

# Prosiding

## SEMINAR NASIONAL ADMINISTRASI PUBLIK 2015

# Peluang & Tantangan

Indonesia Menyongsong  
ASEAN Economic Community  
melalui Inovasi  
Kebijakan & Manajemen Publik

Semarang, 31 Oktober 2015

KERJASAMA ANTARA



PROGRAM STUDI  
DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK  
FISIP - UNIVERSITAS DIPONEGORO



FISIP - UNIVERSITAS MUSAMUS



Prosiding  
Seminar Nasional 2015

Peluang  
Tantangan

Indonesia Menyongsong ASEAN Economic Community  
melalui Inovasi Kebijakan & Manajemen Publik



PROGRAM STUDI  
DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK  
FISIP - UNIVERSITAS DIPONEGORO

FISIP - UNIVERSITAS MUSAMUS

**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015**

**Peluang dan Tantangan Indonesia Menyongsong Asean Economic  
Community ( Masyarakat Ekonomi Asean ) melalui Inovasi Kebijakan dan  
Manajemen Publik**

**Penyusun**

Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP

**Penerbit**

Program Studi Doktor Administrasi Publik  
FISIP Universitas Diponegoro

## **PROSIDING**

**Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Indonesia Menyongsong ASEAN Economic Community ( Masyarakat Ekonomi ASEAN ) melalui Inovasi Kebijakan dan Manajemen Publik**

**Penyusun :**

Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Undip

**ISBN : 9 – 786027 – 364325**

**Editor :**

Dr. Sunarto, M.Si

Drs. AUFARUL MAROM, M.Si

Dr. Fitriani, S.Kom., M.Si

Prof. Dr. Dra. Sri Suwitri, M.Si

Dr. Kismartini, M.Si

**Penyunting :**

Ratno, Galih Wibowo, Edoardus E.Maturbongs

**Desain sampul dan Tata letak**

Galih

Diterbitkan oleh :

Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP

Gd. Program Pascasarjana TTB.B Lt.5

Jl. Imam Bardjo SH No.3-5 Undip Pleburan Semarang Telp/Fax. (024) 8451567

Email : [programdap@yahoo.com](mailto:programdap@yahoo.com), [prodidap@gmail.com](mailto:prodidap@gmail.com)

Bekerja sama dengan :

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus

ISBN 978-602-73643-2-5



Hak cipta dilindungi oleh Undang – Undang  
@2015

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengkaruniakan rakhman dan rakhimNya, sehingga Seminar Nasional Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus Merauke dapat terlaksana dengan baik. Seminar Nasional dengan tema Peluang dan Tantangan Indonesia Menyongsong Asean Economic Community ( Masyarakat Ekonomi Asean ) melalui Inovasi Kebijakan dan Manajemen Publik, yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Universitas Diponegoro ke 58.

Seminar yang bertujuan untuk merumuskan langkah strategis serta memberikan sumbangan pemikiran tentang implementasi kebijakan dan manajemen public kepada pemerintah dan masyarakat, merupakan kontribusi penting hasil – hasil pemikiran para akademisi dan peneliti dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa dalam kompetisi di tingkat ASEAN. Padatlah selanjutnya, hasil – hasil pemikiran ini diharapkan lahir menjadi publikasi ilmiah yang menunjukkan tingkat aktualisasi, para akademisi dan peneliti di bidang kebijakan dan manajemen publik serta benchmarking institusi sebagai indikator kepekaan terhadap permasalahan bangsa.

Pencapaian Universitas Diponegoro sebagai Universitas Riset dengan Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTNBH) berdasarkan Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2014 ( 18 Nopember 2014) dan No 52 Tahun 2015, 22 Juli 2015 memberikan peluang terhadap pengembangan sumber daya, termasuk diantaranya peningkatan keberdayaan sumberdaya manusia dalam forum dan publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat. Hal ini menjadikan seminar dan prosiding yang dihasilkan dari seminar ini mempunyai nilai penting dan strategis, sebagai indikator tingkat dinamika baik bagi staf pengajar maupun insitusi pengayom, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus Merauke, sertapeserta yang berasal dari Universitas, Institusi dan Lembaga yang lain.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, akan selalu melimpahkan ridho dan berkahNya, serta mengantarkan berbagai pemikiran yang dirumuskan dan diimplementasikan dari Seminar ini menjadi bagian dari amalan dan pahala yang mengantarkan hamba – hambanya menjadi insan yang bersyukur,

**Wabillahi Taufik wal Hidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Semarang, November 2015

Tim Penyunting



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	.....	i
KATA PENGANTAR	.....	ii
DAFTAR ISI	.....	iii
KATA PENGANTAR	.....	iv
1 Thailand Strategy Toward ASEAN Communities Contrives (AEC). 2015 <i>Dr. Anurat Anantanatorn, (Burapha University)</i>	.....	1
2 Kesiapan Ketahanan Nasional Menjelang MEA <i>Prof. Dr. Humaidy Joeri, M.Sc, (TIBTA)</i>	.....	13
3 Sumberdaya Manusia Dan Ketahanan Pangan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 <i>Dr. Philipus Betaubun, S.T., M.T, (Rektor Univ. Musamus)</i>	.....	37
4 Universitas Sebagai Wadah Forum Knowledge Sharing Antara Masyarakat, Pemerintah Daerah Dan Stakeholder Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean <i>Dr. Fitriani, S.Kom., M.Si, Rullof Fabian Waas, SH., MH., (FISIP Universitas Musamus)</i>	.....	43
5 Menyongsong MEA Melalui Pengembangan Sumber Daya Aparatur <i>Dr. Kismartini, Msi (Dosen Adm. Publik FISIP Undip)</i>	.....	51
6 Pendidikan Tapal Batas Sebagai Bentuk Pendidikan Layanan Khusus Bagi Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Pulau Sebatik <i>Dr. Hardi Warsono, MTP. (Dosen Adm. Publik FISIP Undip)</i>	.....	63
7 Masyarakat Ekonomi Asean: Perspektif Kebijakan Lingkungan <i>Dr. Hartuti Purnaweni,MPA (Dosen Adm. Publik FISIP Undip)</i>	.....	76

8	<p>Inovasi Kebijakan Pariwisata Kota Semarang Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean Melalui Strategi Promosi “ City Branding “</p> <p><i>Dra. Tri Yuniningsih, M.Si (Dosen Adm. Publik FISIP Undip)</i></p>	86
9	<p>Perencanaan Di Sektor Ketenagakerjaan Yang Berbasis Pengembangan Kompetensi Dalam Menghadapi Persaingan Global</p> <p><i>Titi Djumiarti, S.Sos., M.Si (Dosen Adm. Publik FISIP Undip)</i></p>	98
10	<p>Pembangunan E Gov Sebagai Basis Keunggulan Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) (Studi Pengembangan Egov Kota Semarang)</p> <p><i>Rihandoyo, S.Sos.,MM.,M.Si (Dosen Adm. Publik FISIP Undip)</i></p>	109
11	<p>Pengaruh Karakteristik Bisnis Terhadap Pengelolaan Pengetahuan Pada Ukm Kuliner Di Kota Semarang, Jawa Tengah</p> <p><i>Dr. Hari Susanta Nugraha, S.Sos., M.Si (Dosen Adm. Bisnis FISIP Undip)</i></p>	121
12	<p>Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke</p> <p><i>Karel Betaubun (Universitas Musamus )</i></p>	133
13	<p>Kebijakan Berbasis Kearifan Lokal Guna Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Merauke Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)</p> <p><i>Edoardus E Maturbongs (Universitas Musamus)</i></p>	141
14	<p>Peran Aktor Dalam Memperluas Akses Internet Untuk Mendukung E-Services Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing</p> <p><i>Galih Wibowo(Pemprov. Jawa Tengah)</i></p>	150
15	<p>Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Dalam Perspektif Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa</p> <p><i>Titi Darmi (Universitas Muhammadiyah Bengkulu)</i></p>	169

16	Arah Kebijakan UMKM Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean <i>Yearzy Ferdian (Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik FISIP Undip)</i>	176
17	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Papua Dalam Rangka Menyongsong MEA <i>Leo Antonio (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Musamus)</i>	189
18	Kajian Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Papua Dan Papua New Guinea <i>Yohanis E. Teturan (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Musamus)</i>	202
19	Implementasi Dan Inovasi Kebijakan PDB Samisake Di Kota Bengkulu Dalam Rangka Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean <i>Sri Indarti, S.Sos, M.Si (Universitas Muhammadiyah Bengkulu)</i>	211
20	Peran Strategik Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Membangun Kompetensi Inti Dan Keunggulan Bersaing Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 <i>Willy Abdillah, Iqbal Mujtahid (Universitas Terbuka Bengkulu)</i>	221
21	Analisis Proses Bisnis <i>E-Commerce</i> Di Indonesia Sebagai Persiapan Implementasi MEA <i>Dr. Nufransa Wira Sakti, S.Kom, M.Ec dan Asrul Hidayat, S.E. (Central Transformation Office, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan RI)</i>	232
22	Aspek Komunikasi Kebijakan Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara Pada Pemerintah Daerah <i>Dr. Hadiyati Munawaroh, Akt.,M.Akt (BPK RI)</i>	242
23	Policy Strategy Development Indonesia In Effect Asean Economic Community <i>Dr. Karmanis (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang)</i>	252
24	Jejaring Kebijakan Dalam Pengembangan Kawasan (Studi Di Kabupaten Ponorogo) <i>Ardhana Januar Mahardhani (Universitas Muhammadiyah Ponorogo)</i>	264

25	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik Di Kota Pekalongan <i>Oleh: Syarifah Khasna, Prof. Dr. Dra. Endang Larasati., MS, Dr. Ida Hayu Dwimawanti, MM (Magister Administrasi Publik FISIP Undip)</i>	273
26	Kebijakan Promosi sebagai Langkah Pembangunan Kepariwisataaan “Saung Angklung Udjo “ menghadapi MEA <i>M.E. Tyas Wulan Wahyu D</i>	281
27	Politik Kebijakan Dalam Proses Perumusan Kebijakan Transportasi Darat Di DKI Jakarta <i>Erie Syahril (Mahasiswa Prodi DAP)</i>	297
28	Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN <i>Aji Primanto; Dr. Sundarso, SU; Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.</i>	303
29	Inovasi Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau <i>Mustiqowati Ummul Fithriyyah (UIN SUSKA Riau )</i>	316
30	Pengembangan Kelembagaan Pemerintahan Daerah Pemekaran Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) <i>Khairul (Mahasiswa Doktor Administrasi Publik Undip)</i>	331
31	Kualitas Pelayanan Sistem Informasi Akademik Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) <i>Yindrizal (Mahasiswa Doktor Administrasi Publik Undip)</i>	340
32	Kinerja Perguruan Tinggi Swasta (Pts) Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Dan Globalisasi <i>Yitno Puguh Martomo (Mahasiswa Doktor Administrasi Publik, Undip)</i>	351
33	Kesiapan Daerah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) <i>Muhammad Arif, (Mahasiswa Doktor Administrasi Publik, Undip)</i>	361

34	Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Semarang		
	<i>Katon Alif Utama, Prof. Dr. Dra. Endang Larasati., MS, Dr. Kismartini.M.Si (Magister Administrasi Publik FISIP Undip)</i>	.....	370
35	Kemanfaatan Jejaring Kebijakan Publik Kemacetan Industri Dalam Menghadapi MEA		
	<i>Diana Sukorina (Mahasiswa Doktor Administrasi Publik, Undip)</i>	.....	377







**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL 2015**  
**PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA**  
**MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**  
**( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI**  
**INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**THAILAND STRATEGY TOWARD ASEAN**  
**COMMUNITIES CONTRIVES (AEC).2015**

**Anurat Anantanatorn<sup>1</sup>**

**BACKGROUND**

ASEAN or the Association of Southeast Asian nations was founded in 1967, currently consisting of Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, the Philippines, Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar and Thailand. At the 9th ASEAN Summit in 2003, the ASEAN Leaders conceded that the establishment of the ASEAN Community was a crucial step for closer cooperation among ASEAN members. Four years later, at the 12th ASEAN Summit in January 2007, the leaders signed the Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015. Under the scope of this declaration, the ASEAN Community comprises three pillars, namely the ASEAN Political-Security Community, ASEAN Economic Community (AEC) and ASEAN Socio Cultural Community. The AEC is expected to transform ASEAN into a region with the view of free movement of goods, services, investment, skilled labor, and freer flow of capital (ASEAN 2014). The convergence of ASEAN into a single market presents great opportunities for those who seek a larger market, especially when traditional markets such as Europe and the United States have not shown any vigorous recovery yet. (Nancy Huyen Nguyen.2015)

Thailand is one of the founding members of ASEAN, together with Indonesia, Malaysia, the Philippines and Singapore. Thailand has been a strong advocate for ASEAN's regional economic integration, which has taken shape since the inception of ASEAN Free Trade Agreement in 1992. Thailand proposed

---

<sup>1</sup> Lecture and Director of Doctor and Master degree program (Strategy and Securities) , Faculty of Political Science and Law Burapha University, Thailand

the concept of enhanced ASEAN connectivity in a comprehensive manner, comprising physical, institutional and people-to-people connectivity. In its commitment to AEC. (Nancy Huyen Nguyen.2015)

In 1997, ASEAN leaders declared the ASEAN Vision 2020, which aimed to transform ASEAN into a "stable, prosperous and highly competitive region with equitable economic development, and reduced poverty and socio economic disparities." Building on this vision, at their 2007 Summit ASEAN leaders affirmed their strong commitment to accelerate the establishment of an ASEAN Economic Community (AEC) by 2015.(Nation reporter,2013X)

The AEC aims to make ASEAN a more dynamic and competitive economic block by making it a single market and production base by 2015 governed by the principles of an open, outward-looking, inclusive, and market-driven economy. (Cynthia Pornavalai,2012)

The five core elements of AEC are as followed:

1. Free flow of goods
2. Free flow of services
3. Free flow of investment
4. Freer flow of capital
5. Free flow of skilled labor

#### **Free flow of goods.**

The ASEAN Free Trade Area (AFTA) has already achieved great strides in removing tariffs among ASEAN countries. Under the AEC, tariffs on all intra-ASEAN goods are expected to be completely eliminated in accordance with the schedules and commitments set out in relevant agreements and protocols. In addition to zero tariffs, however, the AEC aims for the removal of non-tariff barriers and increased trade facilitation. The main focus toward 2015 will thus be on the full elimination of non-tariff barriers by enhancing transparency of non-tariff measures and formulating regional rules and regulations consistent with international best practices. With respect to trade facilitation, the AEC aims to simplify, harmonize, and standardize trade and customs processes, procedures, and related information flows by establishing a trade facilitation cooperation mechanism, customs integration and ultimately, create an ASEAN Single

Window (ASW). Setting up an ASW, however, would require all ASEAN members to first make operational their respective National Single Window.

**Free flow of services.**

The AEC envisages the complete removal of restrictions to the provision of services and the establishment of companies across national borders within the ASEAN region by 2015, subject to national regulations. Separate negotiations with respect to specific sectors, such as air transport and financial services, are being undertaken by respective ministerial bodies. ASEAN also aims to establish mutual recognition arrangements for professional services, starting with architectural services, accountancy services, surveying qualifications, medical, and dental practitioners.

**Free flow of investment.**

The AEC is striving to establish a free and open investment regime to enhance ASEAN's competitiveness in attracting foreign direct investment and to promote intra-ASEAN investment. The goals include enhanced investment protection, facilitation, and cooperation, as well as progressive liberalization of member countries' investment regimes.

**Freer flow of capital.**

The AEC aims to strengthen ASEAN capital market development and integration through harmonization of capital market standards in areas such as offering rules for debt securities, disclosure requirements and distribution rules, and cross-border capital raising activities. It also aims to allow greater capital market mobility by ensuring capital account liberalization, albeit within the scope of each member country's national agenda and economic readiness.

**Free flow of skilled labor.**

The AEC is moving toward managed mobility or facilitated movement of natural persons in trade in goods, services, and investments through visa facilitation and issuance of employment passes for ASEAN professionals and skilled labor. It is envisaged that by 2015 there will be a complete free flow of services. To this end, the ASEAN member countries are working toward harmonization and standardization by enhancing increased mobility of students and staff within the region, developing core competencies and qualifications for occupational trainers' skills, and strengthening the research capabilities of each

ASEAN member country in terms of promoting skills and job placements and developing labor market information among the member countries.

## **AEC SCORECARD AND THAILAND**

The AEC Blueprint, adopted in November 2007, outlines the measures to be taken and the schedule of implementation. A scorecard mechanism was developed to monitor the schedule of implementation, and in 2010, the first AEC Scorecard was published, covering the first two-year period (January 2008 to December 2009). The Scorecard noted that the implementation of the regional commitments during the period under review was generally positive, with around 73% of the AEC legal instruments targeted within this period having entered into force. Where does Thailand stand in comparison to its neighbors? Thailand's progress against the first AEC Scorecard is outlined below.

### **Free flow of goods.**

Thailand has already commenced on its National Single Window together with five other ASEAN member countries (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, and Singapore). Thailand also ratified the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) in April 2010, allowing for the agreement to finally enter into force in May 2010. ATIGA has been touted as one of the region's landmark economic agreements to date, and in the words of the ASEAN Secretary-General, Dr. Surin Pitsuwan, "is a major achievement towards the establishment of a single market and production under the ASEAN Economic Community 2015." ATIGA's scope is comprehensive as it focuses not only on tariff liberalization and non-tariff measures, but also on the simplification of the Rules of Origin and their implementation.

### **Free flow of services.**

The ASEAN member countries have so far negotiated eight packages of commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). The AFAS covers the liberalization of : 1) Business services; 2) Professional services 3) Construction 4) Distribution 5) Education 6) Environmental services 7) Healthcare 8) Maritime transport 9)Telecommunications 10)Tourism.

Thailand has entered into the seventh package of the AFAS, pledging commitment to allow for higher foreign equity ownership, but has not ratified the



protocol itself. To date, only Malaysia and Singapore have ratified the protocol to implement this seventh package of commitments.

**Free flow of investment.**

Thailand has not yet ratified the ASEAN Comprehensive Investment Agreement, which currently has already been ratified by eight ASEAN Member States. The only other non-ratifying country is Indonesia.

**Freer flow of capital.**

Most ASEAN countries, including Thailand, no longer have restrictions on inward and outward foreign investments. The ASEAN member countries are, however, still working on monetary and financial integration in the four areas:

1. Capital Market Development,
2. Liberalization of Financial Services,
3. Capital Account Liberalization, and
4. ASEAN Currency Cooperation.

Integration is implemented through several rounds of negotiations, with each round resulting in packages of commitments from each ASEAN Member State in each agreed economic sector/sub-sector and mode of supply. Currently, each member state is at varying stages of preparing and implementing national work programs, including capacity building. With respect to financial services, in 2008 Thailand ratified the Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments on Financial Services under the AFAS. The Protocol to Implement the Fifth Package was signed on May 4, 2011, but has not been ratified by any member state to date.

**Free flow of skilled labor.**

Thailand ratified the ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangement (MRA) in May 2002, which came into effect in December 2002 upon the ratification of Laos, the last member state to do so. To date, seven MRAs have been signed, consisting of medical and dental practitioners, engineering services, nursing services, architectural services, surveying qualifications, and accountancy services. Thailand has not ratified any of these seven MRAs, and with respect to engineering services, it came short of ratification by merely sending a "notification of participation" to the Secretary-General.

## **THAILAND'S LEGAL HURDLES**

Thailand's investment laws have always oscillated between protectionism and liberalization. Recognizing the importance of foreign investment for its economic growth, Thailand has through the years relaxed restrictive investment laws and regulations. At the same time, however, it has stubbornly held on to some antiquated laws restricting foreign participation in industries where Thai nationals are deemed to not yet be competitive. For Thailand to fulfill its commitments to various AEC agreements and protocols, it has to revamp its two major legal stumbling blocks: the Foreign Business Act and the Alien Employment Act.

### **Foreign Business Act.**

The Foreign Business Act (FBA) restricts the participation of aliens in certain business activities. The activities in which alien participation is limited are divided into three groups: List 1 principally contains agricultural and land-dealing activities; List 2 includes businesses related to national safety or security or involving art and culture, tradition, folk handicraft, or natural resources and environment; and List 3 contains most services, including legal and accounting. Foreigners cannot engage in List 1 activities at all, while the activities under List 2 and List 3 may be pursued if the foreigner obtains an alien business license.

The FBA obviously runs counter to the principles espoused by the AEC. The Lists should be narrowed down to allow foreign participation in the various sectors targeted by the AEC. Where a major overhaul of the FBA would cause delays in the implementation of AEC commitments, Thailand could, alternatively, expand the list of projects eligible for investment promotion by the Board of Investment (BOI). The BOI is a government agency empowered to grant a wide range of fiscal and non-fiscal incentives and guarantees to qualified investment projects in an effort to attract foreign investment in the restrictive legal environment of the FBA.

### **Alien Employment Act.**

The Alien Employment Act requires a work permit for all aliens working in Thailand. Under the Act, "work" is defined broadly to include work involving physical strength or knowledge whether or not done for money or other

remuneration. Only a few exceptions are granted such as to members of diplomatic or consular delegations, the United Nations, and other international agencies, as well as pursuant to certain treaties and authorization by the Council of Ministers. More exemptions should be enacted in order for Thailand to be able to commit to the various MRAs which are essential for a truly effective free flow of skilled labor.

### **Moving Forward**

The famous adage, "there is safety in numbers" could not have applied more aptly than in this era of increasing globalization where a country's socioeconomic growth hinges on the strength of its regional ties. Yet, each ASEAN member country still struggles to align its national laws and legislation to implement the AEC agreements and protocols. In Thailand, the lack of understanding of the AEC within the private sector, the civil society, and even the government has contributed to delays in implementing the regional commitments. Any delay in Thailand's ratification of its outstanding agreements and protocols will only create backlogs of unimplemented commitments with the onset of more commitments and measures in accordance with the AEC Blueprint. It is therefore imperative that Thailand's leaders actively promote better understanding of the AEC through regular consultations with the private sector, academia, and the civil society in general.

### **THAILAND STRATEGIES TOWARD AEC 2015**

The Speech of Prime Minister Yingluck Shinawatra in opening the symposium *The nations Time : A new Thai economic in The ASEAN Economic Community* . She said that "We need to prepare ourselves by doing the following": (Thailand Embassy, 2011)

First, the government must strengthen our economy by balancing different investments. This means that while we strengthen our exports, we will also look inward to promote our local economies.

Second, we can increase our competitive edge by focusing on expanding our small and medium enterprises (SMEs). While we attract investors to Thailand, we must also expand investment opportunities for our businesses abroad. The

government, for example, has invited many members of the business sector to travel abroad to realize opportunities for market expansion.

Third, we must ensure that our public policy aligns with private interests as much as possible; we must consult with private companies in all provinces to make sure that this happens according to plan. One way to do this is through workshops like this one where people from all sectors and provinces come to exchange information on the ASEAN Community. That said, we need to hear from you directly—if you have any unique perspectives or information that may be helpful for us as we craft our policies, then please send them our way.

Fourth, we must connect ASEAN together. Now that we have connected the country together, we must connect our country to other nations. You may have heard the word “connectivity” repeated often—what it means is that we will create transportation routes, roads, trains and ferry lines from our country to our ASEAN neighbors. For example, we will develop our economic corridors: one North-South, which leads from China through Thailand; another East-West, from Myanmar through Thailand to Laos to Vietnam; and another from the South of Myanmar through Cambodia, and eventually to India, a huge economic base. My government has prepared a plan to improve nation-to-nation connectivity, and we are ready for the transition.

In Thailand National Economy and Social Plan No.11 conduct Strategy to preparedness to AEC under vision Thailand Vision Toward AEC such as : (Tosssapone Norratus ,2011).

## **THAILAND VISION TOWARD AEC 2015**

“ Thailand is the strong member to support ASEAN people quality of life”.  
The 8 strategies to prepare AEC:

1. Enhance competitiveness of products, services, trades and investment,
  - Establishment of ASEAN investment information center for Thailand investors
  - Promote Business partnership with ASEAN countries.
  - Encourage Thailand entrepreneurs to expand investment in the other ASEAN countries.
  - Promote Contract Farming system to reduce production costs.

- Establishment the organization to support offshore trade and investment
  - Etc.
2. Improve standard of living and expand social security,
- Promoting social protection system , including the establishment of a social alarm monitoring center.
  - Establishment the social alarm monitoring center.
  - Create a network of cooperation to develop health systems at the same standard of ASEAN such as healthcare system, withdrawing and forwarding and so on.
  - Promote program "e Health " and "One stop service "
  - Etc.
3. Develop Infrastructures and logistic system,
- Construction and development mass transportation system .  
For example
    - 4 route for high speed railway , as Bangkok- Chiang Mai (Northern route ) , Bangkok – Padang Besar (southern route ) , Bangkok – Nongkai ( North- Eastern route )
    - Dual line railway in old route
    - High way to border countries for example to Laos , Myanmar, Malaysia
    - Development of Suvarnabhumi International Airport Phase 2
    - Wider and development International sea port.
  - Making agreement on Security of with ASEAN countries and linking ASEAN natural gas pipeline. AEEAN electricity grids.
  - Etc.
4. Develop human resource,
- Development National education curriculum to focus on ASEAN Study for example ASEAN Identities , ASEAN Language? , ASEAN culture .etc.
  - Change the time of education semester to the same time of ASEAN countries.



- Develop and rising skill of English Language to students and Thai people.
  - Cooperation with enterprises to produce and develop the workforce capacity and vocational skills
  - Support researcher to do more research for creating innovative business and service .
  - Etc.
5. Improve/revise law, rules and regulations, For example
- Agricultural Land Act.
  - Business Act.
  - Labor Act.
  - Financial Act.
  - Investment Act.
  - Education Act.
  - Transportation Act.
  - Etc.
6. Raise awareness of ASEAN community, For example
- Training government and private officers in the knowledge of ASEAN countries
  - Exchange government officers with the others ASEAN countries to learn culture and personalities.
  - Development the others ASEAN countries law to the government officers and private entrepreneur.
  - Etc.
7. Strengthen country's security, For example
- Exchange the knowledge and security human resource with the ASEAN countries.
  - Build the network security cooperation between member countries in ASEAN such as combating drug trafficking and money laundering.
  - Strengthen the cooperation between military – civilians to training and operation of disaster management and emergency situations
  - Etc.

8. Increasing city potential linkage within ASEAN. In this area

- Promote Bangkok and Big city as Chiang Mai, Pattaya, Phuket in the campaign of Green Clean Safety and Convenience City.
- Development transportations infrastructure and ICT in all big cities under the campaign of smart city.
- Motivation the skilled people (Generation Y) to create smart business and innovation product.
- Eec.(Tossapone Norratus ,2011).

## CONCLUSION

AEC is the intention of the member of ASEAN counties to build unity and stability of the economy, society and politics of Southeast Asian region. Despite the AEC challenges are the differences contexts of ASEAN members for example difference of scale of populations, scale of areas, scale of nature of resources , scale of economics also difference culture, religion, language, lifestyle, economic structure, prosperity, poverty . These are the things of ASEAN member should take into consideration. In my opinion, every country is well prepared its country towards AEC mainly focus on the economic growth and they are looking for great opportunities to make competitive advantage and gain more national interest from the AEC rather than cooperative with other members for achieving the real target of the AEC. Thus, the cooperation of the AEC should not rely solely on the economic side but it should involve the consideration of sustainable development, environmental protections, reducing pollution and increasing quality of people, in particular disadvantaged and disabled people. The main focal point is “How all of ASEAN countries member is going stronger together” as this is the real target of the AEC.\*\*\*

## REFERENCES

- Cynthia Pornavalai (2012) Thailand: ASEAN Economic Community 2015 and Thailand.  
<http://www.mondaq.com/x/166614/International+Trade/ASEAN+Economic+Community+2015+and+Thailand> search  
27 October 27, 2015
- Nancy Huyen Nguyen (2015) THAI WORKFORCE- READY FOR ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015? . University of the Thai Chamber of Commerce

Tossapone Norratus (2011). Thailand National Strategic Planning for Development Economic and social NO.11 (2012-2016)

Thailand Government Cabinet (2011).The policy speech of government cabinet of Prime Minister Yingluck Shinawatra,(23th August 2011) .[http// www.subcor.com](http://www.subcor.com) search 25 October 2015

The Nation (2013). ASEAN ECONOMIC COMMUNITY IS COMING IN 2015. online reporter. <http://www.thai-aec.com/139> .search 25 October 2015.

Thailand Embassy,(2011) Remarks By Prime Minister Yingluck Shinawatra in opening the symposium The nations Time : A new Thai economic in The ASEAN Economic

[WWW.THAIEMBASSY.SG/ANNOUNCEMENT/](http://WWW.THAIEMBASSY.SG/ANNOUNCEMENT/). Search 20 October 2015



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**KESIAPAN<sup>1</sup> KETAHANAN NASIONAL INDONESIA<sup>2</sup>  
DALAM RANGKA MENYONGSONG MASYARAKAT  
EKONOMI ASEAN (MEA); SUATU TINJAUAN  
KEBIJAKSANAAN PUBLIK.**

(Oleh: Mayjen TNI (Purn) Drs. N.K. Effendi, MBA dan Kolonel (Purn) Prof. Dr.  
Humaidi M.Si)<sup>1</sup>

**A. ANALISA JUDUL SEBAGAI PENDAHULUAN**

Bagian pertama judul saya terima dari Prof. Dr. Humaidi melalui *Black Berry*. Bagian kedua judul saya terima juga dari sumber yang sama yang berasal dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, Dr. Drs. Soenarto M.Si. Demikianlah banyak bahan yang didiskusikan melalui *Black Berry*.

Dari bagian pertama judul dapat disampaikan bahwa Indonesia telah mempunyai 'Ketahanan Nasional' sejak tahun 1973 pada waktu pertama sekali mendayagunakan Garis-Garis Besar Haluan Negara<sup>3</sup> (GBHN) sampai dengan

---

<sup>1</sup> 'Kesiapan' dalam hal ini bukan seperti '*readiness*' dalam satuan militer tetapi berkaitan dengan *Management by Objective* yang berkaitan dengan *National Development Management*. Dalam hal inilah pentingnya makna Tujuan Nasional yang terkandung dalam GBHN 1973-1993. Jadi, masalah pokoknya sejauh mana kita telah mengimplementasikan 'Ketahanan Nasional' tersebut yang kiranya mengandung *Management by Objective* tersebut. 'Kesiapan' dalam hal ini suatu bentuk kesadaran atau 'tahu diri' dalam rangka MEA yang akan datang.

<sup>2</sup> Perwujudannya mempunyai masalah tersendiri.

<sup>3</sup> Sebagai hasil pemikiran Pendiri NKRI yang dimuat dalam UUD 1945 yang asli; selanjutnya disebut UUD 1945/a karena berbeda dengan UUD 1945 sekarang ini yang selanjutnya disebut UUD 1945/c karena UUDS 1945 berikutan Penjelasan UUD 1945 (hasil Dekrit 5 Juli 1957) selanjutnya disebut UUD 1945/b. Salah satu perbedaannya ialah sebelum berlakunya UUD 1945/c ada 'Haluan Negara' ataupun 'Garis-garis Besar Haluan Negara' yang disingkat GBHN.

tahun 1993 yang kemudian dalam bahasa Inggris disebut *National Resilience*<sup>4</sup>. Dalam Bab II GBHN itu disebutkan ‘Ketahanan Nasional’ mulai GBHN 1978 yaitu bersama Wawasan Nusantara yang telah dimuat dalam Bab II GBHN sejak tahun 1973. Wawasan Nusantara yang sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari Ketahanan Nasional. ‘Wawasan Nusantara’ antara lain dapat didayagunakan sebagai ‘wawasan’ dalam membahas ‘Kebijaksanaan Publik’ demikian pula ‘Ketahanan Nasional’ tetapi sebagai pemahaman perseorangan ‘warganegara’ Indonesia tersebut. Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara<sup>5</sup> dan ber-Ketahanan Nasional itu mempunyai pengertian yang agak khas yang bila digambarkan secara skematis global sistemik<sup>6</sup> dalam diam (*in rust*)

Penggambaran itu mulai dirasakan pertama-tama (Bangsa) Indonesia<sup>7</sup> melihat ke luar (*outward looking*) yang sebagian besar sejak awal berasal dari yang disebut ‘geopolitik<sup>8</sup>’ dan ‘geostrategi<sup>9</sup>’ yang merupakan kuliah perdana

<sup>4</sup> Tetapi pembahasan ‘Ketahanan Pangan’ dan ‘Ketahanan Energi’ sampai dengan sekarang berdasarkan nuansa *Food Security* dan *Energy Security*. Beberapa ketahanan lainnya umpamanya yang tersebut dalam Lampiran -1 pada umumnya mengikuti nuansa *Food Security* dan *Energy Security* termasuk nuansa *National Security* secara universal yang umpamanya dapat diangkat dari istilah *National Security Council* dari PBB. Mohon perhatian khusus bahwa subyek ‘Ketahanan Nasional Indonesia yang dimaksud ialah seluruh Bangsa Indonesia tetapi pelaku dalam ‘Kebijaksanaan Publik’ ialah perseorangan ‘warganegara’ Indonesia atau *Indonesian Citizen*.

<sup>5</sup> Bila di dalam GBHN 1973-1993 disebutkan sebagai ‘perwujudan satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Hankam’ (hal ini yang diucapkan Prof. Muladi dalam *Black Berry*) tetapi GBHN 1973-1993 sudah tidak ada. Dalam GBHN 1973-1993 itulah dalam perwujudan ‘satu kesatuan Hankam’ disebutkan ‘bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh Bangsa dan Negara’ dan ‘bahwa tiap-tiap Warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan Negara dan Bangsa’. Makalah ini menganggap ‘perwujudan satu kesatuan itu sebagai embrio yang berkaitan yaitu sebutan untuk menumbuhkembangkan berbagai Sistem xxxxxx Nasional dan kedua secara perlahan dan kelihatannya agak kurang teratur menumbuhkan ‘satu kesatuan’ persepsi setiap Kementerian Negara yang didukung UU tertentu. Kiranya pengertian ‘ancaman’ demikianlah yang melahirkan ‘ancaman militer’ dan ‘nonmiliter’ dalam Pasal 7 UU No: 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sekarang ini. Kementerian Negara yang demikian itulah yang terlibat dalam ‘Kebijaksanaan Publik’. Untuk sementara makalah ini berangkat dari berbagai UU yang berkaitan dengan Sistem Pendidikan Nasional mau tidak mau mengikuti UU No: 20 Tahun 2003 dan UU No: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau nanti dalam kasus Pendidikan Kewarganegaraan berkaitan pula dengan UU No: 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara yang terkandung di dalamnya. Titik temu kedua sistem demikian juga disebut sebagai titik sinergik kedua sistem tersebut. Tetapi dahulu ada yang mengatakan bahwa ‘*no system is also a system*’. Kadang-kadang sistem di Indonesia seperti metoda yang terasa bagi generasi yang seangkatan dengan pendiri NKRI yang berasal dari bahasa Belanda *systeem*.

<sup>6</sup> Adanya hubungan yang serasi antara yang satu dengan yang lain khususnya dalam nuansa Sistem Internasional yang dalam hal ini pada umumnya dalam bidang perdagangan (WTO). Lebih lanjut dalam pandangan Bangsa Indonesia hubungan tersebut berkaitan dengan istilah ‘perdamaian abadi’ yang dimuat dalam bagian alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang bila ‘agak kurang damai’ Indonesia ‘ikut melaksanakan ketertiban dunia’ yang juga dimuat dalam bagian alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Kata ‘Indonesia’ ditekankan dalam hal ini mulai ditekankan sebagai obyek pembahasan sejalan dengan Lampiran .

<sup>7</sup> Seperti seseorang dalam ‘kehidupan bermasyarakat’ (diarahkan ke dalam lingkungan MEA).

<sup>8</sup> Lihat berbagai kepustakaan tentang asal mula dan perkembangan ‘*geopolitics*’ (umpamanya: Earle/1973:69,318,319,388-411,396-411,444) yang sering dikaitkan orang dengan *homo homini lupus*.

almarhum Presiden RI pertama Bung Karno setelah pengresmian Lembaga Pertahanan Nasional<sup>10</sup> (Lemhannas<sup>11</sup>) pada tanggal 20 Mei 1965<sup>12</sup>. Pada waktu itu almarhum Bung Karno belum tersebut berbicara tentang Kebijakan Publik yang berkaitan dengan Administrasi Negara yang juga disebut Administrasi Publik (*Public Administration*)<sup>13</sup>. Mungkin nanti ada penganut kedua ilmu itu yang sebenarnya sama itu agak berbeda pendapat antara yang satu dengan yang lain tetapi tetap demi Indonesia.

Pada periode itu pula almarhum Bung Karno menyebut tentang Trisakti yang selanjutnya disebut Trisakti Bung Karno<sup>14</sup>. Pada periode itu juga Bung Karno menyebut adanya *Nekolim*<sup>15</sup> dan *National and Chracter Building*<sup>16</sup> dan lain-lain umpamanya adanya ‘Ketahanan Revolusi<sup>17</sup>’, ‘Revolusi<sup>18</sup> Belum Selesai’, dan sebagainya. Dalam hati penulis kiranya Administrasi Negara khususnya

---

<sup>9</sup> Sama dengan di atas dan kaitkan dengan ‘Sun Tzu, The Art of War’ (Giles, Lionel/tanpa tahun, Confucius Publishing Co), Hou, dkk/1991, Kheng-Hor/2002).

<sup>10</sup> Nuansa kata ‘tahan’ ialah bila agak kurang tahan supaya diupayakan lebih tahan. Bila dibiarkan dapat pecah atau hancur dan lain-lain tergantung dengan obyeknya.

<sup>11</sup> Selanjutnya disebut Lemhannas I karena Lembaga Pertahanan Nasional (pada awalnya merupakan bagian Dephankam/ABRI) menjadi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas II yang sekarang merupakan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian atau LPNK) (mengandung daya lenting). Jadi, dilihat dari aslinya perlu perhatian khusus tentang Pertahanan Nasional ataupun Pertahanan Negara (UU No: 3 Tahun 2002) sekarang yang kiranya berkaitan dengan Ketahanan sub-gatra Hankam yang seakan-akan istilah singkatan Hankampun dibagi dua secara agregatif (tidak berkaitan) termasuk ABRI pun dibagi secara agregatif atas TNI dan Polri.

<sup>12</sup> Beberapa bulan kemudian terjadi yang disebut Pemberontakan G30S/PKI. Masalah ini dapat dikaitkan dengan beberapa hal menjelang, pada waktu, dan setelah memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober 2015 yang lalu (mengandung Trisakti Tinjauan untuk menghadapi masa depan tertentu termasuk menghadapi MEA).

<sup>13</sup> Malah dahulu penulis pernah membaca suatu dokumen tentang pidato Bung Karno pada tanggal 23 Agustus 1945 yang antara lain tidak akan melaksanakan Administrasi Negara dan Pembelaan Negara’. Siapa yang menemukan saya minta fotokopinya.

<sup>14</sup> Yaitu: 1, Berdaulat di bidang politik; 2, Berdikari di bidang Ekonomi; dan 3, Kepribadian di bidang Kebudayaan.

<sup>15</sup> Dapat dikaitkan dengan globalisasi yang juga termasuk mempengaruhi tumbuhnya MEA. Apapun penafsirannya *Nekolim* menumbuhkembangkan sejenis *Threats* (dapat dikaitkan dengan *SWOT Analysis* yang berkaitan dengan analisis membangun Kemampuan untuk meningkatkan *S* sambil mengileminir *W*).

<sup>16</sup> Nuansanya dalam Bahasa Indonesia kira-kira sejalan dengan pembinaan ataupun pembangunan karakter yang sekarang ini disebut ‘kehidupan berbangsa (ber-*nation* Indonesia di antara bangsa-bangsa daan negara-negara lain di dunia termasuk dalm MEA). Berhubung agak kurang jelas implementasinya naskah ini menafsirkannya seperti terkandung dalam Kewiraan khususnya berdasarkan Wawasan Nusantara yang terpancar dari Gambar -1.

<sup>17</sup> Tidak sempat dibahas yang kira-kira maksudnya tetap konsisten dalam mencapai tujuan Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, dan UUD 1945 yang secara khusus seperti terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

<sup>18</sup> Jadi, berjalan terus termasuk yang sekarang ini disebut Revolusi Mental. Revolusi Mental dan Nawacita sudah dimasukkan dalam PP tentang RPJM 2015-2019 Nasional tetapi kurang memasyarakat karena tidak dalam bentuk UU (lihat Lampiraan -3). Hal ini nanti hendaknya diperhatikan dalam merumuskan konsep RPJP 2025-2050 Nasional yang akan datang karena UU memuat mempunyai potensi sebagai ‘Haluan Negara’ atau ada bentuk yang mungkin nanti dibentuk MPR RI.

Administrasi Publik<sup>19</sup> itu mengandung Trisakti Tinjauan yang berkaitan dengan metoda inkremental<sup>20</sup> yaitu tinjauan (sampai dengan penelitian dan pengkajian) sekarang (masa kini) dan masa yang lalu<sup>21</sup> (dihadapkan pada tuntutan perubahan zaman yang dimuat pada bagian akhir ayat 2 Pasal 1 UU No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) dalam rangka menghadapi masa depan antara lain seperti tertulis pada titik b dasar hukum Menimbang Ketetapan MPR RI No: V/MPR/2000 tentang Pemanjapan<sup>22</sup> Persatuan Dan Kesatuan Nasional<sup>23</sup>.

Beberapa istilah yang mengacaukan dalam UU (Kebijaksanaan Publik) antara lain sebagai berikut:

1. Tata Usaha Negara sama dengan Administrasi Negara (ayat 1 Pasal 1 UU No: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Kewarganegaraan dari Pendidikan Kewarganegaraan bukan UU No: 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Bila ya, maka Pendidikan Kewarganegaraan merupakan *domain* bersama antara dahulu Mendiknas (sekarang Mendikbud bersama Menteri Ristek dan Menteri Dikti) dan Menteri Kum & HAM.
3. Pendidikan Kewarganegaraan dalam UU No: 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara tidak sama Pendidikan Kewarganegaraan dalam UU No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dalam UU No: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Khusus masalah Pendidikan Kewarganegaraan kiranya merupakan *domain* Menteri Ristek dan Dikti dengan memperhatikan kewenangan Mendikbud pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dan 'Bela Negara' yang menjadi kewenangan Menhan.

<sup>19</sup> Mohon perhatian hubungan timbal-balik antara *Public* dan Negara.

<sup>20</sup> Berkaitan dengan ayat 18 surah *A-Hasyr* yang salah satu tafsirnya '..... hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (*akhirat*) .....'. Tafsir ayat berkaitan dengan perencanaan termasuk perencanaan strategik yang terkandung dahulu dalam GBHN. Tafsir demikian juga berkaitan dengan ucapan Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan salah satu ajaran dari Kon Fu Cu yaitu 'barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin ia merupakan orang yang beruntung'. Kutipan dari ayat *Al-Qur'anulkariem* dalam makalah ini didorong nuansa 'kekuatan spiritual keagamaan' yang dimuat dalam rumusan pengertian 'pendidikan' dalam UU No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dimuat ulang dalam UU No: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

<sup>21</sup> Sejalan dengan titik b dasar hukum Menimbang Ketetapan MPR RI No: V/MPR/2000 tentang Pemanjapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional.

<sup>22</sup> Dalam makalah ini sebagai suatu proses yang menuju ke keadaan yang lebih mantap dari suatu waktu ke waktu berikutnya. Jauhkan sikap dan peri laku *cuek*. 'Sikap dan perilaku' ini merupakan awal rumusan pengertian Bela Negara yang sekarang ini ramai diperbincangkan orang.

<sup>23</sup> Pada akhir alinea kedua lampirannya disebutkan 'Tujuan Nasional'. Pembaca dapat membandingkannya dengan Ketetapan MPR RI dan UU yang lain.

4. Berhubung akhir-akhir ini banyak orang membicarakan ‘Bela Negara’ dengan ini berdasarkan ayat 2 Pasal 1 UU No: 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih<sup>24</sup> rumusan ‘Bela Negara’ itu sebagai berikut:

‘Bela Negara adalah sikap dan tingkah laku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945<sup>25</sup> dalam menjamin<sup>26</sup> kelangsungan hidup bangsa dan negara<sup>27</sup>.

‘Sikap dan tingkah laku’<sup>28</sup> yang dimaksud itulah secara umum (baik melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara<sup>29</sup> Tahap Awal maupun PPBN Tahap Lanjutan atau yang terikut dalam Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi berasal dari Pendidikan Kewiraan; Kewiraan juga merupakan ‘sikap dan tingkat laku’ sebagai dasar penelitian dan pengkajian keseluruhan materi GBHN 1973-1993 yang tidak sempat dikembangkan di Perguruan Tinggi pada periode itu atau kiranya mengandung nuansa yang disebut Senikenegaraan (*Statecraft*).

Penulis kurang faham mengapa setelah adanya istilah ‘Bela Negara’ yang berlaku sekarang ini istilah ‘Pendidikan Pendahuluan’ dari PPBN dihilangkan yang kemudian istilah Pendidikan Kewiraan juga hilang. Jadi, Bela Negara itu sepenuhnya yang tumbuh melalui Sistem Pendidikan Nasional mulai periode itu dan yang berjalan dalam Gerakan Pramuka.

5. Samakah ‘Kewarganegaraan’ dari Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul UU No: 12 Tahun 2006 yang disebut ‘Kewarganegaraan’?
6. Penjelasan ‘upaya bela negara’ penjelasan ayat 1 Pasal 9 UU No: 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara berasal dari ayat 3 Pasal 1 dan ayat 1

<sup>24</sup> UU ini masih berlaku tetapi istilah Rakyat Terlatih tidak ada dalam UU No: 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

<sup>25</sup> UUD 1945 ini ialah UUD 1945/b yang dimaksud dalam makalah ini.

<sup>26</sup> Cara berpikir demikianlah yang menumbuhkembangkan adanya ‘Ketahanan’ khususnya ‘Ketahanan Nasional’ yang dimuat dalam GBHN 1973-1993.

<sup>27</sup> Jadi, Bela Negara juga mengandung ‘bela bangsa’. Dalam naskah aslinya dalam ayat 2 Pasal 1 UU No: 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI ditambah beberapa kata yang tidak dikutip dalam makalah ini. Pancasila, UUD 1945, dan NKRI yang dimaksud nanti dapat dikaitkan dengan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksud dalam UU No: 12 Tahun 2006 tentang Pendidikan Tinggi dengan ditambah Bhinneka Tunggal Ika.

<sup>28</sup> Dalam naskah aslinya dalam ayat 2 Pasal 1 UU No: 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI ditambah ‘tindakan’.

<sup>29</sup> Selanjutnya disebut PPBN.



Pasal 19 UU No: 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara yang kata-katanya sama dengan rumusan ‘bela negara’ dalam ayat 2 Pasal 1 UU No: 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Hal ini juga membingungkan.

7. Dan lain-lain umpamanya istilah Polhukam tanpa ‘han’ dan seakan-akan ‘han’ termasuk dalam nuansa istilah singkatan ‘kam’.

Walaupun ada beberapa UU yang telah memuat ‘Ketahanan Nasional’ tetapi ‘pengaturan kesejahteraan dan keamanan<sup>30</sup>’ (Mansyur, dkk/1995:84,116; Mansyur, dkk/2001:106) agak kurang jelas sehingga yang dimaksud dengan ‘kemampuan mengembangkan kekuatan’ yang dimaksud belum terwujud. Demikianlah dalam alinea ketiga bagian Ekonomi Bab II lampiran Ketetapan MPR RI No: X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi<sup>31</sup> Kehidupan Nasional<sup>32</sup> Sebagai Haluan Negara<sup>33</sup> disebutkan sebagai berikut:

‘Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan<sup>34</sup> sejati<sup>35</sup>, mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak kompetitif. Sebagai akibatnya krisis moneter yang melanda Indonesia, tidak dapat diatasi secara baik<sup>36</sup> sehingga memerlukan kerja keras untuk bangkit kembali<sup>37</sup>.

<sup>30</sup> Pengaturan demikian termasuk dalam ‘Kebijakan Publik’.

<sup>31</sup> Yang normal seperti apa?

<sup>32</sup> Sudah biasa disebut berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

<sup>33</sup> Istilah ‘Haluan Negara’ dapat tersendiri di samping adanya GBHN. Walaupun istilah ‘Haluan Negara’ terikut dibuang, tetapi salah satu ukuran mereformasi seharusnya berdasarkan Ketetapan MPR RI minimal melalui penelitian dan pengkajian sebagai pelaksanaan ‘peninjauan’ yang dimuat dalam Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 (sifatnya berdasarkan Konstitusi).

<sup>34</sup> Termasuk semangat ‘kewiraan mikro’ dalam Kewiraswastaan.

<sup>35</sup> Yang bagaimana?

<sup>36</sup> Hal inilah yang berkaitan dengan tulisan pada Lampiran -1. Supaya diperhatikan beberapa kasus kekurangan pangan, kekurangan bahan bakar, dan lain-lain yang tumbuh kemudian.

<sup>37</sup> Dalam lingkungan Operasi Militer inilah yang dinamakan ‘Konsolidasi’ dan setelah itu segera melanjutkan operasi lainnya. Dalam suatu perusahaan besar umpamanya dahulu Garuda Indonesia itulah yang kemudian dalam buku ‘Change!’ disebut ‘Turnaround’ (Kasali/2005:175-213). Ancaman yang dapat menumbuhkan suatu krisis demikian yang berdasarkan ayat 3 Pasal 7 UU No: 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut ‘ancaman nonmiliter’ yang berarti semua yang termasuk dalam nonmiliter hendaknya mampu memikirkan, mempersiapkan (seperti siap dimobilisasi) dan kemudian dengan tidak banyak masalah dapat dikerahkan (dimobilisasi) umpamanya mengatasi kebakaran hutan yang masih berlangsung sampai dengan sekarang ini sehingga organisasi negara tertentu yang lebih siap ikut serta memadamkan kebakaran tersebut dan lain-lain (mengatur dan mempersiapkannya terlebih dahulu baru kemudian siap dikerahkan untuk mengatasi bahaya kebakaran). Semua organisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang tumbuh dari nama lain yaitu Pertahanan Sipil (Hansip) hendaknya bukan hanya siap dengan seragamnya tetapi siap dalam mempersiapkan upaya mengatasinya (mengatur dan melatih anggotanya) walaupun tetap dapat dibantu pihak lain.

Bila kita kembali ke penggambaran awal, mulai terlihat bahwa yang mempengaruhi Indonesia dari luar itulah yang kemudian dalam gambar Pola Pikir<sup>38</sup> di Lemhannas sebagai Lingkungan Strategik<sup>39</sup> yang sekarang ini telah dimuat umpamanya dalam titik e dasar hukum Menimbang UU No: 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan dua kali dimuat dalam Penjelasan Umum UU No: 4 Tahun 2008 tentang Minerba dan Pertambangan Mineral dan lain-lain<sup>40</sup>. Jadi, kiranya beberapa UU<sup>41</sup> yang sejalan perlu<sup>42</sup> juga memperhatikan Lingkungan Strategik tersebut<sup>43</sup>. Kiranya, MEA perlu membahas bersama Lingkungan Strategik MEA yaitu khusus di bidang Ekonomi yang nanti perlu dijabarkan secara berkaitan dengan pandangan setiap anggota ASEAN tersebut. Kiranya ‘Kepentingan Ekonomi’ Indonesia sedikit berbeda<sup>44</sup> antara yang satu dengan anggota MEA yang lain. Dalam hal inilah nanti perlu disepakati bersama (dalam MEA) yang menjadi Kepentingan<sup>45</sup> Bersama MEA dan mana yang menjadi Kepentingan Khas setiap anggota MEA. Menurut ajaran dalam Pendidikan Kewiraan ‘Kepentingan Khas’ itu perlu dijabarkan atas Kepentingan, Tujuan, Kebijakan, dan Strategi. (Mansyur, dkk/1995:191) yang kiranya tetap berlaku dalam MEA. Setelah itulah nanti setiap Negara<sup>46</sup> anggota MEA merumuskan Kepentingan, Tujuan, Kebijakan, dan Strategi masing-masing. Lebih lanjut nanti kiranya masalahnya menjadi perhatian Menlu masing-masing khususnya Menteri Perdagangan (di bawah Menko Perekonomian) dan didukung beberapa Menteri yang berkepentingan umpamanya Menhan tentang aspek Bela Negara (khas yang setingkat Kewiraan<sup>47</sup>) dan Menteri Ristek dan Dikti khususnya dalam rangka menjabarkan dan mengendalikan pelaksanaan Pendidikan

<sup>38</sup> Alangkah baiknya ‘Pola Pikir’ demikian dapat didayagunakan dalam suatu RUU dan demikian pula dalam Kebijakan Publik.

<sup>39</sup> Lingkungan Strategik ini juga merupakan Lingkungan Strategik negara-negara ASEAN dan Lingkungan Strategik setiap Negara anggota ASEAN. Dalam MEA Lingkungan Strategik yang utama tentu di bidang Ekonomi tetapi tak terhindarkan kaitannya dengan bidang-bidang yang lain (semuanya ini berdasarkan ajaran dalam Pendidikan Kewiraan).

<sup>40</sup> Mari kita cek bersama. ‘Lingkungan Strategik’ demikian dapat juga memperhatikan bagian kedua penjelasan ayat 1 Pasal 3 UU No: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain ‘agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan’ (sejalan dengan ajaran pancagatra dari Ketahanan Nasional).

<sup>41</sup> Pembahasan materi RUU itulah yang termasuk dalam Kebijakan Publik yang disebutkan dalam acuan Seminar Nasional ini.

<sup>42</sup> Atau kiranya harus.

<sup>43</sup> Dalam rangka Kebijakan Publik hal ini perlu dibahas agak khusus.

<sup>44</sup> Demikian juga Kepentingan Ekonomi setiap anggota MEA.

<sup>45</sup> Hubungkan dengan empat serangkai dalam makalah ini yaitu Kepentingan, Tujuan, Kebijakan, dan Strategi.

<sup>46</sup> Termasuk Indonesia karena terasa belum agak jelas sehingga agak kurang jelas juga konsepsi pemikirannya.

<sup>47</sup> Sebagai hasil ‘Pendidikan Kewiraan (1974-2001/2002).

Kewarganegaraan yang berkaitan berdasarkan UU No: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Di samping itu bulatan Indonesia di tengah penggambaran diatas juga memperlihatkan implementasi dan pengamalan sila ketiga dari Pancasila yang bulat dan tidak dapat ditawar-tawar lagi<sup>48</sup> dengan memperhatikan peristiwa pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian, sila pertama, kedua, keempat dan kelima dapat memancar ke seluruh dunia<sup>49</sup> tetapi khusus sila kelima selalu diperjuangkan untuk ‘keadilan sosial bagi seluruh Bangsa.

Berhubung sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 wilayah NKRI masih terkotak-kotak<sup>50</sup> berdasarkan *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939*, dicetuskanlah Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957 yang seakan-akan merupakan proklamasi wilayah negara bukan berdasarkan *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939* tersebut. Deklarasi Djoeanda<sup>51</sup> yang akhirnya melahirkan UU No: 17 Tahun 1985 tentang Penetapan *United Nations Convention the Law of the Sea (UNCLOS)* dan UU No: 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara sekarang ini<sup>52</sup>. Jadi, selanjutnya makalah ini berangkat dari Indonesia sekarang ini khususnya dalam rangka menghadapi MEA yang segera akan kita masuki<sup>53</sup>.

Bila kita melihat ke arah penggambaran diatas, itulah yang disebut Lingkungan Strategik Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya. Memandang ke luar itulah

<sup>48</sup> Menurut TNI dan Purnawirawan TNI serta penganut Pancasila merupakan harga mati.

<sup>49</sup> Pancaran tersebut tidak terbatas dan tidak sepenuhnya seperti digambarkan. (Gambar pada Gambar-2 sekedar untuk menggambarkannya saja).

<sup>50</sup> Wawasan Kedalam (*Inward Looking*).

<sup>51</sup> Setiap warganegara Indonesia sebaiknya pernah membaca serangkaian Peraturan Perundang-undangan RI setelah Deklarasi Djoeanda tersebut. Inilah bagian awal kuliah Wawasan Nusantara dahulu dalam Pendidikan Kewiraan yang mulai agak dilupakan orang (sekarang dapat disebut dalam rangka tahu diri). Jadi, Indonesia dalam Gambar -1 tersebut telah berdasarkan *UNCLOS* dan UU No: 43 Tahun 2008 tersebut sekarang ini.

<sup>52</sup> Untuk lebih menumbuhkembangkan ‘rasa kebangsaan dan cinta tanah air’ yang sekarang sebagai bagian kedua kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan UU No: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sesungguhnya cara-cara berpikir dalam UU yang berasal dari Hindia Belanda perlu disesuaikan dengan Wilayah Negara sekarang ini antara lain dengan adanya Menko Kemaritiman sekarang ini. Masalah yang menjadi tugas para Menko perlu dibahas kebulatan keterpaduannya sebagai dasar keterpaduan antar Kementerian yang di bawah Menko. Sedikit perlu disampaikan bagaimana masalah ‘Pertahanan’ dalam kewenangan Menko Polhukam yang secara tertulis tidak ada istilah ‘Pertahanan’-nya? Masalah ‘Pendidikan Kewarganegaraan’ berdasarkan 3 UU (termasuk ‘Bela Negara’ di dalamnya) juga perlu diselesaikan antara Menko Polhukam dan Menko Kesra.

<sup>53</sup> Bagi warganegara Indonesia dapat menghubungkannya dengan bagian alinea Pembukaan UUD 1945 ‘.....mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan ..... dan seterusnya’. Jadi ‘Seminar Nasional’ telah mengantarkan kita ke depan pintu gerbang MEA; kiranya baru akan menyelesaikan beberapa masalah yang akan dibahas yang kiranya perlu berpikir strategik.

yang dinamakan wawasan ke luar atau *outward looking*. Materi Kebijakan Publik dalam hal ini utamanya sekarang inilah materi suatu UU selalu melihat ke dalam atau ke Indonesia yang pada umumnya secara tidak langsung terpancar dari ‘dasar hukum Menimbang’ suatu UU yang kiranya sebagai implementasi tertulis Pancasila sebagai Dasar Negara yang kemudian mempertimbangkan dasar hukum Mengingat UUD 1945.

Berpikir demikian mulai lebih jelas terlihat dalam sistematika GBHN 1973-1993 dengan gambaran yang saling berkaitan. Dengan demikian, Ketahanan Nasional yang diinginkan pada setiap akhir Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yaitu semakin kuat.

Kemudian, secara khusus dalam Seminar Nasional ini disebutkan bahwa ‘Kebijakan Publik’ yang dimaksud semuanya merupakan hasil dari implementasi ‘wawasan ke dalam’ (*inward looking*). Tetapi sayangnya Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional yang dimuat dalam dasar hukum Menimbang UU No: 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI tidak dimuat lagi dalam dasar hukum Menimbang UU No: 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara<sup>54</sup> dan lain-lain. Sebagai contoh lihat dasar hukum Menimbang dan yang berkaitan dari berbagai UU umpamanya UU No: 2 Tahun 1989 dan UU No: 20 Tahun 2003 keduanya tentang Sistem Pendidikan Nasional<sup>55</sup>. Selanjutnya, dalam rangka pembahasan Kebijakan Publik (*Public Policy*) kita tidak dapat mengabaikan semua uraian yang telah disampaikan di atas.

Demikianlah mari kita diskusikan bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi MEA yang sudah diambang pintu tersebut yang benar-benar bila dilihat dari Ketahanan Nasional Indonesia agak kurang jelas setelah GBHN 1973-1993 tidak ada tetapi Lemhannas tetap mengajarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional serta lainnya yang berkaitan dan TNI<sup>56</sup> tetap menganutnya<sup>57</sup>.

---

<sup>54</sup> Dapatkah dikatakan bahwa Pertahanan Negara sekarang ini tidak berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional?

<sup>55</sup> Mohon diperhatikan secara khusus bahwa Sistem Pendidikan Nasional itu tumbuh dari sebelumnya, pada waktu itu hingga sekarang ini (Trisakti Tinjauan). Berpikir demikianlah yang menumbuhkembangkan berbagai Sistem xxxxx Nasional yang perlu diperhatikan agak khusus dalam membahas Kebijakan Publik terutama dalam rangka MEA ‘Sistem Perdagangan Nasional’ masing-masing yang kiranya perlu didukung Sistem xxxxxx Nasional yang lain. Kemudian perlu segera diperhatikan bahwa pada akhir ayat 2 Pasal 1 UU No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tertulis ‘tuntutan perubahan zaman’. Inilah yang perlu diperhatikan secara khusus untuk menghadapi MEA yang sudah diambang pintu.

<sup>56</sup> Ia Tentara Nasional demi Indonesia secara keseluruhan.

Di samping itu kemudian Dewan Hankamnas berubah menjadi dewan Ketahanan Nasional tetapi tidak begitu jelas perannya. Sesungguhnya Dewan Pertahanan Nasional berdasarkan ayat 1 Pasal 19 UU No: 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dapat berperan mewujudkannya tetapi sudah lebih dari satu decade ini belum terbentuk. Kemudian dalam buku 'Studi Strategi; Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional' ada rumusan  $K=(W+P+N+E+M) \times (t+c+s)$  yang K adalah Ketahanan Nasional (Joesoef/2014:20). Bagaimana pula implementasinya terhadap MEA?

Berhubung kami berbicara ini di dalam lingkungan Universitas Diponegoro, makalah ini membawa kita semua benar-benar tahu diri<sup>58</sup> dari diri kita dan lingkungan kita masing-masing dalam arti yang lebih luas ke kawasan MEA terutama nanti dalam istilah 'kehidupan bermasyarakat' termasuk dalam lingkungan MEA, hubungan antar peserta seminar ini, tahu diri sebagai Bangsa Indonesia berdasarkan Gambar -1 dan -2, dan mulai tahu diri dalam 'kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara' masing-masing<sup>59</sup> akan memasuki pintu gerbang MEA dengan suatu persepsi tentang apa yang telah kita siapkan masing-masing. Yang belum siap itulah yang perlu lebih disiapkan.

Khusus bagi warganegara Indonesia sebaiknya introspeksi umpamanya memahami kembali apa yang diharapkan terbentuk setelah memberikan ataupun menerima kuliah Pendidikan Kewiraan dahulu dengan persepsi sampai seberapa jauh 'Kewiraan' (*Wiraship*) telah terbentuk khususnya nanti dalam kerangka pembahasan Kebijakan Publik<sup>60</sup> khususnya dalam rangka memasuki pintu gerbang MEA terutama setelah 'Pendidikan Kewiraan' itu tidak ada lagi mulai sekitar tahun 2001/2002. Berdasarkan penjelasan UU No: 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disampaikan sebagai berikut:

'Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan<sup>61</sup> dan kemampuan<sup>62</sup> dasar berkenaan dengan hubungan

<sup>57</sup> Jadi, penulis tidak membahas hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional kecuali bila ditanyakan karena kedua ajaran itu merupakan dua ajaran utama dahulu dalam Pendidikan Kewiraan.

<sup>58</sup> Termasuk tahu perjuangan Pangeran Diponegoro karena penulis pernah menjadi Perwira Pertama Yon Zipur 4 Kodam IV/Diponegoro (1961-1966).

<sup>59</sup> Dalam MEA.

<sup>60</sup> Idealismenya sejak dahulu walaupun pada periode itu hanya sebagai kuliah pendorong dan pelengkap terhadap keseluruhan kuliah dengan misi untuk membangun yang sekarang sudah sering disebut 'kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara'.

<sup>61</sup> Sebagian dari padanya merupakan hasil penelitian dan pengkajian dari masa yang lalu.

<sup>62</sup> Mulai dapat dikaitkan dengan 'kemampuan' kita memasuki pintu gerbang MEA.

antara warga negara<sup>63</sup> dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara<sup>64</sup> agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh negara dan bangsa. Pada jenjang pendidikan tinggi pendidikan pendahuluan bela negara<sup>65</sup> diselenggarakan antara lain melalui pendidikan kewiraan<sup>66</sup>.

Pendidikan Kewarganegaraan di ataslah yang berlanjut dalam Sistem Pendidikan Nasional<sup>67</sup> hingga sekarang ini seperti disebutkan dalam penjelasan ayat 3c Pasal 35 UU No: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu antara lain sebagai berikut:

‘Yang dimaksud dengan mata kuliah kewarganegaraan<sup>68</sup> adalah pendidikan yang mencakup Pancasila<sup>69</sup>, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika<sup>70</sup> untuk

<sup>63</sup> Makalah ini menggunakan istilah ‘warganegara’. Apakah bedanya?

<sup>64</sup> Kemudian disingkat PPBN yang berdasarkan UU No: 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI dibagi atas PPBN Tahap Awal (umpamanya seperti dalam Gerakan Pramuka) dan PPBN Tahap Lanjutan atau Pendidikan Kewiraan yang sudah ada sejak sekitar tahun 1974 disebut PPBN Tahap Lanjutan (Bahar, dkk/1989).

<sup>65</sup> Khusus tentang ‘Bela Negara’ yang masih berlaku sekarang hendaknya memperhatikan bahwa setiap tanggal 19 Desember telah menjadi Hari Bela Negara berdasarkan Keppres RI No: 28 Tahun 2006. Pada tanggal 12 Oktober 2015 penulis dari Gerakan Bela Negara ikut serta membahas RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dan lain-lain (termasuk tersinggung sedikit tentang Bela Negara) yang ternyata juga menghadapi berbagai masalah (dalam hal ini dianggap sebagai implementasi Ketahanan Nasional subgatra Pertahanan Negara dari gatra Hankam). Pada sekitar pukul 20.00 tanggal 12 dan 13 Oktober 2015 melalui Kompas TV terjadi dialog yang berkaitan dengan Bela Negara tersebut (kelihatannya sudah ke arah kantradiksi tertentu). Apakah Kemhan mempunyai rencana mendayagunakan Hari Bela Negara pada tanggal 19 Desember yang akan datang untuk membulatkan pengertian Bela Negara?

<sup>66</sup> Jadi, ‘Kewiraan’ merupakan ‘Bela Negara’ juga yaitu ‘Bela Negara’ Tahap Lanjutan.

<sup>67</sup> Sistem Pendidikan Nasionalnya sama tetapi nomor UU-nya yang berbeda yaitu No: 20 Tahun 2003.

<sup>68</sup> Bukan UU No: 12 Tahun 2006 yang judulnya ‘Kewarganegaraan’.

<sup>69</sup> Di samping dalam rangka Pendidikan Kewarganegaraan dalam huruf b ayat 3 Pasal 35 UU No: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diadakan kembali Pendidikan Pancasila setelah tidak ada dalam UU No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selama lebih dari sepuluh tahun). Berpikir terpotong demikian terasa tidak berpikir Sistem xxxxx Nasional’ atau nuansa ‘perwujudan satu kesatuan yang dimuat dalam Wawasan Nusantara dalam Bab II GBHN 1973-1993. Di dalam penjelasan huruf b ayat 3 Pasal 35 itu disebutkan ‘Yang dimaksud dengan ‘mata kuliah Pancasila’ adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada Mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia’. Selanjutnya supaya melihat penjelasan Ketetapan MPR RI No: XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Ketetapan MPR RI No: II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Dan Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara’ (penjelasannya dapatnya dibaca sendiri-sendiri atau nanti dapat ditanyakan). Masalah ini sebaiknya dibahas dalam rangka Pendidikan Pancasila sebelum Pendidikan Kewarganegaraan keduanya berdasarkan UU No: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

<sup>70</sup> Keempat yang ditinggalkan ini sungguh sangat menarik karena dalam Pasal 2 UU No: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi itu disebutkan sebagai ‘dasar’ Pendidikan Tinggi. Bagaimanakah pelaksanaannya? Sambil menunggu petunjuk pelaksanaannya masalahnya sedikit dikaitkan dengan makalah ini terutama dilihat dari Pendidikan Kewarganegaraan.

membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air<sup>71</sup>.

Sungguh cukup menarik karena bagian pertama kutipan itulah yang pada awalnya disebut Empat Pilar<sup>72</sup> yang menumbuhkan polemik yang oleh Pengurus Pusat Nahdathul Ulama disebut PBNU seperti tersebut dalam Lampiran -5 yang sesungguhnya telah diaplikasikan hampir sempurna pada beberapa UU (berkaitan dengan Kebijakan Publik) antara lain dalam UU No: 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau dalam keseluruhan Sistem Pendidikan Nasional dari dahulu hingga sekarang ini<sup>73</sup>.

Dengan prinsip Trisakti Tinjauan terhadap Trisakti Bung Karno<sup>74</sup> dalam arti dari dahulu hingga sekarang dan seterusnya pada masa mendatang yang bila perlu dapat dikaitkan dengan Revolusi Mental<sup>75</sup> dan Nawacita<sup>76</sup> sekarang ini (sebaiknya dalam 'satu garis lurus waktu atau masa' sesuai dengan hakikat *ashr* dalam *Al-Qur'anulkariem*).

Walaupun secara pribadi penulis menyayangkan Amandemen UUD 1945 tanpa pengkajian yang berdasarkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang terkandung dalam Kewiraan, dalam makalah ini penulis pertama-tama<sup>77</sup> mendayagunakan istilah 'kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara'<sup>78</sup>,

<sup>71</sup> Khusus bagian terakhirnya memperhatikan bahwa untuk membentuk ikatan kebangsaan dapat umpamanya dalam hal ini meneliti dan mengkaji kembali materi UU tertentu sebagai obyek Kebijakan Publik berdasarkan 'tuntutan perubahan zaman' yang disebutkan pada bagian akhir ayat 1 Pasal 1 dan beberapa penjelasan umpamanya pada alinea terakhir ayat 1 Pasal 35 dan lain-lain dari UU No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Prayitno, dkk/2010:1,2).

<sup>72</sup> Yang dipelopori Sekretariat Jenderal MPR RI mungkin karena MPR RI kelebihan anggaran dan tidak dapat berbuat yang berkaitan dengan 'Haluan Negara' karena sudah kehilangan kewenangan mengeluarkan Ketetapan MPR RI dan istilah 'Haluan Negara'-pun sudah hilang dari UUD 1945. Atau Sekretariat Jenderal MPR RI menganggap mereka ingin menjadi Pusat Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang ada.

<sup>73</sup> Untuk sementara pembahasan tentang masalahnya dibatasi hingga sekian kecuali bila ada yang mempertanyakannya.

<sup>74</sup> Karena penulis setelah menjadi Purnawirawan menjadi Dosen Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Kewarganegaraan khususnya dahulu dalam lingkungan Yayasan Trisakti yaitu di Universitas Trisakti dan STMT-Trisakti.

<sup>75</sup> Dalam makalah ini kembali ke 'Kewiraan' khususnya dalam menghadapi MEA yang akan datang.

<sup>76</sup> Yang dibayangkan telah dimasukkan ke dalam Politik Pembangunan Nasional yang berjalan yaitu perpaduan materi UU No: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan materi RPJP 2005-2025 Nasional.

<sup>77</sup> Jadi, dapat saja nanti berikutnya umpamanya melaksanakan 'peninjauan' yang tersebut dalam Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945/c umpamanya terhadap lampiran Ketetapan MPR RI No: X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Masih adakah 'Haluan Negara' sekarang ini?

<sup>78/78</sup> Sesungguhnya telah dimuat dalam Penjelasan Umum UU No: 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lihat hal 5 UU No: 2 Tahun 1989 terbitan Depdikbud) dan juga telah dimuat pada bagian kedua judul buku 'Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan

yang dimuat pada bagian akhir ayat 1 Pasal 28J UUD 1945 dengan visi dibagi dua secara berkaitan yaitu ke dalam (internal Indonesia yang terpancar dari Gambar -1) dan keluar (yaitu internal anggota MEA ke dalam khususnya dalam kehidupan bermasyarakat lebih khusus di semua daerah perbatasan yang pada umumnya berbudaya yang agak sama). Khusus yang dalam tanda ‘(...)’ berlaku pepatah ‘lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belangnya’, ‘di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung<sup>79</sup>’, ‘tak kenal maka tak sayang’, dan ‘masuk kandang kambing mengembek masuk kandang kerbau menguak’ (Tim Kadeham/2000:2).

## **B. PERCOBAAN METODA KOMUNIKASI ‘BELA NEGARA’ DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA’**

Metoda ini tercetus<sup>80</sup> dalam lingkungan inti Pengurus Pusat Gerakan Bela Negara pada tanggal 12 Oktober 2015 di ruang<sup>81</sup> Kementerian Pertahanan pada waktu pembahasan RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional<sup>82</sup> untuk

---

Bernegara’ (Moediono, dkk/1993); jadi sebelum UUD 1945 diamandemen. Kemudian istilah itu dimuat pada bagian akhir ayat 1 Pasal 28J UUD 1945/c sekarang ini.

<sup>79</sup> Bagi Bangsa Indonesia ialah Pancasila yang bersama UUD 1945 dalam Pola Pikir di Lemhannas RI sebagai Masukan Instrumen (*Instrumental Inputs*).

<sup>80</sup> Cukup terasa adanya ‘miskomunikasi’, kurang baiknya materi suatu UU, dan kurang nyambungannya antara penalaran lama dengan yang baru dalam suatu perubahan khususnya berlakunya UUD 1945/c. Perlu segera disampaikan bahwa istilah ‘pembelaan negara’ telah direformasi ‘hengkang’ dari Pasal 30 UUD 1945/a dan tidak ada dalam Pasal 30 UUD 1945/c. Mungkin banyak yang tidak menyadari (mungkin karena adanya gerakan diam-diam) istilah ‘pembelaan negara’ pindah secara Konstitusional ke Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk dari UUD 1945/c dan didukung Ketetapan MPR RI No: XVII/MPR/1998 dan UU No: 39 Tahun 1999 keduanya tentang Hak Asasi Manusia. Kemdagri yang mengurus ‘Kependudukan’ kiranya perlu turun tangan mengurus ‘Bela Negara’ tersebut. Jangan-jangan ada bekas anggota MPR RI yang mengamandemen UUD 1945/a tidak tahu tentang hal ini, kecuali bila mereka sudah *cuek* pula. Bila beliau tahu mari kita ajak berdiskusi secara jernih dalam makalah ini berdasarkan ‘Bela Negara’ (tidak ditinggalkan) yang hurup ‘(e)’-nya diucapkan seperti ucapan hurup ‘(e)’ dalam ucapan kata bekas, lekas, deras, beras, dedak, dan sebagainya tersebut.

<sup>81</sup> Terasa adanya perbedaan pengertian dan persepsi dan cukup terasa agak kurang konsisten mengikuti UU yang ada.

<sup>82</sup> Penulis menanggapi karena tidak tertulis dalam UU No: 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kalau

ada yang ngomong tentang UU Bela Negara juga tidak ada UU tentang Bela Negara itu. Kelihatannya dalam lingkungan Kementerian Pertahanan seakan-akan ada RUU tentang Bela Negara tetapi tidak dimuat dalam UU No: 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Materi catatan kaki ini mari melalui Universitas Diponegoro nanti akan lebih dijelaskan karena ‘publik’ yang dimaksud dalam makalah ini juga merupakan warga Kodam IV/Diponegoro.



kepentingan<sup>83</sup> Pertahanan Negara dan suasana setelah mendengar dialog seperti ke arah berdebat tentang ‘Wajib Bela Negara’ pada sekitar jam 20.00 tanggal 12 dan 13 Oktober melalui Kompas TV. Istilah ‘Bela Negara’ tidak ditebalkan dengan maksud ucapan ‘(e)’ tidak seperti ucapan ‘Bela Negara’ yang terdengar sehari-hari sekarang ini yaitu seperti ucapan ‘(e)’ dalam kata benar, bekas, lekas, lelah, deras, dan sebagainya yang mengandung makna ‘asuh, mengasuh (*take care of, nurse, teach, supervise, guide, train*) (Hairul dan Khan/1977:41), ‘melindungi’ (*give help, defend, protect*) (Hairul dan Khan/1977:629), memelihara (*care for, nurse, keep safe, protect from danger*) (Hairul dan Khan/1977:794), menjaga (*watch, take care of, care for, nurse*) (Hairul dan Khan/1977:372) sehari-hari agar tetap hidup dengan baik<sup>84</sup>. Bagi orang tua umpamanya dalam ‘membela’ anaknya sejak bayi tetapi melalui makalah ini diharapkan agar anak itu bila telah dewasa dan berumah tangga dan kita mulai uzur mereka diharapkan dapat ‘membela’ kita. Di samping itu kata ‘bela’ juga berlaku di ruang pengadilan tetapi bukan ‘membela’ dengan menggunakan senjata api. Dalam lingkungan masyarakat ada nuansa ‘pembela’ sebagai ‘pendukung’ yang biasanya melakukan dukungannya melalui ‘demostrasi’ yang kelihatannya selalu agak mengganggu kepentingan publik. Pengertian seperti TNI membela Tanah Air sengaja belum dibahas kecuali nanti umpamanya bila diminta termasuk bila diminta Kodam IV/Diponegoro tetapi sebaiknya setelah dicerna terlebih dahulu oleh para ahli bahasa Indonesia di Universitas Diponegoro<sup>85</sup>. Sesungguhnya bahwa ada hubungan ‘Bela Negara’ dengan Kewiraan sebagai idealisme hasil Pendidikan Kewiraan (1974-2001/2002) tetapi tetap berangkat dari nuansa ‘Bela Negara’ ke arah berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional yang dimuat dalam Bab V GBHN 1973-1993<sup>86</sup>. Materi Politik dan Strategi Hankamnas dan Sishankamrata dalam Pendidikan Kewiraan dahulu (1974-2001/2002) hanya sebagai pengetahuan dan bukan untuk berperang). Khusus awalan ‘ber’ dalam istilah ‘kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara’ tidak hanya berarti memiliki (Fromm/1987 dan Hassan/1989) tetapi sudah berarti ‘berada’ atau *be* atau *being in* khususnya sudah

<sup>83</sup> Istilah ini berkaitan dengan istilah Kepentingan Nasional baik dalam penjelasan UU No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun dalam UU No: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang lebih lanjut berkaitan dengan stratifikasi berpikir Kepentingan, Tujuan, Kebijakan, dan Strategi (Mansyur/1995:191).

<sup>84</sup> Justru nuansa demikian yang hendaknya dapat dimasyarakatkan termasuk melalui Universitas Diponegoro.

<sup>85</sup> Pemahaman masalah ini karena terpengaruh pepatah ‘lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya’.

<sup>86</sup> Masalah ‘Bela Negara’ juga dapat dibahas berdasarkan beberapa prinsip dalam ajaran Kewiraan yang masih ada yang diharapkan dapat terikut dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan yang akan datang.

ke arah *being in a system*<sup>87</sup>. Jadi, sudah sewajarnya kita mulai mengenal ‘berpikir sistemik’ terutama setelah Pendidikan Kewiraan tidak ada (mulai 2001/2002) seperti berpikir Paradigma Nasional (Mansyur, dkk/2001:91; IDKI/2008:121) khususnya Pola Pikir seperti di Lemhannas RI.

### C. KEWIRAAN (*WIRASHIP* ataupun *VIRA*<sup>88</sup>*SHIP*)

Pendidikan Kewiraan merupakan salah satu bentuk pengganti Program Wajib Latih Mahasiswa (Walawa)<sup>89</sup> yang namanya seperti kuliah Kewiraan dalam kurikulum Akademi Ilmu Politik pada tahun 1946 sebelum berdirinya Universitas Gadjah Mada (UGM). Setelah berdirinya UGM pada tahun 1947, kuliah Kewiraan dimasukkan ke dalam kurikulum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM dan Akademi Ilmu Politik dibubarkan. Oleh almarhum Prof. Dr. Hardjono kuliah Kewiraan disebut juga ‘Senikenegaraan’<sup>90</sup> (*Statecraft*). Berhubung ada nuansa yang sejalan dapatlah dikatakan bahwa materi Kewiraan itu maksudnya akan diangkat dari materi GBHN yang berjalan dan yang sebelumnya yang utamanya ialah Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, dan ‘Politik dan Strategi Nasional’ dengan tambahan khusus ‘Politik dan Strategi Hankamnas’ dan ‘Sishankamrata’<sup>91</sup>.

Di samping rumusan ‘Politik Nasional’ dan Strategi Nasional’ yang dimuat dalam buku ‘Kewiraan Untuk Mahasiswa’ (Mansyur/1995:129,131) tidak ada rumusan menyeluruh dari ‘Politik dan Strategi Nasional’<sup>92</sup> sebagai mata ajaran ketiga dari Pendidikan Kewiraan tersebut tetapi produk atau obyeknya berkaitan dengan materi yang dalam UUD 1945/a dan UUD 1945/b disebut

<sup>87</sup> Lihat di bawah judul Lampiran -6 (tidak membahas materinya kecuali bila ditanyakan).

<sup>88</sup> Seperti nuansa ‘*vira*’ dalam bahasa Sanskerta yaitu perpaduan antara ‘*verray parfit gentil knight*’ dalam bahasa Perancis dan ‘*Great Hero*’ ataupun ‘*Conqueror*’ dalam bahasa Inggris (Schulberg/1968:55).

<sup>89</sup> Sebagai pelaksanaan Pendidikan Pendahuluan Pertahanan Rakyat (PPPR atau P3R) berdasarkan UU No: 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara. UU ini berdasarkan UUDS 1950.

<sup>90</sup> ‘Seni Kenegaraan’ inilah dahulu berdasarkan semua Ketetapan MPR RI dalam arti luas termasuk tentang GBHN 1973-1993 yang kiranya layak sebagai obyek ‘peninjauan’ secara Konstitusional berdasarkan Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945/c.

<sup>91</sup> Sishankamrata ini tetap dimuat dalam Bab XII Pertahanan Dan Keamanan Negara UUD 1945 tetapi di dalam Bab XII itu tidak ada istilah ‘pembelaan negara’ serta yang baru disebut dalam UU No: 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu Sistem Pertahanan Semesta. Bagaimana sisanya?

<sup>92</sup> Dalam bahasa Inggris sejalan dengan yang disebut *National Policy and Strategy*. Khusus istilah *National Policy* kiranya berkaitan dengan sebutan ‘Kebijaksanaan Publik’ yang dalam bahasa Inggris disebut *National Policy and Strategy*.

‘Haluan Negara’, ‘Garis-garis Besar Haluan Negara’ dan ‘Haluan Negara Dalam Garis-Garis Besar’<sup>93</sup>.

Kemudian, di dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud No: 38/KEP/Dikti/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian<sup>94</sup> Di Perguruan Tinggi disebutkan sebagai berikut:

‘Politik dan Strategi Nasional sebagai Politik Nasional<sup>95</sup> dan Strategi Nasional<sup>96</sup> untuk mengantisipasi<sup>97</sup> perkembangan globalisasi kehidupan<sup>98</sup> dan perdagangan bebas’.

‘Politik Nasional<sup>99</sup> sebagai hakikat materiil politik negara<sup>100</sup>,

‘Strategi Nasional sebagai hakikat seni<sup>101</sup> dan ilmu<sup>102</sup> Politik Pembangunan Nasional<sup>103</sup>,

Kemudian, ajaran ‘Politik dan Strategi Nasional’ ini tidak dimuat dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti No: 43/KEP/Dikti/2006 tentang judul yang sama dengan Kep.38 (Keputusan ini selanjutnya disebut Kep.43) dan setelah itu hampir semua buku tentang Pendidikan Kewarganegaraan tidak memuat ajaran ‘Politik dan Strategi Nasional’ tersebut kecuali buku ‘Pendidikan Kewarganegaraan’ (IDKI/2008) dan ‘Membangun Kesadaran Bela Negara’ (Rangkuti/2007).

Jadi, bila yang dibina dan dikembangkan di Lemhannas RI tersebut diteliti dan dikaji berdasarkan tolok ukur ilmiah<sup>104</sup> maka hasilnya itulah yang termasuk

<sup>93</sup> Masalah ini dapat ditinjau berdasarkan Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945/c.

<sup>94</sup> Disingkat MPK.

<sup>95</sup> Sejalan dengan *National Policy*.

<sup>96</sup> Sejalan dengan *National Strategy*.

<sup>97</sup> Berangkat dari ‘sekarang’ dari Gambar -2.

<sup>98</sup> Inilah yang dalam ajaran Ketahanan Nasional disebut pancagatra atau sejalan dengan yang disebutkan dalam bagian kedua penjelasan ayat 1 Pasal 3 UU No: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain: agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hokum, pertahanan, dan keamanan’.

<sup>99</sup> Pengertian ‘Politik Nasional’ demikian berbeda dengan pengertian ‘Politik Nasional’ dalam buku ‘Konsensus Politik Nasional Orde Baru’ (Silalahi/1990).

<sup>100</sup> Hal ini berkaitan dengan Kebijakan Publik yang berbeda tetapi berkaitan antara pada waktu adanya Ketetapan MPR RI dan sekarang ini tidak adanya Ketetapan MPR RI. Ketetapan MPR RI itulah dahulu disebut sebagai ‘Politik Negara’ (*State Policy*).

<sup>101</sup> Inilah yang dinamakan *art*.

<sup>102</sup> Inilah yang dinamakan *science*.

<sup>103</sup> Jadi, untuk menemukan Ilmu Pembangunan Nasional tersebut dapat melalui penelitian dan pengkajian materi semua Ketetapan MPRS dan MPR RI yang pernah ada yang dapat didayagunakan sebagai Ilmu Politik Pembangunan Nasional mulai sekarang dan seterusnya.

<sup>104</sup> Umpamanya berdasarkan Pasal 3 UU No: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan berdasarkan Etika Keilmuan yang dimuat dalam Ketetapan MPR I No: VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

dalam Senikenegaraan (*Statecraft*) tersebut<sup>105</sup>. Sejak itulah seakan-akan diharapkan melalui Pendidikan Kewiraan akan tumbuh embrio Kewiryaan sebagai *Statercraft* yang dimaksud.

Kata ‘wira’ kiranya tumbuh dari kata ‘vira’ dalam bahasa Sansekerta (*Sanskrit*) yang pada umumnya kemudian diucapkan sebagai ‘wira’<sup>106</sup>, ataupun dalam bahasa daerah dan lain-lain dituliskan *whira*, *wiry*, *wiria*, *wiro*, *wiry*, *wheerye*<sup>107</sup>, dan lain-lain. Sekarang ini salah satu majalah Kementerian Pertahanan bernama ‘WIRA’. Bila kata ‘wira’ diberi awalan ‘ke’ dan akhiran ‘an’ maka nuansanya sebagai suatu kepribadian dan kemampuan pada umumnya. Demikianlah umpamanya tumbuh istilah Kewiraswastaan dan Kewirausahaan (keduanya sebagai terjemahan *Entrepreneurship*<sup>108</sup>). Tetapi, sekarang ini kita tidak lagi mempunyai Pendidikan Kewiraan itu tetapi entah di mana dapat dianggap ada dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan yang akan datang berdasarkan UU No: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Salah satu yang mungkin dapat didayagunakan ialah istilah ‘memajukan diri’ (yang ditebalkan dapat disebut (JURI) dan ‘mengembangkan diri’ (yang ditebalkan dapat disingkat (BANGRI) yang tersebut dalam Pasal 28C UUD 1945 sekarang ini yang dintegrasikan selanjutnya disebut JUBANGRI<sup>109</sup>. Seakan-akan makalah ini tergugah untuk mencari titik tolak untuk menumbuhkembangkan Kewiraan (seakan-akan

<sup>105</sup> Yang secara umum umpamanya melakukan ‘peninjauan’ tertentu yang terkandung dalam Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 sekarang ini.

<sup>106</sup> Di Malaysia, Singapura, and Bruneidarussalam cukup banyak yang mengenal istilah ‘wira’. Berdasarkan Tolok Ukur ‘Nilai-Nilai Kemadirian Terpilih (NKT) dan Paradigma ‘Melayu Cemerlang’ dalam buku ‘Takkan Melayu Hilang Di Dunia’ pada halaman 122 terdapat ‘wira-wira’ seperti terlihat dalam Lampiran -7. Mereka juga faham ‘perwira’ yang merupakan perpaduan kata ‘wira’ dan kata ‘pra’ ataupun ‘pro’ yang maksudnya berpikir ke depan yang berasal dari kata *prowiro* dalam bahasa daerah Jawa dan *propatria* dalam bahasa Latin yang secara universal kemudian menjadi *patriot*. Mereka juga mengenal ‘kewiraan’.

<sup>107</sup> Terdengar dalam bahasa Myanmar dan Thailand yang mungkin artinya ‘kerja keras’.

<sup>108</sup> Perbedaan antara ‘Kewiraswastaan’ dan ‘Kewirausahaan’ tergantung pada pengertian ‘swasta’ yang dalam hal ini ditekankan pada lapisan bawah suatu masyarakat.

<sup>109</sup> Perpaduan JURI dan BANGRI. Nuansa demikianlah yang terkandung dalam ‘kewiraan mikro’ dalam istilah Kewiraswastaan dan kemudian juga terkandung dalam istilah Kewirausahaan (keduanya sebagai terjemahan *Entrepreneurship*). JUBANGRI dapat digambarkan pada suatu grafik pada umumnya. Garis ‘horizontal’ pada grafik itulah yang berkaitan dengan ucapan Nabi Muhammad SAW yang sejalan dengan ajaran Kon Fu Chu beberapa ratus tahun sebelumnya yang berbunyi ‘Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin merupakan orang yang merugi’ (rugi waktu yaitu tidak mendayagunakan nikmat yang diberikan Allah SWT). Orang demikianlah yang dalam grafik terlihat datar saja mengikuti waktu yang berjalan (termasuk bila tidur saja ataupun bermalas-malasan). Yang baik ialah dapat mendayagunakan ayat 11 surah *Ar-Ra’d* yang salah satu tafsirnya ‘Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (penulis: dapat secara perseorangan) sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (penulis: lebih berkembang). Hal ini disampaikan dengan mendayagunakan istilah ‘kekuatan spiritual keagamaan’ yang dimuat dalam rumusan pendidikan dalam UU No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dimuat ulang dalam UU No: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kewiraan mikro) dalam ajaran Kewiraswastaan dan Kewirausahaan (keduanya sebagai terjemahan *Entrepreneurship*<sup>110</sup>).

Dalam Seminar Nasional ini disampaikan nuansa *Civitas International* (Prayitno, dkk/2010:2) ataupun *Civic International* (Kaelan and Zubaidi/2008:1,2) dengan harapan ada butir-butir yang dapat diangkat dalam nuansa masing-masing dari istilah ‘kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara’ dari nuansa masing-masing dalam MEA. Bila masalah ‘kehidupan berbangsa dan bernegara’ sepenuhnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan masing-masing dalam negeri MEA, tetapi dalam ‘kehidupan bermasyarakat’ kiranya dapat berkaitan dengan istilah ‘Masyarakat’ dari MEA khususnya pada semua daerah perbatasan masing-masing.

Demikianlah umpamanya setiap Kementerian Negara selalu melihat Indonesia di antara bangsa-bangsa lain dalam merumuskan ‘Politik dan Strategi Nasional<sup>111</sup>’, dalam bidang masing-masing demikian pula sekarang ini tetapi ditambah melihat MEA di antara bangsa-bangsa dan negara-negara lain (termasuk kerjasama regional yang lain).

Naskah ini tetap memperhatikan idealisme Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam GBHN 1973-1993 yang disesuaikan dengan Politik Pembangunan Nasional<sup>112</sup> yang berjalan sekarang ini umpamanya tetap memantapkan Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional (UU No: 20 Tahun 2003) khususnya berdasarkan UU No: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sebagai contoh umpamanya lihat bagian akhir penjelasan ayat 1 Pasal 35 UU No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu ‘Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan lokal<sup>113</sup>, kepentingan nasional<sup>114</sup>, keadilan, dan kompetisi antar bangsa dalam peradaban dunia<sup>115</sup>’.

<sup>110</sup> Para ahli *Entrepreneurship* dipersilakan untuk memberikan pendapatnya.

<sup>111</sup> *National Policy and Strategy*.

<sup>112</sup> Sebagai perpaduan materi UU No: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan materi UU No: 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025 Nasional yang telah berjalan lebih dari separuhnya. Jadi, alangkah baiknya mulai dari sekarang dilakukan Telaahan Strategik (*Strategic Studies*) dalam rangka lebih memantapkan persiapan untuk mengimplementasikan MEA pada tahun-tahun mendatang dan demikianlah seterusnya.

<sup>113</sup> Dapat diaplikasikan pada setiap anggota MEA.

Jika kita teruskan ajaran kedua dari Kewiraan setelah dalam Bab II GBHN 1973-1993 yaitu Ketahanan Nasional (*National Resilience*) yang berdasarkan nama Lemhannas pertama sekali yaitu ‘Pertahanan Nasional’ (*National Defence*). Keduanya sama-sama memuat kata ‘tahan’ yang dalam bahasa Inggris berarti *lasting, not easily spoilt, enduring, tolerant, stout-hearted, able to bear something, withstand, resist, able to hold out against, etc* (Hairul dan Khan/1977:1091). Di samping Lemhannas<sup>116</sup> tetap ada dan ajaran ‘Ketahanan Nasional’ sampai dengan sekarang tetap diajarkan dan ada dalam beberapa UU dan dokumen tetap masih mengandung ‘Ketahanan Nasional’ dan sekarang menumbuhkembangkan berbagai ‘ketahanan xxxxxx’ umpamanya ‘ketahanan perkankan’ pada Lampiran -1. Bahkan dalam bidang agama juga mulai terdengar ‘ketahanan keimanan’, ‘ketahanan ketaqwaan’, ‘ketahanan kekhusukkan’, dan lain-lain. Mari kita mulai mengembangkan nuansa ‘ketahanan’ demikian dalam MEA khususnya dalam nuansa ‘kehidupan bermasyarakat’.

Setelah ‘Ketahanan Nasional’ sebagai ajaran kedua Kewiraan ialah ‘Politik Nasional<sup>117</sup>’ dan ‘Strategi Nasional<sup>118</sup>’ yang diintegrasikan menjadi ‘Politik dan Strategi Nasional’ (*National Policy and Strategy*). Untuk lebih memahami maknanya melalui berbagai diskusi dengan ini diperkenalkan kutipan berikut:

*‘National Policy is a broad course of action or statements of guidance<sup>119</sup> adopted by the government at the national level<sup>120</sup> in pursuit of national objectives<sup>121</sup>’*  
(Army Regulation/1972:345).

<sup>114</sup> Yang terpenting dalam ajaran Kewiraan bahwa seakan-akan setiap sektor ada hubungan yang berkaitan antara ‘Kepentingan’, ‘Tujuan’, ‘Kebijaksanaan’, dan ‘Strategi’ (antara lain Mansyur, dkk/1995:191) untuk mencapainya termasuk nanti semua masalah dalam MEA.

<sup>115</sup> Kita tidak dapat menyetopnya. Itulah sebabnya di Kelas Internasional Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti diadakan motto ‘*Go Global Win The Competition*’ yang telah dimulai dari sekarang dari Kelas Internasional yang pada periode itu ada mahasiswa dari Yaman, Korea, dan Malaysia. Demikianlah jiwa dan semangat motto tersebut dapat di mulai dari setiap mahasiswa dalam MEA. Kebetulan ‘Visi’ Fakultas Ekonomi itu antara lain tertulis ‘selangkah maju’; jadi tentu juga untuk berkembang’.

<sup>116</sup> Malah sampai dengan sekarang ada Dewan Ketahanan Nasional yang berasal dari Dewan Hankamnas. Bagaimana bentuk Dewan Pertahanan Nasional berdasarkan ayat 1 Pasal 15 UU No: 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara?

<sup>117</sup> Hampir sama dengan ‘*National Policy*’.

<sup>118</sup> Sama dengan catatan kaki di atas tetapi dengan ‘*National Strategy*’.

<sup>119</sup> Bandingkan dengan bentuk GBHN 1973-1993.

<sup>120</sup> Inilah Ketetapan MPR RI tentang GBHN 1973-1993 yang lalu.

<sup>121</sup> Kira-kira inilah awal ide adanya beberapa pemikiran dalam GBHN 1973-1993. ‘*National Objectives*’ inilah yang dalam GBHN 1973-1993 disebut Tujuan Nasional yang digambarkan pada ujung garis dari Pola Pikir di Lemhannas RI. Istilah Tujuan Nasional dapat dikaitkan dengan materi beberapa Ketetapan MPR RI, UU, dan berbagai kepustakaan.

*‘National Strategy is the art and science<sup>122</sup> of developing and using<sup>123</sup> the political, economic and psychological<sup>124</sup> powers of a nation, together with its armed forces, during peace and war to secure national objectives<sup>125</sup> (Army Regulation/1972:346; Bhatia/1982:203).*

Jadi, dalam MEA yang akan datang tetap memperhatikan ‘untuk meningkatkan keunggulan lokal<sup>126</sup>, kepentingan nasional<sup>127</sup>, keadilan dan kompetisi antar bangsa dalam peradaban dunia’ tersebut.

#### **D. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UU NO: 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI.**

Setahu penulis sampai dengan sekarang penulis belum tahu petunjuk pelaksanaannya. Mungkin Rektor Universitas Diponegoro sudah memahami UU ini khususnya Pasal 2, 3, dan penjelasan ayat 3c Pasal 35 UU tersebut khususnya tentang materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Seperti sedikit telah disinggung sebelumnya makalah ini ingin tetap meneruskan beberapa ajaran dari Pendidikan Kewiraan dahulu khusus untuk menjamin adanya kesinambungan beberapa ajaran dalam Pendidikan Kewiraan khususnya dalam menghadapi MEA yang akan datang.

Secara singkat nantinya penulis mengusulkan agar dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang akan datang dapatnya mengikuti beberapa prinsip dari Pola Pikir di Lemhannas RI dalam mengevaluasi materi UU tertentu (sebagai obyek Kebijakan Publik) per-Fakultas dan Sekolah Tinggi. Masalah ini cukup menarik umpamanya beberapa UU yang telah berdasarkan Wawasan Nusantara

<sup>122</sup> *Science* dapat tumbuh dari Penelitian dan Pengembangan (Litbang) ataupun *Research & Development (R&D)* termasuk penelitian materi Kebijakan Publik yang lalu untuk dikembangkan sesuai dengan ‘tuntutan perubahan zaman’ yang dimuat pada bagian akhir ayat 2 Pasal 1 UU No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>123</sup> Perhatikan istilah ‘*developing and using*’ yang dalam hal ini umpamanya ‘bela diri’ baru ‘bela diri’ (*Self Defence*).

<sup>124</sup> Ketiga istilah terakhir inilah yang dalam ajaran Ketahanan Nasional disebut ‘astagatra’.

<sup>125</sup> Sama dengan catatan kaki di atas tetapi sejalan dengan ‘peninjauan’ dalam Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 sekarang ini.

<sup>126</sup> Masing-masing.

<sup>127</sup> Masing-masing.

dan Ketahanan Nasional seperti UU No: 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI di samping ada yang tidak lagi berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional ada pula yang masih berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional secara tertulis. Dengan demikian mahasiswa telah mengikuti implementasi Pancasila, UUD 1945, dan UUD 1945 dan yang keempat menerapkan ayat h Pasal 3 UU No: 12 Tahun 2012 sebagai latihan berdiskusi berbeda pendapat tetapi tetap Tunggal Ika (secara khusus lihat gambaran ‘sila ketiga Pancasila’ dalam Gambar -2).

## E. KESIMPULAN, HIMBAUAN, DAN SARAN SERTA PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Kiranya berdasarkan judul makalah ini ‘Ketahanan Nasional Indonesia’ belum siap khususnya dalam rangka menghadapi MEA yang akan datang. Jadi, mulai dari sekarang mari kita mulai mendudukkan dasar penalarannya dan selanjutnya seperti membuat kesepakatan tentang ‘*MEA Policy and Strategy*<sup>128</sup>’ tertentu yang secara berkala dievaluasi dan dikembangkan untuk terus maju secara bersama di kawasan ASEAN ini.

### 2. Himbauan

Masalah dalam makalah ini dapatnya dibahas secara terbuka, jujur, tulus, dan penuh rasa tanggung jawab sekarang ini dalam kerangka ‘Bela Negara’<sup>129</sup> dalam ‘kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara’ yang mungkin belum banyak dibahas orang. Penulis siap berdialog sesuai dengan kebutuhan Universitas Diponegoro dan perguruan tinggi manapun dan di manapun yang dapat dikaitkan dengan kebutuhan MEA. Untuk itu penulis terbuka menerima ‘tanggapan dan pertanyaan sumbangan bahan secara tertulis’ mulai saat ini ke depan yang dalam hal ini melalui Universitas Diponegoro.

### 3. Saran dan Penutup

Dapatnya Universitas Diponegoro dan Universitas dan Sekolah Tinggi yang lain untuk membahas materi Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan UU No: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang nanti dapat disumbangkan kepada Menteri Ristek dan Dikti RI sedangkan penulis cukup di belakang layar

<sup>128</sup> Khususnya di bidang Ekonomi.

<sup>129</sup> Bukan secara langsung sebagai Bela Negara (mohon perhatian khusus yang dimaksud dalam makalah ini).



tetapi tetap dengan dedikasi penuh rasa tanggung jawab dalam kerangka ‘kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara’ sekarang ini.

Sekianlah makalah ini dengan semua kekurangannya. Atas perhatian peserta seminar dalam menanggapi penyajian dan makalah ini dengan berbagai bentuk khususnya tanggapan tertulis penulis mengucapkan terima kasih.\*\*\*

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU-BUKU

- Bahar, Saafroedin, Drs., dkk, ‘Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Tahap Lanjutan’, Intermedia, 1989.
- Bhatia, H.S., ‘Military Dictionary & Encyclopedia’, Deep & Deep Publications, New Delhi-110027.
- Dunn, William N., ‘Analisa Kebijakan Publik’, Hanindita, 1984.
- Earle, Edward Mead, ‘Makers of Modern Strategy’, Princeton University Press, 1973, Princeton, N.J.
- Fromm, Erich, ‘Memiliki Dan Menjadi’, 1987, LP3ES, Jakarta.
- Giles, Lionel, ‘Sun Tzu The Art of War’, Confucius, tanpa tahun, dan Kota Penerbit.
- Kasali, Rhenald, ‘Change!’, PT Gramedia, 2005, Jakarta.
- Kheng-Hor, Khoo, ‘Applying Sun Tzu’s Art of War in Managing Your Children’, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2002, Jakarta.
- Hou, Wee Chow, dkk, ‘Sun Tzu: War and Management’, Addison-Wesley Publishing Company, 1991, New York.
- Hassan, Fuad, ‘Renungan Budaya’, Balai Pustaka, 1989, Jakarta,
- Headquarters, Department of the Army, ‘Dictionary of United States Army Terms’, AR 310-25, June 1972.
- IDKI, ‘Pendidikan Kewarganegaraan’, Universitas Tama Jagakarsa’, 2008, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan, Drs., MPA, ‘Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara’, Bina Aksara, 1984, Jakarta.
- Joesoef, Daoed, ‘Studi Strategi, Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional’, Kompas Penerbit Buku, 2014.
- Lembaga Administrasi Negara RI, ‘Sistem Administem Administrasi Negara RI, 1988.

- Lindblom, Charles E., dan Syamsudin, Ardian, 'Proses Penetapan Kebijaksanaan', Erlangga, 1986, Jakarta.
- Maaruf, Shaharuddin, Dr., 'Konsep Wira Dalam Masyarakat Melayu', Pustaka Nasional PTE LTD, 1993, Singapura.
- Mansyur, H. Hamdan, Drs., dkk, 'Pendidikan Kewarganegaraan', 2001, PT Gramedia, Jakarta.
- Moerdiono, dkk, 'Pancasila Sebagai Ideologi, Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara', BP-7 PUSAT, Jakarta.
- Murad, Siti Aisah, 'Konsep Wira Dalam Sastra Melayu', Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993, Kuala Lumpur.
- Noor, Ismail, dan Azaham, Muhammad, 'Takkan Melayu Hilang Di Dunia', Pelanduk, Selangor Jaya, 2000, Malays Selangor Jaya, 2000, Malaysia.
- Ohmae, Kenichi, 'The End of the Nation State', The Free Press, New York.
- Rangkuti, Parlindungan, 'Membangun Kesadaran Bela Negara', IPB Press, 2007, Bogor.
- Silalahi, Harry Tjan, 'Konsensus Politik Nasional Orde Baru', Centre for Strategic and International Studies', 1990, Jakarta.
- Suradinata, Ermaya, Dr, MSi, 'Teori Dan Praktek Kebijaksanaan Negara', Ramadan, 1994, Bandung.
- Tim Kadeham, 'Buku Pengantar Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia' (Kadeham)', Universitas Trisakti', 2000.
- Tim IDKI, 'Pendidikan Kewarganegaraan', Universitas Tana Jagakarsa, 2008, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdabdul, Drs, MA., 'ul, Drs, MA., 'Analisis Kebijaksanaan', Bumi Aksara, 1990, Jakarta.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN RI DAN LAIN-LAIN**

Al-Quranulkariem.

UUD 1945/a, UUD 1945/b, UUD 1945/c.

Ketetapan MPR RI No: X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Nasional Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.

Ketetapan MPR RI No: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketetapan MPR RI No: XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No: II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Praseya Pancakarsa) Dan Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

UU No: 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara.

UU No: 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI.

UU No: 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU No: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

UU No: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Surat Edaran Menhankam No: SE/007/M/III/1988 tentang Pokok-Pokok Upaya Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

Departemen Agama RI, 'P-4, Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dan Ajaran Islam.

---

<sup>i</sup> Penulis adalah Purnawiran TNI AD, mantan MPR RI , mantan Dosen Seskoad dan Dosen S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UGM, serta mantan Widyaiswara Lemhannas RI;



**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL 2015**  
**PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA**  
**MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**  
**( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI**  
**INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**SUMBERDAYA MANUSIA DAN KETAHANAN**  
**PANGAN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT**  
**EKONOMI ASEAN**

Dr. Philipus Betaubun ST. MT

**PENDAHULUAN**

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) telah di depan mata. Dalam hitungan hari kita akan memasuki era dalam lingkungan regional yang akan membebaskan aliran barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara.

MEA dilandasi oleh empat pilar yaitu menjadikan ASEAN pasar tunggal dan pusat produksi, menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan upaya integrasi ke ekonomi global. Masing-masing pilar terdapat sasaran yang akan dicapai.

Indikator kesiapan Indonesia menghadapi MEA adalah Global Competitiveness Index. Kondisi daya saing Indonesia dalam laporan Global Competitiveness Index Tahun 2014 dan 2015 untuk melakukan investasi dinilai belum kompetitif. Indonesia berada pada peringkat 5 diantara negara-negara ASEAN, yaitu dibawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand.

Melihat kondisi kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA, maka perlu disusun kebijakan yang baik. Kunci utama untuk dalam menghadapi MEA adalah pada sektor sumber daya manusia. Disamping sumber daya manusia, yang menjadi fokus kajian tulisan ini adalah masalah ketahanan pangan yang tidak terlepas dari faktor jumlah penduduk di Indonesia yang merupakan negara dengan

jumlah penduduk paling besar di ASEAN serta pentingnya ketahanan pangan karena akan berpengaruh pada stabilitas nasional.

### **KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA DAN PAPUA**

Untuk mengetahui kesiapan Indonesia dalam bidang pasar bebas tenaga kerja, marilah kita lihat kesiapan Indonesia dan khususnya Papua. Untuk mengukur kualitas pembangunan sumber daya manusia secara umum, Badan Pusat Statistik mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilihat dari 3 dimensi yaitu dimesi kesehatan, pendidikan dan hidup layak. Bagaimana IPM Indonesia jika dibandingkan dengan negara di ASEAN? IPM Indonesia berada pada peringkat lima setelah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand.

Bagaimana dengan IPM di Papua dan Indonesia? IPM di Papua setiap tahunnya meningkat, namun masih dibawah IPM nasional. IPM Papua selama 12 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Indeks Pembangunan Manusia**  
**Tahun 2004-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Papua</b>	<b>Nasional</b>
2004	60.90	68.70
2005	62.10	69.60
2006	62.75	70.10
2007	63.41	70.59
2008	64.00	71.12
2009	64.53	71.76
2010	64.94	72.27
2011	65.36	72.22
2012	65.86	73.29
2013	66.25	73.81

Sumber: BPS Propinsi Papua

Masyarakat Ekonomi Asean mensyaratkan liberalisasi tenaga kerja professional seperti dokter, insinyur dan akuntan. Bagi Indonesia yang akan gencar membangun infrastruktur dalam 5 -10 tahun ke depan, kebutuhan akan tenaga profesional insinyur akan semakin terasa urgensinya. Di Papua dan Maluku sendiri berdasarkan Laporan MP3EI tahun 2014 pemerintah dalam proses

melaksanakan 38 proyek dengan nilai investasi total Rp. 27.509,9 Milyar. Pertanyaannya adalah apakah sumber daya manusia yang terdidik di Papua, termasuk insinyur, siap melaksanakan pembangunan tersebut. Hingga akhir 2014 Indonesia memiliki 700.000 insinyur dan 9.500 diantaranya telah tersertifikasi. Kebutuhan ini tentunya akan bertambah seiring dengan fokus pembangunan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah. Jangan sampai kebutuhan tenaga profesional seperti insinyur justru dipenuhi oleh negara ASEAN lainnya.

Kesiapan tenaga kerja Indonesia bersaing di ASEAN perlu ditingkatkan. Berdasarkan penelitian International Labour Organization negara yang sumber daya manusia profesional paling siap dalam pasar tenaga kerja MEA adalah Malaysia dan Filipina. Tabel 2 dibawah ini menunjukkan posisi kesiapan *skill labour* negara-negara ASEAN.

**Tabel 2.**  
**Kesiapan Tenaga Kerja Profesional di ASEAN**

Tingkat Kesiapan	Negara
Siap pada berbagai bidang	1. Malaysia, 2. Filipina
Siap pada bidang-bidang tertentu	1. Brunei Darussalam 2. Vietnam 3. Singapura 4. Indonesia 5. Thailand
Perlu dukungan untuk bekerja di bidang-bidang tertentu	1. Kamboja 2. Laos 3. Myanmar

Sumber: *International Labour Organization Research*

## **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA**

Manusia merupakan *catalyst agent* yang akan mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan. Pembangunan manusia tidak akan terlepas dari pendidikan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pengembangan manusia khususnya di Papua adalah:

### 1. Penyaluran tenaga pendidik

Masalah utama yang sering timbul di kampung adalah tidak adanya guru yang mengajar di sekolah. Ketiadaan guru ini mengakibatkan anak-anak

menghabiskan waktu dengan bermain atau ikut orang tuanya berburu. Pemerintah perlu secara tegas mengatur guru yang ditempatkan di kampung-kampung

2. Perluasan akses pendidikan

Akses sekolah untuk anak-anak perlu diperluas. Seringkali alasan anak tidak bisa bersekolah adalah karena letaknya yang jauh dari rumah atau medannya yang sulit. Kondisi ini perlu dipikirkan dengan membuat akses-akses jalan yang lebih mudah dilalui.

Akses pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi juga perlu dioptimalkan, seperti pendirian Musamus di wilayah selatan Papua merupakan salah satu upaya memperluas akses pendidikan tinggi.

3. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan di Balai Latihan Kerja

Tenaga kerja yang memiliki pendidikan rendah perlu ditingkatkan kualitasnya melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan keunggulan di wilayahnya. Wilayah Papua merupakan koridor pengembangan pertanian dan perikanan oleh karena itu sudah seharusnya pelatihan-pelatihan di bidang pengolahan hasil perikanan serta pertanian perlu dilakukan.

4. Menselaraskan kebutuhan pasar tenaga kerja dengan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi

Belajar dari Jepang yang telah mensinergikan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, pemerintah Jepang mendirikan jaringan sekolah kejuruan yang bermitra dengan beberapa perusahaan untuk merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri.

Selain keterampilan dan pengetahuan teknis, pelajar dan mahasiswa perlu memperoleh *life skills* seperti inisiatif bekerja, kemampuan berpikir, perencanaan, kreativitas, bekerja dalam tim serta kemampuan memecahkan masalah.

## **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI BIDANG KETAHANAN PANGAN DALAM RANGKA MENGHADAPI MEA**

Ketahanan pangan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan terutama dalam menghadapi MEA. Salah satu program pemerintah di Papua, khususnya Merauke adalah penancangan Merauke sebagai lumbung

pangan nasional. Pada tahap awal akan dibuka 1,2 hektar dalam kurun waktu 3 tahun. Program Merauke sebagai lumbung padi nasional sebenarnya bukanlah hal baru sejak tahun 2008 telah dipersiapkan dan tahun 2010 program tersebut ditetapkan.

Upaya penancangan program ini adalah sebagai cara mengantisipasi masalah ketahanan pangan di Indonesia. Masalah ketahanan pangan dapat dilihat dari dua sisi yaitu *supply* dan *demand*. Dari sisi *supply*, menurunnya *supply* pangan karena faktor cuaca dan penggunaan bahan pangan sebagai sumber energy (*bioenergy*). Dari sisi *supply* juga terimbas kenaikan harga BBM untuk sarana transportasi bahan pangan yang menyebabkan harga pangan semakin mahal. Dari sisi *demand*, penambahan penduduk meningkatkan permintaan akan bahan pangan.

Di kawasan ASEAN sendiri Indonesia mengimpor dari Thailand dan Vietnam yang notabene negara pengekspor beras terbesar di dunia. Apabila program lumbung pangan nasional di Merauke ini berhasil maka, pangan menjadi salah satu peluang Indonesia dalam MEA.

Ketahanan pangan di Indonesia akan berfokus pada dua dimensi yaitu bagaimana masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau dan bagaimana kesejahteraan petani ditingkatkan.

Kebijakan pemerintah di bidang ketahanan pangan adalah:

1. Peningkatan produktivitas komoditas  
Teknologi pertanian perlu diterapkan dalam meningkatkan produktivitas. Penerapan teknologi pertanian ini tidak terlepas dari diperlukannya SDM yang berkompeten. Teknologi pertanian akan sangat mendukung dalam hal efisiensi untuk menekan biaya produksi, inovasi produk dan
2. Perbaikan konektivitas logistik secara terarah dan berkesinambungan  
Program pengembangan tol laut yang dicanangkan pemerintah adalah program untuk meningkatkan konektivitas. Untuk mendukung program ini perlu didukung oleh SDM yang kompeten di bidang pelayaran. *Linkage* antara lembaga pendidikan dan industri transportasi perlu ditingkatkan.
3. Mendukung investasi pada penyediaan logistik, pergudangan, pengolahan dan distribusi.  
Dengan penyediaan logistik, pengolahan dan distribusi yang memadai maka akan mengurangi ketidakpastian ketersediaan pangan akibat cuaca ataupun peningkatan permintaan di waktu-waktu tertentu. Reformasi iklim investasi melalui kepastian hukum dan perbaikan infrastruktur perlu terus dilakukan



## KESIMPULAN

Daya saing Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 perlu ditingkatkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Indonesia menghadapi MEA ada pada sumber daya manusia yang merupakan modal terbesar Indonesia serta potensi lahan yang luas yang memungkinkan Indonesia mewujudkan ketahanan pangan. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM dan mewujudkan ketahanan pangan diperlukan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta *stakeholder* lainnya seperti lembaga pendidikan dan dunia usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aring, Monika. 2015. ASEAN Economic Community 2015: *Enhancing competitiveness and employability through skill development ILO Asia-Pacific Working Paper Series* <http://papua.bps.go.id/>.
- Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. 2014. Perkembangan Pelaksanaan MP3EI Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku. Disampaikan dalam Raker MP3EI Koridor VI Papua-Maluku tanggal 28-30 Oktober 2014.
- Schwab, Klaus. *The Global Competitiveness Report 2014–2015. World Economic Forum*
- Secretariat ASEAN. 2008. *Economic Community Blueprint*.



**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL 2015**  
**PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA**  
**MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**  
**( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI**  
**INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**PERGURUAN TINGGI SEBAGAI WADAH FORUM**  
**KNOWLEDGE SHARING ANTARA MASYARAKAT,**  
**STAKEHOLDER, SWASTA DAN PEMERINTAH**  
**DAERAH DALAM MENYONGSONG**  
**MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015**

<sup>1</sup> Dr. Fitriani, S.Kom., M.Si

<sup>2</sup> Ruloff Fabian Yohanis Waas, SH., MH.  
Universitas Musamus Merauke

**Abstrak**

*Universitas merupakan sosok wadah besar pendidikan bagi masyarakat, maka dalam rangka mempersiapkan daerah agar tidak terperosok didalam perberlakuan pasar bebas ASEAN yang membutuhkan SDM yang benar-benar berkualitas untuk dipekerjakan. Disinilah fungsi pendidikan sangat dibutuhkan, Universitas memang memiliki tugas untuk memberikan pendidikan yang secara legal diakui setelah peserta didik mendapatkan ijazah. Namun tidak hanya berakhir pada proses tersebut, ada 3 kewajiban yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dipenuhi terdiri dari proses pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Proses pengajaran adalah proses pendidikan yang dilakukan dan dilalui oleh tenaga pendidik serta mahasiswa mulai semester awal hingga wisuda. Penelitian dan pengabdian dilakukan oleh dosen dalam bentuk kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat, dan kegiatan tersebut dilakukan berulang kali setiap tahunnya. Dengan adanya pemberlakuan pasar bebas ASEAN (MEA), maka ini merupakan peluang yang sangat besar untuk Universitas untuk berperan aktif dalam mempersiapkan SDM yang siap di pekerjakan. Salah satu bentuk peran aktif tersebut dalam penelitian dan pengabdian Universitas adalah membentuk Wadah Knowledge Sharing dilakukan antara masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder. Dalam skenarionya akan menggunakan metode partisipatif 3 unsur tersebut yang*

diwadahi oleh pihak Universitas, yang akan melakukan pembekalan pendidikan (level dasar, menengah dan ahli), dan diskusi terbuka dengan para ahli serta pemberian informasi dan motivasi dari sosok yang telah sukses dengan mengimplementasi pendidikan tersebut dengan baik di dunia pekerjaan. Kegiatan ini tidak hanya menunggu permintaan dari masyarakat namun Universitas menjemput kebutuhan tersebut dengan turun langsung ke kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi. Selain itu wadah ini akan menjadi jembatan antara masyarakat sebagai pekerja dengan pemerintah daerah serta stakeholder. Dimana pemerintah daerah sebagai penyedia pekerja, pelayan dan sebagai pembuat kebijakan, masyarakat sebagai pekerja, dan stakeholder sebagai pemberi pekerjaan, akan bersama-sama duduk dalam satu forum yang diskusi sehingga ditemukan antara kesediaan SDM terhadap permintaan pekerja yang dilegalkan dalam peraturan-peraturan daerah, sehingga terbentuk suatu hubungan yang tidak saling merugikan. Universitas akan berperan sebagai moderator dan katalisator diantara 3 unsur tersebut dengan melibatkan para ahli dibidang pendidikan, pemerintahan, ekonomi, bahasa, hukum, tokoh agama serta masyarakat dan pihak swasta. Skenario kegiatan ini akan diadakan rutin setiap 3 atau 6 bulan atau setiap ada permintaan dari masyarakat, pemerintahan daerah atau stakeholder. Pada akhirnya forum knowledge sharing ini akan menyiapkan masyarakat di daerah dalam memasuki serta dalam pelaksanaan pasar bebas ASEAN.

*Keyword : MEA, University, Knowledge Sharing*

## **A. PENDAHULUAN**

Setiap organisasi memiliki peran dan tanggungjawab dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, seperti halnya Perguruan Tinggi yang merupakan salah satu sosok wadah organisasi yang bergerak dibidang pendidikan. Pendidikan adalah merupakan kekuatan yang luar biasa dan memiliki dampak terhadap keseluruhan dari aspek kehidupan, pendidikan juga dapat memberi energi yang memiliki nilai sangat berharga untuk pegangan hidup umat manusia. Penguatan SDM dalam bidang pendidikan merupakan kunci penting untuk menghadapi MEA 2015, revolusi mental yang di canangkan oleh Bapak Presiden Indonesia Joko Widodo adalah sesungguhnya mempersiapkan manusia Indonesia yang berkualitas, berkuantitas, dan berjiwa Pancasila untuk menyongsong MEA 2015, yang sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28C Ayat (1), berbunyi “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat*

*dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.*

Indonesia saat ini dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 juta jiwa akan menjadi pasar dan incaran sembilan negara anggota ASEAN. Indonesia saat ini sudah tidak bisa mengelak lagi dari persaingan MEA yang akan mulai berjalan pada akhir tahun ini, dimana peluang dan persaingan akan benar-benar terbuka, bukan lagi sebatas dunia bisnis, investasi, industri dan ekonomi, melainkan juga di bidang pendidikan, kesenian dan kebudayaan, maka agar tetap eksis dan bertahan di tengah-tengah kehidupan yang kompetitif di era globalisasi, diperlukan SDM dalam jumlah besar yang memiliki keunggulan untuk bersaing, yaitu SDM yang memiliki kemampuan prima dalam menggunakan pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), dan jaringan (networking) namun berjiwa Pancasila. Di sinilah letak permasalahan sekaligus tantangan yang harus dijawab oleh dunia pendidikan di Indonesia.

Perguruan Tinggi adalah sosok wadah besar pendidikan yang juga memiliki harapan dan kewajiban untuk mewujudkan SDM yang prima dan memahami nilai-nilai Pancasila tersebut. Perguruan Tinggi yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia memiliki peluang dan tantangannya masing-masing. Seperti halnya Universitas Musamus yang berada di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, yang berada di tengah-tengah masyarakat papua yang beragam dan unik, serta berbatasan langsung dengan Negara PNG dan Australia. Disini diperlukan keseriusan dan perhatian khusus dalam membentuk integritas karakter dan menciptakan SDM yang prima dan memahami nilai-nilai Pancasila, sehingga revolusi mental yang di dengung-dengungkan akan berhasil di daerah, namun sejalan dengan hal tersebut, maka kesiapan SDM untuk menyongsong MEA 2015 dapat terealisasikan.

Sanada dengan hal tersebut diatas, adanya pemberlakuan pasar bebas ASEAN 2015 maka ini merupakan peluang yang sangat besar untuk berbagai Perguruan Tinggi dapat berperan aktif dalam mempersiapkan SDM di daerahnya yang siap di pekerjaan dan memiliki jiwa Pancasila. Perguruan Tinggi memang memiliki tugas untuk memberikan pendidikan yang secara legal diakui setelah peserta didik memperoleh ijazah. Namun tidak hanya berakhir pada proses tersebut, tetapi ada 3 kewajiban yang paling mendasar yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dipenuhi dan terdiri dari proses pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Proses pengajaran adalah proses pendidikan yang dilakukan dan dilalui oleh tenaga pendidik serta mahasiswa mulai semester awal hingga wisuda. Penelitian dan pengabdian dilakukan oleh tenaga pendidik dalam bentuk kegiatan pengembangan IPTEKS dalam masyarakat, dan kegiatan tersebut dilakukan secara kontinyu setiap tahunnya.

Berbagai bentuk peran aktif tenaga pendidik dalam penelitian dan pengabdian di Perguruan Tingginya masing-masing telah dilakukan, namun dalam menyongsong MEA 2015 ini diharapkan ada bentuk-bentuk baru peran

aktif yang dilakukan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerahnya, relevan dengan keunikan masing-masing karakter daerahnya serta sesuai dengan permintaan pasar kerja. Maka salah satu bentuk konsep yang di kemukakan adalah menjadikan Perguruan Tinggi sebagai wadah knowledge sharing yang dilakukan antara masyarakat dan stakeholder serta pemerintah daerah setempat.

## **B. METODE**

Peran aktif tersebut akan menggunakan metode partisipatif 4 (empat) unsur yaitu : 1. *masyarakat*, 2. *Pihak swasta*, 3. *Stakeholder* dan 4. *pemerintah daerah* yang diwadahi oleh pihak Perguruan Tinggi. Partisipasi yang akan dilakukan berupa pembekalan pendidikan (level dasar, menengah dan ahli), dan diskusi terbuka dengan para ahli serta pemberian informasi dan motivasi dari sosok yang telah sukses dengan mengimplementasi pendidikan tersebut dengan baik di dunia pekerjaan. Kegiatan ini tidak hanya menunggu permintaan dari masyarakat namun, Perguruan Tinggi yang menjemput kebutuhan tersebut dengan turun langsung ke kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi. Selain itu wadah ini akan menjadi jembatan antara masyarakat sebagai pekerja dengan pemerintah daerah serta stakeholder.

## **C. Hasil PEMBAHASAN**

Wadah Perguruan Tinggi ini merupakan salah satu upaya dari Perguruan Tinggi untuk melakukan inovasi/pembaharuan perannya dalam manajemen publik menyongsong MEA 2015, khususnya di daerah-daerah perbatasan Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri dan menjamurnya stakeholder dan pihak swasta yang berinvestasi.

Peran aktif Perguruan Tinggi ini mengapa diprioritaskan kepada masyarakat?, kenapa bukan kepada mahasiswa yang menjadi unsur utama dalam lingkungan Universitas ?

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dengan adanya Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 yang diberikan kepada Provinsi Papua melahirkan berbagai dampak kepada kehidupan masyarakatnya. Salah satunya adalah diberikan keleluasaan terhadap pengaturan tanah hak ulayat, kenyataan yang terjadi di daerah adalah masyarakat yang notabene juga banyak menjadi mahasiswa ikut mengurus permasalahan hak ulayat tersebut, bahkan sebagian besar dijadikan sebagai mata pencahariannya, dengan meminta penggantian hak atas tanah atau hak atas pakai yang telah atau akan digunakan oleh pihak pemerintah dan swasta dengan harga yang sangat tinggi. Sehingga

membentuk sebagian besar mindset masyarakat bahwa ini sebuah pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan demi melanjutkan hidupnya.

Maka dengan dilakukannya Wadah Forum Sharing Knowledge ini, dengan tidak mengenyampingkan kualitas, kuantitas dan kompetensi mahasiswa, serta Tri Dharma Perguruan Tinggi, diharapkan dapat mengubah mindset masyarakat yang juga sebagian besar adalah mahasiswa, menambah pengetahuan, keterampilan, jaringan kerja, karakter hidup berbangsa, dan meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di daerah Papua yang berbatasan langsung dengan Negara lain. Dengan tidak melupakan prinsip pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek, yakni : *Demokrasi, Keadilan, Kemanfaatan, Potensi dan Keanekaragaman daerah*. Penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang *Luas, Nyata dan Bertanggungjawab*.

Forum Knowledge Sharing yang diwadahi oleh pihak Perguruan Tinggi, sebelum dilaksanakan maka perlu pertama-tama dilakukan :

(1) ***Komitmen***

Komitmen pihak Perguruan Tinggi untuk bersedia menjadi wadah dan memberikan pengetahuan, keterampilan dan jaringan serta membentuk pribadi masyarakat yang ber Pancasila. Sekaligus menyiapkan pemateri yang berkompeten, serta membentuk tim dari wadah Perguruan Tinggi.

(2) ***Kerjasama***

Membuat suatu kesepakatan dalam bentuk kerjasama antara Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan Stakeholder serta sektor swasta untuk bersama-sama mendukung kegiatan ini. Selain itu setelah dilakukan survey maka perlu dilakukan juga kerjasama dengan pihak masyarakat.

(3) ***Survey***

Survey yang dilakukan adalah melakukan observasi dan evaluasi terhadap karakteristik daerah dan masyarakat, kebutuhan sektor swasta, dan menginventarisir kebutuhan pengetahuan, keterampilan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sektor swasta.

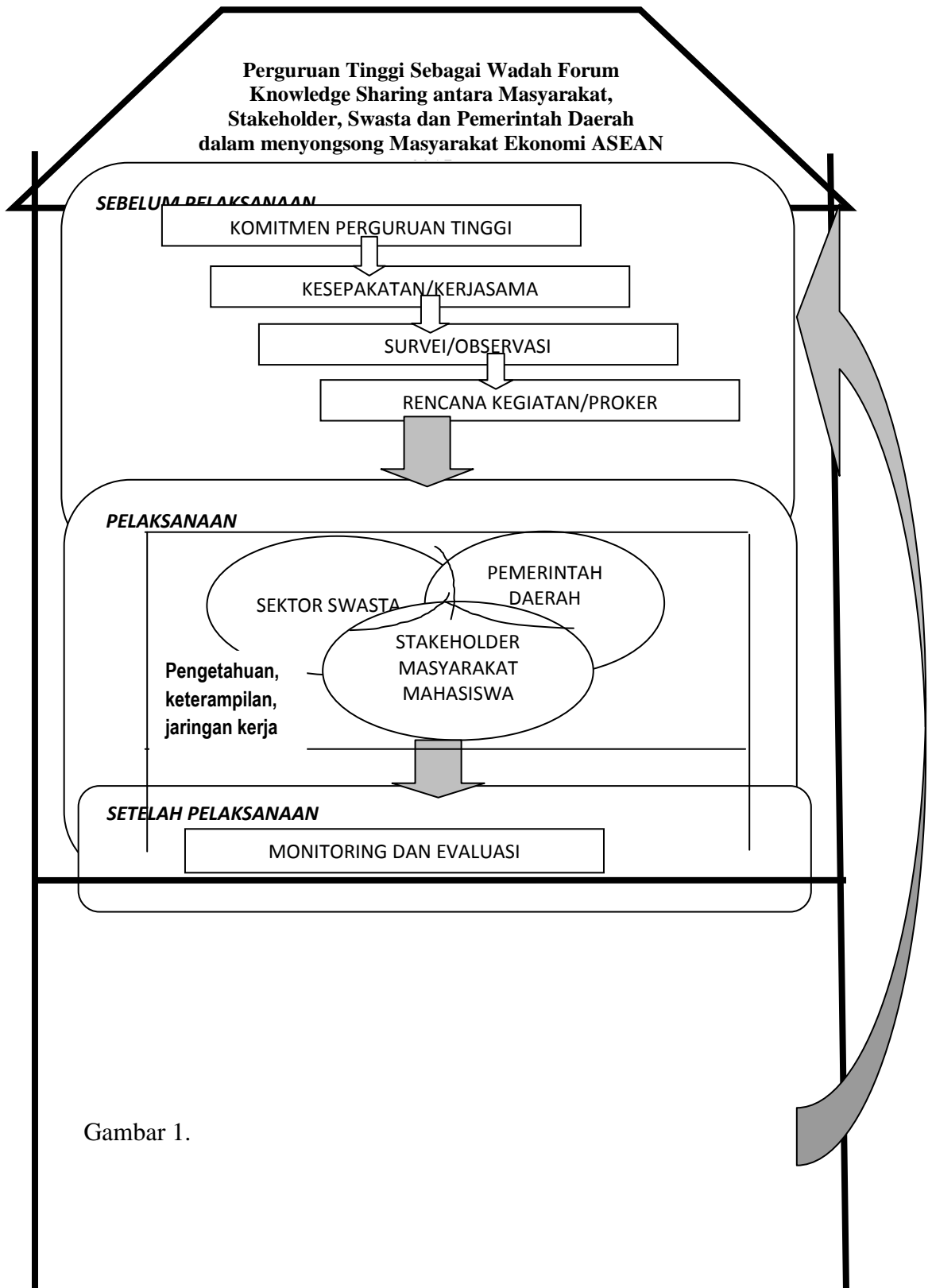
(4) ***Rencana Kegiatan***

Setelah diketahui kebutuhan apa saja yang diperlukan, maka dibuatlah rencana kegiatan oleh 4 pihak yang terlibat tersebut, berupa jumlah peserta, jadwal, materi, pemateri, dan kesediaan pihak swasta untuk memberikan informasi ketersediaan ruang lingkup kerja dan jadwal penerimaannya, sehingga setelah mengikuti kegiatan tersebut maka peserta dapat langsung terfasilitasi untuk masuk dalam lowongan pekerjaan tersebut (semestara ini telah dilaksanakannya penerimaan tenaga kerja melalui *Job Fair* yang diwadahi oleh Universitas). Selain itu di buatkan jadwal berkelanjutan dalam 1 tahun kegiatan yang sama dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan.

Selanjutnya setelah dilakukan point-point tersebut diatas maka Tim Wadah Perguruan Tinggi mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan kegiatan, mulai dari pendaftaran, persiapan tempat sesuai jumlah peserta yang mendaftar, menyiapkan pemateri, sertifikat, menyiapkan administrasi dan segala kelengkapannya yang dibutuhkan dan mendatangkan pihak pemerintah daerah dan pihak swasta. Dan jika dimungkinkan sedapatnya dilakukan program kerja *Job Fair* untuk kepentingan masyarakat umum di daerah, serta setiap tahunnya dilakukan monitoring dan evaluasi atas keseluruhan rangkaian kegiatan yang dilakukan agar dimasa yang akan datang dapat dijadikan sebagai pedoman/landasan dan dapat diperbaiki atas segala kekurangannya yang terjadi sesuai keadaan dan kebutuhan yang diinginkan.

Disini terlihat bahwa Perguruan Tinggi sebagai wadah pendidikan akan melakukan inovasi/pembaharuan dalam memperluas pelayanan bukan hanya kepada mahasiswa tetapi kepada masyarakat, ini berarti terjadi pergeseran focus pelayanan, ada kebijakan institusi yang lebih diperbaharui, ada manajemen public yang akan menjadi lebih baik, karena sesungguhnya Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah adalah pelayan masyarakat jika di lihat dari fungsi publiknya.

Pemerintah Daerah akan menjadi pelayan public dan sebagai pembuat kebijakan, masyarakat sebagai pencari pekerja, stakeholder sebagai penunjang dalam memberikan data pendukung bagi pekerja dan pihak swasta sebagai penyedia lapangan pekerjaan, pada pelaksanaan Forum Wadah Knowledge Sharing ini akan ada satu sesi dimana mereka bersama-sama duduk dalam satu forum untuk dapat menyatukan persepsi sehingga ditemukan antara kesediaan SDM terhadap permintaan pasar kerja yang dilegalkan dalam peraturan-peraturan daerah, sehingga terbentuk suatu hubungan yang tidak saling merugikan. Perguruan Tinggi akan berperan sebagai moderator dan katalisator diantara 4 (empat) unsur tersebut dengan melibatkan para ahli dibidang pendidikan, pemerintahan, ekonomi, bahasa, hukum, tokoh agama serta masyarakat dan pihak swasta. Kegiatan ini diharapkan akan diadakan rutin setiap 3 atau 6 bulan atau setiap ada permintaan dari masyarakat, pemerintahan daerah, stakeholder atau pihak swasta. Pada akhirnya Wadah Forum Knowledge Sharing ini dapat mempersiapkan masyarakat di daerah dalam memasuki pelaksanaan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.



Gambar 1.



## D. KESIMPULAN

Sinergitas antara Perguruan Tinggi sebagai Wadah Forum Knowledge Sharing dengan masyarakat, pemerintah daerah, stakeholder dan pihak swasta diharapkan dapat menciptakan SDM yang memiliki pengembangan IPTEKS, ketrampilan/skill, berjiwa Pancasila dan memperluas jaringan kerja sehingga setidaknya dapat mempersiapkan SDM yang prima berjiwa Pancasila dalam menyongsong pelaksanaan MEA 2015, sekaligus mewujudkan revolusi mental yang sedang gencar dilakukan. Maka Perguruan Tinggi bukan hanya sekedar institusi pendidikan yang melayani mahasiswanya namun mulai melakukan inovasi/pembaharuan manajemen publiknya kearah pelayanan masyarakat umum demi kemaslahatan/kesejahteraan bersama. \*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.2009, “*Menuju ASEAN Economic Community 2015*”, Jakarta.
- KPPN/Bappenas.2012.”*Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013*”.Buku I.
- KPPN/Bappenas.2013.”*Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013*”.Buku II.
- Masnur Tiur Maida Malau, 2014, “*Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional : Masyarakat Ekonomi Asean 2015*”, Jurnal Rechts Vinding Vol. 3 No. 2.
- Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, 2015, “*Kesiapan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Peran Perguruan Tinggi Kita*”.
- Sholeh. 2013. “*Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi AEC (Asean Economic Community) 2015*”. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (2): 509-522.

### Sumber :

- <http://berandapsikologi.blogspot.com/2012/09/simpatidandanempati.html>
- <http://radenpioneer.my.id/blog/2015/04/18/masyarakat-ekonomi-asean-bagaimana-peran-mahasiswa/>
- <http://www.antaraneews.com/berita/436319/kesiapan-koperasi-ukm-indonesia-menatap-era-mea-2015>.
- [http://www.kompasiana.com/arioneuodia/peran-mahasiswa-menghadapi-pasar-bebas-asean\\_54f84a68a333111d5f8b491d](http://www.kompasiana.com/arioneuodia/peran-mahasiswa-menghadapi-pasar-bebas-asean_54f84a68a333111d5f8b491d)
- <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/11/22/322298/banyak-cara-menghadapi-mea>

### Perundang-undangan :

- Undang Undang Dasar Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Daerah Papua
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah/Otonomi Daerah



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**MENYONGSONG MEA MELALUI  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR**

**Oleh : Dr. Kismartini, MSi**

***Abstrak***

*Sumber Daya Aparatur di Indonesia diharapkan sebagai salah satu modal utama dalam mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan menyongsong MEA. Berbagai tantangan dihadapi dalam mewujudkan Sumber Daya Aparatur untuk menunjang Tata Kelola Kelembagaan yang baik, diantaranya adalah dalam mengantisipasi tantangan global berupa kualitas sumber daya manusia yang mengacu pada standar kompetensi internasional (world class). Strategi yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur adalah pendekatan yang holistik melalui strategi Competency-Based HR Management, strategi Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan strategi menggunakan metode Assesment Center.*

**Key Words:** Sumber Daya Aparatur, Pengembangan Kapasitas, Tata Kelola Kelembagaan

**PENDAHULUAN**

Menyongsong era perdagangan bebas antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN Economy Community) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 tentunya dibutuhkan aparatur yang handal serta tanggap. SDM Aparatur sebagai penyelenggara pemerintahan sangat menentukan baik

buruknya birokrasi pemerintahan, yang pada akhirnya menentukan pula kualitas tata kelola pemerintah dalam menyongsong MEA.

Sebagaimana diketahui SDM aparatur yang mewakili birokrasi pemerintah merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan *Good Governance* bersama dengan dua pilar lainnya, yaitu dunia usaha (*corporate governance*) dan masyarakat (*civil society*). Ketiga unsur tersebut diharapkan berjalan selaras dan serasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Aparatur sebagai penyelenggara negara bertanggungjawab untuk merumuskan sekaligus melaksanakan langkah strategis dan upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat. Untuk itu kinerja setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus selalu ditingkatkan dan menjadi fokus perhatian dari pemerintah agar dapat menunjang penguatan *governance* dan kelembagaan dalam meningkatkan daya saing bangsa (Kismartini, 2014).

Kondisi SDM Aparatur Indonesia ternyata jauh dari harapan, kualitas yang buruk khususnya birokrasi yang tidak efisien dan korup menjadi hambatan terbesar untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Kualitas birokrasi yang rendah misalnya diperlihatkan oleh Executive Report Indonesia Governance Index (2012) dalam Indeks Tata Kelola di Indonesia. Dimana angka rata-rata indeks Tata Kelola masih di bawah angka 6, yang dilihat pada aspek government, birokrasi, masyarakat sipil dan *Economic society*, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.

Indeks Tata Kelola di Indonesia Tahun 2012

Arena	Government	Bureaucracy	Civil Society	Economic Society
Participation	5,87	3,96	6,53	6,16
Fairness	3,89	5,91	6,28	5,83
Accountability	5,45	6,17	6,17	6,18
Transparency	4,58	5,04	6,28	5,80
Efficiency	7,51	6,98	6,22	5,54
Effectiveness	5,49	5,38	6,48	4,74
Per Arena	5,28	5,68	6,33	5,72

Sumber: Executive Report Indonesia Governance Index 2012

Terlihat pada tabel di atas bahwa *Government* dan *Bureaucracy* mempunyai indeks tata kelola yang terendah pada hampir semua arena (*participation, fairness, accountability, transparency, efficiency dan effectiveness*). *Government* (Pemerintah) yang dimaksudkan di sini adalah lembaga pembuat kebijakan (*policy-making body*), jika dilihat pada level provinsi menunjuk pada Gubernur dan DPRD Provinsi. Sedangkan *Bureaucracy* (Birokrasi) yang dimaksudkan adalah lembaga pelaksana (*executing body*) dan sekaligus merupakan jembatan antara pemerintah dan publik. jika dilihat pada level provinsi mencakup dinas-dinas dan badan lain setingkat yang berada pada level provinsi, mereka melakukan fungsi pelayanan publik, peningkatan penerimaan keuangan daerah, dan pengaturan ekonomi daerah.

SDM Aparatur yang profesional, aparatur yang mempunyai sikap inovatif dan kompeten, aparatur yang terbuka dan melayani serta aparatur yang bersih dan bebas KKN, diharapkan akan mampu bersaing dalam dunia global, sehingga *World Class Governance* (Tata Kelola Pemerintahan Kelas Dunia) yang menjadi visi dari reformasi birokrasi di Indonesia dapat terwujud.

Berdasar uraian tentang berbagai harapan mengenai SDM Aparatur dalam mewujudkan Tata Kelola dan Kelembagaan dalam menyongsong MEA, maka paper ini bertujuan:

1. Memberikan gambaran tentang tantangan SDM Aparatur dalam mewujudkan Tata kelola yang baik (*Good Governance*) dan Kelembagaan yang bersih (*Clean Government*).
2. Melakukan analisis serta merumuskan strategi dalam mewujudkan SDM Aparatur untuk mewujudkan Tata Kelola dan Kelembagaan dalam menyongsong MEA.

## **PEMBAHASAN**

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat diwujudkan melalui tata kelola SDM Aparatur yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Kondisi birokrasi seperti ini sudah

ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Karena sudah menjadi kebijakan tentunya diperlukan upaya untuk mewujudkannya dalam berbagai bentuk perubahan paradigma yang memberikan kemungkinan ditemukannya terobosan atau pemikiran baru yang mampu menghadapi tantangan pada abad 21. Yakni menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Diantara beberapa kondisi obyektif yang terkait dengan Sumberdaya Aparatur di Indonesia, salah satu isu utama adalah pengembangan kapasitas aparatur. Aparatur adalah unsur utama penggerak organisasi pemerintah, sebaik apapun penataan kewenangan dan kelembagaan, bila tidak didukung aparatur yang baik maka tidak akan terwujud birokrasi ideal yang diharapkan. Problem kepegawaian yang sering ditemukan dalam penyelenggaraan birokrasi adalah seleksi pegawai yang belum terbuka, belum kompetitif dan belum adil. Selanjutnya, pada tahapan pengembangan pegawai masih banyak persoalan, terkait dengan kinerja diklat aparatur yang rendah dan tanpa arah. Fakta lain penghargaan pegawai masih belum sesuai dan selaras dengan kontribusi yang diberikan.

Secara garis besar, kapasitas aparatur di Indonesia saat ini mempunyai beberapa persoalan, diantaranya:

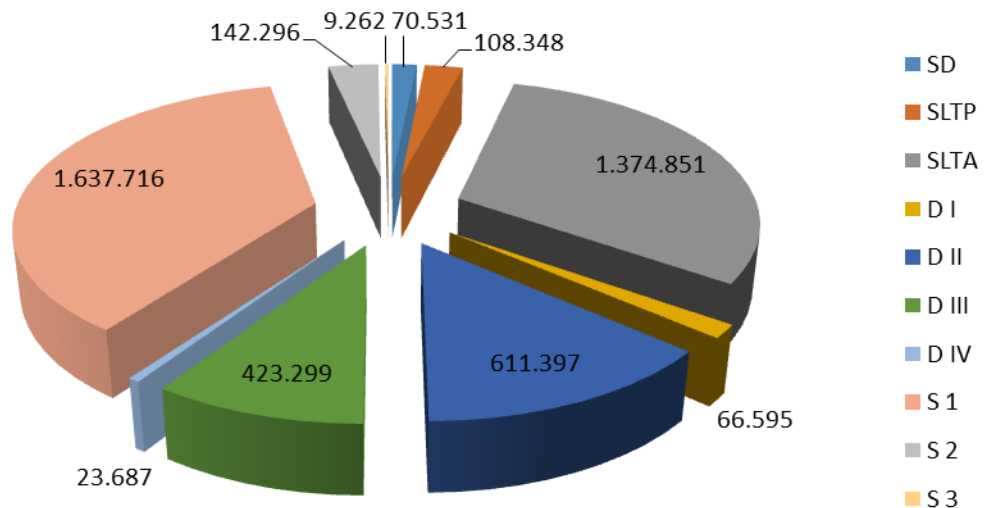
- a) Sistem manajemen kepegawaian berdasarkan merit sistem sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7, 12 dan 17 UU Nomor 43 Tahun 1999 belum dapat diterapkan dengan baik karena belum adanya instrumen pendukung.
- b) Distribusi PNS belum merata secara baik, diindikasikan tidak sesuai dengan beban kerja yang ada.
- c) Komposisi pegawai yang ada belum/tidak mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi karena tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- d) Struktur gaji belum / tidak dapat berfungsi sebagai pemicu peningkatan kinerja karena tidak terkait dengan kinerja, kompetensi dan tanggung jawab.

Gambaran tersebut memberikan indikasi adanya sesuatu yang salah dalam pengelolaan kepegawaian (Aparatur) di Indonesia, yang berdampak kurang berdayagunanya PNS Indonesia. Pengelolaan kepegawaian pada dasarnya bertujuan untuk mengelola atau mengatur sehingga kemampuan pegawai dapat lebih ditingkatkan supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Distribusi jumlah PNS menurut tingkat pendidikan berdasarkan data dari BKN (2013) menunjukkan bahwa sebagian besar PNS berpendidikan Sarjana sebanyak 1.637.716 orang (36,65 %), yang kemudian disusul berpendidikan SLTA sebanyak 1.374.851 orang (30,77 %), selanjutnya berpendidikan D2 sebanyak 611.397 orang (13, 68 %), PNS lulusan SD masih tercatat sebanyak 70.531 orang (1,5%). Secara keseluruhan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.

Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan 2013



Sumber: Profil Statistik PNS BKN,2013

Tugas pokok dan fungsi dari SDM aparatur pada intinya adalah menjadi pelayan masyarakat yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;

menjadi stabilisator yaitu sebagai penyangga persatuan dan kesatuan bangsa; menjadi motivator yaitu memberdayakan masyarakat agar terlibat secara aktif dalam pembangunan; menjadi inovator dan kreatoryaitu menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan masyarakat agar menghasilkan pelayanan yang baru, efektif dan efisien dan menjadi inisiator yaitu selalu bersemangatmengabdikan dengan berorientasi pada fungsi pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat yang dilandasi dengan keikhlasan dan ketulusan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, tentu saja perlu diperhatikan hak dari aparatur itu sendiri, yaitu mendapatkan kehidupan yang sejahtera baik dari aspek material maupun spiritual.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur di Indonesia adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat (*excellent service for people*). Agar tugas pokok dan fungsi serta kewajiban tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Adanya peraturan yang jelas serta didukung dengan sumber daya manusia yang profesional dan handal merupakan faktor pendukung yang tidak boleh ditinggalkan. Sarana dan prasarana yang memadai, lengkap dan canggih akan mempercepat proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, peraturan yang jelas dalam pemberian pelayanan masyarakat akan memberikan pedoman bagi aparatur dalam memberikan pelayanan. Selain itu, masyarakat diberi akses untuk dapat mengontrol dan mengawasi kualitas dan prosedur pelayanan yang diberikan.

Tuntutan tersebut menjadikan kapasitas SDM aparatur perlu mendapat perhatian khusus, dalam hal ini membutuhkan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya. Peningkatan kompetensi SDM aparatur dalam mengemban tugas atau jabatan birokrasi melalui diklat adalah berorientasi pada peningkatan standar kompetensi jabatan sesuai tantangan reformasi dan globalisasi yang tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan *stakeholder*-nya. Kualitas aparatur tidak mungkin meningkat tanpa adanya usaha-usaha yang konkrit untuk meningkatkannya. Oleh karena itu diklat perlu terus ditingkatkan agar SDM aparatur benar-benar memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Kompetensi jabatan SDM aparatur (PNS), secara umum berarti kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya (Mustopadidjaja, 2002).

Disinilah kompetensi menjadi satu karakteristik yang mendasari individu atau seseorang mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik itu muncul dalam bentuk pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku

(*attitude*) untuk menciptakan aparatur yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam melayani masyarakat yang selalu bertindak hemat, efisien, rasional, transparan, dan akuntabel. Jadi, pelayanan publik merupakan pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya dapat menggerakkan roda perekonomian menuju Kesejahteraan. Untuk itu, diperlukan strategi peningkatan kompetensi SDM aparatur, dimana kompetensi yang memadai merupakan sesuatu yang sangat mutlak yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Peningkatan kompetensi SDM aparatur dalam mengemban tugas atau jabatan birokrasi melalui diklat adalah berorientasi pada standar kompetensi jabatan sesuai tantangan reformasi dan globalisasi yang tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan *stakeholder*-nya. Kualitas aparatur tidak mungkin meningkat tanpa adanya usaha-usaha yang konkrit untuk meningkatkannya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja SDM Aparatur diperlukan adanya suatu pemahaman yang jelas mengenai apa yang diharapkan oleh organisasi atau institusi dan apa yang diharapkan dari pegawai. Pegawai dapat bekerja secara maksimal apabila mengetahui arah dan tujuan organisasi dan apa peranan yang dimainkannya dalam pencapaian tujuan tersebut. Peran dan tanggungjawab yang diberikan oleh organisasi harus sesuai dengan kompetensi pegawai. Apabila dirasa ada kekurangan atau gap maka diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Kejelasan dalam pengembangan kompetensi, peran dan tanggungjawab pegawai harus disusun dalam suatu pola karier yang jelas, transparan dan dapat diakses oleh pegawai. Pola karier harus dikembangkan oleh kedua belah pihak, yaitu pegawai dan organisasi (pimpinan). Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa penyusunan pola karier bertujuan untuk memperjelas peran dan fungsi serta kontribusi pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.

Strategi peningkatan kompetensi aparatur seyogyanya tidak dilihat secara parsial tetapi holistik. Keseluruhan unsur perlu dimanage melalui pembuatan sistemnya, penerapan sistem tersebut secara konsisten, dan penyempurnaan yang terus-menerus terhadap sistem yang ada, guna menghasilkan SDM aparatur yang profesional. Strategi pengembangan SDM aparatur (PNS) yang berbasis kompetensi dapat dilakukan melalui:



- (1) Strategi CBHRM (*Competency – Based HR Management*) merupakan salah satu strategi atau pendekatan baru dalam memetakan kinerja SDM yang mengarah pada profesionalisme dengan mendasarkan pada kompetensi, yang tersusun dalam direktori kompetensi serta profil kompetensi per posisi;
- (2) Strategi Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK) adalah sistem pendidikan dan pelatihan yang menawarkan upaya peningkatan kinerja SDM dan organisasi melalui kompetensi yang dapat menciptakan karyawan dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan;
- (3) Strategi yang menggunakan Metode *assessment center* yaitu sebuah proses, prosedur atau metode pendekatan untuk menilai dan mengukur kompetensi orang. Strategi/ metode ini merupakan salah satu sarana/ alat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan SDM seperti rekrutmen, promosi, mutasi dan pengembangan karir pegawai.

Secara manajemen, pengembangan sumber daya sebagai kapital harus terus-menerus dikembangkan, sehingga mampu memberi kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan tepat dinyatakan, “Hanya dengan pegawai yang tepat yang ditempatkan dalam jabatannya dan memperoleh pelatihan, peralatan, struktur, insentif dan akuntabilitas untuk bekerja secara efektif, maka sangat mungkin organisasi tersebut akan berhasil.” (U.S. Office of Personnel Management, 1999:3).

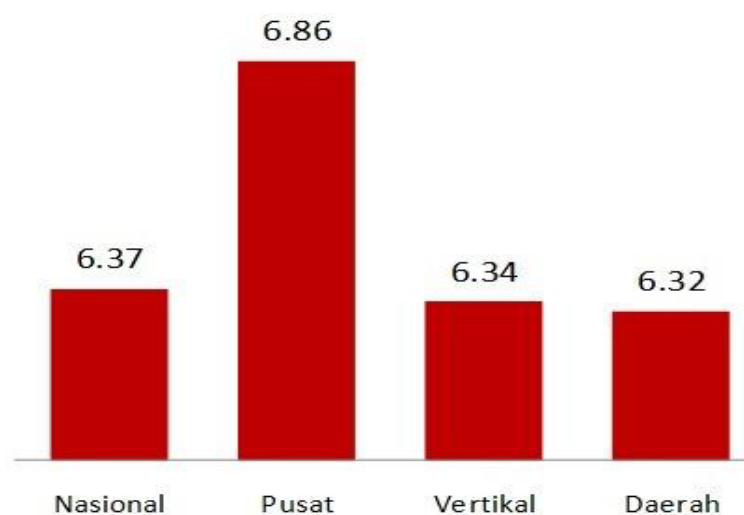
Ada empat komponen penting dalam pengembangan sumber daya atau kapital manusia, yaitu (a) mengadopsi pendekatan strategis dalam perencanaan sumber daya manusia, (b) memperoleh dan mengembangkan staf yang sesuai dengan kebutuhan dasar organisasi, (c) mengembangkan budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja, dan (d) menjaga terpeliharanya prinsip-prinsip prestasi (*merit principles*) (U.S. Office of Personnel Management, 1999:3).

Berdasarkan *Corruption Perception Index* (CPI) yakni sebuah indikator agregat untuk mengukur tingkat persepsi korupsi dari Negara-negara di dunia (*CPI is an **aggregate indicator** that **ranks countries** in term of the degree to which **corruption** is **perceived** to exist among **public officials** and **politicians**. It is a **composite index** drawing on **corruption-related data** by a variety of*

*independent and reputable institutions.* Sumber: *Corruption Perception Index 2010: Long Methodological Brief; Transparency International*) Indonesia memperoleh skor 32 yang setara dengan Negara-negara Madagaskar dan Ecuador. Sedangkan Negara-negara yang memperoleh skor tertinggi adalah Denmark, Finlandia dan Selandia Baru dengan skor 90.

Sedangkan berdasarkan hasil survey Integritas Sektor Publik yang dilakukan oleh KPK (2012), menunjukkan Indeks Integritas Nasional tahun 2012 sebesar 6,37 atau meningkat dibandingkan Indeks Integritas Nasional tahun 2011 (yang mencapai 6,31). Namun demikian terdapat 45 persen (atau 38 instansi/pemerintah daerah) yang pencapaian nilai indeks integritasnya masih di bawah rata-rata nasional dan ada 20 persen (atau 17 instansi/pemerintah daerah) yang pencapaian indeks integritasnya masih di bawah standar yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu 6,00. Penilaian ini dilakukan KPK dengan memotret kondisi aktual pelayanan publik terkait dengan transparansi, suap, pungutan liar, gratifikasi, sistem administrasi, perilaku individu dan lingkungan kerja. Hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut, dimana dalam grafik juga ditunjukkan perbedaan pencapaian indeks Integritas antara Instansi Pusat, Instansi Vertikal dan Pemerintah Daerah.

Grafik 2. Indeks Integritas Nasional (IIN) 2012



Sumber: Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (2012)

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik yang berasal dari dalam diri pelaku maupun dari luar. Yang berasal dari dalam diri pelaku disebut sebagai faktor internal, terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar, bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

Menurut Yamamah (2009), ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta system politik masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi. Perilaku itu dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat yang sering meminta dan "mengemis" sesuatu kepada setiap orang yang punya hajat, seperti dalam Pemilu atau pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Masyarakat tidak lagi memperhatikan latar belakang dan mempertanyakan program atau visi-misi calon pejabat yang bersangkutan sebagai pertimbangan dalam memberikan pilihan politiknya. Masyarakat lebih sering bertanya apa yang akan mereka dapatkan. Kondisi masyarakat yang materialistik dan konsumtif itu justru peluang bagi calon pejabat yang bermental kotor tetapi memiliki persediaan materi yang banyak.

Lemahnya pengawasan juga merupakan faktor pendorong terjadinya korupsi. Pengawasan yang dilakukan instansi terkait (BPKP, Itwil, Irjen, Bawasda) kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya (a) adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, (b) kurangnya profesionalisme pengawas, (c) kurang adanya koordinasi antar pengawas (d) kurangnya kepatuhan terhadap etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri.

Menghadapi tantangan dalam menyongsong MEA, pembinaan SDM Aparatur perlu mengacu pada standar kompetensi internasional (*world class*). Sosok aparatur masa depan penampilannya harus profesional sekaligus taat hukum, rasional, inovatif, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan profesionalisme aparatur harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan mengupayakan terlembagakannya karakteristik sebagai berikut: (a) mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan bernegara, (b) memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik, (c) berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, (d) disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, (e) memiliki daya tanggap dan sikap bertanggung gugat (akuntabilitas), (f) memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan berbagai keputusan sesuai kewenangan, dan (g) memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas.

Oleh karena itu sejak sekarang harus dilakukan perubahan paradigma dalam menata dan menyelenggarakan birokrasi pemerintahan, hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang semakin hari semakin maju dan dinamis. Perubahan paradigma diantaranya adalah dengan mengganti cara-cara pengaturan birokrasi pemerintah yang cenderung sentralistik ke desentralistik, dari otorian menjadi egalitarian dan demoratis, dari bentuk organisasi yang besar menjadi ramping, dari cara yang menekankan *rowing* (semua dikerjakan sendiri) menjadi *steering* (membatasi hanya mengarahkan, mengendalikan, dan member kebijakan saja). Berdasarkan perubahan inilah maka birokrasi dalam menata sumber daya aparaturnya harus melakukan reposisioning, atau reformasi, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan :

1. Kapasitas aparatur di Indonesia saat ini mempunyai beberapa persoalan, diantaranya adalah sistem manajemen kepegawaian berdasarkan merit sistem belum dapat diterapkan dengan baik karena belum adanya instrumen pendukung. Distribusi aparatur belum merata secara baik, diindikasikan tidak sesuai dengan beban kerja yang ada. Demikian juga komposisi pegawai yang ada belum/tidak mampu

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi karena tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

2. Sebagai rekomendasi dalam menghadapi tantangan MEA, strategi pengembangan kapasitas SDM Aparatur perlu mengacu pada standar kompetensi internasional (*world class*). Seharusnya dilakukan secara holistik, keseluruhan unsur perlu dimanage melalui pembuatan sistemnya, penerapan sistem secara konsisten, dan penyempurnaan yang terus-menerus terhadap sistem yang ada. Strategi dapat dilakukan melalui CBHRM (*Competency – Based HR Management*), Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK) serta Metode *assessment center*.\*\*\*

### SUMBER REFERENSI

- Effendi, Akhyar dkk., *Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Efektif*, artikel upload 12 Oktober 2013 [http://www.stialan.ac.id/artikel/artikel%20akhyar\\_effendi.pdf](http://www.stialan.ac.id/artikel/artikel%20akhyar_effendi.pdf)
- Kismartini, 2014. Sumber Daya Aparatur modal utama mewujudkan Tata Kelola dan Kelembagaan dalam meningkatkan Daya Saing Bangsa (dalam Bunga Rampai “Penguatan Governance dan Kelembagaan Dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa”): Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mustopadidjaja, 2002. *Paradigma-Paradigma Pembangunan*, Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refika Aditama
- Thoha, Miftah, 2005. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- U.S. Office of Personnel Management. 1999. *Strategic Human Resources Management*, Washington, D.C: U.S. Office of Personnel Management
- Yamamah, Ansari, 2009. <http://www.dellimanusantara.com/index.php/artikel/105-perilaku-konsumtif-penyebab-korupsi>
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Poko-Pokok Kepegawaian.



**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL 2015**  
**PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA**  
**MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**  
**( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI**  
**INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**PENDIDIKAN TAPAL BATAS SEBAGAI BENTUK**  
**PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS BAGI ANAK**  
**TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI PULAU**  
**SEBATIK**

Oleh : Hardi Warsono

**Abstraksi**

*Wilayah perbatasan hingga saat ini masih sangat identik dengan “keterbatasan” sehingga hampir semua wilayah perbatasan di Indonesia memiliki persoalan yang hampir sama yakni kesenjangan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan sebagai akibat dari keterbatasan berbagai infrastruktur dasar, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan hingga kepada persoalan sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar masih bergantung kepada negara tetangga. Dalam bidang pendidikan dikenal jargon education for all yang menjadi landasan gerakan pemenuhan pendidikan bagi semua. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yang merata, bermutu, relevan dan efisien sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, dirasa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) Pendidikan Dasar sangat perlu mendapat perhatian khusus. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di tapal batas negara umumnya warga pendatang dalam kondisi yang serba darurat dan sibuk dengan kegiatan ekonomi rumah tangganya. Kondisi tersebut berimplikasi pada kurang seriusnya penanganan pendidikan bagi anaknya. Masalah ini diperparah dengan fasilitas pendidikan yang serba terbatas di perbatasan. Untuk mengatasi permasalahan pelik ini gerakan pendidikan tapal batas diperlukan.*

*Kata kunci : gerakan sosial, pendidikan layanan khusus, dan tapal batas*

## A. PENDAHULUAN

Kesan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kawasan perbatasan selalu dikaitkan dengan pendekatan pembangunan yang digunakan di masa lampau, yang lebih menekankan pada keamanan (*security*) dibandingkan dengan peningkatan kesejahteraan (*prosperity*). Apabila kita memperhatikan kondisi sosial, politik dan keamanan pada masa itu, terdapat kesan kuat bahwa dalam pengembangan kawasan perbatasan lebih menekankan pada aspek dan pendekatan keamanan. Namun pada saat ini dimana situasi keamanan yang semakin kondusif dan adanya proses globalisasi yang ditandai dengan berbagai kerjasama ekonomi baik regional maupun subregional, maka pendekatan keamanan perlu disertai dengan pendekatan kesejahteraan secara seimbang. Di pihak lain, beberapa negara tetangga yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia telah mengembangkan daerah perbatasannya sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang telah maju dengan berbagai saran dan prasarana fisik yang lengkap serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Penanganan persoalan perbatasan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota saja akan tetapi perlu didukung oleh seluruh komponen bangsa baik dari dunia usaha, organisasi masyarakat dan instansi/lembaga teknis lainnya. Berawal dari banyaknya persoalan di daerah perbatasan tersebut, maka diperlukan sebuah inovasi dan kreatifitas dari penyelenggara pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Desa sebagai Perbatasan yang menjadi beranda depan NKRI. Sikap peduli terhadap persoalan masyarakat perbatasan yang harus dicarikan solusi dan pemecahan masalahnya.

Kecamatan Sebatik Tengah sebagai salah satu Kecamatan Perbatasan di Pulau Sebatik melaksanakan berbagai kegiatan inovatif dalam rangka mengurai benangkusut dari sekian banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat perbatasan. Inovasi yang dilaksanakan terbagi dalam 2 bidang yakni bidang Kesehatan dan bidang Pendidikan. Di bidang Kesehatan, telah dilaksanakan program Kecamatan Bebas BAB sembarangan. Kegiatan ini terlaksana sebagai wujud prihatin dari pihak Kecamatan dan Desa terhadap masyarakat perbatasan yang sebageaian besar rumah-rumahnya tidak memiliki Jamban/kloset sehingga BAB di sembarang tempat.

Di bidang pendidikan, telah diselenggarakan kegiatan pemberantasan Buta Huruf bagi masyarakat perbatasan dan kegiatan peduli pendidikan perbatasan bagi anak-anak TKI yang bekerja di Sebatik Malaysia sebagai buruh perusahaan sawit. Kegiatan dibidang pendidikan ini bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, PKK Kecamatan Sebatik Tengah dan Yayasan Ar-Rasyid sebagai salah satu yayasan yang ada di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah yang konsen dan komit terhadap pendidikan anak perbatasan. Diperlukan gerakan sosial yang dapat memobilisasi perhatian masyarakat Indonesia untuk mengatasi masalah pendidikan anak TKI di perbatasan ini.

## B. METODE PENELITIAN

Artikel ini diangkat dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan informan utama Camat Sebatik dan pegawai pada Dinas Pendidikan kabupaten Nunukan, sedangkan informan triangulasinya penduduk setempat.

## C. PEMENUHAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN BUAT SEMUA

### 1. Makna Gerakan Sosial

Secara umum makna **Gerakan sosial** ([bahasa Inggris: social movement](#)) adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial. Gerakan Sosial merupakan perilaku kolektif yang ditandai kepentingan bersama dan tujuan jangka panjang, yaitu untuk mengubah atau mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya. Ciri lain Gerakan Sosial ialah penggunaan cara yang berbeda diluar institusi yang ada (Kamanto Sunarto, 2004: 199). Gerakan sosial adalah suatu upaya yang kurang lebih keras dan terorganisir yang dilakukan oleh orang-orang yang realtif besar jumlahnya, entah untuk menimbulkan perubahan, entah untuk menentangnya (Rafael Raga Maran, 2001: 65)

Contoh gerakan sosial bidang pendidikan adalah *education for all*. Ajakan ini terus dikampanyekan karena akses pendidikan belum sama bagi beberapa kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok terpinggir dari pelaksanaan pendidikan ini tidak mudah mendapatkan layanan pendidikan karena berbagai hal, sehingga pemerintah dan masyarakat yang peduli merasa perlu menyelenggarakan pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK) bagi kelompok marginal tersebut. Kelompok marginal tersebut selanjutnya disebut Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang ditangani pendidikan khusus adalah kelompok *diffable* dan cerdas istimewa, sedang pendidikan layanan khusus (PLK), dikembangkan untuk melayani kelompok marginal *non diffable*, seperti anak dari masyarakat terpencil, miskin, kepulauan, terisolir, terlantar dan lain sebagainya.

### 2. Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengamanatkan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan jaminan sepenuhnya kepada peserta didik berkebutuhan khusus atau yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan



yang tidak membedakan pelayanan pendidikan oleh karena keterbatasan ataupun kekhususan yang dimiliki oleh anak. Dijelaskan bahwa pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK).

Undang Undang Sisdiknas Pasal 32 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; sementara ayat (2) menjelaskan bahwa Pendidikan Layanan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Berangkat dari pengertian diatas, maka Pendidikan Khusus (PK) dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis yaitu:

1. Tunanetra
2. Tunarungu, Tunawicara
3. Tunagrahita : Ringan (IQ = 50-70), Sedang (IQ = 25-50), (antara lain Down Syndrome)
4. Tunadaksa Ringan dan Tunadaksa Sedang
5. Tunalaras (*Dysruptive*), HIV AIDS & Narkoba
6. Autis, dan *Sindroma Asperger*
7. Tunaganda
8. Kesulitan Belajar/ Lambat Belajar (antara lain: *Hyperaktif, ADD/ ADHD, Dysgraphia/ Tulis, Dyslexia/ Baca, Dysphasia/ Bicara, Dyscalculia/ Hitung, Hyspraxia/ Motorik*).
9. *Gifted* : potensi kecerdasan istimewa (IQ > 130 ); *Talented*: potensi bakat istimewa (*multiple intelligences : language, logico-mathematic, visuo-spatial, bodily-kinesthetic, musical, interpersonal, natural, intrapersonal, spiritual*); & *Indigo*. Atau yang lebih dikenal dengan istilah CI & BI (Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa)

Sementara Pendidikan Layanan Khusus (PLK) bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun diantaranya yaitu:

1. Daerah terbelakang/ terpencil/ pedalaman/ pulau-pulau, anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).
2. Masyarakat etnis minoritas terpencil (anak suku pedalaman)
3. Pekerja anak, pelacur anak, anak korban trafficking, lapas anak, anak jalanan, anak pemulung.
4. Pengungsi (anak korban gempa, dan konflik).
5. Miskin ekstrim/ miskin absolut.

Demikian halnya dengan pengertian yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 tahun 2011 Pasal 1 menyebutkan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus atau yang lebih dikenal dengan istilah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang mengalami keterbatasan/ keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan anak-anak lain seusianya.

Definisi umum memberikan pengertian Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik (Heward, 2000). Yang termasuk kedalam kategori ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) antara lain anak dengan tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan maupun keterbatasan seperti faktor geografis/ perbatasan, daerah konflik, daerah rawan bencana dan lainnya. Pasal 32 ayat 2 Undang-undang Sisdiknas Anak Berkebutuhan Khusus Marjinal terdiri dari :

- a. Anak korban sosial ekonomi, yang terdiri dari pekerja anak, anak pemulung, pengasong anak, anak pelacur, pelacur anak, anak korban trafficking, anak lapas, anak korban narkoba, anak korban HIV/AIDS, anak jalanan, anak korban perceraian, yatim piatu, anak putus sekolah, anak miskin absolut
- b. Anak korban bencana, terdiri dari anak korban bencana alam, korban konflik, korban peperangan, anak pengungsi
- c. Hambatan geografis, terdiri dari : anak TKI, 3 T (tertinggal, terisolir, terluar) seperti : anak suku/ pedalaman, anak pulau, anak di daerah tertinggal

Anak Berkebutuhan Khusus Non Disabilitas dalam hal ini dimaknai dengan memberikan pendidikan layanan khusus bagi masyarakat yang mengenyam pendidikan/ sekolah karena keterbatasan faktor geografis seperti anak kepulauan dan dalam kasus ini adalah anak TKI.

#### **D. GERAKAN PENDIDIKAN DI TAPAL BATAS**

Wujud dari kepedulian pendidikan di tapal batas ini adalah : PAUD, GERAKAN PEMBERANTASAN BUTA HURUF DAN PENDIDIKAN BAGI ANAK TKI DI PERBATASAN PULAU SEBATIK". Salah satu persoalan perbatasan yang dihadapi di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah adalah persoalan di bidang pendidikan. Berbagai permasalahan yang ada mulai dari Prasarana Pendidikan yang

minim, Jumlah Tenaga Pendidik yang terbatas hingga masalah angka putus sekolah dan angka buta huruf masyarakat yang cukup tinggi.

Berbagai persoalan tersebut melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan telah diakomodir dalam berbagai program dan kegiatan akan tetapi luasnya wilayah geografis kabupaten ditambah dengan ketersediaan anggaran yang terbatas sehingga penanganan masalah di bidang pendidikan di wilayah perbatasan belum sepenuhnya dapat ditangani dengan baik. Oleh sebab itu, kecamatan Sebatik Tengah bekerjasama dengan instansi dan lembaga yang peduli pendidikan bersinergi merancang dan melaksanakan beberapa program kerjasama dalam rangka turut serta mengatasi permasalahan di atas.

kepedulian Kecamatan Sebatik Tengah sebagai kecamatan perbatasan yang setiap hari melihat persoalan pendidikan tersebut mendorong munculnya ide, gagasan dan inovasi untuk meminimalisir dan berkontribusi dalam menangani masalah pendidikan di perbatasan. Dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada berupa organisasi kemasyarakatan, akhirnya pada tahun 2012 dilaksanakan kegiatan PAUD, pemberantasan Buta Huruf dan Pendidikan Anak TKI Sebatik. Kegiatan ini dilaksanakan atas dukungan Pemerintah Kecamatan dan Desa serta Dinas Pendidikan Kab. Nunukan. Secara teknis, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan oleh Yayasan Ar-Rasyid Pulau Sebatik (salah satu lembaga yang konsen dengan pendidikan bagi anak-anak TKI) bekerjasama dengan PKK Kecamatan Sebatik Tengah.

Berkat adanya gerakan tersebut, maka beberapa lembaga sosial maupun pemerintah kemudian tertarik dan terlibat untuk memberikan dukungan maupun bantuan. Salah satu lembaga non-pemerintah yang cukup intens membantu masyarakat Sebatik Tengah dan khususnya lembaga pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Ar-Rasyid adalah yayasan Dompot Dhuafa, salah satu lembaga amil zakat terkemuka di Indonesia.

Paling tidak ada 3 macam gerakan pendidikan di tapal batas, yakni PAUD, gerakan pemberantasan buta huruf dan gerakan pendidikan bagi anak TKI.

### **1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Banyaknya anak TKI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit pulau Sebatik bagian wilayah negara Malaysia yang “dititipkan” di tapal batas juga adanya kebutuhan pendidikan usia dini bagi masyarakat setempat memerlukan layanan pendidikan ini. Meski dengan fasilitas minimum, pendidikan pada tingkatan ini tetap dilaksanakan. Lokasi pendidikan berada di kolong rumah penduduk dan digunakan secara

bergantian dengan kegiatan pendidikan lainnya, yakni gerakan pemberantasan buta huruf. PUD dikelola bekerja dengan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nunukan. Sampai tahun 2015 sudah dibangun ruang untuk dua kelas.

## 2. Gerakan Pemberantasan Buta Huruf

Angka buta huruf di wilayah kecamatan sebatik tengah pada tahun 2012 terbilang cukup tinggi. Dulunya, sebelum ada gerakan pemberantasan buta huruf, dari empat desa yang ada Desa Sungai Limau menyumbang angka yang cukup tinggi. Untuk mengatasi persoalan buta huruf bagi masyarakat perbatasan Kecamatan Sebatik Tengah, maka pada tahun 2012 dilaksanakan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) dengan membentuk kelompok KF yang dikelola bersama antara Yayasan Ar-Rasyid dan TP. PKK Kecamatan Sebatik Tengah.



Gb.1. Kegiatan Pembelajaran KF (Keaksaraan Fungsional)

Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar tahun 2012 sebanyak 11 kelompok dari yayasan Ar-Rasyid (110 orang) dan 5 kelompok dari Tim Penggerak PKK Kec. Sebatik Tengah (50 orang) total 160 orang, sedangkan tahun 2013 untuk yayasan Ar-Raysid 5 kelompok (50 orang) dan TP PKK 5 Kelompok (50 orang) total 100 orang. Secara keseluruhan alumni KF tingkat dasar di Kec. Sebatik Tengah sebanyak **260** orang, dengan rincian sebagai berikut :

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| a) Desa Sungai Limau  | : 20 kelompok (200 orang) |
| b) Desa Aji Kuning    | : 2 kelompok (20 orang)   |
| c) Desa Bukit Harapan | : 1 kelompok (10 orang)   |
| d) Desa Maspul        | : 3 kelompok (30 orang)   |

Dengan terlaksananya program **Keaksaraan Fungsional (KF)** di wilayah kecamatan Sebatik Tengah sejak tahun 2012 telah berdampak pada berkurangnya jumlah buta huruf. Selain itu beberapa masyarakat

yang telah menyelesaikan kegiatan KF melanjutkan dengan kegiatan **Keaksarahan Umum Mandiri (KUM)**.

Salah satu hasil dari program KUM ini adalah terbentuknya Desa Vokasi di Desa Sungai Limau yang hingga kini juga telah menghasilkan produk di luar bidang pendidikan yakni berbagai macam produk olahan dari bahan baku pisang. Program Pemberantasan Buta Huruf ini juga melibatkan tenaga pengajar/tutor yang bekerja dengan sukarela dan berasal dari Staf Desa, Anggota PKK, Staf Kecamatan, Tenaga Pendidik yang ada di Sebatik Tengah.

### 3. Gerakan Pendidikan Bagi Anak TKI

Gerakan pendidikan bagi anak TKI adalah suatu gerakan yang muncul dari keprihatinan akan tingginya angka buta huruf dan angka putus sekolah di kalangan TKI, khususnya yang bekerja di perusahaan perkebunan (baik yang dikelola oleh syarikat maupun oleh perusahaan besar) yang ada di Sebatik Malaysia. Akibat tidak adanya lembaga pendidikan yang didirikan perusahaan untuk memfasilitasi pendidikan anak-anak TKI yang tersebar di perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah itu, maka pada umumnya, para TKI tersebut “terpaksa” menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah pemerintah yang ada di sepanjang perbatasan darat Sebatik Indonesia. Untuk sampai di sekolah, tidak sedikit dari anak-anak ini harus berjalan kaki antara 1,5 hingga 2 jam lamanya untuk sampai di sekolah-sekolah terdekat. Bagi yang memiliki keluarga, ada pula yang menitipkan anak-anak mereka untuk ditampung di rumah-rumah keluarga yang bermukim di wilayah Sebatik Indonesia.



Gb. 2. Kondisi Pendidikan Bagi Anak TKI

Kombinasi antara perjalanan yang melelahkan dan godaan ringgit yang begitu kuat, serta kesadaran akan pentingnya pendidikan yang masih rendah disinyalir menjadi penyebab terus meningkatnya angka putus sekolah di kalangan anak-anak TKI. Mereka yang putus sekolah ini pada umumnya kemudian ikut membantu orang tuanya bekerja di perkebunan-perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan kakao yang ada di Sebatik Malaysia. Tidak sedikit di antara mereka yang telah bekerja dan menetap di perusahaan-perusahaan yang ada di negeri jiran itu selama dua hingga tiga generasi. Hidup mereka pun, jauh untuk dapat dikatakan layak akibat rendahnya pendidikan dan daya saing mereka.

Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan ini, maka yayasan ar-Rasyid dengan mendapat dukungan dari Pemerintah Desa setempat dan Pemerintah Kecamatan kemudian menggagas berbagi kegiatan yang melibatkan TKI di perbatasan guna menggugah kesadaran dan memberikan motivasi agar mereka lebih peduli terhadap pendidikan anak-anak mereka. Secara perlahan-lahan kesadaran mereka terhadap pendidikan mulai tumbuh kembali dan kepercayaan kepada pemerintah juga berangsur-angsur pulih. Muncullah gagasan-gagasan untuk menyelenggarakan gerakan-gerakan pendidikan dan pemberdayaan yang lebih terorganisir di mana yayasan ar-Rasyid dipercayakan untuk menjadi *leading sector*-nya.

## **E. PERAN ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN PEMERINTAH KECAMATAN**

### **1. Peran Yayasan Ar Rasyid**

Yayasan ar-Rasyid adalah salah satu lembaga yang menyelenggarakan berbagai gerakan sosial, pendidikan dan kesehatan di Kab. Nunukan. Pimpinan Yayasan yang juga menjadi pengelola pendidikan al-Ikhlas Kab. Nunukan telah cukup dikenal kegiatan dan kredibilitasnya oleh camat Sebatik Tengah dan sebagian stafnya. Ketika ada salah satu warga yang juga pengusaha sukses di Sebatik Tengah berniat dan berminat untuk menginvestasikan lahannya bagi pengembangan pendidikan, Camat Sebatik Tengah mencoba menawarkan rencana tersebut ke yayasan ar-Rasyid Nunukan yang kemudian disambut dengan tangan terbuka oleh pengurus yayasan. Dimotori oleh ibu Hj. Bidan Suraidah, SKM, M.Ns, dimulailah gerakan-gerakan da'wah, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang menumpang di salah satu bagian dari rumah warga.

Atas permintaan warga setempat, termasuk para TKI yang bekerja di Sebatik Malaysia, maka atas dukungan dari Pemerintah Kecamatan dan

Pemerintah Desa, tidak lama kemudian dilaksanakanlah kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan di salah satu ruangan yang dipinjamkan oleh warga setempat. Selain anak-anak setempat, sebagian dari anak didik PAUD di lembaga ini adalah anak TKI yang orang tuanya bekerja di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terkemuka di wilayah Sebatik Malaysia, Teck Guan Company. Mereka mengantar dan menjemput anak-anak mereka dengan melintasi perbatasan dua negara setiap harinya.

Tidak hanya PAUD, kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Ar-Rasyid juga kemudian berkembang hingga ke kegiatan pelayanan kesehatan yang mayoritas pasiennya juga adalah TKI yang bekerja di Sebatik Malaysia, Program Pemberantasan Buta Aksara (KF Dasar dan Mandiri), Pembentukan Desa Vokasi, Pendidikan Kesetaraan (Paket) dan terakhir adalah Pendidikan Madrasah baik Diniyah maupun Ibtidaiya Baru-baru ini, PAUD Al-Ikhlas yang dikelola oleh yayasan ini juga menjadi *pilot project* Integrasi Program PAUD, Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu.

Selain mendapat dukungan dari pemerintah, dalam menyelenggarakan kegiatannya, yayasan ar-Rashid juga mendapat dukungan dan bantuan dari Yayasan Dompot Dhuafa.

## 2. Peran Kecamatan

Guna mensukseskan gerakan pemberantasan buta huruf dan fasilitasi pendidikan bagi anak TKI, Kecamatan Sebatik Tengah mengambil peran dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi pembinaan, pengkoordinasian dan sekali-kali ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan melalui organisasi PKK Kecamatan maupun menugaskan relawan pengajar yang sebagian terdiri dari staf kecamatan untuk mengajar di program kesetaraan. Kecamatan juga menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya kegiatan.

### 1) Perencanaan

Keterlibatan pemerintah kecamatan dalam perencanaan adalah dalam bentuk perumusan strategi pendekatan kepada masyarakat dan para TKI. Kegiatan tersebut tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat yang merupakan target sasaran kegiatan. Kecamatan membantu yayasan untuk merancang model pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Sedangkan implementasi dari strategi dan perencanaan ini sendiri, umumnya dilaksanakan oleh yayasan beserta mitra strategis lainnya.

## 2) Pengorganisasian

Selain masyarakat, gerakan pendidikan dan pemberdayaan untuk masyarakat perbatasan dan TKI juga melibatkan beberapa organisasi dan lembaga antaranya pemerintah desa, SKPD-SKPD terkait (kabupaten/propinsi/pusat), TNI dan POLRI serta beberapa lembaga sosial seperti Yayasan Dompot Dhuafa. Kecamatan berfungsi melakukan koordinasi dalam rangka membantu mensinergikan jalan dan lancarnya kegiatan, termasuk mempromosikan kegiatan tersebut guna mendorong keterlibatan stake holder yang lebih luas.

## 3) Pelaksanaan

Keterlibatan kecamatan antara lain direpresentasikan oleh PKK Kecamatan maupun relawan mengajar oleh beberapa staf kecamatan, bantuan honor bagi tenaga pengajar dan gotong royong pembangunan sekolah dan sarannya. TP. PKK misalnya terlibat langsung dalam penyelenggaraan beberapa kelompok keaksaraan fungsional, promosi hasil produk olahan dari kelompok desa vokasi. Sedangkan keterlibatan staf kecamatan juga ditunjukkan dalam bentuk menjadi relawan mengajar di pendidikan kesetaraan. Keterlibatan lain oleh pihak kecamatan adalah dalam bentuk pemberian honor bagi Tenaga Pengajar Program Kesetaraan yang diselenggarakan oleh yayasan di Sebatik Malaysia. Honor tenaga pengajar dimaksud diambil dari dana zakat yang dihimpun di lingkungan kantor Kecamatan Sebatik Tengah. Keterlibatan langsung pemerintah kecamatan juga ditunjukkan dalam keterlibatan dalam kegiatan pemberian bantuan peralatan, gotong royong pematangan lahan dan pembangunan sekolah tapal batas yang saat ini menjadi pusat kegiatan yayasan ar-Rasyid.

## 4) Monitoring

Kegiatan monitoring cukup intens dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan termasuk mendampingi tamu-tamu yang berkunjung melakukan visitasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh yayasan.



Gb. 3. Kunjungan Kongsu TKI Sebatik Malaysia



## 5) Evaluasi

Camat Sebatik Tengah juga aktif melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan. Selain menjalankan fungsi kecamatan, evaluasi ini juga dilakukan oleh camat dalam rangka kedudukannya sebagai Pembina/Penasehat di Sekolah Tapal Batas

## F. HAMBATAN

Gerakan pendidikan tapal batas masih banyak menemui hambatan, antara lain : masih kurangnya dukungan masyarakat, baik pemerintah pusat, penduduk lokal maupun *corporate*. Meski demikian sudah mulai ada perhatian seperti dari dompet Dhuafa dan Pertamina.

Dikemukakan oleh camat Sebatik Selatan : “ yang perlu mendapat perhatian adalah ruang belajar untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah, pak. Akan lebih elok kalau dibangun sekolah berasrama pak, agar anak-anak TKI tersebut tidak perlu pulang pergi melintasi negara setiap hari”.

Hambatan yang masih dihadapi dalam pengembangan pendidikan di tapal batas pulau Sebatik ini antara lain, adalah :

- a. Sumberdaya manusia pendidik masih minim, baik kuantitas maupun kualitas. Saat ini tenaga pendidik menggunakan anak-anak lulusan SLTA atau sederajat
- b. Lokal Sekolah tidak memadai, yakni menumpang di kolong rumah warga. Dipinjami selama 7 tahun (sejak tahun 2012). Sarana dan media pembelajaran sangat minim,
- c. Keterbatasan biaya operasional. Biaya operasional dan biaya hidup siswa (ada 11 anak TKI yang menetap di lokasi) hanya mengandalkan donatur dan mitra (dompet dhuafa).

## G. PENUTUP

Gerakan Sosial merupakan perilaku kolektif yang ditandai kepentingan bersama dan tujuan jangka panjang, yaitu untuk mengubah atau mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya. Ciri lain Gerakan Sosial ialah penggunaan cara yang berbeda diluar institusi yang ada. Pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat di tapal batas wilayah RI dan Malaysia khususnya di Kecamatan Sebatik Selatan., seperti halnya gerakan sosial lainnya telah menggunakan cara yang berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya bagi penduduk setempat tetapi bagi semua warga negara Indonesia meski bukan penduduk

setempat. Diekola oleh masyarakat dengan sinergi dengan berbagai pilar kemasayarkatan dan pemerintah.

Di Sekolah Tapal Batas, Kecamatan Sebatik Selatan digelar beberapa jenis layanan pendidikan yakni : PAUD, Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD/ formal), Madrasah Diniyah (SD Non formal), Paket A, B dan C serta Keaksaraan Fungsional (KF) / Keaksaraan Umum Mandiri (KUM). Siswa PAUD, MI dan MD berasal dari anak-anak TKI yang bekerja di perkebunan sawit di pulau Sebatik yang menjadi kawasan negara Malaysia. Di Sebatik Malaysia saat ini juga ada satu kelas Paket A. Dengan demikian Sekolah Tapal batas adalah identitas pendidikan yang mewadahi berbagai macam program layanan pendidikan. Sebagai gerakan sosial, pendidikan tapal batas ini harus selalu dibangkitkan semangat dan penyelenggaraannya dengan terus mengatasi permasalahan yang dihadapi.\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2007. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi)* jakarta : Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi , 2007. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara  
Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta : Rineka Cipta, 2001.
- Daryanto, H.M, 2006. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jaluluddin & Idi, Abdullah, 2007. *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Sunarto, Kamanto, Pengantar Sosiologi, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Suharto, Suharto. 2009. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*. bandung : Alfabeta.
- Tilaar, H.A.R, 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional suatu Tinjauan Kritis* Jakarta : Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R, 2002. *Manifesto Pendidikan Nasional Tinjauan dari Postmodernisme dan Studi Kultur*. Jakarta: Kompas.
- T.Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Yogyakarta : Gava Media.
- Zuriah, Nurul. 2007. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: bumi Aksara.



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**MASYARAKAT EKONOMI ASEAN:  
PERSPEKTIF KEBIJAKAN LINGKUNGAN**

**Hartuti Purnaweni<sup>1</sup>**

***Abstrak***

*Implementasi MEA nampaknya akan lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi (economic heavy), sehingga berpotensi menimbulkan problem lingkungan. Makalah ini bertujuan menganalisis peluang dan tantangan Indonesia menghadapi MEA dalam perspektif kebijakan publik, khususnya kebijakan lingkungan, karena kebijakan dapat menjadi panduan Negara dan mengarahkan masyarakat serta perangkat Negara lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menjelaskan dan menganalisis dari sisi kebijakan lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam persiapan menuju dan implementasi MEA 2015.*

*Hasil telaah perspektif lingkungan menunjukkan bahwa agar MEA dapat berlaku tanpa harus mengorbankan lingkungan, maka berbagai kebijakan lingkungan strategis yang harus segera disusun adalah: (1) kebijakan lingkungan yang mampu membangunkan setiap manusia tidak hanya sekedar sadar lingkungan, tetapi bertindak untuk lingkungan; (2) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sudah saatnya memikirkan dan menyusun blue print ekonomi hijau beserta segenap regulasi/kebijakannya; (3) pembangunan nasional dan daerah mestilah bersandarkan pada pembangunan manusia, ekonomi ramah lingkungan,*

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Undip  
email: [hartutipurnaweni@gmail.com](mailto:hartutipurnaweni@gmail.com)

dan pembangunan lingkungan yang lestari sebagai satu kesatuan; (4) komitmen politik untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDG (*Sustainable Development Goals*) harus terus didorong dan direalisasikan. Disarankan bahwa seluruh komponen meliputi birokrat, akademisi, pebisnis, lembaga swadaya masyarakat harus memiliki prinsip terciptanya keseimbangan ekonomi, ekologi, dan sosial, sebagaimana dituntut dalam visi pembangunan berkelanjutan.

*Kata Kunci: MEA 2015, kebijakan lingkungan, pembangunan berkelanjutan*

## **PENDAHULUAN**

Apabila tidak ada aral merintang, akhir tahun 2015 ini kawasan Asia Tenggara akan memasuki sejarah baru regionalisasi dalam konteks globalisasi ekonomi (*ASEAN integration in global context*). ASEAN telah menyepakati babak baru integrasi perekonomian regional melalui ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Proses regionalisasi (dalam bidang ekonomi) kawasan ASEAN diawali dengan disepakatinya *Preferential Trading Agreement* (PTA) tahun 1977, dilanjutkan dengan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) tahun 1992, dan akan berakhir dengan terbentuknya *ASEAN Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. MEA ini merupakan realisasi dari integrasi ekonomi yang termuat dalam visi ASEAN 2020 (Rahardjo, 2015).

Salah satu pilar utama MEA adalah aliran bebas barang (*free flow of goods*) di mana pada tahun 2015 perdagangan barang di kawasan ASEAN dilakukan secara bebas tanpa mengalami hambatan, baik tarif maupun non-tarif. Upaya untuk mewujudkan ASEAN sebagai kawasan dengan aliran barang yang bebas dalam skema MEA merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari skema yang ada sebelumnya, yaitu *preferential Trading Agreement* (PTA) tahun 1977 dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) tahun 1992. Perbedaan paling mendasar antara skema PTA, AFTA, dan MEA dalam mendorong terjadinya aliran barang yang bebas di ASEAN adalah PTA dan AFTA lebih menekankan pada pengurangan dan penghapusan hambatan tarif, sedangkan MEA lebih menekankan pada pengurangan dan penghapusan hambatan non-tarif.

Keinginan ASEAN membentuk MEA didorong oleh perkembangan eksternal dan internal kawasan. Dari sisi eksternal, Asia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi baru, dengan disokong oleh India, Tiongkok, dan negara-negara ASEAN. Sedangkan secara internal, kekuatan ekonomi ASEAN sampai tahun 2013 memberikan sumbangan sebesar 3,3 % perekonomian dunia. Sebagaimana dikatakan ADB (2014) dalam laporan tahunannya:

*“As a whole, ASEAN’s recent economic performance has been remarkable. In 2013, ASEAN’s gross domestic product (GDP) stood at \$2.4 trillion, accounting for 3.3 per cent of the world’s economy. During the period 2007-13, ASEAN economies, with the exception of Brunei Darussalam, grew faster than the global average, proving relatively resilient to successive international crises in the late-2000s. In 2013, GDP growth for the world as a whole was 3.0 per cent, but for ASEAN it was 4.9 per cent (ASEAN Economic Community : Managing integration for better jobs and shared prosperity, ADB, 2015).*

Penerapan MEA 2015 akan jelas berdampak terhadap pembangunan di Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Syukriah dan Hamdani (2013), dampak positif MEA 2015 adalah bahwa masyarakat dapat menjual barang-barang hasil produksi ke Negara-negara ASEAN dengan mudah, namun dampak negatifnya adalah bahwa akan banyak produk yang masuk ke dalam negeri sehingga persaingan menjadi lebih ketat. Rofiq (2014) memberikan nada yang lebih positif dengan mengatakan bahwa pelaksanaan MEA 2015 memang tidak lepas dari dampak positif dan negatif, namun apabila dianalisis dari tingkat pendapatan yang belum merata serta kesenjangan dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN lainnya, MEA 2015 akan memberikan peluang positif bagi pembangunan domestik maupun pengembangan internasional. Dengan demikian MEA akan dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Makalah ini bertujuan menganalisis peluang dan tantangan Indonesia menghadapi MEA dalam perspektif kebijakan publik. Hal ini penting karena kebijakan dapat meningkatkan alur serta panduan bagi Negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan mengarahkan masyarakat serta perangkat Negara lainnya menuju tahap yang ingin dicapai, yaitu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itulah, maka menurut Malau (2014), pengaturan melalui kebijakan (*policy*) merupakan langkah pertama sebagai upaya mempersiapkan Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Penerapan MEA 2015 menuntut persiapan maksimal dari Negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Salah satu sendi yang harus dipersiapkan adalah sendi kebijakan publik. Pertanyaan yang ingin dijawab melalui makalah ini

adalah bagaimana peluang dan tantangan Indonesia dalam bidang kebijakan lingkungan untuk menghadapi MEA?

Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menjelaskan dan menganalisis dari sisi kebijakan lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam persiapan menuju dan implementasi MEA 2015.

Untuk menghadapi peluang dan tantangan MEA, salah satu perangkat penting yang perlu dipersiapkan adalah kebijakan dan manajemen publik yang mengatur berbagai implikasi dan konsekuensi dari integrasi ekonomi ASEAN tersebut

## KONSEP MEA

Seiring dengan dinamika perkembangan hubungan antar-bangsa di berbagai kawasan, ASEAN menyadari pentingnya integrasi negara-negara di Asia Tenggara. Pada pertemuan informal para Kepala Negara ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997 disepakati *ASEAN Vision 2020* yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Hanoi yang menghasilkan HPA atau *Hanoi Plan of Action* (Rahardjo, 2015). Visi 2020 termasuk HPA berisi antara lain: kondisi yang ingin diwujudkan di beberapa bidang, seperti orientasi ke luar, hidup berdampingan secara damai dan menciptakan perdamaian internasional.

Beberapa agenda kegiatan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Visi 2020 adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ekonomi, **lingkungan hidup**, sosial, teknologi, hak cipta intelektual, keamanan dan perdamaian, serta turisme, melalui serangkaian aksi bersama dalam bentuk hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan diantara negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya pada KTT ASEAN ke 9 di Bali pada tahun 2003 dihasilkan *Bali Concord II*, yang menyepakati pembentukan *ASEAN Community* untuk mempererat integrasi ASEAN.

Terdapat tiga komunitas dalam *ASEAN Community* yang disesuaikan dengan tiga pilar di dalam *ASEAN Vision 2020*, yaitu pada bidang keamanan politik (*ASEAN Political-Security Community*), ekonomi (*ASEAN Economic Community/AEC*), dan sosial budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*).

MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam *ASEAN Vision 2020*: "*To create a stable, prosperous and highly competitive*

*ASEAN economic goods, services, investment, skill labor economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020.*" (ADB, 2015).

Untuk membantu tercapainya integrasi ekonomi ASEAN melalui AEC, maka dibuatlah *AEC (ASEAN Economic Community) Blueprint* yang memuat empat pilar utama yaitu (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam; dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Integrasi ekonomi dimaksud tidak hanya terbatas pada perdagangan bebas dan investasi, tetapi lebih dari itu menyangkut upaya bersama untuk mencapai kesejahteraan.

Integrasi ekonomi ini, sebagaimana dicanangkan dalam *AEC Blueprint* tidak terbatas pada liberalisasi perdagangan dan investasi semata, namun lebih merupakan usaha komprehensif dan berbilang-sisi terkait dengan kesenjangan di dalam dan di antara Negara, intra dan antar Negara, pengembangan infrastruktur, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta mobilisasi pekerja ahli. *AEC Blueprint* juga fokus pada area baru integrasi ekonomi terkait dengan ukuran-ukuran dan kebijakan domestik tentang "*behind-the-border*" (ADB, 2014).

Dengan berlakunya MEA 2015, berarti negara-negara ASEAN menyepakati perwujudan integrasi ekonomi kawasan yang penerapannya mengacu pada *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*. *AEC Blueprint* merupakan pedoman bagi Negara-negara Anggota ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015.

## **PERSPEKTIF KEBIJAKAN LINGKUNGAN**

Untuk menghadapi peluang dan tantangan MEA, salah satu perangkat penting yang perlu dipersiapkan adalah kebijakan dan manajemen publik yang mengatur berbagai implikasi dan konsekuensi dari integrasi ekonomi ASEAN tersebut. Kebijakan dan manajemen publik ini harus dapat terdesiminasi penuh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat secara keseluruhan walaupun saat ini masih terdapat ketidak-harmonisan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah serta masyarakat sehingga muncul isu adanya ego-sektoral kelembagaan dalam upaya persiapan menuju AEC 2015.

Seperti yang telah disebutkan di atas, AEC adalah merupakan salah satu dari tiga pilar utama dalam ASEAN Community 2015, yang ingin membentuk integrasi ekonomi di kawasan ASEAN Tenggara. AEC memiliki lima pilar utama, yaitu aliran bebas barang (*free flow of goods*), aliran bebas jasa (*free flow of service*), aliran bebas investasi (*free flow of investment*), aliran bebas tenaga kerja terampil (*free flow of skilled labour*), dan aliran bebas modal (*free flow of capital*).

Dalam menghadapi realisasi ASEAN Economic Community 2015, negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia harus melakukan upaya guna mempersiapkan diri. Salah satu perangkat yang perlu dipersiapkan adalah pengaturan pemerintah suatu negara melalui peraturan atau kebijakan (*policy*). Hal ini penting karena dapat menciptakan alur serta panduan bagi suatu negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan juga dapat mengarahkan masyarakat serta perangkat negara lainnya menuju tahap yang ingin dicapai, sehingga pengaturan melalui kebijakan (*policy*) ini merupakan langkah pertama sebagai upaya mempersiapkan Indonesia dan dalam menghadapi ASEAN Economic Community pada tahun 2015 kelak.

Kajian kritis tentang kehadiran MEA mengungkapkan bahwa implementasi MEA nampaknya akan lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi (*economic heavy*). Gagap gempita mempersiapkan MEA dengan lebih fokus hanya pada aspek ekonomi, bukan tidak mungkin akan menyisakan problematik lain, khususnya problem lingkungan. Dalam konteks inilah kehadiran MEA dalam konteks kebijakan lingkungan menjadi relevan dan urgen.

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa AEC adalah merupakan salah satu dari tiga pilar utama dalam ASEAN Community 2015, yang ingin membentuk integrasi ekonomi di kawasan ASEAN Tenggara. AEC memiliki lima pilar utama, yaitu aliran bebas barang (*free flow of goods*), aliran bebas jasa (*free flow of service*), aliran bebas investasi (*free flow of investment*), aliran bebas tenaga kerja terampil (*free flow of skilled labour*), dan aliran bebas modal (*free flow of capital*).

Aliran serba bebas aspek ekonomi tersebut jelas akan membawa konsekuensi lingkungan apabila paradigma pembangunan masih berkuat pada bagaimana memasukkan uang sebesar-besarnya untuk penerimaan Negara. Implikasinya semua sumber daya (alam) akan dieksploitasi, diekstraksi tanpa menghitung berapa besar nilai kerugian sosial dan lingkungan.



Tidak pernah diperhitungkan berapa banyak orang disengsarakan atau harus menanggung penderitaan akibat kebijakan ekonomi yang hanya berorientasi sebesar-besarnya memasukkan uang ke penerimaan Negara. Masuknya investasi besar-besaran di sektor perkebunan, misalnya untuk kebun sawit, telah membabat habis hutan di Indonesia sehingga tatanan sosial dan lingkungan rusak parah. Memang secara ekonomi, perkebunan sawit menjadi “pahlawan” perkembangan ekonomi Indonesia.

Namun, apakah negara, kita, pernah menghitung berapa besar kerugian sosial dan lingkungan akibat konversi hutan untuk perkebunan sawit yang dinilai sebagai “pahlawan” tersebut? Dalam konteks kekinian dapat kita simak. Bencana kabut Asap di Sumatra, Kalimantan, dan merembet ke Sulawesi serta Irian, yang tak kunjung dapat diatasi hingga tulisan ini dibuat – sekalipun sudah memperoleh bantuan dari Singapura, Malaysia, Amerika, Rusia, dan negara lainnya – menjadi bukti nyata kerusakan serius lingkungan di Indonesia. Berapa banyak masyarakat harus menanggung berbagai penyakit – yang lebih penting lagi terperangkap dalam penderitaan (*pain and suffering trap*) – karena polusi asap akibat pembakaran (kebakaran?) lahan dan hutan. Kejadian ini layak dimasukkan dalam kategori *ecological harm* (White, 2010) yang mendatangkan protes negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang bereaksi keras terhadap bencana polusi asap kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Indonesia.

Dalam definisi South (2010) bencana asap ini layak dimasukkan dalam kategori *green crime*. South mengatakan bahwa polusi menyebabkan pemusnahan massal dan menyebabkan pengurangan secara signifikan keanekaragaman hayati. Dampaknya terhadap kehidupan planet Bumi luar biasa. South mengutip Zahn yang menyatakan bahwa setiap tahunnya polusi membunuh empat kali lipat jumlah orang daripada pembunuhan biasa. Belum lagi termasuk aneka tumbuhan yang mungkin banyakdi antaranya berkhasiat untuk pengobatan namun belum sempat diselidiki dan dimanfaatkan. Juga sejumlah besar binatang yang terperangkap dan tidak berdaya menghadapi serbuan api dan asap yang luar biasa melingkupi area tempat hidup mereka. Wilayah Indonesia yang pada tahun 1500-an 90%-nya masih berupa hutan, dan dalam istilah Van Solinge (2011) merupakan “*home of the the most magnificent tropical forest in the world*” kini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, menurunkan imej Indonesia di mata dunia internasional, khususnya di kawasan Negara-negara tetangga ASEAN.

Berapa banyak orang harus meninggalkan tempat tinggalnya (mengungsi) dan berapa anak dipaksa untuk tidak dapat bersekolah? Berapa besar penderitaan masyarakat yang harus hidup dalam jebakan asap yang menyesakan data sepanjang hari selama berbulan-bulan? Adakah semua itu pernah dikalkulasi secara ekonomi? Sudah jelas bahwa uang yang masuk sebagai penerimaan negara lebih kecil daripada

hitungan kerugian yang harus ditanggung masyarakat, bila semua dampak yang meliputi ekologi (lingkungan, sosial dan ekonomi dimasukkan).

Karena kebijakan ekonomi lebih berorientasi pada pemasukan penerimaan negara, pembangunan yang diimplementasikan di negeri ini cenderung kurang memperhatikan lingkungan dalam arti seluas-luasnya. Selama ini lingkungan hanya dipahami sekedar sebagai hutan, sungai, laut, dan lainnya yang serba fisik. Padahal lingkungan harus dipahami sebagai tempat manusia hidup yang membutuhkan keseimbangan. Lingkungan harus dipahami sebagai satu planet bumi dimana kita semua bersama-sama tinggal di atasnya.

Oleh karena itu orientasi pembangunan ekonomi harus benar-benar diubah melalui implementasi paradigma pembangunan ekonomi hijau (*green economy*). Konsep ekonomi hijau tidak boleh hanya berhenti di slogan sebagaimana pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang sudah lama dikenal namun tak pernah diimplementasikan secara benar dan berkesinambungan.

Pengembangan ekonomi hijau membutuhkan kebijakan lingkungan yang kuat. Selama ini kebijakan lingkungan hanya dipandang sebelah mata, lebih banyak dijadikan ornamen kebijakan makro. Tak terkecuali pengembangan ekonomi hijau dalam kerangka MEA. Hadirnya MEA bukan tidak mungkin akan menyeret Indonesia dalam pusaran ekonomi global yang eksploitatif terhadap lingkungan. Dalam kerangka ini maka penguatan kebijakan lingkungan menjadi keniscayaan.

## **PENUTUP**

Agar MEA mampu mengimplementasikan ekonomi hijau, yaitu ekonomi yang ramah lingkungan, maka semua negara yang tergabung dalam MEA harus berupaya mewujudkan penguatan kebijakan lingkungan dalam bingkai pengembangan ekonomi. Dalam arti pengembangan ekonomi yang dilakukan MEA harus benar-benar sensitif pada iklim khususnya terkait dengan perubahan iklim, menghormati keanekaragaman hayati, serta mempunyai daya tahan. Dengan harapan agar semua manusia khususnya di ASEAN dan dunia pada umumnya hidup dalam harmonisasi dengan alam dan kehidupan lingkungan yang terlindungi.

Semua itu jelas menuntut kita untuk melihat Bumi sebagai tempat hidup bersama, bumi dengan segala kekayaan dan fungsinya. Mendegradasikan salah satu kekayaan atau fungsi bumi, maka berarti kita tidak melihat bumi sebagai lingkungan besar yang harus dilindungi. Dengan kata lain maka lingkungan harus dipahami sebagai seluruh kehidupan manusia.

Agar MEA dapat berlaku tanpa harus mengorbankan lingkungan, namun justru sebaliknya harus melestarikan lingkungan, maka berbagai kebijakan lingkungan strategis harus segera disusun dan disiapkan.

*Pertama*, kebijakan lingkungan yang mampu membangunkan setiap manusia tidak hanya sekedar sadar lingkungan, tetapi bertindak untuk lingkungan. Harus ada kebijakan lingkungan yang benar-benar aplikatif untuk membangunkan tidak saja kesadaran, tetapi juga bertindak menyelamatkan lingkungan di bumi, khususnya di tanah Indonesia. Bumi adalah rumah kita bersama. Sehingga apapun yang menimpa planet bumi kita, maka kitalah pertama-tama dan terutama yang akan menanggungnya. Keberadaan lingkungan yang lestari sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan pembangunan. Aspek ekologi sangat dibutuhkan untuk sumber produksi barang, dan faktor ini harus dijaga keberlanjutan pengadaannya. Manfaat nyata MEA hanya akan dapat diperoleh melalui peran Negara sehingga Indonesia mampu berperan sebagai pusat produksi dan distribusi, bukan sebagai pusat pemasaran saja (Rahardjo, 2015)

*Kedua*, pada aras kelembagaan seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sudah saatnya memikirkan dan menyusun *blue print* ekonomi hijau beserta segenap regulasi/kebijakannya. Termasuk dalam *blue print* ini adalah menyangkut kerangka pendanaan, kelembagaan, mekanisme evaluasi dan pengawasan. Dengan demikian, isu lingkungan hidup tidak hanya sebatas ditangani atau menjadi tanggungjawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tetapi menjadi tanggungjawab bersama.

*Ketiga*, ke depan pembangunan nasional dan daerah mestilah bersandarkan pada pembangunan manusia, ekonomi ramah lingkungan, dan pembangunan lingkungan yang lestari sebagai satu kesatuan. Paradigma pembangunan yang hanya berorientasi ekonomi serta bersifat sektoral sudah saatnya ditinggalkan. Apalagi bila diingat bahwa produk-produk yang ramah lingkungan dari Negara-negara lain akan banyak masuk ke Indonesia, dan sejalan dengan kesadaran yang meningkat di kalangan masyarakat Indonesia sendiri, maka peluang produk hijau (*green product*) akan meningkat.

Keempat, komitmen politik (*political will*) untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDG (*Sustainable Development Goals*) harus terus didorong dan diupayakan realisasinya.

Untuk itu maka seluruh komponen bangsa mulai dari birokrat, akademisi, pebisnis, sampai dengan lembaga swadaya masyarakat perlu memiliki pemahaman “melek lingkungan” baik fisik maupun sosial budaya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu semua pihak harus memiliki prinsip

sama bahwa “hidup bukan bagaimana nanti” tetapi “hidup nanti bagaimana”. Prinsip ini mencerminkan prasyarat terciptanya keseimbangan ekonomi, ekologi, dan sosial, sebagaimana dituntut dalam visi pembangunan berkelanjutan.\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Gu, K and Q. Zhang, “Prospects Glimmer for China to be Poised for CAFTA: Managing Integration for Shared Prosperity and Social Progress”, background paper prepared for *ASEAN Community 2015: Managing Integration for Better Jobs and Shared Prosperity*, ADB: Singapore, 20 Dec. 2007.
- Malau, Masnur Tiurmaida, “Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional: Masyarakat Ekonomi ASEAN”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol 3, No 2, Agustus 2014, ISSN 2089-9009.
- Rahardjo, Nur Syahrir, *Peran dan Strategi Kebijakan Ekonomi Guna Memanfaatkan Masyarakat ASEAN demi Kemajuan Daerah*, Semnas Temu Administrator Muda Indonesai, FISIP Undip, Semarang 29 Sept 2015.
- Rofiq, Asep Abdul, *Menakar Pengaruh Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Terhadap Pembangunan Indonesia*, <https://www.academia.edu/9997959>.
- Syukriah, Ana dan Imam Hamdani, “Peningkatan Eksistensi UMKM Melalui *Comparative Advantage* dalam Rangka Menghadapi MEA 2015 di Temanggung”, *Economics Development Analysis Journal*, ISSN 2252-6889.
- Van Solinge, Tim Boekhout, “The Land of the Orangutan and the Bird of Paradise Under Threat”, *Global Harms: Ecological Crime and Specisim*, New York: Nova Scotia Publishers, Inc
- White, Rob, “Globalization and Environmental Harm”, in White, Rob, 2010, *Global Environmental Harm: Criminological Perspective*, Poprtland, Oregon, Willian Publishing.



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**INOVASI KEBIJAKAN PARIWISATA KOTA  
SEMARANG MENYONGSONG MASYARAKAT  
EKONOMI ASEAN MELALUI STRATEGI PROMOSI  
“ CITY BRANDING “**

**Oleh : Tri Yuniningsih**

**ABSTRACT**

*CITY Semarang has some interesting tourism potential through the richness of the culture, beaches, culinary, agro, and as a trading city that made a tourist attraction to visit is certainly the potential Semarang. Dengan the local authorities continue to take in order to improve tourism management and moving the economy Semarang. In realizing this vision need careful planning and the right strategy, one that had to be developed and applied is city branding, on an international scale which have been widely applied in cities - cities in the world and proved capable of carrying a significant impact on the progress of the city these include Kuala Lumpur, Singapore and Amsterdam. As part of efforts to tourism market in Semarang. City Branding is considered to have an important role to increase the number of tourist visits especially welcome the ASEAN Economic Community. This study used a qualitative approach, the type of research deskriptif. By Informan snowball determined, source data used is primary and secondary data, and data collection techniques by interview and documentation. Analysis is using domain analysis and triangulation of data. Results of the study revealed that the city of Semarang in implementing this strategy is still not ready and not done systematically planned, given the City Branding only narrowly understood that only in the aspect of visualization. It is pushing forward the need for a policy to a more intense support City Branding strategies implemented optimally.*

*Keywords: City Branding, Tourism, Strategy*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin Asean sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang. Ini dilakukan agar daya saing Asean meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini diharapkan nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, menjelaskan bahwa MEA mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing. "Pembatasan, terutama dalam sektor tenaga kerja profesional, didorong untuk dihapuskan," katanya. "Sehingga pada intinya, MEA akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau minim tenaga asingnya."

Pengembangan pariwisata di kota Semarang tentunya tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Masyarakat langsung maupun tidak langsung membantu dalam usaha menjaga ketertipan serta keamanan di dalam lingkungan obyek wisata maupun di luar obyek wisata. Masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam berjualan sofenir, menjaga keamanan lingkungan obyek wisata dengan cara menjadi petugas parkir kendaraan supaya kendaraan-kendaraan pengunjung yang datang bisa terkendali dengan baik dan rapi, masyarakat ikut andil bekerja di Locket penjualan karcis masuk obyek wisata, adanya peran serta masyarakat dalam kebersihan di lingkungan wisata, masyarakat ikut menjaga keamanan lingkungan wisata baik di malam hari maupun di siang hari dengan cara menjadi penjaga malam maupun menjadi satpam di obyek wisata.

Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah mempunyai potensi yang sangat banyak yaitu sebagai kota metropolitan yang memiliki adat dan kebudayaan yang cukup kental. Namun ibukota Jawa Tengah, Semarang seringkali berada di bawah bayang-bayang kota lain disekitarnya seperti Yogyakarta dan Surakarta yang merupakan kota budaya, dan karenanya wisatawan sering menganggap lebih baik berkunjung ke kedua tempat tersebut, dengan penawaran wisata yang lebih beragam dan lebih menarik. Kemudian bila mengingat bahwa Semarang pernah telah membuat *branding* khas daerah yaitu Semarang "Kota ATLAS", Semarang kota "LUMPIA", Semarang "PESONA ASIA" dan sekarang sedang digalakkan Semarang "SETARA". Namun entah mengapa branding yang selama ini dicanangkan juga belum menunjukkan ciri khas secara umum, padahal

dengan *branding* diharapkan secara ideal akan membangkitkan rasa penasaran untuk mengenal lebih lanjut dari wilayah terkait. Oleh karena itulah untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan suatu inovasi kebijakan pengembangan pariwisata yang mampu memajukan pariwisata ini supaya nantinya lebih baik dalam perkembangannya ke depan.

## 2. Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi masalah yang ada dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang.
- b. Mengetahui bagaimana kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan melalui STRATEGY CITY BRANDING di kota Semarang.
- c. Merekomendasikan inovasi yang perlu dilakukan dalam kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan melalui STRATEGY CITY BRANDING di kota Semarang.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini bertipe deskriptif kualitatif karena bersifat pengungkapan fenomena-fenomena secara deskriptif tanpa mempertimbangkan kuantitas kemunculan fenomena, tetapi kedalaman informasi pada setiap fenomenanya. Fokus dan lokus penelitian: penelitian ini fokusnya adalah pada inovasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Semarang, Sumber data; data primer diperoleh dari *key informan*, yakni Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang, sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan, media elektronik, dan sumber lain yang dapat dijadikan sumber informasi. Teknik koleksi data; pengumpulan data dilakukan dengan *Wawancara*. Teknik penentuan informan adalah *Snowball*. Analisis dan interpretasi data; data disajikan dengan teknik naratif dan dianalisis dengan teknik taksonomi. Kualitas penelitian (*goodness criteria*); penelitian ini diharapkan dapat memperoleh keunggulan dalam hal tema belum banyak dibahas, menggunakan teknik yang memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaannya sehingga informasi dapat lebih kaya, Kelemahan / keterbatasan penelitian : karena belum banyaknya referensi dalam tema ini.

## 4. Kajian Pustaka

Kebijakan Publik, James Anderson, dalam Bambang Sunggono (1994: 22) mengatakan bahwa: "*Public Policies those policies developed by governmental bodies and officials.*" (kebijakan- kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Tujuan Kebijakan Publik adalah : Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator), memajukan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator), memperpadukan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator), Menunjuk dan membagi benda material dan non material (negara sebagai distributor). Dari pemikiran di atas, jelas bahwa tujuan sentral kebijakan publik adalah kepentingan publik (Bambang Sunggono, 1994: 12). Sedangkan Sifat Kebijakan Publik didalam

bentuknya yang positif, kebijakan publik didasarkan pada undang-undang dan bersifat otoritatif. Sifat kebijakan bisa diperinci lima kategori yakni: tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands), keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions), pernyataan-pernyataan kebijakan (policy statements), hasil-hasil kebijakan (outputs), dan dampak-dampak kebijakan (outcomes).

Inovasi menurut Jones (2004) (dalam Wilfridus, 2010:1.22), mendefinisikan inovasi adalah proses dimana organisasi menggunakan keahlian dan sumberdayanya untuk mengembangkan produk barang dan jasa yang baru atau untuk mengembangkan sistem produksi dan operasi yang baru sehingga organisasi mampu memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada konsumen. Sedangkan menurut Paul M. Romer (2006) (dalam Wilfridus, 2010:1.22) mendefinisikan inovasi sebagai proses menciptakan dan menyalurkan nilai baru kepada pelanggan. Beberapa bentuk inovasi adalah terobosan teknologi (penciptaan transistor), penemuan baru, (scooter roda satu), model bisnis baru, proses produksi yang baru, dan desain baru.

Pariwisata merupakan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan secara perorangan maupun kelompok dengan tujuan untuk mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu (Kodhyat dalam James J. Spillane, 1987). Menurut James J. Spillane (1987), pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, maupun untuk tujuan lainnya. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Adapun pariwisata dideskripsikan sebagai kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Menurut Paturusi (2001) pengembangan pariwisata adalah suatu strategi yang dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar objek dan daya tarik wisata maupun bagi pemerintah. Disamping itu pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Dengan adanya pembangunan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut. Dengan kata lain pengembangan pariwisata melalui penyediaan fasilitas infrastruktur, wisatawan dan penduduk setempat akan saling diuntungkan. Pengembangan tersebut hendaknya sangat memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek budaya, sejarah dan ekonomi daerah tujuan wisata.



Berdasarkan pengertian di atas maka *inovasi kebijakan pengembangan pariwisata* adalah suatu kebijakan yang mendukung kegiatan menata dan memajukan suatu obyek wisata untuk dikembangkan lebih layak dan lebih baik melalui suatu cara atau desain baru (inovasi) atau strategi “ City Branding “ serta diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut.

## B. PEMBAHASAN

Sebagai ibukota Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang yang berpenduduk 1,6 juta jiwa lebih, dengan luas wilayah 373,70 km<sup>2</sup>, dan secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan, dengan batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer, sehingga Kota Semarang dapat dikategorikan sebagai Kota Metropolitan.

Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena Kota Semarang berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai Utara, koridor selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Kota Surakarta yang terkenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Surabaya melewati Kabupaten Demak; dan Barat menuju Kabupaten Kendal yang selanjutnya menuju Kota Jakarta. Seiring dengan perkembangan kota, kota Semarang berkembang menjadi kota yang memfokuskan pada perdagangan dan jasa. Berdasarkan lokasinya, kawasan perdagangan dan jasa di kota Semarang terletak menyebar dan pada umumnya berada disepanjang jalan-jalan utama. Kawasan perdagangan modern, terutama terdapat di Kawasan Simpanglima yang merupakan urat nadi perekonomian Kota Semarang.

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 2015 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22). Sedangkan kebijakan yang mengatur adalah Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2010 tentang kepariwisataan.

Sebuah *branding* seharusnya bukan hanya sekedar menunjukkan identitas kota secara umum, tetapi diharapkan mampu membangkitkan rasa penasaran pengunjung untuk lebih mengenal wilayah terkait. Namun bila melihat langkah *City Branding* yang telah dilakukan, secara umum tampaknya lebih berat ke tujuan pengembangan pariwisata, khususnya menarik wisatawan. Padahal seharusnya bias mendatangkan investasi dan meningkatkan perdagangan di kota

tersebut. Sebagian besar daerah dan kota/kabupaten di Indonesia, termasuk Kota Semarang selama ini baru sebatas berpromosi, belum mengangkat sisi yang unik dan bersifat emosional. Dimana masih membuat Booklet, brosur, dan belum menonjolkan keunggulan untuk daerah masing-masing. Identitas pengenalan hanya logo identitas kotanya dan belum mencantumkan identitas yang komersial dan emosional yang dimaksudkan untuk menarik investasi. Upaya *City Branding* sejauh ini kurang menekankan pada potensi dan keunggulan daerah secara jelas, banyak yang tidak menonjolkan keunggulan utama daerahnya dan malah ingin menjual barang produk, inilah yang menjadikan banyak slogan yang dianggap sebagai landasan *City Branding* menjadi tidak fokus pada suatu kelebihan, sementara mungkin ini yang dapat menjadi pondasi awal membangun potensi dan keunggulan daerah tersebut.

### ***City Branding***

Suatu *brand* merupakan identitas sekaligus pembeda dari produk lainnya dan tentu saja berlaku untuk sebuah kota, oleh karenanya penting kiranya merumuskan suatu *City Branding* agar suatu kota benar-benar dapat dibedakan dengan daerah lain, sebagai salah satu strategi meraih keunggulan bersaing baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, apalagi menyongsong MEA ( Masyarakat Ekonomi ASEAN ). Setiap kota harus melibatkan semua komponen stakeholders-nya sehingga akan menjadikan rumusan *brand* yang lebih relevan karena potensi yang diunggulkan akan dikaji dari berbagai sapek secara luas, paling tidak dihargai oleh masyarakatnya sendiri sehingga mereka akan turut bertanggungjawab dalam mewujudkannya.

Secara umum *City Branding* diarahkan pada tiga potensi daerah yaitu : investasi dengan kelompok sasaran para investor, pariwisata atau tourism dengan kelompok sasaran turis domestik dan manca negaradan perdagangan dengan kelompok sasaran para *trader*. Ketiganya sering disebut dengan sebutan *invest*, *tourisnm* dan *trade*.

Pertama, investasi sangat diperlukan di era otonomi daerah seperti saat ini. Setiap kota harus mampu menunjukkan daerahnya sebagai tempat investasi yang strategis, aman, murah, infrastruktur yang lengkap dan tidak birokratif. Menyederhanakan birokrasi dalam perijinan seperti pelayanan satu atap atau yang lebih dikenal dengan *one stop service* merupakan upaya daerah untuk menarik calon investor. Jika dengan *City Branding* berhasil menarik investor tentu akan menimbulkan dampak positif bagi perekonomian daerah tersebut seperti tersedianya lapangan kerja, adanya bagian pajak dan retribusi daerah serta turunan dari dampak positif tersebut.

Kedua, adalah pariwisata. Potensi wisata untuk setiap daerah tentulah tidak sama tetapi yang menjadikan daerah menjadi obyek wisata dikarenakan daerah tersebut memiliki keunikan atau karakteristik yang khusus seperti tradisi dan budaya, kondisi alam, sistem sosial, sistem pertanian, makanan khas dan

sebagainya. Jadi daerah harus bisa mengembangkan nilai dasar potensi wisata agar memiliki atraksi wisata sehingga wisatawan memiliki ketertarikan untuk mengunjunginya.

Ketiga, adalah perdagangan. Terjadinya perdagangan antar daerah atau bahkan antar negara karena suatu daerah atau negara memiliki keunggulan komparatif dalam menghasilkan produk/jasa baik menyangkut biaya, teknologi atau sumber daya. Dengan meningkatnya arus perdagangan berarti akan meningkatkan perputaran ekonomi suatu daerah. Di beberapa daerah telah dibentuk pusat-pusat perdagangan dan penjualan yang mencitrakan sebagai daerah produsen yang memiliki keunggulan komparatif. Dengan pencitraan sebagai pusat penjualan dan perdagangan diharapkan dapat membentuk *image* yang kuat untuk mendorong terjadinya proses transaksi.

Kota Semarang yang terkenal sebagai kota Lumpia, merupakan ibu kota propinsi Jawa Tengah yang mana juga termasuk dari salah satu kota besar di Indonesia. Belakangan ini kota yang mempunyai slogan dari kota ATLAS (Aman Tertib Lancar Asri Sehat) telah mengalami perubahan walaupun belum signifikan sampai sekarang memiliki slogan Semarang SETARA (Semarang Sejajar, Setingkat, Sepadan dengan daerah lain di Indonesia dan Semarang Sejahtera). Potensi Kota Semarang disegala bidang begitu banyak, namun belum semua dapat dioptimalkan oleh pemerintah dan masyarakat kota Semarang itu sendiri. Aset kota Semarang yang juga merupakan potensi kota Semarang itu sendiri diantaranya adalah aset budaya yang berupa kebudayaan-kebudayaan asli kota Semarang misalnya seperti kesenian Gambang Semarang, kesenian Warak Ngendog, tradisi Dugderan menjelang bulan ramadhan, dan lain sebagainya. Wilayah dari Kota Semarang sebenarnya juga memiliki wilayah strategis sebagai penghubung antara daerah Pantura di Jawa Tengah dengan wilayah agraris di dalamnya. Selain itu Semarang merupakan area pengembangan wilayah Joglo Semar yang yang menggabungkan kota Jogjakarta, Solo dan Semarang. Pariwisata kota Semarang pun dibagi dalam beberapa golongan mulai dari objek wisata religi yang berupa tempat-tempat peribadatan umat beragama, objek wisata budaya, objek wisata sejarah, objek wisata hiburan dan alam. Selain budaya dan pariwisata, pendidikan kota Semarang juga merupakan aset yang sangat berpotensi. Dunia pendidikan kota Semarang saat ini sudah dapat dibilang maju, terlihat dari semakin banyaknya sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang mempunyai taraf internasional. Tidak jarang pula siswa-siswi kota ini menjuarai kompetisi setingkat olimpiade, dan dalam hal pendidikan tinggi pun tidak kalah bersaing dengan Jakarta ataupun Jogja, bahkan kota Semarang merupakan kota tujuan pertama di Jawa Tengah dalam hal pemilihan Perguruan Tinggi.

Meskipun demikian, kota Semarang masih sangat membutuhkan banyak hal untuk memperkenalkan dirinya sesuai ciri khas yang dimiliki. Kesadaran akan pentingnya *City Branding* sebenarnya sudah muncul di hampir setiap event yang dilakukan, namun sepertinya aktivitas yang dilakukan masih sangat terbatas dan terpotong-potong dalam beberapa lingkup aktivitas sehingga kurang

mencerminkan kekhasan dan karakter yang ingin ditonjolkan dari kota Semarang itu sendiri. Dengan kata lain, kegiatan branding belum dilakukan secara proaktif dan terintegrasi. Sebagian besar aktivitas yang dilakukan masih sebatas pada promosi-promosi parsial dengan sekadar mengikuti kegiatan yang telah dijadwalkan secara regular.

Kurang sesuaianya *Branding* kota Semarang saat ini dimungkinkan karena kurang fokusnya pengelolaan *City Branding*, karena terlalu banyak tujuan yang ingin dicapai dalam waktu yang sama. Penetapan sebuah *City Branding* semestinya dapat menjadi sesuatu yang lebih efektif dan efisien apabila dilakukan secara fokus untuk menonjolkan identitas kekhasan yang menjadi ciri dari Kota Semarang. Dengan *City Branding* yang lebih fokus diharapkan ini bisa membedakan dari kota-kota lainnya. *City Branding* haruslah *externally different* dan *internally inspiring*, secara eksternal harus berbeda dengan kota lainnya dan secara internal dapat menginspirasi masyarakat untuk berbuat banyak bagi keberhasilan daerah tersebut.

Salah satu citra yang menarik dari Kota Semarang dan membedakan dengan kota lain yaitu bahwa Semarang adalah kota dengan akulturasi budaya yang ditunjang aspek industri dan perdagangan yang kuat. Sebagai kota multikultur di dalamnya, Semarang kental dengan berbagai aktivitas budaya dan sosial yang sulit ditemukan di wilayah lain. Penduduk kota ini umumnya adalah suku Jawa dengan mayoritas agama adalah Islam. Meskipun demikian, kota ini sangat dikenal sebagai kota dengan komunitas Tionghoa yang besar pula. Perpaduan antara budaya Jawa, Tionghoa dan Islam sangat terlihat di berbagai aspek kehidupan yang membaur sejak ratusan tahun silam.

Dari sisi peninggalan sejarah dan budaya, Semarang memiliki kota tua *Little Netherland* yang mencakup kawasan Polder Tawang, Gereja Blenduk, Stasiun Semarang Tawang, Jembatan Berok, Pasar Johar dan Lawang Sewu. Selain itu juga masih ada tempat-tempat seperti monumen Tugu Muda dan juga kuil-kuil komunitas Tionghoa yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Beberapa diantaranya sudah dikemas sebagai tempat tujuan pariwisata, seperti misalnya yang dilakukan oleh Komunitas Tionghoa di Semarang, melalui perkumpulan Kopi Semawis (Komunitas Pecinan Semarang untuk Pariwisata) yang mengadakan Waroeng Semawis, yakni arena wisata kuliner yang menjual berbagai makanan dan oleh-oleh khas Semarang, di daerah Pecinan Semarang (daerah Gang Pinggir) setiap akhir minggu (Jumat-Minggu) dan hari libur nasional. Kopi Semawis juga rutin menggelar Pasar Imlek Semawis selama beberapa hari setiap menjelang perayaan Tahun Baru Imlek di Pecinan Semarang.

Sementara dari sisi pendidikan tinggi, kota Semarang juga menjadi tempat tujuan dikarenakan semakin banyaknya alternatif sekolah tinggi yang ada. Meskipun demikian, program yang ditawarkan selama ini masih dikemas dalam program yang belum sinergi antara satu sama lain, sehingga kurang optimal dalam menginformasikan kekhasan dari sebuah kota. Yang perlu dilakukan sebaiknya

menciptakan suatu informasi mengenai budaya dan pendidikan yang menjadi cerminan identitas kota. Tentunya masih tetap memperhatikan aspek fungsionalnya lewat kenyamanan, keamanan, kebersihan.

Dengan demikian jika proses membangun *brand* sebuah kota dianggap merupakan suatu opsi untuk meningkatkan perekonomian kota, tentu saja diperlukan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Sehingga nantinya proses pembangunan yang dilakukan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pokok membangun *City Branding* sebuah wilayah adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara lebih menyeluruh. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya dimungkinkan apabila pembangunan didesentralisasikan sampai sedekat mungkin pada masyarakat. Artinya, perencanaan pembangunan harus dimulai dari bawah, meskipun juga harus memperhatikan batasan-batasan dan sasaran-sasaran makro, baik makro nasional, makro sektoral, maupun makro regional. Pengambilan keputusan dalam proses pembangunan yang menyangkut masyarakat tentu saja harus berpangkal pada simpul yang paling dekat dengan masyarakat.

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dalam membangun city branding, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Permasalahan yang ditemukan di lapangan dapat diketahui sebagai berikut :
  - a. Kebijakan pariwisata secara umum tampaknya lebih berat ke tujuan pengembangan pariwisata, khususnya untuk menarik wisatawan, seharusnya bisa mendatangkan investasi dan meningkatkan perdagangan.
  - b. Kota Semarang selama ini baru sebatas berpromosi, belum mengangkat sisi yang unik dan bersifat emosional. Dimana masih hanya membuat Booklet, brosur, dan belum menonjolkan keunggulan untuk daerah.
  - c. Identitas pengenalan hanya logo identitas kotanya dan belum mencantumkan identitas yang komersial dan emosional yang dimaksudkan untuk menarik investasi.
  - d. Upaya *City Branding* sejauh ini kurang menekankan pada potensi dan keunggulan daerah secara jelas, banyak yang tidak menonjolkan keunggulan utama daerahnya dan malah ingin menjual barang produk,
  - e. Banyak slogan yang dianggap sebagai landasan *City Branding* menjadi tidak fokus pada suatu kelebihan potensi daerah.
  - f. Potensi Kota Semarang begitu banyak, namun belum semua dapat dioptimalkan oleh pemerintah dan masyarakat.

- g. Kesadaran akan pentingnya *City Branding* sebenarnya sudah muncul di hampir setiap event yang dilakukan, namun sepertinya aktivitas yang dilakukan masih sangat terbatas dan terpotong-potong dalam beberapa lingkup aktivitas sehingga kurang mencerminkan kekhasan dan karakter yang ingin ditonjolkan dari kota Semarang itu sendiri.
  - h. Kegiatan branding belum dilakukan secara proaktif dan terintegrasi.
  - i. Sebagian besar aktivitas yang dilakukan masih sebatas pada promosi-promosi parsial dengan sekadar mengikuti kegiatan yang telah dijadwalkan secara regular.
  - j. Kurang fokusnya pengelolaan *City Branding*, karena terlalu banyak tujuan yang ingin dicapai dalam waktu yang sama.
2. Peran dari perguruan tinggi dalam membangun city branding belum ada sehingga kurang sesuainya branding kota Semarang saat ini dimungkinkan karena kurangnya penelitian mengenai city branding yang tepat untuk kota Semarang dari tinjauan akademisi. Masing-masing perguruan tinggi yang ada belum cukup berkolaborasi bersama dalam upaya membangun city branding kota Semarang. Hal ini menjadi hal yang ironis karena dengan begitu banyaknya perguruan tinggi yang ada justru seharusnya dapat mendorong upaya bersama dalam membangun city branding. Masyarakat akademisi terutama di perguruan tinggi, merasa belum dilibatkan secara penuh dalam proses membangun city branding bersama. City branding dianggap sebagai suatu wacana dan program kerja rutinitas yang dilakukan oleh pemerintah kota. Perlu dilakukan kegiatan kolaborasi antara beberapa perguruan tinggi untuk membangun ciri kota, dengan berkontribusi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian yang 'khas' dengan mengangkat kearifan lokal yang ada, sehingga terbangun city branding kota Semarang yang tepat.
  3. Inovasi kebijakan pengembangan pariwisata melalui strategi *city branding* belum optimal dilakukan mengingat slogan-slogan *city branding* masih bersifat kontemporer dan belum menunjukkan pada symbol keunikan daerah.
  4. Dalam menyongsong MEA diperlukan suatu inovasi kebijakan pengembangan pariwisata melalui strategi *city branding* yang lebih mendukung pada penonjolan keunikan daerah. Selain itu, dibarengi dengan pemberdayaan semua unsur *stakeholder* yang terkait dalam rangka mengoptimalkan segala sumber daya yang dibutuhkan, sehingga kota Semarang siap menyongsong MEA akhir tahun 2015.

## C.PENUTUP

### Kesimpulan

Salah satu kebutuhan untuk memiliki city branding yang tepat merupakan salah satu upaya mengadopsi pendekatan network sebagai upaya alternatif pengambilan keputusan untuk sekelompok elit kecil. Hankinson (2004)

mengkonseptualisasikan brand sebuah tempat sebagai merek jaringan relasional, perspektif yang berfokus pada perlunya pendekatan kolaboratif atau organisasi sektor publik dan swasta dan pendekatan distributif dengan kepemilikan strategi branding kota.

Prinsip-prinsip kemitraan yang efektif termasuk inklusif dan keterwakilan; komitmen jangka panjang, visi bersama; berbagi tanggungjawab; percaya satu sama lain; keselarasan dan keterlibatan; membuat brand investasi, dan kemauan untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas.

Ada beberapa dimensi peranan perguruan tinggi secara ideal yang seharusnya dapat disinergikan, tujuan utamanya city branding adalah untuk membuat preferensi dan

loyalitas ke sebuah kota di antara berbagai segmen yang melayani kota-kota. Di antara yang paling menonjol adalah pemilik bisnis, investor, organisasi nirlaba, warga, mahasiswa, kelompok minat khusus, wisatawan dan pengunjung. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan semua stakeholders dengan kesadaran warga sebagai aktor utama penggerak kota, didukung pemerintah dan pendanaan swasta bekerjasama dengan pihak pemerintah.

*City branding* selain membawa kebanggaan untuk kota tersebut, juga berdampak memacu pertumbuhan kreativitas masyarakat dan perkembangan perekonomian kota. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah dengan melakukan *Public Private Partnerships*. *City branding* akan terbentuk jika semua pihak terlibat dalam proses membangun dengan mempedulikan nilai-nilai integritas yaitu kejujuran, keterbukaan, prinsip etika dan karakter moral. Pengelolaan *city branding* bukan hanya sebuah slogan untuk beberapa waktu, namun harus dikaitkan dengan integritas kepada komunitas, lingkungan, masyarakat dan masa depan. Hal tersebut bukanlah pilihan yang sulit bila mengingat potensi Kota Semarang yang kaya akan sumber daya dan memiliki ciri khas khusus di sisi akulturasi budaya. Dengan demikian diharapkan penciptaan *city branding* akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo (2010), *Pembangunan Kota Optimum, Efisien & Mandiri*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta
- Anholt, S. (2005), *Some Important Distinctions in Place Branding*, *Place Branding* Vol. 1, No. 2
- Buku Saku Pemerintah Kota Semarang (2010), *Bagian Humas SETDA Kota Semarang : 2010*
- Handayani, Desi et al. (2010), *The Official MIM Academy Coursebook : Brand Operation* Penerbit ESENSI (Erlangga Grup)
- Kotler Philip (2011), *Going World Class with The New Chapter of Marketing*, Hand Out One-Day Executive Seminar with Philip Kotler, 30 Mei 2011, Ritz-Carlton Pasific Place, Jakarta, MarkPlus Inc.
- La Gaets Richard and Stout Frederic (2007), *The City Reader*, New York: Routledge
- Qian Minghui (2010), *Research and Review of Management Factors in City Branding Strategy*, *Information Resources Management Journal*
- Riyadi (2009), *Fenomena City Branding pada Era Otonomi Daerah*, *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 5, No.1
- Selayang Pandang Kota Semarang (*Glance of Semarang City*) (2010), *Bagian Humas SETDA Kota Semarang : 2010*
- [administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/.../369](http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/.../369). Artikel Praditiya Budi Laksana, Riyanto, Abdullah Said
- [core.ac.uk/download/pdf/11734193.pdf](http://core.ac.uk/download/pdf/11734193.pdf) . Artikel Farida Indriani dan Rizal Hari Magnadi





**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL 2015**  
**PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA**  
**MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**  
**( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI**  
**INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**PERENCANAAN DI SEKTOR**  
**KETENAGAKERJAAN YANG BERBASIS**  
**PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM**  
**MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL**

TITI DJUMIARTI

**Abstraks**

*Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang paling banyak di Asia Tenggara. Dan pertumbuhan penduduk ini berimplikasi pada peningkatan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya yang selalu meningkat. Sementara itu pasar tenaga kerja di dalam maupun di luar negeri tidak sepenuhnya dapat menyerap angkatan kerja, dari data menunjukkan sampai akhir tahun 2014 masih terdapat 7,24 juta orang menganggur. Ketenagakerjaan menghadapi MEA memiliki tantangan yang cukup pelik dan diperlukan upaya mengatasinya, oleh karena itu tulisan ini merupakan kajian teoritik bagaimana mengembangkan kompetensi tenaga kerja dalam menghadapi persaingan pangsa pasar tenaga kerja di tingkat ASEAN. Hasil Kajian Teoritik ini memperoleh kesimpulan bahwa di perlukan perencanaan strategis yang baik dengan mengacu tujuan utama yakni terciptanya sumberdaya Manusia yang kompetitif dan profesional. Dalam kerangka tersebut maka aktifitas perencanaan harus meliputi : melakukan analisis situasi pangsa pasar tenaga kerja di tingkat ASEAN, Pemerintah dalam hal ini Ketenagakerjaan membuat kerangka kualifikasi nasional, Strategi meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja Indonesia dengan meningkatkan kompetensi pengetahuan, ketrampilan dan dan perilaku, menyusun mekanisme dan melakukan koordinasi secara integral dengan seluruh pemangku kepentingan yang bersinggungan langsung dengan dunia kerja maupun tidak langsung, melakukan monitoring dan evaluasi dari setiap program yang terkait dengan ketenagakerjaan.*

*Adapun untuk meningkatkan kompetensi ketenagakerjaan di Indonesia dapat dilakukan dengan strategi berikut : memberikan pengetahuan melalui peningkatan pendidikan Formal maupun informal, memberikan ketrampilan melalui pelatihan baik ketrampilan berkomunikasi maupun ketrampilan mental, meningkatkan konsep diri calon pencari kerja dengan peningkatan skill mencapai kepribadian Bigfive.*

*Keyword : perencanaan, strategi, kualifikasi nasional, kompetensi tenaga kerja*

## LATAR BELAKANG MASALAH

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah yang sangat rumit dan segera harus diselesaikan. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah pengangguran. Hingga saat ini pengangguran di Indonesia mencapai lebih dari 7,24 juta atau 6,1 persen dari total angkatan kerja yang mencapai angkatan kerja 121, 87 juta orang (BPS.2014) Dengan demikian meskipun angka pertumbuhan nasional berada pada kisaran 5 persen, namun angka tersebut belum dapat mencukupi untuk mampu memberikan lapangan pekerjaan yang memadai bagi jutaan penganggur.

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada bulan Februari 2014,; jumlah angkatan kerja sebanyak 125, 32 juta orang. Jumlah yang terserap bekerja sebanyak 118,17 juta orang (93,14 persen) dan yang tidak terserap sebanyak 7.15 juta orang (6,86 persen). Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian sebanyak 6.031.398 orang atau 37,80 persen, kemudian sektor Perdagangan yang menyerap 3.472.748 orang atau 21,76 persen dan sektor Industri yang menampung 2.765.679 orang atau 17,33 persen dari orang yang bekerja. Status buruh/karyawan bulan Februari 2014 merupakan bagian terbesar persentasenya sekitar 25,03 persen, kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap berada di urutan ke dua dengan angka sekitar 23,18 persen, dan berusaha sendiri dengan persentase sekitar 18,38 persen berada di urutan ke tiga. Persentase pekerja tak dibayar tetap di urutan ke empat dengan persentase sebesar 17,13 persen. Jumlah penganggur pada bulan Februari 2014 adalah sebanyak 7.154.897. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2014 adalah 6,18 persen. Angka ini 0,96 persen point lebih rendah dibandingkan dengan TPT Februari 2013 yang berada pada angka 7,24 persen.

Hasil penelitian saya pada tahun 2010 di Kabupaten Grobogan menjelaskan tentang mengapa masih banyak tenaga kerja yang belum terserap, diantara lainnya adalah 1) Pengaruh ekonomi global yang dapat mengakibatkan menurunnya sektor usaha sehingga menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja secara besar-besaran, 2) Meningkatnya kasus perselisihan antara pekerja dan perusahaan sering menimbulkan keputusan sepihak yang pada akhirnya mengorbankan pekerja, dan 3) Meningkatnya jumlah pengangguran diakibatkan pengaruh PHK dan merosotnya sektor industri serta sempitnya lapangan kerja yang tersedia.

Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi (Disnakertrans) dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dilakukan program :1) Pendidikan latihan kerja daerah, 2) Pembinaan pemagangan di dalam dan luar negeri, 3) Bimbingan teknis pembuatan peraturan perusahaan dan persetujuan kerja bersama, 4) Pembinaan dan pengembangan produktifitas tenaga kerja, 5) Bintek penyusunan skala upah, 6) Fasilitasi SP/SB di perusahaan, 7) Pembinaan dan pembentukan lembaga kerjasama bipartite, 8) Pembinaan perjanjian kerja antarwaktu tertentu dan perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di perusahaan, 9) Bursa Kerja On Line dan

pembuatan informasi Pasar Kerja, 10) Pembinaan calon tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri, 11) Pembinaan dan pelatihan serta bantuan peralatan sektor informal, 12) Pembinaan tenaga kerja mandiri terdidik, 13) Padat karya produktif, dan 14) Penyuluhan bimbingan jabatan bagi pencari kerja.

Demi mengatasi permasalahan ketenagakerjaan tersebut diperlukan program perencanaan pembangunan di sektor ketenagakerjaan yang berbasis kompetensi, baik dalam Program: 1) Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja dan 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 3) Program Pembinaan norma keselamatan Kerja, 4) Program Pembinaan dan pengawasan tenaga kerja asing (TKA), 5) Program Pembinaan norma kerja dan 6) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Mengapa perencanaan program ketenagakerjaan perlu mengembangkan kompetensi?

## **RUMUSAN MASALAH**

Dari paparan di atas penulis mencoba memberikan solusi bagi permasalahan dengan lebih menekankan pada bagaimana Disnaker melaksanakan fungsi perencanaan program yang berbasis kompetensi untuk mengatasi permasalahan di sektor ketenagakerjaan.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat menentukan bagi sebuah kegiatan. Di dalam tahap perencanaan ini langkah-langkah untuk mencapai tujuan ditentukan. Conyers dan Hills dalam Mudrajat (2004: 35) mendefinisikan perencanaan sebagai proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pada sisi lain, Todaro dalam Mudrajad (2004: 78) memberikan pendapatnya bahwa perencanaan ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya.

Perencanaan sebagai proses memilih alternatif tindakan guna menentukan kombinasi terbaik penggunaan sumberdaya yang tersedia, dengan kata lain perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun modal. Hal tersebut penting untuk dilakukan karena sumber daya terbatas sehingga perlu dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik mungkin. Oleh karena itu perencanaan berhubungan dengan masa yang

akan datang, yang berkaitan dengan proyeksi/prediksi. Berkaitan dengan hal tersebut pengumpulan dan analisis data dan informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting di dalam melakukan sebuah perencanaan.

## KOMPETENSI TENAGA KERJA

Kompetensi dapat di asumsikan sebagai perilaku yang berkenaan dengan pekerjaan, motivasi atau pengetahuan, ketrampilan. Menurut Spenser (dalam Prihadi, 2004 : 91-92) mengemukakan bahwa ada 5 (lima) jenis kompetensi yakni:

1. *Motive* (motif) adalah segala sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau di kehendaki seseorang yang menimbulkan tindakan motif menggerakkan, mengarahkan dan menyeleksi perilaku terhadap kegiatan atau tujuan.
2. *Traits* (watak) adalah karakteristik pribadi dan respon respon konsistensi terhadap situasi atau informasi.
3. *Self concept* (konsep diri) adalah sikap nilai dan citra diri seseorang.
4. *Knowledge* (Pengetahuan) merupakan kompetensi yang kompleks yakni merujuk pada informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu.
5. *Skill* (ketrampilan) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik dan mental.

Dari kelima komponen tersebut *skill* dan *knowledge* bersifat *visible* dan mudah untuk dapat di kembangkan melalui program pelatihan. Sementara *selfconcept, traits* dan *motives* bersifat *hidden* sehingga sulit untuk di kembangkan, namun dapat diupayakan melalui pendekatan psikologis.

Dari sudut pandang inilah maka kompetensi yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pengembangan kompetensi adalah lebih menekankan pada unsur *knowledge, skill* dan *attitude*. Ketiga unsur inilah yang dapat digunakan untuk mengembBangkan kompetensi tenaga kerja dalam persaingan pasar kerja di era Masyarakat Ekonomi Asean

## KETENAGAKERJAAN DAN MEA

Dalam Undang undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, definisi ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada fakta sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Bekerja merupakan cara manusia mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia meskipun selalu harus dihadapkan dengan kenyataan terbatasnya lapangan kerja di negara ini.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memuat tujuan negara bahwa negarabertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan

sehingga hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah hak setiap warga negara

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk paling banyak di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat mengakibatkan jumlah angkatan kerja yang juga akan meningkat. Adanya MEA tentu akan memberikan dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah dengan adanya MEA, tentu akan memacu pertumbuhan investasi baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri dan ini akan membuka kesempatan kerja. Adapun dampak negatif MEA adalah dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut akan mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia. Dengan demikian mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang ketat. Saat MEA berlaku, dibidang ketenagakerjaan ada 8 (delapan) profesi yang telah disepakati untuk di buka yaitu insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi dan Akuntan ( Media Indonesia, Kamis 27 Maret 2014). Inilah yang menjadi ujian bagi masalah ketenagakerjaan karena sudah pasti setiap negara bersiap diri di bidang ketenagakerjaannya menghadapi MEA.

## **PROSES PEMBENTUKAN KOMPETENSI**

Perilaku terbentuk dari latar belakang, kondisi sosial dan informasi yang dimiliki individu, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap keyakinan dalam berperilaku, keyakinan normatif dan keyakinan pengontrol yang ada dalam individu. (Fieshbien dalam Isnaini 2009, hal 195) Dalam seorang individu ketiga keyakinan tersebut berpengaruh dalam proses internalisasi sehingga masing masing individu memiliki derajat yang berbeda. Keyakinan untuk berperilaku ini yang akan menghasilkan sikap dalam berperilaku. Apabila keyakinan bersikap atas dasar sebuah norma maka akan menghasilkan norma subyektif dalam diri individu tentang apa yang pantas dilakukan dan tidak pantas dilakukan. Sedangkan keyakinan terhadap kontrol akan menghasilkan kontrol perilaku individu yang didasarkan pada persepsi orang lain. Oleh karenanya perlu melihat proses yang terjadi dalam diri individu yakni sikap terhadap perilaku, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan yang akan menghasilkan niat untuk berperilaku.

Apabila tenaga kerja berkualitas ingin mendapatkan pangsa pasar maka tenaga kerja harus kompeten. Tenaga kerja yang kompeten adalah tenaga kerja yang mempunyai pemahaman terhadap kondisi lingkungan pekerjaannya, mempunyai ketrampilan yang bisa diandalkan serta mempunyai sikap kreatif dan inovatif dalam menghadapi permasalahan. Sehingga dengan demikian akan terbentuk karakter tenaga kerja handal yang mampu memberikan yang terbaik ditempat kerja sehingga dapat bersaing dipasar tenaga kerja internasional baik secara kemampuan maupun penghasilan.

Teori Fishbein tentang pembentukan kompetensi perlu implementasikan dalam perencanaan ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Dalam membentuk pengetahuan.

Calon tenaga kerja agar dapat memenuhi pasar tenaga kerja profesional yang memenuhi standart kualifikasi tenaga kerja Internasional harus memperoleh informasi yang lengkap dan akurat dari Disnaker. Calon tenaga kerja harus diberikan *knowledge* atau pemahaman dengan meningkatkan pendidikan calon tenaga kerja, karena pendidikan akan memberikan *know* dan *knowhow*. Calon tenaga kerja harus tahu dan mereka memahami dengan benar bagaimana dan selanjutnya harus diperbuat. Oleh karenanya partisipasi calon tenaga kerja dalam perencanaan sangat diperlukan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka terjadilah pergeseran konsep partisipasi di mana telah terjadi peralihan konsep partisipasi dari sekadar kepedulian terhadap “penerima derma” atau “kaum tersisih” menuju ke suatu kepedulian dengan pelbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Beberapa pengertian konsep partisipasi (Mikkelsen, 2003: 64) tersebut antara lain:

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- 2) Partisipasi adalah ”pemekaan” pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- 3) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang/kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- 4) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
- 5) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Berdasarkan pada konsep partisipasi tersebut di atas, maka partisipasi mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan.
- b. Kesetaraan dan Kemitraan. Pada dasarnya setiap orang mempunyai ketrampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk

menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

- c. **Transparansi.** Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d. **Kesetaraan Kewenangan.** Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e. **Kesetaraan Tanggung Jawab.** Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f. **Pemberdayaan.** Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain
- g. **Kerjasama.** Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumberdaya manusia.

Melihat hubungan di atas, maka partisipasi masyarakat dalam perencanaan ketenagakerjaan yaitu dengan mengembangkan partisipasi didasarkan atau berbasis pada permintaan setempat agar pembangunan yang dilaksanakan nantinya sesuai dengan kondisi masing-masing sektor dan spasial.

## 2. Dalam meningkatkan Ketrampilan

Ketrampilan calon tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi pasar tenaga kerja., untuk itu maka pelatihan dalam meningkatkan *skill* dapat menjadi pilihan. Pelatihan seharusnya menggambarkan sebuah proses pembelajaran instrumental dan pembelajaran komunikatif. Pembelajaran instrumental di harapkan calon tenaga kerja memiliki ketrampilan adaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja dan memecahkan permasalahan. Sedangkan pembelajaran komunikatif diharapkan calon tenaga kerja memiliki kepekaan terhadap perubahannilai-nilai budaya dan kemampuan berekspresi.

Apabila tenaga kerja Indonesia ingin bersaing di tingkat Asean maka calon tenaga kerja perlu di bekali dengan kemampuan berbahasa Asing (Inggris sebagai bahasa Internasional atau bahasa lokal di Asean misalnya bahasa korea, philipina)

Indonesia juga harus memberikan pembekalan pemahaman akan regulasi atau peraturan yang terdapat di berbagai negara di Asean dengan harapan calon tenaga kerja memahami nilai-nilai yang berlaku dalam negara yang di tuju.

### 3. Dalam meningkatkan konsep diri dalam berperilaku.

Selama ini disnaker lebih banyak memberika ketrampilan secara teknis, namun ketrampilan mental tidak diperhatikan. Oleh karenanya perlu di rencanakan pemberian ketrampilan mental dengan pembekalan motivasi dan tertanam jiwa semangat pada calon tenaga kerja. Ketrampilan mental inoilah yang akan membentuk kepribadian. Carl Rogers (dalam Fred Luthans, 2006 :228) kepribadian adalah bagaimana seseorang memahami dirinya dan memandang dirinya, juga nagaimana pola ukur karakter dalam dan karakter luar saling berinteraksi yang ditunjukkan dalam sikap. Lebih lanjut dikemukakan bahwa ciri kepribadian yang di sebut memiliki karakteristik “*big five*” yang akan menimbulkan kepuasan dalam bekerja. Adapun ciri kepribadian “*big five*” adalah :

- a. Kesungguhan yakni dapat diandalkan dalam bekerja, teratur, bekerjakeras, disiplin diri, gigih dan bertanggungjawab.
- b. Stabilitas Emosi, bersikap tenang, aman senang dan tidak khawatir
- c. Sifat menyenangkan; kooperatif, hangat, perhatian, watak baik, sopan dan dapat dipercaya.
- d. Ekstravers; dapat bersosialisasi, terbuka, banyak bicara, suka berteman.
- e. Terbuka pada Pengalaman; ingintahu, intelek, kreatif, sensitif, fleksibel dan imajinatif.

Oleh karena itu calon tenaga kerja harus memiliki ciri ciri “*big five*” sehingga memiliki daya saing ketrampilan mental atau kesungguhan yang kuat. Dan oleh karenanya diperlukan perencanaan yang komprehensif dalam memberikan bekal ketrampilan tenaga kerja.

## **PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL**

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, namun terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pembuatan tujuan antara lain: tujuan tidak terdefiniskan dengan baik, tujuan tidak realistik, tujuan berjumlah banyak dan tidak konsisten satu sama lain, tujuan tidak sesuai dengan tujuan pengambil keputusan lain.

Ciri-ciri perencanaan yang baik adalah sebagai berikut: a) Bersifat Publik, berarti bahwa perencanaan melibatkan masyarakat di dalam menyusun perencanaan tersebut, b) Berorientasi Masa Depan, berarti bahwa perencanaan menentukan tujuan yang akan dicapai di masa datang, c) Strategis, berarti bahwa perencanaan berisi langkah-langkah yang hendak dilakukan di dalam mencapai



tujuan organisasi, d) Proses Delibrate, berarti perencanaan merupakan suatu kesengajaan dan kesepakatan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingannya, e) Bersifat Taktis, berarti perencanaan berisi tindakan atau langkah-langkah yang sistematis untuk pencapaian tujuan.

Aktivitas perencanaan di sektor ketenagakerjaan dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia sebagai negara yang berkembang mempersiapkan diri mengembangkan segala sumberdaya yang dimilikinya. Daya saing tenaga kerja dalam kancah regional ASEAN menjadi lebih kompetitif. Oleh karenanya guna peningkatan daya saing SDM Indonesia maka pemerintah perlu mempersiapkan beberapa strategi kebijakan untuk meningkatkan kompetensi tenagakerja.

Perencanaan merupakan serangkaian aktivitas perencanaan yang meliputi: a) melakukan identifikasi dan analisis stakeholders, b) penentuan dan penguatan kapasitas mitra lokal, c) penyepakatan dengan stakeholders non pemerintah tentang perencanaan partisipatif, d) penjaringan dan perumusan aspirasi stakeholders non pemerintah tentang agenda dan strategi pembangunan daerah, e) perumusan mekanisme dan f) monitoring dan evaluasi.

Terkait dengan aktifitas perencanaan tersebut maka dalam perencanaan sektor ketenagakerjaan yang harus dilakukan pemerintah meliputi :

1. Melakukan analisis situasi pangsa pasar tenaga kerja di tingkat ASEAN, dilakukan untuk mengetahui pasar tenaga kerja luar negeri membutuhkan permintaan tenaga kerja yang seperti apa. Dan sebaliknya Pemerintah juga harus dapat memberikan informasi kepastian pada tenaga kerja atas kompetensi yang di miliki misalnya dengan menerbitkan sertifikat kompetensi kerja yang bersifat global.
2. Pemerintah dalam hal ini Ketenagakerjaan membuat kerangka kualifikasi nasional agar, exodus tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia memiliki kualifikasi nasional yang sama untuk dapat bekerja di Indonesia.
3. Strategi meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja Indonesia dengan meningkatkan kompetensi pengetahuan, ketrampilan dan perilaku.
4. Menyusun mekanisme dan melakukan koordinasi secara integral dengan seluruh pemangku kepentingan yang bersinggungan langsung dengan dunia kerja maupun tidak langsung. Misalnya lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi, pengusaha, masyarakat pencari kerja, dunia pendidikan pencetak tenaga kerja, lembaga vokasi dan lain lainnya.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi dari setiap program yang terkait dengan ketenagakerjaan apakah sudah mencapai tujuan atau belum.

## KESIMPULAN

Dalam rangka menghadapi persaingan Global dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor ketenagakerjaan maka di perlukan perencanaan strategis yang baik dengan mengacu tujuan utama yakni terciptanya sumberdaya Manusia yang kompetitif dan profesional. Dalam kerangka tersebut maka aktifitas perencanaan harus meliputi :

- Melakukan analisis situasi pangsa pasar tenaga kerja di tingkat ASEAN.
- Pemerintah dalam hal ini Ketenagakerjaan membuat kerangka kualifikasi nasional.
- Strategi meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja Indonesia dengan meningkatkan kompetensi pengetahuan, ketrampilan dan dan perilaku.
- Menyusun mekanisme dan melakukan koordinasi secara integral dengan seluruh pemengku kepentingan yang bersinggungan langsung dengan dunia kerja maupun tidak langsung.
- Melakukan monitoring dan evaluasi dari setiap program yang terkait dengan ketenagakerjaan.

Adapun untuk meningkatkan kompetensi ketenagakerjaan di Indonesia dapat dilakukan dengan strategi berikut :

- Memberikan pengetahuan melalui peningkatan pendidikan Formal maupun informal.
- Memberikan ketrampilan melalui pelatihan baik ketrampilan berkomunikasi maupun ketrampilan mental.
- Meningkatkan konsep diri calon pencari kerja dengan peningkatan *skill* mencapai kepribadian *Bigfive*.\*\*\*

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajzen, I. 1991, The Theory of Planned Behavior and Human Decision Processes, 50, 179 -211
- Isnaini, R. 2009. Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Analisis Pasar Tenaga Kerja, Graha Ilmu. Yogyakarta
- Luthans, Fred. 2006. Perilaku Organisasi, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Mikkelsen. 2003. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya upaya Pemberdayaan, sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Mudrajad, Kuncoro. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Erlangga. Jakarta.
- Nugroho. Riant, 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Prihadi, I. 2004. Dasar Kompetensi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Penghargaan, HRD Club. Jakarta

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan



**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL 2015**  
**PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA**  
**MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**  
**( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI**  
**INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**PEMBANGUNAN E GOV SEBAGAI BASIS**  
**KEUNGGULAN DALAM MENGHADAPI ERA**  
**MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**  
**(STUDI PENGEMBANGAN EGOV KOTA**  
**SEMARANG)**

**Oleh Rihandoyo**

**ABSTRAK**

*Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu bentuk kerjasama perkonomian diantara negara-negara yang tergabung didalam ASEAN. MEA merupakan integrasi perkonomian yang berupa kesepakatan untuk menciptakan perdagangan bebas yang berupaya menghilangkan hambatan ekonomi. Hal ini menjadikan MEA sebagai peluang bagi dan tantangan bagi setiap anggotanya mendorong keunggulan bersaing. ICT dan E Gov merupakan salah satu infrastruktur yang menjadi faktor keunggulan bersaing dewasa ini. Infrastruktur TIK akan memperlancar informasi, mendorong terciptanya good governance, meningkatkan mutu pelayanan serta mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas. Hal tersebut direspon oleh pemerintah sejak lama dengan menyusun Strategi Nasional Pengembangan e-Government (e-Government Development Framework) yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan detail teknis di bidang e-Government. Kota Semarang sebagai kota dagang dan jasa didalam menyongsong MEA telah berupaya membangun TIK / E gov melalui Master Plan Information Technology yang memberikan arah dan pentahapan pembangunan TIK / E gov.*

*Kata Kunci : MEA, ASEAN, ICT, E Gov, Master plan.*

**A. LATAR BELAKANG**

Isu globalisasi merupakan sebuah isu yang selalu didengungkan di era masyarakat modern dewasa ini, isu globalisasi menembus berbagai bidang termasuk bidang ekonomi pembangunan. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses memudarnya batas-batas antar negara sehingga pertukaran informasi, sumber daya serta komoditas barang dan jasa akan semakin lancar dan mudah. John Tomlison (1996) mendefinisikan globalisasi sebagai perkembangan interaksi yang semakin kompleks antara masyarakat, budaya, lembaga dan menjadikan

individu diseluruh dunia yang menyebabkan berkurangnya batasan ruang dan waktu yang dibutuhkan baik secara fisik maupun representasi yang menyebabkann dunia terlihat semakin kecil dan menjadikan hubungan antara penduduk menjadi semakin dekat. Thomas friedman (1996) mengartikan globalisasi sebagai melonggarnya batasan negara melalui perjanjian pasar bebas, internet dan integrasi keuangan dalam hubungan antara negara yang saling menguntungkan dan sekaligus menjadikan kompetisi yang semakin keras.

Globalisasi menjadikan dunia terintegrasi kedalam sistem pasar dimana perdagangan internasional menjadi sebuah mesin ekonomi utama. Oleh karena itu perdagangan antara negara harus difasilitasi melalui liberaliasasi perdagangan, menghapus hambatan perdagangan baik tarif dan non tarif, Selain itu peranan negara juga harus dikurangi melalui privatisasi pelayanan publik dan negara harus mendorong terciptanya situasi pasar yang kondusif. Kondisi inilah yang mendorong terciptanya blok-blok ekonomi regional antara negara yang bertujuan untuk memperlancar arus faktor produksi, mengurangi hambatan moneter, mengurangi hambatan perdagangan dan ongkos transportasi. Intinya pembentukan blok-blok perdagangan di era globalisasi dewasa adalah efisiensi.

Salah satu blok perekonomian regional yang terbentuk adalah ASEAN Economic Community (AEC) atau dalam bahasa Indonesia sering disebutsebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA adalah salah satu bentuk kerjasama perekonomian diantara negara-negara yang tergabung didalam ASEAN. MEA merupakan integrasi perekonomian yang berupa kesepakatan untuk menciptakan perdagangan bebas yang menghilangkan hambatan perdaganagan. Dalam blueprint MEA secara ringkas bertujuan meningkatkan daya saing negara ASEAN melalui empat pilar yaitu :

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung denganelemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih luas.
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hakatas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce.
3. ASEAN sebagai kawasan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk Negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam.)
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasandan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. (ASEAN; 2008,6)

Terbentuknya MEA tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia, apabila Indonesia mampu memanfaatkan peluang maka Indonesia akan memperoleh akses pasar yang lebih luas mengingan bangsa Indonesia telah memiliki modal dasar berupa kekayaan alam dan jumlah penduduk yang terbesar diantara negara ASEAN. Tetapi apabila bangsa Indonesia gagal memanfaatkan

peluang maka Bangsa Indonesia hanya menjadi lahan subur bagi bangsa lain untuk memasarkan hasil produksinya dan sumber dayanya. .

Dalam persaingan saat ini indeks daya saing Indonesia masih rendah, sebagaimana dilansir *World Economic Forum* dalam *Global Competitiveness Report 2014-2015* di level ASEAN sendiri, peringkat Indonesia ini masih kalah dengan tiga negara tetangga, yaitu Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang berada di peringkat ke-31. Namun demikian, posisi Indonesia diposisi 34 dari 144 negara ini masih mengungguli Filipina yang berada di peringkat 52, Vietnam di peringkat 68, Laos di peringkat 93, Kamboja di peringkat 95, dan Myanmar di peringkat 134. Indikator yang dinilai dalam menentukan indeks daya saing ini adalah didasarkan pada 12 pilar daya saing, yaitu pengelolaan institusi yang baik, infrastruktur, kondisi dan situasi ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tingkat atas dan pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, ukuran pasar, lingkungan bisnis, dan inovasi.

Berdasarkan indikator diatas salah kata kunci untuk dapat memanfaatkan peluang MEA dan memenangkan persaingan adalah efisiensi, artinya bahwa efisiensi dalam segala hal akan dapat mereduksi biaya dan waktu. Efisiensi dapat tercipta apabila pemerintah dan masyarakat berhasil memangkas birokrasi, menekan ekonomi biaya tinggi serta memperlancar arus barang dan jasa serta informasi. Di Era modern dewasa ini peran Teknologi Informasi (TI) memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari dukungan perkembangan teknologi internet dan teknologi wireless memungkinkan arus informasi menjadi lebih cepat. Negara-negara diberbagai belahan dunia terus mengembangkan dan menginvestasikan TI pada sektor publik agar lebih efektif, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, perkembangan TI telah direspon seluruh negara di dunia sebagai salah satu basis pembangunan tidak terkecuali di MEA. Didalam Blueprint MEA butir B tentang *Competitive Economic Regional* menyebutkan salah satu elemennya adalah *Information Infrastructure Development*: Infrastruktur informasi yang aman dan terkoneksi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing di kawasan ini. Upaya telah dilakukan untuk memfasilitasi interkoneksi dan interoperabilitas teknis di antara sistem ICT, memanfaatkan jaringan nasional di setiap negara yang ada serta membangun infrastruktur informasi regional. Penekanannya untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dalam penggunaan internet dan keamanan transaksi elektronik untuk pembayaran dan pemukiman.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang terbesar mau tidak mau harus mengembangkan TI sebagai salah satu basis keunggulan kompetitif. Didalam United Nations E-Government Survey 2014 yang dilakukan oleh *United Nations Department of Economic and Social Affairs* menunjukkan bahwa Indonesia berada pada ranking 106 dibawah Singapura (3), Malaysia (52), Brunai (86), Filipina (95), Vietnam (99), Thailand (102). Hal ini berarti bahwa guna mendorong keunggulan kompetitif pemerintah harus mendorong pembangunan e gov dan TIK baik pemerintah pusat maupun daerah.

Kota Semarang yang mempunyai Visi Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa, Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera dalam rangka menghadapi MEA juga wajib untuk mempersiapkan diri baik dari segi Infrastruktur, SDM maupun komponen-komponen kelebagaannya. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa salah satu infrastruktur yang penting untuk dikembangkan adalah TIK yang aplikasinya didunia pemerintahan adalah elektronik government (egov). E Gov yang baik diharapkan akan memperlancar informasi, komunikasi dan transaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha.

## B. PERMASALAHAN

Menjelang diberlakukannya kesepakatan pembentukan blok perdagangan MEA dimana hambatan mobilitas faktor produksi dan hasil produksi diantara negara-negara ASEAN semakin pudar, menjadikan MEA sebagai Peluang dan Tantangan bagi seluruh negara yang tergabung didalamnya. Oleh karena itu setiap negara wajib membuat kebijakan yang mendorong keunggulan kompetitifnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi Kota Semarang dalam menyongsong MEA adalah bagaimanakah kebijakan pembangunan e gov dalam rangka menghadapi MEA ?

## C. TELAAH PUSTAKA

Salah satu fungsi utama dari pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada warga negaranya, seiring dengan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan maka dikembangkanlah berbagai jenis mode pelayanan salah satunya yang sedang berkembang dengan pesat adalah pelayanan melalui elektronik atau disebut dengan *electronic government* (egov). Konsep Egov telah berkembang menjadi banyak versi dan sudut pandang. United Nation Development Programme (UNDP) menyatakan definisi electronic government yaitu

*“E Government is the Application of information and communication technology (ICT) by government agencies” (Indrajit; 2004, 3)*

Pemerintah Amerika Serikat mendefinisikan Egov sebagai berikut,

*“The use of modern ICT in the modernization of our administration which comprise the following classes action : 1) computerization designed to enhance operational efficiency within individual departements and agecies, 2) computerization services to citizen and fiem often impliyng integration among services of deifferent departement and agencies, 3) Provision of ICT acces to final users of government services and information”*

Pembangunan e gov seiring dengan pesatnya perkembangan TIK dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin baik. Pembangunan E gov bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah terhadap pemangku kepentingan.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
3. Meningkatkan efisiensi biaya komunikasi, administrasi dan interaksi.
4. Menciptakan peluang pendapatan.
5. Meningkatkan responsifitas terhadap permasalahan dan perubahan.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

Egov sebuah kegiatan yang tidak terjadi secara instan, namun merupakan kegiatan yang berevolusi yang pembangunannya melalui beberapa tahapan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan didalam membangun sebuah sistem egov disuatu negara atau daerah antara lain dana, SDM dan jaringan. Beberapa penulis menuliskan tahapan-tahapan pembangunan egov berdasarkan negara atau daerah yang dimatinya.

Christopher G. Reddick dalam tulisannya yang bertajuk *A two-stage model of e-government growth: Theories and empirical evidence for U.S. cities* yang ditulis didalam *Journal Government Information Quarterly* 21 (2004) 51–64 menekankan bahwa terdapat dua tahap perkembangan eGov di Amerika yaitu :

1. *The first stage of growth (cataloging of information) is initial efforts of governments to establish an online presence. Cataloging involves presenting information about government and its activities on the Web. At this stage, the information is nontransactional in nature. Online presence saves the government time and money since staff are oftentimes consumed with answering basic questions about government services and procedures. A Web presence reduces the workload of street level bureaucrats because it is a functional equivalent to being open twenty-four hours a day, seven days a week.*
2. *The second stage of e-government growth is the transaction phase. This occurs when online cities allow citizens to transact with government electronically by putting databases online so that citizens can pay taxes, fines, or fees. (Reddick; 2004, 52)*

Reddick menyatakan bahwa perkembangan egov terbagi menjadi dua tahapan yaitu tahapan pengumpulan dan penyediaan informasi kepada publik dan tahapan selanjutnya adalah transaksi. Didalam kedua tahapan ini penggunaan egov ditekankan pada upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta jangkauan informasi kepada publik.

Jika Reddick membagi tahapan pembangunan egov mejadi 2 tahapan saja, lain halnya dengan G. David Garson dalam bukunya *Handbook of Research on Public Information Technology* menuliskan egov merupakan sebuah evolusi yang menurut Layne & Lee terdapat empat tahapan yaitu :

- Stage 1: *Cataloging. Online presentation of information.*
  - Stage 2: *Transaction. Limited forms and services available online.*
  - Stage 3: *Vertical integration. Top down links of different systems.*
  - Stage 4: *Horizontal integration. Links across different functional units.*
- (Garson; 2008, 3)



Sedangkan menurut Indrajit seperti yang yang dikutip dari Bank Dunia tahapan perkembangan egov utamanya terbagi menjadi tiga tahapan yaitu :

1. *Publish*

Dalam tahapan publish ini komunikasi hanya terjadi dalam satu arah, dimana pemerintah hanya mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain melalui internet.

2. *Interact*

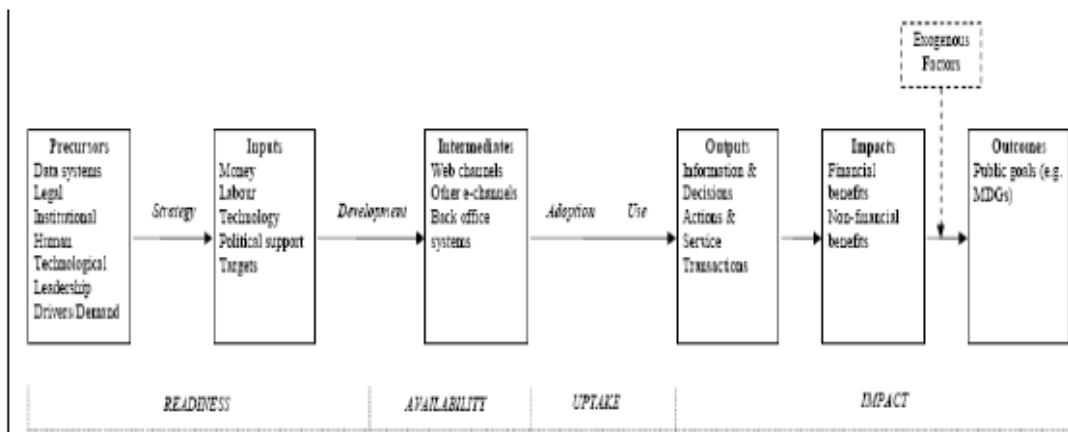
Di dalam tahapan interact terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang bekepentingan. Terdapat dua jenis aplikasi yang bisa dipergunakan. Pertama, adalah situ berbentuk portal yang terkait bagi mereka yang menginginkan searching data dan informasi, Kedua, Pemerintah menyediakan kanal bagi pengguna yang ingin berdiskusi dengan unit-unit pemerintah bagi secara langsung (chatting) maupun tidak langsung (email).

3. *Transact*.

Pada tahapan ini komunikasi terjadi dalam dua arah seperti yang ada pada tahap transact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan data atau uang dari satu pihak ke pihak lainnya.

Tahapan pembangunan egov tersebut akan berjalan seperti yang diharapkan apabila mendapatkan dukungan dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan e government. Tamara Almarabeh (2010) memperkenalkan model yang disebut sebagai e gov value chain, adapun modelnya adalah sebagai berikut :

Gambar 1  
E go Value Chain Model



Model ini merumuskan model input dan output dari program e gov, input tersebut meliputi tenaga kerja yang trampil, teknologi dan komunikasi yang baik, ditambah dengan dukungan anggaran dari pemerintah serta dukungan pimpinan yang kuat. Hasil yang diharapkan dari komponen tersebut adalah pelayanan dan informasi elektronik yang baik serta cepat. (Tamara 2010: 29).

## D. PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Pengembangan E Gov di Indonesia

Pembangunan e-Government di Indonesia diarahkan untuk mengembangkan pengelolaan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik lebih efektif dan efisien. Pemerintah melalui INPRES No. 3 Tahun 2003 telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (*e-Government Development Framework*) yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan detail teknis di bidang e-Government. Kebijakan bertujuan agar pengembangan e-Government dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu. Agar kebijakan ini dapat berhasil maka masih diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan yang konsisten dan saling mendukung.

Penerapan e-gov di setiap lembaga pemerintah mengacu kepada pentahapan pengembangan e-gov secara nasional, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga pemerintah yang mencakup:

- a. prioritas layanan elektronik yang akan diberikan;
- b. kondisi infrastruktur informasi yang dimiliki;
- c. kondisi kegiatan layanan saat ini;
- d. kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Jangka waktu penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi tetap dalam kerangka rencana penerapan e-government secara nasional. Pentahapan dalam blue print e-government di setiap lembaga pemerintah mengikuti:

Tingkat Persiapan, antara lain:

- a. pembuatan situs web pemerintah (lihat buku Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah) di setiap lembaga;
- b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan e-government;
- c. penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk *Multipurpose Community Center* (MCC), Warung dan kios Internet, dan lain-lain;
- d. sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan internal;
- e. pengembangan motivasi kepemimpinan (*e-leadership*) dan kesadaran akan pentingnya manfaat e-government (*awareness building*);

f. penyiapan peraturan pendukung.

Tingkat Pematangan, antara lain:

- a. pembuatan situs informasi layanan publik interaktif, antara lain dengan menambahkan fasilitas mesin pencari (search engine), fasilitas tanya jawab dan lain-lain;
- b. pembuatan hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya (hyperlink).

Tingkat Pemantapan, antara lain:

- a. Penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik antara lain dengan menambahkan fasilitas penyerahan formulir, fasilitas pembayaran dan lain-lain;
- b. penyatuan penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga lain (interoperabilitas).

Tingkat Pemanfaatan, antara lain :

- a. Pembuatan berbagai aplikasi untuk pelayanan G2G (*Government to Government*), G2B (*Government to Bussines*) dan G2C (*Govern-ment to Community*) yang terintegrasi;
- b. Pengembangan proses layanan *e-Government* yang efektif dan efisien;
- c. Penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (*best practice*).  
.( Harijadi, 2005:1)

Berdasarkan blueprint pembangunan e gov di Indonesia dapat dijelaskan bahwa langkah-langkah pemerintah telah dirancang secara konprehensif agar egov di Indonesia dimasa yang akan datang sesuai dengan tujuan. Pengembangan e gov sesuai dengan tahapan-tahapan dan faktor yang dikemukakan Tamara diatas sebagai syarat keberhasilan e gov, adadun tahapan tersebut adalah ;

1. *Readness*, tahapan ini bertujuan untuk mempersiapkan baik masyarakat maupun aparatur pemerintah. Didalam lingkup organisasi diperlukan pengembangan motivasi kepemimpinan sehingga tercipta kesadaran akan pentingnya manfaat e-government (*awareness building*). Disamping itu pemerintah melakukan sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan internal.
2. *Aviability*, tahapan ini dilukkan dengan melakukan pembuatan situs web pemerintah di setiap lembaga pemerintah. Agar masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan e gov ini pemerintah akan memfasilitasi penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk *Multipurpose Community Center* (MCC), Warung dan kios Internet, dan lain-lain.
3. *Uptake*, pada tahapan ini pemerintah berencana untuk Penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik antara lain dengan menambahkan fasilitas penyerahan formulir, fasilitas pembayaran dan lain-lain, serta Pembuatan berbagai aplikasi untuk pelayanan G2G (*Government to Government*), G2B (*Government to Bussines*) dan G2C (*Govern-ment to Community*) yang terintegrasi.
4. *Impact*, dalam blueprint egov Indonesia dampak yang diharapkan adalah proses layanan *e-Government* yang efektif dan efisien serta menuju

kualitas layanan terbaik. Hal inilah diharapkan menjadi salah satu faktor yang mendukung daya saing Indonesia dalam menghadapi MEA dimasa yang akan datang.

## 2. Pembangunan E Gov di Kota Semarang dalam rangka menghadapi persaingan MEA

Kota Semarang sebagai kota dagang dan jasa pada era Masyarakat Ekonomi Asean akan bersaing dengan seluruh kota baik di dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu bentuk persaingan tersebut adalah dalam rangka memberikan informasi tentang barang dan jasa yang ditawarkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, pada intinya semakin lancar dan efisien informasi maka potensi keunggulan bersaing akan semakin bersaing. Kota Semarang menyadari akan hal tersebut, dewasa ini giat melakukan pembangunan dibidang TIK atau E gov.

Pembangunan TIK kota Semarang adalah “Terwujudnya teknologi informasi Pemerintahan Kota Semarang yang terintegrasi untuk mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang efektif dan efisien”. Kalimat visi tersebut diatas mengandung tiga kata kunci sekaligus cita-cita yang hendak dicapai dalam pembangunan egov sekaligus menjadi kunci bagi keunggulan bersaing yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) akan lebih memberikan kepastian dalam segala urusan yang berhubungan dengan dunia usaha. Ketidakpastian pengelolaan birokrasi mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang dapat menghambat bisnis dan investasi. Penggunaan TIK dapat mereduksi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah.
2. Peningkatan kualitas pelayanan terutama yang berhubungan dengan bisnis dan perijinan investasi akan mendorong terciptanya iklim usaha dan investasi yang menarik. Penggunaan TIK memungkinkan pelayanan dilakukan dengan cepat 7/24, sehingga kapan pun dimana pun pelayanan dapat diberikan.
3. Pemerintahan yang efektif dan efisien artinya bahwa pemerintahan dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan menggunakan sumber daya yang sesedikit mungkin. Penggunaan TIK memungkinkan penghematan penggunaan sumber daya dan mempercepat penyelesaian tugas.

Tujuan dari pembangunan e gov kota Semarang adalah

1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
2. Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif
3. Perbaiki organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan.

Sedangkan sasaran Pembangunan e-Gov Kota Semarang adalah :

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional
3. Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah

Sedangkan tahapan-tahapan pembangunan e gov kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2011 adalah tahapan publish yaitu dengan Coverage jaringan, Portal lintas instansi dan Informasi Online.
2. Tahun 2012 adalah tahapan transaction yaitu Integrasi pelayanan, layanan publik online dan investasi.
3. Tahun 2013 adalah tahapan transformation yaitu Dokumen digital, Back Office berbasis TI dan Jaringan Intranet.
4. Tahun 2014 adalah tahapan inter operability yaitu dengan Kapasitas jaringan data lintas instansi, Sekuritas dan otoritas.
5. Tahun 2015 adalah tahapan seamless yaitu Layanan 'Online' satu pintu, Front Office dan Back Office terintegrasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan target pembangunan e gov Kota Semarang maka pemerintah Kota Semarang berupaya untuk membangun faktor-faktor penentu keberhasilan egov. Pemerintah Kota Semarang berupaya melakukan perbaikan dari sisi input tersebut meliputi tenaga kerja yang trampil, teknologi dan komunikasi yang baik, ditambah dengan dukungan anggaran dari pemerintah serta dukungan pimpinan yang kuat. Agenda pembangunan e gov Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Public Sharing Information, dengan cara membagnun portal dan sistem untuk berbagi informasi dengan masyarakat 'single windows'
2. Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, dengan penggunaan teknologi informasi untuk proses pelayanan publik,
3. Paperless Administration. Melakukan reengineering business process untuk mendukung pertukaran dokumen secara elektronik untuk mewujudkan efisiensi penyelenggaraan pemerintah.
4. Standarisasi data dan informasi, dengan cara melakukan sharing data dan informasi diantara instansi pemerintah dengan tingkat keamanan yang tinggi.
5. Penyelarasan antara teknologi informasi dengan organisasi, manajemen dan proses bisnis pemerintahan,

Pembangunan dibidang TIK dan Egov yang dilakukan Kota Semarang diharapkan akan memperlancar informasi dan komunikasi yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan efisiensi serta produktifitas. Namun masih banyak hambatan untuk menjadikan pembagunan e gov sebagai andalan dalam memenangkan persaingan. Hambatan-hambatan yang muncul antara lain :

1. Komitmen, komitmen pemerintah yang berkuasa untuk meneruskan pembangunan TIK egov menjadi kunci kesinambungan pembangunan e gov dimasa yang akan datang.
2. Kepastian Hukum, masih banyak hal-hal yang berhubungan dengan e gov yang belum diatur dengan payung hukum yang jelas. Payung hukum yang jelas akan memberikan rasa aman kepada pemakainya.
3. Budaya Kerja, Perubahan cara kerja dari offline menjadi online harus diikuti dengan perubahan budaya dan nilai-nilai kerja organisasi.
4. Struktur dan Tata Kerja, perubahan cara kerja harus diikuti dengan perubahan terhadap tata kerja organisasi.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penjelasan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu bentuk kerjasama perkonomian diantara negara-negara yang tergabung didalam ASEAN. MEA merupakan integrasi perkonomian yang berupa kesepakatan untuk menciptakan perdagangan bebas yang berupaya menghilangkan hambatan ekonomi. Hal ini menjadikan MEA sebagai peluang bagi dan tantangan bagi setiap anggotanya mendorong keunggulan bersaing.
2. Pembangunan ICT dan E Gov serupakan salah satu infrastruktur yang menjadi faktor keunggulan bersaing dewasa ini. Infrastrutur TIK akan memperlancar informasi, mendorong terciptanya good governance, meningkatkan mutu pelayanan serta mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas.
3. Pemerintah melalui INPRES No. 3 Tahun 2003 telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (*e-Government Development Framework*) yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan detail teknis di bidang e-Government. Pemerintah menciptakan prioritas layanan elektronik, infrastruktur informasi dan anggaran dan sumber daya manusia.
4. Pemerintah kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa serta merupakan bagian dari MEA telah berupaya mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dilakukan pentahapan publish, transaction, transformation, interoperability dan Seamless.

## 2. Saran

Saran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Didalam rangka meningkatkan komitmen pembangunan ICT E Gov perlu dibuat perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengah sehingga akan mengikat kepala daerah siapapun yang berkuasa untuk melaksanakannya.
2. Didalam upaya untuk memberikan kepastian hukum maka perlu dilakukan kajian-kajian aspek perlindungan hukum dalam pelaksanaan TIK / E Gov di kota Semarang.
3. Guna meningkatkan sinergi pembangunan TIK / E gov maka diperlukan lembaga koordinator dan regulator yang jelas dan kuat sehingga pembangunan e gov antar daerah dan antar bidang lebih bersinergi sehingga tujuan berdirinya Indonesia Single Portal bukan mustahil untuk dilakukan.\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

ASEAN, *Asean Economic Community Blueprint*, Jakarta, 2008.

Christopher G. Reddick, A two-stage model of e-government growth: Theories and empirical evidence for U.S. cities yang ditulis didalam journal *Government Information Quarterly* 21, 2004.

David Garson, *Handbook of Research on Public Information Technology*, North Carolina, USA, 2008.

Djoko Agung Harijadi, *Blueprint Aplikasi E-Government Pemerintah Daerah*, Bandung, Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia

Hemant B. Chittoo, Needesh Ramphul, and Bhisum, Nowbutsing, *Globalization and Public Sector Reforms in a Developing Country*, *Culture Mandala: Bulletin of the Centre for East-West Cultural & Economic Studies*, Vol. 8, Issue 2, December 2009, pp.30-51

Indrajit, Richardus, *Electronic Government*, Yogyakarta, Andi Press, 2004.

Tamara Almarabeh, A General Framework for E-Government: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success, *European Journal of Scientific Research* ISSN 1450-216X Vol.39 No.1, 2010.

World Economic Forum, *Global Competitiveness Report 2014-2015*, Geneva, 2015

Pemerintah Kota Semarang, *Master Plan Information Technology 2010-1025*



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**PENGARUH KARAKTERISTIK BISNIS  
TERHADAP PENGELOLAAN PENGETAHUAN  
PADA UKM KULINER DI KOTA SEMARANG,  
JAWA TENGAH**

**Hari Susanta Nugraha<sup>1</sup>**

**ABSTRAKS**

*Jumlah UMKM yang masif dan perkembangan keanekaragaman teknologi kuliner mendorong munculnya bisnis perajinan usaha kuliner yang demikian pesat. Karakteristik usaha mikro yang identik dengan struktur bisnis yang sederhana; kecepatan proses, prosedur, dan aturan perajinan produk; sumberdaya manusia yang terbatas; fleksibilitas nilai dan perilaku bisnis; dan dinamika pasar yang berkembang mendorong unit usaha bisnis usaha kuliner di Kota Semarang untuk mampu mengelola pengetahuan untuk ditransfer kepada pasarnya. Permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana membangun relevansi antara karakteristik unit bisnis dengan proses mengubah informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi pasar. Riset ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik usaha mikro dalam bidang rekayasa usaha kuliner dalam proses pengelolaan modal pengetahuan. Riset ini menggunakan metode non-probability sampling kepada 100 perajin usaha kuliner di Kota Semarang dan sekitarnya. Melalui analisis kecenderungan dan regresi ditentukan bahwa; variabel kepemilikan dan struktur bisnis terhadap pengelolaan modal pengetahuan didapatkan nilai  $r$  sebesar 0,308. variabel proses, prosedur, dan aturan terhadap pengelolaan modal pengetahuan didapatkan nilai  $r$  sebesar 0,767; variabel pelanggan dan pasar terhadap pengelolaan modal pengetahuan didapatkan nilai  $r$  sebesar 0,339. variabel sumberdaya manusia terhadap pengelolaan modal pengetahuan didapatkan nilai  $r$  sebesar 0,418. variabel budaya dan perilaku organisasi terhadap pengelolaan modal pengetahuan didapatkan nilai  $r$  sebesar 0,223. Unit bisnis perlu membangun skema prosedur desain, aturan, dan sistematika proses rekayasa usaha kuliner.*

*Kata Kunci; Rekayasa usaha kuliner; akuisisi pengetahuan; budaya dan perilaku bisnis*

---

<sup>1</sup> [harisusanta.nugraha@gmail.com](mailto:harisusanta.nugraha@gmail.com) Jurusan Administrasi Bisnis FISIP Univ. Diponegoro Semarang



## 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Mengacu kepada peran UKM menurut *The World Bank* yakni; *pertama*, meningkatkan suasana persaingan dan kewirausahaan, selain itu juga mempunyai keuntungan lain pada efisiensi pada sektor ekonomi, inovasi dan pertumbuhan produktivitas. *Kedua*, secara umum UKM lebih produktif daripada usaha besar. Di Indonesia, sumbangan UKM terhadap PDB sebesar 79,20%. Selain itu, dalam hal sumbangan terhadap PDB Indonesia, UKM memiliki sumbangan mencapai hingga lebih dari 60% dari total PDB pada tahun 2012-2014. Melihat kokohnya posisi UKM dalam perekonomian Indonesia, maka cukup alasan untuk menganalisis lebih mendalam bagaimana UKM dapat berkembang dan tetap bertahan pada ekonomi yang fluktuatif. Tekanan lingkungan makro tersebut mengarahkan institusi bisnis untuk lebih menghargai peran penting kemampuan membangun jaringan bisnis. Melalui jaringan bisnis ini mengalir informasi yang penting dan berguna bagi perajinan bisnis. Informasi dalam jejaring bisnis merupakan sebuah pengetahuan penting dalam pasar yang semakin kompetitif. Pengetahuan apabila digunakan dengan tepat dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam berkompetisi (Ferdinand, 2008).

Penelitian dengan unit analisis UKM usaha kuliner yang berdomisili di Kota Semarang. Hal ini disebabkan oleh modal dasar yang digunakan dalam industri ini adalah bersumber pada karakter kewirausahaan dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini sejalan dengan pendapat Setiarso (2006), bahwa secara umum perkembangan industri usaha kuliner dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni; manusia, informasi, dan teknologi.

Pertumbuhan industri usaha kuliner dari Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik, meskipun tidak sebesar beberapa negara dari kawasan Asia seperti India, Jepang, dan China. Namun apabila dibandingkan dengan besarnya jumlah penduduk, maka dapat dikatakan bahwa jumlah produksi keanekaragaman usaha kuliner yang dapat dihasilkan oleh Indonesia merupakan yang terendah di Asia. Apabila usaha kuliner merupakan hasil pengelolaan pengetahuan, maka hal inilah yang mengindikasikan rendahnya kapabilitas SDM dalam penyerapan informasi dan proses mengolah pengetahuan menjadi produk kuliner .

Penelitian menetapkan unit analisis pada unit perajin usaha kuliner yang ada di Kota Semarang, karena pertumbuhan industri yang kondusif di Kota Semarang. Beberapa hal yang spesifik mendorong pertumbuhan industri usaha kuliner di Kota Semarang adalah; kemudahan akses informasi yang cukup luas

tersedia dan secara pasar, banyaknya pasar konsumen di kawasan kota yang menjadi pasar untuk memanfaatkan usaha kuliner, serta bahan baku. Selama beberapa dekade dalam perajinan suatu usaha kuliner, beberapa perusahaan usaha kuliner mencari suatu metode yang efektif dalam menangani suatu bisnis kuliner. Hal ini dilakukan supaya dalam pemrosesannya dapat berlangsung secara efektif dengan prinsip manajemen yang baik. Akibat informasi yang deras mengalir dari berbagai sumber dari era globalisasi, maka hal tersebut mendorong bisnis menghasilkan produk yang berkualitas dan jaminan yang baik. Namun dalam perkembangannya pertumbuhan hasil dari industri tersebut tidak sebanding dengan perkembangan jumlahnya apabila dibanding dengan negara-negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dalam perajinan usaha kuliner, serta kurangnya ide dalam produk dan inovasi. Berdasarkan uraian diatas, maka masalah pada penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh karakteristik bisnis terhadap penciptaan dan akuisisi pada UKM yang bergerak di bidang perajinan usaha kuliner di Kota Semarang.

## 2. METODE DAN KERANGKA KERJA RISET

*Knowledge Management* telah banyak memberikan berbagai definisi (Mei, Nie, 2007). Pengelolaan pengetahuan, sekarang menjadi *domain* yang berbeda dari penelitian dan praktek, yang bersumber dari banyak disiplin ilmu. Pengelolaan Modal pengetahuan di sektor UKM banyak dipengaruhi oleh kemampuan memahami modal pengetahuan (Rahardjo, Timbul: 2010). Dengan demikian ketergantungan kepada elit penguasa di perusahaan akan memengaruhi pelaksanaan manajemen pengetahuan. Berdasarkan kajian Wong dan Aspinwall (2004), karakteristik unit usaha dalam rangka pengelolaan modal pengetahuan ditentukan oleh beberapa faktor, yakni; kepemilikan dan struktur manajemen; pelanggan dan pasar; sistem, proses dan prosedur; pengelolaan sumber daya manusia; dan budaya dan perilaku. Hasil tersebut juga digunakan oleh Deifench (2006) dalam penelitiannya yang menunjukkan keterkaitan antara karakteristik unit usaha dengan kemampuannya mengelola pengetahuan. Karakteristik meliputi;

- a. ***Karakter pengelolaan manajerial***, dimana sebagian besar pemilik UKM berperan sebagai pemilik merangkap manajer dan juga memainkan peran penting sebagai inisiator strategi perusahaan. Keinginan mereka untuk menerapkan sistem pengelolaan pengetahuan, termasuk merumuskan visi, mengalokasikan sumber daya untuk memfasilitasi proses pengelolaan pengetahuan, dan membuat prosedur organisasional tentu akan sangat mempengaruhi pengelolaan pengetahuan pada perusahaan (Senge, 1990; Nonaka dan Takeuchi, 1995).

- b. **Pasar.** UKM menggantungkan diri pada jumlah pelanggan yang kecil dan fokus pada pasar lokal atau regional, dengan sedikit pasar internasional. Mereka biasanya memiliki jalur distribusi produk dan jasa yang terbatas dan kadang-kadang hanya terbatas pada ceruk pasar tertentu. Karyawan memiliki hubungan yang dekat dengan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan kriteria utama dalam mengukur kinerja, karena UKM biasanya hanya menggunakan metode *Word of Mouth* dalam meningkatkan pertumbuhan pasarnya. Selain itu pula, dengan kedekatan dengan pelanggan, menyebabkan UKM lebih mampu memahami keinginan khusus dari pelanggan.
- c. **Sistem, proses dan prosedur.** UKM biasanya memiliki sistem perencanaan dan kontrol yang sederhana, dan memiliki peraturan dan prosedur yang informal. Juga memiliki standarisasi yang lemah pada proses pekerjaan. Dengan operasi yang tidak begitu kompleks. Proses berjalan mengalir saja, dan mudah beradaptasi pada berbagai situasi. UKM memiliki sudut pandang yang sempit dalam hal strategi, hanya memfokuskan diri pada operasi sehari-hari. Dan juga ketika menyangkut mengenai pengelolaan pengetahuan, UKM cenderung hanya berbagi *tacit knowledge* (pengetahuan yang tak tertulis) dibanding menciptakan tempat penyimpanan pengetahuan yang telah ada (Namasivayan & Denizci, 2006).
- d. **Nilai budaya organisasi.** Dimana karakteristik nilai bersifat mengikat orang-orang dalam organisasi dan memberikan acuan tindakan dalam organisasi. Hirarki organisasi yang lebih rata pada UKM menyebabkan adanya fleksibilitas dalam bekerja, namun memiliki tanggung jawab pada masing-masing departemen yang sedikit dan terbatas. Selain itu juga memiliki derajat yang rendah dalam hal spesialisasi. Jalur komunikasi yang lebih pendek, sehingga memudahkan dalam berkomunikasi secara langsung. Struktur seperti ini menghasilkan tingkat koordinasi dan kerjasama yang lebih baik.
- e. **Pengelolaan SDM.** UKM memiliki sedikit jumlah karyawan yang ahli. Di lain pihak, sumber daya manusia adalah sumber daya yang penting dan tingkat *turnover* yang tinggi akan menyebabkan gangguan pada operasi perusahaan (Kawevisultrakul, 2007; Keogh, *et. al.*, 2005). Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang software memerlukan karyawan dengan tingkat keahlian yang tinggi. Perajinan sumber daya manusia dilakukan dengan pada bidang-bidang khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan. Evaluasi terhadap prestasi kerja karyawan tidak terstandarisasi. UKM memiliki suasana yang bersifat informal, organik dan terpadu. Ukurannya yang kecil menyebabkan pengenalan pada perusahaan lebih bersifat keseluruhan daripada per-departemen. Perilaku dari karyawan mudah

dipengaruhi oleh filosofi dan kepercayaan pemilik. Dengan budaya organisasi yang terbuka, menyebabkan karyawan dapat bekerja secara lebih independen tidak hanya pada proses penciptaan pengetahuan, namun juga pada proses penyebarannya kepada karyawan lain.

Tipe penelitian yang bersifat menjelaskan dan menyoroti hubungan antar variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan digunakan sebagai acuan riset dimana Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai hubungan dan pengaruh antara karakteristik bisnis terhadap pengelolaan modal pengetahuan. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perajin/pengusaha rekayasa prangkat lunak di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Berdasarkan data dari *semarang.indonetwork.co.id* terdapat 118 unit usaha penyedia usaha kuliner yang terdiri dari 194 unit usaha mikro; 95 unit usaha mikro dengan jumlah tenaga kerja sebanyak-banyaknya 5 orang; 19 unit usaha kecil dengan kriteria pekerja 5-10 orang; dan 4 unit usaha menengah dimana jumlah pekerjanya lebih dari 10 orang. Kriteria penyedia usaha kuliner dapat dilihat pada tabel 2 (*lampiran*).

Melalui skema *non-probability sampling* yakni teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dapat ditetapkan 100 responden.

### 3. PEMBAHASAN

#### a. Analisis struktur perusahaan kuliner

Pengelolaan pengetahuan pada industri rekayasa usaha kuliner, khususnya yang dilakukan oleh unit bisnis mikro dan kecil belum banyak memberikan sumbangan yang signifikan terhadap proses penangkapan, pengolahan, dan penyimpanan informasi. Hasilnya, banyak unit bisnis yang menjadi sub-ordinat perusahaan yang lebih kuat sebagai unit pendukung saja. Dalam variabel struktur bisnis, melalui indikator kepemilikan usaha, diketahui bahwa sebagian besar unit usaha yakni 48%, merupakan usaha yang dibentuk melalui hasil penjuangan sendiri. Dan sampai saat ini masih banyak unit usaha yang berkembang tidak cukup baik. Sebagaimana halnya karakteristik unit usaha mikro dan kecil, sebagian besar merupakan karakter “*one man show*” dimana pebisnis, pemilik, dan tenaga ahli merupakan satu

orang yang sama. Melalui indikator otonomi keputusan, ditunjukkan betapa besar ketergantungan unit bisnis rekayasa usaha kuliner kepada pemilik usaha, yakni 56%.

Unit bisnis memiliki juga tidak memiliki banyak pegawai yang mampu memberikan dukungan terhadap proses usaha kuliner. Hanya beberapa saja yang memiliki pola kepemimpinan yang tidak otonom, yakni 6% menyatakan keputusan dibuat berdasarkan hasil konsultasi dengan pegawai, dan 4% responden menyerahkan keputusan kepada para karyawan. Kecenderungan untuk mengembangkan ketrampilan pekerja masih sedikit, sehingga suasana sentralistik masih kental dalam perkembangan bisnis rekayasa usaha kuliner di Kota Semarang. Disamping, hal ini menunjukkan bahwa pimpinan kurang memberikan kesempatan bagi pegawai dalam rangka memutuskan keputusan bisnis.

Melalui indikator hirarki organisasi, dapat diketahui bahwa hubungan antara pekerja-pimpinan unit bisnis sangat erat. 81% unit usaha memberikan suasana formalitas yang demikian rendah. Bentuk struktur bisnis dalam unit usaha perajinan usaha kuliner di Kota Semarang mengacu kepada kedekatan berkomunikasi antara pimpinan dan pegawai dalam rangka menjalankan usaha. Dalam bisnis perajinan usaha kuliner, perajin/pengusaha perajin usaha kuliner di Kota seringkali mempekerjakan beberapa pegawai untuk mendukung pekerjaan. Proses perajinan usaha kuliner disusun bersama-sama mulai dari ide sampai dengan produk dihasilkan dan dikirimkan kepada pelanggan. Kedekatan komunikasi menentukan keberhasilan bisnis ini. Di sisi lain, pengusaha pemilik sebagai pimpinan, dan orang yang memiliki ide-ide kreatif dalam merekayasa usaha kuliner.

#### **b. Analisis pasar usaha kuliner**

Konsumen usaha kuliner di Kota Semarang sangat luas, mulai dari konsumen RT, instansi pemerintah sampai dengan lembaga bisnis dan sosial. Pasar Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Melalui indikator jumlah pelanggan. Dapat diketahui bahwa sebagian besar perajin usaha kuliner 42% memiliki pelanggan yang terbatas dalam jumlah. Namun demikian, ada hubungan dekat dan terjalin lama antara pelanggan dan dengan unit bisnis. Kedekatan ini menjadi sangat penting karena hubungan bisnis yang dibangun saling membutuhkan. Pelanggan adalah mereka yang menggunakan produk/jasa usaha kuliner yang sudah dikembangkan oleh perusahaan. Perusahaan menjalin hubungan dengan pelanggan dalam waktu yang lama, sehingga hubungan bisnis itu terjalin

bukan hanya sesaat, tetapi juga merupakan hubungan yang dekat dan saling menguntungkan. Sebuah usaha kuliner yang digunakan pelanggan tidak hanya untuk dibeli lepas saja, biasanya membutuhkan perawatan.

Berdasarkan indikator jangkauan pasar, dapat dijelaskan bahwa 46% unit usaha menjangkau wilayah Kota Semarang dan sekitarnya saja. Dengan demikian, semakin luas jangkauan pemasaran produk, semakin kuat posisi transaksi yang dimiliki oleh perajin usaha kuliner. Pasar yang dilayani lingkup Kota Semarang dan sekitarnya. Jangkauan pasar mereka biasanya kantor-kantor pemerintah, sekolah, rumah sakit, dan perusahaan bisnis yang membutuhkan pengolahan data menggunakan usaha kuliner. Selain itu, hal tersebut menggambarkan kemampuan pimpinan unit sebagai orang yang mampu membangun hubungan dengan baik.

Melalui indikator daya serap pasar, ditunjukkan kemampuan pasar untuk mengkonsumsi produk/jasa perusahaan yang menunjukkan adanya perilaku pembelian. Daya serap pasar dalam unit usaha perajinan usaha kuliner di Kota Semarang dinilai cukup oleh unit usaha, yakni sebesar 76%. Kondisi ini menunjukkan daya serap pasar relatif cukup baik.

### c. Analisis sistem dan proses bisnis

Variabel sistem, proses, dan prosedur merupakan normatif yang mengatur pelaksanaan rekayasa usaha kuliner dan prosedur manajemen mutu UKM rekayasa usaha kuliner. Melalui indikator kejelasan skema proses dan pengawasan rekayasa, dapat diketahui bahwa para perajin membutuhkan proses penyusunan tim kerja, kejelasan penjadualan, dan perencanaan kerja yang terpadu, dimana sebagian besar unit usaha yaitu 89% menyatakan bahwa proses, prosedur, dan sistem perajinan usaha kuliner, dalam tahap perencanaan sangat jelas dan dapat dilaksanakan dengan pengawasan yang minim sekalipun. Proses perencanaan dan pengawasan dapat digambarkan dalam skema usaha kuliner yang disederhanakan, dipresentasikan dari tahapan khusus, yakni alur-kerja (work-flow) barisan kegiatan; alur data (data flow) alur informasi; dan peran/aksi melakukan apa.

Kemudian melalui indikator kesesuaian *prototype* evaluasi dapat diketahui bahwa ukuran evaluasi proses pengumpulan persyaratan, pengaplikasian prinsip analisis, dan penyusunan model usaha kuliner yang akan dibangun untuk penilaian dan perajinan, sangat jelas untuk diikuti. Terdapat 68% unit usaha yang mampu membangun konstruksi prototipe pada awal analisis dan evaluasi. Melalui indikator desain, diukur spesifikasi yang akan disampaikan kepada klien dan spesifikasi disain rinci yang akan digunakan pada tahap implementasi. Terdapat 82% unit usaha menetapkan disain sangat rinci sehingga mudah untuk merancang alur proses.

#### **d. Analisis sumberdaya manusia**

Variabel sumberdaya manusia diukur melalui; (1) komitmen terhadap perajinan SDM, mulai dari pelatihan sampai pada tingkat aplikasi kepada klien dilakukan dengan prinsip berkualitas. Pengelolaan yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu tujuan perusahaan, dan (2) kemampuan melakukan jaminan kualitas produk yang mampu menghadirkan varian yang lebih banyak dan baik sekali. Indikator jumlah pekerja menunjukkan bahwa sebagian besar unit usaha mempekerjakan tidak lebih dari 5 orang, yakni sebesar 81%. Hal ini mengindikasikan sulitnya mendapatkan tenaga kerja yang memadai di sektor rekayasa usaha kuliner .

Berdasarkan indikator pelatihan sistematis dapat diketahui bahwa sebagian besar unit usaha 41% cukup sering menjalani pelatihan kontinyu untuk meningkatkan kinerja dan kualitas usaha kuliner . Klien adalah menggunakan produk/jasa usaha kuliner yang sudah dikembangkan oleh perusahaan merasa sangat nyaman apabila usaha kuliner relevan dengan kemajuan teknologi. Perusahaan menjalin hubungan dengan klien dalam waktu yang lama dan selalu membutuhkan pembaruan usaha kuliner , sehingga kualitas SDM harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan klien. Hal ini yang membuat sifat hubungan bisnis pada industri usaha kuliner ini adalah erat dan kontinyu. Namun, sebanyak 4% responden tidak memiliki skema pelatihan SDM yang kontinyu. Hal ini disebabkan oleh kemampuan bisnis yang tidak cukup untuk membiayai SDM memperbaharui ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki.

#### **e. Analisis dan budaya organisasi**

Variabel nilai budaya organisasi menggambarkan, proses pengelolaan modal pengetahuan di perajin usaha kuliner merupakan proses yang rumit, sehingga membutuhkan komitmen dan loyalitas yang tinggi. Indikator perpaduan hubungan antara pegawai, perusahaan bisnis, dan perajin/pengusaha perajin usaha kuliner di Kota Semarang menunjukkan 91% budaya organisasinya padu dan relevan dengan rekayasa usaha kuliner. Dengan demikian dalam sebuah unit bisnis dengan hanya ada sedikit tenaga kerja perlu mempersatukan pandangan budaya dan menyusun kemampuan kolektif dalam rangka rekayasa usaha kuliner .

Selain budaya organisasi yang padu, indikator lain adalah fleksibilitas pegawai dalam merekayasa usaha kuliner . Fleksibilitas budaya organisasi mengacu kepada kemampuan bisnis untuk melakukan perubahan secara cepat dalam melayani kepentingan klien dan adaptif dalam mengakomodasi perubahan lingkungan bisnis. Pada indikator fleksibilitas budaya ditunjukkan

bahwa 74% merasakan kemampuan yang fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Indikator peran pimpinan adalah kemampuan membangun organisasi pembelajar memungkinkan perusahaan memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan-perubahan. Oleh karena itu, perajinan proses pembelajaran organisasi merupakan aspek penting dalam pengelolaan modal pengetahuan. Skema tersebut sangat dipengaruhi oleh ketrampilan pimpinan perusahaan. Berdasarkan pemahaman pentingnya kepemimpinan dalam unit bisnis dapat diketahui bahwa 44% unit usaha sangat dipengaruhi oleh peran pimpinan. Pimpinan mendominasi seluruh nilai bisnis usaha. Hal ini disebabkan oleh kemampuan pimpinan yang lebih dibandingkan dengan pegawai. Secara internal, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk disesuaikan dengan keinginan klien.

Indikator orientasi hasil mengacu kepada tingkat kepuasan klien yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas klien dan mencegah perpindahan pelanggan. Hal inilah yang perlu dibangun sebagai orientasi bisnis rekayasa usaha kuliner untuk mengurangi biaya kegagalan operasi. Berdasarkan penelitian 96% unit usaha mampu membangun orientasi hasil, yakni menjamin kualitas dan kepuasan pelanggan.

#### 4. REKOMENDASI

Proses pengelolaan pengetahuan menunjukkan kemampuan yang cukup dalam mengelola modal pengetahuan. Indikator kuantitas jaringan bisnis dalam mana unit bisnis mendapatkan informasi menunjukkan bahwa 36% unit usaha memiliki peralatan yang mencukupi dengan kebutuhan perancangan alur dalam rangka proses rekayasa usaha kuliner sebagai bisnis perajinan usaha kuliner sendiri, hal ini disebabkan oleh ketrampilan pokok pengusaha yang relevan dengan perkembangan selera konsumen.

Indikator pengenalan dan kepemilikan perangkat teknologi untuk menangkap, mengolah, dan menyimpan informasi menunjukkan bahwa 95% unit bisnis mengadopsi teknologi yang mampu menangkap informasi. Pemahaman terhadap perkembangan dan menggunakan sarana IT dalam menemukan informasi yang dibutuhkan sangat relevan dalam bisnis rekayasa usaha kuliner. Dalam indikator akuisisi pengetahuan, pengertian pengetahuan adalah proses mengelola kekuatan modal pengetahuan dalam organisasi. Hal ini jelas bahwa proses pengelolaan pengetahuan bertujuan untuk mendorong nilai pengetahuan dan menekankan kemampuan subyek untuk mengelola pengetahuan di dalam organisasi. Pengelolaan pengetahuan dikemukakan sebagai koleksi seluruh proses-proses menciptakan, memelihara dan menggunakan pengetahuan. Pengetahuan bukan hal yang tersimpan secara “siap pakai” tetapi lebih kepada konteks penggunaan dan keperluan yang saat itu terjadi. Proses itu terkait dengan kreasi, diseminasi, dan pemanfaatan pengetahuan, khususnya dalam membentuk inovasi memerlukan pengenalan dan memiliki perangkat teknologi untuk menangkap,



mengolah, dan menyimpan informasi. Ada 5% saja unit usaha yang sangat siap untuk melakukan akuisisi pengetahuan. Dengan demikian komitmen dan kemampuan pembelajaran menjadi faktor utama bila dikaitkan dengan pengelolaan modal pengetahuan organisasi. Proses penciptaan pengetahuan melalui proses pembelajaran pengetahuan berlangsung melalui berbagai cara. Tingkatan proses pembelajaran dalam organisasi merupakan tingkat tertinggi yang ingin dicapai dalam pengelolaan modal pengetahuan. Artinya, pembelajaran baru akan menghasilkan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh klien.

Berdasarkan analisis regresi, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan variabel karakteristik bisnis perajin usaha kuliner di Kota Semarang memengaruhi proses pengelolaan modal pengetahuan pada kondisi sedang. Dengan demikian, penguatan pada karakteristik bisnis tidak memberikan sumbangan yang penting dalam mengembangkan pengelolaan pengetahuan. Secara parsial, variabel sumberdaya manusia memberikan sumbangan yang kuat dalam proses perajinan modal pengetahuan. Fokus utama perajinannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi perajin usaha kuliner dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh klien. \*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Avermaete, et al. (2003). Determinant of Innovation in Small Food Firms. *European Journal of Innovation Management*. 6 (1).p.8-17
- Barney, John D. (2001). Is Resource-based View a useful perspective for strategic management research ? Yes. *The Academics of Management Review*. 26(1),pp.41-56
- Barquin, R. C. (2001). What is knowledge management? *Knowledge and Innovation: Journal of the KMCI (Knowledge Management Consortium International, Inc.)*, 1(2), p.127-143
- Bessant. (1999). Enabling Innovation in The Small and Medium Firm, *Journal of Innovation in Practices*. Vol.1. pp.133-155.
- Bhaskaran, Shuku, (2006). Incremental Innovation and Business Performance: SME in Concentrated Industry Environment. *Journal of Small Business Management*. 44 (1).pp.64-80
- Boisot. (2002). *The Creating and Sharing of Knowledge. The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Learning*. Oxford University Press.
- Bontis, Nick & Choo, C. W. (Eds.), (2002). *The strategic management of intellectual capital and organizational knowledge*. New York, NY: Oxford University Press
- Clarkson, Michael, Mathiass Fink and Sascha Kraus, (2007), Industrial cluster as a factor for innovative drive- in region of transformation and structural change: A comparative analysis of East Germany and Poland. *Journal for East Management Studies*, 12(4),p.340-361
- Deifenbach. (2006). Intangible Resources: A Categorical System of Knowledge and Intangible Assets. *Journal of Intellectual Capital*. Bradford 7(3), pp.406-420

- Disperindagkop Sukoharjo, (2011), Profil Sentra UKM Gutar, Disperindagkop (Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi), Kabupaten Sukoharjo
- Djadiningrat, (2005). Mengelola Pengetahuan dan Modal Intelektual dengan Pembelajaran organisasi: Suatu gagasan untuk ITB, Pidato Diess natalis ITB ke-46, 2 Maret 2005
- Ferdinand, Carl. (2008). Regional Marketing and Innovation System in The Periphery: The case of Quebec. *International Journal of Innovation Management*. 7(1).
- Frappaolo. Carl. (2003). Manajemen Pengetahuan : Cara Cepat Mendongkrak Modal Intelektual di Perusahaan Anda, Seri Manajemen Bisnis Global, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Garvin, David. (2000). Learning in Action; A Guide to putting the learning organization to work. Harvard Business Review. USA
- Holsapple & Joshi, (2000), An investigation of factors thta influence the management knowledge in the organizations. *Journal of Strategic Management*. 9(2/3),pp. 35-61.
- Huang & Liu. (2005). Exploration for the reationship between innovation, IT and poerformance. *Journal of Intellectual Capital*. Bradford. 6(2). Pp.237
- Kaweevisultrakul. (2007). Impact of Cultural Barrier on KM Implementation: Evidence formThailand. *American Academy of Business*. Cambrige. Mar.2007. 11(1).
- Keogh, *et. al.* (2005). The indentification and application of knowledge capital within the small firms. *Journal of Intellectual Capital*. Bradford. 12(1)pp.76-91
- Khan & Ghani, (2004). Cluster and entrepreneurship; Implications for Innovations in a developing economy. *Journal of Development Entrepreneurship*. Bradford Dec. 9(3).
- Kickul & Gundry, (2002). Prospecting for trategic Advantage: The Proactive Entrepnreneruship Personality and Small Firm Innovation. *Journal of Small Business and Management*. 40(2).pp.187-202
- Koencoro, Mudrajad, (2007). Social Capital for Empowering the SME's Cluster at Kasongan, Region of Bantul. *Journal of Small and Business Management*. 44(2).
- Koesbiatono. *et.al.*, (2005). Tacit Knowledge, Formal Knowledge, dan Learning Organization Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Eksplorasi Persepsi Pengusaha UKM Sukses. Pusat Perajinan Iptek (PAPPIPTEK) LIPI, Jakarta.
- Kotelnikov, Dimytri. (2007). Small and Medium Enterprises and ICT. Asia-Pacific Development Information Programme. e-primers for the information economics, society, and polity.
- Kotler, Franz (2003). SME Development in Countries of Central Asia: Constrains, Cultural Aspect and Role of International Assistance. United Nations Industrial Development Organizations. Vienna.
- Leseure, M. & Brookes, N. (2004). Knowledge management benchmarks for project management. *Journal of Knowledge Management*, 8(1),p. 103-116.
- Liao. (2005). Roles of Social Capital Venture Creation: Key dimension and research implication. *Journal of Small Business and Management*. Milwaukee. 43(4),p.359
- Mei & Nie. (2007). A strategic management framework for leveraging knowledge assets. *International Journal of Innovation and Learning*, 1(2), 115-142.
- Mouritsen. (2004). Measuring and intervening: how do we theorise IC management. *Journal of Intellectual Capital*. Braford. 5(2),pp.257-267
- Mouritsen. *et al*, (2005). Dealing with the knowledge economy: IC versus Balanced Scorecard. *Journal of Intellectual Capital*. Braford. 6(1),pp.8-27
- Namasivayan & Denizci. (2006). Human Capital in Service Organization: identifying value drivers. *Journal of Intellectual Capital*. Bradford. 7(3).pp.381-393

- Nicolas, R. (2004). Knowledge management impacts on decision making process. *Journal of Knowledge Management*, 8(1), 20-31
- Nonaka I and H. Takeuchi. 2002. *The Knowledge-Creating Company*. New York: Oxford University Press.
- Nonaka I and Peltokorpi V. 2006. And Subjectivity in Knowledge Management: A Review of 20 Top Articles. *Knowledge and Process Management*, 13(2): 73–82.
- Sangkala. 2005. *Manajemen Pengetahuan: Model Strategi Pengelolaan Modal Intelektual Sebagai Basis Daya Saing Organisasi*. Desertasi program Doktor Ilmu Administrasi. FISIP UI.
- Schumpeter, Lee JH. 1999. *Knowledge strategy planning: methodology and case*. *Expert Syst. Appl.*, 24(3): 295-307.
- Senge, P.M., 1990. *The Leader's New Work: Building Learning Organizations*, *Sloan Management Review*, Fall 32 (1), pp.7-23.
- Setiarso, Bambang, (2006). *Pengelolaan Pengetahuan dan Modal Intelektual untuk Pemberdayaan UKM*. Konferensi Perkembangan Teknologi dan Informasi. Bandung, 3-4 Mei 2006.
- Susanto, Hari. 2011 *Pengaruh Absorptive Capacity dalam Perajinan Kemampuan Inovasi*. *Jurnal Bijak* ed. Januari.2011.
- Tambunan, Tulus. 2009. *Entrepreneurship Development : SMES in Indonesia*. *Journal of Development Entrepreneurship* Vol. 12, No. 1, pp. 95-118. World Scientific Publishing Company.
- Vossen. Straup Altner. 1998. *Sharpening the Intangible Edge*, *Harvard Business Report*, June.1998 edition
- Williams R. 2008. 'The epistemology of knowledge and the knowledge process cycle: beyond the "objectivist" vs "interpretivist"'. *The Journal of Knowledge Management*, 12(4): 72-85.
- Wong K. Y and Aspinwall E. 2005. *Knowledge Management: Case Studies in SMEs*. World Scientific Publishing Company, NY USA



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



***IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE***

***Karel Betaubun***

**ABSTRAK**

*Penetapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 dan Implementasi Peraturan Bupati Merauke nomor 75 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah serta Peraturan Bupati Merauke nomor 76 tahun 2014 tentang sistem dan prosedur akuntansi pemerintahan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Perda Kabupaten Merauke Nomor 14 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai entitas laporan keuangan. Tujuannya adalah memperoleh gambaran umum dalam Implementasi Kebijakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke bahwa setidaknya terdapat beberapa Kebijakan Utama yang harus diperhatikan agar implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat dilaksanakan dengan baik. (1) Penerapan Akuntansi Pemerintah. (2) Basis Akuntansi. (3) Tujuan Penggunaan Basis Akrual. (4) Manfaat Basis Akrual. (5) Alasan Penggunaan Basis Akrual. (6) Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual. (7) Tantangan Akuntansi Berbasis Akrual. (8) Langkah – Langkah penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual. Kemudian dihasilkan Tujuh Penerapan Akuntansi Pemerintah, Dua basis Akuntansi, Enam Tujuan Penggunaan Basis Akrual, Empat Manfaat Basis Akrual, Empat Alasan Penggunaan Basis Akrual, Dua Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual, Lima Tantangan Akuntansi Berbasis Akrual, Faktor Kunci Sukses, dan Tujuh Langkah Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual.*

*Key Word: Implementation, Accounting, Government, and Accrual Basic.*

**1. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang.**

Penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual berdasarkan peraturan bupati merauke nomor 75 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten merauke, sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dan Satuan Kerja Pengolahan Keuangan Daerah (SKPKD) dalam implementasi kebijakan akuntansi guna penyesunan laporan keuangan. Peraturan bupati merauke nomor 76 tahun 2014 tentang sistem dan prosedur akuntansi pemerintah kabupaten merauke sebagai pedoman SKPD dan SKPKD guna melaksanakan proses akuntansi dan Peraturan Daerah Kabupaten merauke nomor. 14 tahun 2014 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menganut basis kas menuju akrual (cash toward accrual) yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun, penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian pada saat ini merupakan masa persiapan dan peralihan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perubahan penggunaan basis akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.

## 1.2. Maksud dan Tujuan.

Penerapan akuntansi berbasis akrual sesuai PP nomor 71 tahun 2010 dan peraturan bupati merauke nomor 75 tentang kebijakan akuntansi sebagai pedoman SKPD dan SKPKD digunakan dalam implementasi laporan keuangan kabupaten merauke.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Sejarah Penerapan Akuntansi Pemerintah di Indonesia.

Praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia selama ini banyak bersumber pada perundang-undangan zaman kolonial yaitu *Indische Comptabiliteit Wet (ICW)* Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448, yang tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/*Indische Comptabiliteitswet (ICW)* Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860).

Undang-undang Perbendaharaan Indonesia tersebut pada akhirnya tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebelum tahun 2003 (Pra Reformasi Keuangan Negara), pengelolaan keuangan negara masih sangat sederhana dan tidak akuntabel. Kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan hanya berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN);
2. Sistem pencatatan akuntansi single entry;
3. Pelaporan keuangan berdasarkan basis kas;
4. Standar Akuntansi Pemerintahan belum ditetapkan;
5. Pengolahan data belum terintegrasi secara memadai, penyusunan laporan keuangan bersifat sentralisasi;
6. Transaksi keuangan disajikan tidak berdasarkan data-data yang telah direkonsiliasi;
7. Adanya time lag yang panjang antara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara.

Reformasi di bidang keuangan negara ditandai dengan terbitnya tiga paket undang-undang keuangan negara, yaitu: UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 (2010:1) adalah: “Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

## 2.2. Basis Akuntansi.

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada 2 (dua) yaitu basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual basis of accounting).

Akuntansi berbasis kas adalah transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah. Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan,

belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

### 2.3. Tujuan Penggunaan Basis Akrua

Adapun tujuan penggunaan basis akrual yaitu :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi dan pelaporan)
2. Meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen asset
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah
4. Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan
5. Mereformasi sistem anggaran belanja
6. Transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah

### 2.4. Manfaat Basis Akrua

Manfaat yang diperoleh dari penerapan basis akrual adalah :

1. Gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Informasi yang sebenarnya kewajiban pemerintah
3. Lebih familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya
4. Standar yang dapat diterima umum
5. Memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya melalui pengakuan dan pengendalian asset dan kewajiban pemerintah
6. Sesuai Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional

### 2.5. Alasan Penggunaan Basis Akrua

Alasan penggunaan basis akrual yaitu :

1. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup misal transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan
2. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya (full costs of operation).
3. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi asset dan kewajiban.
4. Akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas

### 2.6. Implementasi SAP Berbasis Akrua

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan tantangan baru, untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik

perlu dibuatkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detail.

Penerapan SAP berbasis akrual dapat dilakukan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual. Strategi penerapan SAP berbasis akrual yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual
- Mengembangkan framework Akuntansi berbasis Akrual dan BAS
- Sosialisasi SAP berbasis akrual 2011.
- Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi.
- Pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama (Proses bisnis dan requirement).
- Pengembangan kapasitas SDM 2012.
- Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (Lanjutan)
- Pengembangan kapasitas SDM (Lanjutan) 2013.
- Piloting beberapa KL dan BUN
- Reviu, Evaluasi dan penyempurnaan system
- Pengembangan kapasitas SDM (Lanjutan) 2014
- Parallel run dan konsolidasi seluruh LK
- Reviu, Evaluasi dan penyempurnaan system
- Pengembangan kapasitas SDM (Lanjutan) 2015
- Implementasi penuh
- Pengembangan kapasitas SDM (Lanjutan)

## 2.7. Tantangan Akuntansi Berbasis Akrual

Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Jika penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual saja masih banyak menghadapi hambatan, lebih-lebih lagi jika pemerintah akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah:

### a. Sistem Akuntansi dan IT Based System

Melihat kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT based system yang lebih rumit.

### b. Implementasi Sistem Pengendalian Intern

Pembangunan dan implementasi sistem pengendalian intern yang efektif diperlukan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk itu, diperlukan sosialisasi dan upaya implementasi yang melibatkan seluruh tingkatan dalam instansi pemerintah agar SPIP tersebut dapat menjadi bagian yang menyatu dengan operasional pada seluruh unit kerja pemerintahan.



c. Komitmen dari pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

d. Tersedianya SDM yang kompeten

Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada DPR dan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan.

e. Resistensi terhadap perubahan

Sebagaimana layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

## 2.8. Langkah Penerapan Basis Akrual

Terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual, di antaranya:

a. Kehati-hatian menerapkan basis akrual

Terdapat dua model utama dalam menerapkan akrual basis yakni model big bang dan model bertahap. Pendekatan model big bang seperti yang telah dicontohkan oleh negara Selandia Baru untuk seluruh unit pemerintahan dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Keuntungan pendekatan ini adalah mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan dapat menghindari risiko kepentingan, meskipun mengandung kelemahan, seperti beban kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul, dan komitmen politik yang mungkin bisa berubah.

Kesuksesan penerapan di Selandia Baru karena tiga faktor yang mendukung yakni adanya krisis fiskal, dukungan dari para politisi dan adanya reformasi birokrasi yang memberikan fleksibilitas kepada SDM. Komitmen politik merupakan kunci penting. Komitmen politik dalam penerapan basis akrual menjadi sangat esensial, sehingga komitmen politik ini diperlukan untuk menghilangkan adanya kepentingan yang tidak sejalan. Adanya komitmen politik yang kuat dari pengambil keputusan baik eksekutif maupun legislatif akan menentukan keberhasilan implementasi SAP basis akrual. Komitmen

tersebut terwujud dalam bentuk peraturan perundangan, kebijakan dan dukungan anggaran yang menunjang implementasi SAP basis akrual tersebut.

b. Tujuan akrual harus dikomunikasikan

Hasil dan manfaat yang ingin dicapai dengan penerapan basis akrual harus secara intens dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan melalui proses sosialisasi yang dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pihak-pihak terkait sehingga menimbulkan dukungan dalam implementasinya.

c. Perlunya tenaga akuntan yang andal.

Tenaga akuntan yang profesional akan sangat diperlukan untuk rekrutmen dan pelatihan yang cukup. Kekurangan tenaga akuntan akan menyebabkan penundaan penerapan akrual basis pada akuntansi pemerintah.

d. Sistem informasi akuntansi harus memadai

Informasi akuntansi berbasis kas merupakan titik penting dalam pergantian basis ke akrual. Jika suatu negara belum memiliki sistem akuntansi berbasis kas yang dapat diandalkan, maka negara tersebut terlebih dahulu berkonsentrasi pada peningkatan sistem dan proses yang telah ada, sebelum mempertimbangkan perpindahan keakuntansi akrual.

e. Badan audit tertinggi harus memiliki sumberdaya yang tepat

Badan Audit (di Indonesia BPK) memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual. BPK sudah mulai berperan dalam proses penyusunan standard dan nantinya menjadi pihak yang akan menilai implementasi SAP basis akrual tersebut yang tercermin pada laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah.

f. Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi

Penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh. Informasi yang dihasilkan dengan basis akrual akan menjadi berharga dan sukses apabila informasi yang dihasilkan digunakan untuk dasar membuat kebijakan publik yang semakin baik. Perubahan ini tidak secara otomatis terjadi, tapi perlu secara aktif dipromosikan secara kontinyu.

### 3. PENUTUP

#### 3.1. Kesimpulan

Implementasi kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual merupakan pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan bupati merauke nomor 75 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi sebagai pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah dan satuan kerja pengelolaan keuangan. Namun mengingat kesiapan berbagai perangkat yang ada pada unit kerja diseluruh tingkatan pemerintahan, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yaitu dengan penerapan SAP berbasis Kas Menuju Akrual berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan selanjutnya akan dilaksanakan SAP berbasis Akrual secara penuh sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 mulai tahun 2015.

Apabila diperbandingkan antara SAP Kas menuju Akrua (PP Nomor 24 Tahun 2005) dengan SAP Akrua (PP Nomor 71 Tahun 2010) terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan yang paling memerlukan perhatian adalah pada jenis/komponen laporan keuangan, khususnya mengenai Laporan Operasional. Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.

### 3.2. Rekomendasi

Dalam mengimplementasikan kebijakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian bagi seluruh pihak yang terkait agar implementasinya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan serta manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, disarankan untuk :

1. Diperlukan langkah-langkah yang penuh dengan kehati-hatian dalam menerapkan basis akrual.
2. Komitmen politik yang tinggi dari pengambil kebijakan dan persiapan yang matang agar proses perubahan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang akuntabel.
3. Strategi pengembangan pelatihan. Manajemen sumber daya manusia yang berkelanjutan sesuai kebutuhan satuan kerja perangkat daerah dan satuan kerja pengolahan keuangan daerah.\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Bupati Merauke Nomor 75 Tahun 2014. Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.
- Peraturan Bupati Merauke Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Sistem dan prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2014 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bastian, Indra., Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2005
- Irwana, Toni., Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Wilayah Priangan Jawa Barat), Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010
- Nugraheni, Purwaniati., dan Subaweh, Imam., Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 13, Pasca Sarjana Universitas Gunadarma, 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Rosmalasari, Irma, Ade., Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi, Skripsi Fakultas Ekonomi Unikom, Bandung, 2009
- Sugiyono., Statistika Untuk Penelitian, ALFABETA, Bandung, 2007
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**KEBIJAKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL GUNA  
MELINDUNGI HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI  
PAPUA MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI  
ASEAN (MEA)**

Edoardus E Maturbongs<sup>1</sup>

**Abstrak**

*Dalam pembangunan suatu wilayah ada begitu banyak indikator yang harus dikembangkan guna mendukung program pembangunan tersebut, salah satu indikator yang tidak kalah penting adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Harus diakui SDM di Papua pada umumnya masih sangat terbatas dan tentu saja keterbatasan SDM ini akan sangat berdampak pada proses pembangunan maupun penempatan orang asli Papua dalam jajaran birokrasi atau hal yang lainnya.*

*Dengan semakin dekatnya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka sangat tidak mungkin pemerintah dapat menciptakan atau menjamin tersedianya SDM dalam waktu yang relatif singkat. Untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atau masyarakat lokal di Papua guna dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan agar tidak terpinggirkan dengan adanya globalisasi MEA maka pemerintah perlu memperhatikan langkah-langkah strategis lewat kebijakan-kebijakan tertentu guna melindungi kehidupan masyarakat adat atau masyarakat lokal khususnya yang berada di Papua.*

*Kebijakan yang mungkin dapat dikembangkan sehubungan dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atau masyarakat lokal adalah kebijakan-kebijakan yang berbasis kearifan lokal dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Lewat kebijakan yang berbasis kearifan lokal ini diharapkan mampu menahan arus globalisasi MEA yang sudah didepan mata sekaligus mendorong peningkatan SDM agar masyarakat adat atau masyarakat lokal di Papua tidak terpinggirkan diatas tanahnya sendiri.*

*Key Word : Indigenous People, Local Wisdom, ASEAN Economic Community (AEC), PublicPolicy, Human Resources.*

**PENDAHULUAN**

Dalam pencapaian pembangunan secara umum dapat dikatakan bahwa Papua merupakan daerah yang sangat tertinggal dibanding daerah lainnya sehingga dikategorikan sebagai daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Sebagaimana dikutip dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hal. 4 yang menyebutkan dari tiga

---

<sup>1</sup> Universitas Musamus, Merauke - email :edoms.unmus@yahoo.co.id

(3) indikator utama yakni Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*) dan Standar Hidup Layak (*decent standard of living*) diketahui bahwa IPM Papua dalam lima (5) tahun terakhir adalah sebagai berikut : pada tahun 2010 adalah 55.45, tahun 2011 adalah 55.01, tahun 2012 adalah 55.55, tahun 2013 56.25 dan pada tahun 2014 adalah 56.75. Data selengkapnya mengenai data IPM di Indonesia disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 :  
Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru 2010-2014

Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru 2010-2014					
Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
Aceh	67,09	67,45	67,81	68,30	68,81
Sumatera Utara	67,09	67,34	67,74	68,36	68,87
Sumatera Barat	67,25	67,81	68,36	68,91	69,36
Riau	68,65	68,90	69,15	69,91	70,33
Jambi	65,39	66,14	66,94	67,76	68,24
Sumatera Selatan	64,44	65,12	65,79	66,16	66,75
Bengkulu	65,35	65,96	66,61	67,50	68,06
Lampung	63,71	64,20	64,87	65,73	66,42
Kep. Bangka Belitung	66,02	66,59	67,21	67,92	68,27
Kepulauan Riau	71,13	71,61	72,36	73,02	73,40
DKI Jakarta	76,31	76,98	77,53	78,08	78,39
Jawa Barat	66,15	66,67	67,32	68,25	68,80
Jawa Tengah	66,08	66,64	67,21	68,02	68,78
Daerah Istimewa Yogyakarta	75,37	75,93	76,15	76,44	76,81
Jawa Timur	65,36	66,06	66,74	67,55	68,14
Banten	67,54	68,22	68,92	69,47	69,89
Bali	70,10	70,87	71,62	72,09	72,48
Nusa Tenggara Barat	61,16	62,14	62,98	63,76	64,31
Nusa Tenggara Timur	59,21	60,24	60,81	61,68	62,26
Kalimantan Barat	61,97	62,35	63,41	64,30	64,89
Kalimantan Tengah	65,96	66,38	66,66	67,41	67,77
Kalimantan Selatan	65,20	65,89	66,68	67,17	67,63
Kalimantan Timur	71,31	72,02	72,62	73,21	73,82
Kalimantan Utara	0,00	0,00	0,00	67,99	68,64
Sulawesi Utara	67,83	68,31	69,04	69,49	69,96
Sulawesi Tengah	63,29	64,27	65,00	65,79	66,43
Sulawesi Selatan	66,00	66,65	67,26	67,92	68,49
Sulawesi Tenggara	65,99	66,52	67,07	67,55	68,07
Gorontalo	62,65	63,48	64,16	64,70	65,17
Sulawesi Barat	59,74	60,63	61,01	61,53	62,24
Maluku	64,27	64,75	65,43	66,09	66,74

Maluku Utara	62,79	63,19	63,93	64,78	65,18
Papua Barat	59,60	59,90	60,30	60,91	61,28
<b>Papua</b>	<b>54,45</b>	<b>55,01</b>	<b>55,55</b>	<b>56,25</b>	<b>56,75</b>

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Data IPM oleh BPS ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) di Papua dengan tiga (3) indikator utama yakni Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*) dan Standar Hidup Layak (*decent standard of living*) secara umum Papua berada pada posisi yang sangat rendah jika dibandingkan dengan tiga puluh tiga (33) Provinsi lainnya di Indonesia. Walaupun presentasinya menunjukkan kenaikan setiap tahun akan tetapi kenaikan tersebut tidak signifikan atau tetap tidak merubah posisi IPM Papua di tingkat nasional.

Jika dilihat dari data Angka Partisipasi Sekolah (APS) dua tahun terakhir yang tersedia pada sistem BPS pada tahun 2012 dan tahun 2013 kita bisa melihat bahwa kualitas SDM di Papua sangatlah terbatas dan keterbatasan ini diakibatkan karena APS di Papua rata-rata pada tahun 2012 pada usia 7-12 tahun adalah 75,45, usia 13-15 tahun adalah 69,05, usia 16-18 tahun adalah 50,01 sedangkan pada usia 19-24 tahun adalah 13,86. Pada tahun 2013 APS di Papua pada usia 7-12 tahun adalah 75,23, usia 13-15 tahun adalah 72,63, usia 16-18 tahun adalah 53,19 sedangkan pada usia 19-24 tahun adalah 17,50. Dari data ini dapat kita simpulkan bahwa APS sangat berpengaruh terhadap IPM di Papua yang masih berada dibawah dari semua provinsi dan data ini menjadi tolak ukur tersedianya SDM baik secara kualitas dan kuantitas untuk menyongsong perubahan dan arus globalisasi yang terjadi dewasa ini.

Tabel 2 :  
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi Tahun 2012-2013

Provinsi	2012				2013			
	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24
Aceh	99,36	94,34	74,59	28,55	99,66	95,23	74,70	29,18
Sumatera Utara	98,60	90,83	69,86	17,27	99,03	92,11	71,24	21,81
Sumatera Barat	98,34	90,50	71,24	27,55	98,81	92,20	74,10	30,66
R i a u	98,13	88,01	66,55	15,81	98,59	90,35	69,79	22,04
Kepulauan Riau	98,44	94,93	70,94	10,14	98,63	96,67	73,66	14,85
Jambi	98,70	91,11	59,71	15,22	98,81	91,96	63,97	20,25
Sumatera Selatan	98,11	88,75	58,66	13,91	98,57	89,47	60,74	14,08
Kep Bangka Belitung	97,72	84,09	52,02	9,30	98,13	84,63	56,42	9,46
Bengkulu	98,97	93,22	67,76	19,64	99,50	93,16	71,21	24,12
Lampung	98,64	90,00	60,43	11,90	99,03	91,06	64,41	16,19
DKI Jakarta	99,04	94,07	61,87	18,02	99,40	95,47	66,09	19,65
Jawa Barat	98,36	88,68	56,30	12,25	98,85	89,40	59,98	17,34
Banten	98,26	91,10	59,80	15,97	98,60	91,32	62,89	18,08
Jawa Tengah	98,87	89,59	58,65	11,83	99,28	90,73	59,88	17,42
DI Yogyakarta	99,77	98,35	80,04	44,69	99,96	96,79	81,41	45,86

Jawa Timur	98,65	91,62	61,87	14,59	99,05	92,83	62,32	19,49
B a l i	99,18	95,04	71,44	18,99	99,26	95,90	74,03	19,84
Nusa Tenggara Barat	98,18	91,25	61,07	17,82	98,20	92,23	66,40	22,64
Nusa Tenggara Timur	96,15	88,62	61,92	17,92	97,34	89,43	64,81	22,88
Kalimantan Barat	96,66	85,52	55,13	14,17	96,91	85,94	58,80	19,27
Kalimantan Tengah	98,62	85,68	55,06	14,04	99,05	86,14	59,18	19,89
Kalimantan Selatan	97,85	85,62	58,16	16,48	98,76	86,60	60,19	16,95
Kalimantan Timur	99,12	96,32	71,73	20,33	99,46	96,49	73,92	25,04
Sulawesi Utara	98,16	88,34	65,28	16,12	98,92	90,48	66,88	16,36
Gorontalo	97,74	82,91	59,37	20,46	97,90	86,23	59,91	23,27
Sulawesi Tengah	96,87	85,81	61,05	16,74	97,70	87,49	66,12	21,76
Sulawesi Selatan	97,62	87,85	62,16	23,17	98,24	89,66	62,67	27,80
Sulawesi Barat	96,19	82,17	56,80	14,65	95,20	84,55	59,62	18,04
Sulawesi Tenggara	97,57	88,25	65,04	23,62	98,00	89,12	65,84	24,00
Maluku	98,27	94,76	68,33	28,98	98,79	94,44	70,28	33,80
Maluku Utara	98,31	90,83	69,01	21,79	98,02	93,40	69,04	26,42
<b>Papua</b>	<b>75,45</b>	<b>69,07</b>	<b>50,01</b>	<b>13,86</b>	<b>75,23</b>	<b>72,64</b>	<b>53,19</b>	<b>17,50</b>
Papua Barat	95,59	91,13	65,04	20,03	95,59	92,94	71,89	24,10

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana bisa meningkatkan IPM di Papua guna mendukung proses pembangunan ? tentu bukan sebuah permasalahan yang dengan mudah dapat diselesaikan sebab merubah IPM di Papua membutuhkan penanganan yang serius dengan kompleksitas yang bervariasi.

Jika dikaitkan dengan kebiasaan sehari-hari masyarakat Papua maka masih ada kecenderungan dari masyarakat untuk lebih masuk hutan untuk berburu, bercocok tanam, mencari sagu dan sebagainya guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibanding harus bersekolah apalagi pada daerah-daerah pedalaman yang lebih dominan dihuni oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal. Tentu saja ini bukan satu-satunya masalah yang mempengaruhi keinginan belajar masyarakat, masih ada banyak masalah lain yang berkaitan misalnya keterbatasan dan ketersediaan tenaga guru, tidak adanya infrastruktur sekolah dan faktor lainnya yang turut menjadi satu dalam masalah ini. Namun dalam konteks bahasan ini yang menjadi fokus adalah bagaimana kebiasaan masyarakat yang masih kental dengan tradisi atau kebiasaan mereka sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 poin (p) menyebutkan bahwa Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

Dalam aktifitasnya masyarakat adat ini melakukan kebiasaan-kebiasaan yang secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah aktifitas yang bersifat rutinitas misalnya berburu, bercocok tanam, mencari ikan dan lain-lain di wilayah ulayat mereka. Kebiasaan ini akhirnya kebiasaan yang masih sulit dihilangkan sehingga menjadi bagian dari suatu ciri khas atau kearifan lokal. Kearifan lokal

sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab I Pasal (1) poin ke (30) adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Phongphit and Nantasuwannmenyebut kearifan lokal *have described local wisdom as knowledge based on the experiences of people that is handed down over the generations, sometimes by those who may be seen as village philosophers*. Sedangkan Kongprasertamorn menambahkan *This knowledge is used as a guideline for people's daily activities in relations with their families, their neighbors, and other people in the village and with their surroundings* (Affandi dan Wulandari, 64).

Artinya bahwa keseharian masyarakat yang menjadi kebiasaan turun temurun telah menjadi sebuah kearifan lokal yang ada dalam lingkungan hidup mereka sehingga sulit bagi kelompok lain diluar komunitas mereka untuk dapat menghilangkan kearifan lokal tersebut atau dapat dikatakan masyarakat masih memegang teguh adat istiadat mereka. Adat istiadat tersebut meliputi kebiasaan-kebiasaan, pola kehidupan berupa larangan atau hal-hal tabu dan aspek lainnya yang menjadi satu kesatuan didalam masyarakat adat tersebut secara turun temurun hingga kini. Dalam konteks perubahan, mereka akan lebih nyaman dengan kelompoknya dibanding mengikuti pola kebiasaan yang baru untuk sebuah perkembangan atau kemajuan, akibatnya kesatuan masyarakat yang selanjutnya disebut masyarakat adat ini harus diakui masih mempunyai SDM yang sangat terbatas baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Keterbatasan ini yang menyebabkan masyarakat adat akan sulit untuk bersaing dalam berbagai aspek pembangunan maupun segi kehidupan lainnya karena tidak mempunyai cukup kompetensi dibidangnya.

Apalagi tuntutan perkembangan dunia dewasa ini mengharuskan setiap individu masyarakat untuk mempunyai kemampuan dan keahlian untuk dapat bersaing dalam arus globalisasi, dikhawatirkan dengan SDM di Papua yang masih terbatas akan menyulitkan masyarakat adat atau masyarakat lokal ini untuk bersaing dengan tenaga kerja dari luar yang memiliki kemampuan yang sangat jauh berbeda. Padahal tantangan dan tuntutan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sangat jelas mensiratkan kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapa saja untuk datang dan bekerja di Indonesia bahkan hingga ke Papua, saya berpandangan bahwa kesepakatan MEA oleh para petinggi dahulu tidak dengan sigap menyiapkan SDM serta memikirkan konsekuensi yang akan terjadi saat ini khusus bagi masyarakat adat atau masyarakat lokal.

Disaat seperti ini jika pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus yang berpihak pada masyarakat adat atau masyarakat lokal saya khawatir mereka akan tersingkir karena tidak mempunyai kemampuan untuk bersaing dengan tenaga-tenaga yang ahli, sehingga istilah menjadi penonton diatas tanah sendiri bisa jadi akan terbukti dengan adanya MEA ini.



## PEMBAHASAN

### o Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Dengan semakin dekatnya pelaksanaan ASEAN *Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) maka bukan tidak mungkin SDM akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan pemerataan di Papua.

Salah satu (1) poin penting dari empat (4) poin dalam ASEAN *Economic Community* (AEC) *Blueprint* yang merupakan pedoman bagi anggota ASEAN dalam mewujudkan integrasi ekonomi kawasan adalah ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas (Afandi:86). Sebagaimana juga tertuang dalam piagam ASEAN pada Bab I tentang Tujuan dan Prinsip, Pasal 1 poin (5) menyebutkan bahwa tujuan pembentukan ASEAN adalah untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas.

Jika menyikapi dari dua (2) pasal atau pedoman ini maka sangat jelas menggambarkan adanya persaingan bebas dan terbuka pada akhir tahun 2015 terutama dari sisi tenaga kerja atau SDM yang mengharuskan setiap insan memiliki kompetensi yang baik dan berkualitas untuk masuk dalam pasar kerja bebas. Artinya bahwa akan ada gelombang arus tenaga kerja terampil dan berkompoten yang masuk ke Papua, pertanyaannya apakah SDM Indonesia secara umum dan SDM di Papua secara khusus sudah siap untuk menyambut atau berkompotisi dalam persainan global ini ? saya sendiri masih belum yakin akan hal tersebut. Bahkan dalam pandangan saya tidak semua masyarakat paham apa itu MEA dan bagaimana konsekuensinya.

Dari hasil diskusi saya kepada beberapa masyarakat saya mendapatkan informasi bahwa pemahaman dan pengetahuan mereka akan MEA sama sekali belum dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di Papua. Saya khawatir bahwa gelombang masuknya MEA ke Papua akan menimbulkan konflik yang menurut pandangan saya diakibatkan karena kurangnya pemahaman akan MEA itu sendiri sehingga akan muncul anggapan bahwa orang asing atau orang luar ingin berkuasa di atas tanah mereka. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan perlawanan dari masyarakat atau bahkan di sisi lain mereka akan tergeser dengan efek MEA diatas hak ulayatnya karena tidak didukung oleh SDM yang memadai dan akibatnya nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam kelompok masyarakat adat ini perlahan akan hilang.

### o Kajian Kebijakan Berbasis Kearifan Lokal Menyongsong MEA

Dye (Nugroho,2003) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dapat berwujud program-program, peraturan-peraturan daerah atau bentuk lain yang bertujuan menyelesaikan sejumlah *problem* yang ada dalam masyarakat. Dalam kebijakan sebagai

pondasi biasanya berupa kebijakan yang lebih besar yakni Undang-Undang, dari Undang-Undang ini kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan-kebijakan yang lebih spesifik lagi. Ada begitu banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sebagai contoh dalam kerangka otonomi daerah dibuatlah kebijakan bagi Provinsi Papua yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Mungkin saat ini di Papua boleh berada dibawah payung kebijakan otonomi khusus, namun sampai kapan ini akan berlangsung. Kebijakan ini sendiri mempunyai masa berlaku yakni dua puluh lima (25) tahun sejak diterbitkan pada tahun 2011 artinya tinggal beberapa waktu lagi kebijakan ini menjadi landasan bagi Provinsi Papua dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam bingkai kekhususan. Kebijakan otonomi khusus yang dititikberatkan setidaknya pada dua (2) hal utama yakni pendidikan dan kesehatan disamping aspek-aspek yang lainnya, namun dalam perjalanannya kita bisa simpulkan bahwa kebijakan otonomi khusus belum dapat menjawab tantangannya untuk menciptakan Papua yang jauh lebih baik terutama dalam ketersediaan SDM yang mampu bersaing disegala bidang. Arus globalisasi MEA yang tinggal menghitung waktu untuk dilaksanakan akan menjadi sebuah masalah yang serius bagi masyarakat yang ada di Papua jika tidak ada kebijakan-kebijakan yang mampu melindungi masyarakat adat tersebut, sebab untuk membangun SDM masyarakat dengan waktu yang singkat ini sangatlah mustahil untuk dilakukan. Dikhawatirkan jika tidak ada kebijakan khusus dari pemerintah kepada masyarakat adat maka kita bisa pastikan masyarakat adat akan tergeser justru diatas hak ulayat mereka sendiri apalagi jika dihubungkan dengan kompetensi atau keahlian yang dipersyaratkan dalam MEA akan semakin membuat perbedaan yang semakin melebar.

Jika mengacu pada isi kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang bisa dijadikan sebagai pedoman guna menyusun kebijakan yang lebih spesifik dengan memperhatikan kearifan lokal maka ada beberapa poin penting dalam isi kebijakan tersebut yang dapat menjadi landasan bagi pemerintah antara lain :

- Bab X Perekonomian, Pasal 42
  - (1) Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat.
  - (2) Penanaman modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat.
  - (3) Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat.
  - (4) Pemberian kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat adat agar dapat berperan dalam perekonomian seluas-luasnya.
- Bab XI Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, Pasal 43

- (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.
  - (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- Bab XVIII Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Pasal 62
    - (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak serta bebas memilih dan/atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
    - (2) Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya.

Dalam kebijakan publik tentu sebagai turunan kebijakan publik tersebut perlu kiranya mendistribusikan isi kebijakan utama kedalam kebijakan publik dalam bentuk yang lain seperti peraturan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau bentuk-bentuk kebijakan lain yang sekiranya dapat menjawab tantangan yang ada dalam masyarakat. Dari beberapa poin yang terkandung dalam kebijakan otonomi khusus sebagaimana tersaji diatas maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan yang berbasis kearifan lokal khususnya yang berada di wilayah Provinsi Papua. Salah satu kebijakan dengan memperhatikan kearifan lokal yang bisa dikembangkan adalah dengan memberdayakan SDM orang asli Papua misalnya hadirnya peraturan daerah yang mengatur tentang ketenagakerjaan dimana setiap organisasi atau apapun yang mempekerjakan karyawannya di Papua wajib memasukan orang asli Papua sebagai karyawan. Disamping kebijakan tersebut perlu juga kebijakan-kebijakan untuk menjaga kelestarian dan keunikan kearifan lokal masyarakat adat di Papua dalam konteks yang lebih luas seperti perlindungan terhadap hak-hak ulayat dan tatanan hidup mereka sehingga masyarakat adat ini tidak terganggu dan terabaikan dengan adanya perkembangan globalisasi MEA. Selain itu pemerintah perlu memberdayakan potensi-potensi masyarakat adat kedalam berbagai sektor pembangunan serta pelatihan-pelatihan yang dihususkan untuk meningkatkan kualitas SDM orang Papua agar mampu bersaing di tingkat global terutama menyongsong MEA.

Memang kebijakan ini tidak akan merubah ketentuan yang dipersyaratkan dalam MEA, namun penting juga bagi pemerintah untuk membuat regulasi-regulasi mendasar guna memberikan kesempatan yang sama bagi warga negaranya untuk dapat bersaing atau setidaknya ikut dalam proses pembangunan. Bagaimanapun juga arus globalisasi MEA jangan sampai merusak tatanan hidup dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat di Papua yang telah ada dan bertahan selama ini jauh sebelum gagasan MEA dicetuskan, karena ini adalah bagian dari keBhinekaan di Indonesia. Disinilah sebenarnya tugas pemerintah untuk menjaga hak-hak masyarakat adat di Papua akan tetapi juga hak-hak masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia untuk tetap bertahan ditengah arus globalisasi MEA.

## KESIMPULAN

1. Adanya kebijakan-kebijakan yang disusun khusus dengan memperhatikan kearifan lokal setempat untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat adat di Papua;
2. Pemerintah perlu lebih giat melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan dan menciptakan SDM di Papua baik secara kualitas maupun kuantitas untuk dapat bersaing dalam era globalisasi MEA;
3. Agar masyarakat adat mendapat perhatian yang serius lewat program pemberdayaan dan pelatihan bagi mereka agar mereka mempunyai kompetensi guna menyongsong MEA, yang bukan tidak mungkin jika tidak ada perhatian dari pemerintah dalam bentuk kebijakan khusus bagi mereka dikhawatirkan masyarakat adat ini akan tergeser oleh arus globalisasi MEA.\*\*\*

## REFERENSI

- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Afandi, Moch. Masykur. 2011. Peran Dan Tantangan ASEAN *Economic Community* (AEC) Dalam Mewujudkan Integrasi Ekonomi Kawasan Di Asia Tenggara. Spektrum Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Vol. 8, No.1, Januari 2011.
- Affandy Didied, Wulandari Putu. 2012. *An Exploration Local Wisdom Priority In Public Budgeting Process Of Local Government Case Study in East Java*. Int. J. Eco. Res., 2012v3i5, 61-76. ISSN: 2229-6158.
- Booklet Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru. Badan Pusat Statistik.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.  
<http://www.bps.go.id>



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**PERAN AKTOR DALAM MEMPERLUAS AKSES  
INTERNET UNTUK MENDUKUNG E-SERVICES  
DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA SAING**

Galih Wibowo<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

*Dalam integrasi regional ASEAN Economic Community, penting bagi setiap negara untuk membangun daya saing. Salah satu faktor penunjang daya saing adalah kesiapan teknologi dan inovasi, dimana kombinasi keduanya membentuk inovasi layanan e-government atau e-services. Seperti di daerah lain dan di tataran nasional, ternyata implementasi e-service Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih kurang optimal, dikarenakan jumlah partisipasi pengguna internet sangat kecil. Partisipasi publik yang rendah diindikasikan karena akses jaringan internet yang kurang merata.*

*Sebagai sebuah kebijakan, sukses implementasi e-services juga dipengaruhi oleh peran para actor dalam mengatasi keterbatasan jaringan internet. Melalui Actors Network Theory (ANT), upaya pemerintah dalam mengoptimalkan peran para actor dapat dijabarkan sebagai proses translation, yang terdiri dari empat tahap utama: problematisasi, interessement, enrollment, dan mobilization. Deskripsi pada masing – masing tahapan akan menghasilkan gambaran peran masing – masing actor dalam membuka akses internet yang lebih merata di Jawa Tengah. Dengan demikian muncul rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong para stakeholder dalam rangka memperluas akses internet bagi masyarakat, yang berimplikasi pada suksesnya penerapan e-services di Jawa Tengah.*

*Kata Kunci : daya saing, e-service, akses internet, aktor.*

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Negara – negara ASEAN telah menyepakati 3 (tiga) hal dalam rangka integrasi regional, yaitu ASEAN Economy Community, ASEAN Political Security Community, dan ASEAN Socio Cultural Community.<sup>2</sup> Pada percaturan internasional dan regional masing – masing negara akan bersaing untuk

<sup>1</sup> Praktisi dan mahasiswa S3 Doktor Administrasi Publik FISIP Undip – email : galih.wi@gmail.com

<sup>2</sup> Sumber dari www.setkab.go.id

memegang peran global. Posisi Indeks Daya Saing Indonesia menurut Global Competitiveness Report 2015-2016<sup>3</sup> menduduki peringkat 37 dari 140 negara yang dinilai, berada di atas Portugal (38) Italia (43), Rusia (45), Afrika Selatan (49), India (55), namun masih kalah dengan 3 (tiga) negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura (2), Malaysia (18) dan Thailand (32). Oleh sebab itu, penting bagi Indonesia meningkatkan daya saing dalam rangka integrasi regional dan diterapkannya ASEAN Economy Community.

Daya saing juga disebut sebagai kemampuan bangsa untuk menciptakan lingkungan yang dapat membantu untuk berinovasi lebih cepat dari pesaing. Daya saing erat kaitannya dengan produktivitas, bahkan *World Economic Forum* (WEF) mendefinisikan daya saing sebagai *as the set of institutions, policies, and factors that determine the level of productivity of a country*. Penelitian yang dilakukan *Asian Development Bank* (ADB ; 2003) menentukan faktor internal pendukung persaingan internasional, yaitu 1) teknologi, 2) sumberdaya manusia, 3) struktur organisasi, serta faktor eksternal yaitu 4) pemerintah dan 5) peran modal dan keuangan. Penilaian peringkat daya saing global menurut *Global Competitiveness Index (GCI)* didasarkan pada 12 pilar daya saing. Kedua belas pilar tersebut yaitu institusi, infrastruktur, kondisi dan situasi ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tingkat atas dan pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, ukuran pasar, lingkungan bisnis, dan inovasi.<sup>4</sup> Sedangkan, salah satu komponen inovasi adalah penggunaan teknologi. Management teknologi mendorong lahirnya penemuan dan manajemen inovasi, dimana kedua hal tersebut merupakan bagian terpenting dari setiap sistem penciptaan dan pemanfaatan teknologi (Khalil, 1999).<sup>5</sup> Ini artinya antara teknologi dan inovasi terdapat keterkaitan. Perkawinan keduanya menghasilkan konsep – konsep baru yang berguna dalam meningkatkan daya saing.

Salah satu inovasi penting di bidang teknologi yang dibangun oleh pemerintah adalah *e-government*. E-government terdiri dari penggunaan system Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK). Penerapan E-gov bisa dilakukan melalui website yang dapat diakses dan menyebar secara global. (Coombs;1998)<sup>6</sup> ataupun media social atau aplikasi open source lainnya. Tanpa akses Teknologi Informatika dan Komunikasi, bagaimanapun juga masyarakat akan berada dalam kondisi yang terisolasi pada era pengembangan global di masa depan (Zembylas, Michalinos And Charalambos Vrasidas. 2005)<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Global Competitiveness Report 2015 – 2016 dikeluarkan oleh World Economic Forum, sebagaimana dilansir dalam laman [www.kemenkeu.go.id/berita/indeks-daya-saing-global-indonesia-duduki-peringkat-37-dari-140-negara](http://www.kemenkeu.go.id/berita/indeks-daya-saing-global-indonesia-duduki-peringkat-37-dari-140-negara) atau bisa didapatkan di website resminya [www.weforum.org](http://www.weforum.org).

<sup>4</sup> Ibid 3

<sup>5</sup> Khalil, T.M. 1999. *Management of Technology : The Key to Competitiveness and Wealth Creation*, New York: McGraw-Hill Science/Engineering/Math.

<sup>6</sup> Coombs, W. Timothy. 1998. *The Internet as a Potential Equalizer. New Leverage for Confronting Social Irresponsibility*, Public Relation Review. Vol 24

<sup>7</sup> Zembylas, Michalinos And Charalambos Vrasidas. 2005. *Globalization, information and communication technologies, and the prospect of a 'global village': promises of inclusion or electronic colonization?*. *Journal of Curriculum Studies* 2005, VOL. 37, NO. 1, 65–83 ISSN 0022–0272 print/ISSN 1366–5839 online © 2005 Taylor & Francis Ltd.

*E government* hampir diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah pada berbagai sisi pembangunan, seperti pelayanan perijinan, penerimaan pegawai, pelayanan informasi ataupun pelayanan yang lainnya. Sebab, E-gov terbukti mampu merevitalisasi pelayanan public (Bwalya, Kelvin Joseph & Tanya Du Plessis and Chris Rensleigh. 2014)<sup>8</sup>. Misalnya, e-gov dibidang demokrasi, yaitu adanya e-election di Denhag telah berhasil dengan partisipasi public yang cukup tinggi (Bert Mulder & Martijn Hartog;2012).<sup>9</sup>

Dalam bidang pelayanan, e-goverment di badan layanan publik daerah identik disebut dengan *e-services*. Menurut Rowley (2006 dalam Zericka;2013)<sup>10</sup> menyebutkan layanan elektronik di definisikan sebagai: "perbuatan, usaha atau pertunjukan yang pengiriman di mediasi oleh teknologi informasi. E-services merupakan bentuk inovasi teknologi dari pemerintah yang berupaya untuk meningkatkan layanan publik dan daya saing bangsa dengan mengoptimalkan penggunaan media internet. Sebab, melalui akses Internet dengan kecepatan tinggi dapat mendorong produktivitas perekonomian suatu bangsa (Hsieh – Keil ; 2015)<sup>11</sup>. Para peneliti percaya bahwa ada kesepakatan bersama tentang pentingnya tingkat perubahan teknologi dalam penentuan laju pertumbuhan ekonomi (Feldman, 1999).<sup>12</sup> Dari sini dapat disimpulkan bahwa kemampuan akses masyarakat terhadap layanan berbasis internet seperti *e-government* maupun *e-services* merupakan indikasi penting dalam meningkatkan daya saing bangsa.

Tetapi tidak setiap daerah berhasil mengakses *e-services* dengan hasil yang optimal. Penerapan *E-gov* berbentuk penyebaran informasi online di Africa justru membuat informasi tidak diterima dengan optimal. Kesenjangan informasi yang terjadi di desa dan di kota dikarenakan infrastruktur yang menunjang akses masyarakat terhadap informasi berbeda, kebiasaan masyarakat yang berbeda dalam menggunakan media informasi dan kemampuan masyarakat yang berbeda dalam menerima media informasi (Ifukor : 2013).<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Bwalya, Kelvin Joseph & Tanya Du Plessis and Chris Rensleigh. 2014. E-government implementation in Zambia – prospects, by :Kelvin Joseph Bwalya, Tanya Du Plessis and Chris Rensleigh published Transforming Government: People, Process and Policy Vol. 8 No. 1, 2014 pp. 101-130 q Emerald Group Publishing Limited 1750-6166 DOI 10.1108/TG-01-2013-0002

<sup>9</sup> Bert Mulder & Martijn Hartog;2012. Determine the Workload of the Structural Implementation of E-Democracy: Local Government Policy Issues, Policy Cycle and Styles of Citizenship Combined karya Bert Mulder & Martijn Hartog, eSociety Institute of The Hague University of Applied Sciences, The Netherlands yang dimuat pada International Journal of Information Communication Technologies and Human Development, 4(1), 52-61, January-March 2012.

<sup>10</sup> Zericka, M. Dhenda. Penerapan Electronic Service Dalam Pengembangan Informasi Di Kabupaten Kutai Kartanegara. 2013. eJournal Ilmu Komunikasi, 2013, 1 (1): 345- 361 ISSN 0000-0000, ejournal.ilkom.fisip-unmul.org

<sup>11</sup> Hsieh, J.J Po-An, Mark Keil, Jonny Holmstrom, Lynette Kvasny. 2015. The Bumpy Road to Universal Access: an Actor-Network Analysis of a U.S. Municipal Broadband Internet Initiative. The Information Society, 28: 264–283, 2012 Copyright c ? Taylor & Francis Group, LLC ISSN: 0197-2243 print / 1087-6537 online DOI: 10.1080/01972243.2012.689271

<sup>12</sup> Fieldman, M.P. 1999. The New Economics of Innovation, Spillovers and Agglomeration: A Review of Empirical Studies. Economic of Innovation and New Technology, Vol 8 No. 1-2 pp 5-25.

<sup>13</sup> Ifukor, Mari Omogor. 2013. Channels of Information Acquisition and Dissemination Among Rural Dwellers. International Journal of Library and Information Science Vol 5(10) pp 306-312. ISSN 1996-0816 @2013 academic journals

Penerapan E-Government di Indonesia juga belum optimal. Kendala serupa juga terjadi di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah telah banyak memotori adanya program *e-government* di Jawa Tengah. Sebut saja layanan ATM Samsat Online, pelayanan informasi aduan masyarakat, melalui Laporan Gub di *website* <http://jatengprov.go.id>, layanan twitter langsung kepada gubernur Jawa Tengah atau @humasjateng, bahkan setiap SKPD sudah memiliki website dan twitter, layanan SMS centre, musrenbang online melalui *videoconference* berbasis internet sebagainya. Di tengah komitmen Gubernur untuk menerapkan *e-government*, namun demikian, partisipasi masyarakat terhadap layanan elektronik ini masih kurang optimal. Telkom menyatakan bahwa pengguna internet di Jateng masih kalah di Jogja pada tahun 2013, yaitu hanya sekitar 1% dari total penduduk.<sup>14</sup> Data Telkom yang disarikan pada Jawa Tengah dalam Angka 2014 juga menunjukkan bahwa pengguna broadband internet Telkom produk Speedy Tahun 2013 hanya 3.013 pelanggan, Telkom flash data 17.271 pelanggan, blackberry 7.556 pelanggan. Atau total 27.840 pelanggan<sup>15</sup>. Sementara itu, Perpres Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019, pemerintah menargetkan 30% populasi di perkotaan harus bisa menikmati internet broadband tahun 2019.

Dalam GCI, salah satu pilar penting daya saing, adalah kesiapan teknologi, yang dibagi dalam 6 (enam) variabel, yaitu : ketersediaan teknologi terbaru; Penyerapan teknologi oleh perusahaan; transfer teknologi; Pengguna internet; Pelanggan internet pita lebar; dan Pita lebar internet (Porter & Schwab, 2008)<sup>16</sup>. Pengguna internet yang minim menyiratkan masih kurang optimalnya kesiapan teknologi di Jateng. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kurang optimalnya akses masyarakat terhadap *e-services* ini merupakan salah satu indikasi bahwa daya saing Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* kurang optimal. Penyebab utamanya adalah kurang meratanya akses internet untuk masyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Deputy BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM), Hammam Riza dalam pemberitaan [CNN Indonesia](#), dirinya merujuk pada survey yang dilakukan oleh PBB yang berjudul *E-Government Survey 2014*, yang di dalamnya menempatkan Indonesia pada peringkat 106 dari 193 negara di dunia soal pengadopsian pemerintahan yang berbasis digital ini. Inti masalah yang dipaparkan Hammam sebenarnya cukup 'klasik', yakni pemerataan jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi masalah utama di negeri ini. Cukup *fair* rasanya jika penerapan *E-Government* yang merata akan bisa terwujud jika jaringan internet juga tersedia sampai tingkat desa.<sup>17</sup> Kondisi infrastruktur teknologi dan tingkat penggunaan

<sup>14</sup> Sumber dari <http://m.solopos.com/2012/12/11/telkom-genjot-penggunaan-internet-di-jateng-356649>

<sup>15</sup> Data Telkom yang diterbitkan dalam Buku Jawa Tengah Dalam Angka 2014 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

<sup>16</sup> Komponen – komponen kesiapan teknologi ini ditentukan oleh Schwab yang dimuat sebagai indikator pada Global Competitiveness Index sejak tahun 2008

<sup>17</sup> <https://dailysocial.net/post/telkomsel-hadirkan-layanan-big-data>



adalah faktor yang berpengaruh dalam mengatasi digital divide.<sup>18</sup> (Cowdhury:2012) Bahkan pesimisme implementasi jaringan internet ini juga disimpulkan oleh beberapa ahli, antara lain, “*In theory, the Internet can be made available to everyone, yet in reality it is not*” (Sy 1999)<sup>19</sup>.

Banyak literatur menjelaskan bahwa mengapa sebagian besar inisiatif pemerintah kurang berhasil, maka tambahan penelitian diperlukan untuk pemahaman teoritis dari arah tantangan yang kompleks pada inisiatif pemerintah dalam hal implementasi teknologi informasi dan komunikasi (Warschauer:2004)<sup>20</sup>. Demikian pula dengan konsep e-government yang kurang berhasil di Jawa Tengah karena akses internet yang masih kurang merata, dengan demikian penelitian tentang upaya untuk meningkatkan akses internet sangat diperlukan.

Sebenarnya, pemerintah telah berupaya mengatasi kondisi digital divide ini dengan megaprojek Palapa Ring. Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Proyek itu terdiri atas tujuh lingkaran kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) dan satu backhaul untuk menghubungkan semuanya. Proyek Palapa Ring ini akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada (existing network) dengan jaringan baru (new network) pada wilayah timur Indonesia (Palapa Ring-Timur). Palapa Ring-Timur akan dibangun sejauh 4.450 KM yang terdiri dari sub marine cable sejauh 3.850 km dan land cable sepanjang 600 KM dengan landing point sejumlah lima belas titik pada 21 kota/kabupaten. Jaringan tersebut berkapasitas 100 GB (Upgradeable 160 GB) dengan mengusung konsep ring, dua pair (empat core).<sup>21</sup> Mega proyek berbiaya tinggi ini diharapkan bukan hanya mampu meningkatkan jangkauan dan akses internet hingga ke semua daerah, tetapi juga membuat tarif internet akan turun dan lebih murah diakses masyarakat. Namun demikian, megaprojek ini baru akan selesai pada 2019, sementara program – program e- government dari pemerintah daerah perlu segera diterapkan.

E-services seperti itu adalah sebuah bentuk kebijakan yang sukses manakala didukung dengan stakeholder kebijakan yang baik. Sebagian kebijakan gagal bukan satu – satunya karena implementasi, ataupun hasil produksi yang kecil, tetapi sebagian besar karena pengambil kebijakan gagal menangkap kepentingan dan informasi dari key stakeholder. (Nutt and Backoff;1992)<sup>22</sup>

Jika pemerintah pusat telah melangkah dengan program Palapa Ring dan Rencana Pita Lebar, maka bagaimana dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder

<sup>18</sup> Chowdhury, Gobinda. 2012. Sustainability of digital information services. Journal of Documentation Vol. 69 No. 5, 2013 pp. 602-622 @ Emerald Group Publishing Limited  
0022-0418 DOI 10.1108/JD-08-2012-0104

<sup>19</sup> Sy, J. H. 1999. Global communications for a more equitable world. In Global public goods: International cooperation in the 21st century, ed. I. Kaul, I. Grunberg, and M. A. Stern, 326–43. Oxford, UK: Oxford University Press

<sup>20</sup> Warschauer, M. 2004. Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide. Cambridge, MA: MIT Press.

<sup>21</sup> <http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3298/Sekilas+Palapa+Ring/> 0/palapa\_ring#.VhqpB\_ntmko

<sup>22</sup> Nutt and Backoff.1992;see also Bryson and Crosby 1992 pp 378-80)

di daerah dalam rangka meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan berbasis internet. Sebab, bagaimanapun juga kemudahan akses internet ini berimplikasi pada kesuksesan e-government di Jawa Tengah. Dengan demikian perlu adanya investigasi siapa dan bagaimana peran aktor dalam mengoptimalkan akses internet di Jawa Tengah. Penelitian ini berupaya untuk mendiskripsikan siapa dan peran aktor/stakeholder yang berpengaruh dalam kebijakan akses internet di Jawa Tengah sebagai bahan masukan dalam rangka menghadapi ASEAN Economy Community.

## B. PEMBAHASAN

Salah satu langkah untuk mendeskripsikan peran stakeholder adalah dengan menerapkan Actors Network Theory (ANT). Dalam ANT, intervensi TIK pemerintah dapat dilihat sebagai proses translation, di mana kepentingan berbagai aktor yang memiliki kebutuhan khusus (misalnya, menghubungkan semua orang dengan informasi jaringan super) dan bertindak melalui kebijakan sosial (misalnya, broadband universal akses internet). Selama proses translation, muncul kebutuhan yang spesifik, bagaimana skenario teknologi akan digunakan (*Program aksi*), dan peran apa yang akan dimainkan oleh aktor. Translation terdiri dari empat tahap utama: problematisasi, intersement, Enrollment, dan mobilisasi (Hsieh;2015).<sup>23</sup>

Upaya untuk melihat peran aktor dalam rangka meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan berbasis internet dapat menggunakan ANT ini. Langkah – langkah yang ditempuh dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) **Problematisation**, meliputi pendefinisian masalah serta identifikasi aktor lain yang terlibat selain aktor kunci (Callon, 1986).<sup>24</sup>

Beberapa sarjana telah menunjukkan bahwa proyek-proyek ICT publik biasanya melibatkan berbagai pihak dengan motivasi beragam dan berbagai kepentingan (Flak & Rose 2005 dalam Hsieh:2015).<sup>25</sup> Pengaruh TIK menangkap persepsi dan tanggapan dari stakeholder penting (pemerintah, legislator, warga, penyedia layanan, dll), serta menggabungkan seperangkat faktor kontekstual. Maka dari itu, langkah pertama dalam menentukan stakeholder analysis adalah upaya untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam kebijakan. Identifikasi dipandu melalui berbagai sumber bacaan, wawancara, dilengkapi dengan dokumen publik (misalnya laporan surat kabar, dan artikel majalah).<sup>26</sup> *The Worlds Only Integrated Safety Culture Improvement System Incorporating Transformational Leadership Theory* mengatakan bahwa langkah pertama untuk menentukan stakeholder adalah

<sup>23</sup> Hsieh, J.J Po-An, Mark Keil, Jonny Holmstrom, Lynette Kvasny. 2015. The Bumpy Road to Universal Access: an Actor-Network Analysis of a U.S. Municipal Broadband Internet Initiative. *The Information Society*, 28: 264–283, 2012 Copyright © Taylor & Francis Group, LLC ISSN: 0197-2243 print / 1087-6537 online DOI: 10.1080/01972243.2012.689271

<sup>24</sup> Callon, M. 1986. Some elements of a sociology of translation: Domestication of the scallops and fishermen of St. Brieuc Bay. In *Power, action and belief: A new sociology of knowledge*, ed. J. Law, 196–233. London, UK: Routledge & Kegan Paul.

<sup>25</sup> Ibid 21

<sup>26</sup> Ibid 20

identifikasi melalui brainstorming. Pendapat demikian juga dikatakan oleh Bryson (1995),<sup>27</sup> bahwa dasar teknik stakeholder analisis adalah identifikasi yang langkah awalnya dilakukan dengan brainstorming. Stakeholder adalah kelompok atau individual yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh capaian/prestasi tujuan organisasi (Freeman;1984)<sup>28</sup>

Melalui brainstorming sekaligus interview dengan beberapa pelaku kebijakan di daerah, sampling masyarakat dan studi literatur ditentukan bahwa stakeholder atau actor yang terlibat yaitu :

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Legislatur, yang dalam hal ini adalah DPRD Provinsi Jawa Tengah;
3. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi selaku Internet Service Provider,
4. Penyelenggara Jasa Layanan Telekomunikasi, seperti Warung Internet/ Cafe Internet, Pusat Pelayanan Internet Kecamatan (PPIK), Hotspot Publik yang banyak dibuka oleh pihak swasta, seperti di hotel, tempat hiburan, rumah makan dan sebagainya;
5. Pengguna Layanan/Publik/Masyarakat

Setelah mengetahui aktor/stakeholder, maka selanjutnya perlu dilakukan prioritas stakeholder. Dalam *The Worlds Only Integrated Safety Culture Improvement System Incorporating Transformational Leadership Theory*, langkah ke-2 yaitu memasukkan masing-masing stakeholder dalam Grid Power. Hal ini serupa dengan yang dikemukakan Eden and Ackerman (1998), ataupun Campbell dan Mitchell (2002) (dalam Bryson, 2004)<sup>29</sup> Power dapat terdiri dari indikator : 1) otoritas hukum yang relevan dalam pengambilan keputusan kebijakan dan implementasi; termasuk aturan dan penegakan hukum; 2) kepemilikan informasi terkini untuk menegakkan minat konsumen; 3) memiliki keahlian dalam perlindungan konsumen berdasarkan hukum tidak hanya konsumen tetapi juga kebijakan konsumen, perencanaan dan manajemen; 4) kepemilikan anggaran dan sumber daya untuk mendukung operasi kelompok konsumen sipil; 5) kemampuan merangsang mobilisasi massa untuk perubahan kebijakan (Ondee;2008).<sup>30</sup> Melihat kelima indikator ini, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah *key actor* atau *definitive stakeholder* yang paling dominan dalam rangka membuka akses internet yang lebih luas untuk masyarakat. Pemprov. memiliki kelimanya, dan mempunyai interest / ketertarikan yang tinggi terhadap upaya membuka akses

<sup>27</sup> Bryson, J. 1995. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizational Revised Edition*. San Fransisco CA; Jossey Bass.

<sup>28</sup> Freeman, R.E.1984. *Starategic Management A Stakeholder Approach*. Boston ; Priman.

<sup>29</sup> Bryson, Prof.John M. 2004. *What to Do When Stakeholders Matter A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Technique*. A paper presented at National Public Management Research Conference 9-11 Oktober 2003. Georgetown University Public Policy Institute. Washington DC, publish in *Public Management Review*, 2004

<sup>30</sup> Ondee, P & S. Pannarunothai. 2008. *Stakeholder Analysis: Who Are The Key Actors in Establishing and Developing Thai Independent Consumer Organization?*. *International Journal of Human and Social Sciences* 3:4.2008ppg 265-275

internet yang lebih luas untuk masyarakat. Sebab tanpa diakses masyarakat, maka program e-government tidak dapat berjalan optimal.

Langkah berikutnya adalah mendefinisikan masalah. Penentuan masalah dapat dilandasi dengan upaya pembagian masalah menurut Dunn (2000).<sup>31</sup> Tujuan yang ingin diharapkan pemerintah dalam rangka menerapkan e-services yang berbasis internet untuk meminimalisir *digital divide*, menerapkan pelayanan publik yang lebih baik (Bwalya, Kelvin Joseph & Tanya Du Plessis and Chris Rensleigh. 2014) dan meningkatkan perekonomian (Hsieh – Keil ; 2015). Selanjutnya dari visi ini dibreakdown dalam berbagai tahap permasalahan.

<b><i>Problem Formulation Step (Dunn)</i></b>	<b><i>Indicators</i></b>
Problem Situation	Keterbatasan akses internet
Meta Problem	Biaya akses mahal
Substantive Problem	Infrastruktur kurang, seperti BTS, Sarana Kabel (Fyber Optic), dsb.
Formal Problem	Dukungan pembangunan infrastruktur

*Fig. 1 Problem Step Indicator*

Akses internet sangat ditentukan oleh ketersediaan jaringan oleh provider atau penyelenggara jaringan internet. Sedangkan keterbatasan akses masyarakat didasarkan pada tingkat biaya akses yang berlaku. Sebagaimana dilansir oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), bahwa pengguna internet mengemukakan dua alasan utama dalam memilih provider, yaitu mengenai masalah biaya dan akses jaringan.<sup>32</sup> Intinya adalah masalah biaya menjadi pertimbangan utama dalam mengakses internet. Biaya ini didasarkan pada kemampuan provider untuk membangun infrastruktur.

Sampai dengan saat ini, pemerintah belum menerapkan regulasi mengenai tarif internet, walaupun tarif telephone dan SMS sudah diatur. Tarif ditentukan sendiri oleh masing – masing provider, sehingga banyak sekali iklan dan perang tarif yang kita saksikan di televisi saat ini. Selain itu, bagi pengguna internet melalui warung atau cafe internet, maka penyelenggara jasa layanan juga ikut menentukan tarif penggunaan jasa layanan internet. Dalam hal tarif, peran pemerintah daerah hanya bisa memfasilitasi usulan antara pengguna di daerahnya dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat saat ini juga telah berunding bersama dengan operator/provider dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk menentukan tarif internet.

<sup>31</sup> Dunn, William N. 2008. Terjemahan. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

<sup>32</sup> Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Profil Pengguna Internet Indonesia. 2014. Diterbitkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia , Maret 2015

Sebagaimana dilansir CNN Indonesia, bahwa penyesuaian tarif internet baru dikaji intensif pada tahun 2016.<sup>33</sup>

Dalam artikel yang sama dijelaskan pula bahwa akses yang mahal ini dikarenakan faktor seperti komponen biaya perangkat, pemeliharaan dan tingkat kesulitan lain, sebagaimana dikemukakan Vice President Corporate Communication Telkomsel, Adita Irawati. Faktanya, tarif internet dibagi dalam zonasi yang berbeda berdasarkan infrastruktur di setiap wilayah. Infrastruktur ini sebenarnya bisa dibantu dari pemerintah daerah. Dalam mengatasi infrastruktur yang kurang, provider menjadi pelaku utama yang bisa mengembangkan jaringan teknisnya di suatu daerah, disusul dengan jasa layanan internet, seperti warnet walaupun dalam skala kecil. Warnet/Cafenet atau yang sekarang juga populer adalah tempat *Game Online*, secara sederhana menyediakan perangkat untuk akses internet.

Untuk mengatasi kekurangan infrastruktur internet ini, pemerintah daerah dengan DPRD dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan jaringan internet di berbagai daerahnya. Dari pengamatan dan interview, ketika program videoconference di Jawa Tengah berlangsung, ataupun penyelenggaraan e-musrenbang, maka Pemprov. Jateng bekerjasama dengan PT. Telkom dalam penyediaan akses internet. Internet ini menghubungkan daerah komunikator dengan pusat acara. Dalam hal ini, alokasi anggaran sangat penting, sehingga kegiatan semacam videoconference ini bisa berlangsung, dan alangkah baiknya apabila jaringan yang baru saja dipergunakan tersebut bisa seterusnya dipergunakan untuk masyarakat. Istilahnya pemda harus membuka lahan baru terlebih dahulu, agar internet segera sampai ke masyarakat. serta mendorong adanya program – program yang bisa memperluas akses internet, seperti Internet Desa<sup>34</sup>, usulan kepada Menkominfo tentang penambahan Pusat Layanan Internet Kecamatan, Mobile Internet Keliling, dan sebagainya.

Sedangkan dalam rangka mendukung pembangun infrastruktur internet, Peran pemerintah daerah dan DPRD juga sangat vital, terutama dalam hal pengaturan perijinan tentang pendirian transmiter atau BTS, mendorong tumbuhnya jasa layanan internet seperti warnet dan cafenet dan mendorong kerjasama pemerintah dan provider. Di sini DPRD sangat berperan selain menggunakan hak budgetingnya, juga membuat regulasi daerah mengenai jasa layanan internet, regulasi tentang ijin pendirian tower data internet, dan sebagainya. Masyarakat juga punya andil dalam persetujuan pendirian transmiter dan warnet, agar upaya – upaya penolakan warga tidak selalu terjadi. Untuk provider dan penyelenggara jasa layanan internet, tidak usah diragukan lagi, mereka akan sangat mendukung pembangunan infrastruktur, baik dalam sisi teknis, biaya, administrasi, hingga dampak –

<sup>33</sup> Artikel di <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150723141403-185-67777/internet-telkomsel-dianggap-kemahalan-brti-mau-atur-tarif/> yang berjudul Internet telkomsel dianggap kemahalan, BRTI mau atur Tarif yang ditulis oleh Aditya Panji, CNN Indonesia pada 23 Juli 2015 pukul 16:22 WIB

<sup>34</sup> Program Internet Desa yang digagas kerjasama dengan operator / provider seperti Desa Digital dengan Telkom atau Desa Broadband dengan XL;

dampak yang ditimbulkan baik aspek sosial maupun ekonomi. Jasa layanan internet, bukan hanya harus menyiapkan PC kepada customer, tetapi juga antenna receiver dan distributing system. Tak jarang, customer warnet ini bukan hanya pengunjung, tetapi juga rumah – rumah disekitarnya.

Berinovasi dari konsep problem frame stakeholder map (Nutt & Backoff, 1992) maka upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut menunjukkan tingkat level power masing – masing aktor dalam menghadapi masalah. Ke empat stakeholder pendukung pemerintah daerah dalam membuka akses internet yang lebih lebar di Jawa Tengah, dapat digambarkan pada level seperti figur 3.

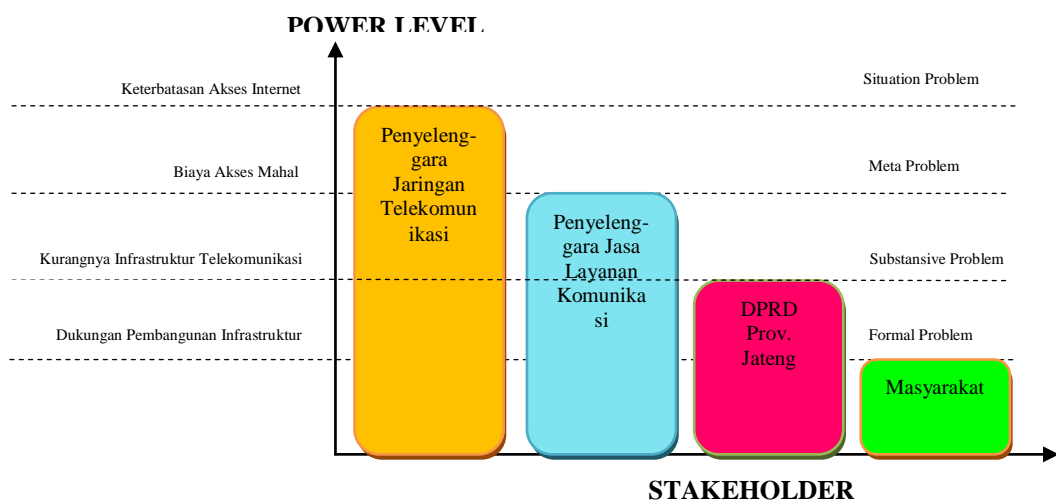


Fig. 2. Power Level

Untuk memeriksa keabsahan level power tersebut, maka dapat digunakan pola negasi dari permasalahan. Sebagai contoh untuk membuat solusi tentang keterbatasan akses internet, apakah provider bisa melakukan tanpa dukungan stakeholder yang lain. Dalam gambar ditampilkan bahwa pada level permasalahan tertinggi, maka hanya provider yang mampu mengatasi. Jawabannya tentu bisa, karena untuk mengatasi keterbatasan akses internet tanpa dukungan aktor lain, maka provider bisa mengganti perangkatnya dengan kapasitas pemancaran yang lebih tinggi, menerapkan promosi tarif sehingga menarik bagi pengguna, dan lain sebagainya. Sedangkan ketiga aktor yang lain tidak dapat melakukannya tanpa adanya dukungan dari provider, sebab providerlah yang berkuasa penuh terhadap peningkatan kemampuan peralatan infrastruktur internet dan penentuan tarif internet, karena belum ada regulasi yang mengaturnya. Contoh selanjutnya mungkin pada tahap masalah kurangnya infrastruktur telekomunikasi, dimana DPRD/Legislatif memiliki power yang lebih tinggi dari masyarakat. Di sini diartikan bahwa tanpa masyarakat DPRD pun bisa membuat kebijakan – kebijakan yang mampu menambah infrastruktur telekomunikasi bertambah, bukan hanya berupa regulasi perijinan tetapi juga persetujuan kerjasama antara pemerintah dan provider atau jasa pelayanan internet, serta hak budgeting. Di sini baik jasa penyelenggara jaringan atau provider dan jasa

pelayanan internet juga berperan, sehingga pada level ini keduanya juga hadir, sedangkan masyarakat tidak mempunyai power dalam tahap ini. Demikian seterusnya.

- 2) **Interessesment**, adalah langkah yang berorientasi pada upaya meyakinkan aktor untuk berbagi peran dan menjadi bagian aktif dari inisiatif. Upaya yang dilakukan adalah untuk meyakinkan para actor agar tetap komitmen mendukung langkah – langkah dalam memperluas akses internet, dalam rangka mengoptimalkan e-services di Jawa Tengah.

Penyelenggaraan akses internet yang lebih luas dalam meningkatkan e-services adalah inisiatif Pemerintah Provinsi melalui berbagai program e-services. Pemprov Jateng disebut sebagai inisiator didasarkan pada indikasi bahwa fungsi pemerintah provinsi adalah wakil dari pemerintah pusat, sehingga kebijakan pemerintah pusat tentang Rencana Pita Lebar untuk membuka akses internet yang lebih luas merupakan bagian kebijakan yang harus dijalankan pemerintah provinsi. Selain itu, Gubernur juga telah mencanangkan penerapan e-government untuk Pemprov. Jateng sehingga implikasinya jaringan internet harus bisa diakses dan tersebar secara merata di Jawa Tengah. Oleh karena itu, Pemprov selaku inisiator perlu mengadakan ikatan kerjasama dengan para actor lain untuk meningkatkan akses internet masyarakat.

Aktor yang paling berpengaruh utama adalah penyelenggara jaringan internet. Maka dari itu, ikatan kerjasama dengan penyelenggara jaringan internet menjadi hal penting untuk membuka akses internet di seluruh daerah di Jawa Tengah.

Berdasarkan penelusuran literatur terdapat beberapa program yang dimotori oleh penyelenggara jaringan internet / provider ini, seperti program Desa Digital, Desa Broadband, dan lain sebagainya. Program seperti ini yang harus didorong oleh Pemprov untuk membuka akses internet di lokasi lain. Misalnya saja di Karimunjawa, maka kesepakatan dan komitmen Pemprov dengan provider sangat penting dalam rangka membuka akses internet di Kepulauan tersebut.

Selain itu juga adanya Desa Berdikari dan Pasar Desa Online<sup>35</sup> sesuai misi dalam RPJMD Prov. Jateng 2013-2018 yang merupakan upaya meningkatkan kapasitas teknologi di desa agar membantu peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam program ini pula penyelenggara jasa layanan internet, seperti warung internet bisa diajak kerjasama dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, selain tentunya kerjasama dengan provider. Warnet yang lebih banyak di Jateng dapat mendorong kemudahan akses masyarakat terhadap internet, termasuk menjadi pendamping bagi masyarakat – masyarakat yang baru mengenal internet.

<sup>35</sup> Dikutip dari [www. antarajateng.com](http://www.antarajateng.com) <http://www.antarajateng.com/detail/jateng-kini-miliki-pasar-desa-online.html> perwarta Akhmad Nazaruddin pada 11 Okt 2013 13:46:07 WIB.

Dalam kerjasama – kerjasama ini bukan hanya kesepakatan teknis yang dibuat, tetapi juga mekanisme insentif agar para actor tersebut juga memiliki interest yang tinggi terhadap upaya membuka jaringan internet yang lebih luas untuk masyarakat. Insentif dapat berupa kemudahan perijinan, atau hal lain yang bersifat legal. Untuk itu Pemerintah Provinsi dapat memberikan rekomendasi kepada provider atau penyelenggara jasa layanan internet yang merupakan pioner dalam membuka jaringan akses internet di suatu daerah baru yang masih kurang tersentuh layanan internet, seperti kawasan pulau – pulau di Kepulauan Karimunjawa. Pemerintah Provinsi juga mendorong rekomendasi ini untuk ditindaklanjuti di tingkat yang lebih rendah, misalkan di SKPD Pemprov sendiri atau di Pemerintah Kabupaten / Kota. Dengan demikian, insentif ini menarik bagi pelaku usaha untuk membantu pengembangan jaringan internet di Jawa Tengah.

Kemitraan dengan legislatif atau DPRD juga perlu ditingkatkan, tidak hanya dalam rangka mendorong persetujuan alokasi anggaran dalam mendukung program penyebarluasan akses internet, tetapi juga langkah – langkah regulatif lainnya. Salah satu yang potensial adalah DPRD bisa saja mengeluarkan aturan daerah mengenai hotel atau tempat hiburan yang harus membangun jaringan internet gratis untuk masyarakat sekitar atau pelanggannya. Hotspot berbasis wi fi connection ini sebenarnya telah ada dan menjadi kesadaran bagi public area seperti hotel, rumah makan dan tempat hiburan lain dalam melayani pelanggannya. Namun demikian, belum diatur dalam sebuah kerangka aturan daerah, maka dari itu hadirnya legislatif menjadi peran penting membuat aturan formal tentang kewajiban pihak swasta membangun free hotspot area. Aturan – aturan lain mengenai kemudahan perijinan untuk pembangunan tower transmiter, penempatan perangkat di beberapa wilayah serta aturan daerah mengenai pengelolaan jasa layanan internet menjadi pendorong terbukanya akses masyarakat terhadap internet.<sup>36</sup> Karena DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah, maka sudah selayaknya memperjuangkan kepentingan masyarakat menjadi bagian dari tugas yang tidak perlu dilegitimasi melalui berbagai insentif.

Sedangkan hubungan dengan masyarakat ditekankan pada upaya sosialisasi pentingnya internet, tentunya dengan bantuan provider dan jasa layanan internet, sehingga masyarakat mendukung setiap kali ada pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Jateng. Dalam mengembangkan akses internet, dibutuhkan penempatan peralatan di berbagai wilayah, seperti tower transmiter dan lain sebagainya, termasuk membangun jaringan kabel dan sentra – sentra layanan. Hambatan yang muncul dalam pembangunan tower transmiter selain perijinan adalah penolakan warga, sebab sewa lahan menara sebagian besar di tanah warga dan membutuhkan persetujuan warga di sekitar lokasi dimana tower akan didirikan, masih banyak warga was – was dengan keberadaan tower *Base Tranceiver Station (BTS)*, meskipun tower ini

---

<sup>36</sup> Pembangunan tower membutuhkan ijin IMB yang diatur dengan Perda Kabupaten/Kota, maupun ijin – ijin teknis lainnya yang berada di daerah



sangat dibutuhkan dalam penyebarluasan akses internet.<sup>37</sup> Maka dari itu, hubungan baik dengan masyarakat ditingkatkan dengan mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya internet, dan sikap masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Insentif untuk masyarakat, berupa perlindungan hukum terhadap ketentuan – ketentuan terkait pembangunan infrastruktur telekomunikasi oleh pelaku usaha komunikasi. Salah satunya upaya untuk mengatur hak yang diperoleh warga dalam pembangunan tower BTS atau warnet, berdasarkan mekanisme Corporate Social Responsibility.

Kerjasama dengan actor ini dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) hubungan, yaitu : a) *private partnership* hubungan antara pemerintah provinsi dengan penyelenggara jasa jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa layanan telekomunikasi, b) *political partnership*, hubungan antara pemerintah dengan DPRD dalam rangka mengalokasikan anggaran, menyetujui program serta membuat regulasi baru, c) *citizen relationship*, yaitu hubungan pemerintah dengan masyarakat.

- 3) **Enrollment**, adalah upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat tertarik untuk mengakses internet dengan upaya win – win solution antara pemerintah dengan stakeholder lainnya.

Dalam penelitian TV Kabel LITV di Kota LaGrange Amerika, salah satu upaya pemerintah daerah dalam *enrollment* melalui tiga langkah *win - win solution*, yaitu adanya potongan harga pemasangan TV kabel yang harus dibayarkan oleh pemerintah, bonus fee kepada operator TV kabel untuk setiap pemasangan TV box, bonus fee bulanan yang dibayarkan pemerintah, dan keterlibatan pegawai pemerintah dalam berbagai department untuk ikut serta dalam melayani instalasi pemasangan TV box kepada masyarakat, setiap pemasangan diberikan bonus fee bagi pegawai tersebut. Dengan win – win solution ini, upaya secara total dikerahkan untuk menyebarluaskan TV kabel kepada masyarakat.

Namun demikian, konsep ini juga masih menemui kendala karena kondisi sosio ekonomi masyarakat. Kondisi sosio ekonomi inilah yang sangat berperan dalam intepretasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam membuka akses internet yang lebih luas.<sup>38</sup> Melihat penelitian di LaGrange ini maka langkah utama dalam enrollment adalah menimalisir biaya serta penerapan reward.

Pendapatan dan tingkat pendidikan merupakan indikasi sosioekonomi yang penting dalam penggunaan internet (Mbarika, Musa, and McMullen

<sup>37</sup> Resiko dan penolakan warga, serta kajian singkat tentang keberadaan Tower BTS dapat dilihat pada artikel “Pro-Kontra Keberadaan BTS Seluler” yang dimuat pada <http://www.suaramerdeka.com/harian/0801/07/eko08.htm> pada 7 Januari 2008.

<sup>38</sup> Ibid 18

2002).<sup>39</sup> Sejalan dengan penelitian dari APJII bahwa masyarakat cenderung akan memilih layanan internet dengan mempertimbangkan faktor biaya dan infrastruktur. Maka dari itu, biaya menjadi kendala utama yang perlu dipertimbangkan.

Untuk mendatangkan ketertarikan masyarakat dalam menggunakan internet, maka elemen biaya harus diminimalisir. Win – win solution yang diterapkan yaitu adanya kesepakatan antara pemerintah dan provider serta jasa layanan internet untuk memberikan internet yang lebih murah dan bahkan gratis kepada masyarakat dengan beberapa solusi, antara lain adalah konsep kerjasama sponsorship dengan provider atau jasa layanan internet.

Pemerintah dapat membangun layanan terintegrasi yang memberikan kemudahan akses internet bagi masyarakat. Konkritnya, Pemprov dapat menyediakan perangkat kepada publik di setiap kantor pemerintahan yang ada di lingkungannya sedangkan jaringan akses internet disediakan oleh provider di tempat yang sama. Misalnya di Kantor Pemprov dibuatlah media centre dimana masyarakat bisa menggunakan komputer, PC dan internet akses melalui hotspot gratis. Layanan semacam ini juga dibangun di beberapa Kantor Pemerintah Provinsi yang ada di daerah, seperti Kantor Badan Koordinasi Wilayah. Pihak Provider dapat menjadi sponsorship untuk penyediaan internet akses, dengan imbalan, bahwa lokasi media centre di branding atau sebagian menjadi lokasi promosi product provider.

Sedangkan untuk lebih menjangkau ke desa – desa, konsep mobile internet, seperti Pusat Layanan Internet Kecamatan dari Kemkominfo RI harus diperbanyak. Mobile internet ini merupakan sarana akses internet yang dinamis dan bisa menjangkau desa – desa, bahkan bisa mangkal secara terjadwal di beberapa kantor desa. Jasa data akses/internet akses bisa disediakan oleh provider atau jasa layanan telekomunikasi dengan imbalan branding mobil sebagai sarana promosi produk mereka.

Adapula potensi skema berbasis regulasi, dimana pemerintah daerah mengatur setiap kali pendirian tower transiver atau warnet, maka provider atau pengelola jasa layanan harus memberikan dukungan akses data gratis bagi masyarakat sekitarnya sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). Banyak sekali skema – skema kerjasama yang bisa dipergunakan untuk memudahkan masyarakat mengakses internet.

- 4) **Mobilization**, adalah upaya untuk mengamankan dukungan dari para aktor, sehingga menstabilkan jaringan dan melembagakan ide yang mendasarinya. Upaya mobilization ini didasarkan pada pertimbangan keuntungan dan kerugian dari berbagai pertimbangan aktor, sehingga program dapat berlanjut.

Pertimbangan yang lebih luas mengenai konteks politik, ekonomi, dan sosial dan posisi berbagai aktor dalam sebuah aspek harus dipahami beserta

<sup>39</sup> Mbarika, V., P.F. Musa, T.A. Byrd, and P. McMullen. 2002. Teledensity growth constraints and strategies for Africa's LDCs: "Viagra" prescriptions or sustainable development strategies? *Journal of Global Information Technology Management* 5: 25–42.

alasan-alasan di balik interpretasi mereka (Carter et al 1999;. Howcroft et al 2004;. Johns 2006). Dalam konteks politik, yang dikawatirkan dapat menghambat program penyebaran jaringan internet ego politik yang berimbas pada perubahan agenda kepentingan politik, serta tingkat kedekatan political relationship. Maka dari itu, kesepakatan – kesepakatan yang terlegitimasi melalui dokumen resmi menjadi senjata untuk menjaga sikap dan dukungan DPRD terhadap kebijakan.

Dalam ranah ekonomi, perhitungan untung dan rugi dari penyelenggara jasa jaringan dan jasa layanan telekomunikasi akan mendominasi. Komitmen yang disertai dengan insentif, serta konsep sponsorship akan memperhatikan perhitungan untung rugi perusahaan. Maka dari itu, secara berkala perlu adanya renegotiasi ulang antara pemerintah daerah dengan private sector ini dalam rangka mengembangkan jaringan internet.

Sedangkan pada aspek sosial, akan terlihat dua kategori masyarakat. Khusus untuk masyarakat sebagai pengguna layanan dibedakan dalam dua kategori yaitu *Socio Economy Disadvantages* (SED) dan *Socio Economy Advantages* (SEA).<sup>40</sup> Kelompok SED yang semula kesulitan mendapatkan layanan internet, justru akan menjadi stakeholder pendukung yang kuat setelah memperoleh kemudahan akses, misalkan dengan adanya internet gratis. Sedang, kelompok SEA yang semula sangat senang dengan adanya jaringan internet yang luas, justru akan berubah menjadi stakeholder opponent, karena menuntut adanya perbaikan – perbaikan layanan yang lebih baik. Ibarat sudah mengenal internet, maka penggunaannya pun tidak akan terbatas pada browsing dan chatting, tetapi juga aplikasi – aplikasi lain yang lebih kompleks, sehingga tuntutan perbaikan sistem sangat penting. Dalam upaya ini, pertimbangan teknis operasional menjadi hal yang sangat penting. Untuk mempertahankan mobilisasi masyarakat agar tetap menjadi pendukung setia kebijakan, maka langkah yang perlu dilakukan adalah mengembangkan inovasi kebijakan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan masyarakat. Skema inovasi yang bisa dikembangkan adalah melalui pemberian hibah kepada kelompok masyarakat, koperasi atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang berbentuk badan hukum. Hibah ini diberikan untuk mengembangkan warung internet desa, sehingga bisa dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat di desa.

E-government adalah prioritas tuntutan global (Druke : 2005)<sup>41</sup> Konsekuensi dari intervensi TIK pemerintah tergantung pada konteks yang lebih luas dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi di mana teknologi tersebut diterapkan (Castells 2004, Sy 1999 dalam Hsieh:2015). Beberapa studi telah meneliti interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, bagaimana interaksi ini berkembang, dan bagaimana konteks sosial, ekonomi, dan faktor politik mempengaruhi perkembangan dan hasil inisiatif ini. Oleh

---

<sup>40</sup> Ibid 18

<sup>41</sup> Druke, Helmut. 2005. Local Electronic Government A Comparative Study. Routledge Research in Information Technology and Society. London

sebab itu, berbagai upaya tersebut menjadi dasar mobilisasi aspek dalam rangka mempertahankan kebijakan dalam rangka membuka akses internet yang lebih luas untuk masyarakat.

### C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam percaturan ASEAN Economic Community, maka daya saing bangsa harus ditingkatkan. Salah satu pilar pembentuk daya saing adalah inovasi dan kesiapan teknologi. E-government merupakan bentuk inovasi pemerintah di bidang pelayanan berbasis internet. Namun demikian penggunaan internet di Jawa Tengah masih minim dan kurang optimal. Penggunaan internet merupakan salah satu indikator kesiapan teknologi yang mendukung daya saing. Indikasi penyebabnya adalah kurang meratanya jaringan internet di Jawa Tengah.

Melalui Actor Network Theory (ANT) dengan penerapan 4 (empat) langkah translation (Hsieh:2015) yang terdiri dari empat tahap utama: problematisasi, interesement, Enrollment, dan mobilisasi, maka dapat ditentukan actor dan peran masing – masing.

Pada langkah problematization, ditentukan identifikasi aktor kunci, aktor yang terlibat, serta problem permasalahan. Berdasarkan 5 (lima) indikator power (Onde ; 2008), maka main actor yang juga disebut sebagai defensive actor adalah pemerintah daerah. Sedangkan dengan kajian literatur dan interview didapat 4 (empat) actor pendukung lainnya yaitu DPRD/legislatif, penyelenggara jasa jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa layanan telekomunikasi, dan masyarakat/pengguna. Mengadopsi pola perumusan masalah (Dunn;2008) terdapat 4 (empat) uraian permasalahan, yaitu situasi masalah berupa keterbatasan akses internet, meta masalahnya adalah biaya internet mahal, masalah substantif adalah karena kurangnya infrastruktur telekomunikasi dan formal masalah adalah kurangnya dukungan seluruh aktor terhadap pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Mengadopsi dari istilah konsep problem frame stakeholder map (Nutt & Backoff, 1992 dalam Bryson:2004)<sup>42</sup>, maka dapat ditentukan level power masing – masing actor pendukung. Selain main aktor pemerintah daerah, maka stakeholder dengan level power tertinggi adalah provider, disusul penyelenggara jasa layanan, DPRD/legislatif serta masyarakat.

Pada tahap interesement langkah utama yang dilakukan adalah meyakinkan para actor agar tetap komitmen mendukung langkah – langkah dalam memperluas akses internet, dalam rangka mengoptimalkan e-services di Jawa Tengah. Dalam interesement dibina kerjasama political partnership, private partnership dan citizen relationship. Pola kerjasama dengan mengedepankan intensif untuk masing – masing hubungan. Pada private partnership intensif yang diterapkan berupa kemudahan perijinan dan rekomendasi, sedangkan pada citizen relationship, intensif yang bisa diterapkan berupa perlindungan hukum terhadap ketentuan – ketentuan terkait pembangunan infrastruktur telekomunikasi

<sup>42</sup> Bryson, John M. 2004. What to Do When Stakeholder Matter-Stakeholder Identification and Analysis Techniques. Public Management Review ISSN 1471-9037 prinViSSN 1471-9045 online Vol. 6 Issue 1 2004 21-53 @ 2004 Routledge Taylor & Francis Ltd

oleh pelaku usaha komunikasi, seperti mengatur hak yang diperoleh warga dalam pembangunan tower BTS atau warnet.

Langkah Enrollment, adalah upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat tertarik untuk mengakses internet dengan upaya win – win solution. Salah satunya melalui konsep kerjasama sponsorship dengan provider atau jasa layanan internet. Pemprov dapat membuka media centre gratis di setiap kantor dan perwakilan yang ada di daerah, dimana provider menanggung biaya akses internet dan mendapatkan imbalan berupa ruang promosi dalam media centre tersebut. Aplikasi sponsorship juga bisa melalui mobile layanan internet keliling, dimana provider atau jasa pelayanan internet memiliki hak promosi branding mobil yang dipergunakan. Win – win solution yang lain yang potensial adalah skema berbasis regulasi, dimana pemerintah daerah mengatur setiap kali pendirian tower transfer atau warnet, maka provider atau pengelola jasa layanan harus memberikan layanan gratis kepada masyarakat sekitarnya sebagaimana dalam program CSR.

Pada langkah Mobilization, diperlukan upaya untuk mengamankan dukungan dari para aktor, sehingga menstabilkan jaringan dalam rangka mendukung kebijakan. Upaya mobilization ini didasarkan pada pertimbangan keuntungan dan kerugian dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial. Konteks politik dikawatirkan membawa ego politik dan perubahan agenda politik yang bisa menghambat program penyebarluasan jaringan internet, sehingga perlu adanya kesepakatan yang terlegitimasi melalui dokumen resmi sebagai jaminan dukungan DPRD. Ranah ekonomi menitikberatkan perhitungan untung dan rugi dari penyelenggara jasa jaringan dan jasa layanan telekomunikasi akan mendominasi, maka secara berkala perlu adanya renegotiasi ulang antara pemerintah daerah dengan private sector. Sedangkan aspek sosial, pertimbangan teknis operasional menjadi hal yang sangat penting maka langkah yang perlu dilakukan adalah mengembangkan inovasi kebijakan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan masyarakat. Skema inovasi yang bisa dikembangkan adalah melalui pemberian hibah kepada kelompok masyarakat atau BKM untuk mendirikan warnet yang dikelola secara mandiri.

Berdasarkan kesimpulan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menyebarluaskan akses internet agar lebih merata sehingga berimbas pada peningkatan partisipasi penggunaan internet maupun dukungan suksesnya e-services, direkomendasikan untuk melakukan langkah :

- 1) Menjalinkan kesepakatan dengan provider untuk membuka jaringan internet baru di Jawa Tengah sehingga mampu menurunkan biaya akses internet, menjalin kerjasama sponsorship dalam membangun media centre dan mobil internet keliling untuk memberikan akses internet gratis, memberikan rekomendasi kepada provider untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah baru;
- 2) Menjalinkan kesepakatan dengan penyelenggara jasa internet untuk mendukung penyebarluasan akses internet kepada masyarakat, kerjasama untuk mendampingi masyarakat dalam sosialisasi program – program e-

- services dan membangun warung internet desa, memberikan rekomendasi untuk pembangunan infrastruktur di daerah baru;
- 3) Bersama DPRD/legislatif merumuskan kebijakan/rekomendasi tentang kemudahan perijinan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pengalokasian anggaran untuk menyebarluaskan jaringan internet seperti untuk menyediakan hardware media centre di kantor pemerintah dan internet keliling;
  - 4) Mengupayakan perlindungan hukum, mengatur hak masyarakat yang diperoleh dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi (tower BTS atau warnet), mendorong provider atau pengelola jasa layanan bisa memberikan layanan internet gratis kepada masyarakat di sekitar infrastruktur yang dibangun, serta mengembangkan inovasi kebijakan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, antara lain pengembangan hibah untuk pendirian warung internet desa.\*\*\*

## REFERENSI

- Bwalya, Kelvin Joseph & Tanya Du Plessis and Chris Rensleigh. 2014. E-government implementation in Zambia – prospects, by :Kelvin Joseph Bwalya, Tanya Du Plessis and Chris Rensleigh published Transforming Government: People, Process and Policy Vol. 8 No. 1, 2014 pp. 101-130 q Emerald Group Publishing Limited 1750-6166 DOI 10.1108/TG-01-2013-0002
- Bert Mulder & Martijn Hartog; 2012. Determine the Workload of the Structural Implementation of E-Democracy: Local Government Policy Issues, Policy Cycle and Styles of Citizenship Combined karya Bert Mulder & Martijn Hartog, eSociety Institute of The Hague University of Applied Sciences, The Netherlands yang dimuat pada International Journal of Information Communication Technologies and Human Development, 4(1), 52-61, January-March 2012.
- Bryson, J. 1995. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizational Revised Edition. San Fransisco CA; Jossey Bass.
- Bryson, Prof. John M. 2004. What to Do When Stakeholders Matter A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Technique. A paper presented at National Public Management Research Conference 9-11 Oktober 2003. Georgetown University Public Policy Institute. Washington DC, publish in Public Management Review, 2004
- Callon, M. 1986. Some elements of a sociology of translation: Domestication of the scallops and fishermen of St. Brieuc Bay. In Power, action and belief: A new sociology of knowledge, ed. J. Law, 196–233. London, UK: Routledge & Kegan Paul
- Chowdhury, Gobinda. 2012. Sustainability of digital information services. Journal of Documentation Vol. 69 No. 5, 2013 pp. 602-622 @ Emerald Group Publishing Limited 0022-0418 DOI 10.1108/JD-08-2012-0104
- Coombs, W. Timothy. 1998. The Internet as a Potential Equalizer. New Leverage for Confronting Social Irresponsibility;. Public Relation Review. Vol 24
- Druke, Helmut. 2005. Local Electronic Government A comparative study. Routledge Research in Information Technology and Society. London
- Dunn, William N. 2008. Terjemahan. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Fieldman, M.P. 1999. The New Economics of Innovation, Spillovers and Agglomeration: A Review of Empirical Studies. Economic of Innovation and New Technology, Vol 8 No. 1-2 pp 5-25.

- Freeman, R.E.1984. *Starategic Management A Stakeholder Approach*. Boston ; Priman.
- Hsieh, J.J Po-An, Mark Keil, Jonny Holmstrom, Lynette Kvasny. 2015. *The Bumpy Road to Universal Access: an Actor-Network Analysis of a U.S. Municipal Boradband Internet Initiative*. *The Information Society*, 28: 264–283, 2012 Copyright c ? Taylor & Francis Group, LLC ISSN: 0197-2243 print / 1087-6537 online DOI: 10.1080/01972243.2012.689271
- Ifukor, Mari Omogor. 2013. *Channels of Information Acquistion and Dissemination Among Rural Dwellers*. *International Journal of Library and Information Science Vol 5(10)* pp 306-312. ISSN 1996-0816 @2013 academic journals
- Khalil, T.M. 1999. *Management of Technology : The Key to Competitiveness and Wealth Creation*, New York: McGraw-Hill Science/Engineering/Math.
- Mbarika, V.,P.F.Musa,T.A.Byrd,andP.McMullen.2002.*Teledensitygrowth constraints and strategies for Africa’s LDCs: “Viagra” prescriptions or sustainable development strategies?* *Journal of Global Information Technology Management* 5: 25–42.
- McQuail, Deni. 200. *Mass Communication Theory (Edisi Keempat)* . London:SAGE Publication
- Ondee, P & S. Pannarunothai. 2008. *Stakeholder Analysis: Who Are The Key Actors in Establishing and Developing Thai Independent Consumer Organization?*. *International Journal of Human and Social Sciences* 3:4.2008ppg 265-275
- Sy, J. H. 1999. *Global communications for a more equitable world*. In *Global public goods: International cooperation in the 21th century*, ed. I. Kaul, I. Grunberg, and M. A. Stern, 326–43. Oxford, UK: Oxford University Press
- Warschauer, M. 2004. *Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Zembylas, Michalinos And Charalambos Vrasidas. 2005. *Globalization, information and communication technologies, and the prospect of a ‘global village’:promises of inclusion or electronic colonization?*. *Journal of Curriculum Studies* 2005, VOL. 37, NO. 1, 65–83 ISSN 0022–0272 print/ISSN 1366–5839 online © 2005 Taylor & Francis Ltd.
- Zericka, M. Dhenda. 2013. *Penerapan Electronic Service Dalam Pengembangan Informasi Di Kabupaten Kutai Kartanegara*. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 2013, 1 (1): 345- 361 ISSN 0000-0000, [ejournal.ilkom.fisip-unmul.org](http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.org)
- \_\_\_\_\_.2015. *Profil Pengguna Internet Indonesia*. 2014. *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia* , Maret 2015
- \_\_\_\_\_.2014. *Jawa Tengah Dalam Angka 2014*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ; Semarang.
- <https://dailysocial.net/post/telkomsel-hadirkan-layanan-big-data>
- [http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3298/Sekilas+Palapa+Ring/0/palapa\\_ring#.VhqpB\\_ntmko](http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3298/Sekilas+Palapa+Ring/0/palapa_ring#.VhqpB_ntmko)
- <http://m.solopos.com/2012/12/11/telkom-genjot-penggunaan-internet-di-jateng-356649>
- <http://www.suaramerdeka.com/harian/0801/07/eko08.htm> “Pro-Kontra Keberadaan BTS Seluler” yang dimuat pada pada 7 Januari 2008www.antarajateng.com
- [www.kemenkeu.go.id/berita/indeks-daya-saing-global-indonesia-duduki-peringkat-37-dari140-negara](http://www.kemenkeu.go.id/berita/indeks-daya-saing-global-indonesia-duduki-peringkat-37-dari140-negara)
- [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id)
- [www.weforum.org](http://www.weforum.org).



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT  
EKONOMI ASEAN (MEA) DALAM PERSPEKTIF  
MENINGKATKAN KAPASITAS APARATUR DESA**

**TITI DARMI<sup>1</sup>**

**Abstrak**

*Bagi Indonesia, pelaksanaan MEA semestinya menjadi tantangan untuk Indonesia, dalam rangka meningkatkan potensi Indonesia dari semua aspek, tantangan tersebut bisa dari sesama anggota Asean atau diluar anggota Asean maupun di dalam negeri Indonesia itu sendiri. Komitmen Indonesia dalam menghadapi MEA sudah dilakukan dengan beberapa strategi, salah satunya adalah terbitnya UU tentang Desa. Sebagai sarana prasarana mempercepat pembangunan desa. UU tersebut dimaknai, desa mempunyai otoritas yang penuh dalam membangun desanya. Pembangunan pedesaan merupakan pondasi pembangunan nasional, desa akan menjadi kekuatan negara, desa merupakan miniature sebuah negara. Agar Indonesia eksis dalam komunitas ini, yang urgen dilakukan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan – Pengetahuan dan keterampilan – sehingga memiliki daya saing dan tenaga yang trampil. Masyarakat membutuhkan mentor, aparatur pemerintah desa sebagai motor penggerak pembangunan desa, harus bisa meningkatkan kapasitas diri dan bisa mengadopsi visi, misi dan strategis yang tepat melalui pelatihan dan pengembangan serta didukung nilai-nilai yang selalu ingin belajar, kreativitas layanan dan inovatif.*

*Kata kunci: MEA, Capacity Building, Aparatur Desa.*

**LATAR BELAKANG**

Komitmen pimpinan Negara-negara Asean yang terbentuk melalui wadah yang disebut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah diketuk palu oleh para pimpinan Negara-negara Asean yang mulai diterapkan tanggal 1 January 2015. MEA terwujud dari keinginan negara-negara ASEAN untuk mewujudkan ASEAN menjadi kawasan perekonomian yang solid dan diperhitungkan dalam percaturan perekonomian Internasional. Para Pemimpin ASEAN telah sepakat untuk mewujudkan MEA pada tahun 2015 dengan 4 pilar, yaitu (1) pasar tunggal dan basis produksi; (2) kawasan ekonomi berdaya saing tinggi; (3) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara; dan (4) kawasan yang terintegrasi penuh

---

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Bengkulu - [titi.harmadi@gmail.com](mailto:titi.harmadi@gmail.com)



dengan ekonomi global. Langkah- Indonesia dalam menghadapi MEA perlu melakukan langkah strategi yang tentunya harus sesuai dengan apa yang direkomendasikan dalam pilar MEA atau Blueprint 2015 yang mengharuskan setiap negara ASEAN wajib merformasi semua unsur-unsur utama yang menjadi sektor esensial dan syarat mutlak dalam rangka menghadapi implementasi MEA (Depdagri, 2015).

Bagi Indonesia, pelaksanaan MEA seharusnya menjadi tantangan untuk Indonesia untuk meningkatkan potensi dari semua aspek. Tantangan yang akan dihadapi Indonesia bersifat internal di dalam negeri tetapi terlebih lagi persaingan dengan sesama negara ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti China dan India. Persaingan yang ketat ini akan berdampak pada harga yang kompetitif pula, bukan hanya komoditi/produk/jasa unggulan industry besar, tetapi juga sektor Sumber Daya Manusia (SDM) karena sangatlah diperlukan SDM yang sangat mampu dan dapat bersaing dalam menghadapi MEA. Menyadari peran SDM sebagai tonggak dan memiliki andil paling besar dan cukup dominan dalam menghadapi persaingan di MEA ini, maka pencapaian kesuksesan MEA mendatang juga akan dipengaruhi oleh kesiapan SDM yang mumpuni dan dapat bersaing di dalamnya

Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan komitmen konsensus tersebut, salah satu komitmen Pemerintah Indonesia, telah diterbitkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Ini merupakan bentuk terobosan yang baik, dalam menerapkan otonomi desa. Pembangunan pedesaan merupakan pembangunan yang penting dari pembangunan nasional. Desa merupakan pondasi dan akan menjadi kekuatan Negara, pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia, desa merupakan miniature sebuah Negara. Kekuatan Negara Indonesia terletak bagaimana stakeholder yang terlibat bisa menjadikan desa sebagai potensi yang besar dalam menghadapi MEA.

UU Desa mengusung konsep Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Desa membangun dan „membangun Desa yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Hal ini, sejalan dengan Visi Misi Nawa Cita Presiden Jokowi bahwa Membangun Indonesia dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan Desa memiliki sasaran yang strategis dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang mengamankan sasaran pembangunan desa dengan cara meningkatkan jumlah desa mandiri.

Jumlah Desa di Indonesia 74.093 Desa – jumlah tersebut dapat digolongkan 20.167 tergolong desa tertinggal, 51.022 tergolong desa berkembang dan 2,904 telah menjadi desa mandiri-. Menurut Sofyan Djalil Menteri Bappenas,

pada tahun 2019 ditargetkan desa Mandiri akan bertambah 2.000 desa. Komitmen tersebut tercermin pada pemerintah mengelontorkan dana untuk desa sebesar Rp. 102,2 Trilyun di tahun 2015. (Koran Jakarta, 21 Oktober 2015).

Dari 74.093 Desa di Indonesia, Indonesia hanya memiliki 4% Desa mandiri. Jumlah yang minim ini sangat berimplikasi terhadap daya saing desa untuk menghadapi tantangan ke depan yaitu pasar global atau MEA. **Urgensi** meningkatkan kapasitas aparatur desa, dalam rangka membekali masyarakat pedesaan untuk berkembang dan memperkuat daya saing serta menggali potensi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat pedesaan juga harus mampu memberikan perlindungan yang jelas terhadap masyarakat. Upaya perlindungan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang akibat berlakunya mekanisme pasar dan eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.

Masyarakat desa jelas akan kalah bersaing. Mereka tidak punya apa-apa selain tenaga-tenaga yang pada umumnya kurang terlatih. Selain itu, upaya yang penting dan melibatkan warga desa sebagai sebuah kesatuan pemerintahan adalah pengembangan kapasitas dalam proses pembangunan di desa.

Disisi lain, sebagian besar desa masih mengalami keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang lemah, minim wawasan, dan keterampilan teknis dalam teknologi informasi. Misalnya, kondisi SDM Aparatur Desa Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, berjumlah  $\pm$  3.370 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, dan Kadus-kadus serta tokoh masyarakat dari 179 desa. Dari jumlah penyelenggara pemerintahan desa tersebut 90% mempunyai kualifikasi pendidikan SMP dan SMA, sementara 10% berpendidikan Sarjana Muda dan S1. Sementara jenis pekerjaan Kepala Desa 80% Petani dan 20% Swasta (Jasa), sedangkan Sekretaris Desa belum semuanya berstatus PNS. Sementara dilihat dari sarana prasarana desa, desa yang sudah memiliki Balai Desa atau Kantor 85% sedangkan sisanya masih menumpang di rumah Kepala Desa atau Sekretaris Desa, (Profil Seluma, 2013).

Melihat bagian kecil potret kondisi Aparatur Desa tersebut di atas, Urgen dilakukan dalam rangka menjadikan desa yang mandiri berdaya saing diperlukan tenaga pendamping – apataur Desa yang memiliki kemampuan/kapasitas- yang tidak hanya profesional (keterampilan teknis) tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengungkapkan secara kritis sebab-sebab yang menjadikan desa belum mampu mengembangkan potensi desanya sehingga desa mengalami kesulitan untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur. Solusi yang ditawarkan dengan cara, meningkatkan kapasitas aparatur desa sebagai motor penggerak pembangunan desa.

Meningkatkan kapasitas aparatur desa dapat diartikan sebagai upaya membangun organisasi, sistem-sistem, kemitraan, orang-orang dan proses-proses secara benar untuk menjalankan agenda atau rencana tertentu. Meningkatkan kapasitas aparatur desa berkaitan dengan *individual capability development*, *organizational capacity building*, dan *institutional capacity building*. Pengertian meningkatkan kapasitas tersebut memberikan gambaran bahwasanya terdapat

banyak hal yang harus diperhatikan dan dicermati secara jeli agar meningkatkan kapasitas dapat membuahkan hasil nyata, bermanfaat, dan menimbulkan dampak positif.

Proses pengembangan kapasitas terdapat tiga tingkatan (level) yang harus menjadi fokus analisis dan proses perubahan dalam suatu organisasi, menurut Milen (2004) Ketiga unsur-unsur tersebut adalah (1) tingkatan sistem/kebijakan; (2) tingkatan organisasi; (3) tingkatan individu/ sumber daya manusia.

Pengembangan kapasitas tersebut dimulai dari proses perencanaan pembangunan hingga pada proses akhir, yaitu evaluasi pembangunan tersebut. Pengembangan kapasitas yang pada proses perencanaan pembangunan tersebut merupakan aktivitas interaksi antara elemen-elemen pemerintahan desa dan masyarakat desa dalam menginventarisasi, mengkategorikan dan mengelola sumber daya yang dimiliki oleh desa untuk pencapaian tujuan pembangunan. Selain itu upaya yang juga penting dan melibatkan warga desa sebagai sebuah kesatuan pemerintahan adalah pengembangan kapasitas dalam proses pembangunan di desa tersebut.

Demikian pentingnya perencanaan pembangunan desa untuk peningkatan seluruh kapasitas sumber daya yang dimiliki desa menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan. Unsur yang paling dominan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa adalah Kepala desa dan perangkat desa sebagai sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, dalam hal ini adalah aparatur pemerintah desa yang menjadi pelaksana aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Kepala Desa sebagai aparatur negara mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan tanggungjawab lainnya. Tugas tersebut membutuhkan SDM yang memiliki kemampuan baik secara pengetahuan maupun secara keterampilan.

## PEMBAHASAN

Sesungguhnya pengertian kapasitas terdapat perbedaan antara satu pakar dengan pakar yang lainnya. Akan tetapi para Ilmuan sepakat bahwa Kapasitas itu merupakan suatu proses yang berlangsung dalam waktu panjang dan bisa dilakukan secara bertahap, bisa dilakukan secara individu, organisasi dan kelompok.

Hal ini sejalan dengan pendapat Milen (2004) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus. Lebih lanjut Morgan (Milen, 2004) merumuskan pengertian kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

Lebih lanjut, Milen(2004) melihat *capacity building* sebagai tugas khusus, karena tugas khusus tersebut berhubungan dengan faktor-faktor dalam suatu organisasi atau sistem tertentu pada suatu waktu tertentu. Sementara itu UNDP mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan (kemampuan memecahkan masalah) yang dimiliki seseorang, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk secara perorangan atau secara kolektif melaksanakan fungsi, memecahkan masalah, serta menetapkan dan mencapai tujuan (UNDP, 2006).

Dari pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa Kapasitas adalah suatu tindakan yang dilakukan baik individu, organisasi ataupun masyarakat yang berupa pembelajaran, terjadilah proses yang berlangsung dalam jangka panjang secara berkesinambungan dimana orang-orang belajar untuk lebih *capable* (lebih mampu melaksanakan pekerjaannya).

Kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan. Dimensi, fokus dan tipe kegiatan tersebut menurut Grindle (1997) adalah: 1) dimensi pengembangan SDM, yaitu: personil yang profesional dan memiliki kemampuan teknis, -training, praktek langsung, kondisi iklim kerja, dan rekrutmen-; 2) dimensi penguatan organisasi, melakukan tata manajemen, sesuai dengan peran dan fungsi, -Sarana prasarana, kesejahteraan aparatur, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur organisasi, dan (3) reformasi kelembagaan, kelembagaan dan sistem serta makro struktur, dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi.

Dari uraian di atas, dihubungkan dengan konteks meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa, maka Aparatur Desa harus memiliki minimal 3 kapasitas/kemampuan yaitu 1) Kemampuan dasar, 2) Kemampuan manajemen, 3) Kemampuan kemampuan teknis. Ketiga kemampuan yang dimiliki aparatur desa tersebut memiliki indikator sebagai berikut: 1) Kemampuan dasar yang harus dimiliki aparatur desa adalah meliputi: a) pengetahuan tentang regulasi desa; b) pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa; c) pengetahuan tentang tugas dan fungsi. 2) Sementara kemampuan yang harus dimiliki aparatur desa di bidang Manajemen memiliki indikator sebagai berikut: a) manajemen SDM; b) Manajemen Pelayanan Publik; c) Manajemen asset; d) Manajemen Keuangan. 3) Sedangkan Kemampuan Teknis yang harus dikuasai aparatur pemerintahan desa adalah: a) Penyusunan Administrasi Desa; 2) Penyusunan perencanaan prmbangunan; c) Penyusunan anggaran; d) Penyusunan perdes; e) Pelayanan public; f) Penata Usahaan Keuangan Desa; g) Pentanaan Usaha Aset Desa.

Berdasarkan kenyataan yang ada, masih minimnya kapasitas apatur desa yang memiliki kemampuan tersebut di atas, tercermin pada kemandirian desa di Indonesia hanya 4%. Aparatur Desa sebagai penggerak roda pembangunan di tingkat paling dasar, yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat, seharusnya memiliki strategi dalam menterjemahkan aktivitas-aktivitas, kebijakan-kebijakan, program-program yang sejalan dengan strategi visi misi Nawacita ketiga Presiden Jokowi dan sasaran strategis untuk mewujudkan desa mandiri.

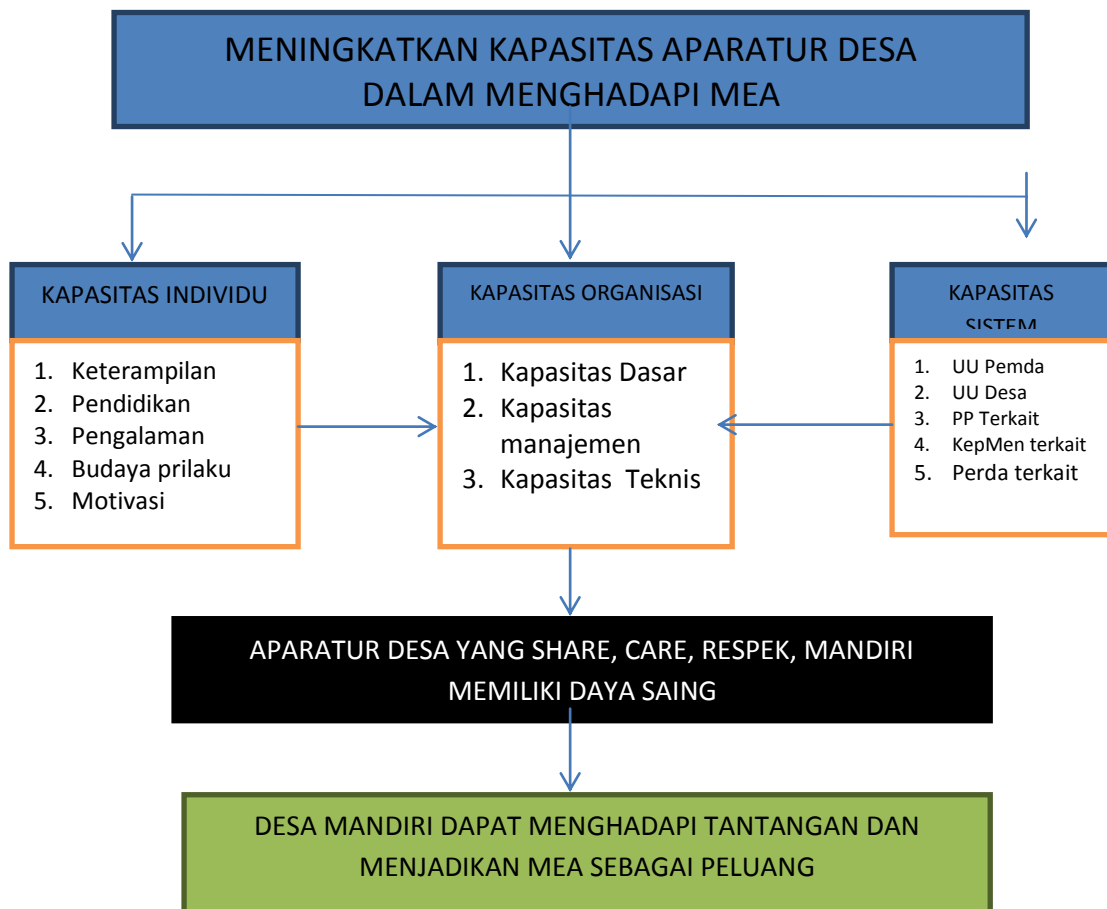
Ke depan, kondisi menjadi seolah-olah dunia semakin tanpa batas yang ditandai dengan perdagangan dunia dan MEA yang kompetitif, tuntutan pelanggan semakin tinggi, hak paten, faktor lingkungan, inovasi dan kreatifitas semakin dibutuhkan. Agar kita menjadi survive maka kita perlu menanamkan

budaya kerja –apatur desa- yang direfleksikan pada aktivitas-aktivitas dalam mengimplementasikan tujuan yang ingin dicapai.

Aparatur Desa perlu tanggap dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif yang tidak saja dari Indonesia, tetapi juga dari luar Indonesia. Lingkungan yang kompetitif ini menuntut aparatur desa bisa meningkatkan kapasitas diri –pelatihan dan mau belajar-, struktur organisasi yang fleksibel yang didukung oleh nilai-nilai profesional yang berorientasi pada keefektifan organisasi. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Indonesia memerlukan dukungan sumberdaya alam maupun sumber daya manusia –sebagai asset pemerintah yaitu aparatur desa-. Di antara kedua sumberdaya ini yang lebih berperan atau yang paling berkontribusi, apakah Indonesia bisa menjadikan MEA sebagai peluang adalah SDM yaitu Aparatur Desa. SDM Aparatur Desa lah yang menjadi penggerak pembangunan pedesaan, yang berkontribusi terhadap pencapaian visi misi Nawacita sehingga tercapai desa-desa mandiri di seluruh Indonesia.

Kerangka konsep meningkatkan apaturatur desa dalam menghadapi MEA, seperti gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1: Indonesia Menghadapi MEA Dalam Persepektif Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa



## KESIMPULAN

Dengan dimulainya komitmen pimpinan Negara-negara Asean yang kita sebut MEA, suka tidak suka, kita sebagai masyarakat harus siap menghadapi tingkat kompetitif antar negara, organisasi maupun antar individu semakin tinggi dan tidak bisa dihindari. Pemerintah telah melakukan terobosan dengan adanya UU Desa dan Visi Misi Nawacita ketiga Presiden bahwa pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sasaran strategis yang akan dilakukan, menargetkan Desa-desa Mandiri di tahun 2019. Agar cita-cita UU dan Visi misi Nawacita dapat terwujud, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas Aparatur Desa. Aparatur Desa sedikitnya harus memiliki 3 kapasitas/kemampuan dalam mengelolah desanya yaitu: 1) Kapasitas individu – aparatur desa memiliki pengetahuan, pengalaman, budaya prilaku (care, share dan respek) dan motivasi; 2) Kapasitas Organisasi –aparatur memiliki kemampuan dasar, kemampuan manajemen dan kemampuan teknis-; 3) Kapasitas Sistem, -aparatur memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar Aparatur Desa dapat memiliki kapasitas yang diharapkan maka Aparatur Desa harus berorientasi ke depan dengan paradigma selalu ingin belajar baik individu maupun organisasi melalui pelatihan dan pengembangan serta didukung nilai-nilai yang selalu ingin belajar, kreativitas layanan dan inovatif.

## SARAN/REKOMENDASI

Untuk menjadikan MEA sebagai peluang besar bagi Indonesia hal pertama yang harus dilakukan Indonesia adalah menjadikan desa-desa diseluruh Indonesia menjadi desa-desa mandiri dan berdaya saing baik secara local maupun global. Pemerintah bisa menargetkan di akhir tahun 2019 minimal 50% Indonesia memiliki desa mandiri dari total desa yang ada di Indonesia.

## SUMBER BACAAN

- BPS, 2013, Bengkulu Tengah Dalam Angka, Kantor Statistik Pemkab Seluma
- David Osborne dan Peter Plastrik, 2000, *Memangkas Birokrasi & Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Terj. Ramelan Jakarta, PPM.
- Grindle, 1997, *Capacity Building, an Approach to people-Centred Development*, Oxford: Oxfam, Publications.
- Grindle, M.S., (editor), 1997, *Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*, Boston, MA Harvard Institute for International Development
- LAN, 2012, *Capacity Building, Birokrasi Pemerintah Daerah, Kabupaten Kota di Indonesia*, Tim Peneliti STIA LAN, Makasar.
- Milen, Anni, 2004, *What Do We Know About Capacity Building?, an Overview of Existing Knowledge and Good Practice*, World Health Organization (Departement of Health Service Provision), Geneva.
- Peraturan Pemerintah Pemerintah RI nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Profil Kabupaten Seluma, 2013, Pemerintahan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
- Undang-undang RI no, 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang RI no 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah
- Koran Jakarta, *Pembanguna Desa “ Ditargetkan 2.000 Desa Mandiri*, Rabu 21 Oktober 2015.



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**ARAH KEBIJAKAN UMKM DALAM MENGHADAPI  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

**Yearzy Ferdian<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

*Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 juta penduduk merupakan potensi dan pangsa pasar paling besar di ASEAN. Untuk itu, upaya penguatan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan sistem pemerintahan (government system) menjadi kunci untuk menghadapi persaingan global, termasuk dalam menghadapi implementasi kesepakatan perdagangan bebas di lingkungan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN Economy Community) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2016. UMKM di Indonesia telah terbukti mampu bertahan dari goncangan ekonomi dan menjadi penyelamat bagi perekonomian pada krisis keuangan tahun 1997 dan krisis global 2008. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia saat ini sekitar 55 juta, dan menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Meski secara kuantitas sangat besar dan menyerap banyak tenaga kerja, pangsa dalam pendapatan nasional masih sekitar 57%.*

*Di Indonesia, UMKM hingga saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan baik yang bersifat klasik, intermediate maupun advanced. Permasalahan tersebut bisa berbeda di satu daerah dengan daerah lain atau antar sektor atau perusahaan pada sektor yang sama. Keberadaan UMKM yang handal dan kuat merupakan modal utama pembangunan ekonomi, serta menjadi bearing (bantalan) dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Tidak hanya di Indonesia, UMKM di negara ASEAN juga menghadapi tantangan yang cukup berat, karena persaingan yang semakin ketat. Mengingat belum setaranya kondisi ekonomi di masing – masing negara, maka diharapkan setiap negara, termasuk Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya agar dapat mengambil manfaat dari liberalisasi. Sebagai bagian terbesar dari pelaku ekonomi di Indonesia, kiranya pengembangan UMKM juga perlu mendapatkan perhatian dalam menyongsong era liberalisasi mendatang.*

*Pengembangan UMKM dalam kerangka AEC 2015 dilaksanakan dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi yang merata, yang pelaksanaannya mengacu pada ASEAN Policy Blueprint for SME Development (APBSD) 2004 –*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang

2014. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM, sebagaimana dicantumkan dalam APBSD adalah perlunya akses UMKM kepada informasi, pasar, pengembangan SDM, keuangan dan teknologi. Dalam APBSD, pengembangan UMKM dilaksanakan melalui 5 program, yaitu: Program pengembangan kewirausahaan, Peningkatan kemampuan pemasaran, Akses kepada keuangan, Akses kepada teknologi, dan Menciptakan kebijakan yang kondusif. Masing – masing program tersebut dilaksanakan oleh instansi Pemerintah terkait di bawah koordinasi Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

*Kata kunci : kebijakan, UMKM, Masyarakat Ekonomi ASEAN*

## A. PENDAHULUAN

Masyarakat Ekonomi Asean merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system perdagangan bebas antara Negara-negara Asean. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). ([www.asean.org](http://www.asean.org))

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap Negara ASEAN melalui Initiative for ASEAN Integration dan inisiatif regional lainnya. Bentuk Kerjasamanya adalah :

1. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas;
2. Pengakuan kualifikasi profesional;
3. Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan;
4. Langkah-langkah pembiayaan perdagangan;



5. Meningkatkan infrastruktur
6. Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN;
7. Mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah;
8. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ([www.asean.org](http://www.asean.org))

Secara umum setidaknya terdapat empat hal penting terkait pelaksanaan MEA 2015. Pertama, ASEAN sebagai pasar dan produksi tunggal. Kedua, pembangunan ekonomi bersama. Ketiga, pemerataan ekonomi. Dan, keempat, penguatan daya saing, termasuk pentingnya pekerja yang kompeten. Kesepakatan pelaksanaan MEA ini diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN yang memiliki total penduduk 600 juta jiwa dan sekitar 43 persen jumlah penduduknya ada di Indonesia. Artinya, pelaksanaan MEA akan menempatkan Indonesia sebagai pasar utama yang besar, baik untuk arus barang maupun investasi. (Wuryandani, 2014)

Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 juta penduduk merupakan potensi dan pangsa pasar paling besar di ASEAN. Untuk itu, upaya penguatan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan sistem pemerintahan (government system) menjadi kunci untuk menghadapi persaingan global, termasuk dalam menghadapi implementasi kesepakatan perdagangan bebas di lingkungan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN Economy Community) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2016. UMKM di Indonesia telah terbukti mampu bertahan dari guncangan ekonomi dan menjadi penyelamat bagi perekonomian pada krisis keuangan tahun 1997 dan krisis global 2008. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia saat ini sekitar 55 juta, dan menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Meski secara kuantitas sangat besar dan menyerap banyak tenaga kerja, pangsa dalam pendapatan nasional masih sekitar 57%. (Bank Indonesia, 2009)

Gambaran yang menarik terlihat pada kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB. Pada pembentukan PDB (atas dasar harga berlaku) terlihat dominasi peran kontribusi UMKM, yaitu sebesar 56,23% pada tahun 2007 dan 55,56% pada tahun 2008. Gambaran serupa juga tampak bila dilihat pada penghitungan PDB dengan harga konstan 2000, dimana kontribusi UMKM sebesar 58,40% pada tahun 2007 dan 58,33% pada tahun 2008. Namun demikian, jika dilihat perbandingannya dengan jumlah entitas dan penyerapan tenaga kerja pada usaha besar dikaitkan dengan kontribusi sektor usaha besar pada pembentukan PDB, dapat dikatakan bahwa produktivitas entitas UMKM jauh lebih rendah dibandingkan entitas usaha besar. Hal ini kemungkinan karena adanya ketidakseimbangan dalam hal pendidikan, ketrampilan, teknologi, manajemen, akses pembiayaan dan akses pasar. Lebih lanjut lagi, dari gambaran total ekspor non migas, entitas UMKM tidak menunjukkan kontribusi yang signifikan, yaitu hanya 19,99% pada tahun 2007 dan 20,17% pada tahun 2008. Kondisi ini dapat diartikan bahwa entitas UMKM memfokuskan diri pada pasar domestik, namun dapat pula diartikan bahwa kemampuan mereka untuk

menembus pasar ekspor masih relatif rendah dan perlu ditingkatkan. Namun demikian, fokus pada pasar domestikpun dapat memberi manfaat mengingat cukup besarnya pasar potensial yang ada serta relatif lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global. Dominasi sektor UMKM pun tampak pada realisasi investasi yang dilakukan. Pangsa investasi sektor UMKM berdasarkan harga berlaku pada tahun 2007 dan 2008 masing-masing sebesar 52,99% dan 52,89%. Gambaran yang tidak berbeda juga tampak bila melihat pada realisasi investasi dengan harga konstan tahun 2000, masing-masing untuk tahun 2007 dan 2008 adalah 51,23% dan 51,80%.

UMKM di Indonesia telah terbukti mampu bertahan dari guncangan ekonomi dan menjadi penyelamat bagi perekonomian pada krisis keuangan tahun 1997 dan krisis global 2008. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia saat ini sekitar 55 juta, dan menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Meski secara kuantitas sangat besar dan menyerap banyak tenaga kerja, pangsa dalam pendapatan nasional masih sekitar 57%.

Di Indonesia, UMKM hingga saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan baik yang bersifat klasik atau *intermediate* atau *advanced*. Permasalahan tersebut bisa berbeda di satu daerah dengan daerah lain atau antar sektor atau perusahaan pada sektor yang sama. Namun ada sejumlah permasalahan yang umum dihadapi oleh semua UMKM. Walaupun perkembangan UMKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan klasik yang dihadapi yaitu rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah internal yang dihadapi UMKM yaitu: rendahnya kualitas SDM UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM, dan terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi, teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh UMKM diantaranya adalah besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang mendukung dan kelangkaan bahan baku. Juga yang menyangkut perolehan legalitas formal yang hingga saat ini masih merupakan persoalan mendasar bagi UMKM di Indonesia.

Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain. Permasalahan lain yang dihadapi UMKM, kualitas produk, harga yang kurang bersaing, kesiapan pasar dan kurang jelasnya peta produk impor sehingga positioning persaingan lebih jelas. Kondisi ini akan lebih berat dihadapi UMKM Indonesia pada saat diberlakukannya ASEAN Economic Community.

Dalam menghadapi MEA 2015 perlu dilakukan penguatan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional, terlebih dalam era MEA dimana akan terjadi integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan akhirnya akan mendorong kompetisi di bidang perekonomian. Berangkat dari permasalahan diatas bahwa UMKM yang seharusnya menjadi aktor penting bagi pengembangan perekonomian Indonesia namun belum mendapat sokongan dan perlindungan dalam menjalankan usahanya, maka perlu dilakukan kajian mendalam guna menjabarkan bagaimana peran penting UMKM dan daya dukung pemerintah dalam membangun sector UMKM untuk persiapan menghadapi MEA 2015 secara menyeluruh.

Bagi negara Indonesia, peran UMKM bahkan merupakan sokoguru utama perekonomian. Dari segi jumlah unit usaha, untuk tahun 2007 dan 2008 pelaku usaha dengan skala UMKM merupakan mayoritas dengan pangsa 99,99% dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Dari segi penciptaan lapangan pekerjaan pun UMKM menunjukkan dominasinya. Dari keseluruhan tenaga kerja yang bekerja di sektor usaha, tercatat masing-masing sebesar 96,95% pada tahun 2007 dan 97,04% pada tahun 2008 bekerja di sektor UMKM. Dari gambaran tentang dominasi UMKM dalam jumlah entitas usaha dan penyerapan tenaga kerja, secara lebih spesifik didominasi oleh entitas usaha mikro. Hal ini dimungkinkan mengingat entitas usaha mikro mencakup baik sektor formal dan informal dengan karakteristik barrier to entry and exit yang rendah. Entitas skala usaha mikro ini juga yang berperan strategis sebagai jaring pengaman rakyat dalam menghadapi krisis dan turbulensi ekonomi.

Dengan melihat ulasan dan paparan yang telah disampaikan di atas, penulis merasa tertarik untuk menulis Arah Kebijakan UMKM Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana UMKM merupakan tulang punggung dan soko guru perekonomian nasional, terlebih dalam era MEA akan terjadi integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan akhirnya akan mendorong kompetisi di bidang perekonomian.

## **B. PERUMUSAN PERMASALAHAN**

Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan titik rawan perjuangan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Berbagai kemudahan perdagangan antar negara seperti pembebasan bea impor dan kemudahan birokrasi akan mendorong meningkatnya impor komoditas ke negara-negara ASEAN. Iklim perdagangan tidak hanya akan didominasi oleh negara-negara ASEAN saja, akan tetapi juga perlu dipertimbangkan kehadiran China dan India dengan produk-produknya yang memiliki daya saing tinggi dilihat dari harga dan kandungan teknologi. Oleh karena itu dibutuhkan Arah Kebijakan UMKM Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

## **C. PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Pustaka**

Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM). Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (*capital intensive*). Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, Sumber Daya Manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi (Sudaryanto dan Hanim, 2002). Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (*bankable*), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi. Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mengadapai tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011). Pada tahun 2011 UMKM mampu berandil besar terhadap penerimaan negara dengan menyumbang 61,9 persen pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui pembayaran pajak, yang diuraikan sebagai berikut : sektor usaha mikro menyumbang 36,28 persen PDB, sektor usaha kecil 10,9 persen, dan sektor usaha menengah 14,7 persen melalui pembayaran pajak. Sementara itu, sektor usaha besar hanya menyumbang 38,1 persen PDB melalui pembayaran pajak (BPS, 2011).

Sebagian besar (hampir 99 persen), UMKM di Indonesia adalah usaha mikro di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal. Itulah sebabnya tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis global. Laporan World Economic Forum (WEF) 2010 menempatkan pasar Indonesia pada ranking ke-15. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi negara lain. Potensi ini yang belum dimanfaatkan oleh UMKM secara maksimal.

### **1. Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)**

Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut Rahmana (2008), beberapa lembaga atau instansi bahkan memberikan definisi tersendiri pada Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementerian Negara

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah 7 tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa)

## 2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. Hal ini dapat di lihat pada tabel 01. Di bawah ini :

**Tabel 01**  
**Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut**  
**UU Nomor 20 Tahun 2008**

No.	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omzet
01	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
02	Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
03	Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber : Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012

Selain berdasar Undang-undang tersebut, dari sudut pandang perkembangannya Rahmana (2008) mengelompokkan UMKM dalam beberapa kriteria, yaitu:

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

### 3. Pemberdayaan UMKM

Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia, Bank Indonesia (2011) mengembangkan filosofi lima jari/ Five finger philosophy, maksudnya setiap jari mempunyai peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika digunakan secara bersamaan.

1. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai *Agents of development* (agen pembangunan).
2. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.
3. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk *Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC) Units*, perusahaan penjamin kredit.
4. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM.
5. Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja.

Pengembangan UMKM dalam kerangka AEC 2015 dilaksanakan dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi yang merata, yang pelaksanaannya mengacu pada ASEAN Policy Blueprint for SME Development (APBSD) 2004 – 2014. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM, sebagaimana dicantumkan dalam APBSD adalah perlunya akses UMKM kepada informasi, pasar, pengembangan SDM, keuangan dan teknologi. (Bank Indonesia 2009)

Dalam APBSD, pengembangan UMKM dilaksanakan melalui 5 program, yaitu:

1. Program pengembangan kewirausahaan;
2. Peningkatan kemampuan pemasaran;
3. Akses kepada keuangan;
4. Akses kepada teknologi; dan
5. Menciptakan kebijakan yang kondusif.

Melihat APBSD tersebut diatas arah kebijakan pemberdayaan UMKM yang diperlukan pada saat ini adalah strategi pada tatanan makro, dan mikro melalui implementasi program-program pemberdayaan UMKM seperti :

1. Penciptaan iklim usaha UMKM. Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan nondiskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha kecil menengah.
2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. Program ini bertujuan untuk mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses UKM kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumberdaya lokal serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi.
3. Penegembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. Program ini ditujukan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang dan produktivitas meningkat;
4. Pemberdayaan Usaha Skala Kecil. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri
5. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat.

Dalam menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Agar dapat menguasai pasar, maka UMKM perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi. Informasi tentang pasar produksi sangat diperlukan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM. Informasi pasar produksi atau pasar komoditas yang diperlukan misalnya (1) jenis barang atau produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen di daerah tertentu, (2) bagaimana daya beli masyarakat terhadap produk tersebut, (3) berapa harga pasar yang berlaku, (4) selera konsumen pada pasar lokal, regional, maupun internasional. Dengan demikian, UMKM dapat mengantisipasi berbagai kondisi pasar sehingga dalam menjalankan usahanya akan lebih inovatif.

Sedangkan informasi pasar faktor produksi juga diperlukan terutama untuk mengetahui : (1) sumber bahan baku yang dibutuhkan, (2) harga bahan baku yang ingin dibeli, (3) di mana dan bagaimana memperoleh modal usaha, (4) di mana mendapatkan tenaga kerja yang profesional, (5) tingkat upah atau gaji yang layak untuk pekerja, (6) di mana dapat memperoleh alat-alat atau mesin yang diperlukan (Effendi Ishak, 2005).

Informasi pasar yang lengkap dan akurat dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk membuat perencanaan usahanya secara tepat, misalnya : (1) membuat desain produk yang disukai konsumen, (2) menentukan harga yang bersaing di pasar, (3) mengetahui pasar yang akan dituju, dan banyak manfaat lainnya. Oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong keberhasilan UMKM dalam memperoleh akses untuk memperluas jaringan pemasarannya.

Selain memiliki kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pasar, UMKM juga perlu memiliki kemudahan dan kecepatan dalam mengkomunikasikan atau mempromosikan usahanya kepada konsumen secara luas baik di dalam maupun di luar negeri. Selama ini promosi UMKM lebih banyak dilakukan melalui pameran-pameran bersama dalam waktu dan tempat yang terbatas, sehingga hubungan maupun transaksi dengan konsumen kurang bisa dijamin keberlangsungannya. Hal itu dapat disebabkan oleh jarak yang jauh atau kendala intensitas komunikasi yang kurang. Padahal faktor komunikasi dalam menjalankan bisnis adalah sangat penting, karena dengan komunikasi akan membuat ikatan emosional yang kuat dengan pelanggan yang sudah ada, juga memungkinkan datangnya pelanggan baru.

Setyobudi (2007) menyebutkan bahwa Bank Indonesia lebih fokus pada penguatan lembaga pendamping UMKM melalui peningkatan *capacity building*. Secara umum *capacity building* adalah proses atau kegiatan memperbaiki kemampuan seseorang, kelompok, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan atau kinerja yang lebih baik (Brown et. al, 2001). Capacity building adalah pembangunan keterampilan (skills) dan kemampuan (capabilities), seperti kepemimpinan, manajemen, keuangan dan pencarian dana, program dan evaluasi, supaya pembangunan organisasi efektif dan berkelanjutan. Ini adalah proses membantu individu atau kelompok untuk mengidentifikasi dan menemukan permasalahan dan menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan melakukan perubahan. (Campobaso dan Davis, 2001) Capacity building difasilitasi melalui penetapan kegiatan bantuan teknik, meliputi pendidikan dan pelatihan, bantuan teknik khusus (specific technical assistance) dan penguatan jaringan.

Prinsip yang perlu diterapkan adalah membangun keberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan kapasitas (capacity building), mencakup : 1) kelembagaan; 2) pendanaan; 3) pelayanan. Di samping itu masalah internal yang harus dihadapi adalah masalah efisiensi, keterbatasan SDM dan teknologi (Krisnamurthi, 2002).

Penguatan lembaga pendamping UMKM melalui peningkatan *capacity building* dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- a. pelatihan-pelatihan kepada lembaga pendamping UMKM, dalam rangka meningkatkan kemampuan kredit UMKM
- b. Pendirian Pusat Pengembangan Pendamping UKM (P3UKM), sebagai *pilot project*. P3UKM antara lain bertugas melakukan pelatihan dan akreditasi pendamping UKM.
- c. Pengembangan Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) sebagai sarana untuk lebih menyebarluaskan secara cepat hasil-hasil penelitian dan berbagai informasi lainnya. SIPUK terdiri dari Sistem Informasi Baseline Economic Survey (SIB), Sistem Informasi Agroindustri Berorientasi Ekspor (SIABE), Sistem Informasi Pola Pembiayaan/ *lending model* Usaha Kecil (SILMUK), Sistem Penunjang Keputusan Untuk Investasi (SPKUI); dan Sistem Informasi Prosedur Memperoleh Kredit (SIPMK). SIPUK ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia.



- d. Berbagai penelitian dalam rangka memberikan informasi untuk mendukung pengembangan UMKM. Kegiatan penelitian terutama diarahkan untuk mendukung penetapan arah dan kebijakan Bank Indonesia dalam rangka pemberian bantuan teknis dan juga dalam rangka penyediaan informasi yang berguna dalam rangka pengembangan UMKM. Penelitian tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan UMKM serta untuk menggali potensi sektor UMKM di tiap-tiap daerah di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan peran UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia melakukan kajian identifikasi peraturan pusat dan daerah dalam rangka pengembangan UMKM serta kajian dan implementasi pilot project klaster pengembangan UMKM.

Teknologi informasi merupakan bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Melalui pemanfaatan teknologi informasi ini, perusahaan mikro, kecil maupun menengah dapat memasuki pasar global. Perusahaan yang awalnya kecil seperti toko buku Amazon, portal Yahoo, dan perusahaan lelang sederhana Ebay, ketiganya saat ini menjadi perusahaan raksasa hanya dalam waktu singkat karena memanfaatkan teknologi informasi dalam mengembangkan usahanya.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis atau sering dikenal dengan istilah *e-commerce* bagi perusahaan kecil dapat memberikan fleksibilitas dalam produksi, memungkinkan pengiriman ke pelanggan secara lebih cepat untuk produk perangkat lunak, mengirimkan dan menerima penawaran secara cepat dan hemat, serta mendukung transaksi cepat tanpa kertas. Pemanfaatan internet memungkinkan UMKM melakukan pemasaran dengan tujuan pasar global, sehingga peluang menembus ekspor terbuka luas. Disamping itu biaya transaksi juga bisa diturunkan.

Biaya transaksi (*Transaction Cost*), merupakan biaya-biaya yang timbul dari proses kegiatan bisnis. Biaya ini mencakup biaya komunikasi (baik di dalam organisasi dan dengan organisasi lain), pembelian asuransi, memperoleh informasi tentang produk dan layanan, sesuai dengan kontrak dan banyak lagi. Biaya dari semua ini berpotensi dapat dikurangi dengan sistem TI yang lebih baik. Hal ini terutama berlaku dengan jaringan, yang dapat mengurangi biaya komunikasi antara bagian geografis terpisah dari organisasi, pemasok dan pelanggan. Hal positif yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan jaringan internet dalam mengembangkan usaha adalah : (1) dapat mempertinggi promosi produk dan layanan melalui kontak langsung, kaya informasi, dan interaktif dengan pelanggan, (2) menciptakan satu saluran distribusi bagi produk yang ada, (3) biaya pengiriman informasi ke pelanggan lebih hemat jika dibandingkan dengan paket atau jasa pos, (4) waktu yang dibutuhkan untuk menerima atau mengirim informasi sangat singkat, hanya dalam hitungan menit atau bahkan detik.

Oleh karena itu, agar UMKM di Indonesia dengan segala keterbatasannya dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi, perlu dukungan berupa pelatihan dan penyediaan fasilitas. Tentu saja tanggungjawab terbesar untuk memberi pelatihan dan penyediaan fasilitas ini ada di tangan pemerintah, disamping pihak-pihak lain yang punya komitmen, khususnya kalangan perguruan tinggi. Pusat Pengembangan UMKM berbasis IT ini perlu dibangun di setiap

kabupaten atau jika mungkin di setiap kecamatan. Fasilitas tersebut berupa ruangan khusus dilengkapi dengan seperangkat komputer yang terkoneksi dengan internet, serta dilengkapi website UMKM masing-masing daerah, di bawah pengelolaan dan pembiayaan pemerintah daerah sehingga perlu dibuat Pusat Pengembangan UMKM Berbasis IT di tingkat kabupaten atau kecamatan, Hal ini didasari pada kenyataan bahwa sebagian besar UMKM berlokasi di desa-desa dan kota-kota kecamatan, serta belum mampu untuk memiliki jaringan internet sendiri, apalagi memiliki websitenya. Padahal untuk pengembangan usaha dengan akses pasar global harus memanfaatkan media virtual. Pusat Pengembangan UMKM Berbasis IT ini akan memudahkan UMKM dalam memperluas pasar baik di dalam negeri maupun pasar luar negeri dengan waktu dan biaya yang efisien. Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat UMKM dan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya akan meningkat, dan secara bersinergi akan berdampak positif terhadap keberhasilan pembangunan nasional. Pada dasarnya produk UKM Indonesia banyak memiliki kualitas sama dengan produk luar negeri, atau bahkan lebih baik lagi. Namun produk luar tersebut seringkali unggul dalam teknologi, baik dalam teknologi produksi, pengemasan maupun pemasarannya. Guna memenangkan persaingan, UMKM juga harus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Pada dasarnya dengan bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan kinerja sehingga lebih efektif dan efisien. Jadi meskipun ada sedikit perbedaan cost dengan sistem tradisional, UMKM dapat menikmati fasilitas dari IT yang akan memberikan return yang sepadan. Dengan IT UMKM akan lebih siap untuk bersaing tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dengan produk-produk luar negeri. Kita dapat bersaing dari segi kualitas, pengemasan, dan kecepatan operasi perusahaan serta yang lebih penting lagi adalah dalam pemasaran produk UMKM.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a) Arah kebijakan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit. Selain itu penguatan lembaga pendamping UMKM dapat dilakukan melalui kemudahan akses serta peningkatan *capacity building* dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM.
- b) Strategi untuk mengantisipasi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif khususnya di kawasan Asean adalah penguasaan pasar, yang merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Agar dapat menguasai pasar, maka UMKM perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM. Aplikasi teknologi informasi pada usaha mikro, kecil dan menengah akan mempermudah UMKM dalam memperluas pasar baik di dalam negeri maupun pasar luar negeri dengan efisien. Pembentukan Pusat Pengembangan UMKM berbasis IT dianggap

mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di era teknologi informasi saat ini.

## 2. Saran

- a. Untuk meningkatkan daya saing diperlukan sinergi antara peran pemerintah selaku pembuat kebijakan serta lembaga pendamping, khususnya lembaga keuangan mikro untuk mempermudah akses permodalan dan perluasan jaringan informasi pemasaran. Selain itu, budaya mencintai produksi dalam negeri juga perlu dipupuk agar UMKM berkembang dan perekonomian nasional menjadi lebih kuat.
- b. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah perlu aktif untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pembinaan dan pelatihan melalui peningkatan *capacity building* dan penerapan aplikasi *information technology* (IT), termasuk mengaktifkan kembali web Pemda-Pemda saat ini yang tidak optimal sebagai basis komunikasi UMKM di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2011. *Five Finger Philosophy: Upaya Memberdayakan UMKM*, (online), (<http://www.bi.go.id/web/id/UMKM/Koordinasi/Filosofi+Lima+Jari/>), diakses 3 oktober 2011)
- Bank Indonesia, 2009. Kajian Mengenai Rumusan Standar Minimum Laporan Keuangan dan Business Plan untuk UMKM di Indonesia
- BPS. 2011. *Produk Domestik Bruto*. (online), <http://www.bps.go.id>
- Brown, Lisanne, Anne LaFond, and Kate Macintyre. 2001. *Measuring Capacity Building, Carolina Population Center*, Chapel Hill : University of North Carolina
- Ishak, Effendi. 2005. *Artikel : Peranan Informasi Bagi Kemajuan UKM*. Yogyakarta : Kedaulatan Rakyat.
- Krisnamurthi, Bayu. 2002. *RUU Keuangan Mikro : Rancangan Keberpihakan Terhadap Ekonomi Rakyat*, (online), [www.bmm-online.org](http://www.bmm-online.org),
- Rahmana, Arief. 2008. *Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Informasi Terdepan tentang Usaha Kecil Menengah*, (online), <http://infoukm.wordpress.com>,
- Setyobudi, Andang. 2007. *Peran serta Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5, nomor2, Agustus 2007. Jakarta: Bank Indonesia
- Sudaryanto. 2011. *The Need for ICT-Education for Manager or Agribusinessman to Increasing Farm Income : Study of Factor Influences on Computer Adoption in East Java Farm Agribusiness*. International Journal of Education and Development, JEDICT, Vol 7 No 1 halm. 56-67
- Sudaryanto dan Hanim, Anifatul. 2002. *Evaluasi kesiapan UKM Menyongsong Pasar Bebas Asean (AFTA) : Analisis Perspektif dan Tinjauan Teoritis*. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol 1 No 2, Desember 2002
- Wuryanti, Dewi. 2014. *Peluang dan Tantangan SDM Indonesia Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Info singkat ekonomi dan kebijakan Vol. VI, No. 17/I/P3DI/September/2014
- World Economic Forum (WEF), 2011 dalam <http://www.bappenas.go.id/blog/wpcontent/>



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA  
MANUSIA DI PAPUA DALAM RANGKA  
MENYONGSONG MEA**

**Leo Antonio<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

*Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia memasuki integrasi ekonomi ASEAN tidak hanya yang bersifat internal di dalam negeri tetapi terlebih lagi persaingan dengan negara sesama ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti China dan India. Tantangan lainnya adalah laju inflasi Indonesia yang masih tergolong tinggi dibandingkan dengan Negara lain di kawasan ASEAN. Kemampuan bersaing SDM tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan baik secara formal maupun informal.*

*Untuk itu, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas SDM sehingga bisa digunakan baik di dalam negeri maupun intra-ASEAN, untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil dari luar. Salah satu tantangan besar dunia pendidikan nasional kita adalah menanamkan kesadaran kolektif sebagai bangsa yang perlu berjuang keras untuk mencapai kemajuan, mengejar ketertinggalannya dari Negara-Negara lain dalam banyak aspek.*

*MEA harus dianggap sebagai kesempatan dibandingkan sebagai kerugian. Jika berbenah serta terus meningkatkan daya saing, Indonesia diyakini akan berhasil. Pertanyaan yang sering mengemuka terkait dengan pemberlakuan MEA 2015 ini adalah siapakah pelaku usaha nasional menghadapinya? Ini lantaran MEA memberikan peluang yang harus diraih sekaligus tantangan yang harus dihadapi. Spiritnya tentu saja siap atau tidak siap pengusaha nasional, termasuk pengusaha perbankan dan lembaga keuangan lainnya harus tetap bersiap menyongsong diberlakukannya MEA 2015.*

*Sumber daya manusia masyarakat Papua khususnya di Kabupaten Merauke masih cenderung sangat rendah karena masih masyarakatnya dimanjakan oleh kekayaan Sumber Daya Alam yang masih melimpah sehingga penduduk atau sekelompok masyarakat hidupnya masih berpindah-pindah tempat, seringnya*

---

<sup>1</sup> [antonioblackpapua@gmail.com](mailto:antonioblackpapua@gmail.com) – FISIP Univ. Musamus Merauke

*masuk hutan, tempat yang jauh dari Sekolah atau tinggal jauh dipelosok kota dan sarana prasarana yang belum memadai. Hal ini yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat di Papua khususnya di Kabupaten Merauke.*

*Di tengah arus globalisasi yang kian besar, dan tantangan yang ada di depan mata adalah bagaimana dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, yang harus diperhatikan sebagai peluang untuk mensejahterakan rakyat Papua khususnya di Kabupaten Merauke. Dengan arus kapital yang kuat dapat mendorong terciptanya peluang usaha atau bisnis baru dan membuka lapangan pekerjaan baru. Disamping dengan adanya arus investasi asing diperlukan sumberdaya manusia yang kompetibel. Dengan memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menghadapi tantangan MEA 2015 diharapkan adanya transfer teknologi dan informasi untuk kemandirian bangsa kedepan.*

*Kata Kunci : Sumber Daya Manusia*

## **PENDAHULUAN**

MEA adalah realisasi dari visi ASEAN 2020 yakni untuk membuat integrasi ekonomi antar negara-negara ASEAN untuk mendirikan pasar dan basis produksi tunggal bersama-sama. MEA pada tahun 2015, setidaknya ada lima hal yang akan dilaksanakan, yaitu aliran bebas barang, aliran bebas investasi, aliran bebas modal, dan aliran bebas tenaga kerja terampil. Pada 2015 di antara 10 negara ASEAN terdiri dari Indonesia, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Laos, Kamboja, dan Vietnam harus membebaskan 5 hal di atas untuk menerapkan aturan perjanjian.

Sebagaimana yang telah dilansir dalam sebuah postingan: SEMA STIE STMY Majalengka Periode 2014/2015 bahwa dalam persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) / AEC (*Asean Economic Community*) 2015 adalah proyek yang telah lama disiapkan seluruh anggota ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang MEA 2015, serta harus meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan Negara anggota ASEAN lainnya sehingga ketakutan akan kalah saing di negeri sendiri akibat terimplementasinya MEA 2015 tidak terjadi.

Dalam pelaksanaan MEA, negara-negara ASEAN harus menjunjung tinggi prinsip pasar terbuka dan ekonomi pasar juga didorong. Dengan kata lain, konsekuensi dari pelaksanaan MEA adalah pembebasan perdagangan barang, jasa, dan tenaga terampil bebas dan tanpa tarif. Kesiapan Indonesia dalam menghadapi

MEA 2015, antara kesempatan dan ancaman. Siap atau tidak, MEA telah menjadi keputusan politik dan ketentuan yang harus dihadapi oleh semua negara ASEAN.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA dalam upaya persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Dalam cetak biru MEA, terdapat 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan oleh pemerintah. Sektor tersebut terdiri dari tujuh sektor barang yaitu industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Kemudian sisanya berasal dari lima sektor jasa yaitu transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan teknologi informasi. Sektor-sektor tersebut pada era MEA akan terimplementasi dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja.

Budaya sosial yang diharuskan ada pada masyarakat Indonesia untuk menghadapi MEA adalah budaya berpikir kompetitif dan kreatif. Kita semua adalah bagian dari elemen masyarakat haruslah sadar dan mandiri. Menyadari tantangan ke depan dan mandiri satu sama lain untuk membangun budaya kompetitif dan kreatif. Masyarakat kita banyak dan tersebar di mana-mana. Ada yang di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan banyak lagi yang lainnya. Belum lagi perbedaan budaya dan adat istiadat, maka sudah seharusnya dari pihak LSM dan Pemerintah, dan kita utamanya sebagai mahasiswa harus berperan aktif untuk berpartisipasi membangun perekonomian Indonesia khususnya pada daerah terpencil, tertinggal, dan terbelakang yang diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dengan tujuan pemerataan pembangunan sumber daya manusia.

Sumber daya manusia masyarakat Papua khususnya di Kabupaten Merauke masih cenderung sangat rendah, karena masyarakatnya masih dimanjakan oleh kekayaan Sumber Daya Alam yang masih melimpah sehingga penduduk atau sekelompok masyarakat hidupnya masih berpindah-pindah tempat, seringkali masuk hutan, tempat yang jauh dari Sekolah atau tinggal jauh dipelosok kota dan sarana prasarana yang belum memadai. Hal ini yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat di Papua khususnya di Kabupaten Merauke. Ada empat kebijaksanaan pokok dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yaitu Peningkatan kualitas SDM yang produktif, Peningkatan kualitas SDM berkemampuan dalam pemanfaatan, mengembangkan dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan, Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan perangkat hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM, Mulyadi S. (2008).

Sumber daya alam dan Sumber Daya Manusia merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Semakin banyak jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dalam proses pembangunan, berarti cenderung akan mempertinggi tingkat produksi secara keseluruhan yang selanjutnya juga akan mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi di Papua khususnya di Kabupaten Merauke.

## **PERMASALAHAN MENDASAR YANG DIHADAPI**

1. Tingginya jumlah pengangguran di Indonesia, pengangguran tertinggi dari 10 negara ASEAN, termasuk ketidaksiapan tenaga kerja terampil;

2. Rendahnya jumlah wirausahawan baru untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja;
3. Pekerja Indonesia cenderung didominasi oleh pekerja tidak terdidik dan tidak terampil sehingga produktivitas mereka rendah;
4. Meningkatnya pengangguran tenaga kerja terdidik, akibat tidak sesuainya lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar,;
5. Tuntutan pekerja akan upah minimum, tenaga kontrak, dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
6. Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang banyak tersebar di luar negeri; dan
7. Ada 40 juta pengangguran di Indonesia. Terjadi pada lulusan yang tidak bisa bersaing didunia kerja.

Era pasar bebas menjadi ancaman serius bagi Bangsa Indonesia, mengingat Sumber Daya Manusia Profesional harus mempunyai ketrampilan serta kemampuan di masing-masing bidang. Sertifikasi kompetensi kerja merupakan bagian penting dari investasi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

## **JENIS DAN METODE PENELITIAN**

### **1. Metode penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu (Lasa, 2009). Kata ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna bersifat keilmuan atau memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia". (Sulistyo. Basuki, 2010).

Penelitian deskriptif mengenal berbagai bentuk yang dapat dikategorikan seperti survei, studi kasus, kajian, kausal-komparatif, kajian korelasi, dan sebagainya. Setiap bentuk penelitian deskriptif mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda, sedangkan penelitian deskriptif ini termasuk dalam kategori "studi kasus".

"Studi kasus" merupakan kajian yang mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami sesuatu hal. Penulis menggunakan bentuk penelitian "studi kasus" karena mengangkat fenomena yang terjadi di Papua khususnya di Kabupaten Merauke sehingga kesimpulan yang ditarik bersifat khusus tidak dapat diterapkan secara umum.

### **2. Jenis dan sumber data**

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga

menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui sumber data data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis untuk pendukung dalam penulisan peneltian. Data sekunder ini seperti buku-buku mengenai teori-teori kajian SDM, dan buku-buku lain sejenis yang berhubungan dengan SDM. Data sekunder juga didapatkan di tempat penulis melakukan penelitian, data yang didapat berupa gambaran umum tempat penelitian, yaitu di Papua khususnya di daerah Kabupaten Merauke dan gambaran umumnya.

### **3. Metode pengumpulan data**

Metode secara umum diartikan sebagai proses, cara, atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini Studi pustaka. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data.

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan."Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada."(Sugiyono, 2005). Studi pustaka merupakan Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

### **RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dalam penilitian ini adalah bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat Papua di Kabupaten Merauke?

### **TINJAUAN TEORITIS**

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk setiap usaha, begitu pula untuk pemerintahan agar dapat menjalankan fungsinya sebenarnya. Banyak defenisi yang dapat digunakan untuk mendefenisikan sumber daya manusia. Menurut Susilo (2003:3) "sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya".

"Sumber daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan", sebagaimana yang dikemukakan oleh David Ulrich (Mathis dan Jackson, 2002:4). Maka dari itu, Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang penting bagi setiap usaha. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menentukan kejayaan atau kegagalan dalam persaingan (Tambunan, 2003:15).

"Nilai sumber daya manusia adalah jumlah nilai dari sumber daya manusia pada sebuah organisasi yang dapat juga disebut sebagai modal intelektual yang terdiri dari orang-orang dalam organisasi, kemampuan yang mereka miliki, dan menggunakannya dalam pekerjaan mereka. Sehingga bagian terpenting dari



peningkatan nilai sumber daya manusia adalah dengan mendayagunakan semua bakat-bakat orang-orang yang ada dalam organisasi dan mengambil yang terbaik dari populasi yang bervariasi di luar organisasi. Disebabkan perubahan kependudukan tenaga kerja, manajemen sumber daya manusia harus memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang bervariasi. Ditambahkan, praktisi sumber daya manusia haruslah orang-orang yang meyakinkan semua tenaga kerja tanpa melihat latar belakang mereka, menyediakan kesempatan untuk mengembangkan kapabilitas mereka ”sebagaimana dikemukakan oleh Mathis dan Jackson (2002:29).

Begitu juga dengan pemerintahan, apabila di dalamnya terdapat sumber daya manusia yang berkualitas tentu akan menjadikan daerah tersebut berjaya. Bagi perekonomian negara, kejayaan suatu pemerintahan akan menjadikan perekonomian suatu negara lebih baik. Oleh karena itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis (Kuratko dan Hodgets, 1989).

Ada empat kebijaksanaan pokok dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yaitu Peningkatan kualitas SDM yang produktif, Peningkatan kualitas SDM berkemampuan dalam pemanfaatan, mengembangkan dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan, Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan perangkat hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM, (Mulyadi S. 2008).

## GAMBARAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 29 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua terletak dibagian selatan yang memiliki wilayah terluas diantara kabupaten/kota di Provinsi Papua. Secara geografis letak Kabupaten Merauke berada antara  $137^{\circ} - 141^{\circ}$  BT dan  $5^{\circ} 00'9 00'$  LS. Kabupaten Merauke terletak paling timur wilayah nusantara.

Jumlah penduduk Kabupaten Merauke Tahun 2013 adalah 209.980 jiwa, mengalami kenaikan dibanding tahun 2012 yang tercatat 205.881 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2012 ke tahun 2013 tercatat 2,03 persen. Hal ini berarti secara rata-rata di Tahun 2013 terdapat penambahan 2 orang penduduk dari setiap 100 orang penduduk dibanding tahun 2012. Komposisi penduduk Kabupaten Merauke pada tahun 2013 yang sebanyak 209.980 jiwa, terdiri dari 110.388 orang laki-laki (53 persen) dan 99.592 orang perempuan (47 persen). Secara umum Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Merauke sebesar 110,84 hal ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 110-111 orang penduduk laki-laki. Secara spesifik nilai rasio jenis kelamin di masing-masing distrik di Kabupaten Merauke bernilai diatas 100. Hal ini berarti kondisi jumlah penduduk laki-laki yang lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan merata diseluruh distrik (Sumber Data: Papua Dalam Angka 2014 Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Updated: 14-8-2015).

Keadaan **Topografi** Kabupaten Merauke umumnya datar dan berawa disepanjang pantai dengan kemiringan 0-3% dan kearah utara yakni mulai dari Distrik Tanah Miring, Jagebob, Elikobel, Muting dan Ulilin keadaan Topografinya bergelombang dengan kemiringan 0 – 8%. Kondisi Geografis

Kabupaten Merauke yang relatif masih alami, merupakan tantangan serta peluang pengembangan bagi Kabupaten Merauke yang masih menyimpan banyak potensi ekonomi untuk menunjang pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table 1 berikut ini :

Tabel.1 Kemiringan Lereng di Kabupaten Merauke

Kelas Lereng	Luas (Km2)	Persentase	Sebelah Wilayah
0-3 %	5.598	12,42	Kimaam, Okaba, Kurik, Semangga.
3-8 %	30.513	67,70	Merauke, Tanah Miring, Jagebob, Sota.
8-12 %	18.960	19,88	Okaba, Kurik, Muting, Elikobel dan Ullin,
Jumlah	45.071	100,00	

(Sumber : Bappeda Kabupaten Merauke)

Kemudian berdasarkan peta dasar Kabupaten Merauke terlihat sebagian besar daerah merupakan areal dataran yang berada pada ketinggian antara 0-60 mdpl diatas permukaan laut. Wilayah yang benar-benar datar tersebut berada sebagian besar pada daerah selatan dan tengah. Daerah tersebut merupakan sentra penduduk yang memulai usaha pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya dan konsentrasi pemukiman penduduk.

## PEMBAHASAN

### Membangun SDM dalam menyongsong MEA

Sebagaimana yang dilansir dari sebuah media massa (Suara Pembaruan Jakarta, Sabtu 01 Agustus 2015) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Papua Charles Simare-Mare mengatakan, pemerintah pusat harus memahami kondisi Papua saat ini. Dari segi SDM, Papua jauh tertinggal dari daerah lainnya di Indonesia. Pemerintah harus memberikan kesempatan mahasiswa Papua untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya baik di dalam maupun di luar negeri. Charles menyebutkan, kualitas guru-guru di Papua juga rendah. Seharusnya, pemerintah berani mengirimkan guru-guru terbaik bangsa ini ke Papua agar SDM semakin meningkat. Fakta selama ini, hanya guru-guru yang tidak diterima di daerah lainnya di Indonesia baru mau ke Papua. Itupun guru-guru itu tidak betah tinggal di pedalaman karena kesejahteraan dan infrastruktur yang tidak sesuai.

Profesor Frederick Harbison dan Profesor A. Meyers dari Princeton University dalam bukunya berjudul *“Manpower and Education”* (1965) mengatakan: *“If a countrys unable to develop its human resources, it can not built anything else, whether it be a modern political system, a sence of national unity or a prosperous economy”*. Artinya, pengembangan SDM sangat penting dan menempati posisi kunci dalam pembangunan suatu daerah maupun negara secara berkelanjutan. Manusia adalah kunci utama dalam meraih kemajuan. Baik bagi kemajuan individu yang bersangkutan, kemajuan di lingkungan pekerjaan,

kemajuan masyarakat, kemajuan suatu daerah maupun bangsa dan negara. Manusia adalah *human and intellectual capital*.

Dalam mewujudkan peningkatan kualitas SDM di Papua khususnya di Kabupaten Merauke dalam menyongsong MEA, diperlukan SDM yang tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan otak (IQ, *Intelligence Quotient*) semata, tetapi juga SDM yang mempunyai “kecerdasan hati dan spiritual” (EQ, *Emotional Quotient* dan SQ, *Emotional Spiritual Quotient*). Sebab, SDM yang memiliki IQ yang bagus tapi tanpa diimbangi dengan EQ dan SQ itu tetap saja dapat merusak segalanya. Bekerja dengan semata-mata mengandalkan IQ tanpa diimbangi EQ dan SQ akan (antara lain) tercipta suatu pekerjaan tanpa moralitas. Kompetensi tanpa diimbangi moralitas hanya akan melahirkan SDM dengan watak yang kurang beretika. SDM yang bekerja dengan mengandalkan IQ tanpa diimbangi EQ dan SQ hanya akan melahirkan manusia-manusia pandai yang lepas dari tatanan nilai-nilai sosial-budaya dan khazanah-kearifan lokal.

Pada akhirnya, seperti yang ditengarai oleh tokoh nasionalis Mahatma Gandhi tentang “tujuh dosa yang mematikan” benar-benar bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, yakni semakin tidak terkendalinya watak dan perilaku manusia hedonistis, narsistis, individualistis dan materialistis. Ketujuh dosa mematikan itu masing-masing “kekayaan tanpa bekerja” (*wealth without work*), “kesenangan tanpa hati nurani” (*pleasure without conscience*), “pengetahuan tanpa karakter” (*knowledge without character*), “kompetensi tanpa moralitas” (*competency without morality/ethic*), “ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan” (*science without humanity*), “agama tanpa pengorbanan” (*religion without sacrifice*) dan “politik tanpa prinsip” (*politics without principle*).

Kemudian, selain harus memiliki IQ, EQ dan SQ, SDM masyarakat di Tanah Papua khususnya Kabupaten Merauke harus pula mempunyai nilai kedisiplinan (*values of discipline*) yang tinggi. Kedisiplinan itu bukan sesuatu yang kaku, namun merupakan sesuatu yang indah yang bisa dilakukan dengan perasaan antusias dan hati yang menyenangkan. Karena dengan hidup disiplin, hidup kita bisa teratur, terarah dan terukur. Yang lebih penting lagi, dengan hidup disiplin maka kita dapat mengharapkan terjadinya suatu perubahan yang jauh lebih baik daripada sekadar rutinitas kegiatan yang kita lakukan setiap hari.

Jadi apabila ingin meraih kemajuan SDM yang lebih baik lagi, maka segenap komponen masyarakat Papua di Kabupaten Merauke harus bekerja keras dengan budaya disiplin yang tinggi. Disiplin adalah salah satu resep dalam mengendalikan diri guna meraih sebuah keberhasilan. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam mematuhi peraturan serta disiplin dalam mengamalkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai penjaga tata kehidupan bersama. Dibutuhkan SDM yang memiliki etos kerja keras, berpikir cerdas dan beramal ikhlas. Bekerja keras dalam arti bahwa dalam bekerja buat kepentingan daerah (yang berarti juga untuk kepentingan diri sendiri, masyarakat Papua Kabupaten Merauke) tidak boleh mengenal batas ruang dan waktu. Banyak bekerja lebih baik ketimbang banyak bicara. Bekerja keras terlebih dulu dengan sepenuh integritas, tanggung jawab dan disiplin, baru setelah berhasil berbicara. Kemudian, berpikir cerdas. Bahwa dalam bekerja harus menggunakan

kemampuan berpikir, kemampuan menganalisis, serta kemampuan mengatasi masalah dengan tepat melalui metode yang terprogram.

Masyarakat Papua di Kabupaten Merauke harus memiliki kemampuan untuk membuat perencanaan, langkah dan strategi yang handal, serta mampu memprediksi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul di wilayahnya. Dan, agar menjadi cerdas, SDM harus terus belajar, menjadi "pembelajar". Belajar kepada siapa pun, di mana pun dan kapan pun. Pengetahuan dan kemampuan seseorang, jika tidak terus diasah dengan cara belajar atau menganggap dirinya sudah pintar, pasti akan berhenti dan tidak berkembang. Melalui proses belajar, SDM yang berpikir cerdas akan terus mampu mengevaluasi, membenahi dan mengambil langkah dan strategi serta kebijakan dan program yang tepat bagi kemajuan daerahnya.

SDM masyarakat Papua di Kabupaten Merauke juga harus mempunyai pola pikir dan pola perilaku yang unggul. Pola pikir (*mindset*) mereka harus mengglobal, kritis, namun tetap jernih serta memiliki kepercayaan diri dan etis. Menjadi SDM yang unggul. Menjadi manusia yang memiliki prinsip, nilai-nilai dan etos kerja serta daya juang yang tinggi. Di mana daya juang itu tidak terlepas dari tindakan disiplin, loyalitas, kerjasama, serta saling percaya dan menghargai. Juga mesti berintegritas, yang merefleksikan sikap dan komitmen tinggi dalam bekerja dengan dasar kejujuran dan etika, memiliki jiwa kepemimpinan. Pemimpin yang selalu tanggap terhadap perubahan dan menjadi kunci keberhasilan bagi tumbuh-berkembangnya daerahnya. Juga, pemimpin yang penuh keteladanan dan keadilan, pemimpin adalah panutan dalam cara berpikir dan bertindak dan harus memiliki jiwa kewirausahaan. *Entrepreneurship* menyangkut bekerja secara mandiri, kreatif dan inovatif, bekerja keras, tekun dan ulet. Termasuk, berdaya-guna, tepat janji dan spirit kemajuan untuk terus mengembangkan potensi serta peka, teliti dan taktis dalam memanfaatkan peluang demi memajukan daerahnya.

SDM masyarakat Papua di Kabupaten Merauke yang memiliki kompetensi, pola pikir, pola perasaan dan pola perilaku unggul itulah yang bisa dikatakan sebagai manusia yang efektif dan kreatif, bertanggung-jawab terhadap setiap tindakan dan perilaku yang kita lakukan. Pro-aktif lebih dari sekadar mengambil inisiatif. Orang-orang pro-aktif yang mengedepankan pemikiran positif (*positive thinking*), yang merupakan para pelaku perubahan menuju kemajuan dan keberhasilan. Mereka juga tidak bersikap reaktif dengan menyalahkan orang lain.

### **Strategi pemerintah Kabupaten Merauke angkat SDM lokal**

Masyarakat di wilayah Tanah Papua umumnya dan khususnya di Kabupaten Merauke adalah masyarakat yang terikat oleh kultur budaya alami. Kehidupannya sangat nikmat dengan alam (naturalistik) dan belum banyak mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebanyakan warga masyarakat di sana cuma mengandalkan kebun yang mereka miliki (90% petani dan nelayan). Mereka hanya memikirkan bagaimana hidup hari ini, tanpa berusaha memikirkan bagaimana masa depan anak cucu.

Masyarakat Papua di Kabupaten Merauke sebagian besar hidup mengandalkan tenaga fisik yang mereka miliki. Kebanyakan dari mereka belum

menyadari bahwa yang dibutuhkan pada masa sekarang ini bukan sebatas tenaga secara fisik saja, tetapi tenaga yang terampil dan mempunyai keahlian. Maka dari itu penting untuk mendorong mereka mengembangkan potensi yang mereka miliki, tentu dengan pendidikan dan pelatihan atau keterampilan yang berkesinambungan.

Teori *human capital* mengatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan keterampilan seseorang semakin tinggi pula tingkat penghasilan. Jadi, jelas pendidikan dan pelatihan atau keterampilan merupakan dasar untuk meningkatkan taraf hidup suatu masyarakat, daerah maupun bangsa dan negara. Suatu kenyataan yang tak terbantahkan, bahwa masyarakat di Tanah Papua (khususnya pedalaman di daerah Kabupaten Merauke) belum bisa dikatakan sebagai masyarakat yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Mereka masih hidup dalam keterbelakangan dan selama bertahun-tahun jauh tertinggal dibanding wilayah lain di Indonesia, terutama di bidang pendidikan.

Berbagai kebijakan dan strategi di bidang pendidikan dilakukan Pemerintah Kabupaten Merauke dalam mengangkat sumber daya manusia lokal Merauke. Selain pendidikan berbasis spesifik juga pendidikan umum. Sejak 2011, Pemerintah Kabupaten Merauke mencanangkan pendidikan itu sebagai *leading sector* untuk mendorong pembangunan SDM masyarakat di Merauke dengan melakukan berbagai strategi pendekatan dan kebijakan. Karena kemajuan suatu daerah tidak diukur dari gedung-gedung yang megah dan jalan yang bagus tapi lebih ada sumber daya manusia, kata Bupati Romanus Mbaraka, MT, seperti yang dilansir dalam sebuah media massa (sumber: <http://infopublik.citrahost.com>).

Menurut Bupati Kabupaten Merauke, berbagai pendekatan dan kebijakan dilakukan untuk mendorong pendidikan di Merauke, baik itu pendidikan yang berbasis spesifik maupun pendidikan umum secara integratif, karena kedepan ini, dunia lebih dikendalikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dikatakan, mulai 2011, dimulai dengan melakukan penataan pengelolaan bantuan pendidikan secara teratur dengan membuat SK terhadap semua anak Merauke yang mendapatkan bantuan pendidikan. Dengan SK itu, akan diketahui siapa yang kuliah dan siapa yang tidak dan siapa yang putus di tengah jalan.

Strategi lainnya, yaitu dengan menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki kapabilitas dan kualitas yang baik. Kerja sama ini dengan sejumlah bidang pengetahuan, mulai kedokteran, engineering, sipil, aritektur, hukum dan sosial. Kerjasama lainnya dengan mengirim anak kelas 3 dan 4 SD ke Surya Institute untuk membentuk pengetahuan dasar tentang pendidikan eksakta.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan sekolah dasar di daerah pedalaman di Kabupaten Merauke tidak berjalan dengan baik sehingga ini perlu dilakukan, jelasnya. Padahal, menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah pamong yang berkewajiban mengajar dan mendidik. Mengajar berarti memberikan ilmu pengetahuan, mentransformasikan ilmu yang bermanfaat, menuntun gerak pikiran, serta melatih kecakapan atau kepandaian anak didik, agar mereka kelak menjadi orang yang pandai, berpengetahuan dan cerdas. Guru adalah jantung pendidikan.

Tanpa denyut nadi dan peran aktif seorang guru, kebijakan pembaruan pendidikan secanggih apa pun tetap akan mubazir. Sebagai apapun dan semodern apa juga sebuah kurikulum dan perencanaan strategis pendidikan dirancang, bila tanpa disertai guru-guru yang bermutu dan profesional (berkualitas), maka tidak akan ada gunanya.

Namun sangat disayangkan persoalan mutu dan keprofesionalan guru di wilayah Papua khususnya di daerah pedalaman di Kabupaten Merauke dari dulu sampai sekarang masih menjadi persoalan yang belum pernah terselesaikan dan sesuai yang diharapkan. Dari sekian guru yang mengajar mayoritas bukan merupakan guru yang berlatar belakang pendidik. Andai saja kita hitung pengajar yang berlatar belakang pendidikan dan yang tidak, dapat dipastikan guru yang berlatar pendidikan non-kependidikan tidak sebanding dengan pengajar berlatar belakang kependidikan. Bahkan lebih banyak daripada tenaga pengajar yang berlatar belakang pendidikan. Hal ini merupakan ancaman terbesar bagi masa depan SDM di wilayah Tanah Papua, karena semua orang bisa mengajar tetapi tidak semua orang bisa mendidik. Yang perlu kita tahu adalah pendidikan di sekolah itu bukan sekadar tempat transfer pengetahuan sesuka pengajar. Tetapi, lebih kepada transformasi nilai dan budaya sehingga terjadi perubahan perilaku pada anak didik untuk terus belajar melakukan perubahan dalam hidup dirinya, masyarakat, daerah maupun bangsa dan negara. Perlu diketahui suatu proses pendidikan, kalau tidak pernah membuat perubahan bagi si pembelajar dan lingkungannya, itu berarti pendidikan yang kurang bagus.

Strategi lainnya, dengan mengirimkan anak-anak putera dan puteri Merauke ke Negara Jerman. Terobosan lainnya, melalui program Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), dimana pada tahun ini 17 orang putera dan puteri dari Merauke akan dimasukkan ke sekolah-sekolah unggulan di 4 kota besar yakni Jakarta, Bali, Bandung dan Jogjakarta. Untuk biaya selama pendidikan, disiapkan langsung oleh Pemerintah Pusat. Menurut Bupati, untuk Papua bisa menjadi tuan di negeri sendiri, bukan dengan uang tapi hanya satu melalui pendidikan. Strategi ini yang dilakukan sehingga kedepan diharapkan banyak putera dan puteri dari Merauke yang lahir dengan SDM yang handal.

Karena itu, pembangunan dan pendidikan di Papua khususnya di Kabupaten Merauke sudah seharusnya merupakan salah satu komponen yang tidak bisa dilepaskan dalam konsep pembangunan nasional. Hal ini seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang mengatakan salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, konsep pembangunan ini yang masih kurang dinikmati masyarakat di Tanah Papua khususnya di Kabupaten Merauke. Padahal, dengan memberikan pendidikan yang baik kepada warga masyarakat, hal itu akan mengubah pola pikir mereka sehingga mampu menciptakan SDM yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas menjadi faktor penting bagi kemajuan suatu daerah. Semakin berkualitas pendidikan di suatu wilayah maka akan semakin maju wilayah ini dan juga sebaliknya. Pembangunan sektor pendidikan di wilayah Papua yang masih jauh tertinggal mengakibatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah yang kaya akan hasil bumi ini rendah. Hal itu bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM atau *Human Development Indeks / HDI*) di wilayah Tanah Papua. Karena IPM

pada dasarnya sebagai salah satu indikator untuk mengukur capaian kualitas SDM di suatu daerah maupun negara.

## KESIMPULAN

Di tengah arus globalisasi yang kian besar, dan tantangan yang ada di depan mata adalah menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 harus diperhatikan sebagai peluang untuk mensejahterakan rakyat Papua. Dengan arus kapital yang kuat dapat mendorong terciptanya peluang usaha atau bisnis baru dan membuka lapangan pekerjaan baru. Disamping dengan adanya arus investasi asing diperlukan sumberdaya manusia yang kompetibel. Dengan memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menghadapi tantangan MEA 2015 diharapkan adanya transfer teknologi dan informasi untuk kemandirian bangsa kedepan. Beberapa pendekatan yang mampu di optimalkan untuk menghadapi tantangan MEA 2015 kedepan.

Pendidikan merupakan hal yang terpenting untuk meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat di kawasan Indonesia Timur. Sebagai usaha untuk meningkatkan daya saing dengan penduduk dari asal negara asing lainnya, penting untuk pemerintah daerah maupun pusat untuk lebih memberikan perhatian kepada masalah pendidikan. Penyuluhan sebagai langkah untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat setempat pun perlu dilakukan untuk memberikan kemudahan mengelola kekayaan sumber daya alam.

MEA akan menjadi tantangan tersendiri bagi Bangsa Indonesia dengan transformasi kawasan ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi, sekaligus menjadikan kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan kompetitif.

Pemberlakuan MEA dapat pula dimaknai sebagai harapan akan prospek dan peluang bagi kerjasama ekonomi antar kawasan dalam skala yang lebih luas, melalui integrasi ekonomi regional kawasan Asia Tenggara, yang ditandai dengan terjadinya arus bebas (*free flow*) : barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal. Meningkatnya investasi diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan mengatasi masalah tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan yang menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## SARAN

Kiranya amat tepat bila pemerintah diharuskan untuk segera mempersiapkan langkah dan strategis dalam menghadapi ancaman dampak negatif dari MEA dengan menyusun dan menata kembali kebijakan-kebijakan nasional yang diarahkan agar dapat lebih mendorong dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan industri sehingga kualitas sumber daya manusia baik dalam birokrasi maupun dunia usaha ataupun profesional di Papua khususnya Kabupaten Merauke meningkat. Pemerintah diharapkan pula untuk menyediakan kelembagaan dan permodalan yang mudah diakses oleh pelaku usaha dari berbagai skala, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi.\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Asyarkoni Mufiz. 2015. Budaya Sosial Indonesia Untuk Menyongsong MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 2015.
- Harbison, Frederick. Meyers. 1965. “*Manpower and Education*” Princeton University
- Kuratko and Hodgetts. 1989. *Entrepreneurship A Contemporary Approach*. New York : *The Driden Press*.
- Mathis, Robert L. dan John H. Jackson. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi, S. 2008. Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan, Raja Grafindo, Jakarta
- Priosoedarsono [Subiakto](#).\_\_\_\_\_, Sudah Siapkah Kita Menyongsong MEA 2015.
- SEMA STIE STMY Majalengka Periode 2014/2015. “Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)”.
- Basuki, Sulistyono. 2010. Metode Penelitian. Jakarta : Penaku.
- Sugiyono. 2008, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Susilo Martoyo. 2003. Audit Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tambunan, 2003, “Perekonomian Indonesia-Beberapa Masalah Penting”, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- <http://www.beritasatu.com/nasional/295642-sdm-masyarakat-papua-jauh-tertinggal-dibanding-daerah-lainnya.html>.
- [http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VI-10-II-P3DI-April-2014-4.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-10-II-P3DI-April-2014-4.pdf)
- <http://www.merauke.go.id/portal/news/view/7/geografis.html>.
- <https://www.scribd.com/doc/275832474/Statistik-Daerah-Kabupaten-Merauke-2014>.
- <http://infopublik.citrahost.com/read/50491/strategi-pemkab-merauke-angkat-sdm-lokal--.html>.





**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH  
PERBATASAN PAPUA DAN PAPUA NEW GUINEA**

**Yohanis E. Teturan<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

*Pengelolaan pembangunan wilayah perbatasan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan di seluruh wilayahnya, sampai dengan saat ini masih banyak timbul masalah wilayah perbatasan dan membutuhkan ekstra perhatian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan bahkan pihak-pihak dunia usaha, pengelolaan yang berbasis pada pengelolaan “manusianya” hal ini dikarenakan masih dominannya pembuatan kebijakan dalam pengelolaan perbatasan yang berbasis pada kepentingan pemerintah. Sedangkan pengembangan daerah tertinggal diprioritaskan untuk pengembangan kelembagaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dasar, dan mengoptimalkan pengembangan perekonomian masyarakat. kesenjangan pembangunan masih rendahnya aksesibilitas, terbatasnya sarana dan prasarana, kepadatan penduduk relatif rendah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan belum optimalnya pembangunan.*

*Kata Kunci : Pengelolaan Wilayah Perbatasan Papua*

**1. PENDAHULUAN**

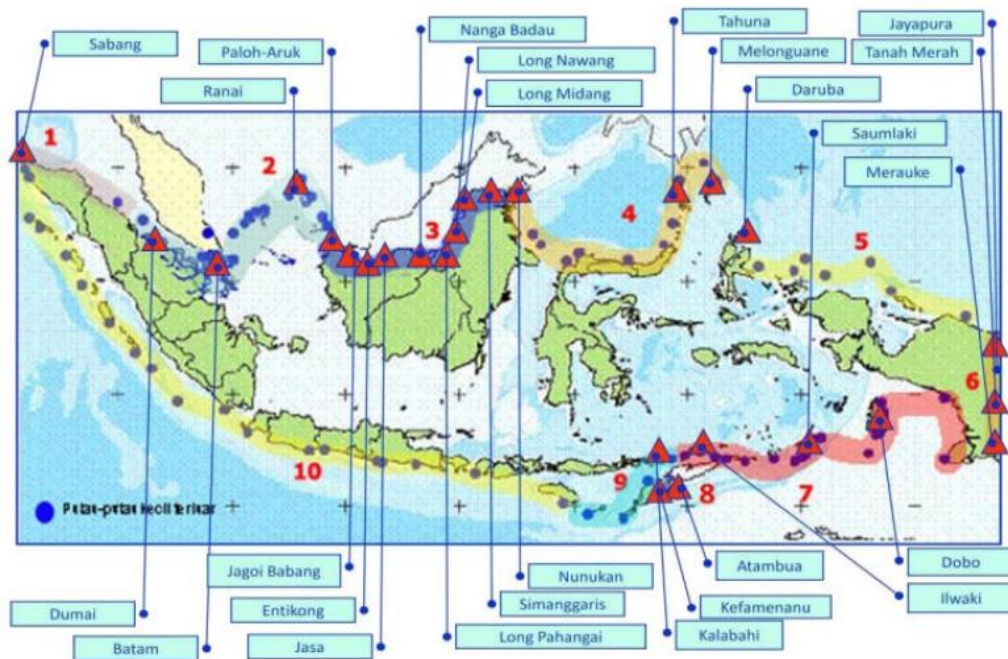
Suatu negara pada umumnya berbatasan langsung dengan negara tetangganya, baik di wilayah darat, laut, maupun udara. Indonesia sebagai negara kepulauan termasuk negara yang memiliki perbatasan negara di ketiga wilayah tersebut. Secara geografis Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara yaitu Malaysia, Papua Nugini (PNG), Timor Leste, Australia, India, Thailand, Singapura, Vietnam, Palau, dan Filipina. Wilayah-wilayah perbatasan Indonesia, termasuk pulau-pulau kecil terluar merupakan wilayah terpencil dan kondisinya masih tertinggal atau terbelakang. Perbatasan Indonesia hingga saat ini masih memprihatinkan dari berbagai segi. Daerah-daerah perbatasan banyak yang mengalami keterbelakangan ekonomi karena tiadanya program dan proyek

---

<sup>1</sup> [teturanendes04@gmail.com](mailto:teturanendes04@gmail.com) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus Merauke

pemerintah maupun swasta. Panjangnya garis perbatasan baik di daratan maupun lautan sangat sulit untuk diawasi dengan reguler oleh aparat keamanan. Akibatnya pelanggaran wilayah perbatasan, penyelundupan, dan aktivitas ilegal lintas batas lainnya seringkali terjadi hal ini dapat terlihat pada gambar peta menunjukkan wilayah perbatasan negara Indonesia dengan tetangga.

Gambar 1. Lokasi 10 Kawasan Perbatasan dan Sebaran 26 Kota Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Perbatasan



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2009-2014

Jika kawasan perbatasan tidak segera dikelola dengan baik dan efektif, tentu kedaulatan negara akan segera menjadi pertaruhannya. Selama ini pemerintah dan masyarakat luas baru tersentak oleh seriusnya masalah perbatasan ketika ada ramai-ramai tentang hilangnya beberapa wilayah Indonesia karena kalah di pengadilan internasional, atau karena adanya klaim sepihak terhadap wilayah kita dari negara tetangga. Selain itu, karena buruknya kesejahteraan dan infrastruktur di daerah perbatasan, banyak penduduk di kawasan ini lebih memiliki kedekatan emosional dan interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga. Tidak jarang mereka ini mengalami krisis identitas kebangsaan, rendahnya perhatian negara kita terhadap nasib mereka dan perkembangan daerahnya. Dalam beberapa tahun belakangan ini Pemerintah Pusat telah mengambil sejumlah kebijakan untuk menjawab persoalan yang rumit di kawasan perbatasan. (Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia [www.kemitraan.or.id](http://www.kemitraan.or.id))

Kebijakan kawasan perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-undang no 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, Undang-undang no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, Perpres no 2 tahun 2015 tentang RPJMN, dan Peraturan badan pengelolaan perbatasan no 4 tahun 2014 tentang rencana

kerja badan nasional perbatasan semua ini bermuara pada kesejahteraan warga masyarakat yang berada pada kawasan perbatasan. Namun sampai sekarang masih saja kawasan perbatasan masih mengalami perbagai persoalan diantaranya, masih rendahnya sumber daya manusia, layanan pendidikan, layanan kesehatan, sarana dan prasarana, infrastruktur, ekonomi, peningkatan taraf hidup dan lain sebagainya. Persoalan tersebut masih mendominasi masyarakat yang berada kawasan perbatasan.

## 2. ISU-ISU KAWASAN PERBATASAN

Permasalahan di wilayah-wilayah perbatasan dapat dikatakan rumit dan membutuhkan ekstra perhatian dari Pemerintah Pusat maupun daerah dan bahkan pihak-pihak dunia usaha. Hal ini dikarenakan selain terkait dengan permasalahan keamanan, ketertiban, dan keutuhan NKRI, juga terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Secara garis besar, isu-isu yang muncul seputar wilayah perbatasan negara dapat dibagi ke dalam beberapa bagian.

- 1) Penentuan batas-batas negara secara fisik dan pengamanannya;
- 2) Pengelolaan pembangunan wilayah perbatasan Negara,
- 3) Rendah kualitas sumberdaya manusia;
- 4) Perjanjian pemerintah kolonial yang membagi pulau Papua menjadi 2 wilayah (RI dan PNG), dilakukan dengan menarik garis lurus secara astronomis, tanpa melihat kondisi social budaya yang ada, akibatnya adalah pemilikan/harta benda (tanah, kebun, lading) menurut hak ulayat masyarakat terbelah, ada yang berada di wilayah RI dan ada yang berada di wilayah PNG. Untuk itu perlu dilakukan penanganan yang serius.
- 5) Minimnya sarana dan prasarana transportasi ke kawasan perbatasan menjadi akses dari pusat pemerintahan Republik Indonesia menjadi sangat terbatas, tetapi dipihak lain akses ke pemerintah pusat Pemerintahan PNG lebih mudah;
- 6) Pada umumnya kawasan perbatasan darat berada di daerah yang terisolir dan pedalaman dengan kondisi alam yang sulit dijangkau;
- 7) Hutan yang ada di kawasan perbatasan umumnya hutan alam dan sebagian besar dikategorikan sebagai kawasan konservasi atau kawasan hutan lindung.
- 8) Infrastruktur di kawasan perbatasan relatif masih sangat terbatas dan memerlukan penanganan yang lebih serius.
- 9) Akibatnya ada beberapa dimana pemerintahan PNG berjalan efektif di dalam wilayah Republik Indonesia. Karena yang berjalan adalah pemerintahan PNG, maka penduduknya pun mengaku sebagai warga negara PNG meski berdiam di wilayah Republik Indonesia.

Dari permasalahan yang telah teridentifikasi di atas memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kondisi pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan perbatasan seperti Merauke PNG. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia memformulasikan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi di wilayah perbatasan.

### 3. PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN

#### a. Pengertian Kawasan Perbatasan

Pengertian Kawasan Perbatasan dijelaskan secara formal dalam beberapa undang-undang Indonesia. Dalam Undang-Undang No 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, kawasan perbatasan didefinisikan sebagai bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Adapaun dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan perbatasan didefinisikan sebagai wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan daratan dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar.

Adapun ruang lingkup kawasan perbatasan secara lebih spesifik dijabarkan dalam Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan PP No. 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) dimana kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan yang meliputi 10 kawasan (3 kawasan perbatasan darat serta 7 kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar). Dalam Bappenas (2008), dijelaskan mengenai sinkronisasi definisi kawasan perbatasan dalam undang-undang (UU) tata ruang dan wilayah negara dimana definisi yang ada dapat dipahami sebagai unit yang saling mengisi, dimana pengembangan dengan unit kabupaten/kota perbatasan diarahkan pada aspek ekonomi yang mencakup wilayah yang lebih luas dan *borderless*, termasuk PKSN sebagai pusat pertumbuhan (PP 26 /2008) sedangkan pengembangan dengan unit kecamatan perbatasan diarahkan pada penguatan sabuk pertahanan dan kesejahteraan masyarakat (UU 43/2008).

#### b. Kebijakan Umum Kawasan Perbatasan

Berbagai peraturan perundangan nasional yang terkait dengan pengelolaan Perbatasan Negara, antara lain UU No. 17 tahun 2005 tentang RPJP Nasional, Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJM Nasional (2010-2014), UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Pada tahun 2015 penetapan Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019, Perpres No 34 Tahun 2015 Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku Utara Dan Provinsi Papua Barat, dengan dikeluarkan RPJMN tahun 2015 maka pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi wialayah perbatasan propinsi papua tahun 2015-2019 dapat meningkat.

Sasaran pertumbuhan ekonomi di propinsi papua pada tahun 2015 mencapai 14,0-14,3 %, dan target dari pemerintah pusat pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi propinsi papua mencapai 16,9-18,6% maka dengan target tersebut pertumbuhan ekonomi di propinsi papua akan meningkat sehingga keterlibatan semua pihak turut berperan membantu demi tercapainya sasaran tersebut.

**SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH  
PAPUA PER PROVINSI  
TAHUN 2015-2019**

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Papua	14,0 - 14,3	14,7 - 15,3	16,2 - 17,2	16,9 - 18,3	16,9 - 18,6
Papua Barat	7,8 - 8,0	10,1 - 10,5	14,3 - 15,1	15,8 - 17,1	15,8 - 17,4

*Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014*

Sasaran tingkat kemiskinan masyarakat di propinsi papua direncanakan akan mencapai 13,4-12,1% pada tahun 2019 memmang pencapai ini masih jauh dari target pemerintah tatapi upaya pemerintah dan tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak demi membantu masyarakat papua sehingga bisa keluar dari masalah yang di hadapi saat ini, oleh karena itu wilayah perbatasan menjadi prioritas utama oleh pemerintah, dapat di lihat pada tabel berikut ini.

**SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH PAPUA PER PROVINSI  
TAHUN 2015-2019**

Provinsi	Tingkat Kemiskinan (persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Papua	23,4 - 22,9	22,1 - 21,2	19,6 - 18,4	17,1 - 15,8	13,4 - 12,1
Papua Barat	28,2 - 27,6	26,8 - 25,7	23,9 - 22,5	21,0 - 19,4	16,6 - 15,0

*Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014*

Sasaran ketiga adalah tingkat pengangguran propinsi papua saat meningkat di tahun 2015 mencapai 5,5 - 5,4% pertahun, sedangkat target dari pemerintah pusat menargetkan pada tahun 2019 tingkat pengaguran di propinsi papua menurun 4,7-4,2 % hal ini menjadi permasalahan di propinsi papua, diharapkan semua pihak turut serta membantu dan mendukung mengurangi pengangguran di propinsi papua.

**SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH PAPUA PER PROVINSI  
TAHUN 2015-2019**

Provinsi	Tingkat Pengangguran (persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Papua	5,5 - 5,4	5,3 - 5,1	5,1 - 4,8	4,9 - 4,5	4,7 - 4,2
Papua Barat	2,9 - 2,8	2,8 - 2,6	2,6 - 2,5	2,9 - 2,6	2,4 - 2,2

*Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014*

Amanat dari RPJMN tahun 2015-2019 menjadi prioritas utama ada 3 hal di propinsi papua adalah yaitu; 1) pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 mencapai



16,9-18,6% ini adalah target yang dilakukan oleh pemerintah pusat, 2) angka kemiskinan pada tahun 2015 mencapai 23,4-22,9 % di targetkan pada tahun 2019 menurun menjadi 13,4-12,1% target ini tidak di dukung oleh semua pihak tentu tidak tercapai hal ini menunjukkan perhatian serius dari pemerintah demi menekan angka kemiskinan tersebut. 3) pengangguran di propinsi papua saat ini mencapai pada 5,5-5,4% pada tahun 2015, sehingga target dari pemerintah pusat pada angka pengangguran menurun tahun 2019 mencapai 4,7-4,2% dengan demikian upaya pemerintah memfokuskan pada 3 hal pokok diatas tentu tidak terlepas dukungan dari semua pihak dalam rangka mencapai target tersebut.

### c. Mencari Model Teoritis Pengembangan Kawasan Perbatasan

Untuk menggambarkan implikasi kebijakan ini, akan dijelaskan beberapa kasus pengembangan kawasan perbatasan. Pendekatan ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu *pertama*, perencanaan dengan mendahulukan membangun infrastruktur (*infrastructure led*) sebagai investasi sebelum aktifitas ekonomi dimulai. *Kedua*, mendahulukan investasi sektor swasta (*investment led*), dan *ketiga*, mendahulukan program-program dan kebijakan (*policy led*) yang bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan kawasan perbatasan. Terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam kategori ini, yang menunjukkan karakteristik dominan yang ada. Sehingga pendekatan ini hanya membatasi dengan 3 (tiga) pendekatan (Wu, 2001: 28-33), yaitu:

Tipologi Pengembangan Kawasan Perbatasan

Tipe Wilayah Perbatasan	Hubungan Ekonomi	Kerangka Institusi/ Pemerintah	Tipe Perusahaan	Jaringan Infrastruktur Pemerintah	Migrasi	Perbedaan upah Buruh	Contoh Kasus
Wilayah Border	Kecil dan kontrol ketat	Kecil  terjadi hanya pada satu sisi	perorangan/ perusahaan kecil	<i>Bottleneck</i> akibat ketatnya kontrol dan inefisien	Kontrol ketat ( <i>frontier</i> )	Sangat Besar	Rusia-China-Korut (Tumen)
			berkembang dengan spontan/ alamiah	(idem)	(idem)	Besar	Thailand-China-Burma-Laos
Wilayah Cross-border	Hubungan Tenikat	Terjadi Mekanisme Konsultatif	Perusahaan besar dan kecil disetiap sisi - hubungan kontraktual- <i>Joint Ventures</i>	<i>Consultatif Planning</i> - kontrol perbatasan masih penting	Migrasi terkontrol (pedagang komuter); mahasiswa komuter	Besar  Berkurang	Polandia-Jerman  Hongkong-Shenzhen
Wilayah Trans-border	Simbiosis	Kerjasama Institusi	Jaringan Perusahaan: Transfer teknologi; Teknologi; <i>Sharing Network</i>	Perencanaan Jaringan Infrastruktur Bersama	Prosedur sederhana dan pergerakan relatif bebas	Kecil bahkan nol	Uni Eropa

Sumber : C.T.Wu dalam "Cross-border Development in Changing World," New Regional Development Paradigm Vol.2, 2001:29 dalam Husaini (2006)

## 4. PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PAPUA

Pengelolaan perbatasan di Provinsi Papua belum sepenuhnya pula menjalankan pengelolaan yang berbasis pada pengelolaan "*manusianya*." Hal ini dikarenakan masih dominannya pembuatan kebijakan dalam pengelolaan perbatasan yang berbasis pada kepentingan pemerintah. Layaknya kawasan perbatasan dengan negara lain di Indonesia, kendala umum yang dihadapi oleh

Provinsi Papua adalah kesenjangan pembangunan dengan ciri-ciri: masih rendahnya aksesibilitas, terbatasnya sarana dan prasarana, kepadatan penduduk relatif rendah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan belum optimalnya pembangunan. Penduduk di kawasan perbatasan memiliki keterampilan yang rendah dan minimnya pendapatan masyarakat, sehingga berdampak pada aspek kehidupan mereka seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Terkait dengan kenyataan sosial bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan

Jika kawasan perbatasan tidak segera dikelola dengan baik dan efektif, tentu kedaulatan negara akan segera menjadi pertaruhannya. Selama ini pemerintah dan masyarakat luas baru tersentak oleh seriusnya masalah perbatasan ketika ada ramai-ramai tentang hilangnya beberapa wilayah Indonesia karena kalah di pengadilan internasional, atau karena adanya klaim sepihak terhadap wilayah kita dari negara tetangga. Selain itu, karena buruknya kesejahteraan dan infrastruktur di daerah perbatasan, banyak penduduk di kawasan ini lebih memiliki kedekatan emosional dan interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga. Tidak jarang mereka ini mengalami krisis identitas kebangsaan berhubung rendahnya perhatian negara kita terhadap nasib mereka dan perkembangan daerahnya. Dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah pusat telah mengambil sejumlah kebijakan untuk menjawab persoalan yang rumit di kawasan perbatasan.

## **5. PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL**

Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mempercepat Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat. Sedangkan pengembangan daerah tertinggal diprioritaskan untuk pengembangan kelembagaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dasar, dan mengoptimalkan pengembangan perekonomian masyarakat.

Arah Pengembangan Kawasan Perbatasan dijabarkan melalui:

1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan peluang pasar negara tetangga dengan didukung dengan transportasi, energi, dan telekomunikasi.
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam mengelola potensi lokal.
3. Membangun konektivitas transportasi utama Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) dengan lokasi prioritas (Kecamatan); Pusat Kegiatan Wilayah (Ibukota Kabupaten); serta Pusat Kegiatan Nasional (Ibukota Provinsi); melalui jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan strategis nasional.
4. Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu *Custom, Immigration, Quarantine, Security* (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu.
5. Melibatkan peran aktif masyarakat adat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara.

6. Melakukan penataan kelembagaan diplomasi melalui peningkatan kapasitas, peran dan fungsi kelembagaan diplomasi.
7. Melakukan peninjauan kembali terhadap hasil-hasil kerjasama perdagangan antar negara (*Border Trade Agreement*). Sedangkan Arah Pengembangan daerah tertinggal dijabarkan melalui:
  - a. Penguatan kapasitas kelembagaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, yaitu sinkronisasi mulai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar pelaku pembangunan, baik pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan dunia usaha, berpedoman pada peraturan-perundangan yang berlaku.
  - b. Dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan ego-sektor dalam pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal.
  - c. Peningkatan ketersediaan pelayanan publik dasar dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan diprioritaskan pada bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, listrik, dan telekomunikasi.
  - d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik wilayah, potensi lokal,
  - e. Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan kawasan strategis, serta pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pada peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah.

## KESIMPULAN

Wilayah perbatasan darat di Indonesia umumnya merupakan kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan harus dimulai sesegera mungkin melalui tindakan nyata di lapangan. Sudah saatnya implementasi dari paradigma kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI dilakukan, tidak hanya sekedar semboyan belaka.

1. Jika kawasan perbatasan tidak segera dikelola dengan baik dan efektif, tentu kedaulatan negara akan segera menjadi pertaruhan penguatan kapasitas lembaga serta peningkatan kualitas pelayanan publik demi menunjang kawasan perbatasan.
2. Penguatan modal sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal kawasan perbatasan termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana harus disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Kebijakan komprehensif dan terarah untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
4. Penduduk di kawasan perbatasan memiliki keterampilan yang rendah dan minimnya pendapatan masyarakat, sehingga berdampak pada aspek kehidupan mereka seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan.
5. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan-perundangan dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan ego-sektor dalam pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal.



## DAFTAR PUSTAKA

- 2010 Laporan Penelitian Program Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti Dan Perekayasa Tahun Pengembangan Wilayah Perbatasan Berbasis Sumber Daya, Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
- Aziz Budianta, Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah Di Indonesia, Staf Pengajar Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako Palu
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Kajian Pengembangan Investasi Wilayah Perbatasan tahun 2011
- Dendy Kurniadi 2009, Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tesis Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Giddens, A. 1985. *The Nation-state and Violence*. Vol. 2 of Contemporary History of Historical Materialism. Cambridge: Polity Press.
- Glasson, John. 1974. *An Introduction to Regional Planning : Concept, Theory and Practice*. London : Hutchinson & Co. (Publishers) Ltd
- Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia Partnership Policy Paper No. 2/2011 <http://www.Kemitraan.or.id>
- Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategi Indonesia Reformasi Manajemen Perbatasan Di Negara-negara Transisi demokrasi Edisi Pertama, Juni 2007, ISBN 978-979-1290-01-2
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan No 5 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang sarana dan prasana kawasan perbatasan tahun 2014
- Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan No 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan kawasan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku Utara Dan Provinsi Papua Barat
- Perbatasan Kalimantan Sarawak dan Sabah, Draft ke-7 Tanggal 16 Oktober 2003.
- Rancangan Keputusan Presiden RI Tahun 2003 tentang *Penataan Ruang Kawasan*
- Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Maret Tahun 2011-2014
- Rumford, C. 2006. 'Borders and bordering', in G. Delanty (ed.) *Europe and Asia Beyond East and West: Towards a New Cosmopolitanism*. London: Routledge.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang *Penataan Ruang*.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- William Dunn. 1999 Pengantar Analisis Kebijakan Publik
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas Tahun 2001-2010*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas, 2001
- Boy S. Bakhri Kesiapan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Dari Perspektif Daya Saing Nasional Jurnal *Economica* 21 Vol. I No. 1 Januari 2015



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**IMPLEMENTASI DAN INOVASI KEBIJAKAN PDB  
SAMISAKE DI KOTA BENGKULU DALAM RANGKA  
MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

**Sri Indarti, S.Sos, M.Si<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

*Samisake merupakan kebijakan pemerintah kota Bengkulu yang dilaksanakan sejak tahun 2013 berdasarkan Perda No.12 tahun 2013, yang dikembangkan sebagai salah upaya pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi produktif. Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, peningkatan daya saing daerah dan percepatan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelibatan Pemerintah Kota, dunia usaha, masyarakat lokal dan kelompok masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif.*

*Implementasi kebijakan dalam konsepsi kebijakan publik memiliki posisi strategis dan sentral terhadap keberhasilan kebijakan. Efektifitas kebijakan publik akan terukur dari seberapa besar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan memberi solusi terhadap berbagai masalah publik yang sedang terjadi. Inovasi-inovasi kebijakan sangat diperlukan pada era reformasi dan keterbukaan ini, sehingga dapat memacu potensi dan sumber daya masyarakat dan lingkungan untuk kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan bersama.*

*Implementasi samisake selama sekitar dua tahun ini memberikan fenomena tersendiri, yang memerlukan inovasi kebijakan untuk pengembangan kebijakan pada masa berikutnya, dengan memanfaatkan berbagai peluang dan mensiasati tantangan yang ada secara kreatif dan profesional, sehingga kebijakan ini bisa mencapai target kebijakannya dalam memperkuat dan mengembangkan fondasi ekonomi masyarakat. Efektifitas kebijakan ini akan memberikan fondasi kuat untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).*

*Key words : Inovasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, MEA*

**A. PENDAHULUAN**

Era reformasi menjadi harapan berbagai kalangan dan elemen akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui peluang yang besar

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prodi Doktor Administrasi Publik UNDIP, Dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

bagi daerah otonom untuk mengurus daerah dan rumah tangga sendiri. Otonomi yang luas pada era reformasi diharapkan bisa meningkatkan eksplorasi dan optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia bagi kemajuan daerah. Era otonomi ini juga disertai dengan peningkatan kapasitas demokrasi lokal berupa pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal ini memberikan fenomena tersendiri dalam kebijakan pemerintah daerah otonom, dimana pemerintah daerah dengan dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dengan peluang bisa merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat di daerah.

SAMISAKE (Satu Milyar Satu Kelurahan) merupakan kebijakan publik yang diatur dalam Perda Perda No.12 tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, dan telah diimplementasikan sejak tahun 2013. Implementasi kebijakan dalam konsepsi kebijakan publik memiliki posisi strategis dan sentral terhadap keberhasilan kebijakan dan pengembangan kebijakan unggul, sehingga perlu melakukan optimalisasi dalam implementasi, sebagaimana pernyataan berikut :

*Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% dan 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi. (Nugroho, 2009:501-502)*

Secara ideal, lahirnya kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah merupakan upaya untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Karena kebijakan publik merupakan upaya untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi masyarakat, maka sudah seharusnya kebijakan tersebut berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Konsekuensinya, masalah dan solusi alternatif permasalahan tersebut juga diakomodasi dari masyarakat, tidak sekedar merupakan cetusan pikiran atau bahkan imajinasi dari pejabat pembuat kebijakan (eksekutif dan legislatif)

SAMISAKE (Satu Milyar Satu Kelurahan) merupakan kebijakan publik yang diatur dalam Perda Perda No.12 tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, dan telah diimplementasikan sejak tahun 2013. Implementasi kebijakan dalam konsepsi kebijakan publik memiliki posisi strategis dan sentral terhadap keberhasilan kebijakan dan pengembangan kebijakan.

## **B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK**

Kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik memiliki nilai strategis, karena memberikan dampak luas terhadap masyarakat dalam segenap aspek kehidupan. Produk kebijakan

publik mengikat orang banyak dan dilaksanakan oleh administrasi Negara dengan subyek kebijakan dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Dalam definisi lain, Edwards dan Sharkansky (1978:2), menyatakan bahwa “kebijakan negara adalah apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program-program, pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan”. Senada dengan pendapat tersebut, Dye' (1978:3) merumuskan kebijaksanaan negara sebagai "semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah". Oleh sebab itu, dari sudut pandang Dye, kebijaksanaan negara itu menyangkut pilihan-pilihan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu.

Dengan demikian kebijakan publik adalah pilihan tindakan baik yang berjangka panjang maupun pendek yang dibuat oleh badan pemerintah dan memberikan pengaruh dalam kehidupan bangsa baik di Pusat maupun Daerah. Keputusan pemerintah untuk memilih melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, akan memberikan dampak besar dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian pokok dalam Administrasi Publik. Administrasi publik terkait erat dengan proses politik, termasuk dalam perumusan kebijakan negara, mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Hal ini terkait dengan fungsi administrasi publik, yang diantaranya adalah mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik

Nigro dan Nigro (dalam Jusman, 2004:49) menyatakan administrasi publik mempunyai suatu peranan yang sangat penting dalam perumusan kebijakan negara dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik (*Public administration has an important role in the formulation of public policy and is thus part of the political process*). Kebijakan publik selayaknya berorientasi kepada kepentingan publik.

Implementasi kebijakan menurut Kamus Webster berarti suatu proses melaksanakan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan dekrit presiden). Implementasi kebijakan itu sendiri harus menyediakan sarana untuk melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Konsep lain disampaikan oleh A. Mazmanian dan Paula A. Sabatier (Wahab 2003: 21) sebagai berikut :

*Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus implementasi kebijakan adalah kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.*

Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu. Tahap implementasi kebijakan dimulai setelah tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang / regulasi ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Dengan demikian proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, tapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, sosial dan stake holders lain yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya dapat berpengaruh pada dampak kebijakan.

### C. METODE

#### 1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field Research*), dengan penerapannya berupa deskripsi fenomena implementasi kebijakan. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan implementasi SAMISAKE di lokasi, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung. Kemudian mengkaji inovasi kebijakannya, menganalisis inovasi kebijakan pada implementasi berikutnya, dalam menyongsong MEA.

#### 2. Tehnik Pengumpulan Data

- a. *Observasi* yaitu pencatatan dan pengamatan secara sistemik mengenai fenomena yang diselidiki
- b. *Interview* yaitu dengan mengadakan wawancara dan komunikasi langsung dengan responden ditingkungan
- c. *Dokumentasi* yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dokumen, peraturan, laporan dan literatur.

#### 3. Informan Penelitian

Pengambilan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dan *snowbal sampling* pada lembaga dan personal yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan SAMISAKE. *Purposive sampling* dilakukan pada UPTD Samisake, BAPPEDA Kota Bengkulu, Dinas Koperasi dan UKM, Bagian Ekonomi Pemda, serta tokoh masyarakat dan penerima program Samisake. *Snowbal sampling* terutama dilakukan apabila pada saat di lokasi penelitian terdapat petunjuk atau informasi bahwa ada informan baru, dan dilakukan secara berantai.

#### 4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pola siklus, dengan proses sebagai berikut: Pemilihan studi, Menyusun pertanyaan, Pengumpulan Data, Menyusun Catatan: Analisis Data: Apabila dalam analisa data terdapat data yang

belum lengkap, maka langsung dilakukan proses kedua siklus ini, yaitu menyusun pertanyaan dan dilanjutkan dengan proses-proses berikutnya. Proses ini diakhiri secara tentatif dengan Penulisan Laporan. Apabila penulisan laporan sudah memenuhi standar, maka proses ini selesai. Namun apabila masih diperlukan data tambahan untuk penulisan laporan, maka dilakukan kembali siklus penelitian tersebut.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SAMISAKE**

#### **a. Gambaran Umum Kebijakan Samisake**

Salah upaya pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi produktif adalah melalui pemberian pinjaman dana bergulir. Pemerintah Kota Bengkulu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2013-2018 telah menjadikan pinjaman dana bergulir sebagai program unggulan daerah yakni yang lebih dikenal sebagai Dana Bergulir Samisake. (UPTD Samisake, Laporan Triwulan1 2014)

Sebagai langkah untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana bergulir Samisake, Pemerintah Kota Bengkulu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu telah melakukan formulasi-formulasi kebijakan, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. Peraturan daerah ini kemudian dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

Untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir Samisake, Pemerintah Kota Bengkulu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bengkulu. Unit Pelaksana Teknis Dinas tersebut berbentuk Badan Layanan Umum Daerah. Dalam menyalurkan dana bergulir Samisake, UPTD berkerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro yang berada pada masing-masing kelurahan di Kota Bengkulu. Pola kerjasamanya adalah LKM bertindak selaku pelaksana penyalur dana bergulir Samisake dengan tugas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima, menetapkan calon penerima, menandatangani akad kredit dengan penerima, pembinaan, penagihan dan pelaporan. Jadi, UPTD maupun Dinas tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan pola ini, diharapkan akses masyarakat terhadap dana bergulir semakin besar dan sekaligus mengurangi resiko penyaluran dana yang tidak tepat sasaran. (UPTD Samisake, Laporan Triwulan1 2014).

Salah satu tugas LKM dalam pengelolaan dana bergulir Samisake adalah menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan dana bergulir Samisake kepada UPTD setiap bulan. Selanjutnya UPTD berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan dana bergulir Samisake kepada Walikota Bengkulu melalui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu dan ditembuskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu setiap tiga bulan. (Laporan Triwulan 1 tahun 2014).

**b. Tujuan**

Tujuan dana bergulir Samisake berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake adalah :

- Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- Perluasan kesempatan kerja dan usaha melalui penciptaan lapangan kerja baru;
- Peningkatan daya saing daerah;
- Terlaksananya upaya percepatan penguatan ekonomi kerakyatan melalui melibatkan Pemerintah Kota, dunia usaha, masyarakat lokal dan kelompok masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif

**c. Agenda**

Kebijakan PDB Samisake di formulasikan dengan agenda kebijakan sebagai berikut (adaptasi dari Perjalanan Samisake, 2014 :5-6)

- 1) Penyusunan strategi dan agenda program SAMISAKE..
- 2) Mengidentifikasi dan mengembangkan kluster ekonomi sebagai fokus SAMISAKE
- 3) Membangun forum kemitraan multi *stakeholder* SAMISAKE yang kuat, efektif dan efisien
- 4) Mengembangkan dan memperkuat kapasitas daerah
- 5) Meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran
- 6) Penyaluran Dana Bergulir Modal Usaha

**d. Perkembangan Pelaksanaan PDB Samisake**

Pemerintah Kota Bengkulu telah melaksanakan launching Program Pengelolaan dan Pendampingan Dana Bergulir Samisake pada tanggal 2 Desember 2013 di lapangan Pesantren Pancasila, Jembatan Kecil. Dalam Tahun Anggaran 2013, dana bergulir Samisake telah disalurkan sebesar Rp 13.649.000.000,- kepada 62 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di 61 kelurahan.

Pengucuran dana Samisake kemudian di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menghasilkan rekomendasi bahwa untuk pelaksanaan PDB Samisake berikutnya harus dibentuk Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). Sehingga walaupun PDB Samisake sudah dianggarkan dalam anggaran perubahan APBD 2013, namun tidak bisa dicairkan yang kemudian dana tersebut

dialihkan untuk kegiatan lain. Tahun 2014 dan 2015 juga tidak ada pengucuran dana untuk PDB Samisake, namun pengguliran dana yang dicairkan tahun 2013, terus dilakukan. Ada dana pinjaman yang sudah diputar 2 kali atau tiga kali, karena ada dana yang dipinjamkan untuk masa waktu 5 bulan, 10 bulan dan sebagainya. Dana UPTD Samisake didapatkan dari dana rutin Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu.

Pendirian BLUD menjadi kemestian untuk kelangsungan kebijakan PDB Samisake. Pendirian BLUD ini memerlukan kelengkapan administrasi seperti tata kelola, SDM, prosedur dan sistem pelaksanaan, renstra, sumber daya keuangan, tahapan-tahapan kerja dan sebagainya. Kelengkapan tersebut dilaksanakan oleh mitra, dengan proses lelang yang telah dilaksanakan sekitar bulan Juli 2015. Proses kelengkapan ini memakan waktu cukup lama, karena prosedur birokrasi yang memakan waktu dan teknis pelaksanaan yang menghadapi beberapa kendala seperti proses lelang *pertama* yang hanya diikuti oleh 2 peserta sehingga belum memenuhi syarat peserta lelang, dan tindak lanjut hasil proses lelang *keduayang* menghadapi kendala teknis untuk pelaksanaan pembuatan berkas kelengkapan administrasi BLUD. (wawancara dengan pegawai UPTD Samisake).

## 2. INOVASI KEBIJAKAN PDB SAMISAKE DALAM MENYONGSONG MEA

### a. Inovasi kebijakan

Kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini dikarenakan bahwa melalui kebijakan publik, pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengarahkan masyarakat dengan aturan yang memiliki kekuatan untuk memaksa agar masyarakat terarah sesuai dengan target dan ketentuan serta yang telah ditetapkan.

Efektifitas kebijakan publik akan terukur dari seberapa besar kebijakan tersebut dapat direalisasikan dan memberi solusi terhadap berbagai masalah publik yang sedang terjadi. Inovasi-inovasi kebijakan sangat diperlukan pada era reformasi dan keterbukaan ini, sehingga dapat memacu potensi dan sumber daya masyarakat dan lingkungan untuk kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan bersama.

Kebijakan publik yang inovatif sangat diperlukan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, guna menembus kemelut dan kebekuan yang selama ini terjadi. Konsentrasi inovasi kebijakan publik menjadi keharusan ketika kebijakan “manual” yang hanya untuk menggugurkan sebuah kewajiban pemerintah, telah melahirkan berbagai kekecewaan bahkan kecemasan di tengah-tengah publik, khususnya yang menyangkut kepentingan



Inovasi kebijakan publik merupakan hasil kreasi kebijakan publik yang responsif terhadap perubahan yang cepat. Baik akibat perubahan lingkungan strategis global, regional, maupun nasional dan lokal. Mariana, menyatakan:

“Kebijakan publik yang inovatif senantiasa harus: 1) Berbasis kepada kepentingan publik; 2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta evaluasinya melibatkan partisipasi publik; 3) Perumusannya senantiasa bergerak secara dinamis sesuai dengan perkembangan aspirasi publik (Mariana, Dede, 2010:18)

Kebijakan Samisake yang telah diimplementasikan sejak tahun 2013, dimana dalam perumusannya telah melibatkan stakeholder seperti kalangan akademisi, ormas, tokoh masyarakat, dan elemen-elemen lain. Kebijakan ini diorientasikan untuk kepentingan publik, walaupun nuansa politis masih amat kental dalam formulasi dan implementasi kebijakannya. Berdasarkan wawancara dengan pegawai UPTD, selama implementasi terdapat kendala seperti koordinasi yang belum optimal, mutasi yang telah membuat situasi bahwa aparat yang memahami formulasi dan implementasi awal kebijakan ini pindah bagian / dinas, dan pegawai yang baru belum memahami konsep dasar atau spirit kebijakan ini. Disamping itu belum berdirinya BLUD, maka tidak bisa dicairkan dana baru untuk kebijakan PDB Samisake, SDM pelaksana juga masih terbatas.

#### **b. Inovasi Pengembangan Kebijakan PDB Samisake dalam Menyongsong MEA**

PDB Samisake merupakan inovasi kebijakan publik, dimana kebijakan ini apabila terlaksana secara efektif maka tercapai orientasi pada kepentingan publik dan dapat mengerahkan partisipasi masyarakat untuk meraih kesejahteraan dan kemajuan.

Implementasi kebijakan PDB Samisake saat ini masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan. Namun kebijakan ini memiliki peluang besar ekonomi untuk membangun dan mengembangkan fondasi perekonomian masyarakat dan daerah. Sehubungan dengan ini maka diperlukan inovasi-inovasi untuk keberlangsungan kebijakan ini, melalui kreatifitas, profesionalisme, kapabilitas aktor dan pelaksana kebijakan.

Dalam inovasi kebijakan, kreativitas adalah spirit dan *condition sine qua non*. Meski tidak selamanya inovasi lahir dari sebuah pemikiran kreatif, namun mayoritas inovasi adalah wujud konkrit dari kreativitas. Kreativitas pada umumnya mendahului lahirnya inovasi. Dengan demikian inovasi kebijakan memerlukan aktor kunci kebijakan yang fokus pada target dan aparat pelaksana yang kreatif dalam mensiasati perkembangan implementasi kebijakan di lapangan.

Inovasi memiliki *degree of trialability* yang cukup tinggi. Ujicoba kreatifitas sebuah ide /konsep baru bisa dilakukan berali-kali hingga tercapai kondisi ideal. Siklus inovasi biasanya memiliki eksperimen-eksperimen, bahkan sering mengandung proses pematangan, seperti melalui modifikasi, sehingga lebih memberikan manfaat nyata saat diimplementasikan. Namun demikian, Inovasi pada umumnya tidak secara frontal megubah kondisi lama menjadi baru, dimana sistem baru masih memiliki keterkaitan dengan sistem lama.

Inovasi kebijakan untuk pengembangan PDB Samisake perlu menjadikan proses implementasi yang telah dilakukan selama ini sebagai pematangan, dimana formulasi yang cukup kompleks dan perkembangan pelaksanaan selama dua tahun, telah menimbulkan fenomena peluang, tantangan, kendala dan idealnya memberikan gambaran celah-celah solusi serta beragam alternatif pengembangannya. Proses terjadi selama ini selayaknya dapat menghasilkan ide modifikasi dalam pelaksanaan kebijakan agar implementasi berikutnya lebih berhasil dan dapat melakukan akselerasi untuk mencapai sasaran kebijakan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN, sehingga ASEAN merupakan kawasan pasar tunggal dan basis produksi. Maka akan terjadi bahwa barang-barang dan jasa dari berbagai negara di Asean dengan mudah bisa ditemui di Indonesia, demikian pula barang-barang dan jasa milik Indonesia bisa beredar dengan bebas di sepuluh negara Asean, dimana hal ini memberikan peluang dan tantangan bagi Indonesia.

Karakteristik utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yaitu 1). Pasar dan basis produksi tunggal, 2). Kawasan ekonomi yang kompetitif,. 3).Wilayah pembangunan ekonomi yang merata, 4). Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global. ([seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/08](http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/08)).

Langkah-langkah strategis untuk inovasi kebijakan Samisake pada implementasi berikutnya dalam menyongsong MEA :

- Profesionalisme pelaksanaan dalam implementasi sehingga mencapai sasaran secara komprehensif, terutama pengembangan kluster ekonomi yang produktif dan kompetitif.
- Kreatifitas organ pelaksana kebijakan dengan mengembangkan ide-ide untuk mencapai tujuan program, seperti pemantauan dan pembinaan yang tepat terhadap penerima pinjaman bergulir, sehingga penerima betul-betul kuat fondasi ekonominya dan dapat mengembangkan usaha pribadi serta memperkuat perekonomian daerah.
- Senantiasa mengarahkan kebijakan untuk berorientasi pada kepentingan publik dan orientasi ini diinternalisasikan pada semua jajaran yang terlibat kebijakan.

- Penguatan partisipasi masyarakat dan stake holder
- Penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi MEA.

## E. KESIMPULAN

Kebijakan PDB Samisake diimplementasikan sejak tahun 2013 dengan sekali pengucuran dana, telah memberikan manfaat berupa membuka lapangan usaha baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengucuran dana tahap kedua dan pengembangan implementasi berikutnya masih menunggu terbentuknya BLUD, revisi Perda dan kesiapan perangkat implementasi. Implementasi pada tahun ini belum berpengaruh signifikan terhadap kapasitas masyarakat dan daerah dalam menghadapi MEA.

Inovasi kebijakan diperlukan untuk implementasi dan pengembangan kebijakan PDB Samisake berikutnya, agar kebijakan efektif dan bisa memperkuat kapasitas dalam menyongsong MEA. Strategi inovasi yang perlu dilakukan antara lain profesionalisme dan kreatifitas implementor, penguatan partisipasi masyarakat dan stakeholders.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwidjowijoto, Riant Nugroho 2003, *Kebijakan Publik; Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Gramedia, Jakarta
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho 2009, Public Policy, *Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho 2009, *Public Policy, Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Iskandar, Jusman, 2004, *Manajemen Publik*, Bandung, Puspaga
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku tentang Metode-metode Baru*, penerjemah Rohidi, Rohendi, UI-Press, Jakarta
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 8 Tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemda Kota Bengkulu 2013-2018
- Perda Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang PDB Samisake
- Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake;
- Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake
- Peraturan Walikota Bengkulu No. 29/2013 tentang Pembentukan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu
- UPTD PDB Samisake, Perjalanan Samisake
- UPTD PDB Samisake, Laporan Tri Wulan Samisake tahun 2014
- UPTD PDB Samisake, Laporan Tri Wulan Samisake tahun 2015
- Koran Bengkulu Ekspres, 14 November 2013, 8 Desember 2013
- Koran Rakyat Bengkulu, 10 Maret 2012, 19 Oktober 2013, , 24 Oktober 2013
- H.A.R. Tilaar, shvoong.com, teori-teori Implementasi Kebijakan, 12 Juni 2011
- [Http://id.Wordpress.com](http://id.Wordpress.com)
- [www.bengkuluekspres.com](http://www.bengkuluekspres.com), 22 November 2013
- [seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/08](http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/08)



**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL 2015**  
**PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA**  
**MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**  
**( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI**  
**INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**PERAN STRATEGIK MANAJEMEN SUMBERDAYA**  
**MANUSIA DALAM MEMBANGUN KOMPETENSI**  
**INTI DAN KEUNGGULAN BERSAING**  
**DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI**  
**ASEAN 2015**

**Willy Abdillah<sup>1</sup> dan Iqbal Mujtahid<sup>2</sup>**

**ABSTRACT**

*The changing of strategic management paradigm from outside-in approach toward inside-out approach shows the critical role of Strategic Human Resource Management (SHRM) in organisations. Based on Theory of Resources-Based View (RBV), organisation may start the strategy formulation process by using resources and capabilities as starting point to build sustainable competitive advantage and core competence. As a key of organisation success, cultivating core competence become the most important roles of SHRM by managing intellectual capital and innovative capabilities as sources of sustainable competitive advantages. The increasing roles of SHRM were significantly viewed by evolving of HR concepts and practices. The evolving process include restructuring, reengineering of business strategy, people and organisational objectives substantially. This article explains relationship between sustainable competitive advantage and building of core competence which based on intellectual capital and innovative capabilities. Hence, explaining roles and contributions of SHRM as complement approach into formulation strategy process based on Theory of RBV.*

*Keywords: intellectual capital, kompetensi inti dan strategik MSDM.*

---

<sup>1</sup>Penulis adalah Dosen dan Peneliti di Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Bengkulu

<sup>2</sup>Penulis adalah Mahasiswa di Program Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro

## A. PENDAHULUAN

Keunggulan bersaing yang berkesinambungan tergantung pada ketepatan pilihan strategi yang mampu mengeksplorasi sumberdaya dan kapabilitas internal sekaligus mampu merespon peluang dan meminimalisir ancaman pada lingkungan eksternal. Strategi yang efektif lahir sebagai cerminan dari misi yang menjadi alasan kehadiran perusahaan dalam kompetisi (Campbell and Yeung, 1991) dan Visi sebagai wujud karakter dan tujuan jangka panjang perusahaan (Collins and Porras, 1996) yang secara detail dijabarkan dalam perencanaan *strategic intent* (Hamel dan Prahalad, 1989).

Proses penyusunan dan pembentukan strategi dalam perspektif manajemen strategik terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Secara garis besar, pola perkembangan paradigma manajemen strategik dimulai dari pendekatan *outside-in* yang menekankan pada analisa lingkungan eksternal (struktur industri dan persaingan) sebagai titik awal penyusunan strategi bersaing (Porter, 1980). Peningkatan intensitas persaingan dan perubahan lingkungan menyebabkan paradigma penyusunan dan pembentukan strategi berubah dan semakin komprehensif. Pendekatan *outside-in* saja dinilai tidak cukup memenuhi kebutuhan dan tantangan persaingan, karena itu dibutuhkan paradigma alternatif untuk melengkapi analisis formulasi strategi yang menekankan pada kapabilitas internal dan kompetensi perusahaan sebagai titik awal dalam penyusunan dan pembentukan strategi (Paauwe dan Boselie, 2003). Perubahan tersebut menunjukkan peran penting Manajemen Sumberdaya Manusia (MSDM) dalam mengelola sumberdaya internal (*intellectual capital: human capital, social capital* dan *organizational capital*) untuk membangun kompetensi inti organisasi yang berbasis kapabilitas inovasi, dimana manusia (*strategist*) menjadi sumberdaya utama dalam konteks inovasi (Jemison, 1981).

Barney (1995) mengemukakan bahwa rerangka model analisis SWOT dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan mengukur kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Melalui pemahaman yang komprehensif tentang keunggulan bersaing yang berbasis sumberdaya (finansial, fisik, manusia dan aset perusahaan) dan kapabilitas internal yang mampu menciptakan nilai, langka, tidak mudah ditiru, tahan lama, tidak mudah dipindahkan, tidak mudah dikenali dan kesesuaian antara sumberdaya dan kontrol perusahaan (Grant, 1991), perusahaan dapat mengeksplorasi peluang dan meminimalisir ancaman eksternal dan memenangkan persaingan dengan membangun kompetensi inti (Hamel dan Prahalad, 1990).

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan keunggulan bersaing berkesinambungan dengan pembangunan kompetensi inti organisasi yang berbasis pada *intellectual capital* dan kapabilitas inovasi.

Selanjutnya, menjelaskan peran dan kontribusi strategik MSDM (pendekatan *inside-out*) yang berbasis pada teori RBV (*Resource-Based View*) dalam menjelaskan hubungan tersebut dan sebagai kompelemen pendekatan *outside-in* dalam proses formulasi strategi.

Tulisan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu; Pertama, menjelaskan hubungan *intellectual capital* dengan kapabilitas inovasi. Bagian kedua

menjelaskan hubungankapabilitas inovasi dengan keunggulan bersaing yang berkesinambungan dan kompetensi inti. Bagian ketiga menjelaskan peran dan kontribusi strategik MSDM yang berbasis teori RBV dalam formulasi strategi.

## **B. HUBUNGAN INTELLECTUAL CAPITAL DENGAN KAPABILITAS INOVASI**

Hubungan *intellectual capital* dengan kapabilitas inovasi organisasi telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Ahuja (2000); Dougherty (1992); Subramaniam dan Venkatraman (2001); Tsai dan Ghosal (1998), menyatakan bahwa *intellectual capital* sebagai variabel anteseden terhadap inovasi yang diukur sebagai luaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan berperan penting bagi organisasi dalam mengembangkan kapabilitas inovasi. Berbagai pendekatan dilakukan oleh organisasi untuk mengakumulasi pengetahuan sebagai sumber inovasi dengan membedakan dimensi *intellectual capital* ke dalam *human capital*, *social capital* dan *organizational capital*.

Youndt et al. (2004) mengklasifikasikan dimensi *intellectual capital* ke dalam tiga dimensi, yaitu *human capital*, *social capital* dan *organizational capital*. *Humancapital* adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dan melekat pada setiap individu yang membentuk kompetensi. Pengetahuan ini bersifat mudah keluar dan berpindah dari organisasi seiring dengan keluarnya individu tersebut dari organisasi, sehingga human capital sering menjadi alasan perusahaan lain atau profesi *headhunter* “membajak” individu tertentu dari suatu organisasi yang memiliki *human capital* yang tinggi. *Social capital* adalah pengetahuan yang melekat pada nilai dan norma yang tidak tertulis dalam organisasi yang digunakan pada saat interaksi antarindividu dalam organisasi. Pengetahuan ini bersifat fleksibel dan tidak terikat pada aturan tertulis dalam organisasi sehingga mampu berevolusi sesuai dengan perkembangan nilai dan norma yang disepakati bersama dalam organisasi. Pengetahuan ini dapat tumbuh dan berkembang atau bahkan dapat hilang dalam organisasi, tergantung pada kondisi sosial organisasi. *Organizational capital* adalah pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi yang secara formal dilembagakan dalam bentuk paten, manual, sistem, proses dan prosedur standar. Pengetahuan ini merupakan kekayaan dan asset tidak berwujud perusahaan. Namun pengetahuan ini bersifat kaku karena diatur oleh peraturan tertulis dan perkembangannya tergantung pada keinginan dan legitimasi manajer puncak.

Dimensi kapabilitas inovasi dibagi atas kapabilitas inovasi inkremental dan kapabilitas inovasi radikal. Kapabilitas inovasi inkremental adalah kemampuan perusahaan untuk mengembangkan pengetahuan yang ada saat ini sebagai sumber inovasi (Chandy dan Tellis, 2000). Kapabilitas inovasi radikal adalah kemampuan organisasi untuk merubah secara signifikan pengetahuan yang ada saat ini menjadi pengetahuan baru sebagai sumber inovasi.

Penelitian yang menguji pengaruh *intellectual capital* terhadap kapabilitas inovasi dilakukan oleh Subramaniam dan Youndt (2005) terhadap CEO pada 919 perusahaan yang memiliki sistem inovasi dan R&D formal menunjukkan *humancapital* berpengaruh negatif pada kapabilitas inovasi radikal tapi interaksi *social capital* dengan *human capital* signifikan memengaruhi hubungan kausal

*human capital* dan kapabilitas inovasi radikal, bahkan *social capital* selain memperkuat hubungan tersebut, juga merubah sifat hubungan kausal dari negatif menjadi positif. Selain itu, *organizational capital* berpengaruh positif terhadap kapabilitas inovasi inkremental, namun *social capital* tidak memoderasi pengaruh *organizational capital* terhadap kapabilitas inovasi inkremental.

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan individual dapat menurunkan kapabilitas inovasi radikal organisasi. Setiap ide revolusioner yang dimiliki oleh individu justru dapat menurunkan kemampuan inovasi organisasi. Namun ide revolusioner tersebut dapat meningkatkan kemampuan inovasi radikal organisasi jika nilai dan norma sosial menerima hal tersebut. Sementara, pengetahuan yang terinstitusionalisasi dan terformalisasi akan meningkatkan kemampuan pengembangan inovasi saat ini tanpa tergantung pada pengaruh nilai sosial, norma dan nilai yang dipegang oleh individu saat berinteraksi dalam organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, *social capital* dalam konteks ini tidak hanya menjadi variabel yang berpengaruh ganda terhadap dua dimensi kapabilitas inovasi, tetapi juga dapat membangun kapabilitas dinamik yang memungkinkan organisasi secara fleksibel mengembangkan kemampuan inovasinya. *Social capital* memegang peran penting dalam peningkatan kapabilitas inovasi organisasi, baik inkremental atau pun radikal. *Social capital* menjadi variabel moderasi pengaruh *human capital* terhadap kapabilitas inovasi radikal organisasi. Ide-ide revolusioner yang dimiliki individu tidak dapat meningkatkan kemampuan inovasi radikal organisasi, bahkan sebaliknya, kecuali jika nilai dan norma sosial yang ada dalam organisasi menerima dan memfasilitasi ide-ide tersebut melalui pembagian ide dan pengetahuan individual. Hal ini berimplikasi pada praktik MSDM, yaitu praktik penarikan, seleksi, pelatihan, desain pekerjaan dan aktifitas MSDM yang lain tidak hanya fokus pada kemampuan fungsional yang dimiliki oleh masing-masing individual saja namun setiap individu dalam organisasi juga harus memiliki kemampuan kerjasama, kolaborasi dan berbagi informasi dan pengetahuan dengan sesama.

Secara umum, hasil penelitian ini telah memberikan kontribusi pada bidang ilmu MSDM, karena hasil uji hipotesa menunjukkan dukungan terhadap hasil penelitian terdahulu, seperti: *organizational capital* memengaruhi kapabilitas inkremental mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hansen et al., (1999), *social capital* berpengaruh pada kapabilitas inovasi (radikal dan inkremental), mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nonaka (1994) dan Schon (1964). Namun pengaruh langsung *human capital* terhadap kapabilitas inovasi radikal tidak mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nonaka (1994) dan Youndt et al., (2004), hasil penelitian justru menunjukkan *human capital* berpengaruh negatif terhadap kapabilitas inovasi radikal.

### **C. HUBUNGAN KAPABILITAS INOVASI DENGAN KEUNGGULAN BERSAING BERKESINAMBUNGAN DAN KOMPETENSI INTI**

Perspektif kompetensi tradisional dalam konteks kompetensi pekerjaan didefinisikan sebagai karakteristik karyawan (motivasi, keterampilan, kepribadian, peran sosial) yang mampu menghasilkan kinerja efektif dan superior. Perspektif

tradisional melihat karyawan dalam konteks kompetensi pekerjaan sebagai “*workforce*”, sementara dalam perspektif baru kompetensi pekerjaan, karyawandinilai sebagai “*competitive force*”. Hal ini didasarkan bahwa kompetensi yang dimiliki individu sebagai keunggulan bersaing organisasi yang bersifat unik, sulit ditiru, tidak tersedia luas di pasar tenaga kerja.

Pendekatan kompetensi baru menekankan pada *forward-looking* dan pendekatan proaktif dalam implementasi perubahan *strategy-driven*. Dalam konteks perubahan strategi bisnis sebagai akibat perubahan lingkungan, kompetensi dinilai tidak hanya pada tingginya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki karyawan, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, belajar dengan cepat dan komitmen setiap individu untuk terus meningkatkan profesionalisme dan pengembangan diri. Perspektif baru kompetensi memungkinkan organisasi dengan mudah melakukan penyesuaian proses, struktur dan kinerja yang dibutuhkan dalam mengantisipasi perubahan. Sehingga pendekatan kompetensi baru dapat menjadi media komunikasi yang efektif dalam implementasi proses perubahan dalam organisasi. (Vakola et al, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Nonaka (1994), menjadi dasar bagi organisasi memahami konsep membangun dan meningkatkan kompetensi berbasis manajemen pengetahuan. Sanchez dan Heene (1997) menyempurnakan studi tersebut dengan membangun konsep kompetensi sistemik, kognitif, dinamik dan aspek holistik dari kompetensi dengan mempertimbangkan pengaruh faktor dinamika lingkungan dimana perusahaan berkompetisi dan memotret perspektif proses dan konten dalam kompetensi. Penelitian Sanchez dan Heene (1997) memberikan gambaran yang lebih kompleks dalam membangun dan meningkatkan kompetensi organisasi melalui koordinasi (mekanisme dan proses koordinasi), membangun dan memperbaharui pola pikir manajerial dan membangun mekanisme tata kelola perusahaan dalam sistem yang lebih terbuka. Kata kunci dari penelitian ini adalah bahwa untuk berkompetisi dalam lingkungan yang dinamis, organisasi harus membangun kompetensi melalui proses dan konten yang sistemik, kognitif dan dinamik. Hasil dari pembangunan kompetensi tersebut akan menghasilkan inovasi yang akan menjadi keunggulan bersaing organisasi.

Praktik inovasi dapat dibedakan atas beberapa perspektif inovasi; perspektif tradisional, *participation-based innovation* dan *compensation-based innovation* Newton (1998) dalam Hailey (2001). Adapun bentuk implementasi inovasi terdiri atas; inovasi produk, teknologi, proses, organisasi dan praktik MSDM. Terkait dengan proses perubahan, inovasi berkembang melalui beberapa tahapan, yaitu: mempertahankan kompetensi saat ini, kombinasi ulang proses pembelajaran dan inovasi baru dan lama, atau membangun secara kompleks sesuatu inovasi baru yang berbeda melalui serangkaian proses eksperimen (Hailey, 2001). Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif perubahan, pembentukan jalur dan tahapan perubahan membutuhkan waktu untuk mempromosikan inovasi sebagai strategi bagi organisasi yang ingin mendapatkan pembaharuan korporat. Perspektif inovasi dalam organisasi, perilaku dan sikap karyawan sangat dibutuhkan untuk memberdayakan lingkungan bagi penciptaan inovasi. Dalam perspektif MSDM, sentralisasi sistem MSDM memberikan kebaikan bagi proses perubahan dan perubahan dalam konteks penciptaan inovasi



mempromosikan kerjasama dan harmonisasi seluruh sistem dalam organisasi.

Inovasi merupakan syarat dan indikator kemampuan perusahaan untuk tetap berkompetisi dalam pasar bisnis. Kombinasi inovasi nilai dan inovasi teknologi menjadi prasyarat penciptaan nilai bagi pelanggan (Kim and Mauborgne, 1999) dan menjadikan perusahaan tetap berada dalam pasar persaingan yang tidak relevan atau *blue ocean market* (Kim and Mauborgne, 2004). Karena itu, *intellectual capital* (*human capital, social capital* dan *organizational*) menjadi kata kunci untuk menciptakan inovasi dan manusia (*strategist*) menjadi sumberdaya utama dalam konteks inovasi (Jemison, 1981).

Lebih jauh, Hamel dan Prahalad (1990), menyatakan bahwa korporat bertanggung jawab tidak hanya membangun portfolio bisnis (SBU) dan mengalokasikan sumberdaya, tetapi juga bertanggung jawab membangun portfolio kompetensi yang mengacu pada *strategic architecture*. Kompetensi inti sebagai wujud dari proses pembelajaran kolektif atas banyak keterampilan teknis dan penguasaan teknologi, menjadi kunci sukses banyak perusahaan dan korporasi di dunia. Kompetensi inti sebagai akar kekuatan internal perusahaan akan menghasilkan produk inti sebagai pohon output perusahaan yang diikuti oleh banyak produk-produk sebagai pengembangan produk inti. Untuk itu, Hamel dan Prahalad (1990) menyarankan agar korporasi merubah paradigma portfolio SBU menjadi portfolio kompetensi yang mengacu pada *strategic architecture*.

SBU harus merubah paradigma tradisional sebagai sebuah "tirani" yang mengukur kinerja atas dasar kinerja keuangan saja tetapi harus lebih menekankan pada aspek manusia sebagai sumberdaya kritis dan sumber kekuatan untuk membangun kompetensi inti perusahaan.

#### **D. PERAN DAN KONTRIBUSI STRATEGIK MSDM BERBASIS TEORI RBV DALAM FORMULASI STRATEGI**

Dalam perspektif manajemen strategik, pendekatan *outside-in* (Porter, 1980), menggunakan analisa lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) sebagai titik awal menyusun dan membentuk strategi, sehingga strategi lahir sebagai respon perusahaan terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal (Hax, 1990). Sukses kompetisi perusahaan ditentukan oleh implementasi elemen strategi perusahaan (*arena, vehicle, differentiator, staging* dan *economic logic*) yang integratif, koheren dan *unifying* sebagai pusat integrasi dan orientasi faktor eksternal untuk mencapai tujuan (Hambrick dan Frederickson, 2001).

Mintzberg (1985, 1987) menyatakan bahwa strategi sebagai sebuah proses yang secara sadar (*intended strategy*) dilakukan dan dampak pengaruh perubahan lingkungan (*emergent strategy*) membentuk sebuah proses kolektif sehingga dihasilkan strategi nyata (*realized strategy*) yang menjadikan strategi sebagai *plan, ploy, pattern, position* dan *perspective*. Sebagai siklus yang tidak terputus, strategi akan terus diperbaiki melalui *strategic learning*. Karena itu, *strategic fit* menjadi kata kunci dalam proses penyusunan dan pembentukan strategi.

Lebih jauh Mintzberg (1987) menyatakan bahwa konsep *strategic fit* dapat dibangun melalui *crafting strategy*, yaitu menggabungkan fikiran dan tindakan sebagai proses yang integratif dan komplemen dalam menyusun strategi. Peran

manajer dan *planner* menjadi sangat penting dalam formulasi *strategy planning* (Mintzberg, 1994) melalui serangkaian proses berfikir *logical incrementalism* (Quinn, 1978).

Jemison (1981) menyatakan bahwa terdapat dua pandangan utama terhadap konteks strategi, yaitu strategi konten dan strategi proses. Strategi konten menekankan pada jenis strategi yang diformulasi dan dibentuk oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Pada pandangan ini kontribusi utama diberikan oleh bidang ilmu *Industrial Organisation* yang berbasis pada rasionalitas ekonomi, seperti: *Transaction Cost Theory*. Strategi proses menekankan pada bagaimana strategi yang dipilih dapat diimplementasikan. Pada pandangan ini kontribusi diberikan oleh bidang ilmu *Administrative Behavior* yang berbasis pada perilaku manusia dan organisasi, seperti: MSDM dan *Organisational Behavior*.

Berdasarkan hal tersebut terlihat adanya dikotomi peran dan kontribusi pada kedua bidang ilmu tersebut yang mengindikasikan adanya marginalitas peran MSDM dalam manajemen strategik. Peran MSDM hanya terletak pada fungsi-fungsi teknis dan operasional organisasi, sementara peran bidang ilmu yang lain, seperti manajemen keuangan dan ilmu ekonomi berada pada level puncak organisasi dan memegang posisi strategis.

Bertolak belakang dengan pendekatan *outside-in*, perubahan pendekatan *inside-out* menekankan pada kapabilitas internal dan kompetensi perusahaan sebagai titik awal dalam penyusunan dan pembentukan strategi (Paauwe dan Boselie, 2003). Perubahan tersebut didorong oleh perubahan paradigma persaingan global yang menilai pendekatan formulasi dan pembentukan strategi *outside-in* saja tidak cukup mampu memenuhi kebutuhan persaingan. Pendekatan analisa lingkungan struktur industri dan persaingan dengan menggunakan lima kekuatan persaingan (Porter, 1980) hanya mampu menilai kinerja dan daya tarik antar industri, tetapi tidak mampu menilai kinerja antar perusahaan dalam satu industri (Grant, 1991). Pendekatan *outside-in* hanyalah setengah bagian dari analisis SWOT, organisasi perlumelengkapinya dengan melihat ke dalam organisasi untuk membangun keunggulan kompetitif yang berbasis sumberdaya dan kapabilitas internal organisasi (Barney, 1995).

Lebih jauh Grant (1991) menyatakan bahwa formulasi strategi dapat dilakukan melalui pendekatan *inside-out* yang berbasis pada teori RBV, yaitu dengan menggunakan sumberdaya dan kapabilitas sebagai dasar formulasi strategi. Proses formulasi dimulai dengan mengidentifikasi sumberdaya yang dapat menjadi kekuatan bersaing organisasi dibandingkan dengan pesaing dan industri. Sumberdaya yang dapat menjadi sumber kekuatan bersaing organisasi memiliki karakteristik antara lain: mampu menciptakan nilai bagi pelanggan, langka (tidak dimiliki oleh pesaing), tidak mudah ditiru (duplikasi dan substitusi), tidak mudah dipindahkan, tidak mudah diperoleh dan dinilai dalam pasar, tahan lama dan adanya kesesuaian antara sumberdaya dengan mekanisme kontrol organisasi terhadap sumberdaya tersebut. Sumberdaya yang dikelola oleh tim-tim kerja dalam organisasi akan menghasilkan kinerja yang disebut sebagai kapabilitas.

Identifikasi kapabilitas organisasi dapat dilakukan dengan mengukur dan membandingkan dengan kapabilitas pesaing dan industri. Identifikasi input dan kompleksitas kapabilitas menjadi penting dilakukan untuk mengidentifikasi

keunggulan bersaing organisasi yang berkesinambungan dan mengukur kemampuan sumberdaya menghasilkan *return* bagi organisasi. Kapabilitas akan menciptakan keunggulan bersaing jika sumberdaya dan kapabilitas memiliki keunikan dan memberikan manfaat bagi pelanggan. Keunggulan bersaing yang unik, langka dan tidak mudah ditiru tersebut jika mampu menciptakan akses pasar akan melahirkan kompetensi inti organisasi.

Permasalahan utama yang penting diperhatikan dalam formulasi strategi yang berbasis pada teori RBV adalah bagaimana memilih strategi (konten strategi) yang mampu mengeksplorasi sumberdaya dan kapabilitas sebagai keunggulan bersaing organisasi dan mengevaluasi gap sumberdaya jika implementasi strategi belum memenuhi tujuan organisasi secara optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa melalui pendekatan *inside-out* yang berbasis pada teori RBV, organisasi dapat melakukan formulasi strategi dengan menjadikan sumberdaya dan kapabilitas sebagai titik awal proses formulasi strategi. Hal ini mengindikasikan kesamaan peran dan kontribusi strategis MSDM dalam manajemen strategik.

Namun, harus disadari bahwa pendekatan *inside-out* tidak dapat menggantikan sepenuhnya pendekatan *outside-in*, pendekatan *inside-out* sebaiknya menjadi komplemen pendekatan *outside-in*. Sejalan dengan pendapat Teng dan Cummings (2002) bahwa implementasi teori RBV yang berbasis sumberdaya dan kapabilitas sering menghadapi *trade-off*. Hal ini disebabkan karena RBV sebagai petunjuk dalam formulasi strategi, mengarahkan fokus organisasi secara sempit pada sumberdaya dan kapabilitas individual tanpa memperhatikan interaksi antar berbagai sumberdaya dan kapabilitas potensial organisasi lainnya. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa beberapa asumsi dan kriteria dalam teori RBV tidak dapat diimplementasi bahkan menimbulkan *trade-off* dalam situasi tertentu. *Trade-off* tersebut antara lain adalah internal *trade-off* (*trade-off* hubungan dan pembelajaran) dan eksternal *trade-off* (*trade-off* jejaring, imitasi dan seleksi). Untuk itu, sebaiknya sinergi kedua pendekatan *outside-in* dan *inside-out* dan fleksibilitas organisasi menganalisis situasi dan kondisi lingkungan persaingan dapat menjadi petunjuk yang komprehensif bagi formulasi strategi organisasi.

Terlepas dari *trade-off* dalam implementasi teori RBV, perubahan paradigma manajemen strategik ke arah pendekatan *inside-out* menunjukkan peran dan kontribusi strategis MSDM. Perspektif tradisional manajemen personalia yang cenderung pada fungsi operasional dan fungsional beralih pada peran MSDM yang semakin luas dan mengarah pada peran strategik. Perubahan-perubahan tersebut tidak hanya sekedar pergantian istilah dan nama departemen, tetapi secara substansial merubah struktur, proses dan orang-orang dan tujuan organisasi (Morley et al., 2006).

Peran utama MSDM dalam manajemen strategik terlihat pada munculnya konsep-konsep baru yang mencoba menjembatani gap dan ambiguitas peran MSDM. Salah satu konsep yang menjadi *cornerstone* dalam MSDM adalah teori RBV. Menurut Grant (1991) RBV memungkinkan organisasi memiliki alternatif pendekatan formulasi strategi dengan berbasis sumberdaya dan kapabilitas yang mampu menciptakan keunggulan bersaing berkesinambungan dan kompetensi inti

organisasi. RBV memungkinkan organisasi memiliki keunikan keunggulan organisasi yang bernilai, tidak mudah ditiru, langka, dan tidak mudah ditiru dengan menciptakan ambiguitas sistem dan kompleksitas sosial sumberdaya dan kapabilitas. Namun, konsep dalam teori RBV sulit untuk diimplementasi untuk kondisi tersebut, ketika semua organisasi mengadopsi konsep yang sama (*best practice*). Peran MSDM dalam setiap organisasi menjadi penting untuk menciptakan mekanisme dan sistem yang unik dalam mengadopsi konsep dalam teori RBV yang sesuai dengan konteks sosial-budaya dan institusional masing-masing organisasi (*best fit*).

Usaha untuk menciptakan keunikan dalam adopsi teori RBV terus dilakukan oleh banyak peneliti dan praktisi di bidang MSDM. DiMaggio dan Powell (1983) dalam (Paauwe dan Boselie, 2003) mengemukakan konsep *New Institutionalism*, yaitu sebuah pendekatan fungsionalis kontingensi yang menjembatani gap antara pendekatan *best practice* dan *best fit* dalam adopsi konsep RBV dan menjembatani kedua paradigma formulasi strategi (*inside-out* dan *outside-in*). Konsep *newinstitutionalism* terdiri atas dua pendekatan, yaitu *competitive isomorphism* yang menekankan pada rasionalitas ekonomi dan kriteria keefektifan dan efisiensi serta pendekatan *institutional isomorphism* yang menekankan rasionalitas normatif dan proses pembuatan keputusan. Pendekatan *competitive isomorphism* menggunakan indikator-indikator kuantitatif dan asumsi ekonomi yang bersifat *best practice*, sehingga mudah untuk ditiru dan diadopsi oleh organisasi apapun, sementara esensi RBV adalah menjadikan organisasi memiliki keunggulan bersaing yang unik dan tidak mudah ditiru oleh pesaing. Sebaliknya, pendekatan *institutional isomorphism* lebih menekankan pada bagaimana menciptakan mekanisme dan sistem organisasi yang kompleks dan ambigu sehingga tidak mudah ditiru oleh pesaing, seperti bagaimana mekanisme pembuatan keputusan dalam organisasi.

Tiga mekanisme *institutional isomorphism* yang memengaruhi pembuatan keputusan dalam organisasi yang diajukan oleh DiMaggio dan Powell (1983) dalam (Paauwe dan Boselie, 2003) adalah:

- Mekanisme *coercive*, yaitu pembuatan keputusan yang menggunakan pendekatan legitimasi dan politik, seperti peraturan pemerintah.
- Mekanisme *mimetic*, yaitu pendekatan pembuatan keputusan dengan mengadopsi dan meniru praktik dan strategi yang dilakukan oleh pesaing atau standar industri.
- Mekanisme *normative*, yaitu pendekatan pembuatan keputusan yang menggunakan latar belakang pendidikan, pengalaman dan identitas profesionalisme lainnya.

Jadi, melalui pendekatan *institutional isomorphism* memungkinkan organisasi dapat menggunakan pendekatan *inside-out* yang berbasis teori RBV dengan menjadikan sumberdaya dan kapabilitas sebagai titik awal proses formulasi strategi yang berbasis keunggulan bersaing yang berkesinambungan dan kompetensi inti dimana pada saat yang sama organisasi mampu menciptakan mekanisme implementasi strategi yang tidak mudah ditiru dan diadopsi oleh pesaing dengan membangun mekanisme kompleksitas sosial dan ambiguitas sistem dalam organisasi (*best fit*). Perubahan paradigma dan konsep strategik

MSDM ini tidak hanya mendorong perubahan dalam praktik MSDM, mulai dari fungsi perencanaan SDM, proses penarikan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen karir, penilaian kinerja dan kompensasi, tetapi juga merubah struktur dan sistem yang ada dalam organisasi. Perubahan yang terjadi dapat berupa restrukturisasi, rekayasa ulang proses bisnis dan/atau transformasi. Pilihan pola perubahan tergantung sejauhmana organisasi melihat kebutuhan untuk menyesuaikan struktur dan sistem organisasi terhadap perubahan lingkungan.

## E. SIMPULAN

Perubahan paradigma manajemen strategik *outside-in approach* menuju *inside-out approach* menunjukkan bahwa peran Strategik MSDM dalam organisasi semakin kritis. Melalui pendekatan *inside-out* yang berbasis teori RBV, organisasi dapat melakukan proses formulasi strategi dengan menjadikan sumberdaya dan kapabilitas internal sebagai titik awal untuk membangun keunggulan bersaing yang berkesinambungan dan kompetensi inti organisasi.

Keunggulan bersaing organisasi yang berkesinambungan akan terwujud jika sumberdaya organisasi mampu menciptakan nilai bagi pelanggan, langka, tidak mudah ditiru, tidak mudah berpindah, tahan lama dan dikelola melalui proses kontrol yang baik oleh organisasi dan tim kerja untuk menciptakan kinerja yang disebut kapabilitas organisasi. Kapabilitas yang unik dibandingkan oleh pesaing dan industri akan menghasilkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Keunggulan bersaing yang mampu menciptakan akses pasar bagi organisasi akan menciptakan kompetensi inti organisasi. Melalui penciptaan *strategic architecture* oleh korporat, organisasi dapat membangun portfolio kompetensi yang akan menghasilkan produk inti organisasi.

Kompetensi inti sebagai kunci utama keberhasilan organisasi, akan terwujud jika peran Strategik MSDM dalam mengelola *intellectual capital* dan kapabilitas inovasi sebagai sumber kekuatan bersaing organisasi. Peran MSDM ditunjukkan dengan adanya perubahan signifikan dalam konsep dan praktik MSDM dalam organisasi. Perubahan tersebut tidak hanya sekedar pergantian istilah dan nama departemen, tetapi secara substansial merubah struktur, proses, orang dan tujuan organisasi. Pola perubahan dapat berupa restrukturisasi, rekayasa ulang proses bisnis dan/atau transformasi, tergantung sejauhmana organisasi melihat kebutuhan untuk menyesuaikan struktur dan sistem organisasi terhadap perubahan lingkungan.\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahuja, G. (2000) Collaborative networks, structural holes and innovation: a longitudinal study. *Administrative Science Quarterly*, Vol. 45, pp. 425-455.
- Barney, J.B. (1995) Looking inside for competitive advantage. *Academy of Management Executive*, Vol. 9, No. 4.
- Campbell, A. and Yeung, S. (1991) Creating a sense of mission. *Long Range Planning*.
- Collins, J.C. and Porras, J.I. (1996) Building your company's vision. *Harvard Business Review*.

- Chandy, R.K., and Tellis, G.J. (2000) The incumbent's curse? Incumbency, size and radical product innovation. *Journal of Marketing*, Vol. 64, No. 3, pp. 1-17.
- Dougherty, D. (1992) Interpretive barriers to successful product innovation in large firms. *Organization Science*. Vol. 3, pp. 179-203.
- Grant, R.M. (1991) The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation. *California Management Review*.
- Hailey, V.H. (2001) Breaking the mould? Innovation as a strategy for corporate renewal. *International Journal of Human Resource Management*, Vol. 12, No. 7, pp. 1126-1140.
- Hambrick, C.D. and Frederickson, W.J. (2001) Are you sure you have a strategy?. *Academy of Management Executive*, Vol. 15, No. 4.
- Hamel, G and Prahalad, C.K. (1989) Strategic intent. *Harvard Business Review*.
- Hamel, G and Prahalad, C.K. (1990) The kompetensi inti. *Harvard Business Review*.
- Hansen, M.T., Nohria, N., and Tierney, T. (1999) What's your strategy for managing knowledge? *Harvard Business Review*. Vol. 77, No. 2, pp. 106-116.
- Hax, A. (1990) Defining the concept of strategy. *Planning Review*, 1990.
- Jemison, D. B. (1981) The contribution of administrative behavior to strategic management. *Academy of Management Review*, Vol. 6, No. 4, pp. 633-642.
- Kim, W.C. and Mauborgne, R. (1999) Strategy, value innovation, and the knowledge economy. *Sloan Management Review*, Fall.
- Kim, W.C. and Mauborgne, R. (2004) Blue ocean strategy. *Harvard Business Review*.
- Mintzberg, H. and Waters, J.A. (1985) Of strategy, deliberate and emergent. *Strategic Management Journal*, Vol. 6, pp. 257-272.
- Mintzberg, H. (1987) Five Ps for strategy. *California Management Review*, Fall.
- Mintzberg, H. (1987) Crafting strategy. *Harvard Business Review*, Vol. 65, No. 4, pp. 66-77.
- Morley, M.J., Gunnigle, P. and O'Sullivan, M. (2006) New directions in the roles and responsibilities of the MSDM function. *Personel Review*, Vol. 35, No. 6, pp. 600-617.
- Nonaka, I. (1994) A dynamic theory of organizational knowledge creation. *Organisation Science*, Vol. 5, pp. 14-37.
- Paauwe, J. and Boselie, P. (2003) Challenging 'strategic MSDM' and the relevance of the institutional setting. *Human Resource Management Journal*, Vol. 13, No. 3, pp. 56-70.
- Porter, M.E. (1980) *Competitive Strategy*. NY: Macmillan Inc.
- Porter, M.E. (1980) How competitive force shape strategy. *Harvard Business Review*.
- Quinn, J. (1978) Logical incrementalism. *Sloan Management Review*. Fall.
- Sanchez, R. and Heene, A. (1997) Competence-based strategic management: concepts and issues for theory research and practice. *John Wiley & Sons Ltd*.
- Schon, D.A. (1963) Champions for radical new inventions. *Harvard Business Review*, Vol. 41, No. 2, pp. 77-86.
- Schultz, T.W. (1961) Investment in human capital. *American Economic Review*, Vol. 51, pp. 1-17.
- Subramaniam, M. and Youndt, M.A. (2005) The influence of *intellectual capital* on the types of innovative capabilities, *Academy of Management Journal*, Vol. 48, No.3, pp. 450-463.
- Teng, B. and Cummings, J.L. (2002) Trade-off in managing resources and capabilities. *Academy of Management Executive*, Vol. 16, No. 2.
- Tsai, W. and Ghosal, S. (1998) Social capital and value creation: the role of intrafirm networks. *Academy of Management Journal*, Vol. 41, pp. 464-478.
- Vakola, M., Soderquist, K.E. and Practacos, G.P. (2007) Competency management in support of organizational change. *International Journal of Manpower*, Vol. 28, No. 3, pp. 260-275.
- Youndt, M.A., Subramaniam, M., and Snell, S.A. (2004) *Intellectual capital* profiles: an examination of investment and returns. *Journal of Management Studies*, Vol. 41, pp. 335-362.



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**ANALISIS PROSES BISNIS *E-COMMERCE* DI  
INDONESIA SEBAGAI PERSIAPAN IMPLEMENTASI  
MEA**

**Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini menganalisis proses bisnis e-commerce sebagai persiapan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015. E-commerce merupakan salah satu strategi MEA untuk mewujudkan kawasan dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dengan strategi ini, bisnis e-commerce diperkirakan akan tumbuh signifikan di ASEAN. Kompleksitas proses bisnis e-commerce menimbulkan perbedaan pandangan dalam penginterpretasian aspek perpajakan pada bisnis e-commerce tersebut. Pada penelitian ini, telah dianalisis proses bisnis salah satu perusahaan transportasi di Indonesia yang dijalankan secara on line dimana ditemukan potensi penerimaan PPN atas bisnis tersebut. Oleh karena itu, untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan bisnis e-commerce seiring dengan semakin tumbuhnya bisnis ini setelah implementasi MEA, diperlukan kebijakan dan regulasi yang dapat dengan mudah menginterpretasikan proses bisnis e-commerce.*

*Kata Kunci: e-commerce, MEA, pajak, ASEAN*

**1. PENDAHULUAN**

Globalisasi menjadikan dunia tanpa batas ruang dan waktu. Di sisi ekonomi, globalisasi mendorong setiap negara berupaya menghilangkan batas-batas negara sehingga setiap penduduk dapat melakukan transaksi perdagangan dengan penduduk negara lain dengan mudah dan cepat. Dalam rangka persiapan menghadapi globalisasi, negara-negara ASEAN sepakat membentuk sebuah kawasan yang

terintegrasi atau disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini dimaksudkan agar ASEAN menjadi sebuah kekuatan ekonomi besar dunia.

MEA merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan ASEAN *vision 2020*. Pada tahun 2020, ASEAN akan bertransformasi menjadi sebuah kawasan yang terjaga stabilitasnya, maju, dan memiliki daya saing yang tinggi dengan perkembangan ekonomi merata serta menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Untuk itu, strategi MEA didukung oleh empat inisiatif utama yaitu pembentukan kesatuan pasar dan basis produksi ASEAN, kawasan dengan tingkat kompetisi tinggi, kawasan dengan pertumbuhan ekonomi merata dan kawasan yang terintegasi secara penuh dengan perekonomian global.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi global, metode dalam melakukan transaksi perdagangan mulai mengalami pergeseran. Dahulunya pembeli datang langsung ke toko penjual untuk membeli barang yang mereka inginkan. Namun, saat ini perkembangan teknologi memungkinkan pembeli melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertemu langsung dengan penjual dengan menggunakan fasilitas internet. Transaksi perdagangan seperti ini disebut dengan *e-commerce*. Salah satu contoh dampak perkembangan *e-commerce* adalah konsumen lagu-lagu Utada Hikaru yang terjual secara digital pada tahun 2007 sejumlah 7,2 juta unit, sedangkan bantuk CD hanya terjual 600 ribu unit. Di Indonesia sendiri, transaksi *e-commerce* mengalami pertumbuhan yang signifikan. Menteri Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa pada tahun 2014 yang lalu jumlah transaksi *e-commerce* mencapai USD 12 miliar. Angka ini akan terus tumbuh dengan proyeksi jumlah transaksi mencapai USD 20 miliar pada tahun 2015.

Dengan adanya MEA, pasar bisnis *e-commerce* diperkirakan akan tumbuh signifikan. Dalam inisiatif pembentukan kawasan dengan tingkat kompetisi yang tinggi terdapat strategi yang khusus dimaksudkan untuk *e-commerce*. Pada strategi tersebut terdapat beberapa tindakan diantaranya penyusunan aturan dan infrastruktur untuk mendukung transaksi *on-line* di kawasan ASEAN. Strategi ini juga didukung dengan penerapan e-ASEAN yang bertujuan mengurangi kesenjangan perkembangan teknologi informasi di kawasan ASEAN.

Di sisi lain, perkembangan *e-commerce* menimbulkan risiko dalam pengawasan perpajakan. Pada prinsipnya, dari sisi perpajakan, perlakuan untuk transaksi *e-commerce* tidak berbeda dengan transaksi konvensional. Namun, transaksi yang dilakukan secara *on line* menyebabkan otoritas perpajakan kesulitan untuk menelusuri transaksi yang dilakukan oleh pelaku *e-commerce*. Contohnya, *Go Jek*, salah satu perusahaan transportasi di Indonesia. Proses bisnis perusahaan ini cukup kompleks karena sulit ditentukan apakah perusahaan ini menjalankan bisnis sebagai perantara atau sebagai pihak yang secara langsung melakukan penyerahan jasa transportasi. Apabila MEA diimplementasikan, pengawasan perpajakan transaksi *e-commerce* akan lebih menantang karena transaksi dilakukan lintas negara sehingga negara asal barang tidak dapat ditentukan dengan mudah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses bisnis *e-commerce* di Indonesia sehingga dapat diketahui aspek perpajakan dari proses bisnis tersebut.



## 2. TINJAUAN LITERATUR

### *E-commerce*

*E-commerce* merupakan singkatan dari *electronic commerce* yang artinya adalah suatu transaksi jual beli dengan menggunakan fasilitas internet sebagai media komunikasi (Sakti, 2014). Bisnis *e-commerce* dapat dikategorikan menjadi *Business to Business* (B2B), *Business to Customer* (B2C), dan *Customer to Customer* (C2C). Adapun B2B merupakan perdagangan elektronik yang dilakukan oleh dua perusahaan, B2C dilakukan antara perusahaan dengan perorangan, dan C2C dilakukan antar perorangan.

Menurut Sakti (2014), dari aspek perpajakan, terdapat beberapa masalah yang muncul dari *e-commerce*. Dari sisi Pajak Pertambahan Nilai, transaksi *e-commerce* dapat menembus batas negara dan tidak terlihat transaksinya sehingga sulit untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sementara itu, dari sisi Pajak Penghasilan, untuk subjek pajak luar negeri seharusnya memiliki BUT di Indonesia sehingga atas BUT tersebut dapat dikenakan pajak seperti Wajib Pajak Dalam Negeri. Namun, dengan *e-commerce*, perusahaan di luar negeri dapat tidak mendirikan BUT di Indonesia sehingga kewajiban Pajak Penghasilan atas perusahaan tersebut sulit diawasi.

Dalam sebuah kajian OECD yang dirilis dalam bentuk *working paper* tahun 2012, dinyatakan bahwa terdapat tiga masalah utama dari *e-commerce* yaitu penentuan tempat konsumsi dalam rangka pengumpulan pajak tidak langsung, pengkategorian penghasilan dari *e-commerce*, dan cara memeriksa transaksi internet dan bagaimana mendorong kepatuhannya.

### **Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan perwujudan dari visi ASEAN 2020 dan sebagai realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi kawasan ASEAN. Dalam perwujudan MEA, negara-negara ASEAN harus menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, inklusif, dan menjadi penggerak ekonomi secara konsisten menerapkan aturan-aturan hubungan multilateral dan kepatuhan terhadap komitmen ekonomi yang telah ditetapkan (Cetak Biru MEA, 2015). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, MEA memiliki empat inisiatif utama seperti diilustrasikan pada gambar 1.

Khusus untuk strategi terkait *e-commerce*, pada cetak biru MEA terdapat beberapa tindakan untuk mewujudkan strategi ini, yaitu:

- a. Mengadopsi *best practice* penerapan kebijakan yang mengatur kompetisi di sektor telekomunikasi dan mendorong persiapan ketentuan *e-commerce* untuk domestik.
- b. Mengharmonisasi infrastruktur resmi untuk melakukan kontrak secara elektronik beserta penyelesaian permasalahan.
- c. Mengembangkan *mutual recognition framework* untuk tandatangan digital.

- d. Mendorong penerapan *best practice* dan pedoman dalam penyusunan aturan dan standar.
- e. Membangun jaringan bisnis *e-commerce* di kawasan ASEAN.

Gambar 1. Ilustrasi Inisiatif MEA

<p><b>1. Kesatuan pasar dan basis produksi ASEAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembebasan arus masuk barang</li> <li>b. Pembebasan arus masuk jasa</li> <li>c. Pembebasan arus investasi</li> <li>d. Pembebasan arus modal</li> <li>e. Pembebasan arus tenaga kerja terampil</li> </ol>	<p><b>2. Kawasan dengan tingkat kompetisi tinggi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan untuk mengatur kompetisi</li> <li>b. Perlindungan konsumen</li> <li>c. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</li> <li>d. Pengembangan infrastruktur</li> <li>e. Perpajakan</li> <li>f. E-commerce</li> </ol>
<p><b>3. Kawasan dengan pertumbuhan ekonomi merata</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan UKM</li> <li>b. Integrasi ASEAN</li> </ol>	<p><b>4. Kawasan yang terintegasi secara penuh dengan perekonomian global</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendekatan yang koheren dengan relasi ekonomi eksternal</li> <li>b. Meningkatkan partisipasi dalam jaringan global</li> </ol>

### Aturan Perpajakan yang Mengatur *E-Commerce*

Di Indonesia, tidak terdapat aturan khusus yang mengatur tentang aspek perpajakan transaksi *e-commerce*. Pada prinsipnya, *e-commerce* hanya merupakan cara melakukan transaksi, sedangkan objek dan subjek pajaknya sama dengan transaksi konvensional. Namun demikian, pada tahun 2013, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-commerce. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keseragaman dalam memahami aspek perpajakan atas transaksi *e-commerce* yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari transaksi *e-commerce* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, bisnis *e-commerce* dibagi menjadi empat kelompok yaitu, *online market place* yang dapat dikatakan sebagai mal internet yang menyediakan tempat usaha *online* bagi penjual barang dan jasa, *classified ads* menyediakan tempat dan waktu untuk pemasangan iklan pada situs yang disediakan, *daily deals* melakukan penjualan barang dan jasa kepada pembeli dengan menggunakan *voucher*, dan *online retail* yang menjual barang dan jasa melalui situs *online* yang dikelolanya sendiri.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, wawancara, dan analisis data kuantitatif. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan informasi yang diperoleh dari internet. Dalam penelitian ini, bisnis

transportasi *Go Jek* dijadikan sebagai sampel penelitian. Namun, PT. Gojek Indonesia selaku pemilik merek *Go Jek* tidak mempublikasikan informasi terkait proses bisnis perusahaan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui proses bisnis *Go Jek* dilakukan dengan cara wawancara terhadap salah satu *official* dari lini bisnis *Go Jek* dan dengan beberapa *driver gojek*.

Berdasarkan hasil wawancara dan beberapa asumsi, penulis menyusun proses bisnis *Go Jek* yang digunakan sebagai dasar analisis aspek perpajakan dari bisnis tersebut. Di samping itu, analisis kuantitatif juga dilakukan dalam proporsi yang tidak terlalu signifikan, yaitu hanya untuk melakukan estimasi basis pajak dari bisnis *Go Jek* tersebut.

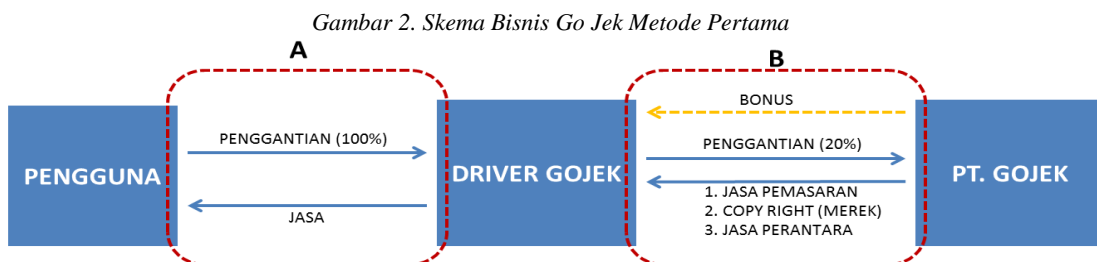
#### 4. HASIL PENELITIAN

*Go Jek* merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang mulai didirikan sejak tahun 2011. Dengan menggunakan motto “*an ojek for every need*”, perusahaan ini mampu mengubah perspektif masyarakat yang menganggap pekerjaan tukang ojek sebagai sampingan berubah menjadi pekerjaan yang cukup menjanjikan. Saat ini, berdasarkan hasil wawancara, telah hampir 120.000 tukang ojek bergabung dengan *Go Jek*. Apabila setiap bulan penghasilan *driver gojek* diperkirakan mencapai Rp 4 juta, maka total penghasilan *driver gojek* di seluruh Indonesia sekitar Rp 480 miliar per-bulan.

PT Gojek Indonesia menerapkan aturan bagi hasil untuk *driver gojek* yaitu dengan perbandingan 80:20, dimana 80% dari penghasilan *driver gojek* merupakan milik *driver gojek* sedangkan sisanya 20% menjadi milik PT. Gojek Indonesia. Berdasarkan aturan bagi hasil ini, maka potensi dasar pengenaan PPh 21 atas *driver gojek* adalah sekitar Rp 384 miliar per-bulan. Dalam hal ini, PT. Gojek Indonesia tidak memungut PPh 21 karena berpendapat bahwa *driver gojek* bukan merupakan karyawan PT. Gojek Indonesia, melainkan sebagai mitra bisnis PT. Gojek Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat digambarkan proses bisnis *Go Jek* sebagai berikut:

##### a. Metode Pertama (Pengguna membayar langsung kepada *driver gojek*)



(sumber: hasil wawancara, diolah)

Metode pertama dapat dibagi menjadi dua transaksi yaitu transaksi A dan B. Pada transaksi A, antara pengguna dengan *driver gojek*, terdapat penyerahan jasa

angkutan umum. Dalam Pasal 4 UU PPN, jasa angkutan merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Namun demikian, ketentuan ini dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 yang mengatur tentang jasa angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenakan PPN. Secara tegas disebutkan pada peraturan tersebut bahwa angkutan umum di darat tidak dikenakan PPN apabila angkutan tersebut menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam.

Sampai dengan saat ini, kendaraan yang digunakan oleh *driver gojek* tidak ada yang menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam. Dengan demikian, berdasarkan UU PPN, jasa angkutan umum yang diserahkan oleh *driver gojek* merupakan jasa kena pajak. Dari sisi subjek, pada metode ini, penyerahan jasa dilakukan dari *driver gojek* yang bukan merupakan pengusaha kena pajak sehingga atas penyerahan ini tidak dapat dikenakan PPN.

Pada transaksi B terjadi penyerahan uang atau penggantian dari *driver gojek* kepada PT. Gojek Indonesia. Uang yang diserahkan sejumlah 20% dari yang diterima dari pengguna. Uang tersebut dimaksudkan untuk membayar jasa pemasaran, jasa perantara, jasa promosi, atau *fee* untuk penggunaan aplikasi dan merek. Penyerahan atas jasa tersebut merupakan objek PPN. Dari sisi subjek, berdasarkan analisis perkiraan omset *Go Jek*, PT. Gojek Indonesia diperkirakan memiliki omset di atas Rp 4,8 miliar setahun sehingga wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, atas jasa yang diserahkan oleh PT. Gojek Indonesia kepada *driver gojek* harus dikenakan PPN.

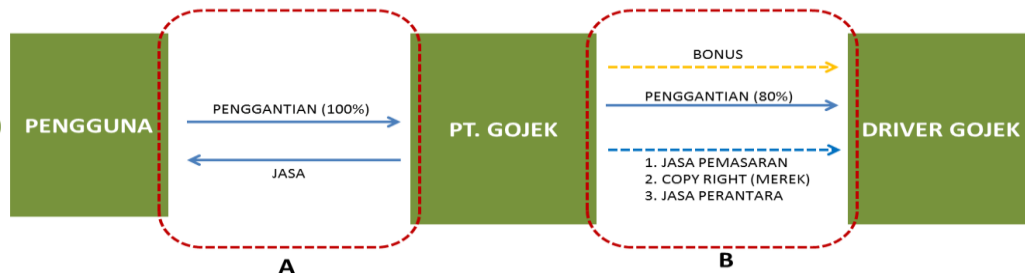
Selain itu, jasa yang diberikan oleh PT. Gojek Indonesia kepada *driver gojek* juga merupakan jasa yang merupakan objek PPh Pasal 23. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Angka 2 UU PPh, jasa manajemen dan jasa perantara termasuk dalam kategori jasa dan jasa lain yang dikenakan PPh 23. Pada prinsipnya, PPh 23 dipotong oleh pihak yang melakukan pembayaran. Namun, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU PPh, subjek pajak orang pribadi dalam negeri tidak termasuk sebagai pemotong PPh 23. Oleh karena itu, jasa yang diberikan oleh PT. Gojek Indonesia kepada *driver gojek* tidak dapat dipotong PPh 23 oleh *driver gojek*.

Pada transaksi B juga terdapat potensi penerimaan pajak yang berasal dari pemberian bonus oleh PT. Gojek Indonesia kepada *driver gojek*. Berdasarkan Pasal 3 huruf c angka 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, *driver gojek* dapat dikategorikan sebagai Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa yang dilakukan oleh pemberi jasa dalam segala bidang. Dari sisi objek, bonus yang diberikan oleh PT. Gojek Indonesia termasuk dalam kategori Pasal 5 ayat (1) huruf e yaitu imbalan kepada bukan pegawai dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan. Di sini jelas bahwa PT. Gojek Indonesia hanya memberikan

bonus kepada *driver gojek* sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh *driver gojek*. Oleh karena itu, bonus yang diberikan kepada *driver gojek* harus dipotong PPh 21 oleh PT. Gojek Indonesia.

**b. Metode Kedua (Pengguna membayar langsung ke PT. Gojek Indonesia)**

Gambar 3. Skema Bisnis Gojek Metode Kedua



(sumber: hasil wawancara, diolah)

Sama halnya dengan Metode Pertama, apabila dianalisis dari aspek perpajakan, Metode Kedua di atas dapat dibagi menjadi dua transaksi. Pada transaksi A, pengguna gojek membeli jasa dari PT. Gojek Indonesia melalui pengisian deposit. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, jasa gojek merupakan jasa yang dikenakan PPN. Dengan memperhatikan omset yang dikumpulkan oleh PT. Gojek Indonesia, atas perusahaan tersebut harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan skema ini, pada transaksi A, seluruh penggantian yang dibayarkan oleh pengguna gojek dapat dikenakan PPN.

Pada transaksi B, PT. Gojek Indonesia membagi pembayaran yang dilakukan oleh pengguna gojek sebesar 80% dari pembayaran tersebut kepada *driver gojek*. Dalam hal ini, *driver gojek* memenuhi kriteria sebagai Bukan Pegawai yang memperoleh penghasilan atas jasa yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, PT. Gojek Indonesia, sebagai pemberi penghasilan, harus melakukan pemungutan PPh 21 atas bagi hasil yang diberikan kepada *driver gojek*. Selain itu, sama halnya dengan Metode Pertama, atas bonus yang diberikan oleh PT. Gojek Indonesia kepada *driver gojek* juga merupakan objek PPh 21 yang harus dipungut oleh PT. Gojek Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, pada tabel di bawah ini ditampilkan perbandingan aspek perpajakan dari kedua metode di atas:

Tabel 1. Perbandingan Aspek Perpajakan Proses Bisnis Gojek

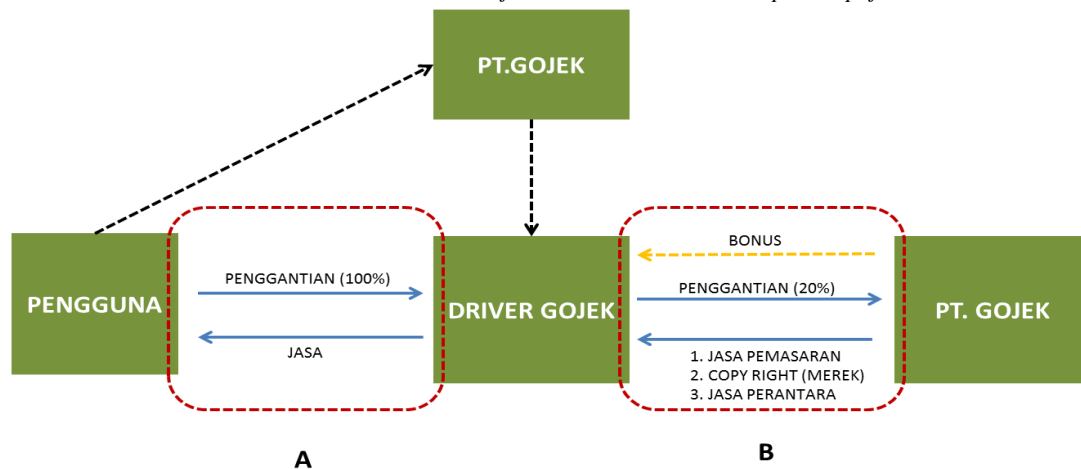
Indikator	Metode Pertama	Metode Kedua
Kategori usaha PT. Gojek	Online Market Place	Online Retail
Penerimaan PPN	20% dari penggantian	100% dari penggantian
Penerimaan PPh 21	Hanya dari bonus	- Dari bagi hasil sebesar 80% dari penggantian - Dari bonus
Penerimaan PPh OP	Dari bagi hasil sebesar 80% dari penggantian	Tidak ada
Penerimaan PPh Badan	Dari keuntungan perusahaan	Dari keuntungan perusahaan

## Pembahasan Proses Bisnis berdasarkan Aspek Perpajakan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PT. Gojek Indonesia menganggap *driver gojek* sebagai mitra bisnis, bukan sebagai pegawai PT. Gojek Indonesia. Dengan adanya keterbatasan informasi yang diperoleh, maka diasumsikan pada penelitian ini *driver gojek* merupakan mitra bisnis dari PT. Gojek Indonesia.

Dengan sistem seperti ini, PT. Gojek Indonesia berperan sebagai perantara antara *driver gojek* dengan penumpang. Berdasarkan SE-62/PJ/2013, PT. Gojek Indonesia dapat dikategorikan sebagai *online market place*. Adapun proses bisnis dan aspek perpajakan pada bisnis *gojek* ini adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Proses Bisnis Gojek Berdasarkan Analisis Aspek Perpajakan



(Sumber: diolah dari berbagai sumber)

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan beberapa hal:

- Pada transaksi A, pada prinsipnya pengguna memesan layanan *gojek* melalui aplikasi yang disediakan oleh PT. Gojek Indonesia. Sementara itu, pengguna dapat melakukan pembayaran melalui PT. Gojek Indonesia atau langsung kepada *driver gojek*. Dalam hal ini, PT. Gojek Indonesia hanya perantara, sedangkan transaksi yang sebenarnya adalah antara penumpang dengan *driver gojek*.
- Atas transaksi A, terjadi penyerahan jasa dari *driver gojek* kepada penumpang. Dalam hal ini, jasa tersebut merupakan jasa kena pajak. Namun, *driver gojek* bukan Pengusaha Kena Pajak sehingga atas jasa tersebut tidak dapat dipungut PPN.
- Pada transaksi B, terjadi pembayaran dari *driver gojek* kepada PT. Gojek Indonesia sebesar 20%. Pembayaran ini dilakukan atas penyerahan jasa manajemen, jasa perantara, jasa pemasaran, ataupun *fee* untuk penggunaan merek dari PT. Gojek Indonesia kepada *driver gojek*. Penyerahan ini merupakan penyerahan jasa kena pajak dan juga seharusnya dipotong PPh Pasal 23 atas jasa. Namun, berdasarkan Pasal 23 UU PPh, pemotongan PPh Pasal 23 hanya bisa

- dilakukan oleh subjek pajak badan dalam negeri. Oleh karena itu, atas transaksi B tidak dapat dipotong PPh Pasal 23.
- d. Pada transaksi B juga termasuk penyerahan jasa kena pajak. Dalam hal ini, PT. Gojek Indonesia harus mengenakan PPN atas jasa yang diberikan kepada *driver gojek*.
  - e. PT. Gojek Indonesia juga harus memotong PPh 21 atas bonus yang dibayarkan kepada *driver gojek*, karena bagi *driver gojek*, penghasilan tersebut merupakan imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan.

### **Driver Gojek Berasal dari Luar Negeri**

Dengan diimplementasikannya MEA, tidak tertutup kemungkinan *driver gojek* berasal dari Malaysia, Myanmar, Thailand, dan negara ASEAN lainnya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU PPh, apabila orang asing berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka atas orang asing tersebut dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri. Dalam hal ini, pemungutan PPh Pasal 26 berlaku atas orang asing tersebut. PT. Gojek Indonesia memegang peranan penting melakukan pemungutan PPh Pasal 26 atas penghasilan yang diperoleh oleh *driver gojek* yang berasal dari luar negeri. Sementara itu, apabila orang asing tersebut berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau mempunyai niat tinggal di Indonesia, maka status orang asing tersebut berubah menjadi subjek pajak dalam negeri. Pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan atas orang asing tersebut disamakan dengan subjek pajak dalam negeri lainnya. Dengan diberlakukannya MEA, arus keluar masuk tenaga kerja asing semakin mudah. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut apakah *time test* 183 hari masih sesuai dengan kondisi setelah implementasi MEA.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

*E-commerce* merupakan salah satu strategi dalam cetak biru MEA untuk mewujudkan kawasan dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis, proses bisnis *e-commerce* cukup kompleks sehingga menimbulkan perbedaan pandangan dalam pengelompokan bisnis *e-commerce* tersebut. Khusus untuk bisnis *e-commerce Go Jek*, perusahaan ini termasuk ke dalam kategori *online market place* karena PT. Gojek Indonesia hanya berperan sebagai perantara antara pengguna *gojek* dengan *driver gojek*. Dalam hal ini, terdapat potensi penerimaan PPN atas jasa perantara yang diberikan oleh PT. Gojek Indonesia kepada *driver gojek* tersebut. Oleh karena itu, untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan bisnis *e-commerce* seiring dengan semakin tumbuhnya bisnis ini setelah implementasi MEA, diperlukan kebijakan dan regulasi yang dapat dengan mudah menginterpretasikan proses bisnis *e-commerce*.

## DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN, 2008. *ASEAN Economic Community Blueprint*
- KPMG, 2014. *The ASEAN Economic Community 2015*
- Sakti, Nufransa, 2014. *Buku Pintar Pajak E-Commerce*. Jakarta: visimedia
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 tentang Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce
- [http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6020/Menkominfo%3A+Pemerintah+Dorong+Pertumbuhan+e-Commerce+Indonesia/0/berita\\_satker#.VhQ6ovmqpBc](http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6020/Menkominfo%3A+Pemerintah+Dorong+Pertumbuhan+e-Commerce+Indonesia/0/berita_satker#.VhQ6ovmqpBc)





**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**ASPEK KOMUNIKASI KEBIJAKAN  
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA  
PEMERINTAH DAERAH**

**Hadiyati Munawaroh<sup>1</sup>**

*Abstrak*

*Keuangan negara perlu dikelola dalam suatu sistem yang didukung kebijakan yang dirumuskan dengan cermat. Komunikasi kebijakan pengelolaan keuangan negara pada pemerintah daerah menghadapi tantangan jumlah pemerintah daerah yang sangat banyak dan lapisan birokrasi yang tidak sedikit. Diskresi yang dipilih pelaksana pada pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan perlu dikelola agar konsisten pada tujuan kemanfaatan umum*

*Kata kunci: diskresi, kebijakan, keuangan negara, komunikasi, pemerintah daerah*

**I. PENDAHULUAN**

Mengelola negara untuk mencapai tujuan negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang baik. Untuk menjamin agar sistem tersebut dipatuhi dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan perumusan kebijakan yang cermat. Konstruksi kebijakan pengelolaan keuangan negara telah dibangun sejak dari konstitusi yang tertinggi yaitu UUD 1945 khususnya pada pasal 23 yang mengatur agar keuangan negara dikelola dengan terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan bertanggung jawab tersebut dimaksudkan agar keuangan negara benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan negara yaitu kemakmuran rakyat. Hal ini seharusnya menjadi arah kebijakan pengelolaan keuangan negara di daerah yang implementasinya diatur dalam kebijakan-kebijakan yang lebih mikro maupun program di pemerintah daerah.

Pemerintah daerah di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak yaitu 542 memerlukan suatu rumusan kebijakan yang mampu membawa pengelolaan keuangan daerah di seluruh pmda pada arah yang jelas sehingga selaras bersama-

---

<sup>1</sup> Email: hadiyati.munawaroh@gmail.com

sama dengan pengelolaan keuangan negara di pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pemanfaatan yang optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan keuangan negara di pemerintah daerah yang sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat, apakah menjamin implementasi pada pemerintah daerah akan serupa dengan yang dimaksud oleh perumus kebijakan tersebut? Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji apakah kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah yang dirumuskan oleh pemerintah pusat dapat diimplementasikan dengan baik.

## II. LITERATUR

Secara sederhana, Riant Nugroho (2011: 139) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut:

“...setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan”.

Kebijakan publik memiliki ciri khas yaitu bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan dan diputuskan oleh mereka yang memiliki otoritas dalam sistem politik (Wahab, 2012: 18). Model proses kebijakan menurut Thomas R. Dye (1972) dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)
- b. Pengaturan agenda (*agenda setting*)
- c. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)
- d. Pengesahan kebijakan (*policy legitimation*)
- e. Pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*)
- f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

*Policy implementation as what develops between the establishment of an apparent intention on the part of government to do something or stop doing something and the ultimate impact of world of actions: connection between the expression of governmental intention and actual result (O'toole, 1995).*

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Fungsi implementasi adalah membentuk suatu upaya yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai “*outcome*” atau hasil dari kegiatan pemerintahan (Suwitri, 2011: 80). Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan publik (Riant Nugroho, 2011:618).

*The importance of reliable information on implementation cannot be underestimated. When policymakers lack information about implementation, they may not only terminate a potentially successful*

*program, but they also may expand a program inappropriately* (Edwards III, 1980).

Edwards III (1980) menggunakan empat aspek dalam implementasi kebijakan:

- a. Komunikasi (*communication*)
- b. Sumber daya (*resources*)
- c. Kecenderungan sikap (*dispositions or attitudes*)
- d. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan menurut Edwards III (1980) mengindikasikan tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu:

a. Transmisi

Transmisi menyangkut bagaimana suatu kebijakan diteruskan kepada personil yang tepat dengan komunikasi yang akurat. Beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah dalam implementasi berupa: i) pertentangan pendapat antara pemberi perintah dengan pelaksana yang berdampak kepada distorsi terhadap komunikasi, ii) berlapisnya hirarki birokrasi yang berdampak pada distorsi perintah kepada pelaksana, iii) persepsi selektif dari pelaksana yang berdampak pada keengganan melaksanakan perintah atau menggunakan diskresi untuk memilih menghindari kebijakan.

b. Kejelasan

Komunikasi atas kebijakan yang diimplementasikan harus jelas, instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana tidak kabur tetapi menjelaskan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Namun demikian, fleksibilitas dalam implementasi tetap diperlukan mengingat lokus dalam implementasi seringkali memiliki perbedaan kondisi yang berdampak kepada perbedaan kebutuhan pendukung implementasi. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan adalah: i) kompleksitas kebijakan publik, ii) keinginan untuk tidak mengganggu stabilitas kelompok-kelompok masyarakat, iii) kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, iv) masalah-masalah dalam memulai kebijakan baru, v) menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan vi) sifat pembentukan kebijakan pengadilan.

c. Konsistensi

Meskipun perintah implementasi sudah jelas, namun jika diantara perintah-perintah saling bertentangan akan membingungkan pelaksana. Perintah yg tidak konsisten juga mendorong pelaksana mengambil tindakan yang longgar dalam menafsirkan suatu kebijakan yang berdampak pada kurang efektifnya implementasi kebijakan. Ketidakkonsistenan biasanya juga berasal dari besarnya kepentingan yang bersaing yang berusaha mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi komunikasi adalah i) kerumitan kebijakan publik, ii) masalah-masalah yang mengawali program baru, dan iii) ketidakjelasan tujuan.

### III. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah pada

pemerintah daerah di Indonesia selama periode tahun 2013 sampai dengan pertengahan 2014. Diskusi dengan personil yang kompeten di beberapa pemerintah daerah dan pengalaman peneliti sebagai auditor pada pemerintah daerah menjadi penyeimbang hasil analisis.

Aspek komunikasi kebijakan menjadi fokus dalam penelitian ini dengan pertimbangan aspek ini yang menurut pelaksana kebijakan di pemerintah daerah mengganggu implementasi kebijakan. Aspek komunikasi kebijakan juga melibatkan banyak *stakeholders* pada banyak lapisan birokrasi sehingga meningkatkan kompleksitas gangguan dalam implementasi kebijakan.

#### **IV. HASIL DAN DISKUSI**

##### **a. Komunikasi Kebijakan**

##### **1. Transmisi kebijakan**

Kebijakan pengelolaan keuangan negara pada pemerintah daerah harus mengacu pada kebijakan makro yang disusun oleh pemerintah pusat. Untuk memungkinkan implementasi kebijakan keuangan negara di pemerintah daerah, diperlukan transmisi kebijakan dari penyusun kebijakan yaitu pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pada pemerintah pusat, yang diberikan tugas untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah adalah Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara. Penyampaian kebijakan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah adalah bagian dari tugas Kementerian Dalam Negeri dhi. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD). Tujuan dibentuknya DJKD adalah mendorong meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, yang transparan, dan akuntabel. Salah satu arah kebijakan DJKD dalam Rencana Strategis tahun 2010 s.d. 2014 adalah menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Edwards III, semakin banyak yang harus dijangkau dengan komunikasi, dalam proses transmisi kebijakan semakin besar kemungkinan kehilangan beberapa diantaranya. Dan semakin banyak lapisan birokrasi yang harus dilewati oleh pelaksana-pelaksana, maka semakin besar peluang perintah implementasi tersebut diabaikan dan terdistorsi. Transmisi implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menghadapi situasi seperti yang disampaikan oleh Edwards III dimana transmisi kebijakan harus menjangkau seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak yaitu 529 Pemerintah daerah yang terdiri dari 34 Pemerintah Provinsi, 402 Pemerintah Kabupaten dan 93 Pemerintah Kota sementara setiap pemerintah daerah memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Selain itu, situasi struktur birokrasi pada pemerintah daerah

yang memiliki lapisan hirarki yang tidak sedikit juga bisa menjadi kendala dalam transmisi kebijakan.

Berdasarkan teori Edwards III, transmisi kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah daerah seharusnya disampaikan kepada personil yang tepat dan informasi yang disampaikan akurat yaitu sesuai dengan yang dimaksud oleh penyusun kebijakan. Personil yang tepat adalah personil yang memiliki pemahaman memadai tentang keuangan daerah dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Untuk bisa menyampaikan informasi pengaturan keuangan negara pada pemerintah daerah dengan akurat maka informan yang melakukan transmisi harus memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan daerah, memiliki kewenangan terkait keuangan daerah dan menguasai teknik komunikasi yang baik. Apabila transmisi tidak dilaksanakan sesuai teori Edwards III, maka timbul permasalahan berupa pertentangan pendapat, distorsi perintah oleh pelaksana dan persepsi selektif. Pertentangan pendapat dan distorsi dalam komunikasi kebijakan pengelolaan keuangan negara pada pemerintah daerah berdampak kepada pengelolaan keuangan yang menyimpang dari kebijakan atau pemborosan karena melaksanakan kegiatan yang tidak diperlukan. Sementara keengganan dari pelaksana kebijakan dalam hal ini pihak-pihak yang terkait pengelolaan keuangan daerah untuk mengubah rutinitas pengelolaan keuangan yang sebelumnya agar sesuai dengan kebijakan yang baru akan menghambat implementasi kebijakan baru. Situasi kurangnya dukungan dari pelaksana menunjukkan keterkaitan aspek transmisi dengan aspek kecenderungan sikap pelaksana (disposisi) dalam teori Edwards III.

## **2. Kelengkapan, kejelasan dan konsistensi komunikasi kebijakan**

Jika menengok sejarah pengaturan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, sangat banyak peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan sering terjadi perubahan pengaturan. Pada awal 1980 an, pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota menggunakan Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA). Sistem MAKUDA tersebut dengan ciri-ciri antara lain *single entry* (pembukuan tunggal), *incremental budgeting* (panganggaran secara tradisional yakni rutin dan pembangunan) dan pendekatan anggaran berimbang dinamis. Perkembangan selanjutnya Sistem MAKUDA dinilai tidak memenuhi kebutuhan daerah terkait pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yaitu tidak mampu memberikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah, atau dengan kata lain tidak dapat memberikan laporan neraca dan tidak mampu memberikan informasi mengenai laporan aliran kas sehingga manajemen atau publik tidak dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan adanya kenaikan atau penurunan kas daerah. Perkembangan selanjutnya pada pemerintah daerah diawali dengan pemberian dan pelaksanaan otonomi yang luas kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk mendukung operasional bagi pelaksanaan kedua undang-undang tersebut, telah pula

diundangkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara pada pemerintah daerah antara lain : (a)PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan; (b)PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; (c) PP Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan; dan (d) PPNomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan negara pada pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel diatur penjabaran lebih lanjut dari PPNomor 105 Tahun 2000 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PelaksanaanTata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Upaya perwujudan akuntabilitas melalui instrumen Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000, yaitu dalam pasal 35 yang mengamanatkan bahwa “penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah”. Namun sampai dengan pertengahan tahun 2005, standar dimaksud belum dapat terwujud. Standar akuntansi keuangan pemerintahan belum disusun antara lain akibat ketidakjelasan mengenai institusi maupun lembaga yang berwenang untuk menerbitkan standar bagi instansi pemerintah.

Kebijakan tentang“keuangan negara” selanjutnya mengalami perubahan besar dengan ditetapkannya paket undang-undang tentang keuangan negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Paket undang-undang tentang keuangan negara tersebut menjadi landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan reformasi manajemen keuangan negara dimana telah dibuat pengaturan secara jelas dan tegas tentang sistem pengelolaan keuangan dan aset negara dengan cermat dan sistematis yang mengikuti perkembangan manajemen sektor publik sehingga dapat mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang bersih dan profesional.

Upaya-upaya untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara digulirkan seiring penerapan otonomi daerah yang semakin luas dengan dilakukan perubahan atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan perimbangan keuangan daerah antara lain adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan selanjutnya dalam paket undang- undang-undang keuangan negara, terutama Undang-Undang 17 tahun 2003 telah secara tegas mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Selanjutnya dalam undang-undang yang sama diamanatkan pula bahwa bentuk

dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Standar akuntansi pemerintah yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Menindaklanjuti amanat UU tentang Keuangan Negara agar Pemerintah menyusun laporan keuangan sesuai SAP, maka terbitlah PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ternyata terdapat beberapa perbedaan yang terkait dengan pengakuan, penilaian dan pelaporan akuntansi berdasarkan Kepmendagri 29 Tahun 2002 dengan PP 24 Tahun 2005. Perbedaan tersebut antara lain berkaitan dengan basis akuntansi, pengakuan dan depresiasi aset tetap, pengakuan kewajiban, jenis laporan keuangan, penyajian dan pengungkapan informasi keuangan.

Perbedaan dalam basis akuntansi, penyajian, pengakuan dan pengukuran akuntansi keuangan daerah menurut Kepmendagri 29 Tahun 2002 yang sudah diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan baru dalam PP 24 Tahun 2005 membawa konsekuensi kebutuhan yang berbeda atas sistem akuntansi yang diperlukan. Sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Dengan demikian pemerintah daerah harus mengubah rutinitas sistem akuntansi berdasarkan Kepmendagri 29 Tahun 2002 antara lain mengubah struktur kekuasaan pemerintahan dari sentralisasi kepada desentralisasi yang membawa pengaruh antara lain : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang didasarkan atas prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima/mengeluarkan uang; memerankan Sekretaris Daerah selaku koordinator dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah daerah; PPKD bertanggungjawab kepada PKPKD melalui Sekretaris Daerah; dan meningkatkan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah.

Mengakomodir reformasi keuangan negara dan otonomi daerah maka dilakukan perubahan atas PP Nomor 105 tahun 2000 menjadi PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 58 tahun 2005 ini juga telah melahirkan regulasi baru sebagai aturan pelaksanaannya karena adanya pasal kunci dalam PP 58 Tahun 2005 yaitu pasal 154, yang berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri." Oleh karena itu, lahirlah Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti Kepmendagri No. 29 tahun 2002. Permendagri No. 13 tahun 2006 merupakan pedoman umum bagi pemerintah daerah di dalam melaksanakan tata kelola keuangannya. Pemerintah daerah selanjutnya harus menyusun aturan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah dalam bentuk Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan berbagai Peraturan Kepala Daerah terkait dengan implementasinya. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ternyata masih banyak

mengandung ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam memberikan pedoman pengelolaan keuangan kepada daerah. Secara singkat ketidakjelasan pengelolaan keuangan tersebut antara lain terkait ketidakjelasan konsep Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU).

Reformasi dalam pengelolaan keuangan negara dengan lahirnya paket undang-undang tentang keuangan negara yang diiringi reformasi tata kelola pemerintah daerah berupa otonomi daerah membawa konsekuensi perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah yang seolah baru lahir menjadi entitas yang mandiri harus bergegas membenahi diri untuk dapat mengikuti tuntutan reformasi. Namun sayangnya, pengaturan-pengaturan dari pemerintah pusat khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah malah membingungkan pemerintah daerah. Pengubahan tata kelola keuangan daerah dari sistem MAKUDA ke sistem sesuai Kemendagri 29 tahun 2002, ternyata tidak sebentar dirasakan hasilnya karena pemerintah daerah harus segera melakukan perubahan dengan keluarnya PP Nomor 24 tahun 2005 tentang SAP. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang diharapkan dapat menjadi pedoman teknis dalam mengimplementasikan SAP sesuai PP Nomor 24 tahun 2005 ternyata malah membingungkan karena kedua peraturan tersebut tidak sinkron sehingga pemerintah daerah harus melakukan modifikasi dan konversi ketika akan membuat laporan keuangan agar sesuai dengan SAP.

Setelah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Kementerian Dalam Negeri masih beberapa kali melakukan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Perubahan dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2007 antara lain mencakup penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan urusan dan organisasi perangkat daerah serta mengatasi permasalahan teknis dalam implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan Perubahan dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 antara lain terkait kebijakan pengalihan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari APBN menjadi APBD, perubahan struktur pendapatan, penegasan pejabat pembuat komitmen, penganggaran tahun jamak dan pengaturan pendanaan tanggap darurat. Kementerian Dalam Negeri selanjutnya mengubah pengaturan penganggaran pemberiang uang kepada masyarakat dengan menjelaskan pada Permendagri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2013 yaitu pemberian uang dimaksud dianggarkan dalam Belanja Pegawai adalah apabila berupa hadiah atau penghargaan pada prestasi. Ternyata Kementerian Dalam Negeri mengubah lagi pengaturan anggaran pemberian uang kepada masyarakat dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2014 yaitu tidak lagi pada anggaran Belanja Pegawai namun pada anggaran Belanja Barang dan Jasa. Padahal anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam SAP tidak mencakup kegiatan pemberian uang kepada masyarakat. Belanja Barang dalam SAP (Buletin Teknis Nomor 4 sebagai bagian dari SAP) dijelaskan sebagai pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang



dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Sementara itu, pemerintah daerah saat ini harus menyiapkan diri untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual selambatnya pada tahun 2015 sebagaimana diatur pada PP Nomor 71 Tahun 2010. Selambatnya pada bulan Mei tahun 2014 Kepala Daerah sudah harus menerbitkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan basis akrual (diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah). Meskipun pedoman terkait kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintahan daerah telah dibuat oleh Kemendagri yaitu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah, namun justru pedoman tentang bagaimana tahapan berupa urutan kegiatan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menyiapkan transisi basis akuntansi menuju akrual penuh belum tersedia. Sampai dengan tahun 2015 ini, belum seluruh pemerintah daerah menerbitkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan basis akrual. Padahal perubahan-perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang sangat sering terjadi sejak sistem MAKUDA yang masih sederhana pada 1980 an, Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 yang *single entry* dan pengelolaan keuangan yang sentralisasi pada PPKD, PP Nomor 24 tahun 2005 tentang SAP dengan Kemendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang *double entry* dan sudah mengarah pada praktek akuntansi yang *best practice* meskipun masih berbasis kas menuju akrual serta pengelolaan keuangan yang desentralisasi pada SKPD dan perubahan-perubahan pedoman pengelolaan keuangan oleh Kemendagri masih belum sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah bahkan masih menyisakan kebingungan.

#### **b. Mengelola diskresi kebijakan**

Komunikasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang buruk sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Edwards III akan menimbulkan dampak yang mengganggu tercapainya tujuan kebijakan. Persepsi selektif dan diskresi yang dipilih pelaksana kebijakan agar sesuai dengan kepentingan dari pihak-pihak yang berkuasa perlu dihindari. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi salah satu upaya untuk mengantisipasi resiko tersebut. Pada pasal 9 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur agar ketiadaan dan ketidakjelasan peraturan perundangan tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu 1) kepastian hukum; 2) kemanfaatan; 3) ketidakberpihakan; 4) kecermatan; 5) tidak menyalahgunakan kewenangan; 6) keterbukaan; 7) kepentingan umum; dan 8) pelayanan yang baik. Diskresi yang dilakukan pejabat pemerintahan hanya boleh dalam koridor batasan kewenangannya dan bertujuan untuk: 1) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; 2) mengisi kekosongan hukum; 3) memberikan kepastian hukum; dan 4) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Bagaimana pelaksana kebijakan menggunakan diskresi kebijakan tergantung dari kecenderungan pelaksana terhadap kebijakan yaitu bagaimana pandangan dan penilaian pelaksana terhadap dampak dari kebijakan bagi pribadi maupun organisasi dari pelaksana. Penyusun kebijakan tidak jarang harus menghadapi pelaksana kebijakan yang memiliki kecenderungan tidak menyukai kebijakan sehingga harus memanipulasi kebijakan atau mengurangi diskresi dari kebijakan (Edwards III: 1980).

## V. KESIMPULAN

Kebijakan –kebijakan terkait pengelolaan keuangan negara di pemerintah daerah yang dirumuskan oleh pemerintah pusat memerlukan transmisi yang baik. Saluran komunikasi harus dikembangkan agar efektif karena banyaknyapemerintah daerah yang harus dijangkau. Perumusan kebijakan yang kurang cermat oleh pemerintah pusat sehingga sering memerlukan perubahan akan menurunkan probabilitas implementasi di pemerintah daerah karena kebijakan baru seringkali masih menghadapi masalah ketidakjelasan dan inkonsistensi kebijakan. Kebijakan yang tidak jelas dan tidak konsisten juga menimbulkan keengganan pelaksana pada pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan. Diskresi yang dipilih oleh pelaksana di pemerintah daerah dari kebijakan yang tidak jelas dan tidak konsisten harus dikelola agar tetap pada tujuan kemanfaatan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dye, Thomas R. 1972. Understanding Public Policy. Eaglewood Cliff: Prentice Hall.*
- Edwards, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press*
- Nugroho, Riant, 2011, Public Policy (Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan– Manajemen Kebijakan), Jakarta: PT Elex Media Komputindo*
- O’Toole, L.J.R. Jr. 1995. Rational Choice and Policy Implementation. American Review of Public Administration*
- Suwitri, Sri, 2011, Konsep Dasar Kebijakan Administrasi Publik, Semarang, Badan Penerbit Undip*
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara*



**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL 2015**  
**PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA**  
**MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**  
**( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI**  
**INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDONESIA**  
**DALAM PENGARUH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**  
**(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY)**

*By: Karmanis<sup>1</sup>*

**ABSTRACT**

*ASEAN Vision 2020 agreed in December 1997 in Kuala Lumpur marked a new chapter in the history of economic integration in Southeast Asia . In the declaration, the leaders of ASEAN countries agreed to transform East Asia into a region that is stable , prosperous and competitive , supported by a balanced economic development , reduction of poverty and socio - economic disparities among its member states. ASEAN leaders agreed to accelerate the establishment of the ASEAN Economic Community in 2015 and to transform ASEAN into a region where goods , services, investment , skilled labor , and capital flows can move freely.*

*Neoliberalism is clearly the basis of economic integration in Southeast Asia. Free flow in the five elements of the pillars of economic integration of ASEAN became clear evidence of how market forces have been the main drivers. Moreover , the agenda of the ASEAN Economic Community have legally binding force, along with a signed and the ratification of the Charter.*

*Implementation of the pillars of neo - liberalism has managed to produce fundamental problems for the economy of the countries in various parts of the world . Poverty , unemployment , inequality and de-industrialization , became the dominant color inherent in the implementation of neo - liberalism . Even episodes of crisis be a part that can not be liberated from the global economy that runs on the basis of the rules of neoliberal*

*The basic principles of neoliberalism in the form of liberalization , privatization and deregulation , into the spirit of the realization of the ASEAN Economic Community ( AEC ) . Neoliberalism has been in a position of hegemony in the Indonesian economy . In other words , neoliberalism has become the consensus is not written as a paradigmatic foundation for development.*

*As a single market and production base , there are five core elements underlying the ASEAN Economic Community ( AEC ) , namely ( 1 ) the free movement of goods ; ( 2 ) the free movement of services ; ( 3 ) the free movement of investment ; ( 4 ) The free movement of capital ; and ( 5 ) the free movement of skilled workers . The fifth core element in the ASEAN Economic Community ( AEC ) as a single market and production base is complemented by two other important components , namely the priority integration sectors consisting of twelve sectors ( Agro based products ; air transport ; automotive ; e - ASEAN ; electronic ; fisheries ; healthcare ; logistics ; metal-based*

---

<sup>1</sup> asay\_angel@yahoo.com

products ; textiles ; tourism ; and wood-based products ) and food sector , agriculture and forestry

With a population of 252 million , the Indonesian people actually have the most advantages portion with 50 percent of the population of 600 million people in ASEAN . There are at least four ( 4 ) things that are the focus of the implementation of the MEA , first , the countries in the unity of the market and production base . Secondly , MEA will serve as regional level competition is very high . Third, the MEA will serve as the region with equitable economic development . Fourth, the MEA will be integrated to the equitable economic development among all the ASEAN region.

With a total population of 50 percent of the population of ASEAN and the amount of per capita income that is smaller than the ASEAN countries such as Malaysia , Singapore and Thailand , the MEA is actually more beneficial for the economic development of Indonesia , particularly in income distribution , but if equalization is not done in a short time , Indonesia will be able to lose the best human resources are migrating to look for a decent living outside Indonesia .

From the aspect of employment , wide opening of job opportunities should be accompanied by the strengthening of the capacity of the Indonesian people . Case Labor Women and the delivery of human resources with the low quality of professionalism that will only make the people of Indonesia to be a " slave " in neighboring countries.

In addition to the enforcement of MEA Indonesia could be an opportunity for the improvement of the domestic economy with the entry investorinvestor located around ASEAN , assuming that Indonesia is a potential market that Indonesia's economic growth will made significant progress , especially if accompanied by strong government role in preparing professional beings , then the level of education and income of the people of Indonesia will increase as well.

Nevertheless , these conditions can bring risk exploitation . Indonesia still has a level of regulation that is less binding that can cause large-scale act of exploitation in the availability of natural resources by foreign companies into Indonesia as the country with the abundant natural resources compared to other countries. There is a possibility also exploitation by foreign companies could damage the ecosystem in Indonesia , while the regulation of investment in Indonesia has not been strong enough to keep the natural conditions including the availability of natural resources contained .

Exploitation risk must be anticipated by restrictions regulative of a special nature , example : the prohibition of foreigners to buy and own land, a ban foreigners to employ local people less than 60 percent of the total number of workers , the prohibition to make industrial explorative that can reduce and disrupt the boundary Indonesian territory , as well as other regulations that may create exploitable public interest so that the MEA is really an opportunity for the advancement of the national economy.

**Keywords:** *Development Policy, ASEAN Economic Community (AEC), Professionalism*

## **A. PENDAHULUAN**

Dibukanya ruang-ruang perdagangan bebas dikawasan ASEAN diprediksi mampu mendorong hal positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia, *pertama*, mendorong pendapatan negara menalalui ekspor dan impor. *Kedua*, membuka peluang industrialisasi baru di kawasan Indonesia yang sempat lesu karena krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 / 1998. *Ketiga*, memperluas lapangan kerja

profesional bagi ledakan generasi-generasi muda baru di Indonesia serta memberikan kesempatan berkarir diberbagai wilayah di ASEAN.

Kekhawatiran bagi para pengusaha terhadap ekonomi pasar, ditengah lemahnya daya saing industri lokal, lemahnya proteksi negara terhadap industri-industri lokal ditakutkan mampu menggerus potensi pengusaha local dan beberapa Usaha Kecil Menengah (UKM) yang masih kekurangan dalam berbagai aspek ekonomi. Selain itu secara ekonomi, Indonesia tidak lebih baik dari Singapura, Malaysia, Thailand dan Kamboja. Namun kegagalan ekonomi pasar lama telah membuka pasar bebas dalam cara pandang baru ekonomi pasar yang dibangun diatas otorisasi negara. Negara menjamin berbagai macam sarana dan prasarana penunjang keberlangsungan pasar, seperti stabilitas keuangan, keamanan domestik, serta penegakan hukum. Bila dibutuhkan, maka negara juga dapat menggunakan kekuatannya agar pasar dapat berjalan dan berfungsi dengan baik. Lebih jauh lagi, bila tidak terdapat pasar dalam area tersebut yang membutuhkan utilitas seperti tanah, air, listrik, pendidikan, jasa kesehatan, ataupun jaminan sosial. Maka negara harus menyediakan pasar, karena dalam pandangan baru ekonomi pasar, peran negara akan dikurangi secara bertahap dan proporsional untuk menciptakan stabilitas pasar, sehingga peran negara tidak hilang seperti yang dipahami secara konvensional oleh paham ekonomi pasar yang lama, namun ekonomi pasar tetap menganut azas persaingan bebas yang mengharuskan semua pihak berkonsentrasi pada kualitas dan kecepatan dalam membaca kecenderungan pasar dan secara bersamaan negara memberikan proteksi yang mendukung pada dinamisasi pasar yang positif.

## II. TINJAUAN LITERATUR

### A. Konsep Masyarakat ASEAN

Konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN sejalan dengan dinamika hubungan antar-bangsa di ASEAN yang menyadari pentingnya integrasi negara-negara di Asia Tenggara. Pada pertemuan informal para Kepala Negara ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997 disepakati ASEAN Vision 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Hanoi yang menghasilkan *Hanoi Plan of Action* (HPA). Visi 2020 termasuk HPA berisi antara lain: kondisi yang ingin diwujudkan di beberapa bidang, seperti orientasi ke luar, hidup berdampingan secara damai dan menciptakan perdamaian internasional.

Beberapa agenda kegiatan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Visi 2020 adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, teknologi, hak cipta intelektual, keamanan dan perdamaian, serta turis melalui serangkaian aksi bersama dalam bentuk hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan diantara negara-negara anggota ASEAN.

Selanjutnya pada KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 dihasilkan Bali Concord II yang menyepakati pembentukan ASEAN *Community* untuk mempererat integrasi ASEAN. Terdapat tiga komunitas dalam ASEAN *Community* yang disesuaikan dengan tiga pilar di dalam ASEAN Vision 2020, yaitu pada bidang keamanan politik (ASEAN *Political-Security Community*),

ekonomi (*ASEAN Economic Community*), dan social budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*). MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020 adalah: *"To create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic goods, services, investment, skill labor economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020."*

Untuk membantu tercapainya integrasi ekonomi ASEAN melalui AEC, maka dibuatlah AEC Blueprint yang memuat empat pilar utama yaitu (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *ecommerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam; dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Dengan berlakunya MEA 2015, berarti negara-negara ASEAN menyepakati perwujudan integrasi ekonomi kawasan yang penerapannya mengacu pada *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*. AEC Blueprint merupakan pedoman bagi negara-negara Anggota ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015.

## B. Integrasi Ekonomi

Kajian tentang integrasi ekonomi secara khusus dipelopori oleh Viner (1950). (Brooks and Marco, 2002). Dampak dari suatu integrasi ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan dijelaskan melalui konsep *trade creation and trade diversion*. *Trade creation* terjadi apabila suatu negara dapat mengimpor barang dengan harga yang lebih murah dari negara lain dalam suatu kawasan integrasi ekonomi, sehingga secara keseluruhan kesejahteraan akan meningkat. *Sedangkan trade diversion* terjadi apabila impor dari suatu negara yang berada di luar kawasan digantikan oleh negara lain yang berada dalam kawasan integrasi, karena produk dari negara lain dalam kawasan tersebut menjadi lebih murah akibat adanya perlakuan khusus dalam penetapan tarif.

Integrasi ekonomi menurut Achsani (2008) diartikan sebagai satu kawasan ekonomi tanpa batas antar negara (*frontier*) dimana setiap penduduk maupun sumber daya dari setiap negara anggota bisa bergerak bebas sebagaimana dalam negara sendiri. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat kegunaan yang paling optimal yang pada akhirnya akan mendorong tercapainya tingkat kesejahteraan yang sama (merata) di antara negara-negara anggota.

Banyak ahli yang menaruh minat dalam kajian globalisasi mendefinisikan globalisasi sebagai proses ekonomi meskipun pada dasarnya globalisasi tidak semata proses ekonomi. Sebaliknya, konsep globalisasi digunakan untuk menjelaskan bidang-bidang kegiatan ekonomi, politik, dan sosial yang melintasi

batas-batas teritorial semacam itu. Akibatnya, keputusan dan aktivitas dalam suatu wilayah akan dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap individu di dunia yang mempunyai jarak cukup jauh (Held 1999, 15).

### III. PEMBAHASAN

#### A. Welcome to AEC 2015

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah ‘WELCOME TO AEC 2015’ adalah tahun kedatangan MEA yang sangat di nanti-nantikan oleh negara yang siap bertarung khususnya Negara di ASEAN dan merupakan hantu yang menakutkan bagi negara yang akan di jadikan pangsa pasar bagi negara-negara anggota. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap, MEA akan datang, sehingga semua Negara ASEAN harus menyiapkan strategi yang bisa di bilang sangat ampuh untuk menjadi pemenang di dalam persaingan pasar ini.

Pertanyaannya adalah apakah Indonesia mampu,? bagaimana strateginya?, dan bisa kah menjadi pemenang? Bagaimana keterkaitan MEA dengan SDM dan aspek apa saja dalam manajemen sumber daya manusia yang di pengaruhi oleh kehadiran MEA.

Para pemimpin Asean sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Liberalisme pasar bebas barang dan jasa akan memacu investasi dalam negeri dan menarik tenaga kerja asing ke Indonesia. Masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia dimungkinkan dapat menjadi ancaman apabila tenaga kerja Indonesia tidak mempunyai daya saing yang sebanding. Oleh karena itu, peningkatan daya saing tenaga kerja harus dilakukan jauh hari sebelum MEA 2015 benar-benar dimulai. Hal tersebut dapat di antisipasi dengan mengkorelasikan input penunjang tenaga kerja sehingga tenaga kerja Indonesia memiliki kesiapan mental dan kemampuan.

Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia memasuki integrasi ekonomi ASEAN tidak hanya yang bersifat internal di dalam negeri tetapi terlebih lagi persaingan dengan negara sesama ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti China dan India. Tantangan lainnya adalah laju inflasi Indonesia yang masih tergolong tinggi dibandingkan dengan Negara lain di kawasan ASEAN. Kemampuan bersaing SDM tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan baik secara formal maupun informal. Untuk itu, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik di dalam negeri maupun intra-ASEAN, untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil dari luar. Salah satu tantangan besar dunia pendidikan nasional kita adalah menanamkan kesadaran kolektif sebagai bangsa yang perlu berjuang keras untuk mencapai kemajuan, mengejar ketertinggalannya dari Negara-negara lain dalam banyak aspek. Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Berbeda dengan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan cenderung jumlahnya semakin berkurang. Sumber daya manusia jumlahnya terus meningkat. Kita mengetahui bahwa dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah, hal ini diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik yang diakses tanggal 10 April 2013 bahwa jumlah penduduk

Indonesia tahun 2010 adalah 194.754.808 jiwa, tahun 2011 adalah 206.264.595 jiwa dan tahun 2012 mencapai 237.641.326 jiwa.

Data diatas menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Indonesia jumlahnya terus meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan data jumlah perusahaan menurut sub-sektornya pada tahun 2008 adalah 25.694, tahun 2009 adalah 24.468 dan tahun 2010 adalah 23.345. (BPS yang diakses tanggal 15 April 2013). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk. Pernyataan tersebut diperkuat dengan teori Thomas Robert Malthus bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan deret ukur, sedangkan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung. Hal inilah yang menyebabkan suatu kesenjangan antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja sehingga memunculkan pengangguran.

Secara kuantitas, jumlah penduduk Indonesia memang jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain dalam ASEAN. Namun, persaingan secara kuantitas tidak akan memenangkan persaingan ketika kualitas masih jauh dibawahnya. Oleh karena itu, masalah tenaga kerja Indonesia bukan hanya menyangkut jumlah dan kesempatan kerja saja, melainkan juga kualitasnya yang masih rendah (Mamat Ruhimat dalam Jurnal Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia dalam Era Globalisasi: 2011). Maka perlu adanya evaluasi terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar tenaga kerja Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi dengan tenaga kerja asing di pasar lokal maupun pasar global. Tetapi sebagai bangsa yang besar, kita harus tetap optimis bahwa MEA 2015 akan meningkatkan perekonomian kita seperti visi ASEAN: “*One Community, Many Opportunities*”.

Dengan bebas masuknya tenaga kerja antar Negara menyebabkan persaingan akan kualitas, dan kompetensi sangat di butuhkan bagi SDM Indonesia. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Para tenaga kerja dari negara MEA yang memiliki kompetensi kerja yang lebih tinggi, tentunya akan memiliki kesempatan lebih luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di dalam MEA. Dengan demikian, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, khususnya di kawasan ASEAN. Meningkatkan kualitas SDM harus diarahkan pada penguasaan iptek untuk menopang kegiatan ekonomi agar lebih kompetitif. Pemenuhan SDM yang berkualitas dan unggul, karena menguasai iptek, akan berpengaruh terhadap struktur industri di masa depan. Dan apabila sasaran di atas bisa dipenuhi, akan semakin kuat basis industri yang sedang dibangun dan dikembangkan di Indonesia, yang pada gilirannya akan mendorong transformasi struktur ekonomi secara lebih cepat.

## **B. Kesiapan Indonesia Menghadapi MEA**

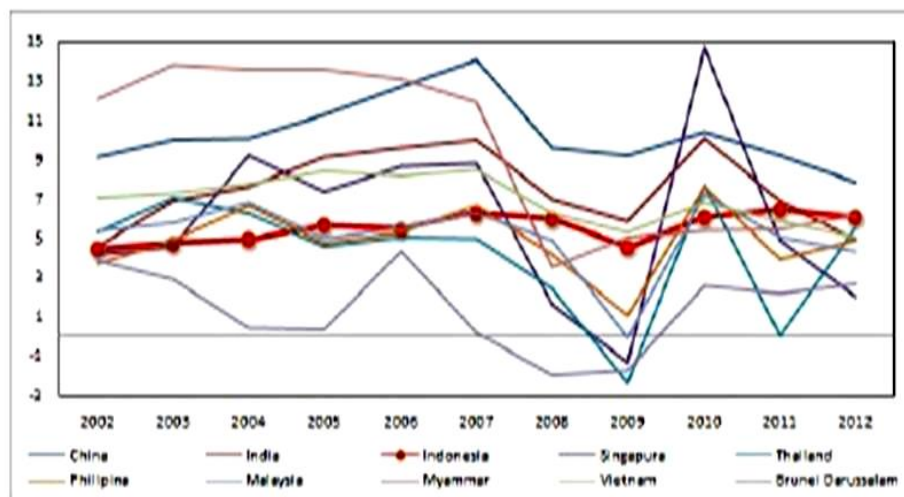
Kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 dapat dilihat dari perbandingan aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekspor nasional serta pendapatan perkapita nasional masyarakat Indonesia. Kesiapan Indonesia jika



dilihat dari **aspek pertumbuhan ekonomi** Berdasarkan laporan pertumbuhan ekonomi yang dilansir oleh IMF pada tahun 2012, terlihat bahwa bahwa pada 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat stabil di kisaran 5,5 persen  $\pm$  1 persen dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,11 persen. Sejak tahun 2007 hingga 2012, tingkat pertumbuhan hampir selalu di atas 6 persen dengan pengecualian tahun 2009 (4,6 persen) sejalan dengan krisis ekonomi global akibat kegagalan sektor kredit properti dimana sebagian besar negara bahkan mengalami pertumbuhan minus. Tren tersebut berbeda

bila dibandingkan dengan Singapura yang memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,55 persen, namun fluktuasinya sangat tinggi mulai dari 14,7 persen (2010) setelah mengalami kontraksi -1,3 persen (2009).

No	Negara	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata2
1	Indonesia	4.5	4.8	5.0	5.7	5.5	6.3	6.0	4.6	6.1	6.5*	6.1*	6.11
2	Singapura	4.2	4.6	9.2	7.4	8.7	8.8	1.7	-1.3	14.7	4.9*	2.1*	6.50
3	Thailand	5.3	7.1	6.3	4.6	5.1	5.0	2.5	-2.3	7.7	0.1*	5.6*	4.70
4	Philippina	3.7	4.9	6.7	4.8	5.3	6.7	4.2	1.1	7.6	4.0*	4.9*	5.39
5	Malaysia	5.4	5.8	6.8	5.0	5.6	6.3	4.9	-1.5	7.2	5.1*	4.4*	5.65
6	Myanmar	12.1	13.8	13.6	13.6	13.1	11.9	3.6	5.1	5.4*	5.5*	6.2*	10.39
7	Vietnam	7.1	7.3	7.8	8.4	8.2	8.5	6.3	5.3	6.8	5.9*	5.1*	7.67
8	Brunei Darussalam	3.9	2.9	0.5	0.4	4.4	0.2	-1.9	-1.7	2.6	2.2*	2.7*	1.62
9	China	9.1	10.0	10.1	11.3	12.7	14.1	0.6	9.2	10.4	9.2*	7.9*	11.36
10	India	4.6	6.9	7.6	9.1	9.6	10.0	7.0	5.9	10.1	6.9*	4.9*	8.26



Sumber : IMF , 2012

Demikian pula halnya dengan Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam yang tidak lepas dari imbas krisis global tahun 2009, sehingga turut mengalami pertumbuhan yang minus. Pertumbuhan ekonomi Vietnam memang menunjukkan tingkat yang selalu lebih tinggi dibandingkan Indonesia dari periode 2002 hingga 2010, namun terlihat mulai mengalami *overheating* dan melambat pertumbuhannya. Sedangkan Myanmar mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi

yang hampir mirip dengan Indonesia, secara umum pertumbuhan ekonomi masyarakat ASEAN tidak lebih jauh dan lebih tinggi dari pertumbuhan Indonesia, oleh karena itu daya saing Indonesia ditingkat ASEAN masih cukup kuat.

Pertumbuhan ekspor Indonesia secara kolektif sempat mengalami stagnasi terutama pasca krisis ekonomi tahun 1998, nilai ekspor non migas pada tahun 1990-1996 berada pada 16 persen per tahun, sementara setelah krisis moneter ekspor non migas mengalami penurunan hingga hanya mencapai 3 persen bahkan hingga akhir tahun 2003. Dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor nasional juga mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2013, pertumbuhan ekspor non migas Indonesia mengalami peningkatan sebesar 6,5 persen dibanding November 2013, bila dibandingkan dengan Desember 2012 ekspor mengalami peningkatan sebesar 10,33 persen. Peningkatan ekspor Desember 2013 disebabkan oleh meningkatnya ekspor nonmigas sebesar 3,09 persen demikian pula ekspor migas naik sebesar 23,07 persen, peningkatan ekspor yang positif memperlihatkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi ACFTA dan MEA 2015.

Sedangkan berdasarkan pendapatan perkapita nasional terlihat bahwa pendapatan perkapita nasional masyarakat Indonesia mengalami peningkatan sebesar 8,8 persen dari tahun 2012, dari 33,5 juta menjadi 36,5 juta. Sepanjang 2013, PDB Indonesia tercatat sebesar Rp. 9.084 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB) sedangkan PDB atas dasar harga konstan adalah Rp. 2.770.3 triliun. Untuk kuarta IV 2013 PDB ADHB sebesar Rp. 2.367.9 triliun, dan ADHK sebesar Rp. 699.9 triliun, angka ini naik dibanding kuartal IV 2012, dimana PDB ADHB sebesar Rp. 2.092,4 triliun dan ADHK sebesar Rp. 662.1 triliun.

Namun pendapatan perkapita Indonesia yang sebesar US\$4.700 masih jauh jika dibandingkan Thailand yang mencapai kisaran US\$10.000, Malaysia mencapai US\$ 15.000 dan singapura sudah melebihi US\$50.000, keadaan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum merata, kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bermasalah, secara penghasilan masyarakat Indonesia masih kalah dari negara lainnya. Pembukaan ACFTA dan MEA justeru akan menjadikan migrasi besar-besaran masyarakat Indonesia menjadi pekerja-pekerja negara-negara lain. Secara ekonomi keadaan ini menguntungkan Indonesia dalam pemanfaatan MEA 2015, namun secara jangka panjang, Indonesia akan kehilangan sumberdaya manusia terbaiknya dalam kegiatan pembangunannya. Meskipun demikian, posisi Indonesia masih bisa dikatakan siap untuk menghadapi MEA 2015 dengan pendapatan perkapita yang terus meningkat setiap tahunnya.

### **C. Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas Kunci Sukses Hadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN.**

Dalam bidang ekonomi dan industri, pada tahun 2015 Indonesia akan menghadapi era *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai konsekuensi dari berlakunya kesepakatan internasional. Ada 12 sektor prioritas MEA 2015 yang disebut *free flow of skilled labor* ( arus bebas tenaga kerja terampil) yaitu: perawatan kesehatan (*health care*), turisme (*tourism*), jasa logistik (*logistic services*), E-ASEAN, jasa angkutan udara (*air travel transport*), produk berbasis agro (*agrobased products*), barang-barang

elektronik (*electronics*), perikanan (*fisheries*), produk berbasis karet (*rubber based products*), tekstil dan pakaian (*textiles and apparels*), otomotif (*automotive*), dan produk berbasis kayu (*wood based products*).

Beberapa persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia dalam rangka menghadapi MEA 2015, yaitu: 1) masih tingginya jumlah pengangguran terselubung (*disguised unemployment*); 2) rendahnya jumlah wirausahawan baru untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja; 3) pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja tak terdidik sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi rendah; 4) meningkatnya jumlah pengangguran tenaga kerja terdidik, akibat ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja; 5) ketimpangan produktivitas tenaga kerja antarsektor ekonomi; 6) sektor informal mendominasi lapangan pekerjaan, dimana sektor ini belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah; 7) pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran tertinggi dari 10 negara anggota ASEAN; ketidaksiapan tenaga kerja terampil dalam menghadapi MEA 2015; 8) tuntutan pekerja terhadap upah minimum, tenaga kontrak, dan jaminan sosial ketenagakerjaan; serta 9) masalah Tenaga Kerja Indonesia yang banyak tersebar di luar negeri.

#### **D. Tantangan MEA Bagi Indonesia**

Dalam beberapa kondisi, perekonomian Indonesia mengalami tantangan dalam menghadapi MEA 2015. Pemberlakuan MEA pada 2015 menjadi sebuah realita yang harus dihadapi oleh berbagai sektor industri, ditengah perbandingan kebutuhan pasar dengan tenaga kerja industri yang terjadi saat ini. Ekonomi nasional saat ini banyak didorong oleh kontribusi industri kreatif dengan melibatkan banyak generasi muda yang memiliki kreatifitas dan inovasi yang berorientasi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) hingga kini telah mencapai 55,2 juta yang tersebar di seluruh Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran strategis. Per akhir tahun 2012, jumlah UMKM di Indonesia 56,53 juta unit dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto 59,08 persen.

Kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 97,16 persen atau 107 juta orang. Namun, dengan segala peran strategis itu, hanya 20 persen dari total UMKM yang sudah terakses kredit bank. Usaha kecil menengah yang berkembang itu terdiri dari: (1) Usaha Percetakan, (2) Bisnis *Gadget* dan Pulsa, (3) Waralaba, (4) Bisnis Lewat Media Online (5) Usaha Kuliner (6) Bisnis Fashion (7) Bisnis Otomotif (Reparasi dan Modifikasi) (8) Bisnis Buku Teks Pelajaran. Kendala UMKM diantaranya ditengarai oleh minimnya faktor pemodal, sulitnya perizinan, faktor pasar yang lemah serta minimnya kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.

UKM pada dasarnya tahan terhadap arus krisis moneter pada tahun 1998 dan 1998 karena 4 faktor yaitu: (1) sebagian UKM menghasilkan barangbarang konsumsi (*consumer goods*), khususnya yang tidak tahan lama, (2) mayoritas UKM lebih mengandalkan pada *non-banking financing* dalam aspek pendanaan usaha, (3) pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam

arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja, dan (4) terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal.

Pada saat diberlakukannya MEA, UKM belum tentu dapat bertahan dari arus globalisasi yang sangat menekankan persaingan dalam masalah kualitas dan harga. Globalisasi dapat merontokkan pondasi-pondasi usaha kecil menengah dengan sangat cepat, karena psikologi pasar masyarakat Indonesia yang masih lebih senang dengan produk-produk impor. Dengan adanya perdagangan bebas yang masuk ke Indonesia, membuat pasar dalam negeri menjadi lesu karena masyarakat Indonesia lebih memilih dan suka terhadap produk luar. Dan setiap tahun dampak perdagangan bebas terhadap UKM Indonesia meningkat, hal ini disebabkan masih rendahnya daya saing produk asli Indonesia dibandingkan dengan produk luar yang memiliki kualitas yang bagus.

Di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang mengkhawatirkan ACFTA (Asean-China Free Trade Area) karena dinilai akan merugikan produsen dalam negeri yang akan berdampak pada beberapa aspek social lainnya seperti banyaknya perusahaan yang akan bangkrut yang mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja, sehingga semakin banyak angkatan penganggur di Indonesia, yang akan membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial di dalam masyarakat seperti kemiskinan dan meningkatnya tindakan kriminal di Indonesia. Perdagangan bebas ASEAN-Cina per 1 Januari 2010 membuat banyak industri nasional gulung tikar karena kalah bersaing. Akibatnya, angka pengangguran diperkirakan melonjak. Pengusaha Indonesia yang tak mampu bersaing dengan Cina akan gulung tikar atau mengurangi kapasitas produksinya.

### **E. Langkah Strategis Indonesia dalam Mempersiapkan Diri Menghadapi AEC 2015**

Secara garis besar, langkah strategis yang harus dilakukan antara lain adalah dengan melakukan pembenahan terhadap sektor-sektor potensial yang strategis dan terkait dengan mekanisme yang telah ditentukan ASEAN dalam rangka menciptakan pasar bebas dan yang berbasis internasional.

Langkah strategis tersebut diantaranya :

- a. Peningkatan Daya Saing Ekonomi
- b. Peningkatan Laju Ekspor
- c. Reformasi Regulasi
- d. Perbaikan Infrastruktur
- e. Reformasi Iklim Investasi
- f. Reformasi Kelembagaan dan Pemerintah
- g. Pemberdayaan UMKM
- h. Pengembangan Pusat UMKM Berbasis Website
- i. Penguatan Ketahanan Ekonomi
- j. Peningkatan Partisipasi Semua Unsur Negara

Sejauh ini, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia berdasarkan rencana strategis pemerintah untuk menghadapi AEC, antara lain:

- a. Penguatan Daya Saing Ekonomi
- b. Program ACI (Aku Cinta Indonesia)

- c. Penguatan Sektor UMKM
- d. Perbaikan Infrastruktur
- e. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- f. Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan

#### D. PENUTUP

ASEAN (*Asean Economic Community*) yang merupakan tujuan utama dari pencapaian integrasi ekonomi ASEAN ini membuka kesempatan tersendiri bagi negara-negara yang siap dalam menghadapi penerapan globalisasi ekonomi dalam sistem perkenomiannya baik dalam bidang perdagangan, jasa, investasi dan pergerakan sumber daya manusia yang lebih bebas. Bagi Indonesia sendiri, ASEAN *Economic Community* (AEC) mendatangkan beberapa tantangan dan peluang secara bersamaan. Dimana kondisi dalam negeri Indonesia sendiri yang sedang berada dalam tahapan reformasi menuju sistem yang lebih baik, dapat dikatakan mendapatkan stimulasi lebih dari pada hasil yang dijanjikan dalam pencapaian AEC 2015. Namun disamping itu, strategi yang harus disiapkan Indonesia dalam menghadapi AEC mengharuskan pemerintah Indonesia berjalan dengan lebih cepat, sehingga terkesan mengabaikan perkembangan dalam lingkup domestik yang berakibat munculnya kesan orientasi ketidaksiapan dalam menghadapi AEC pada tahun 2015. Selain itu, minimnya tindakan sosialisasi tentang AEC dan perkembangannya terhadap masyarakat luas juga menjadi salah satu hal yang krusial bagi pemerintah Indonesia, dikarenakan pemahaman masyarakat juga akan melambangkan kesiapan negeri ini.

Dengan jumlah penduduk 252 juta, masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki porsi keuntungan paling besar dengan 50 persen penduduk dari 600 juta penduduk ASEAN. Paling tidak ada 4 (empat) hal yang menjadi fokus dari pelaksanaan MEA, *pertama*, negara-negara di kawasan kesatuan pasar dan basis produksi. *Kedua*, MEA akan dijadikan sebagai kawasan dengan tingkat kompetisi yang sangat tinggi. *Ketiga*, MEA akan dijadikan sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata. *Keempat*, MEA akan diintegrasikan terhadap perkembangan ekonomi yang merata diantara seluruh kawasan ASEAN.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 50 persen dari penduduk ASEAN dan jumlah pendapatan perkapita yang lebih kecil dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapore dan Thailand, maka MEA 2015 sebenarnya lebih menguntungkan bagi pengembangan ekonomi Indonesia, terutama dalam pemerataan pendapatan, namun jika pemerataan itu tidak dilakukan dalam waktu yang cepat, Indonesia akan dapat kehilangan sumber daya manusia terbaik yang berpindah tempat untuk mencari penghidupan yang layak di luar Indonesia.

Dari aspek ketenagakerjaan, pembukaaan peluang kerja yang luas harus disertai dengan penguatan kapasitas masyarakat Indonesia. Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan pengiriman sumber daya manusia dengan kualitas profesionalitas yang rendah hanya akan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi “budak” di negari tetangga. Selain itu dengan pemberlakuan MEA Indonesia dapat menjadi peluang untuk perbaikan ekonomi domestik dengan masuknya investorinvestor yang berada di sekitar ASEAN, dengan asumsi bahwa

Indonesia merupakan pasar potensial maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami kemajuan yang signifikan, apalagi jika disertai dengan kuatnya peran pemerintah dalam menyiapkan insan-insan profesional, maka tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat Indonesia akan meningkat sekaligus.

Selain itu masyarakat Indonesia juga dapat memperluas investasi mereka di kawasan-kawasan ASEAN sehingga kemampuan produksi dan ekonomi domestik juga semakin bertambah membaik. Namun, pemerintah juga perlu membatasi dan memproteksi warga negara Indonesia yang akan berpindah mencari pekerjaan di luar Indonesia, jangan sampai mereka minim profesionalitas.

Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan *exploitation risk*. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

*Exploitation risk* harus diantisipasi dengan melakukan pembatasan-pembatasan regulatif yang bersifat khusus, diantaranya pelarangan warga asing untuk membeli dan memiliki tanah, larangan warga asing untuk mempekerjakan masyarakat lokal kurang dari 60 persen dari jumlah pekerja, larangan untuk membuat industri eksploratif yang dapat mengurangi dan mengganggu batas wilayah Indonesia, serta regulasi-regulasi lainnya yang dapat menciptakan eksploitasi kepentingan publik sehingga MEA 2015 benar-benar menjadi peluang bagi kemajuan ekonomi nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Association of Southeast Asian Nations (2008). ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT. Jakarta. ASEAN Secretariat.
- Afandi, Moch. Masykur. 2011. Peran dan Tantangan ASEAN Economic Community (AEC) dalam Mewujudkan Integrasi Ekonomi Kawasan di Asia Tenggara, Vol.8 No.1
- Anabarja, Sarah. Kendala dan Tantangan Indonesia dalam Mengimplementasikan ASEAN Free Trade Area Menuju Terbentuknya ASEAN Economic Community
- Fernandes, R.A (2014, Januari). YEARENDER: ASEAN Economic Community to play major role in SEA food Security
- Koesrianti. 2013. Pembentukan Asean Economic Community (AEC) 2015, Vol.13 No.2
- Mandala, Subianta. 2012. Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia dalam Kerangka Harmonisasi Hukum Kontrak ASEAN. Vol.1 No.2
- Nurhayati, Mafizatun. Analisis Integrasi Pasar Modal Kawasan ASEAN dalam Rangka Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN
- Plummer. M.G. & Yue.C.S (2009). Realizing the ASEAN Economic Community: A comprehensive Assesment, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies
- Sholeh. 2013. Persiapan Indonesia dalam Menghadapi AEC (Asean Economic Community) 2015
- Suatma, Jasa. 2012. Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi AEC 2015, Vo.4 No.1
- Winarno, Budi. Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi
- Yuniarti. 2013. Pendekatan Ekonomi dalam Politik Internasional, Vol.1 No.1
- Yufani, Elsa. 2012. Implikasi Asean Economic Community Blueprint Terhadap Perkembangan Perdagangan Indonesia ke Singapura



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**JEJARING KEBIJAKAN  
DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN  
(Studi Kabupaten Ponorogo)**

**Ardhana Januar Mahardhani, M.KP**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dalam rangka kerjasama antar daerah pada pengembangan Kawasan Selingkar Wilis yang terdiri dari enam kabupaten, selanjutnya oleh pemerintah provinsi Jawa Timur disebut dengan kawasan Tunggal Rogo Mandiri (Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Kediri). Kawasan Selingkar Wilis ini terletak melingkar di lereng Gunung Wilis, Provinsi Jawa Timur, keberadaan enam kabupaten yang melingkar di Gunung Wilis tersebut mempunyai karakteristik wilayah berserta keunggulan lokal yang berbeda, selain itu pada perkembangannya, kesepakatan antar kabupaten pada Kawasan Selingkar Wilis juga diproyeksikan akan dibangun jalan tembus sehingga memudahkan akses pada tiap kabupaten, yang tentu saja akan berdampak positif dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat. Didalam perencanaan dan pelaksanaan kerja sama daerah, perlu diperkuat wawasan dan komitmen pemerintah daerah tentang pentingnya kerja sama kewilayahan guna mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing. Dalam hal ini strategi yang digunakan haruslah jelas untuk meningkatkan produksi dan mengangkat produktivitas, terlebih lagi daerah perdesaan tersebut memerlukan banyak inovasi-inovasi pemecahan atas berbagai masalah yang muncul diberbagai sektor, diantaranya sektor pertanian dan sektor pariwisata.*

*Keyword : pengembangan kawasan selingkar wilis, kerjasama kewilayahan, inovasi*

**LATAR BELAKANG**

Pembangunan masih menjadi basis dalam rangka kemajuan bangsa, dalam kenyataannya keberlanjutan sektor lain seperti industri atau jasa juga akan selalu dipengaruhi oleh keberlangsungan sektor pertanian. Pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi hasil saja, tetapi juga memperhatikan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang ada di wilayahnya. Pembangunan pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Proses pembangunan ini lebih dikhususkan pada daerah perdesaan yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Menurut United Nations

dalam Rustiadi (2007: 24), pembangunan perdesaan adalah strategi yang direncanakan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat miskin. Didalam perencanaan dan pelaksanaan kerjasama daerah, perlu diperkuat wawasan dan komitmen pemerintah daerah tentang pentingnya kerjasama kewilayahan guna mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing. Persamaan visi pemerintah daerah adalah modal dasar dalam mewujudkan rencana dimaksud sehingga diperlukan kesadaran kolektif bahwa keberhasilan dalam melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan daerah tidak terlepas dari konektivitas dan sinkronisasi rencana pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini strategi yang digunakan haruslah jelas untuk meningkatkan produksi dan mengangkat produktivitas, terlebih lagi daerah perdesaan tersebut memerlukan banyak inovasi-inovasi pemecahan atas berbagai masalah yang muncul diberbagai sektor, diantaranya sektor pertanian dan sektor pariwisata. Salah satu permasalahan di sektor pertanian yang ada dampak dengan program pemberdayaan masyarakat perdesaan adalah agropolitan. Program agropolitan ini akan memanfaatkan kawasan perdesaan dengan basis pertanian secara luas, yaitu perikanan; perkebunan, kehutanan, dan peternakan, untuk kemajuan perdesaan dan perkembangan perekonomian masyarakat perdesaan menuju kemajuan. Pada dasarnya, pelaksanaan program agropolitan dipandang sebagai alternatif model pembangunan yang sangat menjanjikan, Rustiadi (2007: 92) menyebutkan bahwa dengan adanya pelaksanaan agropolitan ini justru akan mengatasi ketidakseimbangan yang terjadi antara perdesaan dan perkotaan, hal ini dikarenakan agropolitan merupakan suatu model yang mengandalkan desentralisasi, mengandalkan pembangunan infrastruktur setara kota di wilayah perdesaan, sehingga mendorong urbanisasi (peng-kotaan dalam arti positif).

Sedangkan dalam sektor pariwisata, Pendit (1990: 29) mengatakan bahwa pariwisata merupakan suatu sektor yang kompleks, yang juga melibatkan industri-industri klasik, seperti kerajinan tangan dan cinderamata, serta usaha-usaha penginapan dan transportasi. Ditambahkan pula bahwa pariwisata terdiri 10 unsur pokok, yaitu : 1) politik pemerintah, 2) perasaan ingin tahun, 3) sifat ramah tamah, 4) jarak dan waktu, 5) atraksi, 6) akomodasi, 7) pengangkutan, 8) harga-harga, 9) publisitas dan 10) kesempatan berbelanja. Menurut Joyosuharto (1995:46) bahwa pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi, yaitu: 1) menggalakkan ekonomi, 2) memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, 3) memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut maka diperlukan pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata, meningkatkan dan mengembangkan promosi dan pemasaran, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.

Dikemukakan pula oleh Pendit (1990) bahwa pariwisata mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, karena dapat menyediakan lapangan kerja, menstimulasi berbagai sektor produksi, serta memberikan kontribusi secara langsung bagi kemajuan-kemajuan dalam usaha-usaha pembuatan dan perbaikan pelabuhan, jalan raya, pengangkutan, serta mendorong pelaksanaan program kebersihan dan kesehatan, proyek sasana budaya, pelestarian lingkungan hidup



dan sebagainya yang dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik kepada masyarakat setempat maupun wisatawan dari luar.

Kawasan Selingkar Wilis ini terletak melingkar di lereng Gunung Wilis, Provinsi Jawa Timur, kawasan ini terdiri dari enam kabupaten, yaitu Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Madiun yang lebih dikenal dengan sebutan “Tunggal Rogo Mandiri”. Keberadaan enam kabupaten yang melingkar di Gunung Wilis tersebut mempunyai karakteristik wilayah berserta keunggulan lokal yang berbeda, selain itu pada perkembangannya, kesepakatan antar kabupaten pada Kawasan Selingkar Wilis juga diproyeksikan akan dibangun jalan tembus sehingga memudahkan akses pada tiap kabupaten, yang tentu saja akan berdampak positif dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Seperti diberitakan dalam <http://bappeda.jatimprov.go.id> bahwa untuk mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki, maka Gunung Wilis akan dikelola oleh enam daerah yang terletak disekitarnya. Enam daerah tersebut yakni Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Nganjuk, Kediri, dan Madiun. Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, yang menandatangani naskah kerjasama tersebut menjelaskan bahwa kerjasama itu bertujuan mengurangi kesenjangan masyarakat antar daerah. Caranya adalah dengan memaksimalkan potensi Gunung Wilis untuk kesejahteraan masyarakat. Gunung Wilis, kata pria yang lekat dengan sapaan Pakde Karwo itu, berpotensi sangat besar. Dan karena terletak di antara enam kabupaten itu, maka dibuatlah kesepakatan bersama untuk menjalin kerjasama dalam mengelola potensi yang ada. Langkah selanjutnya yang harus segera dilakukan adalah pemetaan dan mencari tahu apa saja potensi yang ada di masing-masing daerah atau wilayah. Baru kemudian membuat klaster sekaligus solusi apa yang dibutuhkan di daerah itu. “Kalau memiliki potensi pertanian, maka dibuatlah perencanaan dan bantuan apa yang cocok dan dibutuhkan untuk mengembangkan pertanian, agar masyarakat di daerah tersebut dapat dan bisa lebih baik kesejahteraannya. Demikian juga untuk potensi lainnya”, demikian disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan menjadi bahasan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kabupaten Ponorogo dalam pengembangan Kawasan Selingkar Wilis

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan: (1) Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan (3) Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dimensi wilayah sangat penting karena merupakan faktor yang harus diperhitungkan dalam menganalisis suatu program atau proyek yang diletakkan dalam perencanaan pembangunan (Adisasmita: 2008). Wilayah dikonotasikan dengan lokasi suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan-kegiatan ekonomi seperti industri atau pabrik, perusahaan, dan fasilitas pelayanan, dengan demikian pemilihan atau penentuan lokasi juga akan berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan-kegiatan tersebut.

Misra (Djakapermana, 2006) menyebutkan jika pengembangan wilayah merupakan upaya mendorong perkembangan wilayah melalui pendekatan komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi dan sosial.

Selanjutnya, landasan teori pengembangan wilayah berikutnya adalah yang dikemukakan oleh Albert Hirschmann (Sjarifuddin, 2006) dengan istilah *polarization effect* dan *trickling down effect*. Dia menegaskan, perkembangan suatu wilayah tidak terjadi bersamaan (*unbalanced development*), mengingat wilayah tertentu cenderung lebih cepat perkembangannya dibanding wilayah sekitarnya. Pandangan optimistis Hirschmann menegaskan *trickle down effect* pada gilirannya akan terjadi dari wilayah yang berkembang cepat ke wilayah yang hirarkinya lebih rendah. Selain itu juga oleh John Friedmann (Sjarifuddin, 2006), yang lebih menekankan pada pembentukan hirarki guna mempermudah pengembangan sistem pembangunan. Teori Friedmann kemudian populer dengan istilah *center-periphery theory* atau teori pusat pertumbuhan, dimana penetapan pusat-pusat pertumbuhan sebagai prioritas dalam pembangunan diasumsikan akan memberi efek positif bagi pengembangan wilayah belakangnya.

*Network theory* (teori jejaring) berkaitan dengan mekanisme serta proses yang berinteraksi dengan struktur jejaring tertentu dan menghasilkan dampak tertentu bagi individu dan kelompok (Borgatti dan Halgin, 2011; Pratomo, 2015: 118). Kata *network* menurut kamus Merriam-Webster (2015) adalah: *a) a system of lines, wires, etc., that are connected to each other, b) a system of computers and other devices (such as printers) that are connected to each other, c) a group of people or organizations that are closely connected and that work with each other.*

Dalam ilmu sosial istilah *network* digunakan pada tahun 1500-an untuk menganalisis dan memetakan hubungan dan dependensi personal. Dalam kasus kebijakan publik, konsep ini memberi perhatian pada bagaimana kebijakan muncul dari kesalinghubungan (*interplay*) antara orang dan organisasi dan memberikan gambaran yang lebih informal tentang bagaimana kebijakan riil dilaksanakan (Suwitri, 2011: 54).

Masih dalam ranah ilmu sosial, pada manajemen keorganisasian, jejaring sangat diperlukan untuk mendapatkan sebuah hubungan yang dinamis dalam melaksanakan segala aktivitasnya, bisa dalam hubungan sesama individu atau antar organisasi. Dalam suatu organisasi, jejaring kebijakan ini akan disebut subsistem kebijakan. Howlett dan Ramesh (1995: 125) menyebut subsistem kebijakan dibangun dari *sub-governments* yaitu kelompok-kelompok dalam masyarakat dan aktor pemerintah yang berinteraksi secara rutin dengan pola yang tetap, aktor dalam alternatif kebijakan tersebut dinamakan analisis kebijakan, organisasi yang mewadahi disebut subsistem kebijakan, dan arena perannya membantu pemerintah maka disebut *sub-governments*. Hubungan antara

pemerintah dengan kelompok kepentingan dalam masyarakat ini disebut jaringan kebijakan.

Jejaring dalam kebijakan memiliki pengertian yang berbeda dengan partisipasi, Jejaring kebijakan bukan hanya menuntut perantara atau keterlibatan para aktor sebagai partisipan, melainkan juga hubungan saling menguntungkan diantara partisipan, aktor pemerintah, swasta dan masyarakat. Jejaring kebijakan juga berbeda dengan koordinasi, dalam koordinasi terkandung suatu agreement diantara aktor untuk mencapai tujuan bersama dengan pemerintah sebagai aktor utama. Jejaring kebijakan justru mengandung konflik diantara aktor karena perbedaan kepentingan, namun konflik tersebut harus dapat dipersatukan dalam beberapa koalisi untuk mencapai tujuan dengan aktor utama tidak selalu dari unsur pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam masalah ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Dikatakan penelitian deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun buatan manusia, dalam hal ini yaitu menggambarkan bagaimana peran pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pengembangan Kawasan Selingkar Wilis.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka hal yang menjadi fokus penelitian, yaitu Identifikasi peran Kabupaten Ponorogo dalam rangka pengembangan Kawasan Selingkar Wilis

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari: (1) Data Primer. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan orang-orang yang terlibat, diantaranya: Bappeda, Staf Pemerintah daerah kecamatan sekitar, kelompok masyarakat, koperasi atau lembaga lainnya, masyarakat umum, dan sumber lain yang mendukung. (2) Data Sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari arsip dan dokumen-dokumen resmi yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) kabupaten ataupun instansi terkait, juga melalui jurnal, buku teks, atau artikel ilmiah lainnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki, maka Gunung Wilis akan dikelola oleh enam daerah yang terletak disekitarnya. Enam daerah tersebut yakni Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Nganjuk, Kediri, dan Madiun. Pelaksanaan kerjasama tersebut diresmikan melalui penandatanganan naskah Kerjasama Antar Daerah di Selingkar Gunung Wilis” TUNGGAL ROGO MANDIRI” yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Trenggalek, Rabu (11/6) siang.

Gubernur Jawa Timur Dr.H.Soekarwo, yang juga ikut menandatangani naskah kerjasama tersebut mengatakan, kerjasama itu bertujuan mengurangi kesenjangan masyarakat antar daerah. Caranya adalah dengan memaksimalkan

potensi Gunung Wilis untuk kesejahteraan masyarakat. Gunung Wilis, kata pria yang lekat dengan sapaan Pakde Karwo itu, berpotensi sangat besar. Dan karena terletak di antara enam kabupaten itu, maka dibuatlah kesepakatan bersama untuk menjalin kerjasama dalam mengelola potensi yang ada.

Hal ini perlu dilakukan, agar di kemudian hari tidak timbul masalah dalam pengelolaannya. “Untuk itu, di kesempatan yang baik ini saya selaku Gubernur dan Pemimpin di Jawa Timur mengingatkan pada semua Kepala Daerah yang telah menandatangani kerjasama, agar terus menindaklanjuti setiap perjanjian yang telah dibuat dan disetujui. Karena, setiap perjanjian itu syarat yang harus dibuat dan dimaknai dalam perencanaan dan kesepakatan serta pelaksanaan,” tegasnya

Pemerintah, kata Pakde Karwo, tidak akan bisa melaksanakan perjanjian yang telah dibuat bila tidak mendapat kesepakatan dari DPRD. Karena yang namanya pemerintahan itu adalah satu paket yakni Kepala Daerah ( Kepala Pemerintahan ) bersama DPRD. Oleh sebab itu, dalam penandatanganan kerjasama hari masing- masing daerah harus menghadirkan DPRD dan Forpimda untuk hadir sebagai saksi agar memahami apa saja yang tercantum dalam naskah perjanjian dan kerjasama dimaksud.

Langkah selanjutnya yang harus segera dilakukan adalah pemetaan dan mencari tahu apa saja potensi yang ada di masing- masing daerah atau wilayah. Baru kemudian membuat klaster sekaligus solusi apa yang dibutuhkan di daerah itu. “Kalau memiliki potensi pertanian, maka dibuatlah perencanaan dan bantuan apa yang cocok dan dibutuhkan untuk mengembangkan pertanian, agar masyarakat di daerah tersebut dapat dan bisa lebih baik kesejahteraannya. Demikian juga untuk potensi lainnya, “Ujarnya.

Di depan bupati dan forpimda enam daerah tersebut, ia juga menjelaskan tiga konsep pembangunan yang perlu diperhatikan. Yakni konsep kewilayahan, konsep sektor dan konsep kelompok bawah. Kalau ketiga konsep ini bisa dibuat dengan rapi dan runtut serta dapat dilaksanakan insyaallah semua masalah akan selesai. “Selama ini permasalahan yang sering muncul dan yang selalu menjadi kendala di pembangunan adalah masalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Dan karena ketidakadilan serta kesenjangan sosial inipun yang memicu disparitas tinggi di masyarakat,” jelasnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah infrastrukturnya. Infrastruktur seperti jalan rusak harus segera diperbaiki. Ini agar masyarakat pinggiran atau perbatasan di masing-masing wilayah tidak terisolasi dan dapat merasakan pembangunan yang sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.

Sejak ditanda-tanganinya Nota Kesepakatan Kerjasama (MOU) Selingkar Wilis “Tunggal Rogo Mandiri” tanggal 11 Juni 2014 di Pendopo Kabupaten Trenggalek oleh enam kepala daerah dan Gubernur Jawa Timur, masing-masing daerah menindaklanjutinya dengan menyusun perjanjian kerjasama. Keenam wilayah yang tergabung dalam kerjasama tersebut antara lain: Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk dan Kabupaten Kediri.

Salah satu tujuan kerjasama ini adalah untuk menyinergikan program-program pembangunan daerah bidang infrastruktur seperti infrastruktur jalan yang terintergarasi di perbatasan daerah di wilayah Selingkar Gunung Wilis sebagai

sarana optimalisasi pengembangan potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dengan terbukanya akses jalan diharapkan dapat mendorong perkembangan bidang-bidang lain seperti kemudahan dalam mobilitas orang dan barang baik dalam satu wilayah kabupaten maupun ke kabupaten lain. Disamping itu, akan mendorong pertumbuhan potensi daerah seperti jasa pariwisata, pertanian dan perkebunan.

Hasil identifikasi awal oleh anggota tim kerjasama Selingkar Wilis diperoleh data panjang trase jalan yang akan diplot/dikerjasamakan adalah sebagai berikut: 1) Tulungagung  $\pm 29,394$  Km; 2) Trenggalek  $\pm 18,950$  Km; 3) Ponorogo  $\pm 40,400$ ; 4) Madiun  $\pm 31,300$  Km; 5) Nganjuk  $\pm 34,855$  Km; 6) Kediri  $\pm 57,952$  Km. Dari masing-masing trase jalan kabupaten tersebut beberapa kabupaten seperti Kediri dalam satu wilayah kabupaten ada yang masih belum terhubung dengan wilayah lainnya. Kondisi ini ditemukan di Kecamatan Mojo dimana antara Desa Petungroto belum terhubung langsung dengan Desa Blimbing dan dari Desa Blimbing juga belum terhubung dengan Desa Jugo. Faktor utama yang menyebabkan belum terhubungnya ketiga desa tersebut adalah kondisi geografis desa yang berada di wilayah perbukitan yang dipisahkan oleh cekungan jurang dan sungai. Selain itu antar desa juga masih dipisahkan oleh kawasan hutan milik Perhutani sehingga belum dimungkinkan untuk dibuka jalan antar desa. Wilayah yang belum terhubung juga ditemukan antara Desa Joho Kecamatan Semen dengan Desa Krampyang Kecamatan Banyakan.

Untuk menggali informasi, kendala dan fakta di lapangan, tim teknis Provinsi Jawa Timur didampingi oleh tim dari Kabupaten Kediri (Bappeda, Dinas PU dan Bagian Pemerintahan) pada tanggal 8 Juni 2015 melakukan survei di sepanjang trase jalan wilayah Kabupaten Kediri yang dimulai dari titik perbatasan Tulungagung – Kediri (Desa Petungroto Kecamatan Mojo) sampai dengan titik perbatasan antara Kediri – Nganjuk (Desa Parang Kecamatan Banyakan). Hasil identifikasi awal ini nantinya dapat dijadikan sebagai pertimbangan teknis oleh Tim dari Provinsi Jawa Timur dalam menetapkan rencana tindak lanjut baik berupa studi kelayakan maupun perencanaan dan penganggaran pembangunan trase jalan.

Berdasarkan hasil rapat tanggal 26 Mei 2015 di Biro Administrasi Kerjasama Setdaprov. Jawa Timur terkait dengan kerjasama pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar daerah di wilayah Selingkar Gunung Wilis adalah telah tercapainya kesamaan pandangan terhadap trase jalan yang akan dibangun di selingkar Wilis. Namun demikian untuk mengetahui kelayakan pembangunannya perlu pengecekan dilapangan/survey Tim Provinsi Jawa Timur dan SKPD terkait Bakorwil I Madiun, Sekretariat Bersama BKAD Tunggalrogo Mandiri dan anggota Sekber dimasing-masing Kabupaten BKAD.

Untuk wilayah Kabupaten Ponorogo trase jalan yang ada sepanjang 400,40 Km, yaitu mulai perbatasan dengan Kabupaten Trenggalek yang tepatnya di Ds. Masaran Kec. Bendungan dan Dsn. Buyut Ds. Ngadirojo Kec. Sooko di Koordinat  $1110\ 38'44.788''E\ 7057\ 6.549''S$ . Selanjutnya menuju Desa Suru Kec Sooko – Desa Pulung dan Desa Kesugihan Kecamatan Pulung – desa Gondowido dan Desa Pupus Kecamatan Ngebel. Di desa Pupus Kecamatan Ngebel inilah tempat perbatasan dengan Desa Kare Kec. Kare Kabupaten Madiun tepatnya pada

koordinat 1110 40`39.814"E 7046`27.907"S. Adapun sumber pendanaan pembangunan trase jalan tersebut dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur, APBN dan dari Dana lain yang tidak mengikat.

## PENUTUP

Kawasan Selingkar Wilis yang terdiri dari enam kabupaten, selanjutnya oleh pemerintah provinsi Jawa Timur disebut dengan kawasan Tunggal Rogo Mandiri (Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Kediri). Kawasan Selingkar Wilis ini terletak melingkar di lereng Gunung Wilis, Provinsi Jawa Timur, keberadaan enam kabupaten yang melingkar di Gunung Wilis tersebut mempunyai karakteristik wilayah beserta keunggulan lokal yang berbeda, selain itu pada perkembangannya, kesepakatan antar kabupaten pada Kawasan Selingkar Wilis juga diproyeksikan akan dibangun jalan tembus sehingga memudahkan akses pada tiap kabupaten, yang tentu saja akan berdampak positif dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Didalam perencanaan dan pelaksanaan kerja sama daerah, perlu diperkuat wawasan dan komitmen pemerintah daerah tentang pentingnya kerja sama kewilayahan guna mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing. Dalam hal ini strategi yang digunakan haruslah jelas untuk meningkatkan produksi dan mengangkat produktivitas, terlebih lagi daerah perdesaan tersebut memerlukan banyak inovasi-inovasi pemecahan atas berbagai masalah yang muncul diberbagai sektor, diantaranya sektor pertanian dan sektor pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djakapermana, Ruchyat Deni. 2006. *Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW)*. Jakarta: Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah RI
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Sound Governance*. Malang: UB Press
- Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Purnomo, Mangku. 2004. *Pembaruan Desa, Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Rustiadi, Ernan dan Sugimin Pranoto. 2007. *Agropolitan Membangun Ekonomi Perdesaan*. Bogor: Crestpent Press
- Rustiadi, Ernan, dkk. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Syarifudin. 2006. *Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Makalah Kuliah Terbuka Program Magister KAPET, Universitas Hasanudin Makasar
- <http://bappeda.jatimprov.go.id/2014/06/12/potensi-gunung-wilis-dikelola-bersama-enam-daerah/>
  - <https://sandyrizapermana.wordpress.com/>
  - <http://bappeda.ponorogo.go.id/index.php/beerita/bappeda/item/172-kegiatan-mapping-survey-trase-jalan-selingkar-gunung-wilis-bkad-tunggal-rogo-mandiri-kabupaten-tulungagung-trenggalek-ponorogo-madiun-nganjuk-dan-kediri-212-851-km>



**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL 2015**  
**PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA**  
**MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**  
**( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI**  
**INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH**  
**BATIK UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING**  
**BATIK PEKALONGAN DALAM MENGHADAPI MEA**

Oleh: Syarifah Khasna<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*The Government of Pekalongan made local regulation about Protection and Environmental Management Pekalongan. The purpose of this policy is to create the environment Pekalongan good and healthy. Various efforts have been made by the government to decrease the pollution with installation of waste water management.*

*This study discuss about policy evaluation batik-waste management in Pekalongan. In order to explain the results of the policy evaluation batik waste management used a qualitative research method. Subjects in this study is the government represented by the Environment Agency Pekalongan, batik entrepreneurs and communities. The method of data collection is through interviews and observations made by the selection of respondents using purposive sampling method.*

*Based on the evaluation by Inputs, Process, Outputs, Outcomes can be concluded that the batik-waste management policy in Pekalongan unsuccessful. It is caused by several factors such as the limited funds so that complicates the motion of the government to make some facilities and also of the low participation of batik businessman itself due to lack of funding.*

*Recommendations for the future are increased coordination with other institutions, to increase the synergy between government, communities and batik entrepreneurs to reduce batik-waste, and the existence of strict rules.*

**Keywords:** *Evaluation Policy, Batik-Waste Management, Pekalongan*

---

<sup>1</sup> Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro,  
website : <http://www.mia.undip.ac.id>.



## A. LATAR BELAKANG

Integrasi perekonomian lewat masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlangsung pada tahun 2016 merupakan hal yang penting untuk menghadapi tantangan global. Selain menjadi tantangan baru, MEA juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian. Salah satunya adalah meningkatkan daya saing produk lokal agar dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Diantara produk lokal yang menjadi produk andalan adalah batik Indonesia.

Indonesia memiliki banyak daerah penghasil batik salah satunya adalah Kota Pekalongan. Menjamurnya industri batik di Kota Pekalongan memiliki dampak yang beragam. Dari peningkatan ekonomi penduduk setempat yang memang banyak menggantungkan hidupnya pada industri ini sampai isu lingkungan. Isu lingkungan dan pencemaran terlihat dari aktifitas pembuangan limbah yang mencemari lingkungan. Sebagai industri kecil dan menengah, kerajinan batik memproduksi limbah industri yang berpotensi mencemari lingkungan.

Sebagai produk andalan dalam menghadapi MEA, maka perlu dilakukan pengelolaan limbah sebagai upaya untuk mengatasi isu lingkungan akibat limbah batik. Selain untuk mengatasi pencemaran lingkungan, hal ini juga dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing Batik Pekalongan dalam menghadapi MEA. Dengan menciptakan produk batik yang berkualitas serta ramah lingkungan akan meningkatkan daya saing Batik Pekalongan sehingga mampu menjadi produk andalan dalam menghadapi MEA.

Meskipun pengelolaan mengenai limbah batik ini sudah diatur dalam perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Pekalongan, akan tetapi mayoritas pengusaha batik di Kota Pekalongan masih membuang limbahnya langsung ke lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Adapun kendala dari pembuatan IPAL ini adalah kurangnya lahan serta biaya yang mahal sehingga sulit dijangkau mengingat industri batik di Kota Pekalongan mayoritas adalah usaha kecil. Akan tetapi, Pemerintah Kota Pekalongan sudah mengupayakan dengan membangun IPAL komunal di sentra industri batik. Nyatanya, daya tampung IPAL komunal tidak mampu menampung banyaknya limbah yang masuk.

Dari latar belakang tersebut maka dapat dilihat suatu kondisi yang kurang optimal dari upaya dari Pemerintah Kota Pekalongan dalam mengelola pencemaran limbah batik. Hal ini terlihat dari beberapa faktor, yaitu:

- a. Perkembangan industri batik di Kota Pekalongan memberikan dampak negatif bagi lingkungan.
- b. Masih banyak pengusaha batik yang membuang limbah langsung ke sungai tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu.
- c. Keberadaan Instalasi Pengolah Air Limbah komunal yang dibangun oleh Pemerintah Kota Pekalongan belum mencakup seluruh unit usaha batik.

Mengingat kompleksnya permasalahan tentang pencemaran air limbah batik di Kota Pekalongan, maka peneliti berusaha untuk mengetahui, meneliti, mengkaji serta memecahkan permasalahan tersebut dengan judul : “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik di Kota Pekalongan”.

## B. TUJUAN

1. Menganalisis keberhasilan kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan.
2. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pekalongan dalam kebijakan pengelolaan limbah batik.

## C.

### TEORI

#### 1. Kebijakan Publik

Pendapat dari Carl Friedrich mengatakan bahwa kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh James Anderson dalam bukunya *Public Policy Making* bahwa: Kebijakan publik adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” yaitu suatu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Dari beberapa konsep mengenai kebijakan publik di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Kebijakan publik sebisa mungkin bersifat adil dan seimbang dalam rangka mendorong kemajuan kehidupan bersama.

Dalam mengeluarkan suatu kebijakan publik, pemerintah daerah selain harus memperhatikan sinkronisasi peraturan daerah tersebut dengan kebijakan nasional, juga harus memperhatikan kesinambungan antar tahapan dalam pembuatan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan kebijakan publik merupakan kajian yang bersifat dinamis dan berkelanjutan. Isa Wahyudi memberikan perumusan yang lebih dalam mengenai tahapan kebijakan yang meliputi lima tahap, yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian kebijakan.

Banyak yang mengira bahwa siklus kebijakan akan berakhir setelah dilakukan evaluasi, namun dengan adanya evaluasi akan memunculkan agenda kebijakan baru dengan optimisme dan pertimbangan-pertimbangan baru. Dengan demikian, pengambil kebijakan harus memahami siklus atau tahapan dan dinamika kebijakan publik agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

2. Evaluasi Kebijakan

Menurut Anderson dalam Winarno<sup>2</sup>, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan menurut William Dunn, evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan.

Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil di masa yang akan datang. Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilaksanakan dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya.

Untuk menilai keberhasilan kebijakan perlu dilakukan pengukuran melalui beberapa indikator. Hal ini dikarenakan, apabila hanya menggunakan satu indikator saja maka hasil penilaiannya akan bias. Secara umum Bridgman & Davis mengemukakan evaluasi kebijakan mengacu pada empat indikator pokok, yaitu indikator *input*, *process*, *outputs*, dan *outcomes*:

1. Indikator *input* memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator input dapat meliputi sumberdaya manusia, uang atau infrastruktur lainnya.
2. Indikator *process* memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektifitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
3. Indikator *outputs* (hasil), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu, berapa penduduk miskin yang sudah tercover dalam kebijakan tertentu, demikian seterusnya.
4. Indikator *outcomes* (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Apakah dalam jangka panjang penduduk miskin dapat *empowered* sehingga mampu keluar dari lingkungan kemiskinan? Apakah kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi dalam jangka lama? Demikian seterusnya.

Indikator-indikator tersebut terintegrasi pada masing-masing tipe evaluasi dimana evaluasi nantinya akan menghasilkan rekomendasi apakah sebuah kebijakan publik layak diteruskan, dipertahankan atau dihentikan sama sekali.

#### D. METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan maka penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati. Penelitian ini dimaksudkan

---

<sup>2</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori & Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2007, hlm. 166.

untuk mengumpulkan informasi mengenai status fenomena, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

## E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik di Kota Pekalongan

Evaluasi kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan diperlukan untuk melihat tingkat keberhasilan kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan dan sebagai bahan masukan untuk kebijakan masa yang akan datang. Berdasarkan indikator evaluasi kebijakan Bridgman & Davis, maka penelitian mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan akan diuraikan melalui empat indikator pokok yaitu: input, proses, output dan outcome.

#### a. *Input* Kebijakan

*Input* kebijakan merupakan suatu masukan yang memberikan penilaian terhadap suatu sumber daya pendukung dan sumber-sumber daya dasar yang diperlukan guna melaksanakan suatu kebijakan. Keberhasilan dan kegagalan suatu input dari kebijakan pemerintah Kota Pekalongan mengenai pengelolaan limbah batik dianalisis berdasarkan hasil-hasil temuan dari penelitian yang ada di lapangan yang terkait dengan masalah input kebijakan ini. Penjelasan mengenai input kebijakan pengelolaan limbah batik di pekalongan meliputi: ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan dana dan ketersediaan fasilitas.

Pemerintah Kota Pekalongan sudah mempunyai sumber daya manusia yang memiliki kemampuan serta terlatih. Selain itu, Perlengkapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan limbah batik sudah memadai.

Namun demikian, terdapat kelemahan yang dimiliki oleh Pemkot Pekalongan dalam *input* kebijakan ini yaitu kelayakan jumlah staf dengan tanggungjawab dan tugas yang harus dilakukan, kurangnya dana yang tersedia serta fasilitas yang kurang memadai.

#### b. *Proses* Kebijakan

Proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi metode yang digunakan serta efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.

Metode yang digunakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan masih kurang efektif. Penggunaan metode produksi bersih masih belum dapat dilakukan karena banyak pengusaha yang merasa keuntungan dan kualitas batiknya akan berkurang jika menggunakan pewarna alami. Selain itu, pembangunan IPAL Komunal maupun IPAL mini belum menjangkau seluruh pengusaha batik di Kota Pekalongan sehingga masih banyak limbah yang belum dikelola. Namun, Pemkot Pekalongan telah berhasil melakukan alokasi dana yang tepat dimana input dana sesuai dengan outputnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan tidak berhasil, dimana terdapat kelemahan, diantaranya: penggunaan metode produksi bersih serta IPAL Komunal dalam kebijakan pengelolaan limbah di Kota Pekalongan kurang efektif, ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai karena belum adanya peraturan yang jelas serta pencapaian hasil yang kurang maksimal.

#### c. *Output Kebijakan*

*Output* kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan.

Berdasarkan output kebijakan, dapat diketahui bahwa Pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan sudah menuju ke arah pencapaian tujuan. Selain itu, terdapat kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan. Meskipun jumlah IPAL Komunal tidak mengalami penambahan, selalu ada penambahan jumlah IPAL mini setiap tahunnya.

Akan tetapi, hasil penilaian terhadap output kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan menunjukkan adanya permasalahan pada ketidaksesuaian antara hasil dan tujuan yang ditetapkan, jumlah peserta kebijakan yang belum sesuai dengan target yang diharapkan serta pengaplikasian kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan yang sulit diterapkan.

#### d. *Outcomes Kebijakan*

*Outcomes* (dampak) memfokuskan diri pada dampak yang akan diterima oleh masyarakat luas akibat kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dampak tersebut bisa positif maupun negatif.

Manfaat hasil kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan belum dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Pekalongan baik pengusaha batik maupun masyarakat pada umumnya. Daya tampung IPAL Komunal yang terbatas serta jumlah IPAL skala rumah tangga yang belum menjangkau seluruh industri batik di Kota Pekalongan membuat banyak masyarakat yang tidak terkena dampaknya.

Adapun konsistensi pemerintah Kota Pekalongan dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan limbah batik sudah baik. Namun. Sebaliknya konsistensi dari masyarakat dalam hal ini pengusaha batik justru belum berjalan dengan semestinya. Meskipun pemerintah sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi namun tidak disertai dengan kesadaran masyarakat maka kebijakan hanya akan jalan di tempat. Selain itu, harus terdapat sanksi yang tegas kepada industri yang mencemari lingkungan, maka secara otomatis pengusaha batik akan lebih patuh dengan ikut serta dalam program tersebut dan tidak akan membuang limbahnya sembarangan.

## 2. **Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Batik di Kota Pekalongan**

Setelah melakukan penelitian di lapangan mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa kendala yang dihadapi diantaranya: (1)kelayakan jumlah staf dengan tanggungjawab dan tugas yang harus dilakukan, (2)kurangnya dana yang tersedia, (3)fasilitas yang kurang memadai, (4)ketidakefektifan metode yang digunakan, (5)ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai karena belum adanya peraturan yang jelas, (6)pencapaian hasil yang kurang maksimal, (7)ketidaksesuaian antara hasil dan tujuan yang ditetapkan, (8)jumlah peserta kebijakan yang belum sesuai dengan target yang diharapkan, (9)pengaplikasian kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan yang sulit diterapkan, (10)manfaat hasil kebijakan pengelolaan limbah batik yang belum dinikmati oleh masyarakat Kota Pekalongan baik pengusaha batik maupun masyarakat pada umumnya serta (11)Konsistensi masyarakat Kota Pekalongan terutama pengusaha batik yang rendah.

**F.**

#### **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap *Input, Process, Output, Outcomes* dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan tidak berhasil. Hal ini disebabkan adanya beberapa indikator yang belum berhasil dicapai atau dilaksanakan, diantaranya sebagai berikut: (1)kelayakan jumlah staf dengan tanggungjawab dan tugas yang harus dilakukan, (2)kurangnya dana yang tersedia, (3)fasilitas yang kurang memadai, (4)ketidakefektifan metode yang digunakan, (5)ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai karena belum adanya peraturan yang jelas, (6)pencapaian hasil yang kurang maksimal, (7)ketidaksesuaian antara hasil dan tujuan yang ditetapkan, (8)jumlah peserta kebijakan yang belum sesuai dengan target yang diharapkan, (9)pengaplikasian kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan yang sulit diterapkan, (10)manfaat hasil kebijakan pengelolaan limbah batik yang belum dinikmati oleh masyarakat Kota Pekalongan baik pengusaha batik maupun masyarakat pada umumnya, (11)Konsistensi masyarakat Kota Pekalongan terutama pengusaha batik yang rendah.

**G.**

#### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan beberapa hal, seperti:

1. Diskusi kelompok, dialog-dialog, serta sharing pengalaman antar kelompok usaha batik perlu digiatkan agar terjalin transfer pengetahuan antar kelompok.
2. Melibatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya, tidak hanya Disperindagkop tetapi juga seperti dinas kesehatan untuk ikut menyadarkan masyarakat luas tentang bahayanya limbah batik secara medis.
3. Perbaikan dalam pengelolaan limbah batik perlu didukung oleh pemerintah dengan payung hukum yang lebih tegas. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi inkonsistensi pengusaha batik dalam pelaksanaan kebijakan.
4. Meningkatkan sinergi antara masyarakat, pengusaha batik dan pemerintah dalam menangani masalah pencemaran di wilayah sungai Kota Pekalongan. Hal ini dilakukan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan industri Pekalongan di satu sisi dan pembangunan kelestarian lingkungan pada sisi lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Atmosudirdjo, Prajudi S. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Badjuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ibrahim, Amin. 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, T. Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang. 2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Sistem Administrasi publik Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Wahyudi, Isa. 2008. *Memahami Kebijakan Publik dan Strategi Advokasi: Sebuah Panduan Praktis*, Malang: In-TRANS Publishing.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo.

### Sumber lain :

- Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.
- Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Pekalongan.



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**KEBIJAKAN PROMOSI SEBAGAI LANGKAH  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
“SAUNG ANGKLUNG UDJO “ MENGHADAPI MEA**

**Oleh : M.E. Tyas Wulan Wahyu D**

**ABSTRAK**

*Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan kemampuan menghadapi tantangan perubahan terutama globalisasi. Untuk menghadapi tantangan globalisasi, terutama kesiapan menghadapi MEA pada bulan Desember 2015 Indonesia perlu menyiapkan beberapa layanan kepada wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara secara mudah dan transparan*

*Sebagaimana diketahui Indonesia mempunyai potensi wisata budaya yang sangat banyak dan sangat potensial untuk dikembangkan. Salah satunya adalah SAU yang didirikan oleh budayawan Sunda bernama Udjo Ngalegena yang bertujuan untuk mempertahankan alat musik tradisional khas Sunda dan melestarikan peninggalan budaya kepada generasi muda.*

*Tujuan mulia SAU tersebut telah melahirkan karya –karya hebat dan inovatif, tetapi dalam perkembangannya SAU belum dapat mempromosikan kehebatannya secara modern masih secara mulut ke mulut. Sehingga untuk menarik wisatawan dan mendukung pelaksanaan MEA perlu dilakukan strategi promosi untuk menarik wisatawan mancanegara.*

*Kunci, MEA, ,Promosi, Strategi Pembangunan kepariwisataan, SAU*

**A. LATAR BELAKANG**

Pada Tahun 2003, saat disepakati Bali Concord II, para pemimpin ASEAN menyepakati untuk memberlakukan ASEAN Community 2015. Dalam kesepakatan ini mengandung tiga pilar utama yaitu politik dan keamanan, ekonomi, serta sosiokultural. Pada bidang ekonomi, membawa dampak pada pentingnya daya saing di tingkat regional, dimana Indonesia akan dihadapkan pada pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang akan dimulai pada 31 Desember 2015.



MEA memberikan tantangan tersendiri bagi Bangsa Indonesia, karena dengan integrasinya kawasan ASEAN akan menjadikan pasar tunggal dan basis produksi, serta menjadikan kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan kompetitif. (Eddy Cahyono, 2014). Hal ini dibuktikan bahwa Indonesia mempunyai potensi yang besar, lokasi geografis, strategis, potensi pelabuhan laut terbesar di ASEAN dalam sumber daya alam, populasi serta PDB (Adhi S Lukman; 2015).

Dengan potensi dan peluang yang dimiliki oleh Indonesia hendaknya momentum ini dimanfaatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan terlebih lagi secara paralel dengan kebijakan dipikirkan adanya regulasi yang mendukung pelaksanaannya (Adhi S Lukman, 2015). Salah satu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah adalah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations. Salah satu kebijakan yang dicanangkan untuk meningkatkan daya saing adalah dalam bidang pariwisata. Dimana pengembangan Kepariwisata, bertumpu pada pengembangan destinasi wisata dan pengembangan acara (*event*) pariwisata. Dengan pengembangan kepariwisataan akan meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia, sehingga tidak semata menjadi pasar bagi negara lain, dan membangkitkan kebanggaan pada Tanah Air. (Mahyudin, 2015).

Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia memiliki 17.504 pulau, dengan keanekaragaman suku bangsa dan budaya yang sangat khas. Di Indonesia terdapat lebih dari 700 suku bangsa, 3000 jenis tarian, ribuan jenis musik seperti gamelan dan angklung. Potensi budaya ini diharapkan akan menjadi modal utama untuk mengembangkan pariwisata dan menarik turis manca negara berkunjung ke Indonesia.

Namun sangat disayangkan bahwa pengembangan potensi budaya belum sepenuhnya dilirik oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dapat terlihat bahwa acara-acara kebudayaan belum dapat dikemas dalam suatu paket kegiatan yang utuh, yang mensinergikan pemerintah pusat dan daerah. Informasi yang dikelola oleh kementerian/lembaga belum terkoordinasikan dengan baik dan belum memanfaatkan fasilitas kemajuan teknologi yang ada seperti website, promosi yang ada belum menggali potensi-potensi yang ada seperti kesenian, adat istiadat, serta promosi yang dilakukan saat ini masih menampilkan keindahan alam yang ada di suatu daerah dan belum menggabungkan keindahan seni dan adat istiadat yang ada. Selain itu, pendekatan pengelolaan pariwisata Indonesia harus diubah, karena pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah lebih bersifat birokrasi bukan bisnis, dan perlu adanya badan independen yang mengatur keberlangsungan pariwisata (Hendri Saparini, 2014).

Pengembangan potensi budaya sebagai pendukung pembangunan pariwisata sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata, diwujudkan pelaksanaannya melalui

rencana pem-bangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Kekhasan budaya dan alam ini merupakan kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara lain mengingat banyaknya jenis tarian, alat musik dan jenis lagu yang berjumlah ribuan, akan memberikan nuansa tersendiri bagi wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara. Dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan manca negara yang datang ke Indonesia selama Januari-Agustus 2015 sebanyak 6.322.592 orang, dan hingga tahun 2019 ditargetkan jumlah kunjungan wisman mencapai 20 juta (Arif Yahya, 2015). Dengan target yang cukup fantastis, perlu dibangun suatu daya tarik bagi wisatawan dalam negeri maupun wisatawan manca negara. Daya tarik sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan (Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011) perlu dikaji, dikembangkan dan dikemas sehingga menjadi nilai jual yang sangat potensial untuk menambah devisa negara.

Pengembangan potensi pariwisata sebagai salah satu upaya untuk menarik wisatawan ini dituangkan lebih lanjut dalam Rancangan Pembangunan Nasional yang meliputi destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik; pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab; industri pariwisata yang berdaya saing; organisasi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

Terlihat jelas sinergitas yang ingin dibangun oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Namun sinergitas ini belum mendukung sepenuhnya perkembangan seni dan budaya yang tersebar di pelosok Nusantara. Salah satu contoh yang menarik adalah kesenian tradisional dari Jawa Barat yaitu angklung. Angklung merupakan alat musik multiton (bernada ganda), dibuat dari bambu berwarna hitam, dan dibunyikan dengan cara digoyangkan. Angklung sebagai warisan budaya yang pada mulanya didirikan oleh budayawan Sunda Udjo Ngalelana (lebih dikenal dengan Mang Udjo) pada tahun 1966, berkembang dengan pesat dan telah mendunia. Angklung membuktikan adanya perpaduan kekayaan budaya lokal dan desakan arus globalisasi mampu menjawab tantangan bahwa perpaduan seni dan budaya yang telah mengalami inovasi dapat memberikan tontonan dan hiburan yang menarik bagi wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara. Namun konsep yang ditawarkan oleh manajemen Angklung Mang Udjo yang selanjutnya disebut dengan Saung Angklung Mang Udjo (SAU) dalam mempromosikan kebudayaannya belum sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Daerah. SAU masih mengandalkan “promosi dari mulut ke mulut”, meskipun juga sudah mempunyai website [angklung-udjo.co.id](http://angklung-udjo.co.id), namun belum memberikan informasi yang selalu *up date*. Kotler & Keller (2007) dalam Budi Wahjono, mengemukakan bahwa *Word of Mouth Communication* (WOM) atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan

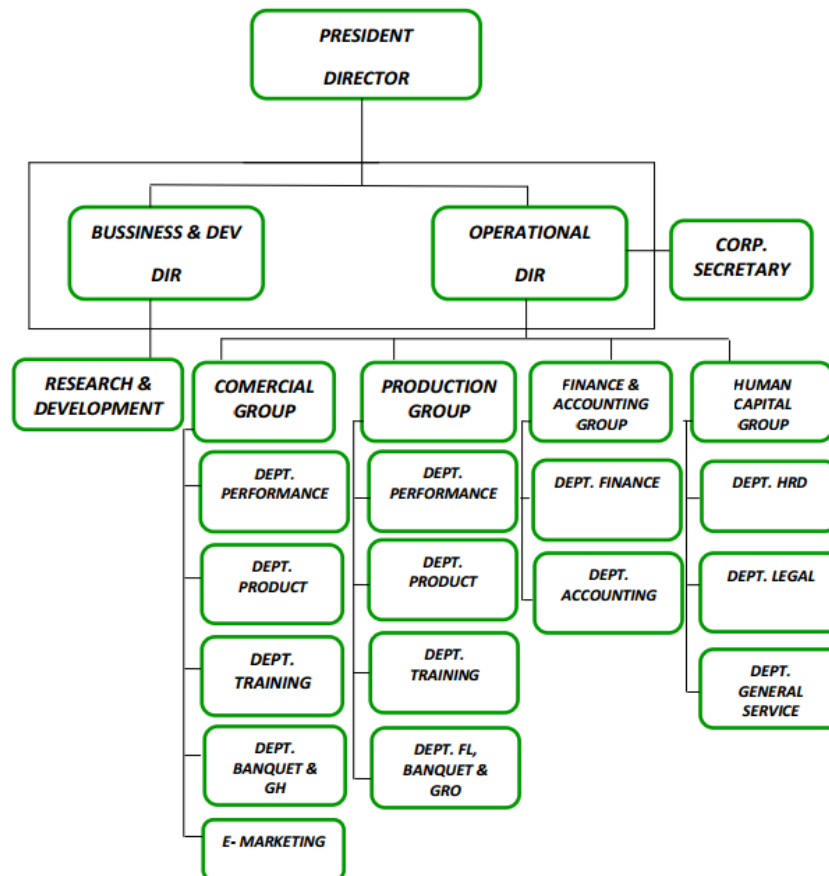
proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Promosi dari mulut ke mulut ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan sebagai saran yang efektif dalam memproses pemasaran. Hal ini tentu saja dapat dioptimalkan jika semua lini dapat mendukung promosi dari SAU, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun pihak-pihak swasta. Kebijakan dan peraturan yang telah buat oleh pemerintah perlu mendapatkan realisasi dan sosialisasi dalam pelaksanaannya. Diperlukan suatu jaringan yang menghubungkan antara negara dengan aktor masyarakat untuk menyatukan kebijakan. Jejaring kebijakan sebagai hubungan saling ketergantungan diantara aktor kebijakan, dimana kelompok dalam masyarakat dan aktor pemerintah diharapkan dapat berinteraksi secara rutin dengan pola yang tetap. Selain itu strategi promosi untuk menarik wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara untuk datang ke Indonesia perlu ditingkatkan. Komunikasi dan koordinasi sebagai jembatan dalam melaksanakan promosi pengembangan kepariwisataan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, para pengusaha, pihak hotel dan travel perlu lebih ditingkatkan sehingga promosi untuk menarik minat wisatawan domestik dan wisatawan manca negara dapat terkoordinasikan dengan baik, cermat, efektif dan efisien.

## **B. PRODUK, JASA DAN INOVASI SAU**

SAU berlokasi di Padasuka 118, Bandung, menempati lahan selus 1,3 hektar, ini setiap harinya dikunjungi tidak kurang dari 2000 orang (Travel, Kompas, 2014). SAU didirikan oleh budayawan Sunda bernama Udjo Ngalegena bersama istrinya Uum Sumiati, pada awalnya bertujuan untuk mempertahankan alat musik tradisional khas Sunda dan melestarikan peninggalan budaya kepada generasi muda.

Sejalan dengan perkembangan, SAU bukan hanya sebagai tempat menyaksikan pertunjukkan musik bambu, tetapi juga tempat melayani permintaan produk- produk alat musik bambu serta pelatihan dan pendidikan berbagai alat musik bambu. Untuk melayani permintaan produk alat musik SAU menerapkan manajemen kemitraan, dimana pembuatan angklung dilaksanakan oleh masyarakat sekitar dan SAU melakukan promosi dan penjualannya saja.

SAU saat ini memperkerjakan 100 orang pegawai dan mempunyai kurang lebih 500 orang murid. Dalam menjalankan usahanya SAU mempunyai manajemen, yang terdiri dari President Director, Bussiness & Development Director, Operational Director (membawahi Divisi Corporete Secretary SAU).



Sumber: Saung Angklung Udjo, 2011

## 1. Produksi dan Jasa SAU

SAU sebagai salah satu bisnis hiburan budaya Sunda, menawarkan beragam produk dan jasa yang bersumber dari nilai-nilai Sunda. Konsep hiburan yang ditawarkan oleh SAU antara lain:

### a. Pertunjukkan

- 1). Pertunjukkan Internal, meliputi Pertunjukkan Bambu Petang yang menampilkan demonstrasi Wayang Golek, upacara Helaran, tari tradisional, Angklung pemula, Angklung orkestra, masal dan Arumba. Pada akhir pertunjukan, para penonton akan diajak untuk menari bersama anak-anak.
- 2) Setengah Hari di SAU, dimulai dengan berjalan mengelilingi SAU, pemandu bercerita tentang sejarah singkat SAU, dan kemudian para peserta akan belajar membuat Angklung bersama para pengarajin Angklung, dilanjutkan dengan menonton sebuah pertunjukan bambu Kaulinan Urang Lembur di Bale Karesmen dan makan siang ala Kampung Sunda di taman belakang. Satu hal yang

menarik dari setengah hari di SAU, peserta akan diajak menceritakan pengalaman di SAU melalui karangan.

- 3) Workshop SAU, memberikan kesempatan kepada para peserta untuk membuat Angklung sendiri, dan akan dimainkan dalam pertunjukan bambu Kaulinan Urang Lembur – Angklung. Sebagai cenderamata angklung yang dibuat dapat dibawa pulang.

b. Pertunjukkan Eksternal, meliputi

- 1) Iwung, sebuah pertunjukan interaktif, yang menampilkan harmoni suara angklung memainkan lagu-lagu populer. Selain itu, sebuah Angklung bertanda khusus yang disesuaikan dengan acara tersebut akan diberikan sebagai cenderamata.
- 2) Awi (Interaktif dan Orkestra), menampilkan Iwung dan Angklung orkestra. Permainan Angklung orkestra, memberikan filosofi sebagai alat pemersatu yang dipercaya dapat menumbuhkan 72 semangat patriotik, terkadang dapat menggugah sisi emosional penonton.
- 3) Gombong Salah satu cara untuk merasakan semangat dan kemeriahan pertunjukan bambu Kaulinan Urang Lembur
- 4) Arumba (Alunan Rumpun Bambu) merupakan inovasi baru dari instrumen bambu, yang terdiri dari Angklung, bass Angklung dan Gambang. Arumba menggunakan tangga nada diatonik, sehingga dapat memainkan beragam jenis musik yang berbeda, dari tradisional, klasik, hingga kontemporer.
- e) Pertunjukkan Sunda Lainnya Mempersembahkan pertunjukan kesenian dan kebudayaan Sunda lainnya – mulai dari tarian Rampak Kendang dan Calung Cilik hingga prosesi upacara dan aktivitas masyarakat Sunda lainnya

2. Inovasi

SAU dengan misi melestarikan dan mengembangkan budaya, tetap menyelipkan sarana pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan memberikan beasiswa kepada anak didiknya di sanggar SAU kepada 500 orang anak didiknya, dengan harapan dengan melanjutkan sekolah sampai kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Selain memberikan beasiswa SAU juga melakukan inovasi dalam

a. Kemasan acara

Acara yang dipersembahkan kepada pemirsanya, dikemas sedemikian rupa, sehingga terkesan interaktif, sederhana dan sangat menarik. Interaksi yang aktif diperlukan mengingat penonton berasal dari wisatawan domestik dan wisatawan manca negara, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan terkadang diselipkan bahasa asing lainnya seperti Belanda, Korea, Mandarin, Perancis. Dalam durasi waktu 15.30 s.d. 17.30 WIB,

penonton diajak secara interaktif berpartisipasi dalam setiap acara dan diajak mengetahui, mengenal apa itu SAU, wayang golek, angklung, memainkan angklung dan menari bersama.

Panduan acara disusun dalam sebuah leaflet sehingga, penonton dapat membaca terlebih dahulu sinopsinya. Sinopsis acara disusun dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sinopsis ini berisi penjelasan mengenai acara yang akan ditampilkan, yaitu :

- 1) Budaya asli yang dilestarikan ditampilkan dengan sentuhan inovasi dan kreatifitas seniman yang elegan, sebagaimana terlihat dalam
  - a) Demonstrasi wayang golek; wayang golek adalah pementasan sandiwaranya boneka, yang dipentaskan dalam upacara adat, seperti bersih desa dan ngaruwat. Dalam pementasan ini biasanya diselipkan pesan moral agar selalu patuh pada Pencipta dan berbuat baik kepada sesama. Ditampilkan dengan sekitar 20 menit diiringi lengkap dengan musik gamelan dan angklung.
  - b) Helaran, adalah pertunjukan berbagai jenis kesenian daerah dimainkan untuk mengiringi upacara tradisional khitanan maupun upacara panen padi. Diiringi angklung dengan nada Salendro/Pentonis yaitu nada asli angklung Sunda yang terdiri dari Da Mi Na Ti La Da, sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan.
  - c) Tarian tradisional dan tarian kreasi baru ditampilkan secara bersama, dengan melibatkan seluruh anak berusia dua tahun sampai dewasa. Tari Topeng, tari merak, tari-tarian dari seluruh Pulau di Indonesia ditampilkan bergantian diiringi musik angklung
- 2) Alat musik yang berinovasi
  - a) Angklung mini, merupakan angklung yang berukuran minimalis yang tidak hanya berfungsi sebagai hiasan tetapi juga dapat memainkan lagu-lagu sederhana. Permainan ini ditampilkan oleh anak-anak kecil, dan mereka mengajak penonton untuk menyanyikan lagu seperti Melati Kenanga, The Song of Do Re Mi, Burung Kakaktua.



- b) Arumba, ( A: alunan, Rum: Rumpun, dan Ba untuk Bambu) adalah alat musik dari bambu yang menggunakan tangga nada diatonis, diciptakan oleh SAU pada tahun 1970.



- c) Angklung Massal Nusantara, merupakan perpaduan seni tari yang berasal dari berbagai daerah di kombinasikan dengan permainan angklung yang ditampilkan oleh murid SAU senior dan junior, secara middley.
- 3) Penonton diajak terllibat dalam pertunjukkan, selama proses acara, penonton selalu diajak terlibat baik itu untuk bermain angklung bersama atau menari bersama. Setelah menonton dan menyanyi bersama, penonton dibagikan alat musik oleh para murid SAU. Dibawah bimbingan instruktur dari SAU penonton diminta memainkan alat musik sesuai dengan tangga nada yang tertera pada angklung yang telah dibagikan. Harmonisasi alat musik angklung yang dibagikan peserta memberikan kegembiraan tersendiri bagi para penonton.

Sebagai puncak dari acara, penonton diajak untuk menari bersama oleh para murid SAU, diiringi alunan musik angklung dan tentu saja dengan menyanyi bersama. Puncak acara ini memberikan kesan tersendiri bagi para penonton karena penonton dapat berinteraksi dengan penonton yang lain maupun berinteraksi dengan para murid SAU yang masih junior.



Memainkan angklung bersama dan menari bersama

### C. Konsep Kewirausahaan yang dilaksanakan oleh SAU

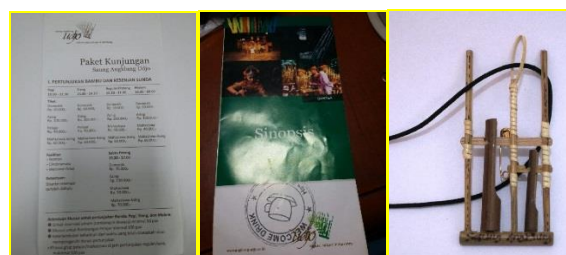
#### 1. *One Stop Shopping*

*One stop shopping* merupakan konsep berbelanja kebutuhan suatu produk dalam suatu tempat atau sekali pemberhentian. SAU telah menerapkan konsep tersebut dalam gerai bisnis hiburan yang dimiliki. SAU menerapkan strategi untuk melayani kebutuhan, keinginan dan permintaan pengunjung dalam satu tempat. SAU mempunyai

- a. Toko souvenir, menyediakan cenderamata angklung, wayang golek, gantungan kunci, batik khas Jawa Barat, yang dapat langsung dimiliki oleh peserta
- b. Penginapan *guest house*, sebagai perwujudan *one stop holiday*, menyediakan fasilitas penginapan bagi para tamu untuk menikmati wisata budaya Sunda, dengan harga kisaran Rp300.000 s.d. Rp900.000/malam.
- c. Makanan Tradisional Khas Sunda dan makanan internasional, melengkapi wisata budaya yang dikemas secara buffe ataupun paket.

Konsep *one stop shopping* ini sebagai bentuk SAU untuk menunjukkan daya kreativitas serta memperkenalkan hasil karyanya kepada pihak lain, sebagai perwujudan *entrepreneur* sejati.

2. Sikap hati-hati dan cermat untuk mendorong kesiapan pihak lain yang bersama-sama mencari keuntungan dan kemajuan, dibuktikan dengan kerjasama kemitraan bagi pengrajin di sekitar SAU, dimana SAU mempromosikan dan menjual angklung. Dan keterbukaan dalam memberikan informasi seperti paket pertunjukan bambu, program setengah hari dan program workshop





Daftar harga, leaflet sinopsis pertunjukan dan tanda masuk

### 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemasaran yang dilakukan oleh SAU ini disampaikan melalui media face book, twitter, dan website [www.angklung-udjo.co.id](http://www.angklung-udjo.co.id). Namun isi dari pemberitaan SAU dari ketiga jenis media tersebut masih banyak kekurangan, seperti kerjasama dengan travel, hotel maupun informasi acara terbaru dari SAU, belum terdata dalam laman face book maupun twitter.



### D. Peranan Pemerintah dalam perkembangan pariwisata

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan kemampuan menghadapi tantangan perubahan terutama globalisasi. Untuk menghadapi tantangan globalisasi, terutama kesiapan menghadapi MEA pada bulan Desember 2015 Indonesia perlu menyiapkan beberapa layanan kepada wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara secara mudah dan transparan .

Pelayanan ini merupakan syarat mutlak bila pemerintah ingin meningkatkan jumlah wisawatan untuk berkunjung ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyediaan layanan ini tidak hanya dari pemerintah saja , tetapi pemerintah harus bekerja sama dengan pengusaha, dan Pemerintah Daerah. Pelayanan yang diberikan ini tentu saja tidak terlepas dari adanya komunikasi yang harus terjalin dengan diantara para pihak.

Sebagaimana diungkapkan oleh Karl weick dalam Risa Oktaviana bahwa keberadaan aspek komunikasi, secara lebih khusus penggunaan fungsi, peran dan saluran komunikasi merupakan dasar bagi pengorganisasian manusia dan untuk mamahami manusia berorganisasi. Dalam berorganisasi ini, terdapat ide, gagasan tujuan yang semuanya akan terlihat dari visi dan misi yang tersusun secara terinci dalam program kerja pemerintah selama satu tahun atau lima tahunan. Gagasan dan ide –ide yang tertera dalam visi dan misi tersebut harus direalisasikan dalam program-program kegiatan dengan koordinasi dan komunikasi yang baik .

Komunikasi yang baik sederhana, baik dan menarik sangat diperlukan ketika Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta akan mengembangkan investasi di bidang pariwisata. Terdapat tiga arah kebijakan dalam pengembangan investasi pariwisata yaitu pemberian insentif, peningkatan kemudahan investasi dibidang pariwisata dan peningkatan promosi investasi pariwisata. Promosi sebagai komunikasi dari penjual dan pembeli yang berasal dari informasi yang tepat bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku (Laksana dalam Mariska, 2014: 7), mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan investasi ini. Promosi yang menampilkan daya tarik wisata seperti keunikan, keindahan, keanekaragaman kekayaan alam dan produk-produk pariwisata akan menimbulkan minat bagi para wisatawan untuk berkunjung.

Kemasan dalam mempromosikan budaya wisata Indonesia ini hendaknya melingkupi iklan, promosi penjualan, penjualan personal, public relation dan direct marketing. Sebagaimana diungkapkan oleh Fandy Tjiptono (dalam Mariska, 2014:7) bahwa yang dimaksud dengan;

1. Iklan, merupakan suatu bentuk komunikasi yang disusun sedemikian rupa berisi keunggulan produk, yang disiarkan melalui media cetak, siaran maupun film
2. Promosi penjualan, bentuk persuasi yang diberikan kepada pelanggan melalui pemberian hadiah, kupon dan diskon;
3. Penjualan personal dengan mengadakan komunikasi langsung, tatap muka antara penjual dan calon pembeli melalui pameran, atau presentasi penjualan
4. Public relation, merupakan penyampaian informasi secara menyeluruh yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan, berupa seminar ,publikasi maupun sponsor
5. Direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif dengan memanfaatkan suatu media atau beberapa media iklan dimana komunikasi langsung ditujukan kepada konsumen secara individual.

Konsep promosi yang yang terstruktur sebagaimana dikemukakan di atas, belum sepenuhnya menjadi bagian dari promosi budaya yang dijalankan di Indonesia terutama dalam promosi SAU. Kegiatan SAU akan menjadi daya tarik tersendiri apabila ada kerjasama yang saling terkait antara pihak pengelola hotel, travel dan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kemasan paket wisata yang digelar saat ini masih belum menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu paket wisata alam, wisata budaya dan wisata kuliner. Paket wisata yang ada hanya menonjolkan keelokan alam, dan belum menyentuh paket seni dan budaya. Apabila paket wisata budaya SAU menjadi tujuan wajib dari setiap paket wisata yang ditawarkan tidak mustahil akan menyaiingi

wisata yang ada di luar negeri, dan pengenalan budaya bangsa ke luar negeri akan menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Peranan iklan, ataupun public relation untuk memasarkan SAU dan beberapa paket wisata budaya masih sangat kurang. Hal ini terlihat pada beberapa hotel belum memajang ataupun membagikan leaflet tempat wisata budaya, tempat-wisata alam maupun wisata kuliner. Potensi wisata yang cukup banyak di Jawa Barat akan menjadikan tambahan pemasukan Pendapatan asli daerah yang cukup besar, mengingat Bandung menjadi salah satu tujuan wisatawan manca negara untuk berburu baju-baju terutama wisatawan dari Malaysia. Selain itu promosi pariwisata melalui media televisi perlu digalakkan sehingga masyarakat lebih mengetahui dan dapat melihat secara langsung potensi wisata yang ada. Hal itu dapat dilakukan dengan kerja sama dengan beberapa stasiun televisi yang ada di Indonesia. Selain promosi melalui media, dapat dilakukan dengan media surat kabar yang terbit dengan skala nasional ataupun skala daerah yang memberikan informasi tujuan wisata maupun potensi alam yang ada. Perlu diingat bahwa promosi ini meliputi produk, harga dan tempat, dimana dalam promosi ini dikembangkan sebuah komunikasi yang menentukan adanya pesan kunci yaitu apa yang ingin dikomunikasikan kepada audiensi, dan audiens percaya untuk melakukan dengan senang hati. Dalam hal ini diperlukan adanya kemahiran dalam menyusun gaya bahasa dan sentuhan yang diinginkan

( Philip Kolter dan Nancy Lee, 159). Dengan pesan kunci yang menarik, akan menimbulkan rasa percaya diri para audience untuk datang dan berkunjung ke Indonesia untuk melihat berbagai keindahan alam dan potensi wisata budaya yang ada.

Banyak hal untuk menarik wisatawan datang ke Jawa Barat, selain promosi melalui media di atas, yaitu melalui media sosial. Hal ini juga telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, namun, sosialisasi mengenai potensi wisata alam, wisata budaya dan wisata kuliner terutama SAU melalui media sosial ataupun website yang tergabung dalam Dinas Pariwisata belum sepenuhnya memberikan informasi yang akurat. Informasi tersebut masih sekedar tampilan yang memberikan informasi tujuan-tujuan wisata di Jawa Barat. Tampilan dalam website tersebut kiranya dapat memberikan informasi secara detail mengenai alamat, moda transportasi untuk mencapai tujuan wisata, dan yang terpenting adalah adanya layanan langsung melalui telpon yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang akan menjawab pertanyaan wisatawan yang meminta informasi tempat wisata. Biasanya di luar negeri ada tempat tertentu bertanda 'i.' Yang berarti informasi, dimana setiap wisatawan dapat memendatangi tempat tersebut dan meminta penjelasan mengenai pariwisata yang ada di suatu daerah. Selain itu tampilan informasi dalam bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa yang tergabung dala ASEAN perlu segera ditampilkan dalam websitenya, sehingga akan memudahkan wisatawan manca negara untuk memahami

dan secara tidak langsung akan menarik minat wisatawan untuk datang ke Indonesia.

Seperti yang diungkapkan oleh Drucker bahwa hampir setiap orang bisa menjadi wirausahawan, asalkan organisasinya disusun untuk mendorong kewirausahaan (David Osborn, 2000). Dalam hal ini peranan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah untuk mendukung usaha wisata budaya ini perlu diubah dari bersifat birokrasi menjadi bisnis. Adanya suatu pemikiran untuk membentuk Badan yang independen yang mengatur keberlangsungan pariwisata, dimana Badan ini terdiri dari pemerintah dan pelaku bisnis pariwisata, yang memiliki kantor pemasaran di berbagai negara. Keuntungan dari badan ini adalah lebih efektif dan mempunyai dana pengelolaan pariwisata yang tidak tergantung dari pemerintah (Hendri Saparini:2014). Meskipun saat ini dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 36 disebutkan bahwa pemerintah juga memiliki Badan Promosi Pariwisata Indonesia., yang bertugas untuk meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia, meningkatkan kunjungan wisata, menggalang dana dan melakukan riset dibawah Kementerian Pariwisata. Namun efektifitas dari lembaga ini patut dipertanyakan karena masih tergantung pada kementerian terkait (Hendri Saparini,2014). Keberadaan badan independen sebagaimana diulas oleh Hendri Saparini memberikan gagasan yang sangat efektif dalam promosi-promosi wisata baik itu wisata alam, budaya maupun kuliner menjadi satu kesatuan yang terorganisir, terstruktur dan terarah dan lebih mendunia karena mempunyai kantor pemasaran di luar negeri. Konsep ini apabila diterapkan, tidaklah mustahil SAU sebagai bagian dari warisan budaya akan menjadi salah satu tujuan wajib wisata budaya dan alat musik yang selama ini diproduksi oleh SAU akan memberikan nilai tambahan penghasilan karena banyaknya pesanan alat musik. Pendapat Hendri ini juga sejalan bahwa dalam penerapan konsep pariwisata terutama penanganan masalah dalam pengelolaan pariwisata dibutuhkan adanya Jejaring Kebijakan yang meliputi partisipasi, kerjasama, menampung keberadaan konflik, opini elit, pembentukan kelompok atau subsistem kebijakan yang baru. (Sri Suwitri; 2011). Sehingga penanganan pariwisata ini akan menjadikan lebih tersistematis, terarah dan terjali dalam satu kesatuan kebijakan. Adanya kebijakan nasional yang bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan pariwisata akan memberikan hal memudahkan wisatawan dalam mencari informasi. Misalnya ketersediaan jaringan, yang menghubungkan antara program pariwisata pemerintah pusat dan daerah yang terkoneksi dengan ketersediaan dan kesiapan hotel, travel dalam pelayanan akan membuat suatu sinergi dalam pelayanan.

Selain Badan independen, dan jejaring kebijakan, konsep *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*" (**Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran**), atau lebih dikenal dengan MICE, belum sepenuhnya diterapkan. MICE merupakan jenis kegiatan pariwisata yang

dirancang untuk kegiatan tertentu. Misalnya Pemerintah Bandung menggelar Festival Bandung, yang meliputi pameran kerajinan, pameran industri baju, pameran makanan tradisional dan pameran wisata budaya, yang dikemas dalam suatu paket wisata yang mengandung unsur edukatif, dan unsur bisnis yang nantinya akan meningkatkan dan lebih mengenalkan potensi daerah terutama wisata budaya. Meskipun potensi-potensi budaya tersebut telah berkeliling dunia dan mempromosikan keunggulan buayanya seperti halnya angklung yang dibawa oleh SAU, tetapi dengan adanya program pariwisata yang diadakan oleh daerah ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi daya tarik tersendiri, dan kemungkinan kelompok wisata budaya yang belum terkenal seperti SAU akan dapat diperkenalkan dalam acara tersebut. Peranan MICE ini dapat direncanakan dalam agenda nasional dan internasional secara tahunan atau secara triwulan, dengan mengambil tema Pesona Indonesia yang melibatkan banyak daerah yang ada di Indonesia.

Strategi dan kemudahan akses untuk mencapai daerah tersebut telah dituangkan dalam promosi SAU, namun mengingat moda transportasi yang nyaman dan aman di kota Bandung seperti taxi dan angkutan belum sepenuhnya memberikan rasa nyaman kepada wisatawan, seperti tarif yang tidak transparan dan tidak menggunakan argometer, akan menjadikan ancaman bagi pengembangan pariwisata kota Bandung. Hendaknya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan swasta memfasilitas moda angkutan yang nyaman dengan tarif yang jelas dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung. Sebagai contoh taxi berargometer dan taxi berstiker khusus wisata, atau mini bus yang ditempatkan di shuttle bus tertentu untuk membawa wisatawan berwisata gratis dan nyaman untuk rute tertentu. Rute tertentu ini tentu saja rute perjalanan wisata seni, wisata alam, wisata budaya dan wisata kuliner, yang diharapkan dapat mendorong kelangsungan industri kecil dan menengah usaha pariwisata.

Strategi di atas merupakan salah satu strategi Inovasi yang dilakukan, bukan hanya melakukan strategi yang hanya melakukan perubahan sederhana tetapi merupakan inovasi yang berarti dan khas. (Stephen P Robin: 1994, 139) Strategi inovasi selain moda transportasi, terlihat dari daya tarik wisata budaya yang tercermin dari inovasi SAU yang tercermin dari arumba dan angklung mini. Tontonan menarik dan memudahkan orang memainkan alat musik dengan nada do re mi fa so la si do. Alat musik sederhana yang dapat digabungkan dengan permainan alat musik jazz, dangdut akan membawa nuansa etnik dan unik sesuai dengan selera penikmat musik. Strategi ini hendaknya juga dibarengi dengan pembuatan cd yang berisikan alunan musik arumba dan angklung mini yang dapat diperjual belikan di SAU atau sebagai souvenir bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Sehingga akan lebih memperkenalkan potensi SAU dan menambah daya jual bagi kesenian di Indonesia

## D. KESIMPULAN

Perkembangan SAU sebagai potensi sumber daya wisata budaya perlu didukung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan para pengusaha bisnis pariwisata. Pemerintah perlu mempererat koordinasi dan promosi sebagai jalan utama untuk memajukan segala potensi wisata yang ada di Jawa Barat terlebih SAU, sehingga SAU menjadi prioritas utama atau ikon budaya di wilayah Jawa Barat. Prioritas ini selain untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, juga mempersiapkan MEA terutama dalam bidang budaya. Dimana jalinan budaya, memupuk kebanggaan dan persatuan bangsa akan lebih erat dan kokoh terjalin.

Selain koordinasi, perlunya promosi melalui media massa, media elektronik maupun media sosial sebagai sarana komunikasi antara wisatawan dan potensi pariwisata terlebih SAU perlu digalakkan. Promosi ini kiranya juga perlu diwadahi dengan pendirian Lembaga independen yang diharapkan dapat mempromosikan potensi wisata yang ada di Indonesia di luar negeri, sehingga target wisatawan yang akan dicapai di Indonesia dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kotler, Philip dan Nancy Lee. 2007. Pemasaran di Sektor Publik Panduan Praktis untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah, PT Indeks, Jakarta
- Meidila, Mariska. 2014. Aktivitas Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wakatobi dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata Wakatobi Sulawesi Tenggara, Sripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Osborne, David. 2000. Mewirusaha Birokrasi Reinventing Government Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke dalam Sektor Publik, PPM, Jakarta
- Oktaviana, Risa. 2012. Kebijakan Promosi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi, Arcan, Jakarta
- Suwitri, Sri. 2011. Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik, Suatu Akjian Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rop Pemerintah Kota Semarang, Badan Penerbit UNDIP, Semarang

### Peraturan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025

### Jurnal

- Cahyono Eddy . 2014. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Peran Birokrasi, SKP Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Jakarta
- Lukman, Adhi S, 2015. Menghitung Hari Menuju MEA, Kompas 12 Oktober 2015
- Suwitri, Sri. 2011. Jejaring Kebijakan Publik Kerangka Baru Penyelenggaraan Pemerintahan, UNDIP, Semarang

**Akses Internet**

<http://www.antaraneews.com/berita/519539/nasionalisme-solusi-hadapi-mea>, (wawancara dengan Wakil Ketua MPR, Mahyudin), 22 September 2015, diunduh 14 Oktober 2015

<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/02/27>, Ada Problem dalam Pengelolaan Pariwisata Indonesia, (Hendri Saparini), 27 Februari 2014, diunduh 14 Oktober 2015.

[http://www.kemenpar.go.id/asp/Siaran\\_Pers\\_Menpar\\_Optimis\\_3\\_Regulasi\\_Baru\\_mewujudkan\\_Pencapaian\\_Target\\_Wisman\\_Arif\\_Yahya\\_8-Okt-2015](http://www.kemenpar.go.id/asp/Siaran_Pers_Menpar_Optimis_3_Regulasi_Baru_mewujudkan_Pencapaian_Target_Wisman_Arif_Yahya_8-Okt-2015)

<http://www.pendidikanekonomi.com/2012/07/pengertian-komunikasi-word-of-mouth-wom.html>, Budi Wahyono, diunduh 14 Oktober 2015

[www.Angklung-udjo.co.id](http://www.Angklung-udjo.co.id)

<http://travel.kompas.com/read/2014/02/18/1140177/Serumpun.Bambu.dan.Angklung.di.Saung>, tanggal 18 Februari 2015. Diunduh 14 Oktober 2015

<http://www.tourismvaganza.com/mengenal-badan-promosi-pariwisata-indonesia-bppi>, diunduh pada 14 Oktober 2015



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**POLITIK KEBIJAKAN DALAM PROSES  
PERUMUSAN KEBIJAKAN  
TRANSPORTASI DARAT DI DKI JAKARTA**

**Oleh : Erie Syahrial**

*Abstract*

*Jakarta which's one city in developing world still remain battle in urban transport problem. Such characteristics like high intensity of urbanization, low of socioeconomic conditions, the limited of living space capacity due to macroeconomic pressures and space density. Review from existing model show that political formulating the model of urban transport mainly depend on structural and agent in policy networking. In the theoretical also found that policy networking would be appropriate in tackling the problem of urban tranport in Jakarta.*

*Keyword : urban transport, urban transport problem, policy networking*

**A. PENDAHULUAN**

Perumusan kebijakan transportasi pada hakekatnya adalah mendalami bagaimana pemerintah menyusun dan merumuskan kebijakan pelayanan transportasi yang berkualitas sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Oleh sebab itu perumusan kebijakan sektor transportasi harus menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Apa yang terjadi di Indonesia terutama di Jakarta nampaknya bukan merupakan masalah nasional tetapi telah pula menjadi perhatian dari para ahli transportasi darat di beberapa negara baik negara berkembang maupun negara maju. Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya Konferensi Model Transportasi Darat ke-9 di Seoul Korea Selatan pada tahun 2001, yang kemudian diperdalam pembahasannya pada Konferensi SIG (*Special Interest Group*) di Gouthenburg pada tahun 2009 ( Ison, Marsden & May, 2011: 489).

Proses perumusan kebijakan transportasi sebagai salah satu bagian dari kebijakan publik mempunyai peranan yang sangat penting terutama mendalami bagaimana mekanisme atau tahapan dalam penentuan alternatif kebijakan hingga perumusan kebijakannya. Proses perumusan kebijakan transportasi darat tentu saja tidak dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan elitis, rasional maupun inkremental. Proses networking kebijakan akan memberikan kontribusi



yang signifikan dalam pemecahan masalah transportasi darat. Dalam networking kebijakan ini maka peran aktor menjadi sangat dominan.

Suwitri ( 2011:53 ) menyebutkan bahwa networking antara aktor atau organisasi yang mempunyai pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan, antara lain: (a) eksekutif dan legislatif yang dihasilkan melalui pemilihan umum (*elected officials*); (b) pejabat atau birokrat yang diangkat (*appointed officials*); (c) kelompok kepentingan (*interest group*); (d) organisasi peneliti; dan (e) media massa. Selain lima hal tersebut, aspek lain yang berpengaruh dalam kebijakan publik antara lain: (a) bentuk organisasi negara; (b) struktur birokrasi; (c) organisasi kemasyarakatan; (d) kelompok bisnis.

Tulisan ini akan memfokuskan pada analisis terhadap proses perumusan kebijakan transportasi darat di DKI Jakarta dimana pertanyaan utamanya adalah “*Bagaimanakah politik kebijakan dalam perumusan kebijakan transportasi darat di DKI Jakarta ?*”

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1. Proses Perumusan Kebijakan**

Proses perumusan kebijakan transportasi darat pada kenyataannya melalui beberapa tahap yaitu tahap identifikasi masalah, tahap perumusan alternatif kebijakan, tahap penentuan agenda kebijakan, tahap diskusi publik, tahap pengambilan keputusan dan tahap legislasi.

#### ***Tahap Identifikasi Masalah Kebijakan***

Pada tahap identifikasi masalah kebijakan ini setidaknya terdapat persoalan mendasar yang terjadi pada pembangunan sistem transportasi darat di Jakarta. Setidaknya ada 2 (dua) poin utama yaitu persoalan teknis dan administratif. Pada aspek teknis antara lain (1) Lemahnya kinerja sistem jaringan jalan kurang mendukung sistem pergerakan. Pembangunan ruas jalan yang telah dilakukan untuk menghindari terkonsentrasinya volume kendaraan pada jalur utama seperti jalan lingkaran luar, seharusnya mengurangi beban kendaraan, tetapi dengan adanya *missing link*, *bottleneck* dan tidak konsistennya klasifikasi fungsional jalan dengan beban pada beberapa lokasi membuat solusi tersebut tidak berdampak signifikan. (2) Terjadinya kemacetan akibat konflik jaringan sebidang dengan jaringan Kereta Api. Dampak yang timbul dari konflik jaringan sebidang dengan jaringan Kereta Api adalah waktu tunda yang berlebih dan kesremawutan yang terjadi pada lokasi-lokasi simpang terutama pada saat pintu lintasan tertutup. (3) Terjadinya penyalahgunaan fungsi fasilitas jalan. Hal ini terjadi karena penurunan kapasitas jalan yang disebabkan karena penggunaan badan jalan untuk pejalan kaki, selain menurunkan kapasitas hal ini juga mengganggu keselamatan.

Pada aspek administratif terdapat persoalan antara lain menunjukkan bahwa sistem transportasi yang telah disusun di wilayah Jabotabek telah lama berada pada kondisi yang cukup memprihatinkan akibat kurangnya kebijakan yang jelas dan pasti mengenai kepemilikan, pengaturan lembaga, tarif dan skema keuangan. Satu-satunya perusahaan bus milik pemerintah, PPD, sekarang berada di ambang

kebangkrutan yang diakibatkan karena kerugian keuangan terus menerus, kegagalan manajemen, dan kebijakan pemerintah mengenai tarif yang ada. Sistem transportasi di Jakarta terjebak di tengah-tengah kebijakan yang tidak mengambil keputusan yang cukup berarti untuk mengarahkan sistem transportasi sesuai dengan permintaan dan ketersediaan pasokan.

### ***Tahap Perumusan Alternatif Kebijakan***

Pada tahap perumusan alternatif kebijakan terdapat 3 ( tiga ) poin penting yang telah diajukan antara lain terkait dengan (1) Perlunya penyusunan rencana pengembangan sistem transportasi jangka panjang yang terpadu dengan pengembangan perkotaan yang diturunkan dari RTRW DKI Jakarta 2010, (2) Perlunya penataan sistem transportasi perkotaan dengan mengembangkan konsep dasar manajemen sistem transportasi yang mempertimbangkan pengaruh peran serta wilayah disekeliling DKI Jakarta, (3) Perlunya pengembangan strategi penanganan sistem transportasi perkotaan yang disusun berdasarkan urutan prioritas, sehingga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam menyusun rencana sistem pengembangan transportasi kota.

### ***Tahap Penentuan Agenda Kebijakan***

Pada tahap penentuan agenda kebijaka maka terdapat 6 agenda utama yang telah muncul antara lain (1) meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas diseluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya dan menata ulang moda transportasi secara terpadu, (2) memasyarakatkan sistem angkutan umum massal, (3) menggalakkan penggunaan angkutan umum dan kereta api, (4) mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan, (5) menambah jaringan Bus Rapid Transit (BRT), Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) serta (6) meningkatkan jaringan jalan umu dan jalan tol.

### ***Tahap Diskusi Publik***

Ada beberapa poin utama yang menjadi bahan perdebatan pada saat dilakukan diskusi publik yaitu (1) masih adanya jumlah trayek yang tumpang tindih untuk efisiensi pengguna angkutan umum dalam menentukan trayek yang terbaik untuk tujuan perjalanannya, (2) transfer dari penumpang akibat pola trayek yang tidak optimal, sehingga meningkatkan kenyamanan perjalanan dan juga biaya yang minimum (3) persoalan terminal sebagai titik transfer untuk efisiensi ruang penggunaan praktek-praktek pemanfaatan terminal yang tidak sesuai dengan fungsinya, (4) penyelarasan moda kendaraan pelayanan yang berfungsi sebagai koridor utama/pelayanan utama dan pelayanan pengumpan, (5) pola perencanaan sistem trayek bus besar yang didasari pada pembagian zona. Pergerakan penumpang di dalam suatu zona selanjutnya merupakan perjalanan yang tidak mengalami transfer serta pertimbangan panjang trayek yang tidak berlebihan

### ***Tahap Pengambilan Keputusan***

Pada tahap pengambilan keputusan, maka peran Dinas Perhubungan DKI Jakarta mempunyai posisi yang sentral. Untuk mengatasi persoalan transportasi di DKI Jakarta setidaknya terdapat beberapa poin yang harus dimasukkan dalam Pola

Transportasi Makro yaitu (1) perlunya keterpaduan antara moda, pengembangan transportasi DKI Jakarta di tekankan dengan mengintegrasikan moda, (2) pembangunan prasarana transportasi jalan kereta api dan sungai, (3) pembangunan sarana transportasi yaitu angkutan jalan, angkutan kereta api dan angkutan sungai, (4) pengembangan fasilitas untuk penyandang cacat dan atau orang sakit, (5) pelaksanaan analisa dampak Lalu-lintas, (6) peningkatan retribusi, (7) pengembangan serta (8) peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian angkutan.

### ***Tahap Legislasi***

Pada tahap legislasi ini merupakan proses yang paling penting dimana usulan-usulan yang telah disusun oleh Dinas Perhubungan dan dipaparkan oleh Gubernur DKI Jakarta mendapat tanggapan yang cukup serius. Persoalan yang diperdebatkan antara lain : (1) apakah PTM DKI ini mampu mengantisipasi kecenderungan perkembangan daerah urban di kawasan Timur dan Barat serta di wilayah Bekasi dan Tangerang, (2) apakah sudah dipertimbangkan kecenderungan perkembangan tata guna lahan yang mengarah ke “*mixed land-use*” dan “*stretching*” dari pusat kegiatan ke arah selatan membutuhkan dukungan pengembangan jaringan jalan terutama dalam pengembangan kawasan-kawasan komersial baru. (3) Apakah PTM mampu menumbuhkan pengembangan jaringan jalan yang diarahkan untuk memberikan ruang kapasitas terhadap “angkutan umum bus” sesuai dengan porsi pergerakan orang, (4) Persoalan yang terkait dengan anggaran dalam pelaksanaan PTM, (5) sistem monitoring dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat di DKI Jakarta, (6) ketimpangan pembangunan antar wilayah serta isu-isu lain yang terkait dengan politik anggaran.

### ***B.2. Peran Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan***

Peran aktor dalam proses perumusan kebijakan dapat tercermin dari beberapa dokumen terkait dengan kebijakan transportasi darat. Pandangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang termuat dalam rencana aksi yang disusun yaitu dengan penerapan skenario yang memeberikan prioritas pengembangan pada sistem angkutan umum, termasuk didalamnya skenario penerapan manajemen permintaan transportasi. Pengembangan sistem ini terdiri dari dua jaringan transportasi utama dan satu transportasi alternatif yaitu (1) sistem jaringan jalan merupakan susunan dari pola jaringan jalan yang berbasis pada hirarki yang terdiri dari jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal, (2) penerapan sistem angkutan umum terdiri dari sistem angkutan umum berbasis jalan raya dan sistem angkutan umum berbasis jalan rel serta (3) penerapan sistem transportasi alternatif terdiri dari angkutan sungai dan kanal.

Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PTM DKI Tahun 2010 yang pada intinya antara lain : (1) skenario PTM DKI 2010 berbasis pada skenario RTRW 2010 dengan beberapa modifikasi pada sistem jaringan sesuai dengan *committed project* Pemprov DKI serta rekomendasi studi-studi yang telah dilakukan, (2) sistem jaringan jalan

sebaiknya diarahkan pada pengembangan jaringan jalan arteri pendukung pelabuhan, bandara, terminal-terminal utama dan angkutan barang. (3) sistem angkutan jalan raya diarahkan pada perluasan jaringan untuk timur-barat dan secara terbatas, (4) terjadinya peningkatan kapasitas sistem bus yang dibutuhkan mengoperasikan bus.

Beberapa pakar transportasi memberikan gambaran bahwa PTM DKI setidaknya berisi : (1) pengembangan sistem jaringan jalan mencakup pengembangan jaringan jalan arteri sehingga “arterial road spacing” dapat mencapai kondisi ideal, serta peningkatan kapasitas jalan dan simpang, (2) pengembangan sistem angkutan umum jalan raya merupakan kelanjutan dari pengembangan jaringan “bus priority” dan ditambah dengan pengembangan jaringan angkutan MRT/Metro/Subway, (3) mengingat waktu pelaksanaan kebijakan transportasi yang relatif panjang, interaksi guna lahan dan sistem transportasi perlu diperhatikan terutama terkait skema tata guna lahan mengingat kepadatan penduduk yang relatif sangat tinggi di DKI Jakarta.

Peran aktor pada tahapan legisalsi nampaknya merupakan aktor yang paling dominan, hal ini dapat terlihat dari intensif perdebatan beberapa aktor politik di DPRD propinsi DKI Jakarta. Perdebatan yang muncul sebgaiian besar adalah bukan terletak pada aspek teknis kebijakan transportasi akan tetapi lebih mengarah pada perbedaan kepentingan-kepentingan masing-masing anggota dewan. Semakin banyak partai dalam dewan maka akan dimungkinkan terjadinya perbedaaan kepentingan yang semakin tajam. Beberapa pengalaman yang terjadi dalam proses perumusan kebijakan, maka pada tahap legisalsi ini merupakan tahap yang paling krusial. Perumusan alternatif kebijakan akan sangat ditentukan oleh kemampuan lobi dari perumus kebijakan itu sendiri.

### C. PENUTUP

Proses perumusan kebijakan transportasi darat di DKI Jakarta telah mengalami beberapa tahapan utama dalam perumusannya. Tahap yang paling krusial terletak pada tahap legisalsi karena pada tahap ini berbagai kepentingan terutama kepentingan partai politik diperdebatkan pada tahap legisalsi ini. Pertanyaan utama yang selalu diperdebatkan dalam proses legisalsi ini adalah apakah setiap anggota dewan yang notabene mewakili partainya mendapatkan keuntungan dari perumusan kebijakan transportasi ini, selama kepentingan-kepentingan partai tidak mampu terwadahi maka proses legisalsi menjadi alot dan panjang. Dalam kontek ini, kemampuan lobi-lobi politik menjadi sangat esensial karena tanpa ada lobi maka proses perumusan dan penetapan kebijakan menjadi terhambat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2002, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.  
 Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika : Jakarta.

- Anderson, James E, 2006, *Public Policy Making: An Introduction*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Bach, Tobias, 2012, *The Involvement of Agency in Policy Formulation*, Policy and Society, 31, 211-222
- Barzelay, Michael, 1992 *Breaking Through Bureaucracy: A New Vision For Managing Government*. Berkeley, California ; University of California Press.
- Croley, Steven P., 2008, *Regulation and Public Interests: The Possibility of Good Regulatory Government*, Princeton: Princeton University Press
- Driscoll, M.L., 2008, *Using Policy Network Theory to Explain Local Policy Development and Implementation in The NHS*, Faculty of Health, University of East Anglia, UK.
- Dunn, William N. 1994. *Public Policy Analysis, Terjemahan*. Englewood Cliffs : New Jersey.
- Dunn, William, N. 2001, Muhadjir Darwin ( Editor ), Analisis Kebijakan Dwijowiyoto, Riant Nugroho, 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta
- Dye, Thomas R, 2005, *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall
- Keban, Y.T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Gava Media : Jogjakarta
- Osborne, David, and Plastrik P., 1997. *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*, Reading, MA: Addison-Wesley
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.

#### **Peraturan Perundangan**

- Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, *Penjelasan Gubernur Mengenai Transportasi*, Jakarta, 13 Maret 2013.
- Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, *Pola Transportasi Makro Jakarta*, Desember 2006.
- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Dinas Perhubungan Dalam Angka Tahun 2011*, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Naskah Akademis Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030*. Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013-2017*
- Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang *Keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan*, Jakarta



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT  
EKONOMI ASEAN**

Oleh: 1) Aji Primanto; 2) Dr. Sundarso, SU; 3) Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.

**ABSTRAK**

*Tahun 2015 merupakan sebuah tahun yang sangat penting bagi Negara-negara di kawasan ASEAN, karena di tahun itu akan dimulainya sebuah babak baru yang akan merubah segalanya khususnya kehidupan ekonomi masyarakat di kawasan ASEAN. Dengan ditetapkannya ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka kegiatan perekonomian di Negara-negara ASEAN mulai menuju ke arah pasar bebas. Bebas dalam hal aliran barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja (free flow of goods, services, investment, capital and skilled labor). Kebijakan Indonesia khususnya di Kota Semarang dalam menyongsong MEA 2015, sudah cukup tepat dan terarah, dimana hal itu bisa kita lihat dari persentase pertumbuhan sector ekonomi, PDRB, investasi permodalan selalu meningkat dan angka pengangguran yang berhubungan dengan tenaga kerja selalu berkurang setiap tahunnya di Kota Semarang pada periode 2011-2013. Hal ini menandakan bahwa Kota Semarang telah siap untuk melaksanakan kebijakan MEA di tahun 2015. Hanya saja perlu ditingkatkan kembali untuk kebijakan tenaga kerja agar lebih berkualitas, karena kedepannya persaingan akan menjadi lebih berat dan kompetitif. Hal tersebut dikarenakan tenaga kerja asing akan bebas masuk dan keluar untuk mencoba mencari pekerjaan di Indonesia khususnya di Kota Semarang.*

*Keywords:*

*ASEAN Economic Community (AEC), free flow of goods, services, investment, capital and skilled labor.*

**1. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN MEA**

Pada saat tahun 2015, Negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara tengah sibuk untuk menghadapi era baru dalam kegiatan perekonomian bebas yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). MEA adalah sebuah kebijakan kerjasama regional di tingkat ASEAN. Kebijakan ini lahir dari penandatanganan piagam ASEAN dan *Blueprint ASEAN* menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang dilakukan oleh para pemimpin di Negara-negara ASEAN dalam sebuah Konferensi Tingkat

Tinggi (KTT) ASEAN ke-13 yang dilaksanakan di Singapura pada tanggal 20 November 2007 yang lalu. Dalam KTT tersebut 10 Negara ASEAN yang hadir telah bersepakat untuk melakukan kebijakan integrasi di bidang ekonomi regional pada tahun 2015.

Kebijakan membentuk sebuah integrasi ekonomi regional tersebut bertujuan agar MEA dapat menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal yang berbasis pada produksi bersama, di mana hal itu dimungkinkan terjadinya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja yang terampil dan modal yang lebih bebas di kawasan ASEAN saat ini. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan guna memastikan adanya aliran bebas terhadap barang, jasa, modal, dan lain sebagainya, antara lain, pertama dengan meniadakan hambatan untuk pergerakan komoditas dan faktor produksi, kedua menghilangkan hambatan penyediaan jasa, serta ketiga menghapus hambatan modal masuk dan keluar melalui harmonisasi kebijakan di antara negara ASEAN. Hal diatas menandakan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil untuk Negara di kawasan ASEAN saat ini, *setelah* dilaksanakannya MEA akan mengkiplatkan *framework* perekonomiannya ke arah pasar bebas.

Globalisasi yang tengah berlangsung saat ini telah mengantarkan ASEAN pada harapan-harapan positif untuk dimulainya sebuah kebijakan ekonomi pasar bebas. ASEAN saat ini merupakan suatu kawasan pasar yang sangat potensial untuk dapat dimanfaatkan, dimana hal tersebut didasarkan pada pasar ASEAN yang sudah mencapai 625 juta orang dengan Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN yang termasuk cukup tinggi, yakni mencapai US\$ 3,36 triliun. Maka dari itu ditawarkanlah mekanisme pasar bebas sebagai berikut : Pertama, kebijakan untuk melanjutkan penghapusan hambatan tarif (*non-entry barrier*) dalam menyongsong pasar bebas 2015 yang ditentukan oleh kesiapan masing-masing negara berdasarkan jenis komoditas, kalau komoditi domestik belum siap maka dapat menunda penghapusan hambatan tarif. Kedua, kebijakan peran pemerintah sebagai promotor, pemrakarsa dan pendorong pasar bebas. Ketiga, kebijakan melakukan standarisasi kemampuan antar negara dalam berkompetisi ditinjau dari kuantitas dan kualitas produksi. Kebijakan ekonomi pasar bebas yang akan dilaksanakan di kawasan ASEAN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota ASEAN melalui intensitas perdagangan bebas antar negara anggota, hal itu dilakukan agar mampu menghadapi persaingan ekonomi pada lingkup skala regional dan global. Oleh karenanya saat ini Negara-negara ASEAN harus mampu dan juga dapat mempersiapkan kondisi perekonomiannya, agar dapat mengambil manfaat dan peluang dari pelaksanaan pasar bebas itu sendiri dengan merencanakan kebijakan yang tepat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah kebijakan yang dimaksud dalam banyak buku disepadankan dengan kata *policy* yang dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Budi Winarno dan Sholichin Abdul Wahab sepakat bahwa istilah 'kebijakan' ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design. Bagi para *policy makers* (pembuat kebijakan)

dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang di luar struktur pengambilan kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan (*policy*). Setiap definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena setiap ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda pula.

Seorang penulis mengatakan, bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it*).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Richard Rose (1969) sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Kemudian ada definisi lain yang disampaikan Carl Friedrich yang penting juga didiskusikan. Menurutnya kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berkenaan dengan definisi kebijakan ini, Budi Winarno (2005) mengingatkan bahwa dalam mendefinisikan kebijakan haruslah melihat apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan. Alasannya adalah karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai.

Beralasan hal tersebut, Budi Winarno menganggap definisi dari James Anderson yang mirip dengan definisi Friedrich sebagai yang lebih tepat. Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Jadi, definisi ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara



kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*) --pemilihan salah satu di antara berbagai alternatif kebijakan yang tersedia.

Berdasarkan diskusi di atas, kami ingin merumuskan definisi kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik --melalui kekuasaan pemerintah-- terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik. Keputusan itu bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan-tindakan. Kata 'publik' dapat berarti masyarakat dan perusahaan, bisa juga berarti negara --sistem politik serta administrasi. Sementara 'pemerintah' adalah orang atau sekelompok orang yang diberi mandat oleh seluruh anggota suatu sistem politik untuk melakukan pengaturan terhadap keseluruhan sistem --bisa RT, RW, desa, kabupaten, provinsi, negara hingga supra negara (ASEAN, EU) dan dunia (WTO, PBB).

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. Kebijakan Indonesia Dalam Menyongsong MEA

Indonesia, merupakan salah satu kekuatan ekonomi di kawasan ASEAN, dimana Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk bersaing di pentas perdagangan bebas MEA 2015 yang akan berlangsung. Hal itu dapat dilihat dari Pertumbuhan ekonomi yang stabil, meningkatnya kelas menengah, serta melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, semua factor tersebut merupakan modal utama Indonesia dalam menghadapi MEA. Dengan adanya *common market* di kawasan regional ASEAN akan berdampak langsung pada aliran investasi, perdagangan intra-regional dan juga penyerapan tenaga kerja yang lebih besar di ASEAN. Indonesia harus dapat melihat peluang yang ada sehingga mampu berperan sebagai 'pemain' dalam MEA, bukan hanya menjadi 'tempat pemasaran' bagi Negara ASEAN lainnya. Untuk menaikkan dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di kompetisi perdagangan bebas ASEAN, Indonesia perlu melakukan persiapan dan mengambil kebijakan yang tepat. Untuk mengetahui bagaimana persiapan Indonesia dan Kota Semarang dalam menghadapi MEA 2015 akan diulas dari persiapan dalam hal aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja (*free flow of goods, services, investment, capital and skilled labor*).

##### 3.1.1. *Free flow of goods*

Dari sisi barang (*free flow of goods*), liberalisasi perdagangan barang akan menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN. Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki tingkat integrasi tinggi dalam berproduksi, berpeluang besar untuk mengembangkan industri di dalam negeri melalui liberalisasi perdagangan barang. Berdasarkan data yang dirilis oleh ASEAN Secretariat tahun 2012, tercatat bahwa Indonesia sudah mengeliminasi hambatan tarif sebanyak 5.731 produk dan menempati urutan ketiga dalam produksi sektor berbasis SDA (karet, minyak dan gas, batu bara, kayu, tekstil), tak lupa, sejumlah UMKM di Indonesia pun turut menggeliat untuk membuka cabang usaha di ASEAN. Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk, kini Badan Standarisasi Nasional (BSN) tengah menyusun

Strategi Standarisasi Nasional 2015-2025, yang nantinya menjadi acuan untuk membendung kemungkinan membanjirnya produk-produk impor dari luar negeri.

### **3.1.2. *Free flow of services***

Menilik ke sektor jasa (*free flow of services*), Indonesia mengandalkan jasa pariwisata, kesehatan, penerbangan, logistik dan telekomunikasi sebagai sektor jasa unggulan guna menghadapi MEA. Dari kelima jasa tersebut, berdasarkan data Kementerian Perdagangan tahun 2012 Indonesia meraup pendapatan sebesar US\$ 2.168 juta. Mengingat kondisi geografis dan demografis ASEAN, peluang pengembangan sektor jasa tersebut sangat terbuka. Apalagi dalam *Blueprint AEC 2015* ditetapkan bahwa pada tahun 2015, sebanyak 128 sektor jasa akan terbuka. Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan liberalisasi sektor jasa ASEAN dengan mengembangkan pola kerjasama pemerintah-swasta untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia.

### **3.1.3. *Free flow of investment and capital***

Dari sisi investasi dan modal (*free flow of investment and capital*), di dalam MEA investasi didefinisikan sebagai investasi langsung yang berupa *Foreign Direct Investment (FDI)*, Indonesia saat ini telah memiliki regulasi yang jelas dalam bidang investasi, di mana keamanan bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia telah dijamin dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden No.39 Tahun 2014 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non-perizinan Penanaman Modal. Ketiga regulasi itu telah lengkap mengatur mengenai ruang lingkup, kebijakan dasar, fasilitas, dan alur perizinan penanaman modal sehingga iklim investasi di Indonesia ke depan menjadi kondusif bagi para investor. Untuk aliran modal, Indonesia akan menyelaraskan pengembangan pasar modal ASEAN dengan agenda nasional supaya manfaat liberalisasi aliran modal bisa dirasakan secara bersama di kawasan ASEAN.

### **3.1.4. *Free flow of skilled labor***

Dari sisi tenaga kerja (*free flow of skilled labor*), dengan terbentuknya MEA akan memberikan peluang dan harapan sekaligus tantangan bagi masa depan para pencari kerja. MEA akan menjadikan ASEAN bagaikan satu Negara besar yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pekerja untuk dapat mengisi lowongan kerja yang tersedia, keluar dan masuk dari satu wilayah Negara ke wilayah Negara lain tanpa hambatan yang berarti. Demikian pula kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan yang akan relatif lebih dimudahkan dalam mencari atau merekrut para pegawai yang diinginkan melalui bursa tenaga kerja yang lebih banyak dan beragam. Di Indonesia, pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia secara umum ditujukan untuk mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. pemerintah Indonesia pun telah mengambil beberapa langkah kebijakan seperti : sertifikasi keahlian di berbagai bidang dan penerapan standar kompetensi tenaga kerja nasional Indonesia. Bagi Indonesia, dengan semakin terintegrasinya ekonomi melalui MEA akan semakin memberikan kemudahan pergerakan dan perpindahan tenaga kerja dan menambah

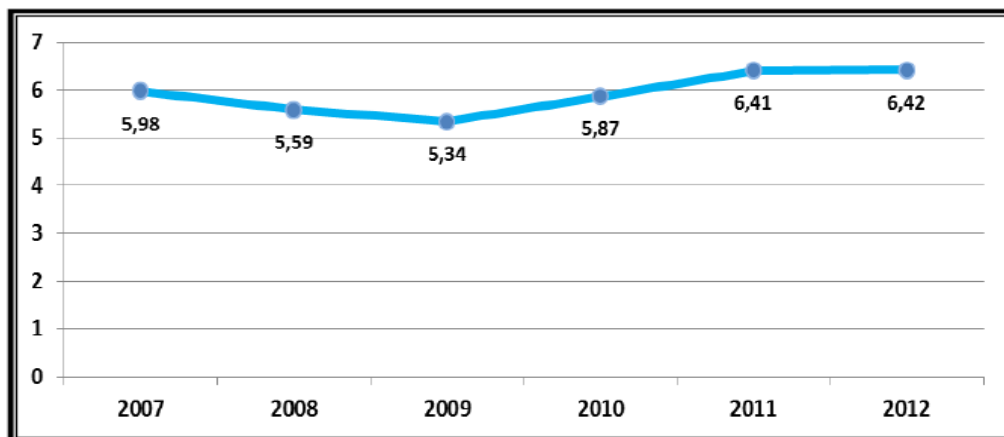
peluang kerja secara lebih luas. Dari hal tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi, meringankan kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penerimaan devisa.

### 3.2. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Menyongsong MEA.

Pemerintah Kota Semarang dalam menyongsong MEA di tahun 2015, selalu mengambil langkah-langkah kebijakan ekonomi yang mendukung ke arah peningkatan serta perbaikan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat kita lihat pada gambar 1, dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun (2007-2012) pemerintah kota semarang rata-rata berhasil melakukan peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun ada perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2008 dan 2009.

Berhasilnya Pemerintah Kota Semarang dalam menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal itu tidak terlepas dari semakin membaiknya kondisi perekonomian nasional dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dalam percepatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

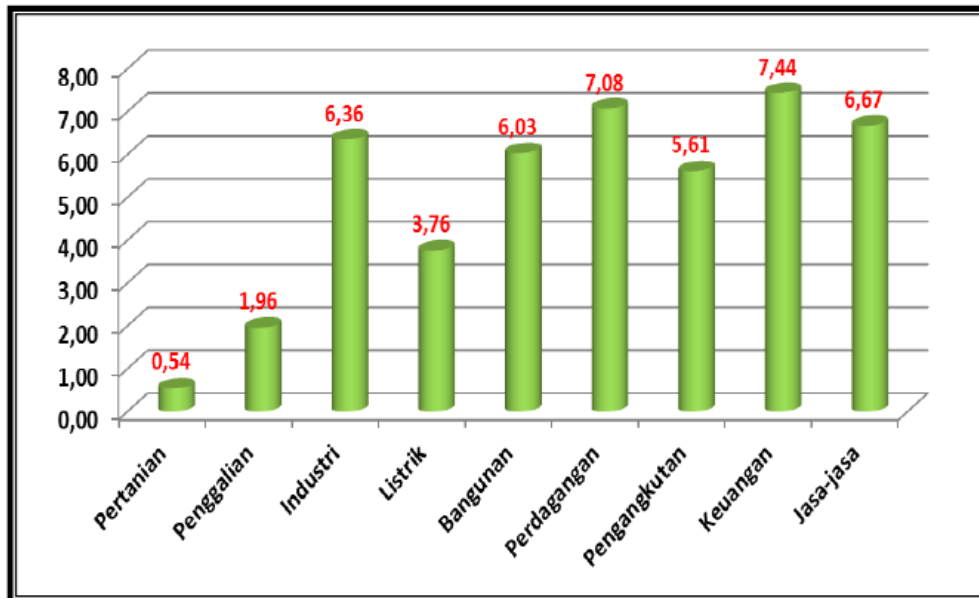
Gambar 1. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi per Tahun Kota Semarang Tahun 2007 - 2012 (Persen)



Sumber: PDRB Kota Semarang, 2013

Gambar 1 terlihat sampai dengan tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang senantiasa mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun 2008 dan 2009 mengalami peningkatan yang melambat, kemudian kembali meningkat lebih cepat pada tahun 2011 dan 2012. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tahun 2011 dan 2012 yang mencapai 6,41 dan 6,42 persen, mengalami peningkatan lebih cepat dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Dengan berhasilnya kota semarang dalam menjaga kesetabilan ekonomi, pemerintah kota semarang telah melakukan langkah-langkah kebijakan yang tepat dalam menyongsong MEA di tahun 2015, dimana Pemerintah Kota Semarang memberikan keleluasaan pada investor untuk melakukan investasi barang dan jasa termasuk dengan pelayanan yang baik dan peningkatan kualitas SDM. Hal ini dapat kita lihat pada gambar 2, dimana sektor unggulan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2012 cukup potensial untuk dapat dikatakan siap dalam menyongsong kebijakan MEA di tahun 2015.

Gambar 2. Rata-rata pertumbuhan sector ekonomi tahun 2012



Sumber: PDRB Kota Semarang, 2013

### 3.2.1. Free flow of goods

Dari gambar grafik 2 (dua) diatas dapat kita lihat bahwa dalam menyongsong MEA, pemerintah kota semarang di tahun 2012 telah siap dengan memfokuskan kebijakan terjaminnya kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi. Hal ini ditunjukkan dengan persentase rata-rata yang cukup tinggi dari sector pengangkutan barang dan jasa sebesar 5,61% , dan perdagangan mencapai 7,08% di tahun 2012.

### 3.2.2. Free flow of services

Kesiapan Pemerintah Kota Semarang dalam menyongsong MEA di tahun 2015, tidak hanya dari segi aliran barang, akan tetapi dari segi sector jasa pemerintah Kota Semarang juga siap melaksanakan kebijakan tersebut. Hal itu dapat kita lihat dari gambar grafik 2 (dua) diatas, dimana persentase sector jasa mencapai sebesar 6,67 % pada tahun 2012. Ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Semarang sangat terbuka untuk mengembangkan pola kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta untuk melakukan kebijakan kerjasama di segala bidang termasuk infrastruktur, dan pembangunan Kawasan Industri untuk kemajuan Ekonomi Kota Semarang.

### 3.2.3. Free flow of investment and capital

Dari sisi investasi dan modal, iklim kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menyongsong MEA sangat mendukung sekali. Hal ini dapat kita lihat pada gambar grafik 2 diatas, dimana investasi di sector keuangan merupakan yang tertinggi diantara sector-sektor ekonomi lainnya yaitu sebesar 7,44% di tahun 2012. Disini menandakan bahwa arah kebijakan investasi dan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menyongsong

MEA pada tahun 2015 sudah berjalan dengan baik, sehingga bagi investor menilai bahwa iklim investasi yang akan dilakukan di kota Semarang aman dan kondusif untuk dilaksanakan.

Jumlah investor juga mengalami peningkatan, seiring dengan akan diberlakukannya MEA pada tahun 2015, hal ini dapat kita lihat dari tabel 1 dibawah ini:

*Tabel 1*  
*Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal*  
*Kota Semarang Tahun 2007-2009*

No	Indikator	Tahun		
		2007	2008	2009
1.	Jumlah investor di Kota Semarang (Penanaman Modal)	2.056	2.160	2.253
2.	Jumlah nilai investasi (Rupiah)	1.350.746.170.600	1.540.210.674.000	1.748.936.779.411
3.	Rasio daya serap tenaga kerja *)	1,00	1,60	1,97
4.	Penanaman Modal (Jumlah tenaga kerja) orang	7.086	11.341	13.977
5.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Penanaman Modal (Rp)	131.903.200.487	189.464.503.400	208.726.105.411

Sumber: Data Olahan BPPT Kota Semarang, 2010

Pada tabel 1 diatas dapat kita lihat bahwa Jumlah investor dan investasi selama 3 tahun telah mengalami kenaikan, sejak ditetapkannya *ASEAN Economic Community (AEC)* di tahun 2007. Peningkatan tersebut didukung dengan adanya layanan *One Stop Service (OSS)* yang memberikan kemudahan dalam mengurus perijinan disamping keamanan yang kondusif, infrastruktur meningkat lebih baik, dan promosi investasi. Kesemuanya itu akan berdampak pada meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja. Upaya peningkatan investasi kedepan, adalah perlunya dukungan peraturan yang jelas mengenai insentif investasi yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah guna memacu pertumbuhan investasi. Dengan demikian perwujudan Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa akan lebih mampu bersaing dengan daerah lain dalam menarik minat investor dalam maupun luar negeri.

#### **3.2.4. Free flow of skilled labor**

Data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, pada periode 2011-2013 dapat kita ketahui bahwa angka pengangguran selama 3 (tahun) tersebut, persentase besarnya selalu menurun. Dimana pada tahun 2011 jumlah pengangguran di Kota Semarang sebesar 10,23 persen, pada tahun 2012 berkurang menjadi 10,07 persen, dan di tahun 2013 dapat ditekan menjadi 8,89%. Hal ini menandakan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk mengurangi angka Pengangguran cukup berhasil, karena telah dapat menekan angka pengangguran. Terlebih lagi akan dilaksanakannya MEA di tahun

2015, diharapkan angka pengangguran dapat menurun lagi karena lingkup kawasan untuk mencari pekerjaan lebih luas jangkauannya.

Keempat indicator yang telah dibahas dalam artikel ini, untuk Kota Semarang telah sesuai dengan visi dan misi kota semarang. Dimana visi yang telah dirumuskan yaitu “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa, Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”. Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Perdagangan, Kota Jasa, Kota Berbudaya, dan Masyarakat yang Sejahtera.

Kota Perdagangan, mengandung arti Kota yang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan.

Dari pemahaman tersebut, karakteristik Semarang sebagai kota perdagangan mengandung beberapa aspek penting, diantaranya :

- 1) Pusat kegiatan (Center Point) distribusi dan transaksi barang dan jasa.

Sesuai dengan letak geografisnya, Kota Semarang merupakan jalur distribusi barang dan jasa untuk wilayah Jawa Tengah pada khususnya dan pulau Jawa pada umumnya, serta antara pulau Jawa dengan Luar Jawa. Oleh karena itu pengembangan Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan mengedepankan konsep pembangunan yang mengarah pada terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat transaksi dan distribusi barang dan jasa. Sebagai salah satu konsekuensi yang harus diemban adalah pelayanan yang memadai kepada seluruh pemangku kepentingan yang menopang pengembangan kota.

- 2) Pengembangan jejaring (networking) dan kerjasama perdagangan

Pengembangan Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan juga bermakna bahwa pembangunan perekonomian daerah harus didasarkan pada terbangunnya jejaring dengan daerah-daerah lain, terutama daerah penyangga (hinterland). Dengan demikian Kota Semarang akan dapat menjadi sentra aktivitas distribusi perdagangan barang dan jasa baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional.

- 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal

Membangun Kota perdagangan tidak bisa lepas dari pengembangan potensi ekonomi lokal. Untuk menunjang terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat transaksi dan distribusi, maka salah satu faktor penting adalah bagaimana mengembangkan potensi lokal agar memiliki nilai tambah ekonomi, yang diharapkan menjadi ikon Kota Semarang.

Beberapa potensi dasar yang dimiliki dan layak dikembangkan sebagai daya tarik kota Semarang adalah pada aspek industri, dalam konteks ini adalah industri kecil dan menengah yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, seperti batik, lumpia, bandeng, industri olahan, dan lain-lain. Disamping itu potensi ini juga harus didukung dengan pengembangan pasar tradisional yang memiliki daya tarik dan daya saing terhadap pasar modern.

#### 4) Pengembangan sarana prasarana penunjang

Pembangunan sarana dan prasarana penunjang dalam pembangunan sebuah kota merupakan salah satu syarat yang mutlak harus dipenuhi. Disamping sarana prasarana fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut, terminal peti kemas, bandar udara internasional, hotel, perbankan, terminal, dan juga sarana penunjang yang sifatnya non fisik, seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan regulasi/kebijakan. Pengembangan SDM secara memadai sangat diperlukan, penataan SDM birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas SDM dalam meningkatkan daya dukung pengembangan Kota, termasuk dalamnya penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kota Jasa, sebutan sebagai Kota jasa sebenarnya tidak lepas dari status kota perdagangan, karena perdagangan akan selalu terkait dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa. Kota Jasa lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang. Sebagai kota jasa dengan demikian mencakup kesiapan kota dalam melaksanakan berbagai fungsi, diantaranya :

- 1) Penyediaan jasa layanan publik secara memadai, baik mencakup standar pelayanan sesuai kualitas yang diharapkan masyarakat, pengaturan / regulasi yang dapat memberikan jaminan mutu pelayanan, maupun kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan.
- 2) Penyediaan fasilitas penunjang yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti hotel, perbankan, transportasi, kesehatan (Rumah Sakit), pendidikan, telekomunikasi, Ruang Pamer Ruang Pertemuan, dan lain sebagainya.
- 3) Berorientasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, dalam arti menempatkan masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya (Customer engagement)
- 4) Pola berpikir (Mindset) dan perilaku melayani bagi masyarakat yang dapat mendorong terciptanya budaya pelayanan

Kota Berbudaya, mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan senantiasa dilandasi seluruh aspek kebudayaan yang terdiri dari Cipta, Rasa dan Karsa yang telah tumbuh menjadi kearifan masyarakat seperti pelaksanaan nilai-nilai religiusitas, kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, ketertiban dan sikap ketauladanan lainnya dalam lingkungan budaya masyarakat, sehingga menghasilkan pembangunan karakter yang mengedepankan kehalusan budi dan perasaan, manusiawi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Percepatan pembangunan yang dilaksanakan tentunya tidak serta-merta melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi orang banyak. Namun kadangkala menimbulkan ekses negatif terhadap tatanan sosial kemasyarakatan, khususnya menyangkut kesenjangan, konflik sosial, kekerasan kolektif, dan materialisme tanpa hati nurani. Pendekatan budaya seyogyanya menjadi dasar utama berbagai upaya solusi persoalan tersebut karena pendekatan budaya pada hakekatnya adalah pendekatan kemanusiaan dan sesungguhnya budaya itu memiliki sifat kekinian dan aktif sebagai proses penataan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi.

Sejahtera, Pemberian otonomi kepada daerah, pada hakekatnya merupakan proses pemberdayaan kolektif bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait

dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, agar disatu sisi tercipta ruang lebih leluasa bagi segenap jajaran birokrasi Pemerintah Daerah untuk memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, sedangkan disisi yang lain terbuka peluang bagi warga masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan keberdayaannya sehingga mampu dan mau secara mandiri memenuhi segala kebutuhan hidup dan kehidupannya.

Sejahtera dalam visi ini, mengarah pada tujuan terlayani dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang.

Dengan demikian, Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Lima tahun kedepan Kota Semarang diharapkan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah hinterlandnya, yang memiliki derajat kualitas budaya masyarakat yang tinggi baik dari segi keimanan dan ketaqwaan, keunggulan dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan dengan tetap menjamin keberlanjutan pengelolaan sumberdaya manusia dan kearifan lokalnya secara bertanggungjawab yang mendasarkan pada aspek perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung pembangunan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan Visi “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa, Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” ditempuh melalui 5 (lima) misi kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas.

Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi yang tinggi dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME.

- 2) Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

Adalah penyelenggaraan Pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintah yang bersih (Clean Governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- 3) Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.

Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.

- 4) Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam



pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

#### 5) Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana.

### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan melihat berbagai persiapan yang telah dijabarkan, bisa disimpulkan bahwa MEA sejatinya bukanlah hal yang patut dikhawatirkan, sehingga Indonesia pada umumnya dan Kota Semarang pada khususnya, harus mampu memanfaatkan pembentukan MEA 2015 untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Di samping itu, integrasi negara-negara ASEAN melalui MEA baru akan dimulai pada 31 Desember 2015 sehingga dengan melihat jangka waktu yang tersedia, pemerintah, pengusaha, investor lokal, dan seluruh elemen masyarakat di Indonesia masih memiliki waktu yang cukup guna membenahi sektor-sektor perdagangan yang dinilai belum memuaskan daya saingnya. Jika segala sektor berhasil dibenahi dan digenjot daya saingnya, maka tak pelak lagi ekonomi Indonesia hanya tinggal menunggu momentum yang tepat untuk 'naik kelas' di kancah perdagangan bebas ASEAN.

Sejarah Kota Semarang dahulunya merupakan Kota perniagaan terbesar kedua setelah Batavia, kebijakan yang diambil untuk menyongsong MEA melalui sektor aliran barang dan perdagangan, jasa, investasi dan penanaman Modal, dan juga *skill* (keterampilan) berupa kependaian SDM, agar faktor-faktor tersebut dapat dilakukan secara serius dan terarah sesuai dengan visi dan misi yang telah tertulis dalam RPJMD 2010-2015 Kota Semarang. Hal itu dikarenakan MEA merupakan sebuah era baru dalam perdagangan bebas di segala bidang di kawasan ASEAN, dimana semua serba bebas masuk dan keluar baik barang dan jasa, terlebih lagi untuk para pencari kerja yang berasal dari Kota Semarang ataupun dari luar kota semarang bahkan WNA yang tertarik untuk mencoba bekerja di Kota Semarang.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi fasilitator Pemerintah Kota Semarang untuk urusan Tenaga Kerja mempunyai tanggung jawab besar untuk dapat menciptakan SDM yang berkualitas yang berasal dari Kota Semarang, dinas ini perlu mengambil langkah kebijakan yang berorientasi pada perbaikan keterampilan (*skill*) untuk dapat dimiliki oleh para pencari kerja. Seperti misalnya dengan membuka kursus atau pelatihan-pelatihan guna mempersiapkan SDM yang berkualitas untuk dapat bekerja dengan baik di sebuah perusahaan yang diinginkan oleh pencari kerja tersebut. Dengan memperbaiki keterampilan (*skill*) yang dimiliki, diharapkan para pencari kerja ataupun pekerja dari Kota Semarang yang ingin melakukan perpindahan kerja dapat bersaing dengan Warga Negara Asing (WNA) yang ingin masuk mencari kerja di Kota Semarang.

## REFERENSI:

- Abdul Wahab, Solichin, 2004; Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.
- James P. Lester dan Joseph Stewart (2000), Public Policy: An Evolutionary Approach, Australia: Wadsworth, second edition.
- Mitchell, J.M. dan Mitchel, W.C. (1993), "Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar", Jurnal Ilmu Politik 3, Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, Riant, 2004; "Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi"; Jakarta: PT Gramedia.
- O Jones, Charles, 1970; An Introduction to the Study of Public Policy, (Belmont, CA: Wadsworth).
- O Jones, Charles (1979) Pengantar Kebijakan Publik (terjemahan) Jakarta: Bina Aksara.
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2012 (2013); Bappeda Kota Semarang, dan BPS Kota Semarang.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 Kota Semarang.
- Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Semaarng tahun 2012.
- Santosa, Amir, 1993; "Analisis Kebijakan Publik; Suatu Pengantar". Jurnal Ilmu Politik 3, Jakarta: Gramedia.
- Suharto, Edi, 2005; Analisis Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Wayne Parson (2005). Public Policy, Edward Elgar Publishing,Ltd. Jakarta: Prenada Media;
- Winarno, Budi, 2005; Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Press.



**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL 2015**  
**PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA**  
**MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**  
**( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI**  
**INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**INOVASI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN**  
**PARIWISATA MELALUI PENGEMBANGAN**  
**EKONOMI KREATIF DALAM MENYONGSONG**  
**MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**  
**DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU**

Oleh: Mustiqowati Ummul Fithriyyah<sup>1</sup>

**Abstract**

*This research is to know why is the program innovations made by the Department of Culture, Tourism, Youth and Sports Pelalawan in the development of the tourism sector through the development of creative economy in menongsong ASEAN Economic Community (AEC).*

*With the presence of the ASEAN Economic Community (AEC), Indonesia has the opportunity to take advantage of economies of scale in the country as a base gain. For Indonesia alone, MEA will be a good opportunity because of trade barriers will tend to diminish even be non-existent. This will result in increased exports, which in turn will increase the Gross Domestic Product (GDP) or gross domestic product (GDP). But on the other hand also new problems that will arise many imported goods will flow in large quantities to Indonesia which will threaten the local industry to compete with foreign products of much higher quality. Then it becomes a necessity that the government needs to make innovations in order not to erode their own country with the advent of the era with a completely open ikilim. The real innovation has been filling the space changes and give another meaning in the culture of government organizations.*

*Pelalawan Regency is one of regencies in Riau which has the potential to become a tourist destination. So that it can be realized, required the development of tourism through the development of creative economy.*

*Inhibitors and supporters of course occur in the implementation of the innovation program. Factors that support in the program is the support of other SKPD to participate implement tourism development and active participation of stakeholders.*

**Keywords:** *innovation, development of tourism, the creative economy*

---

<sup>1</sup> Email: mustiqowati@uin-suska.ac.id

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) 2015 dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan Negara-negara yang perekonomiannya lebih maju saat ini. Dengan terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah Internasional, dan lebih terjalin kerjasama yang sinergis diantara para stakeholder sektor ekonomi di negara-negara ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) 2015 sebenarnya merupakan bentuk integrasi ekonomi yang sangat potensial di kawasan maupun dunia. Barang, jasa, modal dan investasi akan bergerak bebas di kawasan ini. Integrasi ekonomi regional memang suatu kecenderungan dan keharusan di era global saat ini. Hal ini menyiratkan aspek persaingan yang menyodorkan peluang sekaligus tantangan bagi semua negara.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar yang ada di kawasan ASEAN. Kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen dengan berbagai jenis suku, bahasa dan adat istiadat yang terhampar dari Sabang sampai Merauke, menjadikan Indonesia mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup bagus, yang ini akan menjadi modal yang penting untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menuju *ASEAN Economic Community* (Masyarakat Ekonomi ASEAN) pada akhir 2015 mendatang. Jika dilihat dari sisi demografi Sumber Daya Manusia-nya, Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community ini sebenarnya merupakan salah satu negara yang produktif, dan hal ini tidak bisa terlepas dari Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu tulang punggung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada era otonomi daerah adalah sektor kepariwisataan, mengingat sektor inilah yang sangat potensial menghasilkan pendapatan yang besar karena sifatnya yang multisektoral dan *multi-effects*. Dengan berkembangnya sektor kepariwisataan akan mendukung *income generating* dari pelbagai sisi mulai dari retribusi masuk obyek wisata, pajak hotel dan restoran, perijinan usaha pariwisata, di samping juga menyerap tenaga kerja baik dari sektor formal maupun informal. Mengingat demikian strategisnya posisi pengembangan sektor pariwisata maka *developmental-planning*-nya penting untuk dipikirkan.

Pada hakekatnya pembangunan kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kepentingan dan kesatuan Nasional. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pelalawan diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi strategis yang dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menambah pendapatan asli daerah

(PAD) dengan tetap memperhatikan dan memelihara kelestarian kekayaan budaya daerah serta mengoptimalkan peran serta masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan supaya dapat mencapai tujuan yang berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pedoman pelaksanaan yang dituangkan dalam suatu perencanaan yang memuat apa yang akan dikerjakan pada waktu tertentu. Rencana pembangunan dari jangka waktu tertentu dapat dibedakan dengan rencana jangka menengah lima tahun (RPJM) dan rencana jangka panjang dua puluh lima tahun (RPJP).

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan, maka dengan kewenangan yang telah ada, termasuk dalam sektor peningkatan dibidang pariwisata. Bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan-pembangunan di daerah agar tercapai dan berkesinambungan sumber-sumber pembiayaan merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Dengan kewenangan yang telah ada Pemerintah Daerah harus jeli dalam menggali potensi-potensi kekayaan daerah yang dimilikinya, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat membiayai pembangunan daerah tersebut.

Pelalawan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi wisata cukup berlimpah dan bervariasi. Obyek wisata di Pelalawan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu wisata alam serta wisata budaya.

Kebijakan pengembangan pariwisata merupakan langkah strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan, khususnya dalam mengelola potensi kepariwisataan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan formulasi kebijakan yang akan ditempuh nantinya, serta peluang dan tantangan apa yang menghadang. Untuk menempuh kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan tentunya sangat penting untuk mengetahui peta kondisi kepariwisataan Pelalawan yang ada saat ini. Oleh sebab itu perlu dibahas beberapa faktor eksternal, internal, peluang dan hambatan, sehingga memudahkan *policy makers* memformulasikan kebijakannya. Tahap evaluasi ini adalah yang pertama perlu dilakukan untuk memetakan problematika yang dihadapi Pelalawan dalam bidang kepariwisataan dari lingkungan internal.

Pengamatan dari perspektif publik menunjukkan bahwa ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu dipecahkan berkaitan dengan kondisi internal pengembangan kepariwisataan di Pelalawan, yaitu: *Pertama*, Implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata yang belum optimal dilakukan kendati potensi cukup tersedia, termasuk kebijakan linkage antara pengembangan wisata dengan pengembangan potensi ekonomi kreatif. *Kedua*, strategi promosi wisata yang cenderung masih konvensional. *Ketiga*, pelayanan dalam arti luas kepada wisatawan yang masih kurang dari stake holders di bidang pariwisata khususnya. *Keempat*, masih relatif lemahnya koordinasi antara pelaku pariwisata, Pemerintah Daerah dan pihak terkait.

Pengamatan berikutnya adalah evaluasi faktor eksternal yang menunjukkan bahwa seiring belum pulihnya citra negatif negara kita di mata dunia internasional, khususnya dalam aspek keamanan dan kenyamanan, dunia pariwisata nasional mengalami penurunan wisatawan internasional

yang cukup substantif, meskipun pada tataran wisatawan domestik cenderung tak terpengaruh. Kemudian wacana obyek wisata kumuh merupakan hambatan potensial kedatangan wisatawan. Setelah mengetahui peta kelemahan dari faktor eksternal dan internal tersebut, maka perlu pula dirumuskan tentang peluang dan hambatan yang potensial muncul.

Objek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Pelalawan berdasarkan jenis wisatanya yaitu : wisata alam, wisata sejarah/budaya. Untuk wisata alam Kabupaten Pelalawan memanfaatkan potensi pantai misalnya Pantai Ogis, dan Bono, wisata alam lainnya adalah Danau Tanjung Putus, Danau Tajuwid, Taman Nasional Teso Nilo, Air Panas. Sedangkan objek wisata sejarah/budaya adalah Istana Sayap, Makam Raja-Raja Pelalawan, Meriam Peninggalan Kerajaan Pelalawan, Tugu Equator. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.1 : Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Pelalawan

No	Objek/Daya Tarik Wisata Kabupaten Pelalawan	Jenis Wisata	Keterangan
I	Kec. Teluk Meranti 1. Pantai Ogis 2. Bono	Alam Alam	Rekreasi Pantai Rekreasi Pantai
II	Kec. Pangkalan Kerinci 3. Danau Tanjung Putus 4. Danau Tawid	Alam Alam	Wisata hutan dan danau Wisata hutan dan danau
III	Kec. Pelalawan 5. Istana Sayap 6. Makam Raja-Raja Pelalawan 7. Merupakan Peninggalan Kerajaan Pelalawan	Sejarah/budaya Sejarah/budaya Sejarah/budaya	Peninggalan Sejarah Sultan Syarif kasim II Komplek makan Raja dan keluarga kerajaan Pelalawan Peninggalan kerajaan Pelalawan

Sumber : Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pelalawan 2014

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa potensi pariwisata Kabupaten Pelalawan cukup beragam, salah satu wisata yang sangat berpotensi di Kabupaten Pelalawan adalah Wisata Alam Bono. Bono merupakan gelombang atau ombak yang terjadi di muara Sungai Kampar Riau Indonesia yang merupakan suatu fenomena alam akibat adanya pertemuan arus sungai menuju laut dan arus laut yang masuk ke sungai akibat pasang.

Desa Teluk Meranti memang diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Pelalawan. Ini sesuai dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan yang menjadikan daerah Bono sebagai pengembangan wisata bahari. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan terhadap Objek Wisata Unggulan Kabupaten Pelalawan menempatkan Bono sebagai Kawasan Wisata Unggulan I (KWU I) disamping, objek wisata Istana Sayap dan Taman Nasional Teso Nilo.

Untuk itu perlu usaha pengembangan yang terencana dan serius dari Pemerintah Kabupaten yang diharapkan semua pihak. Dalam hal ini peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pelalawan yang pada awalnya bernama Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan.

### 1.2 . Petanyaan Penelitian

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian serta menginterpretasikan hasil dari penelitian, maka terlebih dahulu dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijadikan sebagai arahan dan pedoman penelitian. Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian secara lebih mendalam, dengan judul : **inovasi pemerintah dalam pengembangan pariwisata melalui pengembangan ekonomi kreatif dalam menyongsong MEA di kabupaten pelalawan provinsi riau.**

Dan dengan melihat permasalahan diatas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : *bagaimana inovasi pemerintah dalam pengembangan pariwisata melalui pengembangan ekonomi kreatif dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN di Kabupaten Pelalawan ?*

### 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi pemerintah dalam pengembangan pariwisata melalui pengembangan ekonomi kreatif dalam menyongsong MEA di Kabupaten Pelalawan.

## II. LANDASAN TEORITIS

### 2.1 . Masyarakat Ekonomi ASEAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. Dengan hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan

multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Adapun karakteristik utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (Departemen Perdagangan RI, Buku Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015):

1. Pasar dan basis produksi tunggal,
2. Kawasan ekonomi yang kompetitif,
3. Wilayah pembangunan ekonomi yang merata
4. Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global.

Karakteristik ini saling berkaitan kuat. Dengan Memasukkan unsur-unsur yang dibutuhkan dari masing-masing karakteristik dan harus memastikan konsistensi dan keterpaduan dari unsur-unsur serta pelaksanaannya yang tepat dan saling mengkoordinasi di antara para pemangku kepentingan yang relevan.

Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan *skilled labour* menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce*. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem *Double Taxation*, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis *online*.

Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.

Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan



kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

Suka atau tidak suka, Indonesia harus segera mempersiapkan diri menyongsong pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean 2015, dengan segala potensi yang dimiliki dan usaha untuk selalu berbenah diri menuju daerah yang beribadat, maju, mandiri, sejahtera, tangguh, berdaya saing dan pro investasi, sehingga sangat terbuka peluang untuk bekerjasama dan bersinergi positif tidak hanya dengan daerah lain atau investor secara nasional, tetapi juga secara regional (ASEAN) dan internasional.

## 2.2 . Inovasi Pemerintah

Kata inovasi memiliki sejuta arti dan definisi. Ancok dalam bukunya Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi memberikan definisi inovasi sebagai “suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, carabaru, kebijakan, dan lain sebagainya.” O’Sullivan dan Dooley menyebutkan inovasi adalah “proses membuat perubahan terhadap sesuatu yang telah mapan melalui introduksi suatu hal baru yang memberikan nilai tambah bagi konsumen. Sementara itu, Anthony memahami inovasi dalam pengertian yang lebih sederhana, yakni sebagai “sesuatu yang berbeda yang berdampak. Dari berbagai pengertian dan definisi ini dapat ditarik makna bahwa inovasi adalah proses memikirkan dan mengimplementasikan sesuatu yang original, penting, dan berdampak.

Dari pemahaman ini, maka kemudian inovasi administrasi negara dapat diartikan sebagai proses memikirkan dan mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan kepentingan publik yang original, penting, dan berdampak. Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Didalam Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 386); daerah dapat melakukan inovasi daerah yang mengacu pada prinsip – prinsip : peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya serta tidak untuk kepentingan diri sendiri. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat sebagai aktor – aktor perumus kebijakan publik.

Inovasi pemerintah daerah, khususnya dalam hal pelayanan publik menjadi sangat penting dan mendesak apabila dikaitkan dengan daya saing daerah, daya saing sumberdaya manusia serta memantapkan eksistensi dalam tatanan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia, saat ini memiliki lebih dari 500 daerah otonom baik provinsi dan atau kabupaten/kota. Sejalan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, rakyat atau masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi dengan mudah dapat mengenal dan atau menentukan pilihan untuk kemajuan daerah atau kesejahteraan masyarakat. Inovasi penyelenggaraan pemerintahan bagi kepala daerah, diawali dengan penyampaian visi misi atau janji pada saat kampanye, dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu 5 tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berjangka waktu tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan perencanaan dalam bentuk penganggaran dan kebijakan lainnya.

Dalam inovasi dalam sektor publik, beberapa sarjana mengelompokkan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut. Teori pertama dikemukakan oleh Djameludin Ancok dalam bukunya *Psikologi Kepemimpinan & Inovasi*. Menurutnya, inovasi terdiri atas 8 jenis sebagai berikut: Inovasi proses; Inovasi metode; Inovasi struktur organisasi; Inovasi dalam hubungan; Inovasi strategi; Inovasi pola pikir (*mindset*); Inovasi produk; dan Inovasi pelayanan. Selanjutnya, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam laporannya tahun 2005 *The Measurement of Scientific and Technological Activities* sebagaimana dikutip Doran menyebutkan mengenai 3 jenis inovasi: Inovasi produk, Inovasi proses, dan Inovasi organisasi. Teori jenis-jenis inovasi ketiga dikemukakan oleh Windrum (2008). Berbeda dengan teori Ancok dan OECD yang membuat kategori inovasi secara umum, namun yang bagaimana pun jenis-jenis tersebut terlihat mampu untuk dipraktikkan oleh sektor publik. Teori yang dibuat Windrum secara khusus menegaskan bahwa inovasi-inovasi yang diidentifikasinya hanya berlaku untuk sektor publik. Windrum mengelompokkan inovasi ke dalam enam kategori: Inovasi pelayanan; Inovasi penyediaan pelayanan; Inovasi administratif atau organisasional; Inovasi konseptual; Inovasi kebijakan; dan Inovasi sistemik. Teori terakhir dikemukakan oleh Bekkers, Edelenbos, dan Steijn. Sama dengan Windrum, jenis-jenis inovasi yang diidentifikasi oleh ketiganya juga ditegaskan sebagai jenis yang hanya berlaku untuk sektor publik. Mereka mengklasifikasikan inovasi sektor publik ke dalam 7 kategori: Inovasi produk atau jasa; Inovasi teknologi; Inovasi proses; Inovasi organisasi dan manajemen; Inovasi konseptual; Inovasi tata kelola; dan inovasi institusi. (SeptianaDwiputrianti dkk 2014).

## **2.2. Pengembangan Wisata dan Ekonomi Kreatif**

Pariwisata didefinisikan sebagai aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang senang,

memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur serta tujuan tujuan lainnya (UNESCO, 2009).

Untuk mengembangkan kegiatan wisata, daerah tujuan wisata setidaknya harus memiliki komponen-komponen sebagai berikut (UNESCO, 2009) :

1. Obyek/atraksi dan daya tarik wisata
2. Transportasi dan infrastruktur
3. Akomodasi (tempat menginap)
4. Usaha makanan dan minuman
5. Jasa pendukung lainnya (hal-hal yang mendukung kelancaran berwisata misalnya biro perjalanan yang mengatur perjalanan wisatawan, penjualan cinderamata, informasi, jasa pemandu, kantor pos, bank, sarana penukaran uang, internet, wartel, tempat penjualan pulsa, salon, dll).

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia sebelumnya telah menetapkan program yang disebut dengan Sapta Pesona. Sapta Pesona mencakup 7 aspek yang harus diterapkan untuk memberikan pelayanan yang baik serta menjaga keindahan dan kelestarian alam dan budaya di daerah kita. Program Sapta Pesona ini mendapat dukungan dari UNESCO (2009) yang menyatakan bahwa setidaknya 6 aspek dari tujuh Sapta Pesona harus dimiliki oleh sebuah daerah tujuan wisata untuk membuat wisatawan betah dan ingin terus kembali ke tempat wisata, yaitu: Aman; Tertib; Bersih; Indah; Ramah; dan Kenangan

Ekonomi kreatif dan sektor wisata merupakan dua hal yang saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik (Ooi: 2006). Konsep kegiatan wisata dapat didefinisikan dengan tiga faktor, yaitu harus ada *something to see*, *something to do*, dan *something to buy* (Yoeti, 1985). *Something to see* terkait dengan atraksi di daerah tujuan wisata, *something to do* terkait dengan aktivitas wisatawan di daerah wisata, sementara *something to buy* terkait dengan souvenir khas yang dibeli di daerah wisata sebagai memorabilia pribadi wisatawan. Dalam tiga komponen tersebut, ekonomi kreatif dapat masuk melalui *something to buy* dengan menciptakan produk-produk inovatif khas daerah.

Pada era tradisional, souvenir yang berupa memorabilia hanya terbatas pada foto polaroid yang menampilkan foto sang wisatawan di suatu obyek wisata tertentu. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan paradigma wisata dari sekedar melihat menjadi merasakan pengalaman baru, maka produk-produk kreatif melalui sektor wisata mempunyai potensi yang lebih besar untuk dikembangkan. Ekonomi kreatif tidak hanya masuk melalui *something to buy* tetapi juga mulai merambah *something to do* dan *something to see* melalui paket-paket wisata yang menawarkan pengalaman langsung dan interaksi dengan kebudayaan lokal.

Dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui sektor wisata yang dijelaskan lebih lanjut oleh Yozcu (2010), kreativitas akan merangsang daerah tujuan wisata untuk menciptakan produk-produk inovatif yang akan memberi nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi dibanding dengan daerah tujuan wisata lainnya. Dari sisi wisatawan, mereka akan merasa lebih tertarik untuk berkunjung ke daerah wisata yang memiliki produk khas untuk kemudian dibawa pulang sebagai souvenir. Di sisi lain, produk-produk kreatif tersebut secara tidak

langsung akan melibatkan individual dan pengusaha *enterprise* bersentuhan dengan sektor budaya. Persentuhan tersebut akan membawa dampak positif pada upaya pelestarian budaya dan sekaligus peningkatan ekonomi serta estetika lokasi wisata.

Contoh bentuk pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor wisata dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Bentuk Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai Penggerak Sektor Wisata

Wisata	Ekonomi Kreatif
1. Something to see	Proses kebudayaan (contoh : pembuatan kerajinan tenun songket atau tenun sulaman)
2. Something to do	Wisatawan berlaku sebagai konsumen aktif, tidak hanya melihat atraksi dan membeli souvenir tapi ikut serta dalam atraksi
3. Something to buy	Souvenir.

Sumber: Yoeti, 1985 dan diolah

Potensi pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor wisata di Indonesia masih belum dapat diimplementasikan secara optimal. Salah satu yang dikembangkan di Indonesia adalah mengadopsi bentuk paket wisata tersebut ke dalam desa wisata. Hingga saat ini, tercatat banyak desa wisata yang bermunculan namun hanya sebagian kecil yang berhasil (dalam arti sanggup mendatangkan wisatawan secara berkala dan meningkatkan ekonomi warganya). Fenomena banyaknya desa wisata di Indonesia seringkali terjadi bukan sebagai bentuk kreatifitas, tetapi lebih pada *prestige*. Sangat sering ditemui desa wisata yang infrastrukturnya tidak siap untuk dikunjungi wisatawan. Kelemahan terbesar dari konsep desa wisata selanjutnya adalah minimnya upaya promosi dan tidak adanya link dengan industri kreatif untuk produksi souvenir. Wisatawan hanya sekedar datang dan pulang tanpa membawa sesuatu untuk dikenang (memorabilia) atau untuk dipromosikan pada calon wisatawan lainnya.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif dan sektor wisata pada sebagian besar kota-kota di Indonesia berjalan secara terpisah. Masih kurangnya linkage antara ekonomi kreatif dan sektor wisata dapat terlihat dari tiadanya tempat penjualan souvenir khas daerah. Kalaupun ada, tempat penjualan souvenir dan souvenir yang dijual terkesan biasa saja, dan dapat dengan mudah ditemukan di daerah lain. Atau, pada beberapa kasus, tempat penjualan souvenir berlokasi terlalu jauh sehingga menjadi sebuah proyek yang gagal mendatangkan lebih banyak wisatawan.

Pada hakikatnya, hampir sebagian besar kota/kabupaten di Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor wisata. Kota/kabupaten di Indonesia memiliki daya tarik wisata yang berbeda untuk dapat diolah menjadi ekonomi kreatif. Termasuk juga di Kabupaten Pelalawan.

Potensi wisata yang ada dapat dikembangkan melalui ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif di sini tidak hanya melibatkan masyarakat atau komunitas sebagai sumber daya yang berkualitas, tetapi juga melibatkan unsur birokrasi dengan pola entrepreneurship (kewirausahaan). Konsep pelibatan birokrasi dalam

ekonomi kreatif adalah bahwa birokrasi tidak hanya membelanjakan tetapi juga menghasilkan (income generating) dalam arti positif (Obsore dan Gaebler, 1992).

Strategi pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor wisata dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran seni dan budaya pariwisata
2. Memperkuat keberadaan kluster-kluster industri kreatif
3. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif
4. Melakukan pemetaan aset yang dapat mendukung munculnya ekonomi kreatif.
5. Mengembangkan pendekatan regional, yaitu membangun jaringan antar kluster-kluster industri kreatif.
6. Mengidentifikasi kepemimpinan (leadership) untuk menjaga keberlangsungan dari ekonomi kreatif, termasuk dengan melibatkan unsur birokrasi sebagai bagian dari leadership dan fasilitator.
7. Membangun dan memperluas jaringan di seluruh sektor
8. Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi, termasuk mensosialisasikan kebijakan terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan wisata kepada pengrajin. Pengrajin harus mengetahui apakah ada insentif bagi pengembangan ekonomi kreatif, ataupun pajak ekspor jika diperlukan.

### III. PEMBAHASAN

#### III.1. Pengembangan Ekonomi Kreatif Sebagai Penggerak Sektor Wisata di Kabupaten Pelalawan

Pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor wisata memerlukan sinergi antar stakeholder yang terlibat di dalamnya, yaitu pemerintah, cendekiawan, dan sektor swasta (bisnis).

Sedangkan model pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor wisata dapat diadaptasi dari model-model kota kreatif yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia untuk membentuk (bisa dalam bentuk design atau redesign) ruang-ruang kreatif (UNDP, 2008). Pembentukan ruang kreatif diperlukan untuk dapat merangsang munculnya ide-ide kreatif, karena manusia yang ditempatkan dalam lingkungan yang kondusif akan mampu menghasilkan produk-produk kreatif bernilai ekonomi.

Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang merupakan daerah pemekaran dari kabupaten Kampar. wilayah cakupan pelalawan yang terdiri dari daratan dan kepulauan dan memiliki luas 13.924,94 km. Di kabupaten pelalawan sendiri memiliki 4 tempat wisata alam yang sangat Populer. berikut ini adalah 4 Tempat Wisata Alam di Pelalawan di Provinsi Riau;

##### 1. **Bono**

Untuk peringkat pertama tempat paling populer yang menjadi andalan pariwisata di pelalawan adalah Bono. Bono adalah ombak sungai yang ada di sungai kampar di kabupaten pelalawan. bono sendiri adalah fenomena alam yang unik dimana pertemuan arus dari laut dan sungai telah menciptakan ombak yang besar. besar ombaknya dapat mencapai ketinggian 6-10 meter. Provinsi riau

sendiri memiliki 2 bono yaitu bono Muara sungai kampar di kabupaten Pelalawan yang disebut sebagai bono jantan dan bono sungai Muara Rokan di Kabupaten rokan hilir. disebut sebagai bono jantan karena ombaknya yang relatif tinggi dan disebut betina karena ombaknya yang relatif rendah.

Festival budaya, merupakan salah satu bentuk penciptaan ruang kreatif yang sukses mendatangkan wisatawan. Salah satu hal yang telah dilakukan oleh Pelalawan adalah dengan mengadakan “Festival BakudoBono”, yang berhasil menjadi juara 'runner up' di 'Gebyar Wisata Nusantara' tingkat nasional. Festival Bakudo Bono menampilkan atraksi para selancar Indonesia maupun manca negara dengan kelihaiannya berselancar, di antara ombak yang bergulung-gulung.



## 2. Taman Nasional Tesso Nilo

Taman nasional Tesso Nilo ini bertempat di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki luas 38.576 hektare yang diresmikan oleh pemerintah pada tanggal 19 Juli 2004 terdapat berbagai macam flora dan fauna yang ada di kawasan ini. dan terdapat kawasan konservasi gajah yang dihuni oleh 80-90 gajah.

## 3. Hutan Koservasi Kerumutan

Hutan Konservasi Kerumutan merupakan kawasan hutan lindung yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. hutan ini memiliki fauna endemik yang dilindungi yaitu Harimau Sumatra. Hutan ini memiliki cakupan wilayah yang cukup luas yaitu 1.332.169 ha dan terletak di kecamatan kerumutan kabupaten Pelalawan dan sebagian masuk wilayah Indargiri Hulu.

## 4. Danau Tajwid

Danau Tajwid berada di lokasi Langgam Kabupaten Pelalawan. Di Langgam sendiri masyarakat sebagian besar bekerja sebagai nelayan mereka tinggal di rumah rakit yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan ikan dan pengolahan ikan salai. pemandangan yang Asri di pinggir danau membuat kita takjub akan keindahannya. pohon yang rindang angin yang sepoisepoi menjadi kenikmatan tersendiri bagi anda yang ingin berpetualang di danau tajwid.

Selain wisata alam, di Pelalawan dikenal juga dengan wisata sejarah, yaitu Istana Sayap (Peninggalan Sejarah Sultan Syarif kasim II) dan makam peninggalan raja-raja Pelalawan yang berada di kompleks makan raja dan keluarga

kerajaan Pelalawan. Kemudian terdapat juga wisata adat, yaitu: mandi balimau, sunat rosul, ziarah qubur dan "Upacara Adat Potang Maogang".

Wisata kuliner di Pelalawan juga tergolong unik. Di Pelalawan dikenal beberapa masakan khas, yaitu: Gulai Ayam Nanas, sambal ikan salai khas Pelalawan, sambal nanas dan gulai siput khas Pelalawan.

Salah satu upaya pengembangan pariwisata melalui ekonomi kreatif yang telah dilakukan Pelalawan adalah dengan menyelenggarakan Pagelaran Seni Budaya dan Pelelawan Expo yang dikemas secara profesional dengan tempat yang representatis, pertunjukan musik, pagelaran seni budaya, perlombaan dan festival kreatif lainnya. Pada expo ini ditampilkan kerajinan khas Pelalawan berupa anyaman dari pandan maupun rotan, souvenir dari kayu, tenun songket, miniatur alat kerja masyarakat, hingga sulaman khas Pelalawan yang biasa disebut dengan "tekad". Namun kendati masih tersisa di sebagian home industri warga setempat, namun jumlahnya tidak seramai di masa lampau.

*"Tekad dan kain songket kini tidak sebanyak dulu lagi karena terlindas dengan produk modern. Tekad dan kain songket kini sudah jarang ditemui dan diproduksi karena sumber daya manusia yang mampu mengerjakannya pun sudah sedikit. Terutama bagi barang kerajinan yang diproduksi secara tradisional."* Ini kutipan wawancara kepada Ibu F warga Pelalawan.

Dalam konteks kepariwisataan, diperlukan ruang-ruang kreatif bagi para pengrajin untuk dapat menghasilkan produk khas daerah wisata yang tidak dapat ditemui di daerah lain. Salah satu tempat yang paling penting bagi seorang pengrajin untuk bisa menghasilkan karya adalah bengkel kerja atau studio. Bengkel kerja atau studio sebagai ruang kreatif harus dihubungkan dengan daerah wisata sehingga tercipta linkage atau konektivitas. Konektivitas tersebut diperlukan untuk mempermudah rantai produksi (Evans, 2009). Dari segi ekonomi kreatif, produk kerajinan dalam bentuk souvenir dapat terjual sementara dari sektor wisata, wisatawan memperoleh suatu memorabilia mengenai daerah wisata tersebut. Konektivitas atau *linkage* antara ekonomi kreatif dan wisata dapat berbentuk outlet penjualan yang terletak di daerah wisata. Dengan kata lain, wisata menjadi venue bagi ekonomi kreatif untuk proses produksi, didistribusi, sekaligus pemasaran.

Untuk mendukung pengembangan tenun songket atau sulamanpelalawan sebagai bagian dari industri kreatif sekaligus penggerak wisata, perlu diciptakan *linkage* antara industri batik dan atraksi wisata Seni Kota Sukabumi. Outlet kerajinan tenun sebaiknya diposisikan dekat dengan objek wisata, sehingga tercipta suatu sistem wisata; wisatawan berkunjung melihat atraksi wisata di objek wisata, makan di sekitar objek wisata, membeli oleh-oleh makanan khas, dilanjutkan dengan melihat sekaligus membeli tenun songket atau sulamanPelalawan sebagai souvenir.

### **III.2. Tantangan Pengembangan Pariwisata melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif**

Syahram (2000) menyebutkan bahwa tantangan pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor wisata walau terdengar sangat menjanjikan,

namun tetap memiliki sejumlah tantangan. Tantangan tersebut terkait dengan keberlanjutan industri kreatif itu sendiri untuk menggerakkan sektor wisata. Trend wisata cenderung cepat berubah sehingga pengrajin dituntut untuk bisa menciptakan produk-produk kreatif dan inovatif. Di sisi lain, pengrajin juga tidak boleh terjebak pada selera pasar karena dapat menghilangkan orisinalitas dan keunikan produk. Mengacu dari teori Ooi (2006) sejumlah tantangan yang dapat diidentifikasi di Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Kualitas produk.

Dengan bertumpu pada pengembangan wisata, maka produk ekonomi kreatif akan lebih berorientasi pada selera wisatawan dan diproduksi dalam jumlah yang cukup banyak sebagai souvenir. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya keunikan ataupun nilai khas dari produk hasil ekonomi kreatif tersebut.

2. Konflik sosial terkait dengan isu komersialisasi dan komodifikasi.

Pengembangan ekonomi kreatif melalui wisata (seperti pengembangan wisata “ombak Bono”) seringkali mengkomersialisasikan ruang-ruang sosial dan kehidupan sosial untuk dipertontonkan pada wisatawan sebagai atraksi wisata. Bila tidak dikelola dengan melibatkan komunitas lokal, hal ini dapat berkembang menjadi konflik sosial, karena di beberapa komunitas terdapat ruang-ruang sosial yang bersifat sakral dan tidak untuk dipertontonkan pada wisatawan.

3. Manajemen ekonomi kreatif.

Dibutuhkan manajemen ekonomi kreatif yang baik, dengan salah satu fungsinya menentukan *guideline* ekonomi kreatif mana yang harus dikembangkan dan mana yang sebaiknya tidak dikembangkan.

#### IV. KESIMPULAN

Dalam pengembangan wisata di Kabupaten Pelalawan, diperlukan sinergi antara ekonomi kreatif dengan sektor wisata yang merupakan sebuah model pengembangan ekonomi yang cukup potensial untuk dikembangkan.

Untuk mengembangkan ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor wisata dibutuhkan konektivitas, yaitu dengan menciptakan outlet produk-produk kreatif di lokasi yang strategis dan dekat dengan lokasi wisata. Outlet tersebut dapat berupa counter atau sentra kerajinan yang dapat dikemas dalam paket-paket wisata. Outlet kerajinan berupa counter atau kios atau toko sebaiknya dikembangkan pada tempat wisata yang sudah populer. Pada sentra kerajinan wisatawan tidak hanya sekedar membeli souvenir, tetapi juga melihat proses pembuatannya dan bahkan ikut serta dalam proses pembuatan tersebut.

Setelah akses cukup jelas, maka usaha kerajinan perlu ditingkatkan pada aspek ketrampilan SDM perajin, akses teknologi dan financial atau permodalan. Sehingga peran pemerintah, perguruan tinggi dan dana bergulir dari BUMN sangat dibutuhkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Anas, Sudijono, 2008, *Pengantar Statistik Pendidikan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ancok, Djamiludin.2007. *Psikologi Kepemimpinan & Inovasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fritz, Morstein, Marx, 2007, *Birokrasi & Politik di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imam, Soeharto, 1991, *Keterampilan dan Kemampuan*, Penerbit Citra NiagaRajawali Pers, Jakarta.
- J. Spillance, James, 2001, *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan RekayasaKebudayaan,Kanikus*, Yogyakarta.
- Kaho. Joseph Riwo, 2002, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*,CV.Rajawali, Jakarta.
- Kansil, CST dan Christine, 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kunarjo, 1996, *Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Marpaung. Happy et al, 2002 *Pengantar Pariwisata*, Alfabeta, Bandung.
- Moekijat, 1995, *Analisis Kebijakan Publik*, CV Manda Maju, Bandung.
- Ngapena, Chafid, 2003, *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*, Liberty, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant . *Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Kovergensi dan Kimia Kebijakan*. Edisi revisi kelima 2014, PT Gramedia. Jakarta.
- Nyoman. S. Pandit,2004, *Ilmu Pariwisata*, PT. Pradya Paramita, PT. Angkasa, Bandung.
- Ooi, Can-Seng (2006). *Tourism and the Creative Economy in Singapore*.
- Riduan,2009, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sugiono, 2007, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suwantoro, Gamal, 2007, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Tim Pusat Inovasi Tata Pemerintahan. *Handbook Inovasi Administrasi Negara*. Lembaga Administrasi Negara, 2014
- Poerwadarminta, W.J.S, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wahab, Salah, 1988, *Pemasaran Pariwisata*, Pradya Paramita, Bandung.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, cetakan pertama 2007, Media Pressindo Yogyakarta.
- Yoeti. Oka. A, 1996, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, PT. Penerbit Angkasa, Bandung.

### Peraturan dan Perundang-undangan

- UU No. 9 Tahun 1990 *Penyelenggaraan Kepariwisata*
- Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2002 *Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

### Media Internet

<http://www.pelalawan.org>

<http://www.webstatschecker.com/stas/keyword/kabupaten-pelalawan>.



**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL 2015**  
**PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA**  
**MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**  
**( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI**  
**INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH PEMEKARAN DALAM**  
**MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Oleh : Khairul

**ABSTRAK**

*Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sebagai perwujudan integrasi ekonomi ASEAN dalam artian akan terealisasi sitem perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. MEA adalah realisasi dari integrasi ekonomi yang dianut dalam visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dengan batas waktu yang jelas. Untuk menyongsong implementasi MEA, maka Pemerintah harus mempersiapkan langkah-langkah strategis yaitu pengembangan kelembagaan.*

*Pengembangan kelembagaan juga harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Pemekaran, karena sesuai dengan tujuannya adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk mengantisipasi pelaksanaan MEA akhir tahun 2015*

*Hasil kajian tentang pengembangan kelembagaan berdasarkan PP No.59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah meliputi struktur organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran juga melalui departementalisasi dan spesialisasi. mekanisme kerja pengembangan kelembagaan yaitu pembenahan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit organisasi Pemerintahan Daerah dan antar unit organisasi Pemerintahan Daerah dengan pihak lainnya. Budaya organisasi bahwa pengembangan kelembagaan mempunyai indikator dalam pelebagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan positif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. program dan kegiatan pengembangan kelembagaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing. Sarana dan prasarana yang memadai pemerintah daerah pemekaran bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus untuk menyukseskan MEA di daerahnya.*

*Kata Kunci : Pengembangan Kelembagaan, Pemekaran Daerah, MEA 2015*

## I. PENDAHULUAN

Momentum reformasi sosial politik yang berlangsung cepat memberi arah baru bagi pemerintah dan masyarakat untuk mulai menerapkan kebijakan desentralisasi secara efektif di Indonesia. Kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, merupakan pilihan yang tepat, atas dasar pertimbangan kondisi geografis yang luas dan menyebar serta potensi dan karakteristik yang berbeda antar wilayah. Kebijakan desentralisasi dimaksudkan sebagai instrumen pencapaian tujuan bernegara dalam kesatuan bangsa yang demokratis.

Dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu: “tujuan politik dan administrasi”. Tujuan politik akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat pada tingkat lokal dan secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat terwujudnya *civil society*. Sedangkan tujuan administratif akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintah di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai landasan hukum reformasi pemerintahan daerah, menetapkan beberapa perubahan diantaranya, memberi kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka otonomi. Perubahan lainnya adalah memberikan peluang kepada daerah untuk melakukan pemekaran.

Pemekaran wilayah administratif menjadi kecendrungan pada era reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Regulasi pemekaran daerah kemudian diatur dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara lebih khusus, UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.”

Pemekaran daerah menurut Ferrazzi (2007)) dapat dilihat sebagai bagian dari proses penataan daerah atau *territorial reform* atau *administrative reform*, yaitu “*management of the size, shape and hierarchy of local government units for the purpose of achieving political and administrative goals*”. Penataan daerah umumnya mencakup pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah. Ferrazzi berpendapat bahwa *grand strategy* otonomi daerah yang optimal tidak berhenti pada menentukan berapa jumlah daerah otonom yang ideal di suatu negara, namun lebih dari itu, harus mampu menjawab pertanyaan apa sebenarnya hakekat otonomi daerah di negara bersangkutan. Baru setelah

itu mencari 'jawaban' untuk tujuan apa sebenarnya pemekaran daerah (dalam konteks *territorial reform*) tersebut.

Makagansa (2008:17-18) berpendapat bahwa istilah pemekaran daerah lazim dipakai untuk menggambarkan fenomena bertambahnya daerah otonom baru di Indonesia. Penggunaan istilah pemekaran menurut Makagansa, sekedar memperhalus bahasa (eufemisme), yaitu untuk menyatakan proses 'perpisahan' atau 'perpecahan' satu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Kata 'perpisahan' dan 'perpecahan' dilihat dari kacamata filosofi harmoni punya kandungan makna yang negatif, karenanya, proses itu lebih disukai disebut sebagai pemekaran daerah. Istilah ini dimaknai sebagai proses pertambahan daerah yang terjadi sebagai dampak dari pertumbuhan.

Sudah banyak penelitian yang dilakukan secara parsial terhadap pemekaran wilayah, diantaranya Pusat Litbang Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri (2005) melakukan penelitian Efektivitas Pemekaran Wilayah di Era Otonomi Daerah yang menyimpulkan, bahwa secara umum tidak ada satupun daerah DOB yang bisa dikelompokkan dalam kategori mampu, meski penataan berbagai aspek pemerintahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai dengan pedoman yang ada. Penyebabnya adalah pemerintahan DOB kurang mampu merumuskan dengan tepat kewenangan ataupun urusan yang akan dilaksanakan agar sesuai dengan kondisi, karakteristik daerah serta kebutuhan masyarakat. Studi ini menemukan bahwa kelembagaan yang terbentuk belum sepenuhnya disesuaikan dengan urusan yang telah ditetapkan sebagai urusan daerah. Beberapa masalah timbul, seperti jumlah kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang cenderung berlebihan, struktur organisasi yang cenderung besar, serta belum memperhitungkan kriteria efektivitas dan efisiensi kelembagaan yang baik. Di sektor keuangan daerah, hanya ada satu dari sembilan daerah yang dikategorikan mampu mengelola keuangannya.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terhadap daerah pemekaran seperti dikemukakan diatas, terdapat beberapa indikasi bahwa pemerintah Daerah kurang mampu menunjukkan performa terbaik dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemekaran daerah rata-rata mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan baik di daerah induk maupun daerah otonom baru. Kesadaran terhadap besarnya ancaman kegagalan terhadap pemekaran Daerah, akan mengantarkan kepada pemikiran tentang perlunya langkah strategis sebagai bagian integral dari implementasi desentralisasi itu sendiri, yaitu pengembangan kelembagaan. Dalam kerangka pikir seperti ini, pengembangan kelembagaan merupakan prasyarat yang akan memperkuat infrastruktur administrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang produktif. Infrastruktur administrasi yang kuat dan produktif sangat penting.

Pengembangan Kelembagaan diartikan sebagai "kebutuhan untuk menyusun kebijakan dan regulasi, reformasi kelembagaan, modifikasi prosedur dan mekanisme koordinasi, peningkatan sumber daya manusia, keterampilan dan kualifikasi, perubahan sistem nilai dan sikap, sehingga kebutuhan akan otonomi daerah sebagai pendekatan baru terhadap mekanisme tatakelola, administrasi,

dan partisipasi pembangunan dapat dipenuhi guna menjawab tuntutan akan sebuah sistem yang lebih demokratis." (GTZ, 2005:11).

Pengembangan kelembagaan pemerintah daerah pemekaran, harus diarahkan untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus juga harus mampu menyongsong diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). MEA adalah perwujudan integrasi ekonomi ASEAN dalam artian akan terealisasi sistem perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. MEA adalah realisasi dari integrasi ekonomi yang dianut dalam visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dengan batas waktu yang jelas.

Makalah ini bertujuan menganalisis pengembangan kelembagaan pemerintah daerah pemekaran dalam menghadapi MEA. Hal ini penting karena pengembangan kelembagaan pemerintah daerah sangat berperan penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat dalam menghadapi MEA. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menjelaskan dan menganalisis dari sisi pengembangan kelembagaan pemerintah daerah pemekaran.

## II. PEMBAHASAN

### Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Pesatnya dinamika hubungan antar-bangsa di berbagai kawasan, ASEAN menyadari pentingnya integrasi negara-negara di Asia Tenggara. Pada pertemuan informal para Kepala Negara ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997 disepakati ASEAN Vision 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Hanoi yang menghasilkan Hanoi Plan of Action (HPA) (Wangke,2014).

Kondisi yang ingin diwujudkan pada visi 2020, seperti orientasi ke luar, hidup berdampingan secara damai dan menciptakan perdamaian internasional. Agenda kegiatan untuk merealisasikan Visi 2020 adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, teknologi, hak cipta intelektual, keamanan dan perdamaian, serta turisme melalui serangkaian aksi bersama dalam bentuk hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan diantara negaranegara anggota ASEAN (Wangke,2014).

KTT ASEAN ke 9 di Bali pada tahun 2003 dihasilkan Bali Concord II, yang menyepakati pembentukan ASEAN Community untuk mempererat integrasi ASEAN. Terdapat tiga komunitas dalam ASEAN Community yang disesuaikan dengan tiga pilar didalam ASEAN Vision 2020, yaitu pada bidang keamanan politik (ASEAN Political-Security Community), ekonomi (ASEAN Economic Community), dan sosial budaya (ASEAN Socio-Culture Community)( Wampe,2014).

Diberlakukannya MEA diakhir tahun 2015, berarti negara-negara ASEAN menyepakati perwujudan integrasi ekonomi kawasan yang penerapannya mengacu pada ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint. AEC Blueprint merupakan pedoman bagi Negara-negara Anggota ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015. Guna menyambut era perdagangan bebas ASEAN di ke-12 sektor

yang telah disepakati, Indonesia telah menetapkan regulasi penting yaitu UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam UU ini diatur tentang perijinan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan agar menggunakan bahasa Indonesia didalam pelabelan, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Pemerintah berkewajiban mengendalikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian menentukan larangan atau pembatasan barang dan jasa untuk kepentingan nasional misalnya untuk melindungi keamanan nasional (Wampe,2014)

### **Pengembangan Kelembagaan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran**

Pengembangan kelembagaan menurut (Milen,2004:21) merupakan pengembangan kapasitas tradisional dan penguatan organisasi memfokuskan pada permasalahan sumber daya manusia, proses dan struktur organisasi. Pendekatan modern menguji semua dimensi kapasitas di semua tingkat (misi strategi, kebudayaan, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, asset informasi, infrastruktur) termasuk interaksi dalam sistem yang lebih luas terutama dengan kesatuan lain yang ada, pemegang saham dan para pelanggan.

Pengembangan kelembagaan berdasarkan PP No.59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah pada Bab II Ruang Lingkup Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, Pasal 6 ayat (1-2) berbunyi; (1)Pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a) peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional; b) peningkatan kapasitas tata laksana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja pemerintahan daerah; c) pelembagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan positif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; d) peningkatan kapasitas anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; e) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas; dan f) penerapan standar prosedur operasi (standard operating procedure) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum.

Ayat (2) pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a) penataan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui evaluasi dan analisis departementasi dan spesialisasi unit-unit kerja organisasi pemerintahan daerah; b) pembenahan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit organisasi Pemerintah Daerah dan antar unit organisasi Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya; c) perumusan nilai-nilai luhur sebagai budaya organisasi dan penanaman budaya organisasi pada setiap individu; d) penguatan dan pemantapan metode pengalokasian anggaran sesuai dengan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan sumber penerimaan daerah; e) penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan f) penyediaan standar prosedur operasi (prosedur kerja) dan penerapan metode kerja modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Substansi dari pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan terdapat 6 (enam) fokus yakni, struktur organisasi, mekanisme kerja, budaya organisasi, sistem anggaran/nilai, sarana prasarana dan prosedur kerja. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis aktifitas pada masing-masing fokus dilihat dari kebijakan organisasi atau instansi yang bersangkutan.

Selain itu, pengembangan kelembagaan juga dipengaruhi oleh beberapa factor yang signifikan Riyadi,2003) yaitu: a. Komitmen bersama (*Collective commitments*). Penguatan kelembagaan membutuhkan waktu lama dan memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat (Milen,2004:17). Pengembangan kelembagaan sebuah organisasi baik sektor publik maupun swasta, *collective commitments* merupakan modal dasar yang harus terus-menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik. Komitmen bersama sangat besar pengaruhnya, karena faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang akan dicapai bersama. b. Kepemimpinan yang kondusif (*condusiv leadership*) yaitu kepemimpinan yang dinamis yang membuka kesempatan luas bagi setiap elemen organisasi untuk menyelenggarakan pengembangan kelembagaan. c. Reformasi Peraturan, yang berhubungan langsung dengan kelancaran pembangunan kapasitas itu sendiri, misalnya saja peraturan adanya sistem reward dan punishment. d. Reformasi Kelembagaan merujuk pada struktural dan kultural. Maksudnya adalah adanya budaya kerja yang mendukung pengembangan kapasitas. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek penting dan kondusif dalam menopang program pengembangan kapasitas. e. Peningkatan kekuatan dan kelemahan, diidentifikasi agar dapat disusun program pengembangan kelembagaan yang baik.

#### **a. Struktur Organisasi**

Kerja keras yang dilakukan oleh setiap satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) dalam melayani kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dapat mengangkat citra dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah daerah. Bentuk-bentuk kelembagaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah harus berdasarkan kepada kebutuhan-kebutuhan yang ada dan diperlukan oleh masyarakat di wilayah pemerintah daerah. Untuk menetapkan struktur organisasi pemerintah daerah diatur dengan PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Unsur-unsur penting dalam mendesain struktur organisasi yang juga harus mendapat perhatian dari pimpinan daerah adalah spesialisasi kerja dan departementasi. Sejalan dengan Perpres No. 59 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa penataan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran juga melalui departementasi dan spesialisasi. Untuk menghadapi MEA Pemerintah Daerah Pemekaran harus menetapkan struktur organisasi yang mampu menjawab kebutuhan sesuai dengan kondisi Daerah. Menetapkan struktur organisasi selain didasarkan aturan yang berlaku juga harus berdasarkan kajian yang komprehensif tentang departementalisasi dan spesialisasi yang diperlukan untuk menjawab pelaksanaan MEA. Untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah dan sekaligus

menghadapi tantangan masyarakat ekonomi Asean diperlukan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas untuk mewujudkan visi dan misi dari pemerintra daerah tersebut.

### **b. Mekanisme Kerja**

Suatu organisasi mempunyai mekanisme kerja yang bisa mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai yang di cita-citakan bersama dalam penyelesaian tugas untuk mencapai tujuan bersama, Sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh (Milen,2004:16) bahwa karakteristik dari pengembangan kelembagaan berupa proses peningkatan berkelanjutan yang berarti merupakan proses internal yang hanya bisa difungsikan dan dipercepat dengan bantuan dari luar, melalui mekanisme kerja dengan berbagai pihak yang berkaitan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan.

Pengembangan mekanisme kerja atau hubungan kerja dalam melaksanakan tugas pokoknya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lembaga pemerintah Pusat. Selain itu, institusi pemerintah daerah pemekaran juga bisa melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti pengusaha, tokoh masyarakat. Mekanisme kerja pemerintah daerah pemekaran harus berpedoman kepada PP No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat 2 salah satu poin penting pengembangan kelembagaan yaitu membenah mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit organisasi Pemerintahan Daerah dan antar unit organisasi Pemerintahan Daerah dengan pihak lainnya.

### **c. Budaya Organisasi**

Menurut (Milen,2004,h.21) menyebutkan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam dimensi penguatan organisasi salah satunya adalah strategi dan kebudayaan. Keterkaitan antar keduanya menunjukkan perlu adanya pengarah pada salah satu aspek yaitu proses pencapaian tujuan yang efektif dengan mengembangkan sistem budaya organisasi dengan strategi kepemimpinan, komunikasi dan sistem nilai.

Budaya organisasi dibangun untuk memberikan efek positif dalam pelaksanaan seluruh aktivitas kerja untuk mencapai tujuan bersama. Dilihat dari PP No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Daerah dalam hal budaya organisasi tercantum jelas bahwa pengembangan kelembagaan mempunyai indikator dalam pelebagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan positif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal itu bisa berupa kesopanan, ramah tamah, komunikasi yang menunjukkan suatu nilai luhur bangsa.

Hal lain yang juga perlu ditanamkan dan menjadi budaya organisasi perangkat daerah adalah nilai kedisiplinan pegawai. Pengembangan kelembagaan untuk memperkuat budaya organisasi dengan diberlakukannya PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. Budaya organisasi ini diperlukan oleh pemerintah daerah pemekaran untuk menghadapi MEA, sehingga produktivitas dan etos kerja dapat ditingkatkan.



#### d. Sistem Anggaran/Nilai

Kaho (1991:60) menyatakan tugas otonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah keuangan harus cukup dan baik. Dalam program pengembangan kelembagaan melalui alokasi anggaran sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. *World Bank* yang menekankan perhatian *capacity bulding* pada fokus lingkungan organisasi yang mengarah pada dukungan keuangan dan anggaran dalam merealisasi seluruh kegiatan dan kebutuhan organisasi. Hal ini sesuai dengan PP No.59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Pasal 20 ayat 2 bahwa program dan kegiatan pengembangan kelembagaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing.

#### e. Sarana dan Prasarana

Faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi daerah salah satunya peralatan yang cukup baik diperlukan bagi terciptanya pemerintah daerah yang baik seperti alat-alat perkantoran, alat komunikasi, alat transportasi dan sebagainya(Kaho,1991:60). Pengembangan sarana prasarana diterapkan secara berkala karena penting untuk membantu mempermudah pekerjaan para pegawai.

PP No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Pasal 6 ayat 2 berbunyi, bahwa pengembangan kelembagaan mencakup salah satunya penyediaan sarana prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, sarana prasarana yang memenuhi standar berarti memadai dan masih dapat difungsikan dengan baik. Sarana dan prasarana yang memadai dapat menarik perhatian investor untuk berinvestasi, sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat daerah pemekaran.secara keseluruhan. Sarana dan prasarana yang memadai yang dimiliki oleh pemerintah daerah pemekaran bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus untuk menyukseskan MEA di daerahnya.

### III. PENUTUP

Menghadapi perdagangan bebas ASEAN, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan daya saing produk Indonesia mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar berpotensi menjadi pasar bagi produk sejenis dari negara tetangga. Peningkatan daya saing ini mencakup baik produk unggulan maupun yang bukan unggulan pemerintah daerah pemekaran harus meningkatkan daya saing melalui pengembangan kelembagaan yang meliputi:

*Pertama*, penataan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran juga melalui departementasi dan spesialisasi.

*Kedua*, mekanisme kerja pengembangan kelembagaan yaitu membenahi mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit organisasi Pemerintahan Daerah dan antar unit organisasi Pemerintahan Daerah dengan pihak lainnya.

*Ketiga*, budaya organisasi bahwa pengembangan kelembagaan mempunyai indikator dalam pelembagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan positif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

*Keempat*, program dan kegiatan pengembangan kelembagaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing.

*Kelima*, Sarana dan prasarana yang memadai pemerintah daerah pemekaran bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus untuk menyukseskan MEA di daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ferrazzi, Gabriele. 2007. *International Experiences in Territorial Reform Implication for Indonesia*. USAID-DRSP, Jakarta.
- GTZ, 2005. Guidelines on Pengembangan kapasitas in the Regions, Version.2.0. Module. A: Capacity Building Cycle From Capacity Building Needs Assessment (CBNA) Towards the Capacity Building Action Plan (CBAP).
- Humphrey Wangke, 2014, Peluang Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Info Singkat Hubungan Internasional Vol.VI,No.10/II/P3DI/Mei/2014.
- Kaho Josef Riwu, 1991 Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
- Makaganza, H.R., 2008. *Tantangan Pemekaran Daerah*, Yogyakarta, PusPad.
- Milen, Anelli, 2004 Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta : Pondok Pustaka Jogja.
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.
- Soeprapto, H. R. Riyadi, (2003) “Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance”.Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Pembangunan padaFakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**KUALITAS PELAYANAN SISTEM INFORMASI  
AKADEMIK PERGURUAN TINGGI  
DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI  
ASEAN (MEA)**

**Oleh : Yindrizal**

**ABSTRAK**

*Teknologi informasi dalam studi administrasi publik ditinjau dari perspektif New Public Management, salah satu yang diadopsi dalam bentuk e-government. Salah satu bagiannya adalah implementasi Sistem Informasi Akademik (SIA) secara online. Sistem Informasi Akademik adalah sebuah sistem khusus untuk keperluan pengelolaan data-data akademik dengan penerapan teknologi informasi dengan menggunakan komputer baik hardware, software maupun brainware. Teknologi informasi sangat berpengaruh dalam semua aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada civitas akademika. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan, dapat meningkatkan kualitas pendidikan di era globalisasi yang ditandai berlakunya MEA, sehingga akan meningkatkan daya saing di pasar global. Tulisan ini memfokuskan tentang peranan sistem informasi akademik, dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang dapat bersaing di pasar global.*

**Keywords:** *New Public Management, Kualitas Pelayanan, Sistem Informasi Akademik, MEA*

**1. LATAR BELAKANG**

Setiap permasalahan yang dimiliki masyarakat (masalah publik), membutuhkan pemecahan serangkaian tindakan yang terorganisasi. Masalah publik berkembang dengan berbagai jenis dan kompleksitasnya seiring dengan terjadinya modernisasi di masyarakat. Dalam kehidupan modern, banyak permasalahan yang berkembang menjadi masalah publik, akibat dari implikasi sosial yang timbul dari

perkembangan masalah tersebut. Administrasi publik adalah bagaimana orang-orang mengorganisasikan diri mereka sebagai publik secara kolektif dan juga tugas dan kewajiban masing-masing memecahkan masalah publik untuk mencapai tujuan bersama mereka (Caiden, 1982).

Perspektif administrasi publik bergeser ke new public management, yaitu berusaha menggunakan pendekatan sektor swasta dan pendekatan bisnis dalam sektor publik. Perspektif new public management menekankan penggunaan mekanisme dan terminologi pasar, mereka merubah pandangan badan publik menjadi hubungan sebagaimana layaknya transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Manajer publik memusatkan perhatian pada akuntabilitas kepada pelanggan dan kinerja yang tinggi dengan restrukturisasi badan-badan publik. Dengan restrukturisasi badan publik, terjadilah penyederhanaan proses administrasi dan mendesentralisasi pembuatan keputusan.

Perguruan tinggi mempunyai ciri yang unik yaitu sifatnya yang quasi commercial (Brookes, 2003). Disuatu sisi ingin memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, tetapi prinsip-prinsip komersial harus dijalankan guna mendukung keberlangsungan hidupnya. Penggunaan teknologi informasi (TI) di lingkungan PT menurut Alavi dan Gallupe (2003): (1) memperbaiki competitive positioning; (2) meningkatkan brand image; (3) meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran; (4) meningkatkan kepuasan mahasiswa; (5) meningkatkan pendapatan; (6) memperluas basis mahasiswa; (7) meningkatkan kualitas pelayanan; (8) mengurangi biaya operasi dan (9) mengembangkan produk layanan baru. Hal ini senada dengan apa yang telah dievaluasi melalui akreditasi secara nasional (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 1998).

Dalam menunjang penerapan teknologi informasi berbasis komputer dalam menghasilkan kualitas informasi (McLeod, Jr, 1997) dibutuhkan tiga hal yaitu; (a) Perangkat keras (*hardware*); (b) Perangkat lunak (*software*), dan; (c) Pengguna (*brainware*). Ketiga elemen tersebut saling berinteraksi dan dihubungkan dengan suatu perangkat masukan keluaran (*input-output media*), yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pengguna sistem adalah manusia (*man*) yang secara psikologi memiliki suatu perilaku (*behavior*) tertentu yang melekat pada dirinya. Aspek keprilaku pengguna (*brainware*) TI menjadi penting sebagai faktor penentu keberhasilan TI untuk menghasil layanan yang optimal, apalagi dalam menghadapi pasar global.

Pasar global yang ditandai dengan adanya perdagangan bebas menyebabkan semakin ketatnya daya saing. Melihat potensi Indonesia sebagai mata rantai perdagangan dunia menyebabkan berbagai negara seperti Cina, India, Persia dan negara-negara Eropa banyak yang melakukan perdagangan dengan Indonesia. Banyak bermunculan organisasi-organisasi internasional dalam pasar global seperti WTO (World Trade Organization) dan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang akan menjadi peluang sekaligus ancaman bagi Indonesia. Apalagi pada akhir tahun 2015 bahwa AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan AEC (ASEAN Economic Community) akan berlaku penuh, sehingga akan meningkatkan persaingan Indonesia

dalam pasar global. Teknologi informasi memegang peranan penting, mulai dari aspek pendidikan sampai militer, semuanya sangat membutuhkan manfaat dari teknologi informatika untuk melancarkan prosesnya.

Diberlakukannya ASEAN Economic Community yang disepakati bersama oleh semua negara di wilayah Asia Tenggara, dengan otomatis liberalisasi akan terjadi hampir di semua sektor, termasuk pendidikan. Ketika ASEAN Economic Community berlaku pada akhir 2015, pasar Indonesia akan membuka diri untuk semua bidang. Pasar Indonesia sangat menarik bagi negara tetangga, kita jangan hanya menjadi penonton bila kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang. Untuk menghadapi hal tersebut, perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang mampu menguasai semua bidang, terutama bidang teknologi informasi agar dapat bersaing di pasar global.

Perkembangan teknologi pembelajaran sekarang ini, pelaksanaannya sering menggunakan kombinasi teknologi audio/data, video/data, audio/video, dan internet. Internet merupakan alat komunikasi yang murah dimana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh (E-Learning) menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran-pergeseran dalam dunia pendidikan dari tatap muka konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka dan lebih fleksibel. Hal ini sangat bermanfaat bagi perguruan tinggi yang letaknya tidak dalam satu lingkungan. Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatnya kualitas pelayanan, juga dapat meningkatkan kualitas lulusan, sehingga dapat bersaing di pasar global.

Fenomena era teknologi, sistem informasi harus dimiliki oleh setiap instansi pemerintah khususnya perguruan tinggi, tujuannya untuk mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan akademik. Dengan menggunakan sistem informasi akademik tingkat ketersediaan akan akses informasi lebih luas jangkauannya. Hal ini didukung oleh instrumen standar 11 tentang akreditasi institusi perguruan tinggi, yang diterbitkan oleh Depdiknas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) tahun 2007 di Jakarta. Dijelaskan, setiap perguruan tinggi harus memiliki sistem informasi yang bisa di akses secara online.

## **2. PERMASALAHAN**

Begitu kompleksnya permasalahan dapat dilihat dari tuntutan perkembangan teknologi informasi (TI) terhadap pelayanan yang berkualitas. Dalam kenyataannya masih banyak kekurangan-kekurangan pelayanan yang diberikan oleh Perguruan Tinggi sebagai institusi pemberi pelayanan. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang dapat dikemukakan yaitu *“Bagaimana kesiapan pelayanan sistem informasi akademik di perguruan tinggi”*.

## **3. LANDASAN TEORI**

Kualitas adalah *“conforming to some person’s requirements”* (Weinberg, 2000) yaitu bagaimana sebuah produk dapat memenuhi kebutuhan dari orang yang membeli atau memakainya. Suatu produk yang sama dapat memiliki penilaian kualitas

yang berbeda dari masing-masing orang, hal ini disebabkan karena persepsi tiap orang mengenai kualitas berbeda-beda. Kualitas yang diterima pengguna itu sesuatu hal yang relatif dan sangat subjektif.

Definisi kualitas yang paling sering disebutkan adalah bahwa kualitas merupakan kemampuan mencapai tujuan dan penyesuaian kebutuhan antara pengguna dan pelanggan (Poll, 2008). System quality yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kualitas dari sitem informasi akademik. Item-item untuk mengukur variabel ini diadopsi dari kuesioner yang digunakan oleh McGill, Hobbs dan Klobas (2003) merupakan adaptasi dari kuesioner yang dibangun Davis et al (1988).

Menurut Sedarmayanti dalam bukunya Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, bahwa "*Kualitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah dipenuhi berbagai persyaratan, spesifikasi, dan harapan*" (Sedarmayanti, 2001). Sedangkan Informasi menurut Cangara dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi adalah "*kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta dan pesan, opini dan komentar, sehingga orang bisa mengetahui keadaan yang terjadi diluar dirinya apakah itu dalam lingkungan daerah, nasional atau Internasional*". (Cangara, 2005). Dari kedua definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas informasi adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah dipenuhi berbagai persyaratan, spesifikasi, dan harapan dari sebuah kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta dan pesan, opini dan komentar, sehingga orang bisa mengetahui keadaan yang terjadi diluar dirinya apakah itu dalam lingkungan daerah, nasional atau Internasional.

Sistem informasi merupakan kumpulan, proses, penyimpanan, analisa, dan penyebaran informasi untuk maksud khusus (Turban, 2003). Sedangkan O'Brien (1999), sistem informasi adalah suatu kombinasi yang terorganisir atas orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi dan sumber-sumber daya yang dikumpulkan, diubah dan informasi tersebut disebarkan di dalam suatu organisasi. Dalam hal ini sistem informasi yang dimaksud mengacu pada sistem informasi yang terkomputerisasi yang dibahas lebih lanjut.

Sistem adalah sekumpulan obyek yang terdiri dari orang, sumber daya, konsep, dan prosedur-prosedur yang melakukan sebuah fungsi spesifik untuk mencapai sebuah tujuan (Turban, 2003). Menurut McLeod (1995), sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, sistem adalah sebuah integrasi atau kesatuan dari beberapa elemen-elemen yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, dimana elemen tersebut dapat berupa orang, konsep maupun prosedur.

Informasi adalah data yang mengandung arti dan konteks yang digunakan oleh pengguna akhir menurut Turban (1995), sedangkan McLeod (1995), informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti. Dengan demikian informasi adalah data yang diolah sehingga menghasilkan arti yang berguna bagi yang orang-orang yang menerimanya.

Sistem informasi akademik adalah merupakan sistem informasi yang berbasis web yang bertujuan untuk membentuk *Knowledge Based System* yang dapat diakses internet, sebagai contoh macam informasi yang ada didalamnya adalah; (Arifin, 2002)

- a. Berita, berisi informasi terbaru yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan maupun informasi teknologi dari berbagai sumber berita.
- b. Pendidikan, berisi informasi yang berkaitan dengan perkuliahan yang terdapat dilembaga pendidikan, misalnya kurikulum, Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dosen, materi kuliah, Kerja Praktek, tugas akhir dan penelitian.
- c. Komunitas, berisi tentang komunitas yang ada di lembaga pendidikan yang akan menginformasikan tentang civitas akademika misalnya staff, mahasiswa, alumni, bulletin dan lain-lain.
- d. Data personal, berisi Informasi yang berrhubungan dengan mahasiswa diantaranya;
  - 1) Kartu rencana studi (KRS) sesuai dengan mata kuliah yang telah diprogramkan dalam satu semester
  - 2) Kartu hasil studi (KHS) unruk mengetahui hasil yang telah dicapai selama mengikuti perkuliahan dan hasil evaluasi studi, sekaligus mengetahui indeks prestasinya
- e. Jadwal perkuliahan, yang berisi tentang jadwal kuliah, kegiatan mahasiswa, memonitor jadwal perkuliahan dosen, jumlah kehadiran dalam mengikuti perkuliahan
- f. Perpustakaan, berisi tentang informasi buku melalui catalog online

*Electronic Mail (Email)*, fasilitas ini untuk mengirim dan menerima surat/pesan sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana diskusi antar civitas akademika. Teknologi informasi berperan penting dalam memperbaiki kinerja organisasi. Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, terukur, fleksibel. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tak dapat ditawar lagi, karena ketersediaan informasi yang terintegrasi makin penting dalam mendukung upaya menciptakan sistem perusahaan/organisasi yang efisien dan kompetitif.

Layanan sistem informasi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis layanan yang lain. Perbedaan mendasar layanan sistem informasi terletak pada lini produk layanan yang ditawarkan. Kunci keberhasilan dalam pemuasan pemakai layanan sistem informasi terletak bagaimana Unit sistem informasi mengelola sumber daya manusia dan metodologi yang digunakan dalam pelayanannya. Pengelolaan faktor-faktor tersebut, akan menghasilkan suatu layanan sistem informasi yang handal, akurat, tepat waktu, efektif dan mampu memberikan kontribusi yang memadai bagi organisasi secara keseluruhan (Soebiyantoro: 2003).

Untuk mengukur kualitas dan kepuasan pemakai dari suatu produk sistem informasi bukanlah suatu hal yang mudah, hal ini disebabkan tidak adanya kriteria yang informasi yang dijalankan di dalam perusahaan (Mosley, 1993). Dengan

diketuainya efektifitas produk tersebut maka dapat diindikasikan mengenai kepuasan pemakai maupun kualitas program itu sendiri. Ada 2 metode yang disarankan oleh Mosley untuk melakukan pengukuran yang akurat terhadap kepuasan yaitu (a) definisi produk dari sistem informasi itu sendiri dan (b) identifikasi dari atribut yang relevan dari produk tersebut yang merupakan indikator dari kunci efektifitas. Kualitas suatu produk mempengaruhi tingkat kepuasan, kualitas yang baik biasanya menghasilkan kepuasan yang tinggi pula.

Delone dan McLean (1992) dalam Istianingsih dan Utami (2009) menyampaikan teksonomi mengenai enam faktor yang menjadi dasar pengukuran keberhasilan sistem informasi. Keenam kategori tersebut adalah: (1) kualitas informasi (*information quality*), (2) kepuasan pengguna (*user satisfaction*), (3) kualitas sistem informasi (*system information quality*), (4) intensitas penggunaan sistem informasi (*end user satisfaction*), (5) dampak individual (*individual impact*), dan (6) dampak organisasional (*organizational impact*) dari sistem informasi tersebut.

Sedangkan menurut James O'Brien (2005) dalam bukunya *System Analysis and Design Method*, ada 3 dimensi kualitas informasi yaitu dimensi waktu informasi (*time dimension*), dimensi konten informasi (*content dimension*), dan dimensi bentuk informasi (*form dimension*). Karakteristik dalam dimensi ini adalah pilihan analisis sistem informasi. Tidak semua harus masuk tapi disesuaikan dengan kebutuhan.

1. Time Dimension (*dimensi waktu informasi*). Informasi dikatakan berkualitas jika Currency alias Up to date. Informasi yang disampaikan tepat waktu.
  - a. Timeliness alias tersedia kapan saja user membutuhkan. Artinya informasi tersedia kapan pun user menginginkannya. Aplikasi sistem informasi dapat di akses via handphone (mobile application).
  - b. Frequency yang berarti informasi tersedia dalam periode waktu tertentu.
2. Content Dimension (*dimensi konten informasi*)
  - a. Accuracy. Jelas bahwa informasi yang tersedia akurat, bebas dari kesalahan sehingga tidak menjerumuskan user dan berakibat salah dalam mengambil keputusan.
  - b. Relevance. Nah, informasi yang tersedia sesuai dengan business core atau kebutuhan user.
  - c. Conciseness. Dimaksudkan bahwa informasi yang disajikan diperlukan oleh user.
3. Form Dimension (*dimensi bentuk informasi*)

Bentuk informasi adalah cara bagaimana informasi tersebut sampai ke pengguna (*user*), dan media apa yang sebaiknya digunakan. Apakah sistem informasi stand alone atau yang online.

#### 4. METODE

Metode merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Makalah ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memperoleh gambaran yang



mendalam tentang kualitas pelayanan sistem informasi akademik (SIA) di perguruan tinggi. Pada hakikatnya metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.

## 5. ANALISIS

Dengan adanya sistem informasi akademik online proses pengisian kartu rencana studi (KRS) tidak hanya terjadi di dalam ruangan kelas saja dimana secara terpusat staff memasukkan data-data perkuliahan yang akan diambil oleh mahasiswa, tetapi dengan bantuan peralatan komputer dan jaringan, mahasiswa dapat secara aktif dilibatkan dalam proses pengisian KRS, input nilai oleh dosen, jadwal kuliah, dan juga untuk pengumuman serta tugas-tugas dari dosen dapat dilihat disini. Mahasiswa juga dapat mengakses nilai yang mereka peroleh dapat diakses setiap waktu dan bisa terus berkomunikasi sesamanya kapan dan dimana saja dengan cara akses ke sistem yang tersedia secara online.

Sistem seperti ini tidak saja akan menambah pengetahuan seluruh mahasiswa, akan tetapi juga akan turut membantu meringankan beban staff dalam proses belajar-mengajar. Dengan menggunakan sistem ini beberapa fungsi staff dapat diambil alih dalam suatu program komputer. Apalagi dalam waktu dekat AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan AEC (ASEAN Economic Community) akan berlaku penuh tahun ini. Dengan berlakunya AFTA dan AEC. Kesepakatan negara-negara ASEAN ini tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tapi juga sektor-sektor lainnya. Tak terkecuali "*pendidikan*" sebagai modal membangun sumber daya manusia yang kompetitif. Era perdagangan bebas ASEAN, harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat, agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lain.

Mengacu pada faktor penentu kemajuan suatu negara yaitu, penguasaan inovasi, penguasaan jaringan/networking, penguasaan teknologi, serta kekayaan sumber daya alam, maka pendidikan di Indonesia harus lebih menekankan pada tiga kemampuan tersebut untuk meningkatkan kemajuan di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah melalui perguruan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Perguruan tinggi dituntut benar-benar mampu membekali lulusan untuk berkompentensi dan berinovasi. Kompetensi berinovasi dapat dilakukan dengan peningkatan berbagai keterampilan seperti, inovasi pembudidayaan, desain produk, strategi pemasaran, penggunaan teknologi dan penguasaan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Keterampilan diupayakan dengan mengajarkan bagaimana cara bekerja yang kreatif dan inovatif. Untuk kompetensi membangun jaringan dilakukan dengan pengembangan sikap dan mengelola sumber daya manusia seperti, kepemimpinan, kerja sama serta komunikasi.

Perubahan yang bermuara pada persaingan yang semakin meningkat pada level global ini melahirkan tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu:

1. Menyiapkan lulusannya untuk bisa bersaing dengan lulusan perguruan tinggi ASEAN lain. Kita bisa melakukan pertanyaan ke dalam: siapkah lulusan perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) di tanah air untuk bersaing dengan lulusan ASEAN lain?
2. Meningkatkan daya saing lembaga perguruan tinggi untuk bisa bersaing dengan perguruan tinggi anggota ASEAN dalam menjual jasa pendidikannya. Artinya perguruan tinggi (PT) di Tanah Air harus siap bersaing dengan PT seperti National University of Singapore, Universitas Kebangsaan Malaysia, University of the Philippines, atau bersaing dengan Thammasat University dari Thailand.

Memang untuk persaingan antar PT tidak akan serta merta dan masih membutuhkan waktu lama, namun untuk persaingan antarlumni hanya tinggal menunggu tombol dipencet akhir tahun ini, dan liberalisasi delapan bidang/profesi yang disebut di atas langsung terjadi. Bidang-bidang tersebut tentu akan semakin diperluas pada tahun-tahun berikutnya. Untuk bisa melalui tantangan itu, kunci utamanya adalah bagaimana PT dapat mengelola sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dan dikelolanya dengan baik, sehingga kualitasnya dapat bersaing dengan lulusan PT lain. Perguruan tinggi adalah mengelola manusia, memproses manusia, yang produknya adalah manusia yang lebih berkualitas, baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun karakter atau akhlaknya. Hal ini tentu tanpa harus menepikan kebutuhan tenaga kependidikan, infrastruktur lain seperti penggunaan teknologi informasi.

Dengan gambaran persaingan yang semakin ketat dan lambatnya peningkatan kualitas secara relatif dibandingkan perguruan tinggi kelas dunia, maka upaya-upaya meningkatkan daya saing merupakan suatu keniscayaan. Perguruan tinggi di tanah air harus berusaha keras untuk meningkatkan daya saing tersebut, salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui sistem informasi akademik. Untuk menghadapi hal tersebut perlu perbaikan dan pengembangan teknologi informasi. Tujuannya untuk memudahkan urusan akademik, sehingga tercapainya pelayanan yang diinginkan civitas akademika. Dengan tercapainya hal tersebut, dapat meningkatkan kualitas lulusan dan siap bersaing dalam pasar global

Dengan memanfaatkan sistem informasi akademik, pelayanan akademik dapat dilakukan dengan baik. Pelayanan tersebut seperti halnya pembayaran uang kuliah, pengisian KRS, jadwal kuliah, dan lain sebagainya yang dilakukan secara online. Pengisian KRS dapat dipertanggungjawabkan terhadap pihak mana saja, baik mahasiswa maupun pihak dari universitas, sebab dilakukan langsung oleh mahasiswa, hasilnya disimpan dalam bentuk database. Database ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan, jika sewaktu-waktu mahasiswa lupa dengan jadwal untuk kuliah. Mahasiswa dapat mengakses aplikasi akademik online tersebut dimanapun mereka berada.

Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya sistem informasi akademik online ini antara lain:

- Mahasiswa terhindarkan dari kemungkinan salah mengambil matakuliah yang akan diambil, karena dari sistem aplikasi ini otomatis terhubung ke database dan mahasiswa hanya perlu melihat nama matakuliah yang mereka ambil, adapun kode matakuliah sendiri ada di sampingnya.
- Proses pengisian KRS ini sudah diantisipasi oleh sistem, misalnya ada mahasiswa yang akan mengambil satu matakuliah dan mahasiswa tersebut belum mengambil matakuliah prasyaratnya, maka sistem akan menolak untuk memasukkan matakuliah tersebut.
- Jika mahasiswa mengambil satu matakuliah dan jadwal matakuliah tersebut bentrok dengan jadwal matakuliah yang sudah dipilih sebelumnya, sistem juga akan memberikan warning dan menolak untuk memasukkan matakuliah tersebut.
- Jika satu matakuliah sudah mencapai kapasitas maksimum yang telah ditentukan maka mahasiswa tidak akan bisa mengambil matakuliah tersebut, hal ini perlu dilakukan agar proses belajar mengajar di dalam kelas menjadi nyaman, sehingga mahasiswa tidak perlu berdesak-desakan dalam mengikuti suatu matakuliah.
- Dengan adanya sistem aplikasi akademik ini, jadwal pengisian KRS serta jadwal pembayaran untuk semester/periode tersebut dapat diatur, sehingga memudahkan staff universitas dalam melihat data-data pengisian KRS dan juga data-data pembayaran keuangan mahasiswa.

## 6. KESIMPULAN

Teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan untuk dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi dan pelayanan yang berkualitas. Pemanfaatan teknologi informasi ini tidak terlepas untuk kepentingan dunia pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan dengan Instrumen Standar 11 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) tahun 2007.

Aplikasi sistem informasi akademik ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada civitas akademika, karena registrasi dapat dilakukan dimana saja. Teknologi informasi dapat juga membantu kerja staff dalam mengontrol pengisian Kartu Rencana Studi secara Online. Disamping itu juga dapat memantau arus kas di perguruan tinggi.

Sistem informasi akademik ini sangat berperan dalam dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Dengan adanya sistem informasi akademik, pelayanan kepada civitas akademika jadi lebih meningkat. Peningkatan pelayanan dapat meningkatkan kualitas lulusan yang dapat bersaing di pasar global. Perguruan tinggi harus mampu membekali lulusan untuk dapat berkompetensi dan berinovasi serta

mampu bersaing dengan lulusan perguruan tinggi asing pasca berlakunya AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan AEC (ASEAN Economic Community).\*\*\*

#### DAFTAR PUSTAKA

- A, Moh. Syahrul, 2013, Masyarakat *Ekonomi ASEAN 2015: Pasar Potensi*. [http://bppt.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/informasi/artikel/detailarti\\_kel/7/](http://bppt.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/informasi/artikel/detailarti_kel/7/) (15 Mei 2014).
- Afandi, Moch. Masykur, 2011, “*Peran dan Tantangan ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) Dalam Mewujudkan Integrasi Ekonomi Kawasan di Asia Tenggara*”, Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional, Volume 8 Nomor 1, hal 83-87.
- Alavi, M., and Gallupe, R.B., 2003, Using Information Technologi in Learning: Case Studies in Business and Management Education Programs. *Academic of Management Learning and Education*, 2 (2), 139-153.
- Arifin Mochamad, 2002, Pemanfaatan Media Web Site Sebagai Sistem Informasi Akademik dan Sarana Pembelajaran Mandiri dalam Pengaruhnya dengan Prestasi Belajar Mahasiswa, *Jurnal STIKOM Vol.6 No. 2*.
- Arifin, Sjamsul, Rizal A. Djafaara, dan Aida S. Budiman, 2008, *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Gramedia. Jakarta.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 1998, Tentang Pengguna Teknologi Informasi (TI) Untuk Perbaikan Pelayanan.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2007, Instrumen Standar 11 Tentang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Jakarta.
- Brookes, M., 2003, Higher Education: Marketing in A Quasi-Commercial Service Industry. *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing*, 8 (2), 134-142.
- Caiden, Gerald E., (1982). *Public Administrative*, Second Edition. California: Palides Publisher
- Illias, A., Mohammad R. Y., Mohammad Z. A. R., dan Rahida, A. R., 2007, The Study of End – User Computing Satisfaction (EUCS) On Computerised Accounting System (CAS) Among Labuan F. T Government Sectors : A Case Study In the Responsibility Centres. *Labuan e – Journal of Muamalat and Society*. Vol 11, pp. 1 – 14
- Istianingsih dan Setyo H. Wijanto, 2008, Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Perceived Usefulness, dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Akhir Software Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak: 23 – 25 Juli.
- Kang–Tsung Chang, 2002, *Introdcution To Geographic Information Systems*, New York: McGraw-Hill
- Keputusan Menteri Pembedayaan Aparatur Negara, Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, *Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan*.
- Keputusan Menteri Pembedayaan Aparatur Negara, Nomor 25/M.PAN/2004, *Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah*.
- Keputusan Menteri Pembedayaan Aparatur Negara, Nomor 26/M.PAN/2/2004, *Tentang Petunjuk Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik*.
- Molla, A., dan Paul S. Licker, 2001, E Commerce Systems Success : An Attempt To Extend And Respecify The DeLone and MacLean Model of IS Success. *Journal of lectronic Commerce Research*, Vol. 2, No.40

- O'Brien, James, A., 2005, *Introduction to Information System Essentials For The e-Business Enterprise*. Elevent Edition. New York: Mcgraw Hill Companies. Inc.
- Olsina, L., D. Godoy., G. J. Lafuente., dan G. Rossi, 2008, "Specifying Quality Characteristics And Attributes For Website". [www.gidis.ing.un/pam.edu-ar/downloads/pdfs/olsina\\_web-e.pdf](http://www.gidis.ing.un/pam.edu-ar/downloads/pdfs/olsina_web-e.pdf)
- Poll, Roswitha, 2008, "High Quality – High Impact ? Performance And Outcome Measure InLibraries". [www.tilburguniversity.nl/services/lis/ticer/08carde/publicat/04apoll.pdf](http://www.tilburguniversity.nl/services/lis/ticer/08carde/publicat/04apoll.pdf)
- Supriatna, Dicky dan Tjhai Fung Jin, 2006, Analisis Pengaruh Kepuasan Pengguna Public Computer Terhadap Efisiensi dan Efektifitas mahasiswa Trisakti School Of Management. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 8, No. 2, Agustus. Pp. 111 – 134
- Turban, E. Mc Lean, E. & Wetherbe, J., 1996, *Information Technology For Management: Improving Quality and Productivity*. Canada: John Wiley and Sons, inc.



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**KINERJA PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)  
DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI  
ASEAN DAN GLOBALISASI**

**Yitno Puguh Martomo<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

*Diberlakukannya MEA satu hal yang tidak dapat dihindari adalah persaingan secara terbuka (emulation openly) diantara negara-negara ASEAN. Perguruan Tinggi Swasta memikul tanggung jawab yang berat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan diberlakukannya MEA negara kita akan lebih mudah diserbu oleh tenaga kerja asing sesama anggota negara-negara ASEAN, sebaliknya SDM negara kita juga lebih mudah untuk memasuki ke negara lain sesama anggota ASEAN.*

*Hasil analisis yang telah dilakukan menghasilkan bahwa para pemangku kebijakan di lingkungan perguruan tinggi swasta harus siap dan merespon era pasar tunggal ASEAN ini. Pemberlakuan MEA harus disikapi secara positif, jika tidak maka akan banyak PTS tersisihkan dan menjadi tamu di negeri sendiri. Para pengelola perguruan tinggi swasta dan segenap sivitas akademiknya perlu segera melakukan akselerasi daya saingnya menghadapi MEA ini. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Perguruan Tinggi Swasta, bukan saja pada aturan-aturan main yang ada, namun pada organisasi secara keseluruhan dengan memberikan dorongan pada upaya penguatan, yang diintroduksi lewat berbagai aktivitas untuk mengarahkan pada Good University Governance atau Tatakelola (Tata Pamong) Perguruan Tinggi Swasta yang Baik. Selain itu beberapa langkah yang lain adalah melakukan penjaminan mutu dan akreditasi sesuai standar nasional dan internasional. Dalam mengembangkan kurikulum, selain memasukkan pendidikan soft skill dan entrepreneurship, serta sertifikasi, juga orientasi kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Kerangka Kualifikasi Regional (KKR) merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu sosialisasi, khususnya tentang KKNI harus lebih ditingkatkan. Kerjasama-kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, khususnya lingkup ASEAN sangat perlu dalam rangka meningkatkan kapasitas, baik melalui proyek-proyek penelitian bersama. Joint seminar, menghadirkan dan menjadi dosen tamu internasional, pertukaran mahasiswa, mutual recognition arrangement (MRA) dan sebagainya.*

*Kata Kunci : MEA, strategi kebijakan PTS, Good University Governance*

---

<sup>1</sup> email: tomounsa@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pada kurun waktu tahun 1990-an terjadi fenomena kegagalan besar organisasi pemerintah di berbagai negara maju maupun di negara-negara berkembang, tak terkecuali Amerika Serikat (Osborn & Gaebler, 1995). Fenomena ini kemudian memunculkan pemikiran baru untuk melakukan reinvestasi pada organisasi publik melalui ide *reinventing government* maupun banishing birokrasi (Osborn & Gaebler, Osborn & Plastick, 1995). Inti dari kedua pemikiran tersebut adalah keunggulan organisasi publik, yang ditentukan oleh kapabilitas organisasi, seperti; kecepatan, daya tanggap, ketangkasan, kapabilitas pembelajaran, transparansi, dan lekat dengan nilai-nilai demokrasi, serta etika administrasi publik. Reformasi di dalam ranah birokrasi memunculkan fenomena baru dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan UU No. 22/1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang keduanya merupakan sebagian bentuk perubahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Perubahan dan tuntutan tersebut kemudian memunculkan berbagai fenomena, seperti; *good governance*, reformasi birokrasi dan demokratisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan dari sistem sentralisasi kearah sistem desentralisasi sebagai bentuk dari pemenuhan terhadap tuntutan *good governance*, reformasi birokrasi, dan demokratisasi.

Perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi dalam reformasi birokrasi di Indonesia juga berimbas pada sistem pengelolaan perguruan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Swasta. Pengelolaan perguruan tinggi dengan sistem desentralisasi dimaksudkan untuk mendorong penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta yang mandiri, hal tersebut seperti disebutkan dalam pasal 24 ayat 2 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian pada masyarakat. Pemberian otonomi terhadap Perguruan Tinggi Swasta disatu sisi memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada para penyelenggara untuk mengelola dengan berbagai kebebasan dan kemudahan, akan tetapi disisi yang lain memunculkan kecenderungan terjadinya praktek penyimpangan atas norma perguruan tinggi. Ketika penyimpangan itu benar-benar dilakukan oleh para penyelenggara maka jelas akan banyak pihak yang dirugikan, paling tidak akan berakibat langsung terhadap penurunan kualitas lulusannya.

Kualitas produk perguruan tinggi sangat menentukan kualitas sumber daya manusia secara umum, dengan asumsi semakin tinggi kualitas lulusan perguruan tinggi akan berpengaruh terhadap semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya. Kualitas lulusan Perguruan Tinggi Swasta sebagai penyumbang tenaga kerja diberbagai bidang tentu sangat menentukan kualitas daya saing SDM bangsa ini, terlebih dalam memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 sebagai sebuah konsep integrasi dimana ASEAN akan menjadi satu pasar besar sekaligus satu basis produksi. Pertukaran tenaga kerja dan modal serta

perdagangan berlangsung terbuka antar Negara ASEAN, dengan karakter seperti itu persaingan tidak lagi semata-mata dalam konteks antar Negara tetapi juga antar daerah dan bahkan antar individu, sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan yang tinggi yang mampu terjun ke dalam bursa tenaga kerja dan bersaing dalam dunia bisnis modern. Berdasar laporan tahunan tentang pembangunan manusia seluruh dunia yang dikeluarkan UNDP melalui Human Development Report (HDR) mengungkapkan pada tahun 2014, Indonesia masih menempati peringkat 121 dari 187 negara. Dari tiga dimensi yang diukur oleh UNDP kualitas bobot dimensi pembangunan manusia yang tertinggi adalah kesehatan (0,785) diikuti oleh pendidikan (0,577) dan ekonomi (0,550) dengan total HDI adalah 0,629. Di tingkat ASEAN sendiri Indonesia masih bertengger di posisi ke-6 (enam). Indonesia berada di bawah Singapore (18), Brunei Darussalam (30), Malaysia (64), Thailand (103), dan Philipines (114). Sedangkan di bawah Indonesia terdapat Vietnam (127) dan Myanmar (149) di tempat terakhir.

Dalam era MEA ini, satu hal yang tidak dapat dihindari adalah persaingan secara terbuka (*emulation openly*) diantara negara-negara ASEAN, dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah maka kita tidak akan mampu bersaing dengan bangsa lain di segala bidang dan pada akhirnya kita akan tergilas. Hal tersebut tentu disadari oleh mereka yang bergerak dibidang penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Dengan demikian perguruan tinggi memikul tanggung jawab yang berat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Disisi lain yang dengan diberlakukannya MEA perlu dicermati adalah tantangan tersebut yang harus dihadapi tetapi juga membuka peluang-peluang baru untuk melakukan upaya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia, dengan cacatan kita dapat mencetak sumber daya manusia handal yang mampu berkompetisi dengan bangsa lainnya. Dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya MEA negara kita akan lebih mudah diserbu oleh tenaga kerja asing sesama anggota negara-negara ASEAN, sebaliknya SDM negara kita juga lebih mudah untuk memasuki ke negara lain sesama anggota ASEAN.

Metode yang digunakan dengan pendekatan diskriptif kualitatif dan *field research*. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004:4) mengartikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian lapangan adalah penelitian yang menekankan pada bagaimana melakukan studi terhadap aksi-aksi masyarakat dalam kesehariannya secara alami (*natural setting*), atau dengan kata lain "*The study of people acting in the natural courses of their daily lives*". Secara operasional penulis menjelaskan dan menganalisis dari sisi kebijakan khususnya yang terkait dengan tuntutan perubahan Perguruan Tinggi Swasta dalam menghadapi era MEA 2015.

## **TUNTUTAN PERUBAHAN TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN TINGGI**

MEA dibentuk berdasarkan empat tujuan utama, yaitu: (1). Mewujudkan kawasan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis *produksi* (*single market and production base*). Kondisi ini ditandai oleh sirkulasi barang, jasa, arus investasi, modal dan tenaga kerja berlaku secara bebas di sepuluh negara anggota MEA. (2).



Mewujudkan kawasan yang mempunyai daya saing tinggi (*a highly competitive economic region*). Hal ini mulai diwujudkan dengan kesepakatan mengurangi secara perlahan hambatan-hambatan dalam perdagangan melalui penurunan tarif dan hambatan dalam bisnis melalui penghapusan masalah birokrasi yang berjenjang. (3). Fokus pada pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, MEA bertujuan untuk mewujudkan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*a region of equitable economic development*). (4). Mewujudkan kawasan yang terintegrasi (*a region fully integrated in the global economy*). Dari uraian diatas dapat ditarik benang merah bahwa MEA merupakan langkah dalam menangkap isu globalisasi yang tidak dapat dielakan. David Held (1995:26) menggambarkan globalisasi sebagai suatu tindakan jarak jauh (*action at distance*) dalam bentuk khusus berupa keluasan dan kedalaman hubungan-hubungan yang melintasi batas negara dan dengan intensitas yang semakin meningkat. Sedangkan Gibson, Ivancevich & Donnelly (1996:67) memberikan pengertian globalisasi sebagai saling tergantung dalam transportasi, distribusi, komunikasi dan jaringan ekonomi melewati batas internasional.

Globalisasi menuntut organisasi publik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam belajar, mengkolaborasi dan mengelola keberagaman, kompleksitas dan ambiguitas. Globalisasi juga memaksa organisasi publik untuk dapat memenangkan kompetisi, bertahan, mengukur kompetensi dan modal intelektual. Modal intelektual merupakan syarat mutlak yang harus ada pada organisasi publik saat ini guna mencapai keunggulan kompetitif. Organisasi publik yang sukses akan menjadi sangat mahir dalam mengembangkan dan mempertahankan aset-aset organisasi dengan keterampilan, perspektif dan pengalaman yang cukup untuk bergerak kearah kemajuan dan memenangkan kompetisi. Oleh karena kinerja dalam organisasi publik dituntut untuk memiliki modal intelektual yang sangat dibutuhkan guna pengembangan organisasi publik secara berkelanjutan. Kapabilitas dalam organisasi publik merupakan faktor penentu dalam memenangkan persaingan, yaitu sesuatu yang menjadikan organisasi dapat melakukan atau berbuat secara lebih baik dibanding pesaingnya. Kapabilitas ini dapat berupa kemampuan teknis maupun organisasi dapat melakukan atau berbuat secara lebih baik dibanding pesaingnya. Kapabilitas ini dapat juga berupa kemampuan teknis maupun organisasional seperti fleksibilitas birokrasi, kemampuan merespon secara agresif kebutuhan pelanggan, bergerak lebih secara efektif dalam globalisasi.

Rantai nilai dalam sistem pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi publik menghendaki arah untuk layanan yang kompetitif. Oleh karena itu, sumber daya manusia akan lebih responsif (mau mendengar) terhadap kebutuhan masyarakat. Keresposifan ini meliputi inovasi, pembuatan keputusan yang lebih cepat, arah pelayanan pada harga dan nilai serta secara efektif berhubungan dengan pelanggan (masyarakat) dan sektor bisnis untuk membangun suatu rantai nilai kerjasama (*networks*). Perubahan haluan kinerja organisasi publik bisa dilakukan dengan cara *downsizing*, konsolidasi, dan restrukturisasi. Dalam konteks tersebut organisasi publik berusaha untuk mengurangi biaya dan menghindari kerugian organisasi publik, sementara kualitas dan usaha-usaha *reengineering* dilakukan untuk mengatasi langkah-langkah yang tidak efisien

dalam proses kerja. Semua usaha ini akan membantu merubah haluan organisasi publik, sehingga membuat organisasi publik menjadi lebih gesit, tangkas dan cepat.

Perguruan tinggi yang merupakan organisasi sektor publik seperti yang dikemukakan oleh Peter F. Drucker (1989) bahwa *public sector* juga mencakup pula lembaga non pemerintah yang sering disebut sebagai *third sector*, organisasi ini meliputi rumah sakit, sekolah-sekolah, universitas serta organisasi filantropiga. Menurut Mardiasmo (2004:7) ada perbedaan sifat dan karakteristik dengan membandingkan tujuan, sumber pembiayaan, pola tanggung jawab, struktur, karakteristik anggaran dan *stakeholder* terkait antara organisasi yang bersifat publik dengan organisasi yang bersifat privat. Perguruan tinggi sebagai salah satu organisasi sektor publik juga terkena dampak dari globalisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Globalisasi selain merupakan sebuah tantangan juga memberikan peluang kepada setiap organisasi. Untuk memberikan arah pada kedua dimensi di atas maka visi dan misi Pendidikan tinggi harus didesign sedemikian rupa sehingga mereka lebih siap dalam memasuki kehidupan di milenium ketiga ini. Menurut Tilaar (2000:110) visi dan misi Pendidikan Tinggi tersebut terdiri dari dua dimensi yaitu dimensi lokal dan dimensi global. Oleh karena itu dalam kondisi globalisasi ini perguruan tinggi sebagai organisasi publik harus berjuang guna menyeimbangkan tuntutan berpikir secara global dan bertindak secara lokal.

## **SRATEGI KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM MENSIKAPI PERUBAHAN**

Isu demokratisasi mengemuka pada dasawarsa 1990-an sebagai kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan yang otoriter. Jadi, dapat dikatakan bahwa mengemukanya isu demokratisasi sejalan munculnya isu otonomi. Karena demokrasi tanpa otonomi adalah merupakan sesuatu yang mustahil. Secara literal, konsep demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat, berasal dari bahasa Yunani *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan). Istilah demokrasi, mempunyai berbagai macam pengertian dalam penggunaan yang kontemporer. Sidney Hook (1984) mendiskripsikan demokrasi sebagai bentuk kekuasaan di mana keputusan-keputusan kebijakan yang penting atau arah kebijakan dibalik keputusan ini secara langsung maupun tidak, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas. Philippe C. Schmitter dan Terry Linn Karl (1981) dalam artikel mereka, *what democracy is.....and is not*, mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama.

Pratikno (1999) menjelaskan untuk mewujudkan sebuah organisasi yang demokratis, perlu dijalankan tiga prinsip berikut (1) partisipasi, (2) akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan (3) keadilan. Partisipasi hendaknya menunjuk pada suatu prinsip bahwa suatu keputusan yang diambil haruslah mencerminkan dan memperoleh persetujuan dari rakyat, tidak boleh ada keputusan yang diambil secara sepihak. Pertanggungjawaban merupakan prinsip yang hendak menunjuk

pada keharusan semua kelembagaan yang ada untuk mempertanggung jawabkan apa yang sudah dijalankan. Hal ini hendak ditegakkan agar tidak terjadi tindakan yang berbasis subjektivitas, yang pada gilirannya merugikan masyarakat. Keadilan hendak menunjuk pada keharusan tidak adanya diskriminasi, perbedaan dan kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan harus bisa berdiri di atas semua golongan. Masalah ini sendiri sangat bergantung pada konfigurasi dan ideologi negara. Untuk memungkinkan suatu keadilan, maka negara harus bisa dibebaskan dari ideologi sempit, yang hanya mengakomodasi kepentingan kelompok kecil, salah satu kelompok, dan berbagai jenis lainnya, dengan inti tidak mengakomodasikan kepentingan keseluruhan warga. Isu demokratisasi muncul sebagai kritik terhadap kegagalan penyelenggaraan suatu sistem yang bersifat otoriter. Dominasi pemerintah dalam pengambilan kebijakannya telah mendemisfisikasikan partisipasi masyarakat. Akibatnya dalam sistem tersebut masyarakat tidak merasa menjadi bagian dalam proses kebijakan. Kegagalan tersebut mendorong mengemukanya isu demokratisasi, karena satu-satunya jalan agar masyarakat merasa terlibat dan mengakui kebijakan pemerintah adalah dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kedaulatan merupakan sumber utama dari kekuasaan yang ada.

Perubahan peran perguruan tinggi menjadi sebuah kebijakan yang mutlak dilakukan dalam rangka menyesuaikan tuntutan demokrasi. Perubahan peran perguruan tinggi tersebut didasarkan pada 3 (tiga) elemen pokok yaitu (1) membangun sistem yang mampu mendorong partisipasi perguruan tinggi mampu melibatkan dirinya secara aktif dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan, (2) membangun perguruan tinggi yang akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat, (3) membangun perguruan tinggi yang adil. Dengan mengembangkan perguruan tinggi yang mengacu pada tiga prinsip dalam menjalankan sistem pendidikan tersebut, maka demokratis perguruan tinggi diharapkan dapat diwujudkan.

## **PERBAIKAN KINERJA ORGANISASI DALAM MERESPO PERUBAHAN**

Menurut Zaenal Syarifudin dan Hessel Nogi S. Tangkilisan (2004:13) pada organisasi privat ukuran penilaian kinerja yang digunakan antara lain seberapa besar profit yang dapat diraih, bagaimana efisiensi melalui perbandingan *output, input, cost and benefit* serta efektifitas. Pada organisasi publik dalam menentukan ukuran untuk menilai kinerjanya merupakan pekerjaan yang tidak mudah, hal ini dikarenakan masih sulitnya untuk menemukan alat ukur yang sesuai (Bryson, 2003). Namun demikian bukan berarti kinerja organisasi publik tidak dapat diukur. Dengan berkembangnya paradigma organisasi publik, telah terjadi pergeseran kinerja organisasi publik yang telah masuk ke dalam domain kinerja organisasi privat. Mardiasmo (2002:13) mengatakan bahwa organisasi swasta dan organisasi publik menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya (*scarcity of resources*), sehingga baik organisasi publik maupun organisasi swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengelolaan organisasi publik dewasa ini telah mengadopsi pengelolaan organisasi swasta, dengan pendekatan

*economic, efficiency and effectiveness*. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengukur kinerja organisasi privat maupun organisasi publik antara lain *work load/demand, economy, efficiency, effectiveness dan equity* (Perry 1990 dalam Dwiyanto, 1995). Mardiasmo (2002:196) mengemukakan bahwa tolok ukur kinerja organisasi publik berkaitan dengan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai oleh organisasi tersebut. Satuan ukur yang relevan digunakan adalah efisiensi pengelolaan dana dan tingkat kualitas layanan yang dapat diberikan pada publik.

Kepuasan *Stakeholders/shareholders* merupakan bagian pengukuran kinerja organisasi, artinya kegiatan organisasi berinteraksi dengan berbagai pihak yang menaruh kepentingan terhadap keberadaannya. Untuk itu informasi dari pengukuran kinerja perlu didesain untuk mengakomodasi kepuasan dari para stakeholder. Ukuran waktu juga merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam desain pengukuran kinerja. Betapa sering kita membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan, namun informasi tersebut lambat diterima, sebaliknya informasi yang ada sering sudah tidak relevan atau kadaluwarsa. Penilaian kinerja merupakan aktivitas penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan organisasi mencapai misi dan visi yang telah ditentukan. Menurut Dwiyanto (2002:47) indikator untuk menilai kinerja adalah sebagai berikut : produktivitas, kualitas, responsibilitas, responsivitas, akuntabilitas. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur efisiensi tetapi juga efektifitas dan seberapa besar hasil atau manfaat yang dapat diperoleh. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dan *output*. Produktivitas dikategorikan tinggi jika *output* yang dihasilkan lebih besar dari *input* yang dikorbankan, sebaliknya produktivitas rendah jika *input* yang dikorbankan lebih besar dari *output* yang dihasilkan. Sedangkan pada konsep kualitas lebih mengacu pada kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pandangan (*image*) yang negatif muncul akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan dari suatu organisasi tertentu. Informasi mengenai kepuasan ini seringkali diperoleh dari diskusi-diskusi publik maupun opini yang diakses oleh media massa.

Responsivitas memiliki pengertian sebagai kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Responsivitas juga menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kemampuan organisasi menjalankan visi dan misi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi faktor penentu responsivitas yang tinggi. Sedangkan konsep responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Kemudian konsep akuntabilitas ini menunjuk pada kepatuhan organisasi terhadap kesesuaian nilai dan norma yang berkembang di masyarakat, kinerja organisasi di anggap tinggi ketika aktivitas mereka tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang disepakati begitu pula sebaliknya. Di samping itu konsep akuntabilitas juga digunakan untuk melihat apakah kegiatan dan kebijakan organisasi konsisten dengan kehendak masyarakat. Ruky (2002:7) menyatakan ada beberapa elemen yang harus didayagunakan organisasi untuk mengoptimalkan kinerja yaitu : teknologi, kualitas input, kualitas lingkungan, budaya organisasi, kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya manusia. Dari keseluruhan pendapat di muka dapat

disimpulkan bahwa kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sangat kompleks yang mendominasi dalam mempengaruhi tingkat kinerja. Namun demikian kiranya dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut lebih difokuskan pada, akuntabilitas, responsibilitas, responsivitas, dan produktivitas.

Beberapa literatur dijelaskan tentang faktor-faktor kunci keberhasilan transformasi maupun peningkatan kinerja organisasi. Gomes (2001) menjelaskan bahwa iklim organisasi, kepemimpinan dan sikap aparat merupakan faktor kunci keberhasilan transformasi. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Siagian (2000) yang menyatakan bahwa keberhasilan transformasi yang dilakukan oleh organisasi sangat tergantung pada berbagai faktor, diantaranya; iklim saling mempercayai, kepemimpinan yang transformasional, dan perubahan individual. Iklim saling mempercayai atau iklim organisasi yang kondusif mendukung kelancaran perubahan karena ketersediaan sarana dan prasarana yang memudahkan terjadinya perubahan, kepemimpinan yang kondusif akan mengarahkan perubahan peran aparat sesuai dengan visi dan misinya. Aparat adalah subjek yang akan dirubah jadi sikap atau kesiapan mereka untuk menerima perubahan peran dirinya menentukan berhasil tidaknya perubahan. Ulrich (1998) menjelaskan faktor-faktor kunci keberhasilan transformasi yaitu; (a) iklim organisasi yang menjadi faktor eksternal yang memberikan dukungan dalam proses perubahan peran. Hal yang terkait dengan iklim organisasi ini berupa sarana dan prasarana serta kondisi lingkungan yang kondusif yang memungkinkan proses perubahan peran dapat berlangsung lancar; (b) Kepemimpinan yang kondusif mendukung keberhasilan perubahan peran. Fungsi kepemimpinan adalah memimpin proses pelaksanaan perubahan peran, ia berperan sebagai fasilitator dalam proses perubahan peran; (c) Sikap pegawai. Hal ini dikarenakan pegawai adalah subjek yang akan dirubah maka semakin siap menerima perubahan semakin mudah perubahan peran dilakukan.

## **PENUTUP**

Proses perubahan kinerja, dari kondisi yang tidak efektif dan tidak efisien kearah kinerja pada kondisi yang efektif dan efisien menjadi tuntutan utama agar menghasilkan kualitas lulusan yang lebih kompetitif terutama dalam memasuki dunia kerja di era MEA yang akan segera diberlakukan. Kalangan perguruan tinggi swasta (PTS) harus berbenah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola yang baik agar lebih siap dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Perguruan Tinggi Swasta yang sudah siap akan sangat diuntungkan karena semakin luasnya cakupan pasar, sebaliknya yang tidak siap dalam menghadapi "booming" MEA 2015 terancam tersingkirkan dari dunia pendidikan tinggi nasional, tambahhya. Dalam rangka menghadapi persaingan ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu keniscayaan. Perguruan tinggi swasta, dituntut melakukan langkah penguatan seperti dalam penguatan SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak secara lebih optimal dengan mengedepankan keunggulan yang dimiliki, serta pembekalan soft skills bagi para

lulus. Iklim organisasi yang kondusif di lingkungan masing-masing PTS menjadi bagian penting dalam mewujudkan kinerja lembaga yang efektif dan efisien. Kepemimpinan yang fleksibel dan sikap segenap civitas akademika yang kooperatif sangat berkontribusi dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien.

Para pemangku kebijakan di lingkungan perguruan tinggi harus siap dan merespon era pasar tunggal ASEAN ini. Pemberlakuan MEA harus disikapi secara positif, jika tidak maka akan banyak PTS tersisihkan dan menjadi tamu di negeri sendiri. Para pengelola perguruan tinggi swasta dan segenap sivitas akademiknya perlu segera melakukan akselerasi daya saingnya menghadapi MEA ini. Adapun langkah yang harus segera dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan cakupan penelitian perguruan tinggi swasta agar dapat memberikan saran kebijakan dan memasukan kepada pemerintah dan swasta tentang langkah dan peluang yang dapat diraih oleh Indonesia di pasar ASEAN atau tentang strategi negara ASEAN lain yang harus diwaspadai oleh Indonesia.

Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Perguruan Tinggi Swasta, bukan saja pada aturan-aturan main yang ada, namun pada organisasi secara keseluruhan dengan memberikan dorongan pada upaya penguatan, yang diintroduksi lewat berbagai aktivitas untuk mengarahkan pada *Good University Governance* atau Tatakelola (Tata Pamong) Perguruan Tinggi Swasta yang Baik. Selain itu beberapa langkah yang lain adalah melakukan penjaminan mutu dan akreditasi sesuai standar nasional dan internasional. Dalam mengembangkan kurikulum, selain memasukkan pendidikan *soft skill* dan entrepreneurship, serta sertifikasi, juga orientasi kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Kerangka Kualifikasi Regional (KKR) merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu sosialisasi, khususnya tentang KKNI harus lebih ditingkatkan.

Kerjasama-kerjasama baik dengan sesama perguruan tinggi dalam negeri maupun dengan perguruan tinggi luar negeri, khususnya perguruan tinggi ASEAN sangat perlu dalam rangka meningkatkan kapasitas perguruan tinggi kita, baik melalui proyek-proyek penelitian bersama. *Joint seminar*, menghadirkan dan menjadi dosen tamu internasional, pertukaran mahasiswa, *mutual recognition arrangement* (MRA) dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ducker Peter, 1989, *The Practice of Management*, Harper and Row, New York.
- Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1996, *ORGANISASI : Perilaku, Struktur dan Proses*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Held David, 1995, *Democracy And The Global Order : From The Modern State to Cosmopolitan Governance*, Polity Press.
- Hook, Sidney, (1984). *Introduction to Democracy Theory*, Long-Lines Publications, Cambridge.
- Moleong, Lexy J., (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Rosdakarya, Bandung.
- Tilaar, 2002, *Membenahi Pendidikan Nasional*, PT. Rieneka Cipta, Jakarta
- Osborn, David dan Ted Gaebler (1992). *Reinventing Government.: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, New York : A Plume Book.

- Osborne, David dan Gaebler, Ted (1995), *Mewirusahaakan Birokrasi*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Osborne, Davis dan Plastrik, Peter (2000), *Memangkas Birokrasi*, Penerbit PPM, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Pratikno (1999). *Prospek Otonomi Daerah*, Makalah Seminar Otonomi Daerah, FISIPOL UGM, Yogyakarta.
- Zaenal Syarifudin dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2004, *Kinerja Organisasi Publik - Manajemen Publik Untuk Menciptakan kota Bersih & Nyaman Dihuni*, YPAPI, Yogyakarta.



**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL 2015**  
**PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA**  
**MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**  
**( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI**  
**INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



## **KESIAPAN DAERAH DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Muhammad Arif<sup>1</sup>

***Abstrak.** Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tidak lama lagi akan diberlakukan. Kajian mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA terus bergulir dilakukan berbagai pihak, termasuk dalam tulisan ini. Tulisan ini menganalisis bagaimana kesiapan Indonesia dalam konteks nasional dan daerah menghadapi MEA. Posisi Indonesia, kesiapan daerah, dan strategi menghadapi MEA dijelaskan dalam tulisan ini. Pemerintah Indonesia memosisikan diri dapat mengambil keuntungan dari pemberlakuan MEA nanti. Akan tetapi, di tengah optimisme dapat mengambil keuntungan itu, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada fakta-fakta masih tertinggalnya perekonomian Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, terdapat permasalahan tata kelola pemerintahan dan sumber daya manusia. Dalam menghadapi MEA, strategi yang perlu dilakukan pemerintah adalah reformasi tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi iklim ekonomi, dan pemberdayaan UMKM.*

***Kata kunci:** MEA, posisi Indonesia, kesiapan Indonesia, strategi*

### **PENDAHULUAN**

Pada akhir tahun 2015 nanti, negara-negara di Asia Tenggara akan memasuki era baru yang disepakati sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Communities*). Era tersebut merupakan era yang menyatukan Negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam satu basis pasar dan produksi. Pada era tersebut akan terjadi arus keluar masuknya produk, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal yang semuanya bermuara pada prinsip pasar terbuka bebas hambatan.

Helmi (2014) menuturkan bahwa ambisi ASEAN membentuk MEA salah satunya didorong oleh perkembangan eksternal dan internal kawasan. Dari sisi eksternal, Asia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi baru, dengan disokong oleh India, Tiongkok, dan negara-negara ASEAN. Saat ini saja, berdasarkan Laporan Bank Dunia (2014), dengan menggunakan paritas daya beli (PPP) dolar internasional, ekonomi ASEAN menyumbang 6 persen terhadap PDB global. Hal ini menjadikan ASEAN sebagai blok ekonomi terbesar kelima di dunia setelah

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

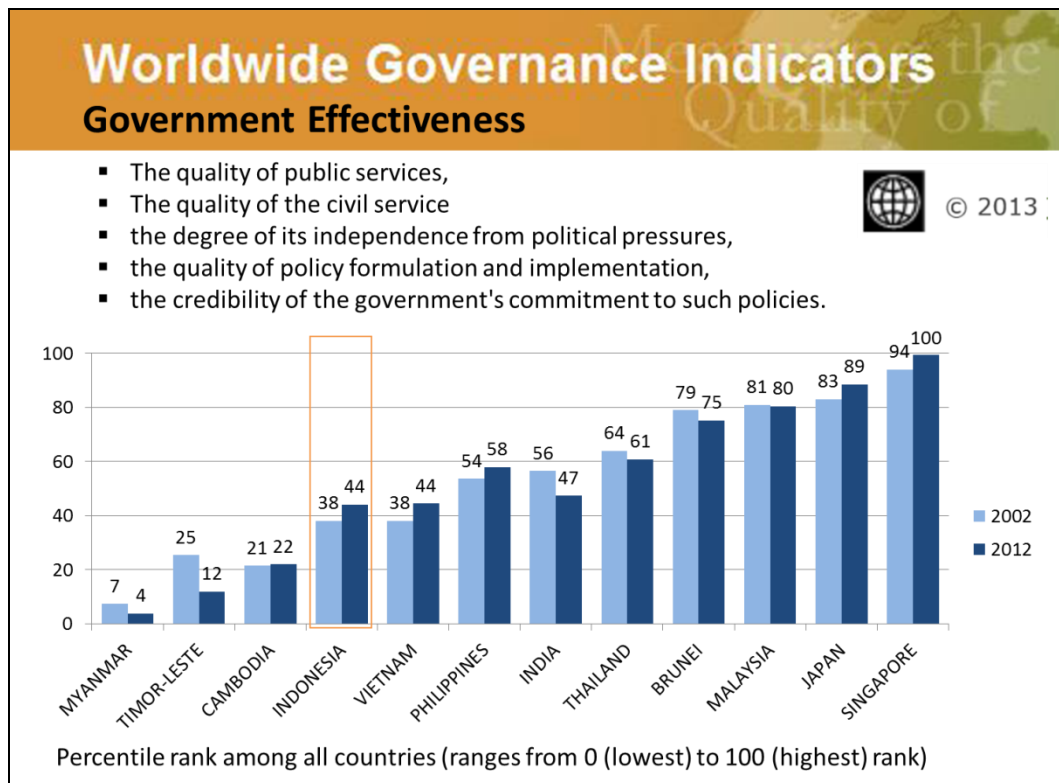


NAFTA (20 persen), EU (17 persen), China (16 persen), dan India (7 persen). Sedangkan dari sisi internal kawasan, krisis keuangan Asia pada tahun 1997/1998 memberikan motivasi lebih lanjut terhadap agenda integrasi regional guna membangun ketahanan yang lebih kuat menghadapi ketidakstabilan keuangan makro. Selain itu, ASEAN juga memiliki pertumbuhan kelas menengah berusia muda yang sangat pesat yang dapat memberikan sumber pertumbuhan baru di kawasan ini.

Bagi Indonesia, MEA dapat menjadi peluang di tengah banyaknya prediksi bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan pembangunan ekonomi yang maju. Asian Development Bank (2012) misalnya menyatakan bahwa bersama-sama Cina, India, Thailand, dan Malaysia, Indonesia sedang menuju kemakmuran dengan *Gross Domestic Products* (GDP) perkapita setara dengan Negara Eropa dan Amerika. Diprediksi pada tahun 2050, GDP negara-negara tersebut mencapai USD\$ 174 Triliun atau 90% dari GDP Asia. Indonesia bahkan diperkirakan akan menjadi negara terbesar ketujuh dalam pembangunan ekonomi pada tahun 2030 (McKinsey, 2012).

Akan tetapi, tidak sedikit yang menyatakan bahwa prediksi-prediksi tersebut akan gagal diraih jika melihat berbagai fakta mengenai tata kelola pemerintahan Indonesia. Dalam laporan *The Global Competitiveness Report* 2014-2015 misalnya, Indonesia ditempatkan pada posisi ke-33 dari 144 negara dalam komponen *favoritism* terhadap perusahaan-perusahaan dan individu-individu berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh pegawai pemerintah. Dalam konteks integritas, Transparency International (2014) menempatkan Indonesia pada posisi 107 dari 174 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, dengan skor 34 atau hanya naik 2 poin dibandingkan dengan tahun 2013. Posisi tersebut jauh di bawah Singapura yang menempati posisi 7 dengan skor 84, Malaysia di posisi 50 (skor 52), dan Thailand serta Filipina yang secara bersamaan menempati posisi 85 (skor 38). Selanjutnya, dalam hal kemudahan melakukan bisnis, Indonesia hanya berada pada peringkat 114 dari 189 negara dengan nilai score 59.15 (World Bank Group, 2015).

Aspek efektivitas pemerintahan juga dinilai kurang baik. World Bank (2013) merilis data efektivitas Pemerintah Indonesia yang tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun 2002 sampai dengan 2012 (lihat gambar 1.1). Bahkan, nilai yang didapatkan Indonesia hanya jauh lebih baik daripada Myanmar, Timor Leste, dan Kamboja di kawasan Asia Tenggara. Data-data tersebut membuat sebagian pihak pesimis Indonesia dapat meraih berbagai prediksi tentang pembangunan ekonomi.



Gambar 1. Efektivitas Pemerintah Indonesia  
Sumber: The World Bank, 2013

Tambunan (2012) menjelaskan bahwa organisasi yang akan mendapatkan keuntungan dari sebuah kompetisi pasar adalah organisasi yang memiliki daya saing. Oleh karena itu, Tambunan (2012) dengan menganalisis berbagai literatur menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi penentu daya saing organisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya keahlian pimpinan, ketersediaan sumber daya, keahlian pegawai, struktur dan manajemen organisasi, ketersediaan informasi, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan input lainnya. Dalam konteks negara sebagai sebuah organisasi, faktor-faktor tersebut diperlukan agar memperoleh keuntungan dari pelaksanaan MEA.

## POSISI INDONESIA DALAM MENGHADAPI MEA

Indonesia diposisikan pemerintah sebagai negara yang memiliki dapat meraih keuntungan menghadapi MEA. Diantara alasannya adalah Indonesia merupakan pasar potensial yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbesar di kawasan (40% dari total penduduk ASEAN). Hal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi yang produktif dan dinamis yang dapat memimpin pasar ASEAN di masa depan dengan kesempatan penguasaan pasar dan investasi. Selain itu, Indonesia merupakan negara tujuan investor ASEAN. Proporsi investasi negara ASEAN di Indonesia mencapai 43% atau hampir tiga kali lebih tinggi dari rata-rata proporsi investasi negara-negara ASEAN yaitu hanya sebesar 15% di kawasan intra-ASEAN. Selanjutnya, Indonesia berpotensi menjadi negara pengeksport, dimana nilai ekspor Indonesia

ke intra-ASEAN hanya 18-19% sedangkan ke luar ASEAN berkisar 80-82% dari total eksportnya, Hal ini berarti peluang untuk meningkatkan ekspor ke intra-ASEAN masih harus ditingkatkan agar laju peningkatan ekspor ke intra-ASEAN berimbang dengan laju peningkatan impor dari intra-ASEAN.

Dalam konteks perdagangan, liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan non-tarif sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang sudah bebas di kawasan dengan sendirinya akan mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Di sisi lain, para konsumen juga mempunyai alternatif pilihan yang beragam yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Indonesia sebagai salah satu negara besar yang juga memiliki tingkat integrasi tinggi di sektor elektronik dan keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber daya alam, berpeluang besar untuk mengembangkan industri di sektor-sektor tersebut di dalam negeri.

Bonus demografi juga menjadi alasan pemerintah bahwa Indonesia akan mendapat keuntungan dari pelaksanaan MEA. Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar akan memperoleh keunggulan tersendiri, yang disebut dengan bonus demografi. Perbandingan jumlah penduduk produktif Indonesia dengan negara-negara ASEAN lain adalah 38:100, yang artinya bahwa setiap 100 penduduk ASEAN, 38 adalah warga negara Indonesia. Bonus ini diperkirakan masih bisa dinikmati setidaknya sampai dengan 2035, yang diharapkan dengan jumlah penduduk yang produktif akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita penduduk Indonesia.

Posisi yang berusaha diraih pemerintah Indonesia tersebut harus dihadapkan pada fakta bahwa perekonomian Indonesia relatif tertinggal dibandingkan negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Studi Bank Dunia (2013) menyebutkan, daya saing produk ekspor Indonesia relatif tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lain, terutama kaitannya dengan nilai tambah produk ekspor kita. Komposisi ekspor kita terbesar didominasi komoditas (resource based) dan barang primer (primary product). Kondisi ini menyebabkan ekspor Indonesia rentan dengan gejolak harga. Hal ini pula yang saat ini kita rasakan, ekspor kita melemah akibat pelemahan perekonomian dunia yang menyebabkan harga komoditas dunia juga ikut menurun.

Berbeda dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand, sebagian besar eksportnya didominasi oleh produk-produk yang telah disentuh teknologi (medium and high tech product). Kondisi infrastruktur kita juga relatif tertinggal. Infrastruktur logistik kita misalnya berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) 2012 yang dikeluarkan Bank Dunia, Indonesia hanya menduduki peringkat ke-59 atau jauh di bawah Singapura yang berada di puncak di antara 155 negara yang disurvei.

Posisi dan daya saing industri logistik Indonesia bahkan kalah dibanding Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina dan hanya unggul terhadap Myanmar dan Kamboja. Indonesia pasar ekonomi yang besar. Kelas menengah Indonesia

semakin bertambah. PDB per kapita Indonesia sudah mendekati USD5.000, yang berarti daya beli masyarakat kita yang cukup tinggi. Tingginya daya beli ini akan menjadi bumerang bagi "neraca ekonomi" kita bila daya saing dan kesiapan infrastruktur kita tidak segera dibenahi dalam menghadapi MEA 2015 ini.

Ekspor kita menjadi kurang bersaing karena nilai tambahnya rendah. Di sisi lain, Indonesia akan menjadi pasar barang dan jasa impor yang empuk, sementara nilai tambah dari barang dan jasa impor tersebut bagi kita sangat kecil. Saat ini dampak dari rendahnya daya saing kita tersebut sudah terasa. Sejak 2012 neraca perdagangan kita telah defisit. Sementara neraca jasa kita sejak dulu tidak mengalami perbaikan, dalam arti selalu defisit.

Tingginya pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia dalam satu dekade ini menyebabkan demand masyarakat kita meningkat. Sayangnya, karena lemah struktur industri kita, demand masyarakat tersebut tidak bisa dipenuhi industri domestik, melainkan harus diimpor. Ketika ekspor booming, kita juga tidak bisa memaksimalkan nilai tambahnya. Ekspor komoditas dan barang primer harus diangkut melalui pelabuhan dan menggunakan kapal.

Sayangnya, karena ketidaksiapan infrastruktur pelabuhan dan kapal kita, terpaksa ekspor tersebut harus dilakukan di pelabuhan negara tetangga dan diangkut dengan kapal berbendera asing. Tidak hanya itu, asuransi angkutannya pun harus dengan perusahaan asuransi asing sehingga neraca jasa kita mengalami defisit. Indonesia negara dengan penduduk yang besar. Kebutuhan energinya juga besar seiring pertumbuhan ekonominya yang tinggi. Pada 2012 kebutuhan minyak kita mencapai 73 juta ton, terbesar kelima di Asia.

Sayangnya, karena kapasitas infrastruktur kilang minyak yang tidak cukup, setiap tahun impor BBM kita terus meningkat. Indonesia kini telah menjadi importir premium (gasoline) terbesar di dunia. Sekitar 30 persen kebutuhan BBM domestik harus dipenuhi dari impor. Negara yang memiliki infrastruktur kilang minyak diuntungkan dengan posisi Indonesia ini, yang salah satunya Singapura karena memiliki kilang minyak dengan kapasitas yang besar sehingga bisa mengekspor BBM-nya, termasuk ke Indonesia.

### **KESIAPAN DAERAH DALAM MENGHADAPI MEA (KASUS KOTA TANJUNGPINANG)**

Posisi Indonesia dalam menghadapi MEA seperti dijelaskan sebelumnya merupakan gambaran secara nasional. Jika dilihat per daerah, maka proporsi kesiapannya dapat berbeda. Ada daerah yang siap, ada juga yang belum. Menarik untuk dilihat lebih mendalam adalah daerah-daerah yang berbatasan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, salah satunya Provinsi Kepulauan Riau dengan ibu kotanya Kota Tanjungpinang yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kesiapan Kota Tanjungpinang dalam menghadapi MEA dari berbagai aspek.

Pertama, dari aspek tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kota Tanjungpinang masih harus berbenah. Sebagai contoh, indeks persepsi korupsi (IPK) Kota Tanjungpinang masih rendah, berdasarkan temuan Transparency Internasional (2010) yang merilis data tentang indeks persepsi korupsi (IPK) di 50 daerah di Indonesia, salah satunya Kota Tanjungpinang. Dari laporan

Transparency International tersebut, nilai IPK Kota Tanjungpinang hanya 4,55. Nilai yang menggambarkan bahwa persepsi anti korupsi di Kota Tanjungpinang masih rendah. Masih dalam laporan yang sama, pelaku bisnis memandang rendah upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk memberantas korupsi. Pelaku bisnis memberikan nilai 4,48 bagi upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk memberantas korupsi. Data-data tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tanjungpinang harus diperbaiki.

Kedua, terkait aspek sumber daya manusia. Menurut catatan Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang (2013), mayoritas penduduk Kota Tanjungpinang lulusan SMA/ sederajat, yaitu 43,93%. Kemudian diikuti oleh lulusan SMP/ sederajat dengan persentase 19,69% dan SD/ sederajat sebesar 18,69%. Sementara penduduk yang menjadi lulusan pendidikan diploma I/II/III sebesar 4,18% dan Diploma IV/S1/S2/S3 adalah 7,36%. Melihat data tersebut, maka perlu ada pembenahan pada sektor pendidikan di Kota Tanjungpinang.

Dalam konteks menghadapi MEA, sumber daya manusia menjadi salah satu aspek yang perlu dipersiapkan. Persaingan dunia kerja tidak hanya akan terjadi antara penduduk local, tetapi juga antar kawasan. Maka dengan begitu diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dan dunia kerja biasanya membutuhkan tenaga kerja yang minimal berkualifikasi diploma atau sarjana. Melihat data kependudukan Kota Tanjungpinang di atas, maka akan banyak penduduknya yang tidak dapat bersaing menghadapi MEA.

Ketiga, terkait perekonomian daerah. Perekonomian Kota Tanjungpinang secara umum ditopang oleh sektor perdagangan hotel dan restoran. Tahun 2013, kontribusi sektor ini menjadi penyumbang terbesar yaitu 30,47 persen terhadap total. Hal ini sangatlah wajar mengingat wilayah Kota Tanjungpinang berada di antara Kota Batam, Kabupaten Bintan, Negara Singapura, Negara Malaysia, dan Provinsi Riau, sehingga menjadikan Kota Tanjungpinang tempat yang strategis untuk berbagai kegiatan perdagangan. Selain itu pada tahun 2013, penduduk Kota Tanjungpinang yang bekerja terbanyak pada sektor perdagangan hotel dan restoran mencapai 33,18 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa sektor ini merupakan sektor vital yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Sektor lain yang merupakan primadona perekonomian Kota Tanjungpinang pada tahun 2013 adalah sektor bangunan serta pengangkutan dan komunikasi. Kedua sektor tersebut memberikan kontribusi masing-masing sebesar 19,42 persen dan 17,17 persen. Hal ini disebabkan semakin tingginya permintaan akan kebutuhan tempat tinggal oleh masyarakat sehingga terjadi peningkatan realisasi proyek fisik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Selain itu juga semakin bertambahnya sarana angkutan udara karena terjadinya mobilisasi penduduk yang datang dari luar kota Tanjungpinang maupun penduduk yang berasal dari kota Tanjungpinang itu sendiri.

Dari hasil penghitungan PDRB diketahui bahwa tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang sebesar 6,98 persen dimana mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 7,09 persen namun tetap berada pada arah yang positif. Pertumbuhan yang dihasilkan dari seluruh sektor yang ada di Kota Tanjungpinang masih berada pada kisaran angka 7 pada dua periode tahun belakangan, Ini menunjukkan bahwa perekonomian di

Kota Tanjungpinang tetap kompetitif walaupun situasi global tengah mengalami resesi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang pada tahun 2013 utamanya ditopang oleh pertumbuhan sektor bangunan yang mencapai 9,82 persen. Selain disebabkan semakin tingginya permintaan akan kebutuhan tempat tinggal, meningkatnya pembangunan dan perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran perhubungan darat dalam kota juga memberi peran terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor bangunan tersebut. Hal ini sejalan dengan sektor yang menjadi primadona perekonomian Kota Tanjungpinang dimana sektor perdagangan, hotel dan restoran berada pada urutan kelima dengan laju pertumbuhan sekitar 7,53 persen, serta pengangkutan dan komunikasi dengan laju pertumbuhannya sebesar 7,71 persen pada tahun 2013.

Di sisi lain, Sektor Pertambangan dan Penggalan berada pada urutan kedua dalam pertumbuhannya yaitu mencapai 8,47 persen. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2013 kegiatan pertambangan khususnya bauksit akan di hentikan pada tahun 2014. Jadi para pengusaha bauksit memaksimalkan pertambangannya di tahun 2013.

Melihat sektor-sektor lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB Kota Tanjungpinang, maka mengindikasikan beberapa hal. Pertama, dapat dikatakan Kota Tanjungpinang dapat meraih keuntungan dari perpindahan manusia yang datang ke Kota Tanjungpinang nantinya berhubung sektor andalannya ada pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Akan tetapi, indikasi kedua, besarnya kontribusi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran menyebabkan kurangnya kontribusi sektor lapangan usaha yang mengeksport produk dari Kota Tanjungpinang. Kondisi seperti ini dalam konteks MEA nantinya kurang menguntungkan Indonesia, karena dapat membuat Indonesia menjadi negara yang menjadi sasaran ekspor negara lain, bukan sebaliknya.

Keempat, terkait usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari delapan aturan kunci (golden rules) peringkat kompetitif dunia yang dikeluarkan oleh International Institute for Management Development (IMD), salah satunya adalah dukungan terhadap UMKM. Pada masa krisis moneter, UMKM mampu bertahan dan terus berkembang, hal tersebut dapat memberikan peluang peningkatan daya saing. Namun demikian, UMKM masih berada pada area kurang diperhatikan oleh pemerintah. Ketiadaan pendampingan dari pemerintah untuk menstandarkan produk lokal dan menginternasionalkan UMKM, membuat UMKM sulit bersaing dan kalah pada pasar lokal. Keanekaragaman yang dimiliki UMKM Indonesia berpeluang untuk membentuk pasar ASEAN, salah satu contohnya adalah kerajinan tangan, furniture, makanan daerah, dan industri lainnya. Khusus di Kota Tanjungpinang, UMKM yang berada disana lebih banyak beroperasi pada produk makanan. Pada tahun 2013, dari 4.924 UMKM, 2.914 UMKM-nya beroperasi pada produk makanan.

## **STRATEGI MENGHADAPI MEA**

Pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kontribusi pembangunan daerah. Dalam hal ini, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah

pusat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Termasuk dalam kebijakan menghadapi MEA, kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak bisa diabaikan oleh pemerintah daerah.

Meskipun secara prinsip harus sejalan, tetapi tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah memiliki inovasi-inovasi dalam membangun daerahnya, sehingga memiliki kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Beberapa daerah yang khususnya memiliki kepala daerah yang inovatif telah melakukan itu. Hal ini tidak lain karena kebijakan otonomi daerah yang menjadikan daerah memiliki wewenang mengatur dan mengurus atas urusan-urusan yang dilimpahkan kepadanya.

Dalam menghadapi MEA, tentunya pemerintah pusat telah membuat kebijakan-kebijakan terkait hal itu. Hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan, baik harmonis dalam peraturan perundang-undangannya maupun implementasi programnya. Selain perlunya penyelenggaraan pemerintahan yang harmonis, beberapa strategi di bawah ini perlu dilakukan dalam menyongsong MEA.

Pertama, reformasi tata kelola pemerintahan. Kelembagaan dan pemerintah yang taat hukum dan tidak memihak sangat diharapkan. Sikap kelembagaan dan pemerintah yang kooperatif terhadap pelaku usaha merupakan salah satu hal yang harus diperbaiki. Tidak mempersulit urusan administrasi dan birokrasi yang berkepanjangan. Penguatan lembaga hukum harus ditingkatkan, terutama dalam hal independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, sehingga tercipta iklim kelembagaan hukum yang profesional dan transparan. Upaya peningkatan kesejahteraan kelembagaan dan pemerintah juga terus dilaksanakan guna mencegah tindakan yang mengarah dan berpotensi koruptif atau pungli.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. SDM merupakan hal yang paling krusial dalam menghadapi MEA. SDM yang berkualitas akan mampu bersaing dan kuat menghadapi tantangan. Cekatan serta inovatif dalam mengambil ide, langkah, dan tindakan. Peningkatan kualitas SDM misalnya dengan pelatihan bahasa. Bahasa sangat penting dalam peranan persaingan global, terutama bahasa Inggris. Selain itu, pengembangan skill dapat dilakukan dengan pelatihan, workshop, pertemuan rutin antar pelaku ekonomi, juga pembangunan networking. Semua hal ini dilakukan agar pelaku ekonomi selalu mengikuti perkembangan terbaru perekonomian.

Ketiga, reformasi iklim ekonomi. Indonesia harus melakukan pembenahan iklim ekonomi melalui perbaikan infrastruktur, menciptakan stabilitas makro-ekonomi, serta adanya kepastian hukum dan kebijakan, dan memangkas ekonomi biaya tinggi. Penyediaan modal juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kapastias produksi suatu usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga permodalan yang mudah diakses oleh pelaku usaha dari berbagai skala. Terutama pelaku UMKM yang seringkali kesulitan dalam penambahan modal.

Keempat, pemberdayaan UMKM. UMKM merupakan sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan.

Pemberdayaan ini dapat menciptakan iklim usaha dan mengurangi ekonomi biaya tinggi. Pemberdayaan UMKM sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Persaingan dalam hal kualitas maupun kuantitas yang bukan hanya untuk pasar local dan nasional, tetapi juga ekspor. Semakin banyak UMKM yang bisa mengekspor, akan semakin besar pula daya saing ekonomi Indonesia. Pelatihan penggunaan website dalam rangka memperluas segmentasi konsumen juga sangat diperlukan di era digital saat ini. Hal ini yang terkadang masih jarang dilakukan oleh UMKM.

## PENUTUP

Masyarakat Ekonomi ASEAN memberi babak baru pada interaksi ekonomi antar negara-negara di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia memposisikan diri dapat mengambil keuntungan dari pemberlakuan MEA nanti. Akan tetapi, di tengah optimisme dapat mengambil keuntungan itu, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada fakta-fakta masih tertinggalnya perekonomian Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, terdapat permasalahan tata kelola pemerintahan dan sumber daya manusia yang dapat menghambat tercapainya keuntungan dari MEA tersebut. Oleh sebab itu, beberapa strategi yang dirumuskan sebelumnya dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya sehingga akan lebih siap lagi menghadapi MEA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kota Tanjungpinang, 2014. Indikator Pembangunan Manusia Kota Tanjungpinang Tahun 2014. Tanjungpinang: Bappeda Kota Tanjungpinang.
- Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, 2014. Kota Tanjungpinang dalam Angka Tahun 2014. Tanjungpinang: BPS Kota Tanjungpinang.
- Helmi, Alfian, 2014. Kesiapan Menghadapi MEA 2015. (Online) <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/14/12/29/nhbp7h-kesiapan-menghadapi-mea-2015> diakses 23 Oktober 2015.
- McKinsey, 2012. Perekonomian Nusantara: Menggali Potensi Terpendam Nusantara. Jakarta: McKinsey & Company di Indonesia.
- Tambunan, Tulus, 2012. *Indikator Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Bappenas RI.
- Transparency International Indonesia, 2010. *Corruption Perception Index*. Jakarta: TI.
- Transparency International, 2014, *Corruption Perception Index 2014*, (Online) at <http://www.transparency.org/country#SGP>, diakses 23 Oktober 2015.
- World Bank, 2013. *Worldwide Governance Indicators*. USA: The World Bank.
- World Economic Forum, 2014, *The Global Competitiveness Report 2014-2015*, (Online) at <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/economies/#indexId=GCI&economy=SGP>, diakses 23 Oktober 2015.





**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK  
JALANAN PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI  
KOTA SEMARANG**

Oleh:

Katon Alif Utama<sup>1</sup>, Endang Larasati<sup>2</sup>, Kismartini<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*A city of Semarang Central Java Province experienced problems every year an increasing number of street children, beggars and vagabonds. This is what underlies the issuance of Local Regulation No. 5 Year 2014 about the handling of street children, beggars and homeless in the city of Semarang. Researchers interested in studying more deeply how the relevant agencies that implement this policy run. This study is a qualitative research with a descriptive analysis of the locus in some government agencies, such as Social Service of Youth and Sports Semarang, Semarang City Unit of the Civil Service, Social Rehabilitation Among Jiwo, and also Center for Social stopover Margo Widodo. Researchers look at the implementation of policies that are run by prevention, rehabilitation treatment, post rehabilitation, and administration of sanctions fines and imprisonment. To determine the factors driving and inhibiting implementation author uses the theory of Edward III consisting of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results showed that there are still some things that need to be corrected in the process of policy implementation that is not the duty officer who occupy posts for the supervision of beggars and homeless, shelters while the capacity is already inadequate to accommodate beggars and the homeless, the provision of skills training which are not effective because it was given to a homeless psychotic, the difficulty of doing a referral hospital for beggars and homeless people who are sick. Factors that inhibit the implementation of this policy include communication, a lack of coordination between municipal police with the social rehabilitation Among Jiwo or reinforcements stopover social Margo Widodo, then resources, the lack of quantity of human resources to carry out tasks and activities Among Jiwo and Margo Widodo, lack of adequate storage facilities, lack of provision of training facilities existing skills, a lack of funding sources for activities at the shelter.*

**Keywords: Policy Implementation , management , street children , beggars , vagrant**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

<sup>2</sup> Dosen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

<sup>3</sup> Dosen Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Semarang adalah Kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak nomor dua di Indonesia. Di Kota Semarang sendiri pengemis dan gelandangan sangat mudah di jumpai di berbagai tempat yang ramai dan di persimpangan jalan yang terdapat lampu lalu lintas. Biasanya para pengemis dan gelandangan akan mendatangi para pemilik kendaraan yang sedang menunggu lampu hijau dan meminta uang kepada para pengendara di jalanan.

Permasalahan tentang banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Semarang ini menjadi semakin serius, sehingga baru-baru ini dikeluarkanlah Perda No 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Diharapkan dengan dikeluarkannya kebijakan ini akan mampu mengatasi permasalahan mengenai jumlah pengemis dan gelandangan yang semakin meningkat dari tahun-ketahun.

### B. TUJUAN

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Perda No 5 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi Perda No 5 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

### C. TEORI

#### 1. Administrasi Publik

Administrasi Publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik serta melembagakan praktek-praktek manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien, dan rasional.

Hebert A. Simon (Syafii, 2006: 13) mendefinisikan administrasi “sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.” Definisi dari Hebert A. Simon ini menjelaskan bahwa administrasi merupakan sebuah kerjasama kelompok dimana di dalam kerjasama ini memiliki sebuah tujuan bersama yang hendak dicapai.

#### 2. Model Implementasi Kebijakan

Dalam pandangan Edwards III, dikutip oleh Leo Agustino (2014, 149-154), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Pendekatan ini disebut juga dengan model implementasi kebijakan publik *direct and indirect impact on implementation*.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Variable atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai implementasi kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.

Variabel keempat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal lain ini akan menyebarkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

#### **D. METODE**

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Semarang, sehingga metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat analisis diskriptif.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

##### **1. Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan, Pengemis, dan Gelandangan di Kota Semarang**

Implementasi adalah tahapan terpenting dalam sebuah kebijakan, karena sebaik apapun pembuatan perencanaan kebijakan namun tanpa implementasi yang baik maka perencanaan kebijakan sebaik apapun tidak akan baik hasilnya.

Pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Semarang yang tertuang dalam Perda No 5 Tahun 2014 ini secara garis besar dilakukan dengan empat cara, yaitu penanganan pencegahan, penanganan dengan rehabilitasi sosial, penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial, dan dengan penegakan hukum. Berikut ini hasil penelitian implementasi kebijakan penanganan anak jalanan, pengemis, dan gelandangan di Kota Semarang.

a. Penanganan Pencegahan

Penanganan pencegahan dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan melakukan pendataan, sosialisasi, dan pemantauan pengendalian, dan pengawasan. Pendataan selama ini dilakukan oleh Satpol PP dan juga panti rehabilitasi sosial, pendataan telah dilakukan dengan baik untuk mengetahui latar belakang dari para gelandangan yang terjaring razia Satpol PP dan ditempatkan di panti rehabilitasi. Sosialisasi selama ini dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dan juga Satpol PP, sosialisasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung, secara langsung dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga dengan memanggil dan mengumpulkan unsur-unsur terkait untuk diberikan sosialisasi, sedangkan secara tidak langsung dilakukan melalui media massa, elektronik, dan media cetak yang dibagikan kepada masyarakat. Pemantauan pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh Satpol PP dengan cara melakukan operasi razia secara berkala untuk menangkap pengemis dan gelandangan yang ada di Kota Semarang.

b. Penanganan Rehabilitasi Sosial

Penanganan rehabilitasi sosial dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan perlindungan, penampungan sementara, bimbingan sosial dan pemberdayaan, dan rujukan. Perlindungan ini dilakukan dengan mendirikan posko-posko yang ada di area-area yang berpotensi menjadi tempat para pengemis dan gelandangan untuk mengemis, posko-posko selama ini telah ada namun untuk belum ada petugas jaga yang ada pada posko karena belum ada koordinasi lebih lanjut sehingga belum berjalan secara maksimal. Penampungan sementara yang ada di Kota Semarang untuk menampung hasil razia Satpol PP ada pada panti rehabilitasi sosial Among Jiwo dan juga balai persinggahan sosial Margo Widodo, namun sayangnya kapasitas tempat penampungan yang ada masih belum memadai untuk menampung seluruh hasil razia Satpol PP yang ada selama ini karena keterbatasan kapasitas tempat penampungan yang ada. Bimbingan sosial dan pemberdayaan kepada para pengemis dan gelandangan, selama ini pemberian bimbingan sosial telah dilakukan oleh panti Among Jiwo dan Margo Widodo, namun untuk pelatihan atau pemberdayaan hanya bisa dilakukan oleh panti Margo Widodo yang memiliki fasilitas, pemberian pelatihan di panti ternyata selama ini hanya bersifat mengisi waktu luang yang diberikan sebagian besar kepada gelandangan psikotik yang ada di tempat penampungan sehingga pemberian pelatihan ini dirasa kurang tepat sasaran. Rujukan untuk para pengemis dan gelandangan yang sakit untuk dirawat kerumah sakit sangat

sulit untuk dilakukan, hal ini dikarenakan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit harus memiliki identitas lengkap yang bisa menjadi persyaratan untuk dirawat di rumah sakit dengan menggunakan BPJS yang dibayar oleh pemerintah, namun kebanyakan yang mengalami sakit adalah gelandangan psikotis yang sulit untuk dimintai keterangan sehingga rujukan masih belum bisa dilakukan secara maksimal.

c. Penanganan Lanjut Pasca Rehabilitasi Sosial

Penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial dilakukan dengan berbagai cara, beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan penempatan pendidikan formal dan nonformal, bantuan stimulus beasiswa dan peralatan sekolah, bantuan peralatan kerja dan modal usaha, mengembalikan kepada pihak keluarga atau daerah asal. Penempatan pendidikan formal atau nonformal diberikan kepada anak jalanan yang masih ingin melanjutkan sekolah, Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang memberikan bantuan agar anak jalanan dapat bersekolah kembali. Bantuan beasiswa diberikan kepada anak jalanan yang kurang mampu dengan cara memberikan bantuan uang kepada penerima bantuan melalui uang yang dikirim kerekening penerima bantuan secara langsung yang diberikan setiap tahun sekali oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Bantuan peralatan kerja dan modal usaha selama ini belum diberikan, selama ini hanya pemberian pelatihan saja kepada pengemis dan gelandangan namun belum ada bantuan alat kerja dan modal usaha yang diberikan. Pengembalian kepada keluarga selama ini dilakukan apabila ada keluarga dari pengemis dan gelandangan yang mau mengambil keluarganya yang terjaring razia, pengembalian kepada keluarga ini sebagian besar adalah keluarga dari pengemis aktif karena dianggap menghasilkan, meskipun dalam pengambilan harus menulis surat pernyataan tidak akan mengemis lagi namun kenyataannya pengemis yang sama tetap mengemis kembali.

d. Denda dan Hukuman Kurungan

Selama ini denda dan hukuman kurungan bagi pelanggar Perda belum diberlakukan karena masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat, selama ini yang dilakukan hanyalah teguran bagi masyarakat yang masih memberi uang kepada pengemis di jalan oleh Satpol PP.

**2. Faktor yang Mendorong dan Menghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Pengemis dan Gelandangan di Kota Semarang.**

Faktor yang mendorong implementasi kebijakan ini adalah komunikasi dalam hal kejelasan, setiap instansi telah mengetahui dengan jelas apa tugas dan fungsinya masing-masing, kemudian sumber daya dalam hal informasi dan wewenang setiap instansi telah mengetahui arahan yang ada dalam perda dengan jelas dan mengetahui kewenangannya masing-masing, disposisi dalam hal pengangkatan birokrat dan insentif tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan Perda, struktur birokrasi dalam hal ini *fragmentasi* di setiap instansi telah membagi tugas dan tanggungjawab kepada setiap bagian untuk bekerja bersama.

Faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini adalah komunikasi dalam hal transmisi masih belum baik, koordinasi antar instansi terkait masih

kurang maksimal. Sumber daya dalam hal ini staf dan juga fasilitas masih belum memadai sesuai dengan yang dibutuhkan, staf atau pegawai yang ada di panti rehabilitasi masih kurang dan fasilitas yang ada di panti penampungan juga belum bisa dikatakan maksimal untuk menjalankan Perda ini. Struktur birokrasi dalam hal ini standar operasional prosedur yang dilakukan antar instansi masih belum berjalan dengan baik dan belum maksimal.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dalam implementasi kebijakan penanganan anak jalanan pengemis dan gelandangan di Kota Semarang masih belum berjalan atau dilakukan secara maksimal sebagaimana seharusnya seperti yang ada dalam Perda. Hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor penghambat yang membuat pelaksanaan kebijakan belum bisa dilakukan secara maksimal seperti seharusnya. Faktor-faktor penghambat tersebut seperti komunikasi, sumber daya dan juga struktur birokrasi yang menjadikan pelaksanaan kebijakan kurang maksimal.

### **B. Saran**

Rekomendasi berdasarkan faktor-faktor penghambat yang ada dalam penanganan anak jalanan, pengemis, dan gelandangan di Kota Semarang :

1. Melakukan perbaikan koordinasi dengan setiap instansi terkait dalam setiap kegiatan penanggulangan anak jalanan, pengemis, dan gelandangan di Kota Semarang.
2. Perlunya penambahan jumlah SDM di panti rehabilitasi sosial Among Jiwo dan juga balai persinggahan sosial Margo Widodo dikarenakan jumlah SDM masih kurang mencukupi.
3. Perlunya peningkatan kapasitas penampungan atau panti untuk menampung hasil razia PGOT, hal ini bisa dilakukan dengan segera memulai pembangunan resource terpadu yang telah direncanakan untuk dibangun di daerah Rowosari agar daya tampung yang ada mampu menampung semua PGOT yang tertangkap razia.
4. Perlunya dibuat alur standar operasional prosedur yang lebih jelas dan lebih rinci antar setiap instansi terkait, mulai dari Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga, Satpol PP Kota Semarang, Panti Rehabilitas Sosial Among Jiwo, dan juga Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo, sehingga koordinasi terjalin dengan baik dari satu instansi ke instansi lain dan diharapkan tidak terjadi penolakan di tempat penampungan karena kurangnya koordinasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Leo, Agustino. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Mantra, Ida Bagoes. 2008. *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. Jakarta : PT Gramedia.
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Syafie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Afabeta.
- Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta : Prenada Media Group.
- Widodo, Joko. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Malang : Banyumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik. Jakarta : Center of Academic Publishing Service.
- Asrul Nurdin. 2013. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Di Kota Makassar. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Dinar Ayu Nastiti. 2012. Analisis Kinerja Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Inne Septiana Permatasari. 2013. Strategi Penanganan Anak Jalanan Prmrintah Kota Semarang. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Irka Suryani. 2013. Perilaku Pengemis Di Kota Palembang (Studi Pada Komunitas Pengemis Di Kawasan Masjid Agung). Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Nitha Chitrasari. 2012. Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon Dalam Penanganan Gelandangan, dan Pengemis Di Kota Cilegon. Serang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Muslim S. Sos, M. Si, 2013, "Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru". Jurnal EL-RIYASAH. Volume 4, No 1.
- Anastasia Puspita W. & Argo Pambudi, M. Si, 2013, "Strategi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis". E Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta. Volume Oktober, No 2.

Internet :

<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1488>

<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489>

<http://www.jatengprov.go.id/id/berita-skpd/mimpi-gubernur-jateng-model-percontohan-penanganan-pmks-di-indonesia>

[http://www.rri.co.id/post/berita/90709/nasional/jumlah\\_pengemis\\_dan\\_gelandangan\\_di\\_indonesia\\_masih\\_tinggi.html](http://www.rri.co.id/post/berita/90709/nasional/jumlah_pengemis_dan_gelandangan_di_indonesia_masih_tinggi.html)

<http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=644>

<http://simgakin.semarangkota.go.id/2015/website>



**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL 2015  
PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA  
MENYONGSONG ASEAN ECONOMIC COMMUNITY  
( MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ) MELALUI  
INOVASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PUBLIK**



**KEMANFAATAN JEJARING KEBIJAKAN PUBLIK  
STUDY KASUS KEMACETAN JALUR INFRASTRUKTUR  
INDUSTRI DALAM MENGHADAPI MEA 2015**

Oleh : *Diana Sukorina*

**LATAR BELAKANG**

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah bentuk salah satu pilar dari ketiga pilar Komunitas Asean 2015, Komunitas ASEAN 2015 merupakan hasil dari KTT Asean ke-9 pada tahun 2003 di Bali. Pada saat itu dicanangkan komunitas Asean yang akan berlaku pada tahun 2020. Namun hal itu dipercepat kedatangannya menjadi tahun 2015 yang disepakati pada saat KTT Asean ke-12 yang berlangsung di Kuala Lumpur tahun 2007.

Komunitas Asean 2015 bertujuan membangun kembali hubungan kerja sama antar Negara anggota Asean secara lebih luas. Komunitas Asean juga berkekuatan bersama dalam sebuah integrasi organisasi kawasan yang lebih solid dan maju membangun kebersamaan untuk satu tujuan (satu visi, satu identitas dan satu komunitas) mendorong kepedulian demi kesejahteraan bersama diantara Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, terdapat tiga pilar dalam komunitas Asean yaitu :

1. Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN
2. Komunitas Ekonomi Asean
3. Komunitas Sosial dan Budaya Asean

Salah satu pilar itu adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN ( MEA ) 2015, kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA telah diukur dan dilakukan kajian-kajian atas Hambatan MEA yang diantaranya adalah pertama , mutu pendidikan tenaga kerja, kedua ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran lalu lintas barang dan jasa . Salah satu yang sangat vital sebagai penunjang kelancaran ekonomi, ketiga sector industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setelah jadi, keempat keterbatasan pasokan energy, kelima lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor.

Menjelang MEA yang sudah didepan mata, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis dalam sector tenaga kerja , infrastruktur , dan sector industry agar siap menghadapi MEA yang penuh



peluang dan resiko, sementara menghadapi perubahan lingkungan strategis eksternal yang begitu cepat, kompleks dan dinamis (Sanim, 1999 :1)

Dalam study kasus kemacetan jalur infrastruktur sektor Industri di PT. Sai Apparel sebagai perusahaan garment perlu kita cermati dengan semakin ketatnya persaingan bisnis khususnya pada perusahaan produksi garment yang dapat menyerap begitu banyak tenaga kerja ,agar tetap memperhatikan faktor hambatan disektor infrastruktur dan industri maka supaya tetap *survive* di lingkungan masyarakat yang merasakan langsung imbas dari kegiatan produksi maka pihak perusahaan harus memperhatikan keadaan lingkungan. Salah satunya adalah Kegiatan Community Development yang pada dasarnya merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan terhadap lingkungan. Kegiatan community development merupakan salah satu bentuk investasi sosial dengan keuntungan jangka panjang. Kegiatan community development merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pengembangan lingkungan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pendanaan kegiatan community development diambilkan dari keuntungan perusahaan yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar perusahaan.

Kegiatan community development dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Karena itu program dan prakarsa dalam *community relations* difokuskan untuk menanamkan kebanggaan karyawan, membangun kepercayaan publik, menumbuh kembangkan pendidikan, memberi respons terhadap kebutuhan komunitas dan meningkatkan citra perusahaan. Semua langkah dalam program *community relations* dilakukan dengan didasarkan pada nilai-nilai dasar perusahaan yakni menghormati individu, integritas yang utuh, keterpercayaan, kredibilitas dan perbaikan berkelanjutan, pembaharuan pribadi dan serta pengakuan dan nama baik. Keadaan ini tidak akan lepas dari hubungan terhadap lingkungan produksi dan pemerintah.

Seperti halnya yang dilakukan oleh perusahaan lain study kasus pada PT. Sai Apparel sebagai perusahaan dengan jumlah pekerja rata –rata lebih dari 10.000 orang pekerja yang mempunyai daftar persoalan yang sama dengan sebagian besar pelaku industri di tanah air yang menjalankan berbagai aktivitas fisik community development yang perlu dilakukan dan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa walaupun disana telah terjadi aktivitas community development yang memang memberi pencitraan positif bagi manajemen tetapi masih ada saran agar kegiatan community development lebih ditingkatkan dan kontinuitasnya dijadikan suatu acuan aktifitas sosial perusahaan. Serta penyelenggaraan kegiatan community development yang berorientasi pada perlindungan budaya lokal agar lebih dikembangkan menjadi sebuah aset yang dapat dipergunakan untuk membangun kebanggaan masyarakat atau penduduk lokal. Pengertian ini menunjukkan bahwa community development sangatlah penting sebagai aktifitas corporate social responsibility untuk membantu perusahaan dalam bersaing di dunia bisnis dalam eksistensi produksi dan

pemasaran, yang berhubungan erat dengan dengan solusi terhadap hambatan bagi masyarakat Indonesia pada saat MEA telah terlaksana nantinya

Sementara dalam penanganan industri di Indonesia khususnya pasar ekspor dan import sering diwarnai dengan hambatan proses infrastruktur yang masih kurang memadai sehingga mempengaruhi kelancaran lalu lintas barang dan jasa, dalam contoh study kasus di PT. Sai Apparel gambaran perusahaan ini menyatakan bahwa sebagian besar hambatan MEA terjadi disini dari mulai proses sumber daya manusia, kualitas infrastruktur dalam hal ini kemacetan lalu lintas disekitar kawasan berikat yang menyerap banyak tenaga kerja, kemudian muncul suatu strategi dalam penyelesaian kemacetan lalu lintas sekitar kawasan berikat yang krodit akibat jumlah buruh yang banyak, saya kira akan menjadi contoh bagi kawasan berikat lain dalam menangani keterlambatan perjalanan produksi dan keresahan masyarakat sekitar sebagai stakeholder utama dalam community development, sekaligus sebagai salah satu prioritas dalam community relations. Lalu bagaimana kita merefleksikan dalam kemanfaatan proses jejaring kebijakan publik yang tepat sehingga hambatan dalam penyelesaian penunjang kelancaran ekonomi dalam hal ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang masih kurang ini supaya tidak mempengaruhi kelancara lalu lintas barang dan jasa.

## **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dikaji dalam keadaan ini adalah “bagaimana kebijakan pemerintah dapat digunakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan dan hambatan tentang ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran lalu lintas barang dan jasa sebagai salah satu yang sangat vital sebagai penunjang kelancaran ekonomi dalam menghadapi MEA 2015.

## **TUJUAN DAN MANFAAT KAJIAN**

Adapun tujuan kajian ini adalah :

- a. Sebagai wahana penambah pengetahuan
- b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi para pelaku bisnis di industry sejenis kawasan industry berikat.
- c. Sebagai bahan informasi bagi kajian sejenis dimasa yang akan datang

Adapun manfaat kajian ini diharapkan :

- a. Untuk mengetahui kemanfaatan jejaring kebijakan public dalam mengatasi kemacetan jalur infrastruktur industry dalam menghadapi MEA 2015
- b. Ingin mengetahui langkah strategis mewujudkan kelancaran kemacetan jalur infrastruktur industry dalam menghadapi MEA 2015

## TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kenyataannya terdapat beberapa kebijakan Administrasi kepabeanan yang sangat beresiko bila tidak dipahami oleh tenaga kerja di perusahaan industry dalam aturan kebijakan kawasan berikat, seperti pada peraturan direktur jenderal bea dan cukai tentang kawasan berikat nomor 57/BC/2011 bab 1 ketentuan umum pasal 2 nomor 4 berbunyi “berdasarkan manajemen resiko, terhadap kawasan berikat dapat diberikan kemudahan kepabeanan dan cukai berupa : a. kemudahan pelayanan perijinan, b. kemudahan pelayanan kegiatan operasional, c. Pemberian pintu tambahan , dan/ atau d. kemudahan kepabeanan dan cukai selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c. Seharusnya proses kemacetan itu bisa diselesaikan sejak awal namun baru terealisasi sekitar 15 tahun terakhir sejak perusahaan ini berdiri, ini suatu keadaan yang ironis karena human error tentang pemahaman kebijakan pemerintah bahwa setelah diterapkan teori jejaring kebijakan maka terselesaikanlah problem kemacetan dikawasan berikat yang di tata dengan kebijakan kepabeanan Bea cukai, semua ilmu tentang administrasi public terjalankan disini sehingga study kasus kita ceritakan kembali untuk menjadi acuan para pelaku bisnis khususnya industry dengan kapasitas sebagai kelompok industry kawasan berikat.

Pada awal permasalahan ini merupakan pekerjaan yang diwarnai trial dan error, sehingga suatu saat dimulai dengan membuka aturan dan prinsip kerja bea cukai maka kita temukan suatu langkah dimana kita ajukan syarat seperti biasa kepada bea cukai dan dilampiri proses jejaring kebijakan, menjadikan stakeholder sebagai partisipan dalam usaha memobilisasi komunitas, mewakili komunitas masyarakat khusus dan stakeholder adalah “kelompok kepentingan”.

Lars Carlsson, *Policy Study Journal*, vol 28 no.3, 2000(502-520), *Policy Network as Collective Action*. Jaringan kebijakan merupakan sumbangan penting bagi ilmu kebijakan dan riset interorganisasi. Policy network disebut oleh Carlsson sebagai teori network. Terdapat perbedaan jaringan kebijakan antara teori dan praktek dalam kegiatan kolektif, jaringan kebijakan didiskripsikan sebagai actor-aktor, hubungan diantar mereka dan batasan-batasannya. Batasan dari sebuah jaringan kebijakan bukanlah institusi formal, melainkan proses hubungan yang menguntungkan dari fungsi dan struktur yang relevan. Struktur intensif yang spesifik, norma-norma, peraturan-peraturan dan perlengkapan fisik yang bisa membentuk jaringan kebijakan dalam kajian ini proses yang ada diantaranya :

1. Sosialisasi dengan paguyuban masyarakat sekitar lingkungan berikat
2. Koordinasi dengan PEMKOT Semarang dalam hal ini surat terhadap Kepala Daerah yang sangat kooperatif saat itu tahun 2013, yang sebelumnya hampir 15 tahun lalupun telah diupayakan atas ijin surat tersebut.
3. Dilanjutkan Rapat Koordinasi dengan SKPD terkait dengan proses kemacetan

4. Diakhiri dengan rekomendasi Kepala Daerah yang semestinya sejak awal perlu menambah dalam proses perijinan langkah mengatasi kemacetan di lingkungan berikat yang memang klasik terjadi disekitar perusahaan dengan jumlah karyawan yang sangat besar dan membutuhkan penanganan secara serius, karena dianggap telah mengganggu calon investor dan buyer yang menghendaki kelancaran proses.
5. Kelayakan Proses dengan hasil ijin dari kementrian keuangan Negara Republik Indonesia melalui Kantor Bea dan Cukai Wilayah Jawa Tengah.

Dari rangkaian kegiatan ini kemudian dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan yang ada terkadang belum bisa terealisasi tanpa adanya proses jejaring yang selanjutnya menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan di kalangan birokrasi.

Secara prinsip pola kerja jejaring ini akan memetakan kepentingan yang berbeda dan yang sama sehingga menimbulkan satu pemikiran yang akan menghasilkan persamaan misi dan visi walaupun berbeda kepentingan, seperti contoh proses yang menarik kita lakukan adalah ketika kita menggali informasi tentang keinginan masing-masing stakeholder yang meliputi :

1. Masyarakat Lingkungan sekitar kawasan berikat dan LSM plamongan
2. PT. Sai Apparel Industries dan Karyawan
3. PKL PT. Sai Apparel Industries
4. Kepala Kelurahan penggaron kidul
5. Kepala Kecamatan pedurungan
6. Kepala SKPD pemerintah kota Semarang terkait meliputi, dinas Tata Kota, DPKAD, DINAS PASAR, DLLAJR, SATPOL PP, BPBD, (letak bersebelahan dengan calon lahan jalan alternative kedua untuk penanggulangan macet). TNI tingkat kecamatan, dan POLRI tingkat kecamatan setempat.
7. Kepala Daerah Kota Semarang
8. Bea Cukai Kantor Wilayah Jawa Tengah
9. Kementrian Keuangan Republik Indonesia

Dari kepentingan mereka yang berbeda-beda kita dapati satu keinginan yang sama yaitu lancar terhadap pertanggungjawaban dan tugas masing-masing sehingga kita akhirnya pahami bahwa muncul pemetaan kepentingan sebagai berikut :

1. Masyarakat beserta LSM Plamongan menginginkan bahwa pemukiman mereka bebas dari macet yang setiap hari membuat stress masyarakat dari mulai kalangan pelajar hingga pegawai yang menggunakan jalan alternative utama yaitu penggaron atau dikenal

dengan jl. Brigjend Sudiarto dan masyarakat mengenal dengan jalan Raya Majapahit perbatasan dengan mranggen demak.(namun sekarang sudah tidak ada complain dan masyarakat semakin merasa senang ada perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja banyak dan menyelesaikan masalah kemacetan itu dengan sangat baik)

## INTEREST AND POWER STAKEHOLDER



- PT. Sai Apparel Industries selalu mendapat teguran LSM plamongan dan dari sisi bisnis mendapat warning dari kolega dan buyer sehingga ketika mereka mendatangi wilayah pabrik menyampaikan kenapa dari 1 km menuju perusahaan malah 2 kali lipat banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk melaju menuju dalam perusahaan ketika berada pada posisi jam keluar masuk karyawan. Hingga nama baik selalu di coreng ketika semua pihak bicara tentang kemacetan yang bertahun-tahun tidak teratasi, sehingga muncul diberita media cetak atas ketidakpuasan masyarakat melintasi area PT. Sai Apparel Industries Semarang.(Namun sekarang sudah tidak ada berita yang sama tentang ketidak puasan kolega dan buyer)
- PKL PT. Sai Apparel Industries menginginkan dapat tertata rapi disekitar area perusahaan dan tidak lagi memenuhi badan jalan didepan sepanjang jalan brigjend sudiarto dan pintu masuk perusahaan yang sebelumnya mereka berdesakan dengan trayek bis penumpang dan keberadaan mereka mendapat sorotan negative walau menurut mereka keberadaan mereka dicari karyawan untuk sekedar membeli sarapan pagi untuk kebutuhan tubuh karyawan agar fit dalam bekerja. (Namun

sekarang keberadaan pkL diharapkan tidak seperti dulu lagi karena keramaian yang sudah dibagi dengan pintu kedua di samping perusahaan dan tidak lagi banyak yang didepan perusahaan saja. kehidupan para PKL sekitar apparelpun menjadi lebih baik dan lancar karena adanya penataan).

4. Kepala Kelurahan setempat yang setiap hari mendapat laporan tentang kemacetan dan aduan itu berlangsung dari kepala yang lama berlanjut kepala-kepala baru yang melanjutkannya, sehingga keinginan kelurahan agar segera dicarikan solusinya saat itu.(Namun sekarang berkurang aduan kepada kepala kelurahan seputar persoalan PT. Sai Apparel dan kemacetan yang diakibatkannya)
5. Kepala Kecamatan juga hampir sama bahkan beliau juga pasti dimintai keterangan oleh pemimpin di atasnya dan harus mencari segera alternative pemecahan yang tak kunjung ada (Namun sekarang tidak lagi di bebani tentang kemacetan tentang keluar masuk karyawan disekitar kawasan berikat yang ekstrim lagi seperti dulu)



6. Kepala SKPD PASAR berhubung ada rencana pemerintah membuka kawasan terpadu antara pasar klitikan, pasar unggas dan pasar pemotongan hewan di sekitar area penggaron maka keinginan dinas pasar hanya satu yaitu para pedagang dan pembeli tidak berkeberatan dengan pemindahan area baru yang tadinya di tempat lama yaitu pasar klitikan dikokrosono dan pasar unggas di pasar kobong dan pasar pemotongan hewan dipasar kambing menjadi satu area dipenggaron( Namun sekarang keengganan penjual dan pembeli menjadi berkurang dan pasar tidak membutuhkan anggaran untuk mensosialisasikan himbauan pemerintah yang tentunya menyerap anggaran karena awalnya yang sepi tidak terlewati sekarang menjadi ramai tanpa dipaksa pembeli dan penjual berbondong kearea itu karena dimulai karyawan yang berjumlah sekitar 12.000 orang telah melewati dan

menyebarkan informasi kemasyarakatan, sehingga PAD Semarang dalam dinas pasar otomatis terdorong dengan sendirinya). Kepala SKPD DISHUBKOMINFO secara area disana terdapat terminal penggaron yang selama ini dianggap sepi dan di orientasikan untuk dipindahkan tetapi ternyata keadaan yang baru berkata lain bahwa setelah terbukanya pintu kedua sebagai pemecah kemacetan semua angkutan umum tidak berjajar didepan pintu masuk perusahaan sehingga para awak angkutan itu memasuki area terminal dan menghampiri karyawan yang keluar dari pintu kedua yang baru melewati terminal menjadikan PAD kota Semarang di Dishub naik tajam. Sementara kebutuhan dinas pamong praja akan keadaan ini adalah ketertiban wilayah yang selama ini terkesan kumuh baik didepan pt, sai apparel karena PKL maupun di sekitar penggaron yang sepi dan akhirnya ditumbuhi gubug-gubug liar yang tidak bertuan harus segera ditertibkan untuk ketertiban lingkungan. (Namun sekarang semua menjadi sering dilewati penduduk dan aparat satpol pp tidak kerepotan untuk menindak yang tidak tertib). SKPD BPBD adalah badan yang letaknya persis di area sekitar pintu dua, pada awalnya merekalah yang sangat berkeberatan, namun karena pertimbangan kepentingan bersama yang lebih banyak membutuhkan dari pada yang tidak membutuhkan hanya BPBD maka pada akhirnya BPBD juga tidak mengalami gangguan yang berarti atas dibukanya pintu kedua yang berada disekitar kantor mereka, malah kantor tidak lagi sepi seperti semula dan pegawai lebih semangat karena kawasannya terlihat oleh umum lagi sehingga bukan seperti kantor yang mati seperti sebelumnya, sepi tanpa penghuni).

7. Kepala Daerah Kota Semarang berhubung dengan sekali dengan agenda ini karena ketika sejarah itu dibaca kembali maka akan didapati suatu keadaan dimana pertanggung jawaban sebuah kepala daerah menjadi catatan bagi warganya dan dibutuhkan inovasi seorang kepala daerah untuk membuat wilayah pemerintahannya menjadi lebih baik untuk kepentingan peningkatan industry kota, dan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah dari segala sector dan yang paling utama sumbangan pemerintah terhadap pemikiran akan pemecahan titik-titik kemacetan di sekitar wilayah kota Semarang ini, menjadi contoh bahwa tanpa proses yang panjang sekitar hanya 2 bulan saja pimpinan yang bijaksana tersebut telah mampu menyelesaikan masalah klasik kemacetan disekitar perusahaan besar kawasan berikat yang sudah berlangsung 15 tahun lamanya.
8. Sebenarnya pihak yang sejak awal paling perlu akan persoalan ini selain perusahaan sendiri adalah bea cukai karena dengan lancarnya proses pengiriman produksi dan ketepatan waktu dalam proses akan memperlancar juga agenda kegiatan bea cukai, hanya saja kurangnya koordinasi dan SDM yang kurang memahami akan kebijakan lebih

detail maka terjadilah kelambatan proses ini.(namun sekarang baik perusahaan maupun bea cukai dapat bekerja secara baik dan lancar tanpa adanya hambatan terhadap proses kelancara lalu lintas barang dan jasa karena infrastruktur diperhatikan juga oleh pemerintah setempat)



*PT SAI APPAREL DAN BEA CUKAI*

9. Kementrian keuangan republic Indonesia tentunya akan mendukung segala hal baik yang akan berlangsung dalam setiap proses kebijakan pemerintah untuk kepentingan kemajuan uasaha dalam industry demi menghadapi masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan direalisasikan Desember 2015.

Anthony Bertelli, *Public Administration Review*, Washington : jul/aug 2006, vol 66,iss.4:pg.583,13pgs., *The Role of Political Ideologi In the structural design of New Governance Agencies*. Tulisan ini merupakan hasil penelitian terhadap pelaksanaan tugas pemerintah sebagai organisasi public dalam rangka mewujudkan good government. Sama hal nya dengan penyelesaian kemacetan yang sangat ditunggu sebagai pelayanan pemerintah terhadap aduan warga dan lingkungan .

Perumusan kebijakan atau penyusunan alternative kebijakan adalah juga proses perencanaan (Quade, 1984 :108). Dalam era desentralisasi, partisipasi masyarakat haruslah dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasannya. Perencanaan adalah "anorganized, conscious and continual attempt to select the best available alternatives to achieve spesiffic goal"(waterson,1965, dalam Qomarudin dkk, 2004:164).Perencanaan berkaitan dengan pengaturan jadwal



dalam mencapai tujuan yang telah dibentuk termasuk didalamnya penentuan kegiatan tentang permasalahan yang akan diselesaikan dari penyusunan prioritas

Dimana setelah dikaji proses ini maka secara umum diketahui bahwa tujuan membangun misi yang berbeda dan visi yang sama ini akhirnya bisa melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak-pihak terkait bahwa kepentingan yang seharusnya mereka tuju adalah menyikapi hambatan itu agar menjadi peluang maka dilakukanlah koordinasi dengan membuka penyelesaian pintu dua dengan membebaskan lahan pemerintah untuk kepentingan masyarakat dengan pembebasan lahan itu maka tugas perusahaan adalah membangun infrastruktur jalan sementara menunggu persetujuan anggaran selanjutnya agar bisa lebih di perindah oleh pemerintah dan ini merupakan bagian dari kegiatan *community development* perusahaan untuk selanjutnya masyarakat sekitar yang mencari nafkah dengan berjualan sebagai PKL telah nyaman dan mereka saling bergantung dengan karyawan yang membutuhkan jasa dan barang mereka,



Prosedur kerja diawali dengan menyampaikan perijinan kepada beacukai yang dilampiri oleh rekomendasi kepala daerah yang sebelumnya dilakukan koordinasi dengan SKPD terkait yang menghasilkan suatu kesepakatan yang mutahir dengan kelengkapan data itu maka ijin yang sekian tahun tidak diberikan kemudian dapat terealisasi selanjutnya dilanjutkan dengan koordinasi dengan perusahaan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan yang sementara menjadi CSR perusahaan untuk menata PKL yang berdagang didepan pintu kedua sebagai pemecah alternative kemacetan lalu lintas disekitar perusahaan dengan karyawan yang banyak. Dan disini terdapat terapan ilmu akademi tentang jejaring kebijakan yang merupakan gabungan antara beberapa kebijakan oleh beberapa lembaga milik Negara yang ada di masyarakat antara lain 9 stake holder masing masing memiliki suatu hak dan kewajiban atas kebijakan yang mengatur system kerja mereka sehingga ditemukan suatu literature-literatur yang dapat diadopsi dan kemudian disatukan menjadi temuan baru akan pemecahan persoalan

kemacetan dimana pada saat kita sadari jejaring kebijakan itu menjadi motor bagi terlaksananya suatu inovasi penyelesaian problem lintas dinas yang pada akhirnya juga menguntungkan bagi masing-masing lembaga dengan berlangsungnya proses tersebut. Selain kelancaran maka akan didapatkan keuntungan lain terutama kepuasan masyarakat akan pelayanan public tentang pengatasan kemacetan lalu lintas barang dan jasa atas infrastruktur industry.



Setelah kita bicarakan beberapa agenda kepentingan masing- msing dengan melihat bagan interes dan power stakeholder maka akan kita pahami pemecahan masalah yang tepat untuk segera membuat nyaman dari masing-masing kepentingan di keadaan selanjutnya. Beberapa hal yang perlu dipahami adalah bagaimana stakeholder dengan kapasitas interest dan power mereka mampu di kelola dengan baik dalam proses pemecahan masalah selanjutnya

## **PENUTUP**

Dengan demikian yang harus dipahami dalam pengambilan keputusan adalah bahwa jejaring kebijakan public yang baik akan mampu menyelesaikan persoalan public sepeleik apapun, dengan pemahaman yang kuat terhadap pemanfaatan jejaring kebijakan ini maka akan didapatkan inovasi dalam penyelesaian masalah public sehingga dalam keterbatasan kita akan mampu mendapatkan penyelesaian masalah yang singkat karena kita memulainya dengan memanfaatkan jejaring public itu secara structural dan sistematis. Langkah-langkah strategis dapat diambil ketika suatu keputusan pada akhirnya menjadi solusi bagi lembaga-lembaga yang berbeda khususnya demi kepentingan masyarakat luas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Carlsson, Iars. 2000 Policy Network as collective Action, Policy studies journal, vol.28 no.3 502-520

Anthony Bertelli, Public Administration Review, Washington : jul/aog 2006, vol. 66,iss.4 :pg.583,13 pgsThe Role Of Political Ideology in The Structural Design of New Governance Agencies

Quade, E.S. 1982, Analisis for public Decision. Elsevier Science Publishing, New York

Qomarudin, dkk 2004. Drajat Tri Kartono, Editor, Reformasi Pemerintahan daerah, Pustaka Cakra Nusantara, Surakarta